



LPPD 2023

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD) TAHUN 2023 KOTA TANGERANG**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Tahun 2023 yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 69 ayat (1) yaitu Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan pasal 70 ayat (4) yaitu Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan LPPD Kota Tangerang Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.7/8697/OTDA tanggal 11 Desember 2023 perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, laporan kami sajikan dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, memuat informasi tentang profil daerah secara umum, perencanaan pembangunan daerah, serta dasar dan kebijakan penerapan Standar Pelayanan Minimal
- BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memuat Capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
- BAB III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, meliputi dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan, gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan, perbandingan target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran
- BAB IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, memuat laporan pencapaian SPM urusan wajib pelayanan dasar
- BAB V Penutup



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang tahun 2023 ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi Pemerintah Pusat terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif dan selanjutnya digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan untuk pembangunan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan dan peluang bagi pemerintah Kota Tangerang untuk bangkit memulihkan perekonomian dari dampak pandemi Covid 19 yang melanda dunia dan Indonesia. Berbagai upaya telah dilaksanakan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Tangerang yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang telah digambarkan melalui laporan ini baik capaian, hambatan, serta rekomendasi perbaikan yang telah diidentifikasi. Sehingga kami berharap melalui buku laporan ini, para pembaca dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Tangerang.

Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) Kota Tangerang Tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait, serta dapat memberikan umpan balik (feed back) sebagai bahan masukan untuk perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang akan terus berkomitmen untuk berkolaborasi mewujudkan visi Pembangunan Kota Tangerang menjadi Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing.

Wabillahi Taufik Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tangerang, Maret 2024

Pj. WALIKOTA TANGERANG





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.1.1. Penjelasan Umum	I-1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I-39
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	I-281
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO	II-1
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-7
2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	II-11
2.1.3 Tingkat Kemiskinan	II-12
2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-14
2.1.5 Indeks Gini (Gini Rasio).....	II-15
2.1.6 Pendapatan Per Kapita	II-16
2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	II-17
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	II-18
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	II-84
2.2.3 Indikator Kinerja Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-102
2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH.....	II-107
2.3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	II-107
2.3.2 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	II-109
2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja.....	II-111
2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	II-114
2.3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	II-121
2.3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.....	II-264
2.3.7 Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.....	II-272
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III-1





BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

.....	IV-1
4.1. URUSAN PENDIDIKAN	IV-1
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-1
4.1.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	IV-3
4.1.3 Realisasi.....	IV-4
4.1.4 Alokasi Anggaran	IV-5
4.1.5 Dukungan Personil.....	IV-7
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	IV-15
4.2. URUSAN KESEHATAN.....	IV-16
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-16
4.2.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	IV-17
4.2.3 Realisasi.....	IV-20
4.2.4 Alokasi Anggaran	IV-22
4.2.5 Dukungan Personil.....	IV-24
4.2.6 Permasalahan dan Solusi.....	IV-25
4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM	IV-30
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-30
4.3.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	IV-33
4.3.3 Realisasi.....	IV-33
4.3.4 Alokasi Anggaran	IV-35
4.3.5 Dukungan Personil.....	IV-35
4.3.6 Permasalahan dan Solusi.....	IV-36
4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	IV-37
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-37
4.4.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	IV-39
4.4.3 Realisasi.....	IV-40
4.4.4 Alokasi Anggaran	IV-43
4.4.5 Dukungan Personil.....	IV-44
4.4.6 Permasalahan dan Solusi.....	IV-45
4.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN BENCANA DAN KEBAKARAN	IV-46
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-46
4.5.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	IV-47
4.5.3 Realisasi.....	IV-50
4.5.4 Alokasi Anggaran	IV-52
4.5.5 Dukungan Personil.....	IV-54
4.5.6 Permasalahan dan Solusi.....	IV-59
4.6. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.....	IV-62
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-62
4.6.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	IV-63
4.6.3 Realisasi.....	IV-64
4.6.4 Alokasi Anggaran	IV-66
4.6.5 Dukungan Personil.....	IV-67
4.6.6 Permasalahan dan Solusi.....	IV-67
4.7. URUSAN SOSIAL.....	IV-68
4.7.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-68
4.7.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	IV-69





4.7.3 Realisasi.....	IV-73
4.7.4 Alokasi Anggaran	IV-74
4.7.5 Dukungan Personil.....	IV-75
4.7.6 Permasalahan dan Solusi	IV-76
4.8. PROGRAM DAN KEGIATAN	IV-77

BAB V PENUTUP.....V-1





DAFTAR TABEL

Tabel I 1	Kondisi Topografi Kota Tangerang	I-3
Tabel I 2	Kondisi DAS Kota Tangerang	I-6
Tabel I 3	Kondisi Situ/Rawa Kota Tangerang	I-8
Tabel I 4	Temperatur Udara Kota Tangerang Tahun 2023.....	I-10
Tabel I 5	Rata-rata Curah Hujan dan Kelembaban Udara Kota Tangerang Tahun 2023	I-10
Tabel I 6	Jumlah Penduduk Kota Tangerang Tahun 2023	I-11
Tabel I 7	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2018-2023	I-12
Tabel I 8	Kepadatan Penduduk di Kota Tangerang Tahun 2023.....	I-13
Tabel I 9	Jumlah Penduduk Kota Tangerang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2023.....	I-13
Tabel I 10	Jumlah Penduduk Kota Tangerang Menurut Kelompok Umur Tahun 2023.....	I-14
Tabel I 11	Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2023.....	I-15
Tabel I 12	Penduduk Kota Tangerang Berdasarkan Jenis Kegiatan, TPAK dan TPT Tahun 2023.....	I-17
Tabel I 13	Persentase Penduduk Bekerja di Kota Tangerang Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Tahun 2022-2023	I-18
Tabel I 14	Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Kerja yang Tersedia (Menurut Tingkat Pendidikan) di Kota Tangerang Tahun 2023.....	I-19
Tabel I 15	Jumlah Sekolah Berdasarkan Kewenangan Jenjang Pendidikan di Kota Tangerang Tahun 2018-2023	I-21
Tabel I 16	Jumlah Murid dan Guru di Kota Tangerang Tahun 2023	I-21
Tabel I 17	Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Tangerang Tahun 2023.....	I-22
Tabel I 18	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Tangerang Tahun 2023.....	I-23
Tabel I 19	Luas, Jumlah, dan Batas Wilayah Administrasi Kota Tangerang Tahun 2023	I-24
Tabel I 20	Jarak Antar Ibukota Kecamatan di Kota Tangerang (Km) Tahun 2023.....	I-25
Tabel I 21	Susunan Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2023	I-26
Tabel I 22	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang, Desember 2023	I-31
Tabel I 23	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang, Desember 2023	I-32
Tabel I 24	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang, Desember 2023	I-33





Tabel I 25	Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun 2023	I-36
Tabel I 26	Prioritas Pembangunan Kota Tangerang	I-41
Tabel I 27	Fokus dan Tantangan Kota Tangerang	I-51
Tabel I 28	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2013-2032	I-54
Tabel I 29	Tujuan dan Target Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2030	I-65
Tabel I 30	Isu Strategis Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019-2023	I-78
Tabel I 31	Keterkaitan Visi Pembangunan Kota Tangerang dengan Visi Pembangunan Provinsi Banten dan Indonesia	I-90
Tabel I 32	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019-2023	I-97
Tabel I 33	Indikator Makro Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2021-2023	I-125
Tabel I 34	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tangerang Tahun 2021-2023	I-126
Tabel I 35	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Tahun 2021-2023	I-130
Tabel I 36	Keterkaitan Isu Strategis, Masalah, dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023	I-148
Tabel I 37	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Banten, dan Kota Tangerang Tahun 2023	I-151
Tabel I 38	Target Kinerja Program Perubahan RKPD Kota Tangerang Tahun 2023	I-153
Tabel I 39	Perubahan Pagu Perangkat Daerah Tahun 2023	I-277
Tabel I 40	Alokasi Anggaran Berdasarkan Urusan Tahun 2023	I-279
Tabel I 41	Target Indikator Kinerja Daerah Kota Tangerang Terkait SPM Tahun 2021-2023	I-283
Tabel I 42	Target SPM Pada Kebijakan Umum Anggaran Kota Tangerang Tahun 2023	I-289
Tabel II 1	Perkembangan Indikator Makro Kota Tangerang Tahun 2019-2023	II-2
Tabel II 2	Perbandingan Realisasi Indikator Makro Kota Tangerang dengan Provinsi Banten Tahun 2019-2023	II-4
Tabel II 3	Capaian Indikator Makro Kota Tangerang Tahun 2023	II-6
Tabel II 4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang Tahun 2019-2023 Berdasarkan Data Long Form SP2020 (SP2020-LF)	II-9
Tabel II 5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Indonesia Tahun 2019-2023	II-10
Tabel II 6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2019-2023	II-12
Tabel II 7	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang Tahun 2019-2023	II-13
Tabel II 8	Tingkat Kemiskinan Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2019-2023	II-13
Tabel II 9	Penduduk Kota Tangerang Berdasarkan Jenis Kegiatan, TPAK dan TPT Tahun 2023	II-14





Tabel II 10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2019-2023	II-15
Tabel II 11	Indeks Gini Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2019-2023	II-16
Tabel II 12	Pendapatan Per Kapita Kota Tangerang Tahun 2019-2023....	II-17
Tabel II 13	Pendapatan Per Kapita Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2019-2023.....	II-17
Tabel II 14	Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Tangerang Tahun 2023	II-111
Tabel II 15	Laju Pertumbuhan Tujuan 1 Tahun 2023	II-114
Tabel II 16	Laju Pertumbuhan Tujuan 2 Tahun 2023	II-114
Tabel II 17	Laju Pertumbuhan Tujuan 3 Tahun 2023	II-114
Tabel II 18	Laju Pertumbuhan Tujuan 4 Tahun 2023	II-115
Tabel II 19	Laju Pertumbuhan Tujuan 5 Tahun 2023	II-115
Tabel II 20	Laju Pertumbuhan Sasaran 1 Tahun 2023.....	II-116
Tabel II 21	Laju Pertumbuhan Sasaran 2 Tahun 2023.....	II-116
Tabel II 22	Laju Pertumbuhan Sasaran 3 Tahun 2023.....	II-117
Tabel II 23	Laju Pertumbuhan Sasaran 4 Tahun 2023.....	II-117
Tabel II 24	Laju Pertumbuhan Sasaran 5 Tahun 2023.....	II-118
Tabel II 25	Laju Pertumbuhan Sasaran 6 Tahun 2023.....	II-118
Tabel II 26	Laju Pertumbuhan Sasaran 7 Tahun 2023.....	II-119
Tabel II 27	Laju Pertumbuhan Sasaran 8 Tahun 2023.....	II-119
Tabel II 28	Laju Pertumbuhan Sasaran 9 Tahun 2023.....	II-120
Tabel II 29	Laju Pertumbuhan Sasaran 10 Tahun 2023.....	II-120
Tabel II 30	Laju Pertumbuhan Sasaran 11 Tahun 2023.....	II-120
Tabel II 31	Ketercapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Terhadap Target Tahun 2023	II-121
Tabel II 32	Capaian Kinerja Tujuan 1 Tahun 2023.....	II-123
Tabel II 33	Capaian Kinerja Tujuan 2 Tahun 2023.....	II-140
Tabel II 34	Capaian Kinerja Tujuan 3 Tahun 2023.....	II-145
Tabel II 35	Capaian Kinerja Tujuan 4 Tahun 2023.....	II-157
Tabel II 36	Capaian Kinerja Tujuan 5 Tahun 2023.....	II-175
Tabel II 37	Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023	II-179
Tabel II 38	Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023	II-185
Tabel II 39	Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2023	II-193
Tabel II 40	Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2023	II-196
Tabel II 41	Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2023	II-203
Tabel II 42	Capaian Kinerja Sasaran 6 Tahun 2023	II-215
Tabel II 43	Capaian Kinerja Sasaran 7 Tahun 2023	II-223
Tabel II 44	Capaian Kinerja Sasaran 8 Tahun 2023	II-230
Tabel II 45	Sebaran Luasan Genangan dan Banjir (Kategori Sedang dan Berat) Tahun 2017	II-231
Tabel II 46	Sebaran Luasan Genangan dan Banjir (Kategori Sedang dan Berat) Tahun 2023	II-233
Tabel II 47	Capaian Kinerja Sasaran 9 Tahun 2023	II-242
Tabel II 48	Pengurangan Sampah di Kota Tangerang Tahun 2023	II-248
Tabel II 49	Penanganan Sampah di Kota Tangerang Tahun 2023	II-252
Tabel II 50	Capaian Kinerja Sasaran 10 Tahun 2023	II-257
Tabel II 51	Capaian Kinerja Sasaran 11 Tahun 2023	II-261
Tabel II 52	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 Menurut Kelompok Belanja	II-264
Tabel II 53	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang	





	Tahun Anggaran 2023 Menurut Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	II-265
Tabel II 54	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah	II-268
Tabel II 55	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama (Tujuan dan Sasaran Strategis) Kota Tangerang Tahun 2023	II-271
Tabel II 56	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2023.....	II-272
Tabel II 57	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Untuk Mendukung Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Kota Tangerang Tahun 2023.....	II-320
Tabel IV 1	Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2023.....	IV-3
Tabel IV 2	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2023	IV-4
Tabel IV 3	Pagu dan Realisasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2023	IV-6
Tabel IV 4	Jumlah dan Status Pegawai Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2023	IV-9
Tabel IV 5	Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2023	IV-15
Tabel IV 6	Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2023.....	IV-18
Tabel IV 7	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2023	IV-20
Tabel IV 8	Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2023.....	IV-22
Tabel IV 9	Jumlah dan Status Personil yang Terlibat Dalam Pencapaian dan Penerapan SPM Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2023.....	IV-24
Tabel IV 10	Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2023	IV-25
Tabel IV 11	Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2023	IV-27
Tabel IV 12	Ukuran SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota	IV-31
Tabel IV 13	Indikator SPM Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun 2023.....	IV-32
Tabel IV 14	Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun 2023	IV-33
Tabel IV 15	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun 2023	IV-34
Tabel IV 16	Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun 2023	IV-35
Tabel IV 17	Jumlah dan Status Pegawai yang Terlibat Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun 2023.....	IV-36
Tabel IV 18	Indikator SPM Perumahan Rakyat Kota Tangerang Tahun	





	2023.....	IV-38
Tabel IV 19	Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Tangerang Tahun 2023	IV-39
Tabel IV 20	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Tangerang Tahun 2023	IV-41
Tabel IV 21	Alokasi Anggaran Kegiatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang Terkait SPM Tahun 2023	IV-43
Tabel IV 22	Penerima Bantuan Anggaran BAZNAS Kota Tangerang Untuk Korban Bencana Tahun 2023.....	IV-43
Tabel IV 23	Alokasi Anggaran Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rusunawa Kota Tangerang Tahun 2023	IV-44
Tabel IV 24	Jumlah dan Status Pegawai yang Terlibat Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Kota Tangerang Tahun 2023.....	IV-44
Tabel IV 25	Indikator SPM Sub Urusan Bencana dan Kebakaran Kota Tangerang Tahun 2023	IV-47
Tabel IV 26	Target Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana dan Kebakaran Kota Tangerang Tahun 2023	IV-48
Tabel IV 27	Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran Kota Tangerang Tahun 2023	IV-50
Tabel IV 28	Alokasi Anggaran BPBD Pelaksanaan SPM Kota Tangerang Tahun 2023.....	IV-52
Tabel IV 29	Jumlah dan Status Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Tahun 2023	IV-58
Tabel IV 30	Permasalahan dan Solusi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Tahun 2023	IV-60
Tabel IV 31	Indikator SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Tangerang Tahun 2023.....	IV-63
Tabel IV 32	Target Pencapaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Tangerang Tahun 2023.....	IV-63
Tabel IV 33	Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Tangerang Tahun 2023.....	IV-64
Tabel IV 34	Alokasi Anggaran SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Tangerang Tahun 2023.....	IV-66
Tabel IV 35	Jumlah dan Status yang Terlibat Dalam Pencapaian dan Penerapan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Tahun 2023.....	IV-67
Tabel IV 36	Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Tangerang Tahun 2023.....	IV-67
Tabel IV 37	Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Kota Tangerang Tahun 2023.....	IV-69
Tabel IV 38	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Kota Tangerang Tahun 2023.....	IV-73
Tabel IV 39	Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Kota Tangerang Tahun 2023.....	IV-74
Tabel IV 40	Jumlah dan Status Pegawai Dinas Sosial Kota Tangerang Dalam Pencapaian dan Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2023.....	IV-75
Tabel IV 41	Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Urusan Sosial Kota Tangerang Tahun 2023	IV-76
Tabel IV 42	Program dan Kegiatan Terkait Pencapaian SPM Kota	





Tangerang Tahun 2023IV-77





DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Peta Wilayah Administrasi Kota Tangerang	I-2
Gambar I-2	Struktur Geologi Kota Tangerang	I-5
Gambar I-3	Peta Hidrologi Kota Tangerang.....	I-9
Gambar I-4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tangerang Tahun 2017-2023.....	I-20
Gambar I-5	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kota Tangerang Tahun 2005-2025.....	I-39
Gambar I-6	Tahapan Pelaksanaan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032.....	I-53
Gambar II-1	Sebaran Pembangunan Jalan Tahun 2023.....	II-217
Gambar II-2	Sebaran Pembangunan Jembatan Tahun 2023	II-217
Gambar II-3	Sebaran Luasan Genangan dan Banjir (Kategori Sedang dan Berat) Tahun 2017	II-232
Gambar II-4	Sebaran Luasan Genangan dan Banjir Tahun 2023	II-239
Gambar II-5	Sebaran Penanganan Genangan dan Banjir Tahun 2023	II-239



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Penjelasan Umum

A. Dasar Hukum Pembentukan Kota Tangerang

Pembentukan Kota Tangerang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518), dimana dalam Pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang terdiri dari 6 (enam) wilayah Kecamatan, yaitu: Kecamatan Tangerang, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Batuaceper, Kecamatan Jatiuwung, dan Kecamatan Benda.

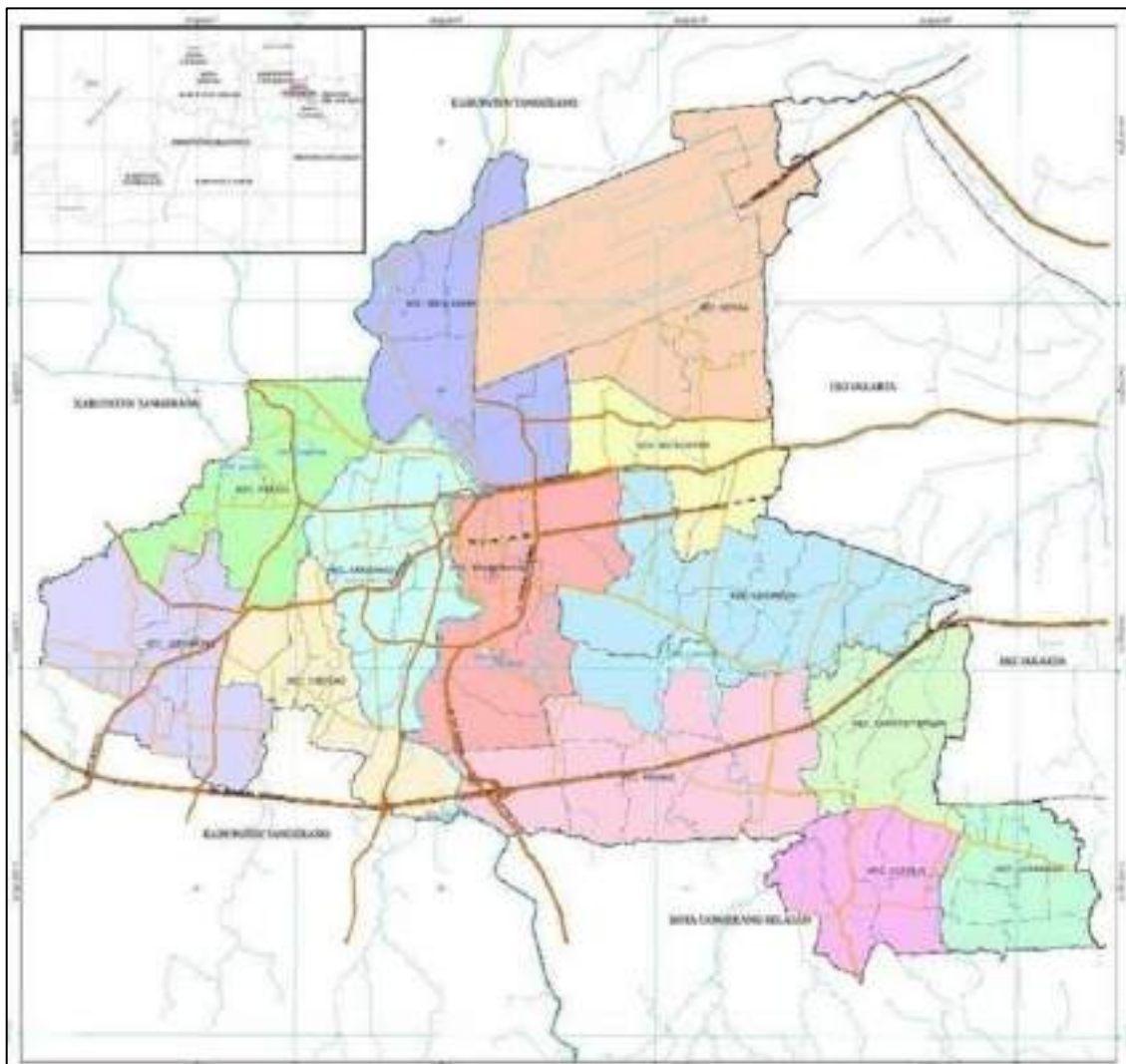
Untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, maka pada Tahun 2000 dibentuk Provinsi Banten melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4010), dimana Kota Tangerang sesuai dengan Pasal 3 undang-undang tersebut merupakan salah satu kota yang masuk dalam lingkup wilayah Provinsi Banten.

Seiring dengan adanya pembentukan 7 (tujuh) kecamatan baru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kecamatan di Wilayah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2000), maka jumlah kecamatan yang ada di wilayah Kota Tangerang bertambah menjadi 13 (tiga belas) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Tangerang;
2. Kecamatan Jatiuwung;
3. Kecamatan Batuaceper;
4. Kecamatan Benda;
5. Kecamatan Cipondoh;
6. Kecamatan Ciledug;

7. Kecamatan Karawaci;
8. Kecamatan Periuk;
9. Kecamatan Cibodas;
10. Kecamatan Neglasari;
11. Kecamatan Pinang;
12. Kecamatan Karang Tengah; dan
13. Kecamatan Larangan.

Gambar I-1 Peta Wilayah Administrasi Kota Tangerang



Sumber: Pemerintah Kota Tangerang, 2024

B. Kondisi Geografis

B.1. Batas Wilayah Administratif

Secara geografis Kota Tangerang terletak pada koordinat $106^{\circ}36'$ – $106^{\circ}42'$ Bujur Timur (BT) dan $6^{\circ}6'$ – $6^{\circ}13'$ Lintang Selatan (LS). Kota Tangerang memiliki luas $\pm 184,24$ km² (termasuk Bandara Soekarno–Hatta seluas $\pm 19,69$ km²) atau sekitar 1,59% dari luas Provinsi Banten dan merupakan wilayah yang terkecil kedua setelah Kota Tangerang Selatan. Berjarak ± 65 km dari Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten dan berjarak ± 27 km dari Ibukota negara (DKI Jakarta). Wilayah administrasi Kota Tangerang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang serta Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan DKI Jakarta.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

B.2. Topografi

Wilayah Kota Tangerang sebagian besar berada pada ketinggian 10-18 m di atas permukaan laut (dpl), sedangkan di bagian Utara meliputi sebagian besar Kecamatan Benda ketinggiannya rata-rata 10 m dpl, sedang di bagian selatan seperti Kecamatan Ciledug, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Karang Tengah memiliki ketinggian 18 m dpl. Selain itu, Kota Tangerang mempunyai tingkat kemiringan tanah 0-3% dan sebagian kecil (yaitu di bagian Selatan wilayah Kota) kemiringan tanahnya 3-8% yang meliputi wilayah Kelurahan Parung Serab, Kelurahan Paninggilan Selatan, dan Kelurahan Cipadu Jaya.

Kota Tangerang tidak memiliki wilayah pesisir karena tidak ada daerah yang langsung berbatasan dengan pantai. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar lahan di Kota Tangerang cukup landai. Hal ini juga sangat menguntungkan bagi pengembangan Kota Tangerang secara umum, terutama untuk pengembangan kegiatan perkotaan. Namun demikian, kondisi topografi Kota Tangerang yang cukup landai ini juga menjadi tantangan tersendiri karena hal ini menyebabkan Kota Tangerang memiliki potensi genangan dan banjir.

Tabel I-1 Kondisi Topografi Kota Tangerang

No	Kecamatan	Kondisi Topografi	
		Kemiringan Lahan	Ketinggian dpl (m)
1	Batuceper	0-3%	14,0

No	Kecamatan	Kondisi Topografi	
		Kemiringan Lahan	Ketinggian dpl (m)
2	Benda	0-3%	10,0
3	Cibodas	0-3%	14,0
4	Ciledug	3-8%	18,0
5	Cipondoh	0-3%	14,0
6	Jatiuwung	0-3%	14,0
7	Karang Tengah	0-3%	18,0
8	Karawaci	0-3%	14,0
9	Larangan	3-8%	18,0
10	Neglasari	0-3%	14,0
11	Periuk	0-3%	14,0
12	Pinang	0-3%	14,0
13	Tangerang	0-3%	14,0
	Kota Tangerang	0-3%	14,0

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2024

B.3. Geologi

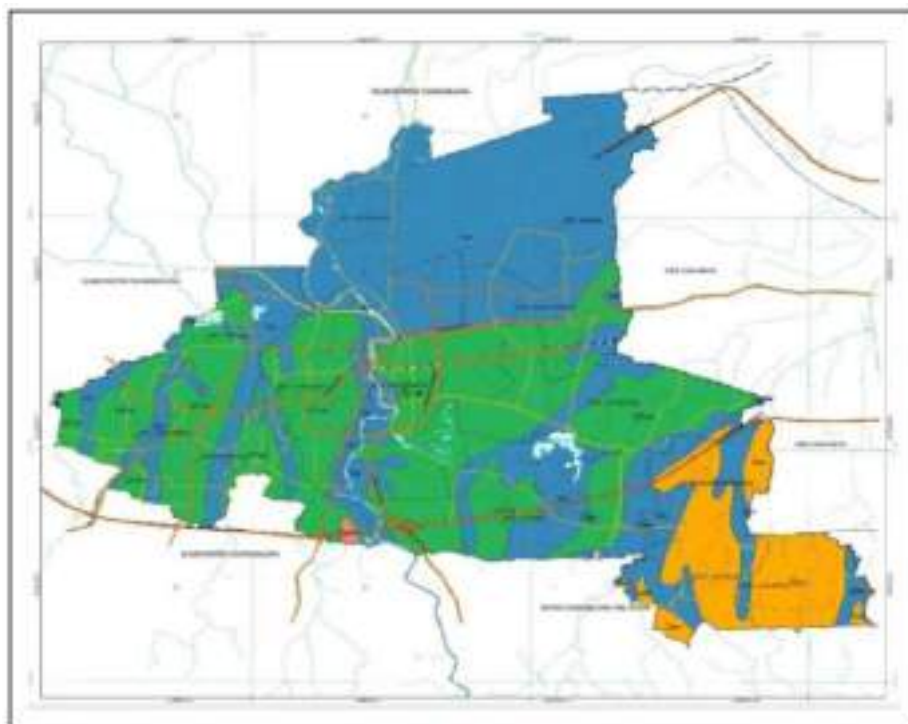
Secara geologis, daerah Tangerang berada pada suatu tinggian struktur yang dikenal dengan sebutan *Tangerang High*. Tinggian ini terdiri atas batuan Tersier yang memisahkan Cekungan Jawa Barat Utara di bagian barat dengan Cekungan Sunda di bagian timur. Tinggian ini dicirikan oleh kelurusan bawah permukaan berupa lipatan dan patahan normal, berarah utara-selatan. Di bagian timur patahan normal tersebut terbentuk cekungan pengendapan yang disebut dengan Sub cekungan Jakarta.

Tinggian ini terbentuk oleh batuan Tersier yang memisahkan cekungan Jawa Barat Utara di bagian Barat dengan cekungan Sunda di bagian timur. Tinggian ini dicirikan oleh kelurusan bawah permukaan berupa lipatan dan patahan normal yang berarah Utara-Selatan. Di bagian Timur patahan normal tersebut terbentuk cekungan pengendapan yang disebut dengan Sub cekungan Jakarta.

Batuan yang menutupi Kota Tangerang terdiri dari endapan alluvium, endapan kipas alluvium vulkanik muda, dan satuan Tuf Banten. Di Sub Cekungan Jakarta, berdasarkan data pemboran menunjukkan adanya endapan alluvium yang menebal ke arah utara, yang disusun oleh klastika halus hingga kasar, sedangkan cekungan di Barat Tangerang High memiliki ciri endapan pantai dan delta. Struktur-struktur tersebut pada saat ini sulit dijumpai di permukaan karena endapan Kuartar yang berumur lebih muda telah menutupi lapisan batuan tersebut. Endapan Kuartar yang menimpa batuan tersebut berupa batuan vulkanik yang berasal dari Gunung Gede-Pangrango dan Salak. Hampir seluruh daerah kajian ditutupi oleh batuan vulkanik yang berasal dari Gunung Gede-Pangrango dan alluvium. Deskripsi singkat mengenai jenis batuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Satuan Batuan Tuf Banten Atas/Tuf Banten
Satuan ini terdiri atas lapisan tuf, tuf batu apung, dan batu pasir tufan yang berasal dari letusan Gunung Rawa Danau. Tuf tersebut menunjukkan sifat yang lebih asam (*pumice*) dibandingkan dengan batuan vulkanik yang diendapkan sesudahnya. Bagian atas satuan tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi lingkungan pengendapan dari lingkungan pengendapan di atas permukaan air menjadi di bawah permukaan air. Satuan ini berumur Plio-Plistosen atau sekitar dua juta tahun.
2. Endapan Vulkanik Muda
Endapan ini terdiri atas material batu pasir, batu lempung tufan, endapan lahar, dan konglomerat yang membentuk endapan kipas. Ukuran butiran berubah menjadi semakin halus (lempungan) dan menebal ke arah utara. Hal ini menunjukkan sumber material berasal dari selatan. Satuan ini terbentuk oleh material endapan vulkanik yang berasal dari gunung api di sebelah selatan Kabupaten Tangerang, seperti Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangrango. Batuan ini diendapkan pada umur Plistosen (20.000 – dua juta tahun). Kipas vulkanik tersebut terbentuk pada saat gunung api menghasilkan material vulkanik dengan jumlah besar. Kemudian ketika menjadi jenuh air, tumpukan material tersebut bergerak ke bawah dan melalui lembah. Ketika mencapai tempat yang datar, material tersebut akan menyebar dan membentuk endapan seperti kipas.

Gambar I-2 Struktur Geologi Kota Tangerang



Sumber: Bappeda Kota Tangerang, 2024

3. Endapan Pantai dan Endapan Pematang Pantai

Endapan batuan ini berasal dari material batuan yang terbawa oleh aliran sungai dan berumur antara 20.000 tahun hingga sekarang. Endapan tersebut tersusun oleh material lempung, pasir halus dan kasar, dan konglomerat serta mengandung cangkang moluska. Endapan alluvium tersebut dapat membentuk endapan delta, endapan rawa, endapan gosong pasir pantai, dan endapan sungai dengan bentuk meander atau sungai teranyam.

4. Endapan Aluvium

Endapan ini terdiri atas lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah yang berumur Kuartar dan tersebar pada daerah pedataran serta sekitar aliran sungai.

B.4. Kondisi Hidrologi

Secara hidrologi, wilayah Kota Tangerang dilalui oleh 3 (tiga) aliran sungai yaitu sungai Cisadane, kali Angke dan kali Cirarab dengan panjang daerah yang dilalui sepanjang 33,15 Km. Sungai Cisadane membagi Kota Tangerang menjadi dua bagian, yaitu bagian Timur sungai dan bagian Barat sungai. Kecamatan yang terletak di bagian Barat Sungai Cisadane meliputi Kecamatan Jatiuwung dan sebagian Kecamatan Tangerang. Sungai Cisadane memiliki debit air 88 m³ per detik dan mengalir sejauh 15 Km.

Kali Angke berada pada bagian Timur Sungai Cisadane, Sungai Cirarab yang merupakan batas sebelah Barat Kota Tangerang wilayah Kecamatan Jatiuwung dengan Kecamatan Pasar Kemis di Kabupaten Tangerang. Kali Ledug yang merupakan anak Sungai Cirarab, Kali Sabi, dan Kali Cimone, sungai-sungai tersebut berada di sebelah Barat Sungai Cisadane.

Tabel I-2 Kondisi DAS Kota Tangerang

Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Catchment Area (ha)	Panjang (km)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Debit (m ³ /detik)
DAS Cisadane	106.350	15,00	100	5,35	88
DAS Cirarab	6.030	7,70	11	3,50	36
DAS Angke	7.430	10,45	12	5,50	24
Jumlah	119.810	33,15			

Sumber: Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2024

Deskripsi singkat mengenai Daerah Aliran Sungai di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Daerah Aliran Sungai Cisadane

Sungai Cisadane membagi Kota Tangerang dua bagian yaitu Sisi Timur sungai (meliputi: sebagian Kecamatan Tangerang, Kecamatan Pinang,

Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Batuaceper, Kecamatan Benda, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Ciledug, dan Kecamatan Larangan) dan Sisi Barat sungai (meliputi: Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Periuk, Kecamatan Neglasari, dan sebagian Kecamatan Tangerang). Sungai Cisadane memiliki daya tampung air seluas 106.350 Ha, dengan panjang 15 km dan lebar 100 m, kedalaman sungai Cisadane rata-rata 5,35 m serta debit air dalam kondisi normal sekitar 88 m³/det. Bendungan Pintu 10 di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari merupakan bendungan untuk mengendalikan debit air Sungai Cisadane ke arah hilir Kabupaten Tangerang dan dimanfaatkan untuk irigasi teknis. Pada DAS Cisadane yang berada di Kota Tangerang terdapat 43 anak sungai/saluran pembuangan yang semuanya bermuara di Kali Cisadane, dimana anak sungai yang terbesar adalah Saluran Mookervaart yang merupakan sodetan penghubung Kali Cisadane dan Kali Angke. Sungai Cisadane sangat panjang melintasi daerah administrasi Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Tangerang dan bermuara di Laut Jawa.

2. Daerah Aliran Sungai Angke

Sungai Angke melalui wilayah Kota Tangerang sepanjang 10,45 km dengan lebar sungai sekitar 12 m pada kawasan terbuka dan menyempit menjadi 3-4 meter pada kawasan terbangun/ perkotaan. Kedalaman rata-rata Kali Angke adalah 5,50 m, memiliki daerah tangkapan air seluas 7.430 Ha dan debit air pada kondisi normal tercatat sekitar 24 m³/det. Sungai Angke mengalir di bagian Timur Kota Tangerang, dibagian Timur ini juga dialiri beberapa anak sungai meliputi Kali Pembuangan Cipondoh, Kali Angke, Kali Wetan, Kali Pasanggrahan, Kali Cantiga, dan Kali Pondok Bahar. Hulu Sungai Angke berasal dari daerah Semplak, Kabupaten Bogor. Aliran Sungai Angke melintasi 4 daerah administrasi, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Jakarta Barat, berakhir di Saluran Pembuang Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke merupakan kawasan terbangun intensitas sedang-tinggi, yaitu kegiatan permukiman dan kegiatan perkotaan. Pada DAS Angke yang berada di Kota Tangerang terdapat 7 anak sungai/saluran pembuangan yang semuanya bermuara ke Kali Angke.

3. Daerah Aliran Sungai Cirarab

Sungai Cirarab melintasi wilayah administrasi Kota Tangerang sekitar 7,70 km, di daerah perbatasan barat dengan Kabupaten Tangerang. Lebar Kali Cirarab sekitar 11 m dengan kedalaman rata-rata 3,50 m dan debit air dalam kondisi normal 36 m³/detik. DAS Cirarab memiliki daerah tangkapan air seluas 6.030 Ha. Hulu sungai Kali Cirarab berada di bagian Utara Kabupaten Bogor sekitar Kecamatan Rumpin. Aliran Kali Cirarab berkelok-kelok, melintasi 3 daerah administrasi, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) Cirarab merupakan kawasan budidaya daerah terbangun.

DAS Cirarab di Kota Tangerang terdapat 4 anak sungai/saluran pembuangan yang bermuara ke Kali Cirarab, yaitu: Kali Cangkring, Kali Sasak, Kali Keroncong, dan Kali Jatake.

Selain sungai, di Kota Tangerang juga terdapat situ/rawa sebanyak 6 (enam) buah dengan total luas 152,01 Ha dan kedalaman antara 2-3 meter. Kota Tangerang juga mempunyai 54 saluran pembuangan dengan total panjang 150,03 Km, dan 16 saluran irigasi dengan total panjang mencapai 62.488,30 Km. Nama-nama situ/danau di Kota Tangerang tersebut diantaranya adalah Situ Cipondoh, Situ Besar/Gede, Situ Cangkring, Situ Kunciran, Situ Bojong, dan Situ Bulakan. Sedangkan 3 (tiga) situ lainnya, yaitu Situ Kompeni, Situ Plawad, dan Situ Kambing sudah tidak aktif menjadi situ/danau.

Situ Cipondoh merupakan situ atau danau terbesar yang berada di Kecamatan Cipondoh dengan luas kurang lebih 126,17 Ha. Di sekitar Situ Cipondoh, terdapat bagian yang mengalami pendangkalan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian lahan basah, sehingga perlu kontrol yang lebih ketat agar tidak beralih fungsi. Selama ini Situ Cipondoh difungsikan sebagai pengendali banjir, irigasi, cadangan air baku dan rekreasi. Kondisi Situ Cipondoh saat ini cenderung mengalami pendangkalan terutama di tepi situ karena banyak ditumbuhi tanaman eceng gondok yang memenuhi permukaan air Situ Cipondoh. Untuk lebih jelasnya, berikut kondisi 6 (enam) Situ/Rawa di Kota Tangerang.

Tabel I-3 Kondisi Situ/Rawa Kota Tangerang

No	Nama Situ/Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Kedalaman (m)	Kewenangan	Penggunaan oleh masyarakat
1	Cipondoh	Kec. Cipondoh Kec. Pinang	126,17	3,00	Pusat/Prov. Banten	pengendalian banjir dan sarana pariwisata
2	Besar (Gede)	Kel. Cikokol Kec. Tangerang	5,07	3,00	Pusat/Prov. Banten	pengendalian banjir dan sarana pariwisata
3	Cangkring	Kec. Periuk	6,17	3,00	Pusat/Prov. Banten	pengendalian banjir dan sarana pariwisata
4	Kunciran	Kel. Kunciran Kec. Pinang	0,60	3,00	Pusat/Prov. Banten	danau reservoar
5	Bojong	Kel. Kunciran Kec. Pinang	0,30	3,00	Pusat/Prov. Banten	danau reservoar
6	Bulakan	Kec. Periuk	15,00	2,50	Pusat/Prov. Banten	pengendalian banjir dan sarana pariwisata
7	Kompeni	Kel. Rawa Bokor Kec. Benda	-	-	-	-
8	Plawad	Kec. Cipondoh	-	-	-	-
9	Kambing	Kec. Karang	-	-	-	-

No	Nama Situ/Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Kedalaman (m)	Kewenangan	Penggunaan oleh masyarakat
		Tengah				
	Kota Tangerang		152,01	17,5		

Sumber: Pemerintah Kota Tangerang, Tahun 2024

Gambar I-3 Peta Hidrologi Kota Tangerang



Sumber: Pemerintah Kota Tangerang, 2024

B.5. Klimatologi

Kota Tangerang merupakan daerah beriklim tropis dengan rata-rata temperatur (suhu) udara mencapai 30,27°C pada Tahun 2023. Rata-rata temperatur (suhu) udara tertinggi mencapai 34,73°C dan rata-rata temperatur (suhu) udara terendah mencapai 23,15°C. Waktu terpanas pada Tahun 2023 terjadi di bulan September dan Oktober yang mencapai 36,40°C dan waktu terdingin terjadi di bulan Agustus yang mencapai 22,00°C.

Jika dilihat perkembangan dari tahun sebelumnya, terjadi perubahan rata-rata temperatur (suhu) udara yaitu dari 29,30°C pada Tahun 2022 menjadi 30,18°C pada Tahun 2023. Berikut ini diuraikan kondisi temperatur (suhu) udara Kota Tangerang berdasarkan bulan pada Tahun 2023.

Tabel I-4 Temperatur Udara Kota Tangerang Tahun 2023

Bulan	Temperatur Minimum (°C)	Temperatur Rata-rata (°C)	Temperatur Maximum (°C)
Januari	24,00	29,90	34,40
Februari	23,00	28,10	33,60
Maret	23,20	28,70	33,00
April	23,40	30,40	34,60
Mei	24,60	30,60	34,60
Juni	23,40	30,10	34,60
Juli	22,80	29,80	34,00
Agustus	22,00	30,20	34,20
September	23,20	30,90	36,40
Oktober	23,00	31,90	36,40
November	22,80	30,90	35,00
Desember	22,40	30,70	36,00
Tahun 2023	23,15	30,18	34,73

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2024

Kondisi iklim Kota Tangerang juga dapat dilihat dari banyaknya hari hujan, curah hujan, dan kelembaban udara pada kurun waktu tertentu. Pada Tahun 2023, Kota Tangerang memiliki rata-rata banyaknya hari hujan adalah 11 hari dalam sebulan. Hujan terbanyak pada Tahun 2023 terjadi pada bulan Februari sebanyak 25 hari dan bulan yang mengalami hujan paling sedikit adalah bulan Agustus dan September sebanyak 1 hari dalam satu bulan. Rata-rata curah hujan di Kota Tangerang pada Tahun 2023 adalah 119,09 mm, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 398,40 mm sedangkan curah hujan terendah adalah Agustus sebesar 2,00 mm.

Kota Tangerang memiliki rata-rata kelembaban pada Tahun 2023 sebesar 70,31%, dengan kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Januari 76,50% dan kelembaban terendah terjadi pada bulan September 59,90%. Jika dibanding dari tahun sebelumnya, terjadi penurunan tingkat kelembaban di Kota Tangerang.

Tabel I-5 Rata-rata Curah Hujan dan Kelembaban Udara Kota Tangerang Tahun 2023

Bulan	Banyak Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Kelembaban Udara (%)
Januari	18	82,40	76,50
Februari	25	396,40	81,00
Maret	20	278,10	78,50
April	13	77,90	71,10
Mei	11	69,70	71,50
Juni	11	155,90	71,30
Juli	8	98,70	67,90
Agustus	1	2,00	64,60
September	1	15,50	59,90
Oktober	2	24,80	62,10
November	14	139,40	70,10
Desember	12	88,30	69,20
Tahun 2023	11,33	119,09	70,31

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2024

C. Kependudukan

Gambaran kependudukan Kota Tangerang meliputi berbagai data/informasi terkait dengan kependudukan antara lain: jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, komposisi penduduk menurut struktur usia, dan lain-lain.

Kota Tangerang sebagai wilayah hinterland pertumbuhan penduduknya tidak hanya dipengaruhi oleh kelahiran (fertilitas), tetapi juga oleh perpindahan (migrasi). Identifikasi terhadap jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, komposisi penduduk menurut struktur usia, sebagai bahan untuk memformulasikan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan diuraikan sebagai berikut.

C.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan jika memiliki kualitas yang memadai. Oleh karena itu, penanganan kependudukan tidak hanya pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Pada Tahun 2023 penduduk Kota Tangerang berjumlah 1.912.679 jiwa.

Kecamatan Cipondoh merupakan wilayah berpenduduk paling besar yaitu sebanyak 231.127 jiwa atau 12,08% dari total penduduk Kota Tangerang. Selanjutnya diikuti terurut oleh Kecamatan Karawaci, Kecamatan Pinang, dan Kecamatan Tangerang masing-masing sebesar 10,12%, 9,76%, dan 8,66% dari total penduduk di Kota Tangerang sedangkan Kecamatan Benda merupakan wilayah berpenduduk paling sedikit yaitu sebanyak 85.769 jiwa atau 4,48% dari total penduduk Kota Tangerang.

Tabel I-6 Jumlah Penduduk Kota Tangerang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		DKB Semester I	DKB Semester II	Penambahan
1	Tangerang	164.467	165.575	1.108
2	Jatiuwung	107.615	107.510	-105
3	Batuceper	95.123	95.474	351
4	Benda	85.138	85.769	631
5	Cipondoh	228.079	231.127	3.048
6	Ciledug	148.672	150.190	1.518
7	Karawaci	192.958	193.480	522
8	Periuk	143.981	144.640	659
9	Cibodas	157.636	158.036	400
10	Neglasari	123.891	124.907	1.016
11	Pinang	184.787	186.671	1.884
12	Karang Tengah	116.396	117.440	1.044
13	Larangan	150.771	151.860	1.089
Kota Tangerang		1.899.514	1.912.679	13.165

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2024

(Data DKB Semester 2 Tahun 2023)

Jumlah penduduk Kota Tangerang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dengan laju pertumbuhan Tahunan selama Tahun 2018-2023 sebesar 1,66% dan laju pertumbuhan penduduk Tahun 2021-2023 sebesar 1,57%. Pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang dipengaruhi oleh tingginya arus migrasi yang masuk ke Kota Tangerang, karena Kota Tangerang merupakan daerah yang sangat strategis sebagai kota jasa, perdagangan dan permukiman. Kota Tangerang juga berbatasan langsung dengan Ibukota DKI Jakarta sehingga kebijakan pembatasan penduduk di Jakarta berdampak terhadap Kota Tangerang sebagai alternatif tujuan migrasi.

Selain jumlah penduduk terbanyak, Kecamatan Cipondoh juga memiliki laju pertumbuhan yang terbesar (2,39%), pertumbuhan terbesar selanjutnya diikuti terurut Kecamatan Pinang (2,25%), Kecamatan Pinang (2,16%), Kecamatan Ciledug (2,09%), dan Kecamatan Neglasari (1,86%) dimana kelima Kecamatan tersebut berada diatas pertumbuhan penduduk Kota Tangerang. Sedangkan kecamatan lainnya berada dibawah laju pertumbuhan penduduk Kota Tangerang dimana yang terkecil adalah di Kecamatan Jatiuwung yang mengalami sedikit kenaikan pertumbuhan sebesar 0,41%.

Tabel I-7 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2018-2023

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)						LPP 2018- 2023 (%)	LPP 2021- 2023 (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Ciledug	132.663	136.525	142.008	145.070	147.893	150.190	2,09	1,55
2	Larangan	142.607	143.934	147.732	148.975	150.404	151.860	1,05	0,97
3	Karang Tengah	106.835	108.405	112.335	114.150	115.778	117.440	1,59	1,44
4	Cipondoh	200.644	203.881	215.754	220.626	225.947	231.127	2,39	2,29
5	Pinang	164.235	168.477	175.667	179.743	183.603	186.671	2,16	1,67
6	Tangerang	150.279	153.793	158.515	161.388	115.778	165.575	1,63	43,01
7	Karawaci	181.239	184.216	188.862	190.813	192.619	193.480	1,10	0,45
8	Jatiuwung	104.900	104.419	107.036	107.184	107.366	107.510	0,41	0,13
9	Cibodas	145.780	149.192	154.280	156.236	157.652	158.036	1,35	0,24
10	Periuk	133.224	134.741	139.414	141.790	143.604	144.640	1,38	0,72
11	Batuceper	89.715	90.053	92.734	93.771	94.670	95.474	1,04	0,85
12	Neglasari	111.809	115.162	118.883	120.838	123.267	124.907	1,86	1,33
13	Benda	78.294	78.294	81.742	83.636	84.946	85.769	1,53	0,97
Kota Tangerang		1.742.224	1.771.092	1.834.962	1.864.220	1.891.942	1.912.679	1,66	1,57

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2024
(Data DKB Semester 2 Tahun 2023)

Kepadatan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2023 adalah 11.498 jiwa/km², dengan luas wilayah 164,55 km² berada pada kriteria kepadatan Tinggi. Kecamatan Ciledug dengan luas wilayah sebesar 8,77 km² merupakan wilayah yang memiliki penduduk paling padat dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kota Tangerang yaitu sebesar 19.233 jiwa/km². Kepadatan penduduk di Kecamatan Ciledug dipengaruhi dengan aktifitas perekonomian yang tinggi dengan nilai strategis berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan dan DKI Jakarta. Sedangkan penduduk dengan

kepadatan terendah berada di Kecamatan Jatiuwung sebanyak 7.124 jiwa/km². meskipun Kecamatan Jatiuwung merupakan Kecamatan dengan kepadatan terendah di Kota Tangerang namun berdasarkan kriteria kepadatan masih diatas 4.500 jiwa/km yang berarti berada pada kriteria kepadatan tinggi.

Tabel I-8 Kepadatan Penduduk di Kota Tangerang Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Klasifikasi
1	Ciledug	15,79	9.822	Tinggi
2	Larangan	14,41	7.124	Tinggi
3	Karang Tengah	11,58	8.020	Tinggi
4	Cipondoh	5,92	14.208	Tinggi
5	Pinang	17,91	14.316	Tinggi
6	Tangerang	8,77	19.233	Tinggi
7	Karawaci	13,48	13.956	Tinggi
8	Jatiuwung	9,54	15.116	Tinggi
9	Cibodas	9,61	15.514	Tinggi
10	Periuk	16,08	7.381	Tinggi
11	Batuceper	21,59	8.585	Tinggi
12	Neglasari	10,47	11.309	Tinggi
13	Benda	9,4	17.755	Tinggi
	Kota Tangerang	164,55	11.732	Tinggi

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2024
(Data DKB Semester 2 Tahun 2023)

C.2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Tahun 2023 penduduk Kota Tangerang menurut jenis kelamin dan persebarannya dapat dilihat pada tabel di bawah, dimana penduduk Kota Tangerang didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Peningkatan penduduk yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan di Kota Tangerang terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Tabel I-9 Jumlah Penduduk Kota Tangerang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2023

No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Ciledug	82.828	82.747	165.575	100,10
2	Larangan	54.936	52.574	107.510	104,49
3	Karang Tengah	48.485	46.989	95.474	103,18
4	Cipondoh	43.561	42.208	85.769	103,21
5	Pinang	115.812	115.315	231.127	100,43
6	Tangerang	74.940	75.250	150.190	99,59
7	Karawaci	97.250	96.230	193.480	101,06
8	Cibodas	73.023	71.617	144.640	101,96
9	Jatiuwung	78.897	79.139	158.036	99,69
10	Periuk	63.597	61.310	124.907	103,73
11	Neglasari	93.706	92.965	186.671	100,80
12	Batuceper	58.671	58.769	117.440	99,83

No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
13	Benda	75.648	76.212	151.860	99,26
	Kota Tangerang 2023	961.354	951.325	1.912.679	101,05
	Kota Tangerang 2022	951.938	940.004	1.891.942	101,27
	Kota Tangerang 2021	939.291	925.929	1.864.220	101,44
	Kota Tangerang 2020	924.433	910.529	1.834.962	101,53
	Kota Tangerang 2019	893.950	877.142	1.771.092	101,92

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2024
(Data DKB Semester 2 Tahun 2023)

Berdasarkan tabel di atas, penduduk Kota Tangerang didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan sex rasio sebesar 101,05%. Jika dilihat perkembangan sex rasio dari Tahun 2017 sebesar 102,25% cenderung turun, menunjukkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin semakin mendekati berimbang. Selisih tertinggi jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan berada di Kecamatan Jatiuwung dengan jumlah sex rasio sebesar 104,49% atau selisih laki-laki lebih banyak 2.362 jiwa. Sementara kecamatan yang memiliki selisih jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan terendah berada di Kecamatan Larangan dengan jumlah selisih 564 jiwa perempuan lebih banyak.

C.3. Struktur Usia

Informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Setiap kelompok umur memiliki karakteristik kebutuhan yang berbeda-beda.

Informasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu informasi ini juga diperlukan untuk melihat besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Tabel I-10 Jumlah Penduduk Kota Tangerang Menurut Kelompok Umur Tahun 2023

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	74.022	69.455	143.477
2	5 – 9	86.315	80.477	166.792
3	10 – 14	85.171	79.462	164.633
4	15 – 19	70.505	67.537	138.042
5	20 – 24	76.826	73.905	150.731
6	25 – 29	75.271	75.944	151.215
7	30 – 34	78.643	79.537	158.180
8	35 – 39	78.261	77.765	156.026

No.	Kelompok Umur	Jennis Kelamin Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
9	40 – 44	82.765	84.298	167.063
10	45 – 49	70.827	73.564	144.391
11	50 – 54	60.802	60.909	121.711
12	55 – 59	45.108	46.960	92.068
13	60 – 64	32.624	35.050	67.674
14	65+	44.214	46.462	90.676
	Tahun 2023	961.354	951.325	1.912.679
	Tahun 2022	951.938	940.004	1.891.942
	Tahun 2021	938.291	925.929	1.864.220
	Tahun 2020	924.433	910.529	1.834.962
	Tahun 2019	893.950	877.142	1.771.092

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2024
(Data DKB Semester 2 Tahun 2023)

Dari tabel di atas jumlah penduduk pada kelompok usia anak (0–14 tahun) jumlahnya mencapai 474.902 jiwa. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Seiring dengan jumlah proporsi usia anak dalam komposisi penduduk maka peningkatan kualitas anak sebagai sumber daya manusia membutuhkan perhatian yang besar. Sedangkan jumlah Penduduk pada kelompok usia (15–64 tahun) yang merupakan usia produktif berjumlah 1.347.101 jiwa atau sekitar 70,43% dari jumlah penduduk Kota Tangerang. Kondisi ini mengartikan bahwa potensi SDM dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan di Kota Tangerang tahun 2023 terlihat relatif besar, sedemikian sehingga perlu adanya upaya antisipasi terhadap penyediaan sarana-prasarana pada tiga bidang tersebut, terutama bidang ketenagakerjaan/lowongan kerja.

Terkait dengan jumlah penduduk menurut struktur usia, maka dapat pula dihitung besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk (*Dependency Ratio*) pada wilayah dan pada tahun tertentu. Hal ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar seorang penduduk usia produktif harus menanggung beban atas penduduk usia non produktif..

Tabel I-11 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelompok Umur			Jumlah	Dependency Ratio
		0 – 14	15 - 64	65+		
1	Ciledug	40.487	116.341	8.747	165.575	42,32
2	Larangan	27.439	77.570	2.501	107.510	38,60
3	Karang Tengah	24.098	67.251	4.125	95.474	41,97
4	Cipondoh	22.232	59.955	3.582	85.769	43,06
5	Pinang	58.147	163.041	9.939	231.127	41,76
6	Tangerang	36.215	106.331	7.644	150.190	41,25
7	Karawaci	48.186	135.076	10.218	193.480	43,24
8	Cibodas	35.284	104.120	5.236	144.640	38,92
9	Jatiuwung	39.453	110.800	7.783	158.036	42,63
10	Periuk	32.449	86.744	5.714	124.907	43,99
11	Neglasari	46.925	130.965	8.781	186.671	42,54
12	Batuceper	28.250	82.378	6.812	117.440	42,56
13	Benda	35.737	106.529	9.594	151.860	42,55

No	Kecamatan	Kelompok Umur			Jumlah	Dependency Ratio
		0 - 14	15 - 64	65+		
	Tahun 2023	474.902	1.347.101	90.676	1.912.679	41,98
	Tahun 2022	445.675	1.352.637	93.630	1.891.942	39,87
	Tahun 2021	473.511	1.315.577	75.132	1.864.220	41,70
	Tahun 2020	464.487	1.300.289	70.186	1.834.962	41,12
	Tahun 2019	422.888	1.275.355	72.849	1.771.092	38,87

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2024
(Data DKB Semester 2 Tahun 2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui kualitas produktivitas penduduk Kota Tangerang pada tahun 2023 dilihat dari struktur penduduk Kota Tangerang diperkirakan memiliki nilai rasio ketergantungan sebesar 41,98%. Hal ini berarti bahwa diantara 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) terdapat sekitar 41/42 penduduk usia non produktif (0–14 tahun dan 65 tahun). Atau dengan kata lain bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar sebanyak 41/42 penduduk usia non produktif. Diantara 13 kecamatan, maka Kecamatan Neglasari merupakan kecamatan yang memiliki rasio ketergantungan paling tinggi, yaitu sebesar 43,99% dan Kecamatan Jatiuwung merupakan kecamatan yang memiliki rasio ketergantungan terendah, yaitu sebesar 38,60%.

C.4. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan, dikarenakan tenaga kerja sebagai motor penggerak pembangunan. Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator ekonomi yang mempunyai arti penting dalam beberapa aspek untuk memperoleh gambaran dan permasalahan ketenagakerjaan, seperti penduduk usia kerja, angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas. Penduduk yang termasuk Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang mengurus rumah tangga, sekolah atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja (yang bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk pengangguran dengan jumlah penduduk angkatan kerja, biasanya dinyatakan dalam persen.

Berdasarkan data Sakernas BPS Tahun 2023, kondisi ketenagakerjaan di Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel I-12 Penduduk Kota Tangerang Berdasarkan Jenis Kegiatan, TPAK dan TPT Tahun 2023

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		Total	TPAK	TPT
	Laki-laki	Perempuan			
Bekerja	558.492	318.352	876.844	63,39%	6,76%
Pengangguran	37.172	26.358	63.530		
Bukan Angkatan Kerja	149.687	393.444	543.131		
Jumlah	745.351	738.154	1.483.505		

Sumber : BPS Sakernas, Agustus 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada Tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Kota Tangerang sebesar 6,76%. Hal ini mengartikan bahwa diantara 100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPT untuk Kota Tangerang tersebut turun dari tahun sebelumnya (2022) yaitu 7,16%.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang banyak terjadi sebagai dampak dari mewabahnya virus Covid-19 sejak awal Tahun 2020, menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran di Kota Tangerang. Angka TPT Kota Tangerang Tahun 2021 sebesar 9,07% meningkat dibandingkan Tahun 2020 yang sebesar 8,63%. Namun seiring meredanya pandemi dan pulihnya ekonomi, angka TPT Kota Tangerang juga mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 yakni mencapai angka 6,76%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan ketenagakerjaan di Kota Tangerang.

Jika dilihat menurut jenis kelaminnya, TPT tahun 2023 pada jenis kelamin perempuan sebesar 7,65 persen lebih tinggi dibandingkan TPT jenis kelamin laki-laki sebesar 6,24 persen. TPT jenis kelamin perempuan cenderung mengalami penurunan dimana TPT tahun 2021 sebesar 9,68 persen lalu di tahun 2022 turun menjadi 9,44 persen kemudian di tahun 2023 TPT jenis kelamin perempuan turun menjadi 7,65 persen. Sementara untuk TPT jenis kelamin laki-laki cenderung fluktuatif selama tiga tahun terakhir dimana TPT tahun 2021 jenis kelamin laki-laki sebesar 8,71 persen turun di tahun 2022 menjadi 5,9 persen dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2023 menjadi 6,24 persen.

Adapun distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha di Kota Tangerang pada Tahun 2023 dibagi menjadi 3 (tiga) sektor pekerjaan (lapangan usaha) utama. Tabel di bawah menunjukkan sebaran penduduk yang bekerja menurut sektor pekerjaan (lapangan usaha) utama di Kota Tangerang Tahun 2022-2023, yaitu sektor pertanian, manufaktur dan jasa-jasa.

Tabel I-13 Persentase Penduduk Bekerja di Kota Tangerang Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Tahun 2022-2023

Lapangan Usaha (3 Sektor)	Tahun	
	2022	2023
Pertanian	0,84	1,47
Manufaktur	25,28	26,95
Jasa-jasa	73,88	71,58
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : BPS Sakernas, Agustus 2023

Sektor jasa merupakan faktor utama penyokong perekonomian di Kota Tangerang. Pada tahun 2023, sebesar 71,58 persen penduduk di Kota Tangerang bekerja di sektor jasa. Angka ini turun 2,3 poin dibanding tahun 2022 dimana penduduk yang bekerja di sektor usaha jasa sebanyak 73,88 persen. Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak sektor manufaktur yang mengalami dampak secara ekonomi sehingga harus mengurangi sejumlah tenaga kerjanya untuk dapat mempertahankan operasional usaha. Namun pada 2023 sektor ini terlihat mulai bergerak kembali dimana persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor manufaktur sebesar 26,95 persen, naik sebanyak 1,67 poin dibandingkan tahun 2022 dimana persentasenya sejumlah 25,28 persen.

Gambaran kondisi tersebut di atas menunjukkan ciri tenaga kerja perkotaan yang mendukung perekonomian perdagangan dan jasa. Hal ini menunjukkan pula karakteristik pekerja di Kota Tangerang pada Tahun 2023 mempunyai potensi ketenagakerjaan pada sektor perdagangan dan industri pengolahan. Potensi lain yang mungkin tidak banyak memberikan kontribusi ketenagakerjaan dapat dikembangkan/ alih usaha, melalui program padat karya produktif dan kewirausahaan. Dengan demikian sejalan dengan perkembangannya, sektor pekerjaan (lapangan usaha) dapat ditingkatkan melalui penciptaan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya bagi penduduk Kota Tangerang dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal.

Salah satu pendekatan yang sering dilakukan terkait dengan ketenagakerjaan adalah optimalisasi kemampuan dan keterampilan berdasarkan kebutuhan serta penyesuaian jenis lowongan pekerjaan dengan kualifikasi tingkat pendidikan serta keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja. Jumlah pencari kerja kurun waktu 2019-2023 mengalami penurunan dan kenaikan yaitu pada tahun 2019 sebanyak 14.982 orang, tahun 2020 sebanyak 15.492 orang, tahun 2021 sebanyak 14.190 orang, tahun 2022 sebanyak 12.898 dan tahun 2023 sebanyak 13.135 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, pencari kerja pada tahun 2023 didominasi oleh tamatan SLTA & SMK sebanyak 10.497 orang.

Tabel I-14 Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Kerja yang Tersedia (Menurut Tingkat Pendidikan) di Kota Tangerang Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Pencari Kerja			Pencari Kerja Yang Ditempatkan		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	0	0	0	0	0	0
2	SD	73	62	135	73	62	135
3	SLTP	568	578	1.146	568	578	1.146
4	SLTA & SMK	5.266	5.231	10.497	5.266	5.231	10.497
6	Diploma/Sarjana Muda	175	188	363	175	188	363
7	Sarjana	482	392	874	482	392	874
8	Pasca Sarjana (S2)	58	62	120	58	62	120
	Tahun 2023	6.622	6.513	13.135	6.622	6.513	13.135
	Tahun 2022	6.487	6.411	12.898	6.138	6.096	12.234
	Tahun 2021	7.350	6.840	14.190	6.230	5.962	12.192
	Tahun 2020	8.322	7.170	15.492	8.981	7.609	16.590
	Tahun 2019	7.562	7.420	14.982	11.869	10.935	22.804

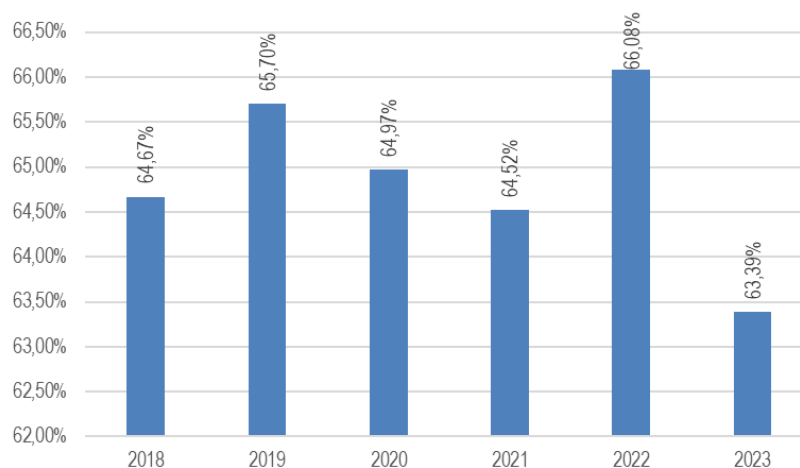
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Tahun 2023

Pencari kerja berjenis kelamin laki-laki dan lowongan kerja laki-laki masih lebih banyak dibanding pencari kerja berjenis kelamin perempuan dan lowongan kerja perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja di Kota Tangerang yang mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan masih didominasi oleh laki-laki. Fenomena ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam kegiatan ekonomi belum maksimal di Kota Tangerang. Implikasinya banyak perempuan yang masih menjadi kelompok bukan angkatan kerja. Mengurus rumah tangga, adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan perempuan. Diduga pula, pergeseran nilai-nilai budaya terutama dalam hal bekerja secara ekonomis, yang terjadi di Kota Tangerang belum bergerak cepat. Istilah bahwa yang mencari pekerjaan (mencari nafkah) adalah kewajiban laki-laki masih cukup kuat berakar dalam budaya masyarakat Kota Tangerang.

Indikator ketenagakerjaan lain yang biasa digunakan untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Secara khusus TPAK sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bisa diartikan sebagai bagian dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti. Disamping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Sementara itu, penduduk yang bekerja atau mempunyai pekerjaan adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus.

Dari sisi capaian, TPAK Kota Tangerang mengalami trend fluktuatif selama lima tahun terakhir. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, TPAK Kota Tangerang tahun 2023 turun sebanyak 2,69 poin dimana TPAK pada tahun 2022 sebesar 66,08 persen. Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2021, TPAK Kota Tangerang tahun 2022 naik sebanyak 1,59 poin dimana TPAK Kota Tangerang tahun 2021 sebesar 64,52 persen. Bila dibandingkan menurut jenis kelamin, maka ada perbedaan yang signifikan antara TPAK penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Tangerang. Pada tahun 2023 TPAK laki-laki sebesar 79,92 persen sedangkan TPAK perempuan sebesar 46,70 persen.

Gambar I-4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tangerang Tahun 2017-2023



Sumber : BPS Sakernas, Agustus 2023

Berdasarkan grafik di atas, TPAK Tahun 2023 Kota Tangerang sebesar 63,39%, turun sebesar -2,69% dari TPAK tahun sebelumnya (2022). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pada Tahun 2023 terdapat sekitar 63 persen dari penduduk usia kerja di Kota Tangerang yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan/penghasilan, walaupun di dalamnya termasuk mereka yang sedang mencari pekerjaan.

C.5. Pendidikan

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, kewenangan pengelolaan pendidikan sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar. Dengan demikian, diharapkan akses masyarakat terhadap pendidikan dapat meningkat dan sektor pendidikan dapat dikelola dengan lebih baik sehingga meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia.

Selain itu, pendidikan juga merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan merupakan bagian dari

upaya pembangunan nasional yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pembangunan yang harus dilakukan bersama adalah bukan hanya mengelola sumber daya alam, namun juga perlu membangun kualitas sumber daya manusianya.

Dalam kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Kota Tangerang menyelenggarakan urusan pendidikan yang merupakan bagian dari urusan desentralisasi dalam rangka otonomi daerah dimaksud. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan ini, beberapa faktor yang menjadi perhatian penting sebagai modal pembangunan manusia antara lain ketersediaan sekolah dan ketersediaan guru.

Adapun jumlah sekolah sebagai penyelenggara pendidikan formal yang berada di wilayah Kota Tangerang pada Tahun 2023 ditampilkan pada tabel di bawah berikut ini.

Tabel I-15 Jumlah Sekolah Berdasarkan Kewenangan Jenjang Pendidikan di Kota Tangerang Tahun 2018-2023

Tahun	Jenjang Pendidikan			Jumlah
	PAUD, TK, KB, SPS, TPA/RA	SD/MI	SMP/MTs	
2018	758	582	258	1.598
2019	778	592	262	1.632
2020	1.109	589	261	1.959
2021	1.070	552	265	1.887
2022	1.093	524	252	1.869
2023	1.039	529	267	1.835

Sumber: Profil Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2023 dan Dapodik Tahun 2023

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam analisis kependidikan adalah perbandingan antara murid dengan guru (rasio murid-guru), dalam hal ini yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang dapat menunjukkan tingkat faktor efektivitas proses belajar-mengajar di sekolah pada masing-masing tingkatan. Semakin besar rasio murid-guru akan mengindikasikan ketidakefektifan dalam proses belajar-mengajar, sebaliknya semakin kecil nilai rasio murid-guru akan memberikan informasi tentang semakin efektifnya proses belajar-mengajar. Berikut ini perbandingan antara murid dengan guru (rasio murid-guru) di Kota Tangerang Tahun 2023.

Tabel I-16 Jumlah Murid dan Guru di Kota Tangerang Tahun 2023

No.	Jenjang	Jumlah		Rasio
		Murid	Guru	Guru : Murid
1	PAUD Sederajat/RA	51.206	4.642	1 : 11
2	SD/MI	206.548	9.660	1 : 21
3	SMP/MTs	100.379	4.955	1 : 20

Sumber: Profil Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2023 dan Dapodik Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa pendidikan pra sekolah jenjang PAUD yang terdiri dari Taman kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Sekolah PAUD

Sejenis (SPS), dan Tempat Penitipan Anak (TPA) serta RA (yang dikelola oleh Kemenag) pada Tahun 2023 tersedia sebanyak 1039. sekolah dengan rincian jenjang PAUD (TK, KB, SPS, dan TPA) sebanyak 708 sekolah dan RA sebanyak 331 sekolah, dengan jumlah murid PAUD/RA sebanyak 51.206 murid.

Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) yang tersedia pada Tahun 2023 adalah sebanyak 529 sekolah dengan rincian SDN sebanyak 271 sekolah, SD Swasta sebanyak 147 sekolah, MI Negeri sebanyak 1 sekolah dan MI Swasta sebanyak 110 sekolah. Jumlah murid pada jenjang pendidikan dasar ini di Tahun 2023 sebanyak 206.548 siswa yang terdiri dari siswa di bawah kewenangan Kemendikbud dan siswa yang di bawah kewenangan Kemenag (Madarasah dan Pondok Pesantren), dengan guru sebanyak 9.660 orang (guru SD sebanyak 7.980 orang dan guru MI sebanyak 1680 orang). Sehingga dapat dihitung rasio guru-murid SD sebesar 1:21 yang artinya setiap 1 (satu) orang guru membimbing sekitar 20 murid.

Untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP/MTs) pada Tahun 2023 tersedia sebanyak sekolah, yang terdiri dari SMP Negeri sebanyak 34 sekolah, SMP Swasta sebanyak 167 sekolah, MTs Negeri sebanyak 3 sekolah dan MTs Swasta sebanyak 63 sekolah, dimana MTs merupakan sekolah di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag). Untuk jumlah murid sebanyak 100.379 murid yang terdiri dari siswa di bawah kewenangan Kemendikbud dan siswa yang dibawah kewenangan Kemenag (Madarasah dan Pondok Pesantren). Jumlah guru SMP/MTs sebanyak 4.955 orang (Guru SMP sebanyak 3.271 orang dan guru MTs sebanyak 1.234 orang). Sehingga terhitung rasio guru-murid SMP/MTs adalah 1:20 yang artinya setiap 1 (satu) orang guru membimbing sebanyak 20 murid.

Selain jumlah sekolah dan persebarannya di setiap wilayah kecamatan, maka hal yang perlu dilihat terkait dengan kependidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Dari angka-angka ini akan didapatkan informasi tentang seberapa besar peran serta masyarakat dalam pendidikan. APM dan APK ini dapat dihitung berdasarkan jumlah murid dan jumlah penduduk yang bersumber dari Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Tangerang pada semester I untuk jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar (SD/MI), menengah (SMP/MTs) pada sekolah negeri dan sekolah swasta.

Besarnya APM dan APK sekolah di Kota Tangerang dapat dilihat pada rangkaian tabel - tabel di bawah berikut ini.

Tabel I-17 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Tangerang Tahun 2023

No	Jenjang	Jumlah Siswa	Jumlah Penduduk	APM (Persen)
1	Jenjang SD/MI	196.225	200.050	98,09
2	Jenjang SMP/MTs	95.937	96.534	99,38

Sumber: Dapodik dan Emis Tahun 2023

Persentase capaian APM SD/MI/Paket A pada Tahun 2023 sebesar 98,09%. Hal ini berdasarkan perhitungan jumlah siswa kelompok usia 7 -12 tahun yang sekolah pada jenjang sekolah dasar sederajat dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Tangerang kelompok usia 7-12 tahun.

Persentase capaian APM SMP/MTs/Paket B pada Tahun 2023 sebesar 99,38%. Hal ini berdasarkan perhitungan jumlah siswa kelompok usia 13 -15 tahun yang sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama sederajat dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Tangerang kelompok usia 13-15 tahun.

Tabel I-18 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Tangerang Tahun 2023

No	Jenjang	Jumlah Siswa	Jumlah Penduduk	APK (Persen)
1	Jenjang PAUD/RA	51.206	67.292	76,10
2	Jenjang SD/MI	206.548	200.050	103,25
3	Jenjang SMP/MTs	100.379	96.534	103,98

Sumber: Dapodik dan Emis Tahun 2023

Adapun persentase capaian APK PAUD/RA/Sederajat pada Tahun 2023 sebesar 76,10%. Hal ini berdasarkan perhitungan jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar sederajat dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Tangerang kelompok usia 5-6 tahun.

Sedangkan persentase capaian APK SD/MI/Paket A pada Tahun 2023 sebesar 103,25%. Hal ini berdasarkan perhitungan jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar sederajat dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Tangerang kelompok usia 7-12 tahun.

Sedangkan persentase capaian APK SMP/MTs/Paket B pada Tahun 2023 sebesar 103,98%. Hal ini berdasarkan perhitungan jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama sederajat dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Tangerang kelompok usia 13-15 tahun.

Pada Tahun 2023 dalam menajamkan analisis keakuratan terhadap APK/APM maka Kemendikbud melalui Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) terus meningkatkan sistem dalam pengolahan datanya sehingga data/informasi yang disajikan lebih akurat. Hal ini dimulai dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat menengah pertama untuk Kota Tangerang khususnya atau yang lebih dikenal dengan SATU DATA. Adapun pada tingkat sekolah lebih menekankan pada kecepatan proses sinkronisasi terkait pengolahan data yang ada pada sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kota Tangerang.

D. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Secara administratif Kota Tangerang terdiri dari 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan, dengan 1.017 Rukun Warga (RW) dan 5.171 Rukun Tetangga (RT).

Kecamatan Karawaci merupakan kecamatan yang paling banyak memiliki kelurahan, yaitu sebanyak 16 Kelurahan dan RW sebanyak 127 RW. Sedangkan Kecamatan Periuk dan Kecamatan Benda merupakan kecamatan dengan paling sedikit kelurahan di dalamnya, yaitu masing-masing terdiri dari 5 kelurahan.

Terkait luas wilayah, Kecamatan Pinang merupakan wilayah kecamatan terluas di Kota Tangerang yakni sebesar 21,59 Km². Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil ada pada Kecamatan Benda yakni 5,92 Km². Hal tersebut dikarenakan di Kecamatan Benda terdapat Bandara Soekarno-Hatta seluas 19,69 Km², sehingga luas Kecamatan Benda berkurang sebesar luas Bandara Soekarno-Hatta tersebut.

Tabel I-19 Luas, Jumlah, dan Batas Wilayah Administrasi Kota Tangerang Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah			Batas Wilayah Administrasi			
			Kel.	RW	RT	Utara	Timur	Selatan	Barat
1	Ciledug	8,77	8	105	406	Kec. Kr Tengah Kec. Pinang	Kec. Larangan	Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan
2	Larangan	9,4	8	90	430	Prov. DKI Jakarta	Prov. DKI Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Kec. Ciledug Kec. Kr Tengah
3	Karang Tengah	10,47	7	74	361	Kec. Cipondoh	Prov. DKI Jakarta	Kec. Ciledug	Kec. Pinang
4	Cipondoh	17,91	10	111	701	Kec. Batuceper Prov. DKI Jakarta	Kec. Kr Tengah Prov. DKI Jakarta	Kec. Pinang Kec. Kr Tengah	Kec. Tangerang
5	Pinang	21,59	11	83	480	Kec. Cipondoh. Kec. Tangerang	Kec. Karang Tengah	Kota Tangerang Selatan	Kec. Cibodas
6	Tangerang	15,79	8	80	414	Kec. Neglasari Kec. Batuceper	Kec. Cipondoh Kec. Pinang	Kec. Pinang	Kec. Karawaci
7	Karawaci	13,48	16	127	539	Kec. Neglasari	Kec. Tangerang	Kec. Cibodas	Kec. Cibodas Kec. Periuk
8	Cibodas	9,61	6	93	479	Kec. Periuk Kec. Karawaci	Kec. Pinang	Kab. Tangerang	Kec. Jatiuwung
9	Jatiuwung	14,41	6	41	227	Kec. Periuk	Kec. Cibodas	Kab. Tangerang	Kab. Tangerang
10	Periuk	9,54	5	76	461	Kab. Tangerang	Kec. Neglasari Kec. Karawaci	Kec. Jatiuwung Kec. Cibodas	Kab. Tangerang
11	Neglasari	16,08	7	50	244	Kab. Tangerang	Kec. Benda Kec. Batuceper	Kec. Karawaci. Kec. Tangerang	Kab. Tangerang Kec. Periuk
12	Batuceper	11,58	7	47	233	Kec. Benda	Prov. DKI Jakarta	Kec. Cipondoh Kec. Tangerang	Kec. Neglasari
13	Benda*)	5,92	5	40	196	Kab. Tangerang	Prov. DKI Jakarta	Kec. Batuceper Kec. Neglasari	Kec. Neglasari
TOTAL		164,55	104	1.017	5.171				

Sumber: Pemerintah Kota Tangerang, 2024

*) Tidak termasuk luas Bandara Soekarno-Hatta (19,69 km²)

Diantara ke-13 kecamatan, Kecamatan Larangan merupakan kecamatan terjauh dari Ibukota Tangerang (sekitar 14 km) dan Kecamatan Tangerang merupakan kecamatan terdekat dari Ibukota Tangerang. Jarak paling jauh antar kecamatan adalah antara Kecamatan Larangan dengan Kecamatan Benda yaitu sekitar 21 km dan jarak paling dekat antar kecamatan adalah antara Kecamatan Cibodas dengan Kecamatan Jatiuwung yaitu sekitar 1 km.

Tabel I-20 Jarak Antar Ibukota Kecamatan di Kota Tangerang (Km) Tahun 2023

Kecamatan	Ciledug	Larangan	Karang Tengah	Cipondoh	Pinang	Tangerang	Karawaci	Cibodas	Jatiuwung	Periuk	Neglasari	Batuceper	Benda
1 Ciledug		3	4	5	7	11	12	15	17	15	13	15	18
2 Larangan	3		3	8	10	14	15	18	20	18	16	18	21
3 Karang Tengah	4	3		6	8	12	13	16	18	16	14	11	14
4 Cipondoh	5	8	6		4	6	9	10	12	10	8	3	6
5 Pinang	7	10	8	4		7	4	3	5	3	9	11	14
6 Tangerang	11	14	12	6	7		4	6	7	4	2	4	7
7 Karawaci	12	15	13	9	4	4		2	4	6	6	8	11
8 Cibodas	15	18	16	10	3	6	2		1	5	8	10	13
9 Jatiuwung	17	20	18	12	5	7	4	1		3	9	11	14
10 Periuk	15	18	16	10	3	4	6	5	3		4	8	11
11 Neglasari	13	16	14	8	9	2	6	8	9	4		4	7
12 Batuceper	15	18	11	3	11	4	8	10	11	8	4		3
13 Benda	18	21	14	6	14	7	11	13	14	11	7	3	

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2023

E. Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah

E.1. Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah

Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tangerang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 dan perubahannya pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Kota Tangerang, sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Perangkat daerah yang dibentuk merupakan unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah Kota Tangerang, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan

pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/fungsi penunjang (*techno structure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang meliputi:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Dinas;
5. Badan; dan
6. Kecamatan.

Berikut tabel di bawah ini yang menjelaskan rincian Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang dengan tipe perangkat daerah yang didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja urusan pemerintahan disertai unit perangkat daerah.

Tabel I-21 Susunan Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2023

Kode	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Tipe	Urusan Pemerintahan Daerah (UPD)	Unit Kerja OPD (Esselon III)	Jumlah Sub Unit	
01	Dinas Pendidikan	A	Pendidikan	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal	3 Seksi
				3	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD/MI)	3 Seksi
				4	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah (SMP/MTs)	3 Seksi
				5	Bidang Pembinaan Ketenagaan	2 Seksi
				6	UPTD	
				7	Satuan Pendidikan	
02	Dinas Kesehatan	A	Kesehatan	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Bidang Kesehatan Masyarakat	3 Seksi
				3	Bidang Pelayanan Kesehatan	3 Seksi
				4	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3 Seksi
				5	Bidang Pengembangan Sumber Daya	3 Seksi
				6	UPTD PUSKESMAS	
				7	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	
03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Bidang Perencanaan Teknis	3 Seksi
				3	Bidang Operasi dan Pemeliharaan	3 Seksi
				4	Bidang Bina Marga	3 Seksi
				5	Bidang Tata Air	3 Seksi
				6	Bidang Tata Ruang	3 Seksi
				7	UPTD	

Kode	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Tipe	Urusan Pemerintahan Daerah (UPD)	Unit Kerja OPD (Esselon III)		Jumlah Sub Unit
04	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	A	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	3 Seksi
				3	Bidang Bangunan	3 Seksi
				4	Bidang Air Minum dan Air Limbah	3 Seksi
				5	Bidang Pengawasan, Pelayanan Bangunan dan Pertanahan	4 Seksi
				6	UPTD	
05	Satuan Polisi Pamong Praja	A	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1	Sekretariat	2 Sub Bagian
				2	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	2 Seksi
				3	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman	2 Seksi
				4	Bidang Pembinaan Masyarakat	2 Seksi
				5	Bidang Pembinaan Satlinmas	2 Seksi
				6	UPTD	
06	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	C	Kesatuan Bangsa Dan Politik	1	Sekretaris	2 Sub Bagian
				2	Bidang Kesatuan Bangsa	2 Seksi
				3	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	2 Seksi
				4	UPTD	
07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana dan Kebakaran	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2 Seksi
				3	Bidang Kedaruratan dan Logistik	2 Seksi
				4	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2 Seksi
				5	Bidang Sarana Prasarana Bencana	2 Seksi
				6	UPTD	
08	Dinas Sosial	A	Sosial	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	2 Seksi
				3	Bidang Rehabilitasi Sosial	3 Seksi
				4	Bidang Pemberdayaan Sosial	3 Seksi
				5	UPTD	
09	Dinas Ketenagakerjaan	A	Tenaga Kerja	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	3 Seksi
				3	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	3 Seksi
				4	Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas	3 Seksi
				5	UPTD	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	A	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Bidang Pemberdayaan Perempuan	2 Seksi
				3	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	2 Seksi
				4	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	2 Seksi
				5	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2 Seksi
				6	UPTD	
11	Dinas Ketahanan Pangan	A	Pangan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Bidang Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan	3 Seksi
				3	Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	2 Seksi

Kode	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Tipe	Urusan Pemerintahan Daerah (UPD)	Unit Kerja OPD (Esselon III)		Jumlah Sub Unit
				4	Bidang Pertanian	2 Seksi
				5	UPTD	
12	Dinas Lingkungan Hidup	A	Lingkungan Hidup	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Bidang Tata Lingkungan	3 Seksi
				3	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	3 Seksi
				4	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	3 Seksi
				5	Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	3 Seksi
				6	UPTD	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	3 Seksi
				3	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3 Seksi
				4	Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil	3 Seksi
				5	UPTD	
14	Dinas Perhubungan	A	Perhubungan	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Bidang Pengembangan Sistem Transportasi	2 Seksi
				3	Bidang Angkutan	2 Seksi
				4	Bidang Lalu Lintas	3 Seksi
				5	Bidang Penerangan Jalan Umum	2 Seksi
				6	UPTD	
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	A	Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Bidang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian	3 Seksi
				3	Bidang Statistik dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3 Seksi
				4	Bidang Pengembangan E-Government	3 Seksi
				5	Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	3 Seksi
				6	UPTD	
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	A	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Bidang Perindustrian	3 Seksi
				3	Bidang Perdagangan	3 Seksi
				4	Bidang Pemberdayaan Koperasi	3 Seksi
				5	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	3 Seksi
				6	UPTD	
17	DPMPSTP	A	Penanaman Modal	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				3	Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2 Seksi
				4	Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan	2 Seksi
				5	Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi	2 Seksi
				6	UPTD	
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	C	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Sekretariat	2 Sub Bagian
				2	Bidang Kepemudaan	3 Seksi
				3	Bidang Olahraga	3 Seksi

Kode	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Tipe	Urusan Pemerintahan Daerah (UPD)	Unit Kerja OPD (Esselon III)		Jumlah Sub Unit
				4	UPTD	
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	A	Kebudayaan, Pariwisata	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Bidang Kebudayaan	2 Seksi
				3	Bidang Pariwisata	3 Seksi
				4	Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota	3 Seksi
				5	UPTD	
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	A	Perpustakaan, Kearsipan	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Bidang Pengembangan dan Dokumentasi	2 Seksi
				3	Bidang Perpustakaan	2 Seksi
				4	Bidang Kearsipan	2 Seksi
				5	UPTD	
21	Sekretariat Daerah	A	Pelayanan Administratif, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Asisten Tata Pemerintahan	
				1.1	Bagian Pemerintahan	3 Sub Bagian
				1.2	Bagian Hukum	3 Sub Bagian
				1.3	Bagian Organisasi	3 Sub Bagian
				2	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	
				2.1	Bagian Kerjasama dan Perekonomian	3 Sub Bagian
				2.2	Bagian Pembangunan dan Perencanaan Sekretariat Daerah	3 Sub Bagian
				2.3	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	3 Sub Bagian
				3	Asisten Administrasi Umum	
				3.1	Bagian Umum	3 Sub Bagian
				3.2	Bagian Keuangan	3 Sub Bagian
				3.3	Bagian Hubungan Masyarakat	3 Sub Bagian
				3.4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	3 Sub Bagian
				22	Sekretariat DPRD	A
2	Bagian Perencanaan dan Administrasi Keuangan	3 Sub Bagian				
3	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	2 Sub Bagian				
4	Bagian Humas dan Protokol	2 Sub Bagian				
23	Inspektorat	A	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Inspektur Pembantu Wilayah I	
				3	Inspektur Pembantu Wilayah II	
				4	Inspektur Pembantu Wilayah III	
				5	Inspektur Pembantu Wilayah IV	
				6	Inspektur Pembantu Wilayah V	
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Bidang Perencanaan Pembangunan, Evaluasi dan Pelaporan	2 Sub Bidang
				3	Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Ekonomi	2 Sub Bidang
				4	Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana	2 Sub Bidang
				5	Bidang Perencanaan Pemerintahan	2 Sub Bidang
				6	Bidang Pengelolaan Data Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan	2 Sub Bidang
				7	UPTD	

Kode	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Tipe	Urusan Pemerintahan Daerah (UPD)	Unit Kerja OPD (Esselon III)		Jumlah Sub Unit
25	Badan Pendapatan Daerah	A	Keuangan	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Bidang Pelayanan	3 Sub Bidang
				3	Bidang Pendataan, Verifikasi dan Pengolahan Data	3 Sub Bidang
				4	Bidang Penetapan, Penagihan dan Penyelesaian Piutang	3 Sub Bidang
				5	Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Keberatan dan Pengendalian	3 Sub Bidang
				6	UPTD	
26	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	A	Keuangan	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Bidang Anggaran	3 Sub Bidang
				3	Bidang Penatausahaan dan Akuntansi	3 Sub Bidang
				4	Bidang Administrasi Aset	3 Sub Bidang
				5	Bidang Pendapatan Lainnya	3 Sub Bidang
				6	UPTD	
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1	Sekretariat	3 Sub Bagian
				2	Bidang Pengembangan Aparatur	3 Sub Bidang
				3	Bidang Mutasi Aparatur	3 Sub Bidang
				4	Bidang Pembinaan Aparatur	3 Sub Bidang
				5	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	3 Sub Bidang
				6	UPTD	
28	Kecamatan Batuceper	A	Kewilayahan	1	Sekretariat	2 Sub Bagian, 5 Seksi
29	Kecamatan Benda	A	Kewilayahan	1	Sekretariat	2 Sub Bagian, 5 Seksi
30	Kecamatan Cibodas	A	Kewilayahan	1	Sekretariat	2 Sub Bagian, 5 Seksi
31	Kecamatan Ciledug	A	Kewilayahan	1	Sekretariat	2 Sub Bagian, 5 Seksi
32	Kecamatan Cipondoh	A	Kewilayahan	1	Sekretariat	2 Sub Bagian, 5 Seksi
33	Kecamatan Jatiuwung	A	Kewilayahan	1	Sekretariat	2 Sub Bagian, 5 Seksi
34	Kecamatan Karang Tengah	A	Kewilayahan	1	Sekretariat	2 Sub Bagian, 5 Seksi
35	Kecamatan Karawaci	A	Kewilayahan	1	Sekretariat	2 Sub Bagian, 5 Seksi
36	Kecamatan Larangan	A	Kewilayahan	1	Sekretariat	2 Sub Bagian, 5 Seksi
37	Kecamatan Neglasari	A	Kewilayahan	1	Sekretariat	2 Sub Bagian, 5 Seksi
38	Kecamatan Periuk	A	Kewilayahan	1	Sekretariat	2 Sub Bagian, 5 Seksi
39	Kecamatan Pinang	A	Kewilayahan	1	Sekretariat	2 Sub Bagian, 5 Seksi
40	Kecamatan Tangerang	A	Kewilayahan	1	Sekretariat	2 Sub Bagian, 5 Seksi

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

E.2. Pegawai Pemerintah Kota Tangerang

Aparatur Sipil Negara Kota Tangerang merupakan pegawai Kota Tangerang yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan dan disertai tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya.

Untuk dapat menjalankan penyelenggaraan tugas pemerintahan Kota Tangerang maka penempatan jabatan perangkat daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Sekretaris DPRD, inspektur, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan, dan staf ahli walikota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
3. Sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
4. Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
5. Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan, kepala seksi pada dinas dan badan, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas A, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
6. Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
7. Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
8. Kepala UPT yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Berikut jumlah Aparatur Sipil Negara menurut jabatan dan jenis kelamin di Kota Tangerang berdasarkan data Tahun 2023 di bawah ini.

Tabel I-22 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang, Desember 2023

Jabatan Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Eselon IIA	1	0	1
Eselon IIB	28	4	32
Eselon IIIA	48	6	54
Eselon IIIB	77	21	98
Eselon IVA	231	54	285
Eselon IVB	257	219	476
Eselon VA	0	0	0
Non Eselon	2.172	4.235	6.590

Jabatan Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Jumlah	2.817	4.539	7.356

Sumber: BKPSDM Kota Tangerang, Tahun 2024

Sedangkan jumlah ASN berdasarkan penempatan pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tangerang dapat dilihat pada rincian tabel di bawah ini.

Tabel I-23 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang, Desember 2023

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Sekretariat Daerah	94	88	182
2	Sekretariat DPRD	27	8	33
3	Badan Pendapatan Daerah	50	35	80
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16	31	44
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40	58	106
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	46	9	51
7	Badan Pengelola Keuangan Daerah	49	39	86
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17	7	25
9	Inspektorat	28	32	62
10	Dinas Kesehatan	198	991	1.157
11	Dinas Pendidikan	995	2.617	3.239
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40	14	50
13	Dinas Ketahanan Pangan	23	25	44
14	Dinas Ketenagakerjaan	21	18	37
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34	18	53
16	Dinas Perhubungan	67	9	75
17	Dinas Sosial	26	17	39
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	28	16	43
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69	28	88
20	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	38	37	71
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	19	23	40
22	Dinas Lingkungan Hidup	105	33	120
23	DPMPSTP	30	19	43
24	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	27	12	37
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	32	25	54
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	28	36
27	Satuan Polisi Pamong Praja	78	6	80
28	Kecamatan Batuaceper	44	21	64
29	Kecamatan Benda	40	11	49
30	Kecamatan Tangerang	53	29	75
31	Kecamatan Cipondoh	59	35	86
32	Kecamatan Cibodas	36	23	54
33	Kecamatan Ciledug	45	26	66
34	Kecamatan Larangan	43	17	56
35	Kecamatan Karang Tengah	39	26	60

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
36	Kecamatan Neglasari	36	20	54
37	Kecamatan Karawaci	77	35	111
38	Kecamatan Jatiuwung	39	12	50
39	Kecamatan Periuk	39	14	49
40	Kecamatan Pinang	62	30	83
	Jumlah	2.574	4.286	6.860

Sumber: BKPSDM Kota Tangerang, Tahun 2024

Aparatur Sipil Negara Kota Tangerang didominasi dengan pegawai berjenis kelamin perempuan dengan komposisi sebesar 64% dari keseluruhan Aparatur Sipil Negara Kota Tangerang, yang berarti pegawai berjenis kelamin pria hanya sebesar 36%.

Selanjutnya dapat dilihat komposisi tingkat pendidikan dari Aparatur Sipil Negara Kota Tangerang melalui tabel di bawah ini yaitu jumlah Aparatur Sipil Negara menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin pada Tahun 2023.

Tabel I-24 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang, Desember 2023

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
SD/Sederajat	29	1	30
SMP/Sederajat	35	10	45
SMA/Sederajat	391	190	581
D-I/D-II/D-III	159	514	673
D-IV	38	137	175
S-1/S-2	1.918	3.430	5.348
S-3	4	4	8
Jumlah	2.574	4.286	6.860

Sumber: BKPSDM Kota Tangerang, Tahun 2024

Dilihat dari komposisi tingkat pendidikan, pegawai dengan tingkat pendidikan terbesar ada pada pegawai dengan tingkat pendidikan S1/S2 sebesar 5.348 orang atau 80% dari keseluruhan pegawai. Perimbangan pegawai dengan tingkat pendidikan S1/S2 terbesar berjenis kelamin perempuan yaitu sejumlah 3.430 orang atau 64,13% dari total pegawai dengan tingkat pendidikan S1/S2.

Untuk tingkat pendidikan S3 masih berjumlah 8 orang atau 0,11% dari keseluruhan pegawai, dengan perimbangan 4 orang berjenis kelamin pria atau 50% dan 4 orang berjenis kelamin perempuan atau 50% dari total jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S3.

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kota Tangerang telah dilakukan dengan berbagai program melalui pemberian penghargaan, pendidikan, pelatihan teknis umum dan fungsional serta pemberian hukuman dan pembinaan.

1. Pemberian penghargaan Tahun 2023

- Satyalancana dengan masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun sejumlah 481 orang, yang terdiri dari:
 - a. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun : 70 orang.
 - b. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun : 124 orang.
 - c. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun : 287 orang.
- Pemberian Penghargaan Kenaikan Pangkat sampai 31 Desember 2023 ada sejumlah 1.399 orang (SK).
- Pemberian penghargaan Purna Tugas sampai 31 Desember 2023 ada sejumlah 469 orang.

2. Pendidikan Pelatihan manajerial kepemimpinan tahun 2023 yang meliputi:

- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Latsar CPNS Gol III : 5 orang
- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Latsar CPNS Gol II : - orang
- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan : 81 orang, terdiri dari:
 - a. Diklatpim II (Kepemimpinan Nasional) : 3 orang.
 - b. Diklatpim III (Kepemimpinan Administrator) : 17 orang.
 - c. Diklatpim IV (Kepemimpinan Pengawas) : 60 orang.
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional melalui pengiriman pada lembaga pendidikan dan pelatihan : 661 orang, dengan rincian:
 - a. Pendidikan dan pelatihan teknis : 600 orang.
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional : 61 orang.

3. Pemberian Hukuman

Pelanggaran Disiplin Pegawai hingga penetapan 31 Desember 2023 sebanyak 10 orang yang terdiri dari:

- Pelanggaran disiplin ringan sampai sedang sebanyak 6 orang.
- Pelanggaran disiplin berat sampai pemberhentian jabatan menjadi jabatan pelaksana sebanyak 4 orang.

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mengelola keuangannya secara mandiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya mandiri meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasannya. Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah; dan (7) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah. Secara garis besar struktur APBD terdiri dari tiga komponen, yaitu: pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pada periode Tahun Anggaran 2019-2023, realisasi pendapatan daerah Kota Tangerang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada Tahun Anggaran 2019 pendapatan daerah mencapai Rp4.277.659.353.829,00 dan meningkat menjadi Rp4.691.252.495.432,00 pada Tahun Anggaran 2023. Pada Tahun 2020 akibat terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, Indonesia termasuk Kota Tangerang yang memicu krisis kesehatan dan ekonomi, pendapatan daerah mengalami penurunan yaitu dari Rp4.277.659.353.829,00 pada Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp3.648.663.446.803,00 pada Tahun Anggaran 2020. Seiring dengan meredanya Pandemi Covid-19, pendapatan daerah kembali mengalami peningkatan dari Tahun 2020, yaitu mencapai Rp4.213.054.524.430,00 pada

Tahun Anggaran 2021, Rp4.274.452.905.169,00 pada Tahun Anggaran 2022, dan Rp4.691.252.495.432,00 pada Tahun Anggaran 2023. Pada periode Tahun Anggaran 2019-2023, rata-rata laju pertumbuhan pendapatan daerah mencapai 3,94% per tahun.

Realisasi belanja daerah Kota Tangerang pada periode Tahun Anggaran 2019-2023 juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada Tahun Anggaran 2019 belanja daerah mencapai Rp4.371.084.765.016,00 dan meningkat menjadi Rp4.705.483.322.900,00 pada Tahun Anggaran 2023. Pada Tahun 2020 akibat terjadinya Pandemi Covid-19, belanja daerah mengalami penurunan yaitu dari Rp4.371.084.765.016,00 pada Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp3.511.434.248.531,00 pada Tahun Anggaran 2020. Seiring dengan meredanya Pandemi Covid-19, belanja daerah kembali mengalami peningkatan yaitu mencapai Rp4.127.780.205.111,00 pada Tahun Anggaran 2021, Rp4.434.781.481.835,00 pada Tahun Anggaran 2022, dan Rp4.705.483.322.900,00 pada Tahun Anggaran 2023. Pada periode Tahun Anggaran 2019-2023, rata-rata laju pertumbuhan belanja daerah mencapai 2,67% per tahun.

Seiring dengan perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada periode Tahun Anggaran 2019-2023, realisasi pembiayaan daerah Kota Tangerang juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada Tahun Anggaran 2019 pembiayaan daerah mencapai Rp545.634.592.725,00 dan menurun menjadi Rp502.593.555.633,00 pada Tahun Anggaran 2023. Pada Tahun Anggaran 2020 pembiayaan daerah mengalami penurunan yaitu dari Rp545.634.592.725,00 pada Tahun 2019 menjadi Rp452.209.160.887,00 pada Tahun Anggaran 2020. Namun dalam 2 tahun selanjutnya, pembiayaan daerah kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp589.431.699.180,00 pada Tahun Anggaran 2021 dan Rp662.934.925.149,00 pada Tahun Anggaran 2022. Pada Tahun Anggaran 2023 pembiayaan daerah kembali mengalami penurunan yaitu sebesar Rp502.593.555.633,00. Pada periode Tahun Anggaran 2019-2023, rata-rata laju pertumbuhan pembiayaan daerah mencapai -7,26% per tahun.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang di Tahun 2023 dikarenakan pada dasarnya kinerja pengelolaan keuangan daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut ini diuraikan lebih rinci anggaran dan realisasi APBD Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel I-25 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Unaudited)	%
1	PENDAPATAN	4.558.269.432.595,00	4.691.252.495.432,00	102,92
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.202.605.531.310,00	2.271.392.858.607,00	103,12

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Unaudited)	%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.925.000.000.000,00	1.947.444.196.342,00	101,17
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	66.291.215.000,00	75.402.815.127,00	113,74
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.495.325.872,00	14.495.325.873,00	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	196.818.990.438,00	234.050.521.265,00	118,92
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.355.663.901.285,00	2.419.084.007.661,00	102,69
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1.640.653.970.801,00	1.633.668.330.271,00	99,57
1.2.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	297.360.684.235,00	296.166.462.510,00	99,60
1.2.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam	1.653.034.566,00	1.955.370.689,00	118,29
1.2.1.3	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	881.177.697.000,00	893.570.994.905,00	101,41
1.2.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	11.363.304.000,00	10.347.097.928,00	91,06
1.2.1.5	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	449.099.251.000,00	431.628.404.239,00	96,11
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	5.385.758.000,00	5.385.758.000,00	100,00
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah (DID)	5.385.758.000,00	5.385.758.000,00	100,00
1.2.2.2	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	0,00	0,00	
1.2.2.3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	
1.2.2.4	Dana Desa	0,00	0,00	
1.2.3	TRANSFER ANTAR DAERAH	709.624.172.484,00	780.029.919.390,00	109,92
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	704.624.172.484,00	775.632.182.390,00	110,08
1.2.3.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	5.000.000.000,00	4.397.737.000,00	87,95
1.2.3.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	775.629.164,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	775.629.164,00	
2	BELANJA	5.060.875.781.078,00	4.705.483.322.900,00	92,98
2.1	BELANJA OPERASI	4.111.223.192.748,00	3.904.618.342.674,00	94,97
2.1.1	Belanja Pegawai	1.629.920.043.105,00	1.568.820.763.541,00	96,25
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.268.069.980.243,00	2.124.268.170.782,00	93,66
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	
2.1.3	Belanja Subsidi	37.000.000.000,00	36.352.600.597,00	98,25
2.1.4	Belanja Hibah	172.135.169.400,00	171.119.307.754,00	99,41
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.098.000.000,00	4.057.500.000,00	99,01
2.2	BELANJA MODAL	912.667.075.407,00	800.254.297.026,00	87,68
2.2.1	Belanja Modal Tanah	62.644.910.736,00	11.206.062.731,00	17,89
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	176.550.710.550,00	166.010.986.051,00	94,03
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	257.972.796.180,00	235.599.718.327,00	91,33
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	377.984.249.310,00	354.196.828.076,00	93,71
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.526.565.701,00	22.225.309.936,00	98,66
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	14.987.842.930,00	11.015.391.905,00	73,50
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	36.985.512.923,00	610.683.200,00	1,65
2.3.1	Belanja Tak Terduga	36.985.512.923,00	610.683.200,00	1,65
3	TRANSFER	0,00	0,00	
3.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	0,00	0,00	
3.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00	
3.1.2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	
3.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00	
3.2.1	Transfer Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Unaudited)	%
3.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00	
3.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	
3.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	
	SURPLUS/DEFISIT	-502.606.348.483,00	-14.230.827.468,00	2,83
4	PEMBIAYAAN	502.606.348.483,00	502.593.555.633,00	100,00
4.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	502.606.348.483,00	502.593.555.633,00	100,00
4.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	502.606.348.483,00	502.593.555.633,00	100,00
4.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	
4.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	
4.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
4.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
4.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	
4.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	
4.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	
4.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	
4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	
4.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
4.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETO	502.606.348.483,00	502.593.555.633,00	100,00
4.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	488.362.728.165,00	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang TA 2023 (Unaudited)

Berdasarkan data tabel di atas, maka kinerja APBD Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

- Realisasi pendapatan daerah lebih besar sebesar Rp132,983 miliar dari anggaran yang ditargetkan atau kenaikan sebesar 2,92%. Hal tersebut dikarenakan realisasi yang melampaui target dari komponen Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp22,444 miliar, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp9,111 miliar dan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp37,231 miliar. Jika dilihat realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap total realisasi Pendapatan Daerah, maka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 sebesar 48,35%. Capaian realisasi pendapatan asli daerah terhadap target yang telah ditetapkan menunjukkan **Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan sebesar 102,92%**.
- Realisasi belanja daerah terhadap target anggaran belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar 92,98% dengan realisasi sebesar Rp4,705 triliun dengan komposisi terbesar adalah Belanja Operasi sebesar 94,97%. **Proporsi realisasi belanja pegawai pada belanja operasional terhadap realisasi belanja daerah sebesar 40,18%**.
- Pembiayaan Daerah diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp502,593 miliar dengan realisasi defisit tahun anggaran 2023 sebesar Rp14,230 miliar sehingga realisasi

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan menjadi Rp488,362 miliar.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

A.1. Tantangan Pembangunan Daerah

Tantangan pembangunan daerah merupakan kondisi internal jangka panjang (cita-cita) yang ingin diwujudkan serta kondisi eksternal yang bersifat global, nasional, regional yang mempengaruhi upaya untuk mewujudkan cita-cita jangka panjang daerah. Berikut ini diuraikan tantangan pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019-2023 sebagai berikut.

A.1.1. Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 menguraikan bahwa tahapan pembangunan jangka panjang Kota Tangerang dibagi menjadi 5 (lima) tahapan pembangunan, sebagaimana ditunjukkan dalam diagram berikut di bawah ini.

Gambar I-5 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kota Tangerang Tahun 2005-2025



Sumber: RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025

Pembangunan jangka menengah periode Tahun 2019-2023 merupakan tahap pembangunan yang diarahkan sebagai Tahap awal pembentukan Kota Tangerang sebagai 'Kota yang Maju dan Lestari'. Pembangunan pada periode Tahun 2019-2023 menekankan pada upaya pemantapan daya saing kompetitif perekonomian secara nasional dan global; pembentukan sumber

daya manusia berkualitas dan berdaya saing; peningkatan daya dukung dan pelayanan infrastruktur perkotaan; pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Prioritas pembangunan jangka menengah Kota Tangerang periode Tahun 2019-2023 ditujukan pada upaya sebagai berikut.

Tabel I-26 Prioritas Pembangunan Kota Tangerang

Jangka Panjang (2005-2025)			Periode Tahun 2019-2023	
Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, maju dan berdaya saing				
Terwujudnya masyarakat yang bermoral, berbudaya dan bermartabat	Meningkatnya kualitas implementasi norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, sosial dan kebudayaan	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
		Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sarana keagamaan, sosial dan kebudayaan		Implementasi dan aktualisasi nilai-nilai tradisional, budaya dan kearifan lokal masyarakat sebagai faktor penyeimbang perkembangan IPTEK
		Pembinaan kerukunan hidup beragama dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya		
Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berdaya saing	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Penuntasan wajib belajar dua belas tahun
		Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan		Perintisan wajib belajar lima belas tahun
		Optimalisasi manajemen pelayanan pendidikan		Peningkatan kualitas lembaga PAUD formal dan non formal
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan		Pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal berskala nasional dan internasional
		Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas kelembagaan pendidikan swasta		Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan kurikulum internasional
		Optimalisasi minat dan budaya baca masyarakat		Peningkatan pendidikan keterampilan dan penguasaan IPTEK bagi masyarakat
		Optimalisasi daya saing kompetensi pendidikan yang berwawasan Iptek dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan, dunia usaha, dan pembentukan jiwa kewirausahaan		
Terwujudnya masyarakat yang	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Optimalisasi dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan		

Jangka Panjang (2005-2025)			Periode Tahun 2019-2023	
Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
sehat	masyarakat	Peningkatan mutu tenaga kesehatan		Peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan
		Pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat dan makanan		Pemberdayaan profesi kesehatan (institusi)
		Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan		Pengembangan dan penguatan sistem kesehatan
		Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat		Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan
		Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan lingkungan		
		Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		
		Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat		
Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Peningkatan kapasitas dan kualitas kesejahteraan sosial	Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan advokasi, pemberdayaan dan perlindungan PMKS
		Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan PMKS		
	Meningkatnya keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap sumber daya produktif (pelatihan keterampilan, modal dan manajemen usaha)		
		Perlindungan dan rehabilitasi PMKS Fasilitasi jaminan sosial bagi PMKS		
Terwujudnya keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak		Jaminan sosial pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan		Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat
	Membairnya tingkat kesejahteraan keluarga	Peningkatan pelayanan pembinaan keluarga sejahtera		Peningkatan kemandirian dan kesejahteraan keluarga
Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan terkelolanya	Terkendalnya pertumbuhan penduduk	Peningkatan kapasitas kelembagaan keluarga berencana		Pengendalian pertumbuhan penduduk
		Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana		

Jangka Panjang (2005-2025)			Periode Tahun 2019-2023	
Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
administrasi kependudukan	Tertibnya administrasi kependudukan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan		Penataan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar daerah
		Pengendalian dan pengawasan manajemen kependudukan		
		Peningkatan kerjasama kependudukan antar daerah		
Terwujudnya peran aktif pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan		
		Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda		
Terwujudnya budaya olahraga masyarakat dan prestasi olah raga	Meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olah raga	Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga		
		Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana olah raga		
Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing				
Terwujudnya perekonomian yang merata, maju dan berdaya saing	Meningkatnya investasi	Optimalisasi kualitas dan daya saing pelayanan investasi	Peningkatan Daya Saing Perekonomian	Pengembangan investasi yang memiliki daya saing dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi
		Peningkatan cakupan dan kualitas promosi investasi		
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Jaminan kepastian hukum berusaha		
	Meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat	Peningkatan keterampilan dan keahlian SDM bagi pelaku usaha		Peningkatan kehandalan UMKM dan Koperasi sebagai penggerak perekonomian daerah
		Peningkatan kapasitas manajemen usaha bagi pelaku usaha		Pengembangan jaringan kelembagaan UMKM dan Koperasi
		Peningkatan fasilitasi modal usaha bagi pelaku usaha		
		Peningkatan fasilitasi aksesibilitas pasar bagi pelaku usaha		
		Penguatan kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah		
		Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna pengembangan produk		

Jangka Panjang (2005-2025)			Periode Tahun 2019-2023	
Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
Terwujudnya agribisnis pertanian dan perikanan yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya produktivitas, kualitas dan daya saing produk agribisnis pertanian dan perikanan	Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM		Pemantapan sistem agribisnis pertanian
		Pembinaan manajemen usaha		Pengembangan dan penerapan teknologi pertanian
		fasilitasi aksesibilitas pasar		
		Fasilitasi kerjasama perdagangan		
		Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk		
Terwujudnya industri yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya produktivitas, kualitas dan daya saing produk industri	Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan padat karya dan padat teknologi yang ramah lingkungan		Perkuatan potensi industri strategis
		Fasilitasi aksesibilitas pasar		Penumbuhkembangan hubungan industrial untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja
		Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah		
		Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar		
Terwujudnya perdagangan yang maju (modern) dan berdaya saing	Meningkatnya produktivitas kualitas dan daya saing produk perdagangan	Fasilitasi kerjasama perdagangan		Pengoptimalan pendayagunaan potensi lokal
		Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah		
		Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar		
Terwujudnya pelayanan jasa pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan jasa pariwisata	Fasilitasi pemasaran dan kerjasama pariwisata		Pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata
		Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata		Penataan destinasi pariwisata
		Pengembangan dan peningkatan sarana pelayanan pariwisata		Penciptaan daya tarik wisata
		Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha pariwisata besar dengan pelaku usaha pariwisata kecil dan menengah		Pengembangan kelembagaan pariwisata
Terwujudnya ketahanan pangan	Memadainya ketersediaan pangan	Peningkatan produktivitas tanaman pangan		
		Peningkatan kerjasama antardaerah dalam		

Jangka Panjang (2005-2025)			Periode Tahun 2019-2023	
Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
masyarakat yang kokoh		penyediaan pangan Pengaturan tata niaga perdagangan bahan pangan		
Terwujudnya kesempatan kerja yang luas	Meningkatnya kesempatan kerja Menurunnya tingkat pengangguran	Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri		Penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar
Meningkatnya kualitas dan daya saing produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya kualitas dan daya saing produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi, kualitas dan daya saing produktivitas tenaga kerja dan wirausaha Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum Peningkatan kapasitas dan pelayanan lembaga ketenagakerjaan Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha		Pemantapan kompetensi, daya saing dan jiwa kewirausahaan tenaga kerja
Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari				
Terwujudnya tata ruang kota yang berkualitas	Meningkatnya ketersediaan dan kelengkapan rencana tata ruang Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Penataan dan peningkatan kualitas rencana tata ruang wilayah kota Penataan dan optimalisasi fungsi pelayanan, struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang kota Penataan dan pengembangan kawasan strategis kota Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang	Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pemantapan sistem pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang
Terjaganya kualitas dan kelestarian	Terjaganya kualitas dan kelestarian sumber daya	Penataan dan optimalisasi pengelolaan fungsi lahan pada kawasan budi daya		Peningkatan nilai tambah potensi sumber daya alam dan fungsi

Jangka Panjang (2005-2025)			Periode Tahun 2019-2023	
Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
sumber daya alam	alam	Penataan dan pelestarian fungsi lahan pada kawasan lindung		lingkungan hidup
		Pemulihan, rehabilitasi, pelestarian dan pengelolaan situ, sungai, embung, bendungan dan air bawah tanah		Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dengan daya dukung lingkungan
		Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air		
		Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya air		
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Terjaganya daya dukung ruang terbuka hijau	Penataan dan pengembangan kawasan ruang terbuka hijau		Pemantapan sistem pemantauan, pengendalian dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
	Menurunnya tingkat pencemaran	Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya		Peningkatan konsistensi penegakan hukum dalam pengendalian lingkungan
		Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup		Pembudayaan perilaku ramah lingkungan di kalangan masyarakat
		Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup		
Mewujudkan pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota yang memadai dan berdaya saing				
Terwujudnya layanan transportasi nyaman, aman, handal, ramah lingkungan dan terjangkau	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas jaringan jalan dan jembatan	Penataan dan pengembangan sistem jaringan jalan dan jembatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota	Pemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah
		Peningkatan daya dukung dan kualitas jalan dan jembatan		Pembangunan dan pemerataan infrastruktur wilayah
	Meningkatnya kualitas pelayanan sistem jaringan terminal dan angkutan umum masal	Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan sistem jaringan, peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal		Pemantapan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah
		Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan sistem jaringan dan moda angkutan umum masal darat dan sungai yang		Revitalisasi infrastruktur wilayah yang telah ada

Jangka Panjang (2005-2025)			Periode Tahun 2019-2023	
Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
		nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan		
Terwujudnya pelayanan drainase yang memadai untuk meminimalkan kerawanan banjir	Meningkatnya kualitas pelayanan drainase	Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan sistem jaringan drainase		Pengembangan sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport)
	Menurunnya lokasi rawan banjir			Pemantapan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana
Terwujudnya pelayanan air bersih yang merata, berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan air bersih	Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengolahan air bersih		
		Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan sistem jaringan air bersih		
Terwujudnya pelayanan persampahan yang memadai dan berkualitas untuk menciptakan kebersihan kota	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan persampahan	Meningkatkan dan optimalisasi pendayagunaan sarana dan teknologi persampahan		
		Peningkatan kapasitas dan optimalisasi manajemen persampahan		
Terwujudnya pelayanan pengelolaan limbah yang memadai, berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatnya pelayanan pengelolaan limbah	Peningkatan kualitas dan optimalisasi sistem dan teknologi pengelolaan limbah terpadu		
		Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana pengelolaan limbah terpadu		
Terwujudnya pelayanan pemadam kebakaran yang memadai dan berkualitas untuk meminimalkan kerawanan kebakaran	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran	Penataan dan pengembangan sistem jaringan prasarana pemadam kebakaran		
		Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan teknologi pemadam kebakaran		

Jangka Panjang (2005-2025)			Periode Tahun 2019-2023	
Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
Terwujudnya pelayanan telekomunikasi, telematika dan informatika yang memadai, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya pelayanan telekomunikasi, telematika dan informatika	Penataan dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, telematika dan informatika		
		Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan teknologi telekomunikasi, telematika dan informatika		
Terwujudnya pelayanan fasilitas perdagangan yang maju dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas perdagangan	Optimalisasi dan peningkatan kualitas layanan pasar tradisional		
		Penataan dan pengembangan sistem dan fasilitas perdagangan modern		
Terwujudnya pelayanan fasilitas jasa yang maju dan berdaya saing	Meningkatnya daya saing pelayanan fasilitas jasa	Penataan, pengembangan, peningkatan kualitas fasilitas hotel dan restoran		
		Penataan, pengembangan dan peningkatan kualitas fasilitas jasa keuangan dan perbankan		
Terwujudnya perumahan yang layak huni dan terjangkau	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas rumah yang layak huni dan terjangkau	Pengendalian pengembangan perumahan horizontal yang layak huni dan terjangkau		
		Peningkatan pengembangan perumahan vertikal yang layak huni dan terjangkau		
		Fasilitasi rehabilitasi rumah layak huni		
		Fasilitasi dan kerjasama pembiayaan pembangunan perumahan dengan dunia usaha		
		Pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha pengembang perumahan		
Terwujudnya lingkungan permukiman yang tidak kumuh	Menurunnya kawasan permukiman kumuh	Peningkatan daya dukung dan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman		
		Peningkatan daya dukung dan kualitas sanitasi lingkungan permukiman		
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih				
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur	Optimalisasi tata kerja kelembagaan Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Penguatan dan pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik didukung sistem,

Jangka Panjang (2005-2025)			Periode Tahun 2019-2023	
Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
berorientasi pada pelayanan publik		Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur		prosedur, serta standarisasi kualitas pelayan serta budaya organisasi
	Meningkatnya kualitas data, informasi, perencanaan, dan pengawasan pembangunan daerah	Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah Peningkatan kualitas kearsipan daerah Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah		
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan publik	Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan SPM pelayanan publik		Pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
		Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik		
		Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik kepada kecamatan dan kelurahan		
		Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah		
		Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan		
Terwujudnya kapasitas dan pengelolaan keuangan daerah yang memadai dan akuntabel	Meningkatnya pendapatan daerah	Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah		Peningkatan daya guna dan hasil guna kekayaan dan aset daerah
	Meningkatnya efektivitas alokasi belanja daerah	Peningkatan kapasitas belanja daerah yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik		
	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah		
	Meningkatnya kontribusi pembiayaan pembangunan daerah dari masyarakat dan swasta	Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah		

Jangka Panjang (2005-2025)			Periode Tahun 2019-2023	
Sasaran Pokok	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
Terwujudnya masyarakat yang demokratis	Meningkatnya penerapan prinsip demokrasi masyarakat	Peningkatan implementasi tata nilai demokrasi		Pemantapan peran masyarakat madani (civil society)
		Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik		
Terwujudnya masyarakat yang sadar, patuh dan taat hukum	Meningkatnya kesadaran, kepatuhan dan penegakan supremasi hukum	Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum		Penanaman budaya taat hukum di masyarakat
		Penataan produk hukum daerah		Harmonisasi produk hukum
		Penegakan supremasi hukum		Perwujudan produk hukum yang memihak kepentingan masyarakat
Terwujudnya lingkungan masyarakat yang tenteram dan tertib	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tenteram dan tertib		Pemantapan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM)
		Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		
Terkelolanya penanganan bencana secara cepat dan tepat	Meningkatnya penanganan bencana	Mitigasi bencana		Optimalisasi potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
		Peningkatan penanganan tanggap darurat bencana		
		Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
		Peningkatan pelayanan rehabilitasi pasca bencana		

Sumber: RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 dan Perubahan RPJMD Kota Tangerang 2019-2023

Berikut merupakan fokus dan tantangan pembangunan daerah Kota Tangerang pada Tahun 2023 berdasarkan aspek dan fokus.

Tabel I-27 Fokus dan Tantangan Kota Tangerang

Fokus	Tantangan
Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
• Tata nilai sosial budaya dan norma agama	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Aktualisasi norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat • Meningkatnya Pencegahan dan penanggulangan pengaruh dan dampak negatif tata nilai sosial dan budaya dari luar yang bertentangan dengan norma agama dan tata nilai sosial budaya masyarakat
• Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
• Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya tingkat persaingan kualitas SDM • Kualitas SDM yang selalu adaptif terhadap kemajuan IPTEK • Pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau
• Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkat secara berkelanjutan derajat kesehatan masyarakat • Meningkatnya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau • Meningkatnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup sehat
• Kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Perlindungan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) • Tertanganinya Kerawanan sosial • Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial • Menurunnya penduduk miskin
• Tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Meluasnya kesempatan kerja • Meningkatnya kualitas tenaga kerja • Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
• Pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat • Meningkatnya secara berkelanjutan peran perempuan, perlindungan anak • Menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak • Meningkatkan perlindungan anak
• Pengendalian kependudukan dan kesejahteraan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pengendalian pertumbuhan penduduk • Meningkatnya Pelayanan dan penegakan administrasi dan manajemen kependudukan • Meningkatkan kesejahteraan keluarga
• Pemuda dan olah raga	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kapasitas dan peran pemuda dalam pembangunan • Meningkatnya pemyarakatan dan prestasi olah raga
Aspek Perekonomian Daerah dan Masyarakat	
• Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya persaingan iklim investasi yang semakin tinggi • Meningkatnya iklim investasi • Reorientasi investasi pada kelompok sektor tersier
• Usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi • Meningkatnya Reorientasi dan pengembangan produk berorientasi pasar • Meningkatnya Kemitraan dengan pelaku usaha besar
• Produktivitas,	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya persaingan usaha dan kualitas produk yang

Fokus	Tantangan
kualitas dan daya saing perekonomian	semakin kompetitif; <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Reorientasi dan pengembangan pasar produk berorientasi pasar • Meningkatnya Kemitraan usaha antar pelaku usaha perdagangan
• Ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pengendalian distribusi bahan pangan • Meningkatnya Pengaturan dan pengawasan tata niaga perdagangan bahan pangan
Aspek Penataan Ruang, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
• Penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penataan dan optimalisasi fungsi, struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang • Meningkatnya penegakan pengendalian pemanfaatan ruang
• Sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian sumber daya lahan • Meningkatnya pemulihan, rehabilitasi, pelestarian dan pengelolaan sumber daya air
• Lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan • Meningkatnya pendayagunaan teknologi ramah lingkungan
Aspek Infrastruktur dan Fasilitas Kota	
• Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan • Meninkatnya secara berkelanjutan upaya pengendalian kemacetan • Berkembang dan Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan
• Air bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Bersih
• Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatnya volume penanganan persampahan
• Pengelolaan limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya volume penanganan limbah
• Energi dan kelistrikan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan teknologi hemat energi • Peningkatan promosi hemat energi
• Telekomunikasi, telematika dan informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kebutuhan telekomunikasi, telematika dan informatika • Berkembangnya teknologi telekomunikasi, telematika dan informatika yang pesat
• Fasilitas perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya persaingan usaha dan kualitas produk yang semakin kompetitif; • Meningkatnya reorientasi dan pengembangan pasar produk berorientasi pasar; • Meningkatnya kemitraan usaha antar pelaku usaha perdagangan
• Fasilitas jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelayanan fasilitas jasa
• Fasilitas industri	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelayanan fasilitas industri
• Perumahan dan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyediaan kebutuhan perumahan • Meningkatnya penanganan kawasan kumuh
Aspek Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Kualitas Ketentraman, Ketertiban, Demokrasi dan Hukum	
• Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya secara berkelanjutan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur
• Pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya daya saing pelayanan publik
• Keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya secara berkelanjutan kapasitas keuangan daerah
• Kehidupan demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya secara berkelanjutan kualitas kehidupan demokrasi yang bertanggungjawab
• Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penataan dan supremasi hukum
• Ketenteraman dan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya secara berkelanjutan pemeliharaan

Fokus	Tantangan
ketertiban masyarakat	ketentraman dan ketertiban umum dalam mendukung lingkungan kota yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan
• Penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya secara berkelanjutan upaya pengendalian banjir • Terkendalinya daerah rawan bencana kebakaran

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Tangerang 2019-2023

A.1.2. Tantangan Pembangunan Tata Ruang Daerah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Tahun 2012-2032 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Tahun 2012-2032. Penelaahan terhadap RTRW Kota Tangerang dalam perumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tangerang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang (spasial) Kota Tangerang dalam periode tahun berkenaan yang difokuskan pada indikasi program pemanfaatan ruang.

Dalam RTRW Kota Tangerang Tahun 2012-2032 diuraikan bahwa tahapan pelaksanaan indikasi program pemanfaatan ruang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, sebagaimana ditunjukkan pada diagram berikut di bawah ini.

Gambar I-6 Tahapan Pelaksanaan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032



Sumber: RTRW Kota Tangerang 2012-2032

Dalam kaitannya dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2024, maka tahapan waktu pelaksanaan indikasi program pemanfaatan ruang wilayah Kota Tangerang yang berkenaan adalah berada dalam Tahap Kedua (Periode 2018-2022) dan Tahap Ketiga (Periode 2023-2027).

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Keterangan	
		2013-2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032		
6) Pembangunan Jalan	Jalan Ciledug-Bandara (STA 11), Jalan Sepanjang Sisi kanan kiri Tol Jakarta-Tangerang (Frontage Tol), Jalan Sepanjang Sisi Kanan Kiri Sungai Cisadane (Promenade), Jalan Sisi Utara Rel Kereta Api, Jalan Sisi Selatan Mookervart, Jalan Cadas Kedaung, Jalan Tembus Jalan Prabu Kiansantang-Jalan Pajajaran, Jalan Lingkar Selatan terdiri dari ruas Jalan Adam Malik-Jalan Taman Asri Lama- Jalan Cipto Mangunkusumo-Jalan Raden Fatah-Jalan Puri Kartika-Jalan Graha Raya					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
7) Pembangunan Simpang Tidak Sebidang	Simpang Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Pembangunan 3, simpang Benda, simpang Jalan Gatot Subroto-Jalan Gajah Tunggal, simpang Jalan Gatot Subroto-Jalan Siliwangi, simpang Jalan Gatot Subroto-Jalan Telesonik, simpang Jalan Ciledug-Bandara (STA 11) dengan Jalan Daan Mogot, simpang Jalan Ciledug-Bandara (STA 11) dengan Jalan Benteng Betawi dan rel kereta api					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
8) Optimalisasi Simpang Tidak Sebidang	Simpang Cikokol, simpang Ciledug, simpang Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Hasyim Ashari, simpang Jalan Gatot Subroto-Jalan Taman Cibodas					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
9) Pembangunan Jembatan	Jembatan yang menghubungkan Kedaung dengan Sepatan (eretan), jembatan yang menghubungkan Jalan M.H. Thamrin dengan Jalan Imam Bonjol, jembatan yang menghubungkan Jalan Pembangunan 3 dengan Cadas, jembatan yang menghubungkan Jalan K.S. Tubun dengan Jalan Lio Baru					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Angkutan Umum dan Terminal							
1) Pengembangan Terminal Poris Plawad	Poris Plawad					Belum dilaksanakan	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Pembangunan Terminal Tipe A	Jatiuwung					Belum dilaksanakan	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Pembangunan Terminal Tipe B	Ciledug atau Larangan, Periuk, Imam Bonjol					Terminal Ciledug ini di-downgrade dari terminal tipe B ke tipe C karena kendala penganggaran dan pembebasan lahan	<input checked="" type="checkbox"/>

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Keterangan	
		2013-2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032		
4) Penataan Terminal Eksisting	Terminal Cimone, Terminal Cibodas					Terminal Cimone ini juga di-downgrade dari terminal tipe B ke tipe C pada tahun 2016	<input checked="" type="checkbox"/>
5) Pembangunan Terminal Tipe C	Tersebar di seluruh wilayah					Belum dilaksanakan	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Pembangunan Terminal Angkutan Barang	Jatiuwung					Belum dilaksanakan	<input checked="" type="checkbox"/>
7) Pengembangan Sistem Angkutan Massal dalam Kota	Koridor cadas-Terminal Poris Plawad, koridor Jatiuwung-Terminal Poris Plawad, koridor Karawaci-Terminal Poris Plawad, koridor Bandara-Tangerang, koridor yang menghubungkan antara koridor dalam kota					Belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan jadwal, ada beberapa prasarana angkutan umum massal yang sudah disiapkan tetapi belum operasional	<input checked="" type="checkbox"/>
8) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Jabodetabek	Koridor Kalideres-Tangerang, koridor Blok M-Ciledug, koridor Tangerang-Harmoni					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
c. Kereta Api							
1) Peningkatan Jalur Kereta Double Track	Tangerang-Jakarta					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Pembangunan Kereta Bandara	Bandara-Jakarta, Bandara-Serpong					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Pengembangan Jaringan Kereta dalam Kota	Menghubungkan PPK dengan SPPK					Belum dilaksanakan	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Penataan Stasiun Eksisting	Stasiun Tangerang, Stasiun Tanah Tinggi, Stasiun Batucapeper, Stasiun Poris					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
5) Pembangunan Stasiun Baru	Lokasi di PPK dan SPPK					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Angkutan Udara							
1) Pengembangan dan Pembangunan Bandara Soekarno Hatta	Bandara Internasional Soekarno Hatta					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan							
a. Pengadaan Stasiun BBG	Pada jalan arteri dan kolektor di seluruh wilayah kota					Belum dilaksanakan	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Mengembangkan Pipa Distribusi Gas	Tersebar di seluruh wilayah					Belum dilaksanakan	<input checked="" type="checkbox"/>
c. Pengembangan Jaringan Transmisi dan Gardu Listrik	Tersebar di seluruh wilayah					Belum dilaksanakan	<input checked="" type="checkbox"/>

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Keterangan	
		2013-2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032		
d. Pengembangan Jaringan Transmisi Bawah Tanah	Tersebar di seluruh wilayah					Belum dilaksanakan	<input checked="" type="checkbox"/>
e. Pemerataan Pelayanan PJU	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
f. Mengembangkan Energi Listrik Alternatif	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Sistem Jaringan Telekomunikasi							
a. Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Pengembangan Jaringan Bawah Tanah	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
c. Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Pengaturan Penggunaan Frekuensi Pemancar Radio	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Sistem Jaringan Sumberdaya Air							
a. Penataan Wilayah Sungai	Sungai Cisadane, Kali Angke, Saluran Pembuang Mookervart, Kali Cirarab, Kali Sabi, Kali Cantiga, Saluran Pembuang Perancis dan/atau Dadap, Kali Ledug, Kali Wetan, Saluran Pembuang Cipondoh					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Revitalisasi Situ	Situ Cipondoh, Situ Bulakan, Situ Gede, Situ Cangkring, Situ Bojong, Situ Kunciran					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
c. Penataan Jaringan Irigasi	Saluran Induk Irigasi Cisadane Utara, Saluran Induk Irigasi Cisadane Barat, Saluran Induk Irigasi Cisadane Timur, Saluran Induk Tanah Tinggi					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Pengembangan Sistem Jaringan Air Baku	Sungai Cisadane, Kali Angke, Saluran Induk Cisadane Timur, Saluran Induk Cisadane Barat, Saluran Induk Tanah Tinggi, Situ Cipondoh, Situ Bulakan, dan tandon air yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
e. Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Sistem Infrastruktur Perkotaan							
a. Air Minum							
1) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Keterangan	
		2013-2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032		
2) Pengembangan Unit Air Baku	Sungai Cisadane, Saluran Induk Cisadane Timur di Kecamatan Benda dan Batuceper, Saluran Induk Tanah Tinggi, Suplesi Bendung Nerogtog Kali Angke, dan Situ Cipondoh di Kecamatan Cipondoh dan Saluran Induk Cisadane Barat dan Situ Bulakan di Kecamatan Periuk					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Non Perpipaan	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Air Limbah							
1) Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dengan Sistem Setempat	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Peningkatan Sistem Air Limbah Domestik dengan Sistem Terpusat	IPAL Tanah Tinggi, IPLT Bawang, dan Kolam Oksidasi Perumnas 1					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Pengembangan Pengolahan Limbah Industri dengan Sistem Setempat	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Pengembangan Prasarana Limbah Industri Sistem Terpusat	Kawasan peruntukan industri					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
c. Persampahan							
1) Optimalisasi TPA Rawa Kucing	Kecamatan Neglasari					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Pengadaan Lokasi TPS	Di setiap kelurahan					Belum dilaksanakan karena belum tersedia lahannya	<input type="checkbox"/>
3) Pengembangan 3R pada TPS	Di setiap kelurahan					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Penyusunan Masterplan Persampahan	Kota Tangerang					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Drainase							
1) Penataan kembali sempadan sungai dan situ	Sungai Cisadane, Kali Angke, Saluran Pembuang Mookervart, Kali Cirarab, Kali Sabi, Kali Cantiga, Saluran Pembuang Perancis dan/atau Dadap, Kali Ledug, Kali Wetan, Saluran Pembuang Cipondoh, Situ Cipondoh, Situ Bulakan, Situ Gede, Situ Cangkring, Situ Bojong, Situ Kunci					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Keterangan	
		2013-2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032		
2) Pembangunan, peningkatan, dan pengembangan fungsi situ, tandon air, kolam dan sumur resapan	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Penyusunan masterplan drainase	Kota Tangerang					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
e. Jalan Pejalan Kaki							
1) Penyediaan Trotoar	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Penyediaan Penyeberangan Sebidang	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Penyediaan Penyeberangan Tidak Sebidang	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Pengembangan Kawasan Khusus Pejalan Kaki	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
f. Jalur Sepeda							
1) Pengembangan Jalur Sepeda	Koridor primer yang meliputi koridor Sungai Cisadane, koridor Hasyim Ashari – Cisadane – Sudirman dan koridor Gatot Subroto – Merdeka – Cisadane dan koridor sekunder yang meliputi koridor Daan Mogot – Cisadane, koridor Ciledug – Hasyim Ashari, koridor Cikokol – Cisadane dan koridor Kian Santang – Gandasari					Belum sepenuhnya dilaksanakan, karena yang sudah dilaksanakan sebagian adalah <i>bicycle land</i> (jalur untuk sepeda) bukan <i>bicycle way</i> (jalur khusus untuk sepeda saja)	<input type="checkbox"/>
g. Jalur Evakuasi Bencana							
1) Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana Banjir	Kecamatan Periuk, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Cibodas					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
h. Proteksi Kebakaran							
1) Peningkatan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kebakaran	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Penempatan Lokasi Hidran	Tersebar di seluruh wilayah					Belum dilaksanakan	<input type="checkbox"/>
3) Penyusunan Masterplan Sistem Proteksi Kebakaran	Kota Tangerang					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
i. Perparkiran							
j. Penyediaan Parkir Off Street	Tersebar di seluruh wilayah					Belum dilaksanakan	<input type="checkbox"/>

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Keterangan	
		2013-2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032		
k. Pembatasan Parkir On Street	Tersebar di seluruh wilayah					Belum dilaksanakan, karena pembatasan parkir <i>on street</i> baru bisa dilaksanakan apabila telah disediakan parkir <i>off street</i>	<input type="checkbox"/>
1) Pengembangan Konsep Park and Ride	Di setiap stasiun dan terminal					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
B. Perwujudan Pola Ruang							
1. Kawasan Lindung							
a. Kawasan Perlindungan Setempat							
1) Penataan Kawasan Sempadan Situ	Situ Cipondoh, Situ Bulakan, Situ Gede, Situ Cangkring, Situ Bojong, Situ Kunciran					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Penataan Kawasan Sempadan Sungai/Kali/Saluran Pembuang	Sungai Cisadane, Kali Angke, Saluran Pembuang Mookervart, Kali Cirarab, Kali Sabi, Kali Cantiga, Saluran Pembuang Perancis dan/atau Dadap, Kali Ledug, Kali Wetan, Saluran Pembuang Cipondoh					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Penataan Kawasan Sempadan Saluran Irigasi	Saluran Induk Irigasi Cisadane Utara, Saluran Induk Irigasi Cisadane Barat, Saluran Induk Irigasi Cisadane Timur, Saluran Induk Tanah Tinggi					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Ruang Terbuka Hijau							
1) Pembebasan dan Pengadaan Lahan Untuk RTH	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Pengembangan dan Penataan Taman Perumahan, Kelurahan, dan Kecamatan	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Pengembangan dan Penataan Taman Kota	Pusat Pelayanan Kota					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Pengembangan RTH Hutan Kota	Saluran Mookervart					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
5) Pengembangan RTH Sabuk Hijau	Kawasan peruntukan industri					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Pengembangan RTH Jalur Hijau	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Keterangan	
		2013-2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032		
7) Penataan Pemakaman sebagai RTH	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
8) Penataan dan Pengembangan Lapangan Olah Raga sebagai RTH	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
c. Kawasan Cagar Budaya							
1) Penataan dan Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya	Kecamatan Tangerang, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Neglasari					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Kawasan Rawan Bencana							
1) Perbaikan Sistem Drainase	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Penataan Kawasan Permukiman yang Terkena Banjir	Kecamatan Periuk, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Cibodas					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Kawasan Budidaya							
a. Kawasan Perumahan							
1) Pengembangan Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi, Sedang, dan Rendah	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Regenerasi Kawasan Perumnas	Kecamatan Karawaci dan Kecamatan Cibodas					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Pengembangan dan Pembangunan Hunian Vertikal	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Penataan Permukiman Kumuh	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
5) Pembangunan utilitas, prasarana dan sarana kawasan perumahan	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Kawasan Perdagangan dan Jasa							
1) Pengembangan dan Pembangunan Pasar Tradisional	Di setiap kecamatan					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Pengembangan dan Penataan Pusat Perbelanjaan	PPK dan SPPK					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Pengembangan dan Penataan Toko Modern	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Pengembangan Kawasan Perdagangan Khusus	Kecamatan Larangan					Belum dilaksanakan	<input type="checkbox"/>

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Keterangan	
		2013-2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032		
5) Pengembangan Kegiatan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, and Event/Exhibition</i>)	Kawasan penunjang bandara, PPK, dan SPPK					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Pengembangan Kegiatan Perdagangan dan Jasa dengan Konsep Superblok atau Mix Use	Jalan Arteri, PPK, dan SPPK					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
c. Kawasan Perkantoran Pemerintahan							
1) Perbaikan dan Pembangunan Kantor Pemerintahan	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Pengadaan Lahan untuk Kantor Pemerintahan	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Kawasan Peruntukan Industri							
1) Pengembangan dan Penataan Industri Rumah Tangga	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Mempertahankan Keberadaan Industri Sedang dan Industri Besar	Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Batuceper dan Kecamatan Periuk					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Membatasi Perkembangan Industri Eksisting	Kecamatan Karawaci, Kecamatan Tangerang, dan Kecamatan Cibodas					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Penataan Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Jatiuwung					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
5) Pengembangan Kegiatan Industri Kreatif	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
e. Kawasan Pariwisata							
1) Pengembangan rekreasi dan wisata alam	Sungai Cisadane, Situ Cipondoh, dan Situ Bulakan					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Revitalisasi kota lama	Kecamatan Tangerang					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Penataan dan pengembangan wisata belanja	Kecamatan Larangan					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Pengembangan wisata berbasis budaya lokal	Kecamatan Neglasari dan Kecamatan Pinang					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
5) Pengembangan kegiatan agro wisata	Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
f. Ruang Terbuka Non Hijau							

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Keterangan	
		2013-2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032		
1) Pembangunan dan Pengembangan Lahan Parkir	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Pembangunan dan Pengembangan Trotoar/ Pedestrian	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Pembangunan dan Pengembangan Lapangan	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
g. Ruang Evakuasi Bencana							
1) Pengembangan ruang untuk evakuasi bencana pada wilayah rawan banjir						Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
h. Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal							
1) Penataan Sektor Informal	Jalan Kisamaun dan Jalan Kiasnawi					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Pengembangan Sektor Informal	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
i. Kawasan Pertanian							
1) Mempertahankan Lahan Pertanian	Kecamatan Neglasari, Kecamatan Periuk, Kecamatan Benda					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Pengembangan Hortikultura	Kecamatan Neglasari, Kecamatan Periuk, Kecamatan Benda, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Pinang, Kecamatan Cipondoh					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Pengembangan Kawasan Peternakan	Kecamatan Periuk					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Pengembangan Kegiatan Perikanan	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
j. Kawasan Pelayanan Umum							
1) Pengembangan dan Pembangunan Sarana Pendidikan	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Pengembangan dan Pembangunan Sarana Peribadatan	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Pengembangan dan Pembangunan Sarana Kesehatan	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Pengembangan dan Pembangunan Sarana Pemerintahan	Tersebar di seluruh wilayah					Dilaksanakan sesuai jadwal	<input checked="" type="checkbox"/>

Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Keterangan
		2013-2017	2018-2022	2023-2027	2028-2032	
5) Pengembangan dan Penataan TPA	TPA Rawa Kucing	█				Dilaksanakan sesuai jadwal <input checked="" type="checkbox"/>
k. Kawasan Penunjang Bandar Udara			█			
1) Pengembangan dan Pembangunan Kegiatan Penunjang Bandara	Kecamatan Benda dan Kecamatan Neglasari	█				Dilaksanakan sesuai jadwal <input checked="" type="checkbox"/>
2) Pembangunan Kampung Haji	Kecamatan Benda dan Kecamatan Neglasari	█	█			Dilaksanakan sesuai jadwal <input checked="" type="checkbox"/>
3) Penataan Kegiatan di Sekitar Bandara	Kecamatan Benda dan Kecamatan Neglasari	█				Dilaksanakan sesuai jadwal <input checked="" type="checkbox"/>
1. Kawasan Bandar Udara			█			
1) Pengembangan dan Pembangunan Bandar Udara	Kecamatan Benda dan Kecamatan Neglasari	█	█			Dilaksanakan sesuai jadwal <input checked="" type="checkbox"/>
m. Kawasan Pertahanan dan Keamanan			█			
1) Penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Komplek Bataliyon Infantri 203 di Kecamatan Jatiuwung, Komplek Satuan Rudal (Satrudal) di Kecamatan Neglasari, Komando Distrik Militer (Kodim) 0506 dan Kepolisian Resort (Polres) Tangerang di Kecamatan Tangerang	█				Dilaksanakan sesuai jadwal <input checked="" type="checkbox"/>
C. Perwujudan Kawasan Strategis						
1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota	Pusat Kota Baru, Kota Lama, Sepanjang sisi jalan tol, Kawasan Peruntukan Industri, Sepanjang Sungai Cisadane, dan Penataan Situ	█	█			Dilaksanakan sesuai jadwal <input checked="" type="checkbox"/>
2. Penyusunan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota	Pusat Kota Baru, Kota Lama, Sepanjang sisi jalan tol, Kawasan Peruntukan Industri, Sepanjang Sungai Cisadane, dan Penataan Situ	█				Belum dilaksanakan sepenuhnya, hanya sampai naskah akademik saja <input checked="" type="checkbox"/>

Sumber: Perubahan RTRW Kota Tangerang Tahun 2012-2032



A.1.3. Tantangan Pembangunan Global


Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat, yang dihadiri oleh 193 pemimpin negara termasuk Indonesia, secara resm telah mengesahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai agenda pembangunan global yang baru untuk periode 2016-2030. Mulai tahun 2016, SDGs 2015-2030 secara resmi menggantikan Millennium Development Goals (MDGs) 2000-2015.


Sustainable Development Goals (SDGs) berisi 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 target. Seluruh tujuan SDGs merupakan satu kesatuan sistem pembangunan, tidak mementingkan satu isu tertentu. SDGs ini perlu diterjemahkan dan diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Tabel di bawah ini menguraikan 17 tujuan dan 169 target SDGs 2015-2030.




Tabel I-29 Tujuan dan Target Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2030


Tujuan	Target
 <p>Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang di manapun, dimana ukuran yang digunakan sekarang adalah mereka yang hidup dengan pendapatan kurang dari \$ 1,25 perhari. (1.1) 2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya separuh proporsi dari laki-laki, perempuan dan anak-anak segala umur yang hidup dalam kemiskinan dalam segala dimensi menurut definisi nasional. (1.2) 3. Di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level, dan pada tahun 2030 sudah mencapai cakupan yang cukup substansial terhadap yang miskin dan rentan. (1.3) 4. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua laki-laki dan perempuan, terutama mereka yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber-sumber ekonomi, juga terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi mikro. (1.4) 5. Pada tahun 2030, membangun daya tahan mereka yang miskin dan yang berada dalam situasi rentan dan mengurangi situasi tanpa perlindungan dan kerentanan terhadap kejadian-kejadian ekstrim yang berhubungan dengan perubahan iklim, juga kejutan dan bencana ekonomi, sosial dan lingkungan lainnya. (1.5) 6. Memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang diperluas, dalam rangka menyediakan alat-alat yang cukup dan mudah diprediksi oleh negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, untuk mengimplementasikan program dan kebijakan yang dapat mengakhiri kemiskinan dalam semua dimensinya. (1.a) 7. Menciptakan kerangka kerja kebijakan pada level nasional, regional dan internasional, yang berdasarkan pada strategi pembangunan yang berpihak pada yang miskin dan gender sensitive, untuk mempercepat investasi dalam aksi-aksi pengentasan kemiskinan. (1.b)



Tujuan	Target
 <p>Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 8. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses bagi seluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap pangan yang aman, bernutrisi dan berkecukupan sepanjang tahun. (2.1) 9. Pada tahun 2030, mengakhiri segala macam bentuk malnutrisi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target-target yang sudah disepakati secara internasional tentang gizi buruk dan penelantaran pada anak balita, dan mengatasi kebutuhan nutrisi untuk para remaja putri, ibu hamil dan menyusui dan manula. (2.2) 10. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas agrikultur dan pendapatan dari produsen makanan berskala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara terhadap tanah, sumber-sumber produksi lainnya dan juga input, pengetahuan, layanan finansial, pasar dan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dan lapangan kerja bukan pertanian. (2.3) 11. Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan mengimplementasikan praktek-praktek agrikultur yang tahan lama yang dapat menaikkan produktivitas dan produksi, yang dapat membantu menjaga ekosistem, yang dapat menguatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas lahan dan tanah. (2.4) 12. Pada tahun 2020, memelihara keanekaragaman genetik benih, mengolah tanaman dan persawahan serta melestarikan hewan jinak dan spesies liar yang terkait, termasuk melalui bank benih dan tumbuhan yang dipelihara dengan baik keragamannya pada level nasional, regional dan internasional, dan mendukung akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan setara yang berasal dari pemanfaatan sumber-sumber genetik dan pengetahuan tradisional, seperti yang telah disepakati secara internasional. (2.5) 13. Menaikkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang diperluas, dalam hal infrastruktur pedesaan, penelitian pertanian dan perluasan pelayanan, pengembangan teknologi dan tanaman serta bank genetik ternak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi agrikultur di negara-negara berkembang, terutama di negara-negara kurang berkembang. (2.a) 14. Memperbaiki dan mencegah pembatasan perdagangan dan distorsi dalam pasar agrikultur dunia, termasuk melalui penghilangan bersamaan dari segala bentuk subsidi ekspor agrikultur dan semua ukuran ekspor lainnya yang memiliki efek yang sama, sesuai dengan mandat Putaran Pembangunan Doha (2.b) 15. Mengadopsi ukuran-ukuran yang dapat memastikan fungsi yang layak bagi pasar komoditi pangan dan turunannya dan memfasilitasi akses terhadap informasi pasar, termasuk persediaan pangan, dalam rangka untuk membatasi pergolakan ekstrim harga bahan pangan. (2.c)
 <p>Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 16. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran. (3.1) 17. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita, dimana setiap negara menargetkan untuk mengurangi kematian neonatal setidaknya menjadi kurang dari 12 per 1000 kelahiran dan kematian balita menjadi serendah 25 per 1000 kelahiran. (3.2) 18. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya. (3.3) 19. Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, melalui tindakan pencegahan dan pengobatan serta menaikkan kesehatan mental


Tujuan	Target
	<p>dan kesejahteraan. (3.4)</p> <p>20. Memperkuat pencegahan dan pengobatan dari penyalahgunaan zat berbahaya, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan yang berbahaya dari alkohol. (3.5)</p> <p>21. Pada tahun 2020, secara global mengurangi setengah dari angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas. (3.6)</p> <p>22. Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk perencanaan, informasi, dan pendidikan keluarga, dan mengintegrasikan kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional. (3.7)</p> <p>23. Mencapai cakupan layanan kesehatan universal, termasuk lindungan resiko finansial, akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua. (3.8)</p> <p>24. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi angka kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya dan juga polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah. (3.9)</p> <p>25. Menguatkan implementasi dari Kerangka Kerja Konvensi WHO mengenai Kontrol terhadap Tembakau di semua negara, sebagaimana layaknya. (3.a)</p> <p>26. Mendukung riset dan pengembangan dari vaksin dan obat-obatan untuk penyakit menular dan tidak menular, yang secara khusus mempengaruhi negara-negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat-obatan dasar dan vaksin yang terjangkau, sesuai dengan Deklarasi Doha mengenai Perjanjian TRIPS dan Kesehatan Publik, yang menegaskan hak dari negara-negara berkembang untuk menggunakan secara penuh provisi dalam Perjanjian Aspek Terkait Perdagangan Hak Properti Intelektual mengenai fleksibilitas untuk melindungi kesehatan publik, dan terutama akses terhadap obat-obatan untuk semua (3.b)</p> <p>27. Secara substansial meningkatkan pendanaan dan untuk perekrutan, pengembangan, training dan daya serap tenaga kerja kesehatan di negara-negara berkembang, terutama di negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil. (3.c)</p> <p>28. Menguatkan kapasitas di setiap negara, khususnya di negara berkembang untuk peringatan dini, pengurangan resiko dan manajemen resiko kesehatan nasional dan global. (3.d)</p>
 <p>Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang</p>	<p>29. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif. (4.1)</p> <p>30. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapat akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak secara dini yang berkualitas, juga pengasuhan dan pendidikan pra-dasar agar mereka siap untuk masuk ke pendidikan dasar. (4.2)</p> <p>31. Pada tahun 2030, memastikan akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas. (4.3)</p> <p>32. Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha. (4.4)</p> <p>33. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap semua tingkatan pendidikan dan training kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk yang memiliki disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan. (4.5)</p> <p>34. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan sejumlah orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai kemampuan baca-tulis dan kemampuan berhitung. (4.6)</p>



Tujuan	Target
	<p>35. Pada tahun 2030, memastikan bahwa mereka yang belajar mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, HAM, kesetaraan gender, mendukung budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan. (4.7)</p> <p>36. Membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas dan menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. (4.a)</p> <p>37. Pada 2020, secara substansial memperbanyak jumlah beasiswa yang tersedia untuk negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara Afrika, untuk masuk ke pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan dan teknologi informasi dan komunikasi, teknik, program teknik dan sains, di negara-negara maju dan negara berkembang lainnya. (4.b)</p> <p>38. Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil. (4.c)</p>
 <p>Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan</p>	<p>39. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimana saja. (5.1)</p> <p>40. Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (<i>trafficking</i>) dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya. (5.2)</p> <p>41. Menghapuskan segala semua praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa dan sunat pada perempuan. (5.3)</p> <p>42. Menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama didalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional. (5.4)</p> <p>43. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik. (5.5)</p> <p>44. Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana telah disepakati dalam Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan dan Aksi Platform Beijing dan dokumen hasil dari konferensi review keduanya. (5.6)</p> <p>45. Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk property lainnya pelayanan finansial, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional. (5.a)</p> <p>46. Memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pemberdayaan perempuan. (5.b)</p> <p>47. Mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas dan penegakkan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level. (5.c)</p>


Tujuan	Target
 <p>Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang</p>	<p>48. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua. (6.1)</p> <p>49. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang layak dan adil untuk semua dan mengakhiri buang air di tempat terbuka, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam situasi rentan. (6.2)</p> <p>50. Pada tahun 2030, memperbaiki kualitas air dengan mengurangi polusi, menghapuskan pembuangan limbah dan meminimalisir pembuangan bahan kimia dan materi berbahaya, mengurangi separuh dari proporsi air limbah yang tidak diolah dan secara substansial meningkatkan daur ulang dan penggunaan ulang yang aman secara global. (6.3)</p> <p>51. Pada tahun 2030, secara substantif meningkatkan penggunaan air secara efisien di semua sektor dan memastikan pengambilan dan suplai air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang mengalami kelangkaan air. (6.4)</p> <p>52. Pada tahun 2030, mengimplementasikan pengelolaan sumber air yang terintegrasi (IWRM) pada setiap level, termasuk melalui kerjasama antarbatas selayaknya. (6.5)</p> <p>53. Pada tahun 2020, melindungi dan memperbaiki ekosistem terkait air, termasuk pegunungan, hutan, rawa, sungai, resapan air dan danau. (6.6)</p> <p>54. Pada tahun 2030, memperbanyak kerjasama internasional dan dukungan pengembangan kapasitas kepada negara-negara berkembang dalam aktivitas dan program terkait air dan sanitasi, termasuk water harvesting, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, teknologi daur ulang dan penggunaan ulang. (6.a)</p> <p>55. Mendukung dan menguatkan partisipasi masyarakat lokal dalam memperbaiki pengelolaan air dan sanitasi. (6.b)</p>
 <p>Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang</p>	<p>56. Pada tahun 2030, memastikan adanya akses universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan modern. (7.1)</p> <p>57. Pada tahun 2030, meningkatkan secara substantif proporsi energi terbarukan dalam energi campuran global. (7.2)</p> <p>58. Pada tahun 2030, menggandakan laju perbaikan efisiensi energi. (7.3)</p> <p>59. Pada tahun 2030, memperbanyak kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses terhadap riset dan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi dan teknologi bahan bakar fosil yang lebih maju dan bersih, dan mendorong investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih. (7.a)</p> <p>60. Pada tahun 2030, menambah infrastruktur dan meningkatkan mutu teknologi untuk supply pelayanan energi modern dan berkelanjutan untuk semua negara berkembang, khususnya di negara-negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil, dan negara berkembang terkungkung daratan, sesuai dengan bantuan program masing-masing. (7.b)</p>
 <p>Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan</p>	<p>61. Memelihara pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan situasi nasional dan, khususnya, setidaknya mempertahankan 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto pertahunnya di negara-negara kurang berkembang. (8.1)</p> <p>62. Mencapai level yang lebih tinggi untuk produktivitas ekonomi melalui disertifikasi, peningkatan mutu teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus terhadap sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah lebih dan padat karya. (8.2)</p> <p>63. Mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas-aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan.</p>



Tujuan	Target
pekerjaan yang layak bagi semua orang	<p>(8.3)</p> <p>64. Memperbaiki secara progresif, sampai tahun 2030, efisiensi sumberdaya global dalam hal konsumsi dan produksi dan berupaya untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan kerangka kerja 10 tahun program tentang konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dengan dipelopori negara-negara maju. (8.4)</p> <p>65. Pada tahun 2030, mencapai ketenagakerjaan secara penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda dan orang dengan disabilitas, juga kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama. (8.5)</p> <p>66. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak berpendidikan atau terlatih. (8.6)</p> <p>67. Mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk mengentaskan kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan menegakkan larangan dan eliminasi bentuk terburuk dari tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan pemanfaatan serdadu anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri segala bentuk tenaga kerja anak. (8.7)</p> <p>68. Melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja dalam situasi genting. (8.8)</p> <p>69. Pada tahun 2030, merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung turisme yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus mendukung budaya dan produk lokal. (8.9)</p> <p>70. Menguatkan kapasitas institusi keuangan domestik untuk mendorong dan meluaskan akses terhadap perbankan, asuransi dan layanan pendanaan untuk semua. (8.10)</p> <p>71. Meningkatkan Bantuan untuk Perdagangan (Aid for Trade) untuk negara-negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui Kerangka Kerja Terintegrasi yang Diperluas untuk Bantuan Teknis Terkait Perdagangan bagi Negara-negara Kurang Berkembang. (8.a)</p> <p>72. Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global bagi angkatan kerja muda dan mengimplementasikan Pakta Kerja Global milik Organisasi Buruh Internasional (ILO). (8.b)</p>
 <p>Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi</p>	<p>73. Membangun infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan dan tahan lama, termasuk infrastruktur regional dan antar batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan berfokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semua. (9.1)</p> <p>74. Mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan, pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan bagian industri terhadap penciptaan lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan situasi nasional, dan menggandakan bagian industri di negara kurang berkembang. (9.2)</p> <p>75. Meningkatkan akses industri skala kecil dan usaha skala kecil lainnya, khususnya di negara-negara berkembang terhadap layanan pendanaan, termasuk kredit yang terjangkau dan digabungkan dengan value chains dan pasar. (9.3)</p> <p>76. Pada tahun 2030, meningkatkan mutu infrastruktur dan menambahkan komponen pada industri agar dapat berkelanjutan, dengan ditambahkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengadopsi teknologi bersih dan ramah lingkungan dan proses industrial, dimana semua negara melakukan aksi ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. (9.4)</p> <p>77. Menambah penelitian ilmiah, meningkatkan kemampuan teknologi dari sektor industri di semua negara, khususnya negara berkembang, termasuk, pada tahun 2030, mendorong inovasi dan</p>

Tujuan	Target
	<p>secara substantif meningkatkan jumlah riset dan tenaga pembangunan per 1 juta orang dan juga riset publik dan swasta serta pengeluaran pembangunan. (9.5)</p> <p>78. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang tahan lama dan berkelanjutan di negara-negara berkembang melalui dukungan finansial, teknologi dan teknis yang diperbanyak untuk negara-negara Afrika, negara kurang berkembang, negara berkembang terkungkung daratan dan negara berkembang kepulauan kecil. (9.a)</p> <p>79. Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan kondisi kebijakan yang kondusif untuk, diantaranya, diversifikasi industri dan penambahan nilai komoditi. (9.b)</p> <p>80. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan berupaya untuk menyediakan akses yang universal dan terjangkau terhadap internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. (9.c)</p>
 <p>Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara</p>	<p>81. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan memelihara pertumbuhan pendapatan dari 40 persen populasi yang paling bawah di tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. (10.1)</p> <p>82. Pada tahun 2030, memberdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi dan politik bagi semua, tanpa melihat usia, jenis kelamin, disabilitas, bangsa, suku, asal, kelompok etnis, agama atau ekonomi atau status lainnya. (10.2)</p> <p>83. Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan/outcome, termasuk dengan mengeliminasi diskriminasi terhadap hukum, kebijakan dan praktek-praktek dan mendorong adanya legislasi, kebijakan dan aksi yang sepantasnya untuk hal ini. (10.3)</p> <p>84. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan. (10.4)</p> <p>85. Memperbaiki regulasi dan memonitor pasar dan institusi keuangan global dan menguatkan implementasi dari regulasi tersebut. (10.5)</p> <p>86. Memastikan representasi yang lebih banyak dan suara untuk negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan di institusi-institusi ekonomi dan keuangan global internasional agar dapat menjadi institusi yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan sah. (10.6)</p> <p>87. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang tertata, aman, teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui implementasi kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik. (10.7)</p> <p>88. Mengimplementasikan prinsip perlakuan khusus dan diferensial untuk negara-negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, sesuai dengan perjanjian WTO. (10.a)</p> <p>89. Mendorong bantuan pembangunan resmi (ODA) dan aliran finansial, termasuk investasi asing langsung (FDI), untuk negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang kepulauan kecil dan negara berkembang terkungkung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional masing-masing. (10.b)</p> <p>90. Pada tahun 2030, mengurangi sampai dengan kurang dari 3 persen dari biaya transaksi pengiriman migran dan menghilangkan koridor pengiriman yang berbiaya lebih dari 5 persen. (10.c)</p>
 <p>Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman,</p>	<p>91. Pada tahun 2030, memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu pemukiman kumuh. (11.1)</p> <p>92. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua, meningkatkan keamanan jalan, dengan memperbanyak transportasi publik, dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan dari mereka yang berada di situasi rentan, perempuan, anak-anak,</p>

Tujuan	Target
berketahanan dan berkelanjutan	<p>orang dengan disabilitas dan manula. (11.2)</p> <p>93. Pada tahun 2030, meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan pemukiman yang partisipatoris, terintegrasi dan berkelanjutan di setiap negara. (11.3)</p> <p>94. Menguatkan upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan natural dunia. (11.4)</p> <p>95. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak dan secara substantif mengurangi kerugian ekonomi langsung yang berhubungan dengan produk domestik bruto global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana terkait air, dengan fokus kepada melindungi yang miskin dan yang berada di situasi rentan. (11.5)</p> <p>96. Pada tahun 2030, mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan perkapita di perkotaan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara dan kotamadya dan manajemen limbah lainnya. (11.6)</p> <p>97. Pada tahun 2030, menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, dan hijau, terutama bagi perempuan dan anak-anak, manula dan orang dengan disabilitas. (11.7)</p> <p>98. Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan yang positif diantara area urban, peri-urban dan rural dengan menguatkan perencanaan pembangunan nasional dan regional. (11.a)</p> <p>99. Pada tahun 2020, secara substantif meningkatkan jumlah kota dan pemukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang terintegrasi menuju inklusif, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, tahan terhadap bencana, dan mengembangkan dan mengimplementasikan, sejalan dengan Kerangka Kerja Sendai untuk Resiko Pengurangan Bencana 2015-2030, dan manajemen resiko bencana yang holistic pada semua level. (11.b)</p> <p>100. Mendukung negara-negara kurang berkembang, termasuk melalui bantuan finansial dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tahan lama dengan memanfaatkan bahan material lokal. (11.c)</p>
 <p>Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan</p>	<p>101. Mengimplementasikan Kerangka Kerja 10 tahun dari program konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, di mana seluruh negara melakukan aksi, dengan dipelopori negara-negara maju, dengan melihat pembangunan dan kemampuan dari negara-negara berkembang. (12.1)</p> <p>102. Pada tahun 2030, mencapai manajemen berkelanjutan dan penggunaan yang efisien dari sumber daya alam. (12.2)</p> <p>103. Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian pasca panen. (12.3)</p> <p>104. Pada tahun 2020, meraih manajemen ramah lingkungan dari bahan kimia dan limbah lainnya sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan tersebut ke udara, air dan tanah dalam rangka meminimalisir dampak buruk bahan tersebut terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. (12.4)</p> <p>105. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui tindakan pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali. (12.5)</p> <p>106. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan skala besar dan transnasional untuk mengadopsi praktek-praktek yang berkelanjutan dan untuk memasukkan informasi yang berkelanjutan didalam siklus laporan mereka. (12.6)</p> <p>107. Mendukung praktek-praktek pengadaan barang publik yang</p>

Tujuan	Target
	<p>berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional. (12.7)</p> <p>108. Pada tahun 2030, memastikan bahwa setiap orang di manapun mendapatkan informasi yang relevan dan kesadaran untuk pembangunan dan gaya hidup yang berkelanjutan secara harmonis dengan alam. (12.8)</p> <p>109. Mendukung negara-negara berkembang untuk menguatkan kapasitas ilmiah dan teknologi agar dapat bergerak menuju pola-pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. (12.a)</p> <p>110. Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal. (12.b)</p> <p>111. Merasionalisasikan subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang justru mendorong konsumsi berlebih dengan cara menghilangkan penyimpangan pasar, sesuai dengan situasi nasional, termasuk dengan merestrukturisasi pajak dan secara bertahap mengurangi subsidi yang berbahaya, dimana adanya, untuk merefleksikan dampaknya terhadap lingkungan, dengan melihat pada kebutuhan spesifik dan kondisi dari negara-negara berkembang dan meminimalisir dampak buruk terhadap pembangunan negara-negara tersebut dengan cara yang melindungi kaum miskin dan masyarakat terkena dampak. (12.c)</p>
 <p>Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya</p>	<p>112. Menguatkan daya tahan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya hal-hal yang berkaitan dengan iklim dan bencana alam di semua negara. (13.1)</p> <p>113. Mengintegrasikan ukuran-ukuran perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. (13.2)</p> <p>114. Memperbaiki pendidikan, penyadaran dan juga kapasitas baik manusia maupun institusi terhadap mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak dini. (13.3)</p> <p>115. Mengimplementasikan komitmen yang dibuat oleh pihak negara-negara maju kepada Kerangka Kerja Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim dengan tujuan untuk memobilisasikan secara bersama \$100 milyar pertahunnya pada tahun 2020 dari segala sumber untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi dan transparansi terhadap implementasinya dan secara penuh mengoperasionalkan Dana Iklim Hijau (GCF) melalui kapitalisasi secepat mungkin. (13.a)</p> <p>116. Mendukung mekanisme untuk peningkatan kapasitas untuk perencanaan dan manajemen terkait perubahan iklim yang efektif di negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil, dengan berfokus pada perempuan, remaja, dan masyarakat lokal dan marjinal. (13.b)</p>
 <p>Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan</p>	<p>117. Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis polusi kelautan, terutama dari aktivitas daratan, termasuk serpihan sisa barang laut dan polusi bahan makanan. (14.1)</p> <p>118. Pada tahun 2020, secara berkelanjutan mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat daya tahannya, dan melakukan aksi restorasi agar dapat mencapai kelautan yang sehat dan produktif. (14.2)</p> <p>119. Meminimalisir dan mengatasi dampak dari bertambahnya keasaman air laut, termasuk memperbanyak kerjasama ilmiah pada setiap level. (14.3)</p> <p>120. Pada tahun 2020, secara efektif meregulasi panen dan pengambilan ikan secara berlebihan, pemancingan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak teregulasi, juga praktek-praktek pemancingan yang destruktif serta mengimplementasikan perencanaan manajemen berbasis ilmiah agar dapat mengembalikan persediaan ikan secepat mungkin, setidaknya pada level dimana dapat memproduksi hasil</p>

Tujuan	Target
	<p>maksimum yang berkelanjutan sebagaimana karakteristik biologis masing-masing ikan. (14.4)</p> <p>121. Pada tahun 2020, mengkonservasi setidaknya 10 persen dari area pesisir laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. (14.5)</p> <p>122. Pada tahun 2020, melarang bentuk tertentu dari subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap kapasitas berlebih dan pengambilan ikan yang berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan yang ilegal, tidak melaporkan dan tidak teregulasi dan menahan diri dari memperkenalkan bentuk subsidi yang demikian, dengan kesadaran bahwa perlakuan khusus dan diferensial yang layak dan efektif untuk negara-negara berkembang dan kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi WTO. (14.6)</p> <p>123. Pada tahun 2030, meningkatkan keuntungan ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumberdaya kelautan, termasuk melalui manajemen yang berkelanjutan dari perikanan, budidaya pariwisata perairan. (14.7)</p> <p>124. Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas riset dan transfer teknologi kelautan, dengan melihat pada Kriteria dan Panduan Komisi Antar Pemerintah Oceanografi mengenai Transfer Teknologi Kelautan, agar dapat meningkatkan kesehatan laut dan memperbanyak kontribusi keanekaragaman hayati laut terhadap pembangunan negara-negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang. (14.a)</p> <p>125. Menyediakan akses terhadap sumber daya kelautan dan pasar bagi nelayan kecil. (14.b)</p> <p>126. Memperbanyak konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan terhadap laut dan sumber dayanya, seperti yang tertera di paragraf 158 dari “The Future We Want” (Masa Depan yang Kami Inginkan). (14.c)</p>
 <p>Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati</p>	<p>127. Pada tahun 2020, memastikan bahwa konservasi, restorasi dan penggunaan yang berkelanjutan dari ekosistem terestrial dan air daratan dan pelayanannya, khususnya hutan, rawa, pegunungan dan daratan, sejalan dengan kewajiban dibawah perjanjian internasional. (15.1)</p> <p>128. Pada tahun 2020, mendukung pengimplementasian manajemen yang berkelanjutan untuk semua tipe hutan, menghambat deforestasi, merestorasi hutan terdegradasi dan secara substansial meningkatkan aforestasi dan reforestasi secara global. (15.2)</p> <p>129. Pada tahun 2030, memerangi desertifikasi, merestorasi lahan dan tanah terdegradasi, termasuk lahan yang kena dampak desertifikasi, kekeringan, banjir, dan berupaya untuk mencapai dunia yang terdegradasi secara netral. (15.3)</p> <p>130. Pada tahun 2030, memastikan konservasi ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayati, agar dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memberikan manfaat yang esensial bagi pembangunan berkelanjutan. (15.4)</p> <p>131. Melakukan aksi segera dan signifikan untuk mengurangi degradasi natural habitat, menghambat hilangnya keanekaragaman hayati dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah kepunahan spesies terancam/langka. (15.5)</p> <p>132. Mendorong pembagian keuntungan yang adil dan setara yang berasal dari pemanfaatan sumber-sumber genetika dan mendukung akses yang layak terhadap sumber-sumber tersebut, sebagaimana disepakati secara internasional. (15.6)</p> <p>133. Melakukan aksi segera untuk mengakhiri perburuan dan penjualan spesies flora dan fauna yang dilindungi dan mengatasi baik penawaran maupun permintaan produk satwa liar ilegal. (15.7)</p> <p>134. Pada tahun 2020, mengenalkan upaya-upaya yang dapat mencegah</p>

Tujuan	Target
	<p>pengenalan dan secara signifikan mengurangi dampak dari invasi spesies asing terhadap ekosistem tanah dan air yang dapat mengurangi jumlah spesies prioritas. (15.8)</p> <p>135. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan lokal, proses pembangunan, dan strategi pengentasan kemiskinan. (15.9)</p> <p>136. Memobilisasi dan secara signifikan meningkatkan sumber daya finansial dari segala macam sumber untuk melakukan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem. (15.a)</p> <p>137. Memobilisasi sumber daya yang signifikan dari semua sumber dan semua level untuk mendanai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menyediakan insentif yang sesuai kepada negara-negara berkembang untuk dapat melaksanakan model pengelolaan tersebut, termasuk untuk konservasi dan reforestasi. (15.b)</p> <p>138. Memperbanyak dukungan global untuk upaya-upaya memerangi perburuan dan penjualan spesies dilindungi, termasuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mendapatkan kesempatan kesejahteraan yang berkelanjutan. (15.c)</p>
 <p>Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan</p>	<p>139. Secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak. (16.1)</p> <p>140. Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan segala macam bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak. (16.2)</p> <p>141. Mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semua. (16.3)</p> <p>142. Pada 2030, secara signifikan mengurangi aliran keuangan dan senjata terlarang, memperkuat pemulihan dan pengembalian asset yang dicuri dan memerangi semua jenis tindak kejahatan kriminal yang terorganisir. (16.4)</p> <p>143. Secara substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk. (16.5)</p> <p>144. Membangun institusi-institusi yang akuntabel dan transparan di semua level. (16.6)</p> <p>145. Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di semua level. (16.7)</p> <p>146. Memperlebar dan menguatkan partisipasi dari negara-negara berkembang dalam institusi dan tata-kelola global. (16.8)</p> <p>147. Pada tahun 2030, menyediakan identitas legal bagi semua, termasuk akta kelahiran. (16.9)</p> <p>148. Memastikan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional. (16.10)</p> <p>149. Memperkuat institusi nasional yang terkait, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk pengembangan kapasitas pada semua level, khususnya di negara-negara berkembang, untuk mencegah kekerasan dan memerangi terorisme serta kejahatan. (16.a)</p> <p>150. Mendukung dan mendorong hukum dan kebijakan non-diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan. (16.b)</p>
 <p>Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (<i>means of implementation</i>) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan</p>	<p>151. Menguatkan mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui bantuan internasional kepada negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas domestik dalam hal pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya. (17.1)</p> <p>152. Negara-negara maju mengimplementasikan secara penuh komitmen ODA mereka, termasuk komitmen yang dibuat oleh banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen dari ODA/GNI bagi negara-negara berkembang dan 0,15 – 0,20 persen dari ODA/GNI bagi negara-negara kurang berkembang; pemberi ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk dapat memberikan setidaknya 0,20 persen dari ODA/GNI kepada negara-negara kurang berkembang. (17.2)</p> <p>153. Memobilisasi tambahan sumber daya finansial untuk negara</p>

Tujuan	Target
	berkembang dari berbagai sumber. (17.3)
	154. Membantu negara berkembang dalam mencapai pengelolaan hutang jangka-panjang yang berkelanjutan melalui kebijakan yang terkoordinir yang ditujukan untuk membantu perkembangan pendanaan hutang, penghapusan hutang dan restrukturisasi hutang, sebagaimana layaknya, dan mengatasi hutang dari negara miskin berutang banyak untuk mengurangi beban hutang. (17.4)
	155. Mengadopsi dan mengimplementasikan regim yang mendukung investasi bagi negara kurang berkembang. (17.5)
	156. Memperbanyak kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan segitiga regional dan internasional mengenai akses terhadap sains, teknologi dan inovasi dan memperbanyak berbagi pengetahuan mengenai syarat yang disepakati bersama, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik diantara mekanisme yang sudah ada, khususnya pada level PBB, dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. (17.6)
	157. Mendukung perkembangan, transfer, diseminasi dan difusi teknologi ramah lingkungan kepada negara-negara berkembang dengan syarat lunak, termasuk syarat konsesi dan preferensial, sebagaimana yang telah disepakati bersama. (17.7)
	158. Secara penuh mengoperasionalkan bank teknologi dan sains, mekanisme pengembangan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan memperbanyak penggunaan teknologi yang memungkinkan, terutama teknologi informasi dan komunikasi. (17.8)
	159. Meningkatkan dukungan internasional untuk mengimplementasikan pengembangan kapasitas yang efektif dan mengena di negara-negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk mengimplementasikan semua tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama segitiga. (17.9)
	160. Mendorong system perdagangan multilateral yang universal, berdasarkan aturan, non-diskriminatif dan setara di bawah WTO, termasuk melalui konklusi negosiasi dibawah Agenda Pembangunan Doha. (17.10)
	161. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara-negara berkembang, dengan pandangan untuk menggandakan porsi ekspor global negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. (17.11)
	162. Menyadari implementasi yang tepat waktu dari akses terhadap pasar bebas-bea dan bebas-quota untuk seterusnya, bagi negara-negara kurang berkembang, konsisten dengan keputusan WTO, termasuk dengan memastikan bahwa aturan asal (rules of origin) yang preferensial yang diterapkan bagi import dari negara kurang berkembang bersifat transparan dan sederhana, dan berkontribusi untuk memfasilitasi akses pasar. (17.12)
	163. Memperbaiki stabilitas ekonomi makro global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan. (17.13)
	164. Meningkatkan koherensi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan. (17.14)
	165. Menghargai ruang kebijakan dan kepemimpinan masing-masing negara untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. (17.15)
	166. Memperluas kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan multi-pihak yang dapat memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber daya finansial, untuk mendukung pencapaian Tujuan di semua negara, terutama negara berkembang. (17.16)
	167. Mendorong dan mendukung kemitraan publik, publik-swasta, dan masyarakat sipil yang efektif, yang dibangun dari pengalaman dan strategi dalam bermitra. (17.17)

Tujuan	Target
	<p>168. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan terhadap pengembangan kapasitas ke negara-negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil, untuk secara signifikan meningkatkan ketersediaan data yang bermutu tinggi, tepat waktu dan dapat diandalkan, diagregat menurut pendapatan, gender, usia, suku, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dalam konteks nasional. (17.18)</p> <p>169. Pada tahun 2030, membangun dari inisiatif-inisiatif yang ada untuk mengembangkan ukuran kemajuan terhadap pembangunan berkelanjutan yang melengkapi produk domestik bruto dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara-negara berkembang. (17.19)</p>

Sumber: Diolah dari SDGs 2030

A.1.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan potensi, permasalahan dan tantangan sebagaimana diuraikan di atas, maka berikut diidentifikasi berbagai isu strategis pembangunan Kota Tangerang yang diidentifikasi berdasarkan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023 beserta permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Tabel I-30 Isu Strategis Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019-2023

Isu Strategis/ Sub Isu Strategis	Permasalahan		
	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar (Penyebab) Permasalahan
1	Daya Saing Sumber Daya Manusia		
1.1	Pendidikan		
	1.1.1	Akses, kualitas dan daya saing pendidikan yang belum memadai	1.1.1.1 Akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan SMP/MTs yang berkualitas belum terpenuhi sepenuhnya 1.1.1.2 Kualitas pendidikan masyarakat belum mendukung daya saing SDM masyarakat
			1 Daya tampung SMP/MTs/Sederajat belum memadai 1 Kualitas sarana pendidikan (PAUD/TK/RA; SD/MI; SMP/MTs) belum sepenuhnya memadai, layak dan sesuai dengan standar 2 Tingkat kompetensi pendidik belum sepenuhnya sesuai standar ideal 3 Tingkat pelayanan pengelolaan pendidikan (manajemen, kurikulum) belum memadai 4 Pendidikan non formal belum optimal
	1.1.2	Pendidikan karakter akhlak mulia dan budaya lokal belum optimal	1.1.2.1 Kurikulum pendidikan karakter dan budaya lokal belum dikembangkan dan diterapkan secara optimal
			1 Kurikulum pendidikan karakter (akhlak mulia) belum dikembangkan secara memadai
	1.1.3	Budaya gemar membaca masyarakat belum tumbuh dengan baik	1.1.3.1 Cakupan literasi dan gemar membaca masyarakat belum memadai
			1 Kapasitas pelayanan perpustakaan belum memadai 2 Kesadaran masyarakat untuk membaca belum maksimal
1.2	Kesehatan		
	1.2.1	Derajat kesehatan yang belum memadai	1.2.1.1 Kualitas gizi masyarakat belum sepenuhnya baik 1.2.1.2 Kesehatan lingkungan dan pola hidup bersih dan sehat (PHNS) masyarakat belum memadai 1.2.1.3 Kematian ibu melahirkan masih terjadi
			1 Perilaku hidup masyarakat yang sadar gizi belum tumbuh dengan baik 2 Edukasi gizi seimbang kepada masyarakat belum maksimal 1 Perilaku pola hidup masyarakat yang sadar sehat (PHBS) belum tumbuh dengan baik 2 Fasilitas sanitasi lingkungan permukiman belum memadai 1 Kesadaran masyarakat untuk

Isu Strategis/ Sub Isu Strategis		Permasalahan							
		Permasalahan Pokok		Permasalahan		Akar (Penyebab) Permasalahan			
				1.2.1.4	Pelayanan kesehatan belum optimal		pemeriksaan ibu melahirkan belum maksimal		
						2	Peran posyandu belum optimal		
						1	Daya tampung fasilitas kesehatan belum memadai		
						2	Ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan belum memadai		
						1	Keterbatasan fasilitas olahraga		
				1.2.1.5	Pemasyarakatan olahraga masyarakat belum optimal	2	Gerakan pemasyarakatan olahraga belum optimal		
1.3	Kemiskinan	1.3.1	Jumlah masyarakat miskin masih cukup tinggi	1.3.1.1	Pemberdayaan masyarakat miskin secara terintegrasi dan evaluasi perkembangan PSKS di kelurahan belum optimal dilakukan	1	Akses terhadap perumahan yang layak huni terbatas		
						2	Akses terhadap pemenuhan kebutuhan pangan pokok terbatas		
						3	Akses terhadap lapangan kerja terbatas		
						4	Akses status kepemilikan aset belum memadai		
						5	Aktivitas usaha ekonomi mikro belum berkembang dengan baik		
						6	Akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas yang terbatas		
						7	Implementasi program penanggulangan kemiskinan (PKH, KUBE, JKN KIS, KIP, PSKS, dll) belum optimal berjalan		
						1	Pendataan dan verifikasi masyarakat miskin belum optimal		
						2	Kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan memverifikasi belum maksimal		
								1.3.2	Perlindungan dan pemberdayaan PMKS yang belum optimal
2	Fasilitas pelayanan perlindungan sosial PMKS belum memadai								
1.3.2.2	Pemberdayaan PMKS belum maksimal	1	Keterbatasan SDM pengelola						

Isu Strategis/ Sub Isu Strategis		Permasalahan					
		Permasalahan Pokok		Permasalahan		Akar (Penyebab) Permasalahan	
						2	Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap PMKS belum maksimal
				1.3.2.3	Optimalisasi potensi sumber daya dan tenaga sukarelawan kesejahteraan sosial (TSKS) belum optimal	1	Keterbatasan jumlah TSKS
						2	Fasilitasi TSKS belum memadai
				1.3.3	Stabilitas ketersediaan pangan yang berkualitas belum memadai	1.3.3.1	Pengelolaan pangan belum optimal
						2	Manajemen logistik pangan strategis (pokok) belum memadai
						3	Kerjasama penyediaan pangan dengan daerah penghasil pangan belum optimal
				1.3.3.2	Ketersediaan lahan pertanian dan budidaya perikanan yang terbatas sehingga mengurangi dukungan sektor pertanian dan perikanan terhadap pasokan pangan	1	Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
						2	Penegakan regulasi belum maksimal
				1.3.3.3	Diversifikasi pangan non beras belum memadai	1	Pengembangan pangan lokal non beras belum dibudayakan
1.4	Pengangguran						
		1.4.1	Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas dan kesempatan berusaha yang belum memadai	1.4.1.1	Pengembangan sektor ekonomi padat karya belum tumbuh secara optimal	1	Belum adanya insentif usaha padat karya
				1.4.1.2	Kesempatan berusaha (wirausaha) belum berkembang	1	Belum adanya insentif pengembangan wirausaha baru
						2	Keterbatasan kapasitas SDM, manajemen, modal dan pemasaran pelaku wirausaha baru
						3	Edukasi dan pendampingan calon wirausaha baru belum maksimal dan berkelanjutan
		1.4.2	Kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang belum memadai	1.4.2.1	Kualitas calon dan tenaga kerja belum sesuai yang diharapkan para pelaku usaha	1	Keterbatasan skill/kemampuan calon tenaga kerja/tenaga kerja yang ada

Isu Strategis/ Sub Isu Strategis		Permasalahan					
		Permasalahan Pokok		Permasalahan		Akar (Penyebab) Permasalahan	
						2	Ketersediaan fasilitas pendidikan ketenagakerjaan belum memadai
						3	Keterbatasan instruktur pelatihan tenaga kerja yang kompeten
				1.4.2.2	Produktivitas tenaga kerja belum berdaya saing	1	Keterbatasan skill/kemampuan tenaga kerja yang ada
						2	Budaya kerja produktif belum tumbuh maksimal
1.5	Pelayanan Publik						
1.5.a	Pelayanan Administratif						
		1.5.1	Pelayanan pertanahan belum memadai	1.5.1.1	Belum semua aset milik pemda bersertifikat	1	Data aset milik pemda belum terupdate dan terintegrasi dengan baik
				1.5.1.2	Tingkat pengadaan lahan untuk pembangunan belum memadai	1	Keterbatasan ketersediaan lahan yang dapat diadakan
						2	Koordinasi kebutuhan lahan untuk pembangunan dengan OPD pengguna belum berjalan optimal
				1.5.1.3	Rasio tanah bersertifikat masyarakat masih belum memadai	1	Fasilitasi sertifikasi tanah milik masyarakat khususnya masyarakat miskin belum memadai
		1.5.2	Pelayanan administrasi kependudukan belum optimal	1.5.2.1	Pelayanan pencetakan E-KTP menunggu pemerintah pusat	1	Partisipasi aktif masyarakat belum maksimal
						2	Pola pelayanan masih belum optimal
				1.5.2.2	Pelayanan Kartu Keluarga, Akte Lahir, Akte Kematian dan Akte Nikah belum terintegrasi dengan baik	1	Partisipasi aktif masyarakat belum maksimal
						2	Pola pelayanan masih belum optimal
		1.5.3	Pelayanan komunikasi dan informatika belum optimal	1.5.3.1	Integrasi pelayanan publik online belum optimal	1	Ketersediaan infrastruktur data center, layanan internet/intranet, standarisasi dan integrasi aplikasi sistem informasi pelayanan publik dan pemerintahan belum memadai
		1.5.4	Pelayanan statistik belum optimal	1.5.4.1	Ketersediaan data yang terkini dan tepat waktu belum memadai	1	Keterbatasan kapasitas SDM
						2	Pendataan belum optimal
		1.5.5	Pendayagunaan persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal	1.5.5.1	Belum optimalnya peningkatan upaya persandian dalam mengamankan informasi pemerintah daerah	1	Keterbatasan kapasitas SDM dan teknologi persandian

Isu Strategis/ Sub Isu Strategis		Permasalahan							
		Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar (Penyebab) Permasalahan					
		1.5.6	Pelayanan kearsipan belum optimal	1.5.6.1	Kapasitas dan kualitas pendukung kearsipan belum memadai	1	Keterbatasan SDM arsiparis yang berkualitas		
						2	Kemampuan berarsip yang baku belum optimal		
						3	Keterbatasan sarana pendukung arsip		
		1.5.7	Kualitas perencanaan pembangunan belum optimal	1.5.7.1	Ketersediaan SDM perencana yang berkualitas belum memadai	1	Pelatihan perencanaan belum memadai		
						1.5.1.2	Peran penting perencanaan dalam pembangunan belum mendapat perhatian serius	1	Pemahaman perencanaan bagi aparatur dan masyarakat belum memadai
								1.5.1.3	Perencanaan pembangunan belum mengakomodir sepenuhnya kebutuhan aspirasi masyarakat
		1.5.8	Kapasitas potensi keuangan daerah belum dioptimalkan	1.5.8.1	Pendapatan daerah belum optimal	1	Pendapatan daerah belum menjangkau keseluruhan potensi yang ada		
						2	Perusahaan Daerah belum dapat memberikan kontribusi yang optimal		
						3	Pendayagunaan aset belum optimal		
						4	Kurang optimalnya kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan swasta dan BUMN yang dapat meningkatkan pendapatan Daerah		
				1.5.8.2	Potensi penerimaan yang masih belum tergali	1	Perlunya menambah usaha dalam bentuk perusahaan daerah sesuai dengan perkembangan dunia usaha di Kota Tangerang		
						2	Kontribusi peran Bandara Soeta untuk dapat menambah pendapatan daerah belum optimal		
1.5.9	Kinerja aparatur belum optimal	1.5.9.1	Kapasitas dan kompetensi aparatur belum maksimal	1	Pelatihan aparatur berbasis kompetensi belum memadai				
				2	Keterbatasan kualifikasi teknis aparatur				
				1.5.9.2	Budaya kerja yang berintegritas dan profesional masih perlu ditingkatkan terus menerus	1	Implementasi aturan <i>reward dan punishment</i> belum optimal		

Isu Strategis/ Sub Isu Strategis		Permasalahan					
		Permasalahan Pokok		Permasalahan		Akar (Penyebab) Permasalahan	
		1.5.10	Dukungan penelitian berbasis inovasi pembangunan belum memadai	1.5.10.1	Kemampuan adaptasi IPTEK dan inovasi masyarakat belum berkembang dengan baik	2	Pembinaan orientasi budaya kerja yang produktif belum memadai
						1	Edukasi IPTEK dan inovasi kepada masyarakat belum memadai
						2	Keterbatasan media/fasilitas pengembangan IPTEK dan inovasi
						3	Keterbatasan SDM pengembangan IPTEK/inovasi
		1.5.11	Kualitas pengawasan belum optimal	1.5.11.1	Perumusan tujuan pengawasan dan penetapan area audit belum mencerminkan tujuan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah	1	belum fokusnya pengawasan pada aspek-aspek penting pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan APBD, pelaksanaan APBD, serta pertanggungjawaban dan pengendalian APBD
				1.5.11.2	Penetapan prioritas audit dan identifikasi sumber daya belum memiliki dasar pertimbangan yang memadai	1	kurangnya pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri terhadap kebijakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang mengacu kepada kebijakan pengawasan yang ditetapkan
				1.5.11.3	Tenaga auditor masih kurang memadai	1	perlu penambahan auditor
						2	peningkatan kapasitas auditor dengan mengikuti diklat sertifikasi, diklat keahlian khusus, dan diklat substansi teknis lainnya
				1.5.11.4	Pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan belum optimal	1	kurangnya data yang dibutuhkan
						2	Updating data yang kurang tepat waktu untuk digunakan
		1.5.12	Pelayanan PATEN Kecamatan belum optimal				
1.5.b	Pelayanan Regulasi	1.5.13	Pelayanan regulasi belum optimal	1.5.13.1	Pengembangan regulasi (peraturan daerah dan peraturan kepala daerah) yang mendukung pembangunan perlu ditingkatkan		
				1.5.13.2	Penegakan regulasi (peraturan daerah)		

Isu Strategis/ Sub Isu Strategis		Permasalahan					
		Permasalahan Pokok	Permasalahan		Akar (Penyebab) Permasalahan		
					dan peraturan kepala daerah) belum optimal		
				1.5.13.3	Evaluasi regulasi (peraturan daerah dan peraturan kepala daerah) yang menghambat pembangunan belum optimal		
				1.5.13.4	Pengembangan regulasi SOP pelayanan publik belum optimal		
1.5.c	Pelayanan Jasa						
		1.5.14	Penanggulangan bencana kebakaran belum optimal	1.5.14.1	Kapasitas fasilitas dan SDM pemadam kebakaran belum memadai	1	Ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran belum memadai
						2	Kapasitas SDM pemadam kebakaran yang bersertifikat belum memadai
				1.5.14.2	Potensi Instalasi listrik rumah tangga belum sepenuhnya memenuhi standar keselamatan bangunan	1	Instalasi listrik rumah tangga belum sepenuhnya memenuhi standar keselamatan bangunan
2	Daya Saing Infrastruktur Kota						
2.1	Kemacetan dan Pelayanan Transportasi yang Handal	2.1.1	Penanganan kemacetan yang belum teratasi	2.1.1.1	Ketersediaan prasarana dan simpul transportasi yang berkualitas belum memadai	1	Ketersediaan jalan yang belum memadai
						2	Masih banyaknya persimpangan jalan sebidang
						3	Tingkat ketersediaan lahan parkir yang belum memadai
				2.1.1.2	Budaya tertib berlalu lintas pengguna jalan masih rendah	1	Budaya tertib berlalu lintas pengguna jalan belum memadai
						2	Penegakan tertib berlalu lintas belum optimal
				2.1.1.3	Pelanggaran penggunaan badan jalan	1	Penggunaan sebagian badan jalan untuk aktivitas yang tidak sesuai peruntukannya sehingga mempersempit kapasitas jalan
						2	Penegakan pelanggaran belum optimal
		2.1.2	Pengembangan sistem	2.1.2.1	Ketersediaan sarana angkutan umum	1	Ketersediaan angkutan umum yang

Isu Strategis/ Sub Isu Strategis		Permasalahan					
		Permasalahan Pokok	Permasalahan		Akar (Penyebab) Permasalahan		
			transportasi yang terintegrasi dan handal belum memadai		belum memadai dan terintegrasi dengan baik		belum memadai
						2	Integrasi antar moda angkutan umum yang belum bertata dengan baik
2.2	Banjir dan Genangan	2.2.1	Banjir dan genangan yang masih terjadi	2.2.1.1	Kapasitas jaringan drainase dan kualitas sumber daya air yang belum memadai	1	Ketersediaan dan kapasitas jaringan drainase belum memadai
						2	Kondisi sungai, situ yang semakin kritis
				2.2.1.2	Ketersediaan media penyerap air hujan yang terbatas	1	Ketersediaan tandon air (embung) penampung banjir belum memadai
						2	Ketersediaan sumur resapan air belum memadai
				2.2.1.3	Pelanggaran penggunaan sempadan sungai, badan drainase serta kesadaran masyarakat akan kebersihan yang cukup rendah	1	Pelanggaran penggunaan sempadan sungai dan drainase
						2	Penyumbatan sampah pada jaringan drainase akibat perilaku masyarakat yang belum sadar kebersihan
						3	Penegakan pelanggaran belum optimal
2.3	Permukiman Kumuh, Layak Huni Dan Terjangkau	2.3.1	Permukiman kumuh yang belum seluruhnya ditata	2.3.1.1	Keberadaan rumah tidak layak huni serta dukungan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masih belum memadai	1	Belum semua rumah tidak layak huni dibedah
						2	Sarana prasana lingkungan permukiman kurang dipelihara
				2.3.1.2	Aspek sosial ekonomi masyarakat penghuni kawasan kumuh belum diberdayakan secara optimal	1	Pemberdayaan ekonomi rumah tangga masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh belum optimal
						2	Perilaku masyarakat yang belum tertib dan bersih
		2.3.2	Ketersediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau belum sepenuhnya memenuhi	2.3.2.1	Keterbatasan lahan yang memadai dan terjangkau untuk membangun rumah	1	Pembangun rumah susun belum memadai

Isu Strategis/ Sub Isu Strategis		Permasalahan					
		Permasalahan Pokok		Permasalahan		Akar (Penyebab) Permasalahan	
			kebutuhan masyarakat			2	Regulasi insentif pembangunan rumah susun belum memadai
2.4	Sanitasi Lingkungan Permukiman (Air Bersih dan Air Limbah Domestik)	2.4.1	Ketersediaan sanitasi lingkungan permukiman yang belum memadai	2.4.1.1	Cakupan pelayanan air bersih yang berkualitas belum memadai	1	Keterbatasan sumber air baku
						2	Ketersediaan jaringan SPAM perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah
				2.4.1.2	Pengelolaan air limbah domestik dan MCK belum memadai	1	Ketersediaan fasilitas penampungan dan pengolah limbah domestik yang terbatas
						2	Ketersediaan sarana MCK rumah tangga dan komunal yang berkualitas belum memadai
2.5	Persampahan	2.5.1	Pengelolaan persampahan yang belum optimal	2.5.1.1	Tingkat kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah belum berkembang dengan baik	1	Perilaku hidup bersih dan pengurangan sampah anorganik (plastik) masyarakat belum memadai
						2	Masih kurangnya sistem penanganan sampah
				2.5.1.2	Fasilitas pengelolaan sampah belum memadai	1	Masih kurangnya fasilitas pengurangan sampah
						2	Masih kurangnya sistem penanganan sampah
2.6	Pencemaran Lingkungan	2.6.1	Degradasi kualitas lingkungan hidup	2.6.1.1	Tingkat pencemaran semakin meningkat	1	Aktivitas ekonomi yang masih cenderung belum ramah lingkungan
						2	Penegakan regulasi lingkungan belum optimal
				2.6.1.2	Tingkat ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) belum memadai	1	Ketersediaan lahan untuk RTH terbatas
				2.6.1.3	Tingkat kesadaran hidup ramah lingkungan masyarakat masih belum maksimal	2	Perilaku masyarakat cenderung boros energi
		2.6.2	Penggunaan energi yang tidak	2.6.2.1	Pola hidup dan perilaku masyarakat	1	Pengembangan energi alternatif baru

Isu Strategis/ Sub Isu Strategis		Permasalahan					
		Permasalahan Pokok		Permasalahan		Akar (Penyebab) Permasalahan	
			ramah lingkungan dan efisien		dalam penggunaan energi yang masih belum efisien dan cenderung boros	terbaharukan yang ramah lingkungan belum memadai	
2.7	Ruang Terbuka Publik	2.7.1	Tingkat ketersediaan ruang terbuka publik belum memadai	2.7.1.1	Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) belum memadai	1	Ketersediaan lahan untuk RTH terbatas
				2.7.1.2	Ketersediaan dan pengelolaan taman tematik belum optimal	1	Ketersediaan lahan untuk taman terbatas dan fasilitas taman yang perlu ditingkatkan
		2.7.2	Kualitas penataan ruang kota yang belum memadai dan optimal	2.7.2.1	Tingkat ketersediaan perencanaan tata ruang belum memadai	1	Penyelesaian dokumen tata ruang belum memadai
				2.7.2.2	Pemanfaatan ruang belum optimal	1	Tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang masih terjadi
						2	Tingkat penegakan regulasi penataan ruang belum maksimal
						3	Tingkat kesadaran masyarakat dalam penataan ruang yang belum maksimal
3	Daya Saing Perekonomian Daerah						
3.1	Investasi	3.1.1	Pelayanan perijinan dan investasi belum optimal	3.1.1.1	Pelayanan perijinan terpadu satu pintu online belum optimal	1	Keterbatasan SDM dan manajemen pengelola
						2	Belum semua aplikasi pelayanan perijinan dan investasi terintegrasi dengan baik
				3.1.1.2	Data/informasi potret investasi dan promosi investasi belum optimal	1	Keterbatasan data dan analisis investasi
						2	Kurangnya promosi investasi
3	Kerjasama dengan pengelola investasi belum berkembang dengan baik						
				3.1.1.3	Regulasi investasi yang sederhana, berinsentif belum memadai	1	Tumpang tindih peraturan yang berpotensi menghambat investasi
3.2	UMKM						
		3.2.1	Peran UKM dan Koperasi	3.2.1.1	Kualitas produk UKM belum memadai	1	Kualitas skill SDM UKM belum

Isu Strategis/ Sub Isu Strategis		Permasalahan					
		Permasalahan Pokok	Permasalahan		Akar (Penyebab) Permasalahan		
		sebagai pelaku usaha ekonomi kerakyatan belum tumbuh dan berkembang dengan baik			memadai		
					2	Manajemen usaha masih tradisional	
					3	Keterbatasan permodalan	
					4	Keterbatasan akses pemasaran	
					5	Dukungan intensif, pendampingan konseling bisnis belum memadai	
					6	Fasilitasi sarana produksi belum memadai	
					7	Adaptasi IPTEK belum diterapkan (E-Commerce produk UKM)	
			3.2.1.2	Pemberdayaan koperasi aktif yang belum optimal	1	Kapasitas SDM belum memadai	
					2	Kemampuan manajemen usaha masih terbatas	
		3.2.2	Pengelolaan pariwisata belum optimal	3.2.2.1	Destinasi pariwisata belum dikelola dan dikembangkan dengan optimal	1	Dukungan regulasi belum memadai
				3.2.2.2	Fasilitas pendudukng pariwisata belum memadai	1	Kualitas hotel, restoran, jasa pendukung pariwisata belum memadai
				3.2.2.3	Promosi pariwisata belum maksimal	1	Keterbatasan media input promosi pariwisata
				3.2.2.4	Kualitas SDM dan manajemen pariwisata belum memadai	1	Pelatihan skill pariwisata belum memadai
						2	Manajemen pariwisata belum inovatif
						3	Budaya sapta pesona masyarakat belum tumbuh dengan baik
		3.2.3	Pengelolaan perdagangan belum optimal	3.2.3.1	Pengelolaan pasar tradisional yang berstandar nasional, modern, bersih dan sehat belum memadai	1	Manajemen pengelolaan pasar yang masih tradisional
						2	Pengelolaan pasar belum berdaptasi dengan perkembangan IPTEK (E-commerce pasar)
				3.2.3.2	Lokasi pedagang kaki lima yang belum tertata dengan baik	1	Keterbatasan lahan
						2	Perilaku PKL yang tidak tertib
		3.2.4	Kualitas produk industri dan IKM yang belum berdaya saing	3.2.4.1	Daya saing produk industri belum kompetitif	1	Fasilitasi sertifikasi kualitas produk industri belum optimal

Isu Strategis/ Sub Isu Strategis		Permasalahan			
		Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar (Penyebab) Permasalahan	
				2	Penerapan teknologi yang belum berdaya saing
			3.2.4.2	1	Kualitas skill SDM IKM belum memadai
				2	Manajemen usaha masih tradisional
				3	Keterbatasan permodalan
				4	Keterbatasan akses pemasaran
				5	Dukungan intensif, pendampingan konseling bisnis belum memadai
				6	Fasilitasi sarana produksi belum memadai
				7	Keberdaan IKM belum tertata dengan basis produk unggulan (kampoeng IKM)

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Tangerang 2019-2023

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

B.1. Visi Kota Tangerang

Berikut ini diuraikan keselarasan dan keterkaitan visi pembangunan Kota Tangerang berdasarkan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023, RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan RPJMN Tahun 2020-2024.

Tabel I-31 Keterkaitan Visi Pembangunan Kota Tangerang dengan Visi Pembangunan Provinsi Banten dan Indonesia

Kota Tangerang		Provinsi Banten	Indonesia
RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025	RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023	RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022	RPJMN Tahun 2020-2024
Kota Industri, Perdagangan, dan Jasa Yang Maju dan Lestari Berlandaskan Akhlakul Karimah	Terwujudnya Kota Tangerang Yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah Dan Berdaya Saing	Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah	Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Tangerang 2019-2023

Perumusan visi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019-2023 juga didasarkan pada cita-cita seluruh masyarakat pada masa mendatang dan merupakan kelanjutan dari hasil pembangunan pada masa lalu. Dalam kaitan tersebut maka tahap IV (Tahun 2019-2023) RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025 menekankan pada perwujudan kemajuan dan daya saing daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berakhlakul kharimah (akhlak mulia).

Berpijak pada keselarasan visi pembanguan jangka panjang daerah, Provinsi Banten, nasional serta upaya untuk melanjutkan cita-cita pembangunan maka visi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019-2023 Visi Kepala Daerah terpilih dirumuskan sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG SEJAHTERA,
BERAKHLAKUL KARIMAH DAN BERDAYA SAING”**

Makna yang terkandung dalam visi pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
1	Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera	Kota Tangerang yang sejahtera diwujudkan dengan tercapainya taraf kehidupan masyarakat yang baik dan berkualitas sehingga terbentuk kehidupan masyarakat yang makmur dan berkeadilan serta menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek dalam pembangunan.
2	Terwujudnya Kota	Kota Tangerang yang berakhlakul kharimah diwujudkan

No.	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Tangerang yang Berakhlakul Karimah	dengan tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku akhlak mulia yang dicerminkan melalui kualitas hubungan antar manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia itu sendiri, dan menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani, serta tercukupi kebutuhan material spiritual, sehingga mampu mewujudkan sebuah masyarakat madaniyyah dan hidup menuju negeri yang adil, makmur, dan diberkati (<i>baladatan toyibatun warabun ghafur</i>).
3	Terwujudnya Kota Tangerang yang Berdaya Saing	Kota Tangerang yang berdaya saing diwujudkan dengan tercapainya sumber daya manusia (SDM) yang inovatif, kreatif dan kompetitif; perekonomian daerah yang inovatif, kreatif, kompetitif dan berkeadilan; infrastruktur, fasilitas, permukiman kota yang inovatif dan kompetitif dan lingkungan hidup; serta didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, prima, inovatif, kreatif dan kompetitif dalam menyongsong era kompetisi dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

B.2. Misi Kota Tangerang

Berpijak pada keselarasan misi pembangunan jangka panjang daerah, Provinsi Banten dan nasional serta upaya untuk melanjutkan pembangunan dan untuk mewujudkan pencapaian visi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019-2023 maka misi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019-2023 dirumuskan sebagai berikut:

1. Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berintegritas.
2. Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kota Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan.
3. Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Mandiri Dan Berkeadilan.

Adapun penjelasan misi pembangunan jangka menengah Kota Tangerang tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Misi	Penjelasan Misi
1	Bersama mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kota Tangerang yang cerdas, sehat, berakhlak mulia dan berdaya saing. Daya saing sumber daya manusia (SDM) masyarakat ini diwujudkan dengan tercapainya kualitas SDM masyarakat yang inovatif, kreatif dan kompetitif dalam menyongsong era kompetisi dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional. Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat akan berjalan dengan optimal apabila ditunjang oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif. Kemajuan dan

No.	Misi	Penjelasan Misi
	mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.	inovasi pelayanan publik dihadirkan agar daya saing tata kelola pemerintahan Kota Tangerang mampu menjawab tuntutan masyarakat dan dapat turut andil dan mengambil peran penting di dalam era kompetisi dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional
2	Bersama meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas perkotaan ditujukan untuk mewujudkan kota layak huni yang nyaman, asri, modern dan berdaya saing. Peningkatan penyediaan infrastruktur dan fasilitas perkotaan yang berkualitas, modern dan berdaya saing mutlak diperlukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dalam rangka mendukung berlangsungnya kegiatan perekonomian yang produktif, inovatif, kreatif dan kompetitif serta berkelanjutan dan seimbang antara aspek sosial dan ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup sehingga pada akhirnya mampu menjadi faktor pendukung bagi tercapainya kota layak huni yang nyaman, asri, modern dan berdaya saing. Sehingga diharapkan kualitas infrastruktur dan fasilitas perkotaan Kota Tangerang dapat turut andil mendukung peningkatan daya saing kota di dalam era kompetisi dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional.
3	Bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan.	Peningkatan kualitas perekonomian masyarakat ditujukan untuk mewujudkan daya saing perekonomian kota. Daya saing perekonomian kota ini diwujudkan dengan tercapainya kualitas taraf perekonomian masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang sekaligus berdampak pada upaya penciptaan keadilan perekonomian bagi seluruh lapisan masyarakat. Pencapaian perekonomian kota yang berkualitas, berkeadilan dan berdaya saing ini dilakukan dengan memajukan kualitas dan daya saing sektor-sektor unggulan kota (jasa, perdagangan, industri) yang didukung dengan inovasi, kreativitas dan kemitraan usaha dari seluruh pelaku usaha ekonomi masyarakat baik UMKM dan koperasi maupun usaha besar. Sehingga diharapkan perekonomian masyarakat dan Kota Tangerang dapat turut andil dan mengambil peran penting serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam era kompetisi dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD

C.1. Program Prioritas

Sebagai upaya untuk mewujudkan misi pembangunan maka Program Prioritas (Program Unggulan) pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019-2023 dirumuskan sebagai berikut:

Misi/Isu Strategis	Program Prioritas (Program Unggulan)	Kegiatan Prioritas
MISI 1 : Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berintegritas		
1	Daya Saing Sumber Daya Manusia	
1.1 Pendidikan		
	- ANAK KITA	
	1.1 Fasilitas Sekolah Terjamin	1 Pemenuhan Ruang Kelas dan Fasilitas Pendukung Sekolah yang Memadai dan

Misi/Isu Strategis		Program Prioritas (Program Unggulan)		Kegiatan Prioritas	
					Layak sesuai Standar
			1.2 Pendidikan Dasar Gratis Negeri dan Swasta (SD dan SMP)	2	Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Gratis Negeri dan Swasta (Bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Beasiswa Pendidikan)
			1.3 Berakhlak Mulia	3	Pengembangan dan Penerapan Pendidikan Karakter Akhlak Mulia, Kreatif dan Inovatif
			1.4 Kreatif dan Inovatif	4	Kampung Tematik
		- KELUARGA KITA	2.1 Magrib Belajar dan Mengaji	5	Pemberdayaan Umat (dalam bentuk Kebijakan/Peraturan Walikota Magrib Belajar dan Mengaji)
				6	Pemberian Insentif dan BPJS Ketenagakerjaan Guru Non PNS PAUD/TK/RA/SD/MI/SMP/MTS/SKH
				7	Pengembangan Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Online
		- KAMPUNG KITA	3.1 Warga Semakin Guyub	8	Kampung tematik/ Gotong Royong
		- KOTA KITA	4.1 Kesenian dan Budaya Berkembang	9	Penyediaan sarana prasarana pusat seni dan kebudayaan (Perda peninggalan seni budaya)
			4.2 Masyarakat Berakhlakul Karimah	10	Pembangunan pusat pembinaan (konseling) masjid/fasilitas peribadatan
			4.3 Lebih Aman dan Nyaman	11	Kampung Bersinar (Bersih dari Narkoba)
1.2	Kesehatan				
		- KELUARGA KITA	1.1 Tersedia Banyak Posyandu	1	Revitalisasi Posyandu
			1.2 Tersedia Puskesmas Rawat Inap 24 Jam	2	Pengembangan Puskesmas Rawat Inap
			1.3 Sadar Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	3	Kampung PHBS
		- KAMPUNG KITA	2.1 Kunjungan Petugas Kesehatan	4	Kunjungan Petugas Kesehatan Ke Warga (<i>Home Care</i>)
		- KOTA KITA	3.1 Kesehatan Lebih Terjamin	5	Bantuan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat
			3.2 Peningkatan Fasilitas Olah Raga	6	Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Sport Center
1.3	Kemiskinan				
		- KELUARGA KITA	1.1 Peningkatan Keluarga Sejahtera	1	Peningkatan Keluarga Sejahtera Mandiri (Kampung Sejahtera)

Misi/Isu Strategis		Program Prioritas (Program Unggulan)			Kegiatan Prioritas	
						Mandiri)
					2	Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat Miskin (Tangerang Cerdas)
					3	Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Tangerang Sehat)
					4	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Miskin
					5	Pemenuhan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Luar Panti Sosial
					6	Tata Niaga Bahan Pangan Strategis
1.5	Pengangguran					
		- KOTA KITA	1.1	Lapangan Kerja Tersedia	1	Perluasan Bursa Tenaga Kerja (<i>Online</i> dan <i>Offline</i>)
					2	Pengembangan dan Peningkatan Wirausaha (Pengembangan Pusat Pengembangan Kewirausahaan (Konseling Bisnis Kewirausahaan))
					3	Peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK)
					4	Sertifikasi Keahlian dan Kompetensi Kerja
		- KAMPUNG KITA	2.1	Pelatihan dan Peningkatan SDM Kepemudaan	5	Pendidikan dan Pelatihan Organisasi Kepemudaan (Pengembangan wirausaha muda mandiri)
					6	Pengembangan Bakat dan Skill (Workshop) Kepemudaan
1.6	Pelayanan Publik					
		- KOTA KITA	1.1	Kota Semakin Canggih (<i>Smart City</i>)	1	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Online dan Terintegrasi
					2	Pengembangan Fasilitas Internet Gratis Pada Ruang/Fasilitas Publik
			1.2	Akhlakul Karimah Center	3	Pembangunan Akhlakul Karimah Center dan Mall Pelayanan Publik
		- KELUARGA KITA	2.1	Pelayanan Kependudukan Warga Semakin Mudah	4	Pelayanan kependudukan secara online (SIWARGA)
MISI 2 :						
Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kota Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan						
2	Daya Saing Infrastruktur Kota					

Misi/Isu Strategis		Program Prioritas (Program Unggulan)			Kegiatan Prioritas			
2.1	Kemacetan	- KOTA KITA	1.1	Kemacetan Berkurang	1	Penanganan dan Penataan Simpul Lokasi Kemacetan (Penataan Simpang Jalan Sebidang, Pembangunan Fly Over dan Under Passs)		
			1.2	Transportasi Masal Bertambah	2	Pengembangan dan Pengelolaan Bus Rapid Transortation (BRT) dan Integrasi Moda Angkutan Pelayanan Umum		
					3	Pembangunan dan Pengelolaan Cisadane <i>Waterways</i>		
2.2	Permukiman Kumuh	- KOTA KITA	1.1	Lebih Aman dan Nyaman	1	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		
					2	Pengembangan Sanitasi Lingkungan Permukiman		
					3	Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun		
2.3	Banjir Dan Genangan	- KOTA KITA	1.1	Titik Banjir Berkurang	1	Normalisasi Sungai, Situ, Kali, Saluran Pembuang		
					2.1	Genangan Air Berkurang	2	Pembangunan Sistem Jaringan Drainase Perkotaan
							3	Normalisasi Sungai, Situ, Kali, Saluran Pembuang
							4	Pembangunan dan Pengelolaan Pengendali Banjir (Embung, Tandon, Pintu Air)
							5	Pembangunan Sumur dan Bidang Resapan Air
2.4	Persampahan	- KAMPUNG KITA	1.1	Penanganan Sampah Semakin Baik	1	Revitalisasi TPSA Rawa Kucing dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah		
					2	Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan Berbasis 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>), Bank Sampah, Sedekah Sampah		
2.5	Sanitasi Lingkungan (Air Bersih dan Air Limbah Domestik)	- KAMPUNG KITA	1.1	Tersedia Air Bersih	1	Pembangunan Jaringan Distribusi SPAM		
					2	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)		
					3	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Komunal		
2.6	Pencemaran Lingkungan	- KOTA KITA	1.1	Lebih Aman dan Nyaman	1	Pengembangan Bangunan Ramah Lingkungan		

Misi/Isu Strategis		Program Prioritas (Program Unggulan)			Kegiatan Prioritas	
					2	Pengembangan Energi Alternatif Baru Terbaharukan
2.7	Ruang Terbuka Publik	- KAMPUNG KITA	1.1	Banyak Ruang Terbuka Hijau dan Indah	1	Pembangunan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Publik
					2	Pembangunan dan Pengelolaan Taman dan Hutan Kota
			1.2	Tersedia Tempat Main Anak dan Keluarga	3	Pembangunan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Publik Edukatif (Tempat Bermain Keluarga) Ramah Anak
MISI 3 :						
Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Mandiri Dan Berkeadilan						
3 Daya Saing Perekonomian						
3.1	Investasi	- KOTA KITA	1.1	Kemudahan Berinvestasi	1	Pembangunan dan Pengelolaan Mall Pelayanan Publik
					2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pelayanan Perijinan dan Investasi Terpadu dan Satu Pintu <i>Online Single Submission</i> (OSS)
3.2	Ekonomi Lokal (UMKM)	- KAMPUNG KITA	1.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan UMKM	1	Pengembangan IKM dan UMKM Tematik (<i>One Village One Product</i>)
					2	Pengembangan <i>E-Commerce</i> dan Ekonomi Kreatif UMKM
					3	Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional yang bestandar SNI
					4	Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi dan Produk Pariwisata

C.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi,

misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Berikut ini diuraikan mengenai sasaran pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023.

Tabel I-32 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2019-2023

Visi/Misi		Tujuan		Sasaran	
Visi: Terwujudnya Kota Tangerang Yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah Dan Berdaya Saing					
1	Bersama mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas	1.1	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
				1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		1.2	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	1.2.1	Menurunnya kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
				1.2.2	Meningkatnya kesempatan kerja
1.3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1.3.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik		
2	Bersama meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	2.1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan	2.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perkotaan
				2.1.2	Meningkatnya kualitas permukiman
				2.1.3	Meningkatnya kualitas drainase dan sumber daya air
				2.1.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
3	Bersama meningkatkan	3.1	Meningkatkan kualitas	3.1.1	Meningkatnya investasi daerah

Visi/Misi		Tujuan		Sasaran	
pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan		perekonomian masyarakat yang berdaya saing		3.1.2	Meningkatnya perekonomian masyarakat
3	Misi	5	Tujuan	11	Sasaran

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Tangerang 2019-2023

C.3. Rancangan Strategi Pembangunan Daerah

Rumusan rancangan strategi pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
- Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin.
- Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
- Memperkuat daya saing perekonomian daerah.
- Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kualitas dan daya saing pelayanan prasarana, sarana, dan fasilitas kota.
- Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perhubungan.
- Meningkatkan pengendalian banjir dan genangan.
- Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman serta penataan kawasan permukiman kumuh.
- Meningkatkan kualitas penataan ruang.
- Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam.
- Meningkatkan penanggulangan, pemulihan, dan pelestarian lingkungan hidup.
- Meningkatkan kualitas dan daya saing penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

Berikut ini diuraikan strategi pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 sesuai misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1. Strategi Pembangunan Pada Misi 1 : **Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan,**

Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berintegritas.

Tujuan	Sasaran	Strategi
1.1	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	
	1.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
		1.1.1.1 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pendidikan karakter, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan non formal
	1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		1.1.2.1 Peningkatan kemandirian kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan
		1.1.2.2 Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olahraga
1.2	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	
	1.2.1	Menurunnya kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
		1.2.1.1 Perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat miskin
		1.2.1.2 Peningkatan ketahanan pangan
		1.2.1.3 Penguatan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak
		1.2.1.4 Peningkatan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga
	1.2.2	Meningkatnya kesempatan kerja
		1.2.2.1 Perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan kualitas tenaga kerja
		1.2.2.2 Pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan
1.3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	
	1.3.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik
		1.3.1.1 Pengembangan dan peningkatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		1.3.1.2 Pengembangan, pengelolaan dan publikasi data statistik daerah
		1.3.1.3 Peningkatan sistem persandian daerah
		1.3.1.4 Optimalisasi tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas SDM aparatur
		1.3.1.5 Harmonisasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah
		1.3.1.6 Peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan

Tujuan		Sasaran		Strategi	
				1.3.1.7	Peningkatan sistem dan kualitas perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan
				1.3.1.8	Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
				1.3.1.9	Optimalisasi potensi sumber pendapatan daerah serta peningkatan sistem tata kelola administrasi keuangan dan aset daerah
				1.3.1.10	Peningkatan kualitas SDM aparatur yang profesional, kreatif, inovatif dan berintegritas
				1.3.1.11	Penataan status kepemilikan tanah pemerintah daerah dan peningkatan advokasi dan pengawasan tanah milik pemerintah daerah
				1.3.1.12	Pengembangan dan pemasyarakatan budaya baca masyarakat serta peningkatan pelayanan perpustakaan
				1.3.1.13	Pengembangan dan pengelolaan sistem kearsipan
				1.3.1.14	Peningkatan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
				1.3.1.15	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban, kerukunan hidup masyarakat dan ketahanan bangsa serta penanggulangan bencana
3	Tujuan	5	Sasaran	24	Strategi

2. Strategi Pembangunan Pada Misi 2 : **Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kota Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan**

Tujuan		Sasaran		Strategi	
2.1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan				
		2.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi publik	2.1.1.1	Pengembangan dan integrasi sistem transportasi serta peningkatan kualitas pengelolaan angkutan umum dan lalu lintas
		2.1.2	Meningkatnya kualitas permukiman	2.1.2.1	Penataan kawasan kumuh dan pengembangan rumah layak huni yang terjangkau
				2.1.2.2	Peningkatan cakupan dan kualitas air bersih dan pengelolaan air limbah domestik
		2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan pekerjaan	2.1.3.1	Pengembangan dan penataan

Tujuan		Sasaran		Strategi	
			umum dan penataan ruang		sistem jaringan drainase dan sumber daya air
		2.1.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2.1.4.1	Peningkatan penataan dan kapasitas lingkungan hidup serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
				2.1.4.2	Pengelolaan persampahan berbasis masyarakat dan peningkatan kapasitas TPA
				2.1.4.3	Pengembangan ketersediaan dan peningkatan kualitas ruang terbuka
1	Tujuan	4	Sasaran	7	Strategi

3. Strategi Pembangunan Pada Misi 3 : **Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Mandiri Dan Berkeadilan**

Tujuan		Sasaran		Strategi	
3.1	Meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian daerah dan masyarakat				
		3.1.1	Meningkatnya investasi daerah	3.1.1.1	Peningkatan iklim investasi yang kondusif
		3.1.2	Meningkatnya perekonomian dan ketahanan pangan masyarakat	3.1.2.1	Pengembangan, penataan, dan peningkatan industri, perdagangan, UMKM dan koperasi, pariwisata, serta pertanian dan perikanan
1	Tujuan	2	Sasaran	6	Strategi

C.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Berikut ini diuraikan tema/fokus arah kebijakan pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pembangunan Pada Misi 1 : **Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berintegritas**

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1.1.1.1	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pendidikan karakter, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan non formal	1.1.1.1.1	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kurikulum, manajemen kelembagaan, sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan, minat, bakat, prestasi peserta didik, serta penguatan pendidikan karakter akhlak mulia, kesusilaan, budaya, kreatif dan

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
					inovatif serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan non formal
1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1.2.1	Peningkatan kemandirian kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan	1.1.2.1.1	Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dan pengendalian dan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, produksi pangan (makanan minuman), serta kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
		1.1.2.2	Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olahraga	1.1.2.2.1	Mengembangkan dan mengelola sarana, prasarana dan fasilitas olah raga serta meningkatkan pemasyarakatan dan prestasi olahraga
1.2.1	Menurunnya kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1.2.1.1	Perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat miskin	1.2.1.1.1	Meningkatkan perlindungan, jaminan dan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemberdayaan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial serta memperluas dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat miskin
		1.2.1.2	Peningkatan ketahanan pangan	1.2.1.2.1	Mengendalikan stabilitas ketersediaan bahan pangan strategis yang berkualitas dan terjangkau serta mengembangkan kerjasama penyediaan bahan pangan strategis
		1.2.1.3	Penguatan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak	1.2.1.3.1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		1.2.1.4	Peningkatan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga	1.2.1.4.1	Meningkatkan advokasi dan pendayagunaan PLKB dan kader KB serta memperkuat kesertaan KB dan ketahanan kesejahteraan keluarga
1.2.2	Meningkatnya kesempatan kerja	1.2.2.1	Perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan kualitas tenaga kerja	1.2.2.1.1	Memperluas bursa tenaga kerja dan wirausaha serta mengembangkan kelembagaan, pelatihan, serifikasi kompetensi, produktivitas, penempatan dan perlindungan tenaga kerja
		1.2.2.2	Pemberdayaan dan pembinaan	1.2.2.2.1	Mengembangkan, meningkatkan

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
			kepemudaan		dan membina kualitas SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana kepemudaan
1.3.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	1.3.1.1	Pengembangan dan peningkatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.3.1.1.1	Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur data center, layanan internet/intranet, standarisasi dan integrasi aplikasi sistem informasi pelayanan publik dan pemerintahan serta meningkatkan desiminasi dan kemitraan komunikasi publik untuk mendukung smart city
		1.3.1.2	Pengembangan, pengelolaan dan publikasi data statistik daerah	1.3.1.2.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem dan pelayanan dalam pengelolaan dan publikasi data statistik daerah
		1.3.1.3	Peningkatan sistem persandian daerah	1.3.1.3.1	Meningkatkan keamanan sistem persandian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
		1.3.1.4	Harmonisasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah	1.3.1.4.1	Meningkatkan pembinaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan daerah serta kesejahteraan rakyat
				1.3.1.4.2	Meningkatkan dukungan kapasitas dan kinerja DPRD
		1.3.1.5	Peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan	1.3.1.5.1	Meningkatkan pelayanan paten kecamatan dan kelurahan serta koordinasi & pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah kecamatan dan kelurahan
				1.3.1.5.2	Meningkatkan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
		1.3.1.6	Peningkatan sistem dan kualitas perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan	1.3.1.6.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, komunikatif, dan berkualitas
				1.3.1.6.2	Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah serta mendayagunakan penelitian dan pengembangan pembangunan yang inovatif
		1.3.1.7	Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	1.3.1.7.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
		1.3.1.8	Optimalisasi potensi sumber pendapatan daerah serta peningkatan sistem tata kelola	1.3.1.8.1	Mengembangkan dan meningkatkan intensifikasi potensi sumber pendapatan, kualitas sistem dan pelayanan pendapatan

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
			administrasi keuangan dan aset daerah	1.3.1.8.2	daerah Meningkatkan sistem pengelolaan anggaran dan akuntansi keuangan daerah serta pengelolaan pemanfaatan aset daerah
		1.3.1.9	Peningkatan kualitas SDM apartur yang profesional, kreatif, inovatif dan berintegritas	1.3.1.9.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem pengelolaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan SDM apartur
		1.3.1.10	Penataan status kepemilikan tanah pemerintah daerah dan peningkatan advokasi dan pengawasan tanah milik pemda	1.3.1.10.1	Mengembangkan sistem penataan dan status kepemilikan tanah pemerintah daerah serta meningkatkan advokasi dan pengawasan tanah milik pemerintah daerah
		1.3.1.11	Pengembangan dan pemasyarakatan budaya baca masyarakat serta peningkatan pelayanan perpustakaan	1.3.1.11.1	Mengembangkan dan meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sistem, sarana, prasarana, fasilitas dan SDM perpustakaan
		1.3.1.12	Pengembangan dan pengelolaan sistem kearsipan	1.3.1.12.1	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem kearsipan online dan tata kelola kearsipan yang baku sesuai standar
		1.3.1.13	Peningkatan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1.3.1.13.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem online dan mobile dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		1.3.1.14	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban, kerukunan hidup masyarakat dan ketahanan bangsa serta penanggulangan bencana	1.3.1.14.1 1.3.1.14.2 1.3.1.14.3	Meningkatkan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban masyarakat Meningkatkan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dalam negeri dan ketahanan bangsa Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana
		1.3.1.15	Pembangunan gedung pemerintah daerah dan pelayanan publik	1.3.1.15.1	Membangun dan memelihara gedung pemerintah dan pelayanan publik
5	Sasaran	24	Strategi	29	Arah Kebijakan

2. Arah Kebijakan Pembangunan Pada Misi 2 : **Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kota Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan**

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
2.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perkotaan	2.1.1.1	Pengembangan dan integrasi sistem transportasi serta peningkatan kualitas	2.1.1.1.1	Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem transportasi umum, meningkatkan

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
			pengelolaan angkutan umum dan lalu lintas		ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana angkutan umum dan penerangan jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan penertiban angkutan jalan
		2.1.1.2	Pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	2.1.1.2.1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan
2.1.2	Meningkatnya kualitas permukiman	2.1.2.1	Pengembangan dan penataan permukiman serta peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah domestik	2.1.2.1.1	Merehabilitasi rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas parasana sarana dasar permukiman serta mengembangkan rumah susun layak huni yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
				2.1.2.1.2	Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan pelayanan bangunan serta kapasitas jasa konstruksi
				2.1.2.1.3	Mengembangkan jaringan dan meningkatkan pelayanan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik
2.1.3	Meningkatnya kualitas drainase dan sumber daya air	2.1.3.1	Pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas sistem jaringan drainase dan sumber daya air	2.1.3.1.1	Mengembangkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan drainase dan sumber daya air
2.1.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2.1.4.1	Peningkatan penataan dan kapasitas lingkungan hidup serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta Pengelolaan persampahan berbasis masyarakat dan peningkatan kapasitas TPA	2.1.4.1.1	Meningkatkan penataan dan kapasitas lingkungan hidup serta pemantauan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
				2.1.4.1.2	Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan persampahan berbasis 3R dan kapasitas TPA
		2.1.4.2	Pengembangan ketersediaan dan peningkatan kualitas ruang terbuka	2.1.4.2.1	Mengembangkan ruang terbuka hijau, taman, tempat bermain anak dan keluarga serta dekorasi kota
		2.1.4.3	Peningkatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	2.1.4.3.1	Menyusun dan mensosialisasikan rencana tata ruang serta mengendalikan pemanfaatan ruang
4	Sasaran	7	Strategi	10	Arah Kebijakan

3. Arah Kebijakan Pembangunan Pada Misi 3 : **Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Mandiri Dan Berkeadilan**

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
3.1.1	Meningkatnya investasi daerah	3.1.1.1	Peningkatan iklim investasi yang kondusif	3.1.1.1.1	Menyederhanakan sistem dan mempermudah pelayanan investasi, pelayanan perizinan dan non peizinan, serta mengembangkan insentif dan disinsentif investasi
3.1.2	Meningkatnya perekonomian masyarakat	3.1.2.1	Pengembangan, penataan, dan peningkatan industri, perdagangan, UMKM dan koperasi, pariwisata, serta pertanian dan perikanan	3.1.2.1.1	Mengembangkan dan meningkatkan pasar tradisional yang bersih dan modern, tata niaga perdagangan serta membina pelaku usaha perdagangan
				3.1.2.1.2	Mengembangkan produk industri kecil menengah (IKM) yang kreatif dan inovatif
				3.1.2.1.3	Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
				3.1.2.1.4	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana prasarana produksi, kualitas produk yang kreatif dan inovatif, promosi dan pemasaran usaha mikro
				3.1.2.1.5	Mengembangkan potensi, destinasi, promosi, sumber daya manusia, fasilitas dan jasa pendukung pariwisata
				3.1.2.1.6	Meningkatkan kualitas sumber daya (fasilitas, peralatan, sanggar, SDM) kebudayaan serta mengembangkan festival budaya dan pagelaran kesenian daerah, taman budaya, museum kota dan kawasan cagar budaya
				3.1.2.1.7	Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan serta kesehatan hewan
2	Sasaran	2	Strategi	8	Arah Kebijakan

C.5. Program Pembangunan

Berpijak pada strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan maka selanjutnya dirumuskan berbagai program pembangunan daerah. Berikut ini diuraikan program pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023

1. Program Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 Pada Misi 1

Misi 1 : Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berintegritas.

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
MISI 1 : Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berintegritas				
1.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1.1.1.1	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pendidikan karakter, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan non formal	1.1.1.1.1
			Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kurikulum, manajemen kelembagaan, sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan, minat, bakat, prestasi peserta didik, serta penguatan pendidikan karakter akhlak mulia, kesusilaan, budaya, kreatif dan inovatif serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan non formal	
			1	1
			1 01	1
			1 01 01	1
			1 01 02	1
			1 03	1
			1 03 08	1
			2	1
			2 10	1
			2 10 05	1
1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1.2.1	Peningkatan kemandirian kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan	1.1.2.1.1
			Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dan pengendalian dan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan,	
			1	1
			1 02	1
			1 02 01	1
			1 02 02	1

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program		Perangkat Daerah
					produksi pangan (makanan minuman), serta kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat		Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
						1 02 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
						1 02 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
						1 02 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
						1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						1 02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
						1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						1 03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
						1 03 08	Program Penataan Bangunan Gedung	Disperkimtan
						2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						2 10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	
						2 10 05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Disperkimtan
		1.1.2.2	Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olahraga	1.1.2.2.1	Mengembangkan dan mengelola sarana, prasarana dan fasilitas olah raga serta meningkatkan pemasyarakatan dan prestasi olahraga			
						2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						2 19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	
						2 19 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
						2 19 03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
						1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						1 03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
						1 03 08	Program Penataan Bangunan Gedung	Disperkimtan
						2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						2 10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	
						2 10 05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan	Disperkimtan

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program		Perangkat Daerah
							Santunan Tanah Untuk Pembangunan	
1.2.1	Menurunnya kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1.2.1.1	Perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat miskin	1.2.1.1.1	Meningkatkan perlindungan, jaminan dan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemberdayaan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial serta memperluas dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat miskin	1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
1 06						Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
1 06 01						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
1 06 02						Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	
1 06 04						Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	
1 06 05						Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	
1 06 06						Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial	
		1.2.1.2	Peningkatan ketahanan pangan	1.2.1.2.1	Mengendalikan stabilitas ketersediaan bahan pangan strategis yang berkualitas dan terjangkau serta mengembangkan kerjasama penyediaan bahan pangan strategis	2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
2 09						Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		
2 09 01						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 02						Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 03						Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 04						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan						
	1.2.1.3	Penguatan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak	1.2.1.3.1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
2 08					Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
2 08 01					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB		
2 08 02					Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DP3AP2KB		
						2 08 03	Program Perlindungan Perempuan	DP3AP2KB

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program		Perangkat Daerah
						2 08 06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DP3AP2KB
						2 08 07	Program Perlindungan Khusus Anak	DP3AP2KB
		1.2.1.4	Peningkatan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga	1.2.1.4.1	Meningkatkan advokasi dan pendayagunaan PLKB dan kader KB serta memperkuat kesertaan KB dan ketahanan kesejahteraan keluarga			
						2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						2 14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						2 14 02	Program Pengendalian Penduduk	DP3AP2KB
						2 14 03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP3AP2KB
						2 14 04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP3AP2KB
1.2.2	Meningkatnya kesempatan kerja	1.2.2.1	Perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan kualitas tenaga kerja	1.2.2.1.1	Memperluas bursa tenaga kerja dan wirausaha serta mengembangkan kelembagaan, pelatihan, serifikasi kompetensi, produktivitas, penempatan dan perlindungan tenaga kerja			
						2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						2 07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	
						2 07 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan
						2 07 02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
						2 07 03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
						2 07 04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
						2 07 05	Program Hubungan Industrial	Dinas Ketenagakerjaan
		1.2.2.2	Pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan	1.2.2.2.1	Mengembangkan, meningkatkan dan membina kualitas SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana kepemudaan			
						2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						2 19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	
						2 19 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
						2 19 04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.3.1	Meningkatnya kualitas	1.3.1.1	Pengembangan dan	1.3.1.1.1	Mengembangkan dan			

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program			Perangkat Daerah
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik		peningkatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		meningkatkan infrastruktur data center, layanan internet/intranet, standarisasi dan integrasi aplikasi sistem informasi pelayanan publik dan pemerintahan serta meningkatkan desiminasi dan kemitraan komunikasi publik untuk mendukung smart city	2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
					2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika		
					2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
					2	16	02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
					2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1.3.1.2	Pengembangan, pengelolaan dan publikasi data statistik daerah	1.3.1.2.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem dan pelayanan dalam pengelolaan dan publikasi data statistik daerah	2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
					2	20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		
					2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1.3.1.3	Peningkatan sistem persandian daerah	1.3.1.3.1	Meningkatkan keamanan sistem persandian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
					2	21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		
					2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1.3.1.4	Harmonisasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah	1.3.1.4.1	Meningkatkan pembinaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan daerah serta kesejahteraan rakyat	4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
					4	01	Sekretariat Daerah		
					4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
					4	01	02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
					4	01	03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
					4	02		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
	1.3.1.4.2	Meningkatkan dukungan kapasitas dan kinerja DPRD	4	02	sekretariat DPRD				
			4	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat DPRD		
			4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD		
1.3.1.5	Peningkatan	1.3.1.5.1	Meningkatkan pelayanan paten						

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program		Perangkat Daerah		
		pelayanan kecamatan dan kelurahan		kecamatan dan kelurahan serta koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah kecamatan dan kelurahan	7		Unsur Kewilayahan			
					7 01		Kecamatan			
					7 01 01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan		
					7 01 02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan		
				7 01 04		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan			
				1.3.1.5.2		Meningkatkan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7		Unsur Kewilayahan	
							7 01		Kecamatan	
							7 01 03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
		1.3.1.6	Peningkatan sistem dan kualitas perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan	1.3.1.6.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, komunikatif, dan berkualitas	2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
						2 13		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
						2 13 05		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Kecamatan	
						5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
						5 01		Perencanaan		
						5 01 01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5 01 02		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
			5 01 03		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
1.3.1.6.2	Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah serta mendayagunakan penelitian dan pengembangan pembangunan yang inovatif			5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
				5 05		Penelitian Dan Pengembangan				
				5 05 02		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program			Perangkat Daerah			
		1.3.1.7	Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	1.3.1.7.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	6		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
						6	01	Inspektorat Daerah				
						6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Inspektorat		
						6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat		
						6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat		
				1.3.1.8	Optimalisasi potensi sumber pendapatan daerah serta peningkatan sistem tata kelola administrasi keuangan dan aset daerah	1.3.1.8.1	Mengembangkan dan meningkatkan intensifikasi potensi sumber pendapatan, kualitas sistem dan pelayanan pendapatan daerah	5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
								5	02	Keuangan		
								5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Pendapatan Daerah
								5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
								5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	
1.3.1.8.2	Meningkatkan sistem pengelolaan anggaran dan akuntansi keuangan daerah serta pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah			5	02	Keuangan						
				5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				
				5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
				5	02		Keuangan					
				5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				
1.3.1.9	Peningkatan kualitas SDM apartur yang profesional, kreatif, inovatif dan berintegritas	1.3.1.9.1	Mengembangkan dan meningkatkan sistem pengelolaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan SDM apartur	5	03		Kepegawaian					
				5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
				5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya				
				5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
				5	03		Kepegawaian					

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
			5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Manusia
			5 04 Pendidikan Dan Pelatihan	
			5 04 02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	1.3.1.10 Penataan status kepemilikan tanah pemerintah daerah, peningkatan advokasi dan pengawasan tanah milik pemerintah daerah	1.3.1.10.1 Mengembangkan sistem penataan dan status kepemilikan tanah pemerintah daerah serta meningkatkan advokasi dan pengawasan tanah milik pemerintah daerah	2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			2 10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	
			2 10 10 Program Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1.3.1.11 Pengembangan dan pemyarakatan budaya baca masyarakat serta peningkatan pelayanan perpustakaan	1.3.1.11.1 Mengembangkan dan meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sistem, sarana, prasarana, fasilitas dan SDM perpustakaan	2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			2 23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	
			2 23 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			2 23 02 Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	1.3.1.12 Pengembangan dan pengelolaan sistem kearsipan	1.3.1.12.1 Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem kearsipan online dan tata kelola kearsipan yang baku sesuai standar	2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			2 24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	
			2 24 02 Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			2 24 03 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	1.3.1.13 Peningkatan kemudahan pelayanan administrasi	1.3.1.13.1 Mengembangkan dan meningkatkan sistem online dan mobile dalam pelayanan	2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program		Perangkat Daerah	
			kependudukan dan pencatatan sipil		administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2	12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
						2	12 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						2	12 02	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						2	12 03	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						2	12 04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.3.1.14	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban, kerukunan hidup masyarakat dan ketahanan bangsa serta penanggulangan bencana	1.3.1.14.1	Meningkatkan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						1	05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
						1	05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
						1	05 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
				1.3.1.14.2	Meningkatkan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dalam negeri dan ketahanan bangsa	8		Unsur Pemerintahan Umum	
						8	01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	
						8	01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						8	01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						8	01 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						8	01 04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program			Perangkat Daerah	
						8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			1.3.1.14.3		Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana					
						1			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						1	05		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
						1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.3.1.15	Pembangunan gedung pemerintah daerah dan pelayanan publik	1.3.1.15.1	Membangun dan memelihara gedung pemerintah daerah dan pelayanan publik					
						1			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						1	03		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
						1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
						2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	
						2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
5	Sasaran	24	Strategi	29	Arah Kebijakan	93			Program	

2. Program Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 Pada Misi 2

Misi 2 : Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kota Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut.

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
MISI 2 : BERSAMA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KOTA YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN					
2.1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan	2.1.1.1 Pengembangan dan integrasi sistem transportasi serta peningkatan kualitas pengelolaan angkutan umum dan lalu lintas	2.1.1.1.1 Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem transportasi umum, meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana angkutan umum dan penerangan jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan penertiban angkutan jalan	2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			2 15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	
			2 15 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			2 15 02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
	2.1.1.2 Pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	2.1.1.2.1 Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan	1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			1 03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
			1 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1 03 10	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			2 10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	
		2 10 05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.1.2 Meningkatkan kualitas permukiman	2.1.2.1 Pengembangan dan penataan permukiman serta peningkatan cakupan dan kualitas	2.1.2.1.1 Merehabilitasi rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas parasana sarana dasar	1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program		Perangkat Daerah
			elayanan air bersih dan pengelolaan air limbah domestik		permukiman serta mengembangkan rumah susun layak huni yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1 04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
						1 04 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
						1 04 02	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
						1 04 03	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
						1 04 05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
				2.1.2.1.2	Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan pelayanan bangunan serta kapasitas jasa konstruksi	1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						1 04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
						1 04 03	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
						1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						1 03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
						1 03 11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
				2.1.2.1.3	Mengembangkan jaringan dan meningkatkan pelayanan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik	1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						1 03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
						1 03 03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
						1 03 05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
2.1.3	Meningkatnya							

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program			Perangkat Daerah
kualitas drainase dan sumber daya air	2.1.3.1	Pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas sistem jaringan drainase dan sumber daya air	2.1.3.1.1	Mengembangkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan drainase dan sumber daya air					
					1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
					1 03		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
					1 03 02		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					1 03 06		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
					2 10		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan		
		2 10 05		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2.1.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang	2.1.4.1	Peningkatan penataan dan kapasitas lingkungan hidup serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta Pengelolaan berbasis persampahan berbasis masyarakat dan peningkatan kapasitas TPA	2.1.4.1.1	Meningkatkan penataan dan kapasitas lingkungan hidup serta pemantauan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup				
					2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
					2 11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		
					2 11 01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	
					2 11 02		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
					2 11 03		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
					2 11 05		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup	
					2 11 06		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Dinas Lingkungan Hidup	
					2 11 08		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program		Perangkat Daerah
						2 11 10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				2.1.4.1.2	Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan persampahan berbasis 3R dan kapasitas TPA	2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						2 11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
						2 11 11	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.1.4.2	Pengembangan ketersediaan dan peningkatan kualitas ruang terbuka	2.1.4.2.1	Mengembangkan ruang terbuka hijau, taman, tempat bermain anak dan keluarga serta dekorasi kota	2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						2 11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
						2 11 04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
						2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						2 11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
						2 11 04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						2 10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	
						2 10 05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.1.4.3	Peningkatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	2.1.4.3.1	Menyusun dan mensosialisasikan rencana tata ruang serta mengendalikan pemanfaatan ruang	1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						1 03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
						1 03 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Sasaran	7	Strategi	10	Arah Kebijakan	28	Program	

3. Program Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 Pada Misi 3

Misi 3 : Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Mandiri Dan Berkeadilan adalah sebagai berikut.

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
MISI 3 : BERSAMA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN				
3.1.1	Meningkatnya investasi daerah	3.1.1.1	3.1.1.1.1	Menyederhanakan sistem dan mempermudah pelayanan investasi, pelayanan perizinan dan non peizinan, serta mengembangkan insentif dan disinsentif investasi
			2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
			2 18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
			2 18 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			2 18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			2 18 03	Program Promosi Penanaman Modal
			2 18 04	Program Pelayanan Penanaman Modal
			2 18 05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			2 18 06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
3.1.2	Meningkatnya perekonomian masyarakat	3.1.2.1	3.1.2.1.1	Mengembangkan dan meningkatkan pasar tradisional yang bersih dan modern serta tata niaga perdagangan serta membina pelaku usaha perdagangan
			3	Urusan Pemerintahan Pilihan
			3 30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
			3 30 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			3 30 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			3 30 04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program		Perangkat Daerah	
								Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						3	30 05	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						3	30 06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						3	30 07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				3.1.2.1.2	Mengembangkan produk industri kecil menengah (IKM) yang kreatif dan inovatif				
						3		Urusan Pemerintahan Pilihan	
						3	31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	
						3	31 02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						3	31 03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				3.1.2.1.3	Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi				
						2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						2	17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
						2	17 03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan	Dinas

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program		Perangkat Daerah
							Koperasi	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						2 17 04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						2 17 05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						2 17 06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				3.1.2.1.4	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana prasarana produksi, kualitas produk yang kreatif dan inovatif, promosi dan pemasaran usaha mikro	2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						2 17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
						2 17 07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						2 17 08	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				3.1.2.1.5	Mengembangkan potensi, destinasi, promosi, sumber daya manusia, fasilitas dan jasa	3	Urusan Pemerintahan Pilihan	
						3 26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Program		Perangkat Daerah
					pendukung pariwisata	3 26 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						3 26 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						3 26 03	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						3 26 05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			3.1.2.1.6		Meningkatkan kualitas sumber daya (fasilitas, peralatan, sanggar, SDM) kebudayaan serta mengembangkan festival budaya dan pagelaran kesenian daerah, taman budaya, museum kota dan kawasan cagar budaya	2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
						2 22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	
						2 22 02	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						2 22 03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						2 22 04	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						2 22 05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						2 22 06	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			3.1.2.1.7		Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan serta kesehatan hewan	3	Urusan Pemerintahan Pilihan	
						3 25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	
						3 25 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan
						3	Urusan Pemerintahan Pilihan	
						3 27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	
						3 27 02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan
						3 27 04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan
2	Sasaran	2	Strategi	8	Arah Kebijakan	32	Program	

C.6. Target Kinerja

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Pencapaian visi pemerintah daerah bisa didekati dengan berbagai pendekatan dan instrumen pembangunan daerah terkait tolok ukur kinerja yang menjadi representasi perwujudan visi dan pelaksanaan misi pembangunan daerah. Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terkait tentang arsitektur kinerja pembangunan daerah bahwa tolok ukur kinerja perwujudan visi dan pelaksanaan misi dapat direpresentasikan melalui beberapa indikator pembangunan daerah dengan tingkatan dampak (impact) yaitu suatu indikator keberhasilan pembangunan daerah yang bersifat makro dan diperoleh dari pencapaian keseluruhan program prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan.

Indikator makro pembangunan daerah Kota Tangerang merupakan tolok ukur dan representasi atas keberhasilan visi dan pelaksanaan misi pembangunan. Penetapan indikator makro pembangunan daerah Kota Tangerang tersebut merujuk dan selaras dengan indikator makro pembangunan Provinsi Banten yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Tabel I-33 Indikator Makro Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2021-2023

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Realisasi		Target			Kondisi Akhir (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	77,92	78,43	78,25	78,53-78,73	78,82-79,05	79,13-80,05	79,13-80,05
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,95	4,05	-6,92	3,15-4,15	4,13-5,01	4,86-5,30	4,86-5,30
3	Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)	%	4,76	4,43	5,22	4,60-4,93	4,35-4,65	4,01-4,39	4,01-3,39
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,41	7,13	8,63	7,55-8,24	6,90-7,87	6,45-7,54	6,45-7,54
5	Indeks Gini (Gini Rasio)	Point	0,360	0,320	0,339	0,325-0,333	0,315-0,325	0,305-0,316	0,305-0,316

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Tangerang 2019-2023

Indikator kinerja utama (IKU) daerah dirumuskan berdasarkan indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berikut ini diuraikan penetapan IKU daerah Kota Tangerang Tahun 2021-2023.

Tabel I-34 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tangerang Tahun 2021-2023

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi		Target		
				2019	2020	2021	2022	2023
MISI 1 :								
Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berintegritas								
1.1	Tujuan 1.1 : Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1 Indeks pendidikan (Indeks pengetahuan)	Point	73,94	74,11	74,73	74,93	76,74
		2 Indeks kesehatan (Indeks harapan hidup)	Point	79,34	79,38	79,43	79,48	79,66
1.1.1	Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1.1 Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	98,46	97,51	97,63	97,67	97,72
		1.2 Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	98,99	87,23	98,99	98,99	99,00
1.1.2	Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1 Angka kematian bayi (AKB)	Orang/1.000 kelahiran hidup	1,15	1,14	1,13	1,10	1,07
		2.2 Angka kematian ibu (AKI)	Orang /100.000 kelahiran hidup	15,66	12,92	12,90	12,51	12,13
		2.3 Angka kesakitan	Orang /100.000 penduduk	223	186	186	184	182
1.2	Tujuan 1.2 : Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	1 Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	%	4,43	5,22	4,60-4,93	4,35-4,65	4,01-4,39
1.2.1	Sasaran 1.2.1 : Menurunnya kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1.1 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Orang	113.525	109.070	104.910	100.579	95.403
1.2.2	Sasaran 1.2.2 :							

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi		Target		
				2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatnya kesempatan kerja	2.1 Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	7,13	8,63	7,55-8,24	6,90-7,87	6,45-7,54
1.3	Tujuan 1.3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1 Indeks reformasi birokrasi	Point	63,61	63,61	65,00	67,00	70,00
1.3.1	Sasaran 1.3.1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	1.1 Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah	A, BB, B, CC, C, D	B	BB	BB	BB	BB
		1.2 Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		1.3 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	Point	82,62	84,25	84,83	85,33	85,83
MISI 2 :								
Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kota Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan								
2.1	Tujuan 2.1 : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan	1 Indeks pembangunan sarana prasarana perkotaan	Point	78,68	79,46	82,40	84,38	86,31
2.1.1	Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perkotaan	1.1 Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%	86,23	86,96	89,96	92,11	94,26
		1.2 Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan	Km/jam	21	22	23	24	25
2.1.2	Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya kualitas permukiman	2.1 Persentase permukiman kumuh	%	0,12	0,12	0,10	0,09	0,08
		2.2 Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2.3 Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,73	99,79	99,79	99,80	99,81
2.1.3	Sasaran 2.1.3 : Meningkatnya kualitas drainase dan sumber daya air	3.1 Luas banjir dan genangan	Ha	395,16	376,88	286,38	239,68	195,88

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi		Target		
				2019	2020	2021	2022	2023
2.1.4	Sasaran 2.1.4 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	4.1 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Point	60,32	57,33	57,33	57,63	57,93
		4.2 Tingkat pengelolaan sampah	%	100,00	99,22	100,00	100,00	100,00
MISI 3 :								
Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Mandiri Dan Berkeadilan								
3.1	Tujuan 3.1 : Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat yang berdaya saing	1 Nilai PDRB ADHK	Rp. Trilyun	110,59	102,94	106,18-107,22	110,57-112,59	115,94-118,57
		2 Indeks pengeluaran (daya beli)	Point	82,24	81,46	82,20	82,94	83,91
3.1.1	Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya investasi daerah	1.1 Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Trilyun	7,97	8,35	8,77	9,21	9,67
3.1.2	Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya perekonomian masyarakat	2.1 Laju inflasi	%	4,30	1,18	3,50	3,50	3,50
		2.2 Indeks gini (gini rasio)	Point	0,320	0,339	0,325-0,333	0,315-0,325	0,305-0,316

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Tangerang 2019-2023

Indikator kinerja daerah pada dasarnya dirumuskan berdasarkan indikator tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan atau kompositnya. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah (*impact*). Indikator tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah diperlukan untuk mengukur kinerja masing-masing program yang telah dirumuskan dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Berikut diuraikan penetapan indikator kinerja daerah Kota Tangerang Tahun 2021-2023.

Tabel I-35 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Tahun 2021-2023

Kode						Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
								Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
A						ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
A	1					Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
A	1	3				Penunjang Urusan Pemerintahan						
A	1	3	0	0	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	78,43	78,25	78,53-78,73	78,82-79,05	79,13-80,05
A	1	3	0	0	2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,05	-6,92	3,15-4,15	4,13-5,01	4,86-5,30
A	1	3	0	0	3	Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin) (Persentase Penduduk yang Hidup Dibawah Garis Kemiskinan)	%	4,43	5,22	4,60-4,93	4,35-4,65	4,01-4,39
A	1	3	0	0	4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	82,62	84,25	84,83	85,33	85,83
A	1	3	0	0	5	Indeks Daya Beli (IDB)	Point	82,24	81,46	82,20	82,94	83,91
A	1	3	0	0	6	Pengeluaran per Kapita Setahun yang Disesuaikan (PPP/DB)	Rp. Ribu	14.86	14.484	14.84	15.205	15.696
A	2					Fokus Kesejahteraan Sosial						
A	2	1				Urusan Wajib						
A	2	1	1			Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
A	2	1	1	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan						
A	1	1	1	1	1	Indeks Pengetahuan (Indeks Pendidikan) (IP)	Point	73,94	74,11	74,73	74,93	76,74
A	1	1	1	1	2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,84	13,85	13,86	13,87	14,26
A	1	1	1	1	3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,65	10,69	10,87	10,92	11,14
A	1	1	1	1	4	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	98,46	97,51	97,63	97,67	97,72
A	1	1	1	1	5	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	98,99	87,23	98,99	98,99	99,00
A	2	1	1	2		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						
A	2	1	1	2	1	Indeks Kesehatan (Indeks Harapan Hidup)	Point	79,34	79,38	79,43	79,48	79,66
A	2	1	1	2	2	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,57	71,60	71,63	71,66	71,78
A	2	1	1	2	3	Angka kematian bayi (AKB)	Orang per 1.000 kelahiran hidup	1,15	1,14	1,13	1,10	1,07
A	2	1	1	2	4	Angka kematian ibu (AKI)	Orang per 100.000 kelahiran hidup	15,66	12,92	12,90	12,51	12,13
A	2	1	1	2	5	Angka kesakitan	Orang per 100.000 penduduk	223	186	186	184	182
A	2	1	2			Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan						

Kode						Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	
								Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
						Dasar							
A	2	1	2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja							
A	2	1	2	1	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,13	8,63	7,55	6,90	6,45	
B	1					ASPEK PELAYANAN UMUM							
B	1					Fokus Urusan Wajib							
B	1	1				Urusan Wajib							
B	1	1	1			Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
B	1	1	1	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan							
B	1	1	1	1	1	Tingkat ketersediaan daya tampung SD	%	87,62	87,92	87,92	87,92	87,92	
B	1	1	1	1	2	Persentase SD yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	98,96	98,96	98,96	98,96	98,96	
B	1	1	1	1	3	Tingkat layanan terhadap siswa miskin SD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
B	1	1	1	1	4	Persentase pengembagan minat bakat siswa SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
B	1	1	1	1	5	Tingkat ketersediaan daya tampung SMP	%	92,19	96,68	96,68	96,68	96,68	
B	1	1	1	1	6	Persentase SMP yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	98,47	98,47	98,47	98,47	98,47	
B	1	1	1	1	7	Tingkat layanan terhadap siswa miskin SMP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
B	1	1	1	1	8	Persentase pengembangan minat bakat Siswa SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
B	1	1	1	1	9	Persentase jumlah warga negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	86,79	58,97	100,00	100,00	100,00	
B	1	1	1	1	10	Tingkat ketersediaan daya tampung PAUD	%	72,42	82,05	82,05	82,05	83,73	
B	1	1	1	1	11	Persentase PAUD yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	89,15	89,15	89,15	89,15	89,15	
B	1	1	1	1	12	Persentase pengembangan minat bakat siswa PAUD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
B	1	1	1	1	13	Persentase jumlah warga negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
B	1	1	1	1	14	Persentase pendidikan non formal yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
B	1	1	1	1	15	Persentase lulusan Paket A, B dan C	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
B	1	1	1	1	16	Persentase guru bersertifikat	%	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	
B	1	1	1	1	17	Persentase guru SD dan SMP berkualifikasi S1/D4	%	89,39	90,88	90,88	90,88	90,88	
B	1	1	1	1	18	Tingkat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
B	1	1	1	2		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan							
B	1	1	1	2	1	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
B	1	1	1	2	2	Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Kode						Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
								Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
B	1	1	1	2	3	Persentase bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	4	Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	94,04	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	5	Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	6	Persentase usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	7	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	89,95	56,45	89,00	89,00	89,00
B	1	1	1	2	8	Cakupan pembinaan lingkungan sehat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	9	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	10	Persentase orang dengan terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	11	Persentase kasus berpotensi KLB yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	12	Persentase jumlah penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	13	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	14	Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	15	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	83,33	75,71	80,00	85,33	90,63
B	1	1	1	2	16	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer yang memenuhi standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	17	Cakupan masyarakat yang mendapat kunjungan rumah oleh petugas kesehatan sesuai standar	%	87,50	50,00	55,00	62,50	67,50
B	1	1	1	2	18	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	19	Persentase ketersediaan alat kesehatan dan alat laboratorium puskesmas	%	101,56	92,33	95,00	95,00	95,00
B	1	1	1	2	20	Cakupan penduduk Kota Tangerang yang memiliki jaminan kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	21	Cakupan pembinaan kesehatan kerja dan olahraga	%	85,29	89,47	90,00	90,91	91,67
B	1	1	1	2	22	Persentase pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	%	85,29	89,47	90,00	90,91	91,67
B	1	1	1	2	23	Persentase tenaga kesehatan yang meningkat kompetensinya	%	99,20	21,38	79,82	83,91	87,99
B	1	1	1	2	24	Persentase IRTP yang memenuhi syarat	%	96,67	80,83	95,00	95,00	95,00
B	1	1	1	2	25	Persentase fasilitas kefarmasian (Apotek, Toko Obat dan UMOT) dan alat kesehatan (Toko Alat Kesehatan	%	70,00	72,00	75,00	80,00	82,22

Kode						Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
								Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
						dan Optikal) yang memenuhi syarat						
B	1	1	1	2	26	Cakupan posyandu aktif	%	100,00	98,07	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	27	Cakupan rumah tangga ber PHBS	%	60,61	68,29	69,00	72,00	75,00
B	1	1	1	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						
B	1	1	1	3	1	Persentase dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air yang ditindaklanjuti	%	57,14	57,14	71,43	82,14	100,00
B	1	1	1	3	2	Persentase sumber daya air yang dipelihara	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
B	1	1	1	3	3	Persentase luas banjir yang tertangani	%	19,87	30,42	62,31	95,88	100,00
B	1	1	1	3	4	Persentase sarana prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	%	66,06	71,33	75,00	87,50	100,00
B	1	1	1	3	5	Persentase dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase yang ditindaklanjuti	%	57,14	57,14	75,00	87,50	100,00
B	1	1	1	3	6	Persentase saluran drainase/gorong-gorong yang dipelihara	%	50,00	53,00	56,00	59,00	60,00
B	1	1	1	3	7	Persentase luas genangan yang tertangani	%	19,87	30,42	32,32	68,44	100,00
B	1	1	1	3	8	Persentase sarana prasarana drainase dalam kondisi baik	%	66,06	71,33	75,00	85,00	100,00
B	1	1	1	3	9	Persentase dokumen perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang ditindak lanjuti	%	45,16	58,06	74,19	90,32	100,00
B	1	1	1	3	10	Persentase dokumen pemuktahiran data leger yang akurat	%	25,81	29,03	67,74	83,87	100,00
B	1	1	1	3	11	Persentase panjang jalan yang dipelihara	%	83,57	85,07	86,57	88,07	89,57
B	1	1	1	3	12	Persentase jembatan yang dipelihara	%	87,76	90,56	93,36	96,15	98,95
B	1	1	1	3	13	Tingkat ketersediaan jalan	%	98,37	98,42	99,25	99,59	100,00
B	1	1	1	3	14	Tingkat ketersediaan jembatan	%	98,28	98,63	98,97	99,31	99,66
B	1	1	1	3	15	Tingkat ketersediaan dokumen rencana tata ruang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	16	Tingkat penyelesaian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	17	Tingkat penyelesaian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	18	Cakupan layanan air minum perpipaan	%	24	24,91	21,64	24,52	28,16
B	1	1	1	3	19	Tingkat kualitas air minum memenuhi baku mutu yang berlaku	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	20	Cakupan pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik	%	99,79	99,79	99,79	99,80	99,81
B	1	1	1	3	21	Tingkat kualitas air limbah domestik memenuhi baku mutu yang berlaku	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
								Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
B	1	1	1	3	22	Tingkat penyelesaian pembangunan/rehabilitasi gedung/bangunan sarana dan prasarana pendidikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	23	Tingkat penyelesaian pembangunan/rehabilitasi gedung/bangunan sarana dan prasarana kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	24	Tingkat penyelesaian pembangunan/rehabilitasi gedung/bangunan sarana dan prasarana olahraga	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	25	Tingkat penyelesaian pembangunan/ rehabilitasi gedung/ bangunan sarana dan prasarana pemerintah dan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	3	26	Persentase jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	17,50	35,73	30,00	40,00	50,00
B	1	1	1	4		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman						
B	1	1	1	4	1	Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	4	2	Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	4	3	Persentase bangunan yang memiliki kesesuaian dengan perijinan	%	129,73	129,73	30,00	34,62	41,07
B	1	1	1	4	4	Persentase rumah tidak layak huni	%	0,29	0,37	0,27	0,24	0,22
B	1	1	1	4	5	Persentase perumahan yang memiliki PSU	%	96,77	96,77	96,77	98,39	100,00
B	1	1	1	5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
B	1	1	1	5	1	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	2	Tingkat pembinaan kewaspadaan dini masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	3	Tingkat pembinaan satlinmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	4	Tingkat penyelesaian penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	5	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	6	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	7	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	8	Tingkat ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	9	Rata-rata waktu tanggap penanganan bencana kebakaran di daerah layanan WMK	Menit	14,91	14,10	15,00	15,00	15,00

Kode						Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
								Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
B	1	1	1	5	10	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	11	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana non kebakaran (banjir)	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	6		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial						
B	1	1	1	6	1	Persentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	6	2	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	102,43	70,39	71,90	73,41	74,87
B	1	1	1	6	3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (yang terpenuhi kebutuhan dasarnya)	%	15,65	17,05	18,45	19,85	21,25
B	1	1	1	6	4	Persentase pelayanan perlindungan sosial	%	108,64	77,60	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	6	5	Persentase pelayanan jaminan sosial	%	102,05	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	6	6	Persentase jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	6	7	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	%				100,00	100,00
B	2	1	2			Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
B	2	1	2	7		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja						
B	2	1	2	7	1	Tingkat ketersediaan perencanaan tenaga kerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	7	2	Prosentase tenaga kerja terlatih yang bersertifikat kompetensi	%	51,25	53,13	55,63	56,88	58,13
B	2	1	2	7	3	Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	78,13	80,00	80,00	80,94	81,88
B	2	1	2	7	4	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	%	59,06	83,62	62,20	63,78	65,35
B	2	1	2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak						
B	2	1	2	8	1	Tingkat partisipasi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pemberdayaan perempuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	8	2	Cakupan perempuan yang meningkat kualitas hidup (Cakupan Pemberdayaan Perempuan melalui	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00

Kode						Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
								Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
						peningkatan kualitas hidup perempuan)						
B	2	1	2	8	3	Persentase organisasi perempuan dalam pemberdayaan perempuan (Cakupan kelembagaan pemberdayaan perempuan)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	8	4	Persentase kekerasan (KDRT) terhadap perempuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	8	5	Capaian indikator kota layak anak (KLA)	%	75,00	77,50	80,00	82,50	85,00
B	2	1	2	8	6	Persentase kekerasan (KDRT) terhadap anak	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	9		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan						
B	2	1	2	9	1	Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	Gram/ kapita/ hari	72,26	71,50	72,26	72,26	72,26
B	2	1	2	9	2	Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan	Gram/ kapita/ hari	56,70	85,90	57,33	57,65	57,96
B	2	1	2	9	3	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	Kkal/ kapita/ hari	2.160,00	2.959,00	2.184,00	2.196,00	2.208,00
B	2	1	2	9	4	Tingkat stabilitas Harga Pangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	9	5	Tingkat cadangan pangan daerah	%	27,77	48,53	50,00	60,00	70,00
B	2	1	2	9	6	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	Kkal/ kapita/ hari	2.291,40	2.305,40	2.251,00	2.230,80	2.210,60
B	2	1	2	9	7	Rasio rekomendasi SKPG dan FSVA yang dimanfaatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	9	8	Tingkat pengawasan dan pembinaan keamanan pangan daerah	%	87,00	90,50	91,07	93,03	95,00
B	2	1	2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						
B	2	1	2	10	1	Rasio tanah milik pemda bersertifikat	%	11,11	21,05	24,87	28,20	31,53
B	2	1	2	10	2	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	10	3	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	10	4	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	10	5	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah dan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	10	6	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas jalan dan jembatan	%	27,27	45,45	63,64	81,82	100,00
B	2	1	2	10	7	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas sumber daya air dan drainase	%	27,27	45,45	63,64	81,82	100,00
B	2	1	2	10	8	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas	%	1,14	0,00	7,33	45,51	46,02

Kode						Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	
								Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
						lingkungan							
B	2	1	2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
B	2	1	2	11	1	Tingkat pelaksanaan evaluasi dokumen lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	11	3	Persentase titik pantau udara, kebisingan, air sungai, air situ dan air tanah yang sesuai baku mutu	%	64,80	35,68	70,00	75,14	80,00	
B	2	1	2	11	4	Tingkat penurunan emisi gas karbon	%	20,00	20,10	20,20	20,30	20,40	
B	2	1	2	11	5	Persentase ruang terbuka hijau (RTH) yang dikembangkan	%	4,13	4,13	4,14	4,19	4,24	
B	2	1	2	11	6	Tingkat pengelolaan limbah B3	%	70,00	75,00	85,00	90,00	100,00	
B	2	1	2	11	7	Persentase badan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
B	2	1	2	11	8	Persentase sekolah adhywiyata	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
B	2	1	2	11	9	Persentase RW yang dibina menjadi kampung iklim	%	10,00	15,00	23,00	25,00	27,00	
B	2	1	2	11	10	Persentase pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
B	2	1	2	11	11	Persentase volume sampah yang tertangani	%	84,00	90,19	82,00	78,00	75,00	
B	2	1	2	11	14	Persentase volume sampah yang berkurang melalui mekanisme 3R	%	16,00	9,03	18,00	22,00	25,00	
B	2	1	2	11	15	Peningkatan luas taman untuk RTH dan ruang terbuka non hijau publik yang tersedia	%	98,01	98,48	98,96	99,53	100,00	
B	2	1	2	11	16	Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap jumlah dekorasi kota dan reklame yang seharusnya	%	88,73	91,55	94,37	97,18	100,00	
B	2	1	2	12		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							
B	2	1	2	12	1	Persentase dokumen administrasi kependudukan yang terverifikasi sesuai standar	%	99,83	99,84	99,85	99,86	99,97	
B	2	1	2	12	2	Persentase peningkatan pengajuan permohonan dokumen administrasi kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
B	2	1	2	12	3	Persentase dokumen pencatatan sipil yang terverifikasi sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
B	2	1	2	12	4	Persentase peningkatan pengajuan permohonan dokumen pencatatan sipil	%	89,50	100,00	100,00	100,00	100,00	
B	2	1	2	12	5	Cakupan layanan SIAK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
B	2	1	2	12	6	Cakupan database kependudukan yang akurat dan valid	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
B	2	1	2	12	7	Tingkat pemanfaatan data kependudukan	%	0,00	19,51	21,00	31,00	43,00	
B	2	1	2	13		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa							
B	2	1	2	13	1	Tingkat pembinaan lembaga kemasyarakatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Kode						Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
								Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
B	2	1	2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
B	2	1	2	14	1	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	14	2	Persentase kelompok masyarakat (RW) yang berperan aktif dalam program pengendalian penduduk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	14	3	Persentase peserta KB aktif	%	77,17	77,21	77,26	77,30	77,34
B	2	1	2	14	4	Cakupan keluarga sakinah mawadah warahmah (samawa)	%		22,76	45,52	72,39	100,00
B	2	1	2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan						
B	2	1	2	15	1	Persentase hasil kajian, analisa dan evaluasi pengembangan sistem transportasi	%	17,24	37,93	58,62	79,31	100,00
B	2	1	2	15	2	Jumlah titik kemacetan yang tertangani	Titik	5,00	10,00	15,00	20,00	26,00
B	2	1	2	15	3	Jumlah beroperasinya koridor/trayek angkutan umum sistem transit	Koridor	3,00	8,00	12,00	13,00	13,00
B	2	1	2	15	4	Presentase PJU keselamatan jalan dalam kondisi baik	%	11,67	27,66	47,85	72,00	100,00
B	2	1	2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika						
B	2	1	2	16	1	Persentase pengembangan diseminasi informasi dan komunikasi publik	%	24,65	96,67	97,03	98,83	100,00
B	2	1	2	16	2	Persentase konten saluran media informasi sesuai kebutuhan	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
B	2	1	2	16	3	Presentase informasi yang terpublikasi	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
B	2	1	2	16	4	Presentase kecamatan yang memiliki kelompok informasi masyarakat (KIM) yang aktif	%	7,69	23,08	38,46	53,85	69,23
B	2	1	2	16	5	Presentase penyelenggaraan pelayanan informasi	%			100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	16	6	Persentase pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	%	24,65	96,67	97,03	98,83	100,00
B	2	1	2	16	7	Persentase pengembangan, integrasi aplikasi layanan publik	%	28,00	56,00	66,00	71,00	76,00
B	2	1	2	16	8	Presentase peningkatan pemahaman TIK	%	19,58	33,65	53,22	70,05	92,99
B	2	1	2	16	9	Persentase pengembangan, integrasi dan layanan eGovernment	%	19,92	39,45	59,77	79,69	100,00
B	2	1	2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah						
B	2	1	2	17	1	Presentase koperasi yang patuh terhadap peraturan terhadap total jumlah koperasi aktif	%	29,28	33,56	38,59	50,34	62,08
B	2	1	2	17	2	Presentase koperasi yang sehat terhadap total jumlah koperasi aktif	%	6,71	10,07	16,78	33,56	50,34
B	2	1	2	17	3	Presentase koperasi yang melakukan RAT terhadap total jumlah koperasi aktif	%	36,91	43,62	50,34	60,40	67,11

Kode						Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
								Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
B	2	1	2	17	4	Presentase koperasi yang dibina kapasitas dan kompetensi SDMnya terhadap total jumlah koperasi aktif	%	45,06	55,90	66,75	77,59	88,43
B	2	1	2	17	5	Pertambahan jumlah usaha mikro	%	7,90	15,80	5,00	5,00	5,00
B	2	1	2	17	6	Presentase jumlah usaha mikro yang meningkat daya saingnya (berdaya saing)	%	7,90	15,80	3,00	3,00	3,00
B	2	1	2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal						
B	2	1	2	18	1	Tingkat pelaksanaan kebijakan daerah mengenai perizinan dan penanaman modal	%			100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	18	2	Presentase promosi yang menarik investor	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	18	4	Tingkat ketepatan waktu pelayanan perizinan pelayanan penanaman modal	%	94,34	95,24	96,15	97,09	98,04
B	2	1	2	18	5	Tingkat ketepatan waktu pelayanan perizinan pemerintahan dan kesra	%	94,34	95,85	97,40	99,01	99,01
B	2	1	2	18	6	Tingkat ketepatan waktu pelayanan perizinan pembangunan	%	94,34	95,24	96,15	97,09	98,04
B	2	1	2	18	7	Tingkat penyelesaian pengaduan perijinan dan penanaman modal dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	18	8	Tingkat pengendalian pelaporan penanaman modal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	18	9	Tingkat pemanfaatan sistem terhadap pelayanan perizinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	19		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga						
B	2	1	2	19	1	Prosentase SDM kepemudaan yang berprestasi	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
B	2	1	2	19	2	Persentase jumlah wirausaha muda	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	19	3	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	19	4	Jumlah atlet berprestasi tingkat Provinsi	atlet	150,00	350,00	150,00	675,00	180,00
B	2	1	2	19	5	Prosentase SDM keolahragaan yang berkompeten	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
B	2	1	2	19	6	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan	%	90,63	90,63	93,75	96,88	100,00
B	2	1	2	19	7	Prosentase SDM pramuka yang berprestasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	19	8	Tingkat ketersediaan fasilitas kegiatan kepramukaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	19	9	Tingkat keterlibatan kepramukaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	2	1	2	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik						
B	2	1	2	20	1	Persentase layanan statistik daerah dan sektoral	%	18,92	37,84	56,76	75,68	100,00
B	2	1	2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian						
B	2	1	2	21	1	Persentase pengelolaan keamanan informasi dan persandian	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
B	2	1	2	22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan						
B	2	1	2	22	1	Cakupan kajian seni dan budaya	%	42,86	57,14	71,43	85,71	100,00

Kode						Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
								Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
B	2	1	2	22	2	Cakupan fasilitasi seni dan budaya	%	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00
B	2	1	2	22	3	Cakupan pembinaan sejarah	%	0	0	25	50,00	100,00
B	2	1	2	22	4	Cakupan perlindungan seni dan budaya	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
B	2	1	2	22	5	Tingkat pengelolaan museum	%	0	0	25	50,00	100,00
B	2	1	2	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan						
B	2	1	2	23	1	Cakupan pelayanan perpustakaan kecamatan sesuai standar nasional dari aspek layanan	%	7,69	38,46	53,85	76,92	100,00
B	2	1	2	23	2	Persentase perpustakaan kecamatan yang mengaplikasikan pelayanan otomasi	%	7,69	38,46	53,85	76,92	100,00
B	2	1	2	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan						
B	2	1	2	24	1	Tingkat arsip yang memiliki nilai guna	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
B	2	1	2	24	2	Tingkat perlindungan dan penyelamatan arsip	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
B	2	1	2	24	3	Persentase digitalisasi arsip	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
B	1	1	3			Urusan Pemerintahan Pilihan						
B	1	1	3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan						
B	1	1	3	25	1	Produktivitas perikanan	Kg/m2	5,81	5,85	6,19	6,25	6,31
B	1	1	3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata						
B	1	1	3	26	1	Tingkat perkembangan objek wisata daerah	%	10,00	20,00	30,00	60,00	100,00
B	1	1	3	26	2	Persentase wisatawan yang datang karena promosi	%	25,03	25,03	25,64	26,38	27,54
B	1	1	3	26	3	Tingkat kepatuhan usaha jasa pariwisata terhadap peraturan kepariwisataan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						
B	1	1	3	27	1	Produktivitas pertanian	Kwintal Per Ha	45,10	45,72	60,25	60,75	61,25
B	1	1	3	27	2	Persentase pendistribusian bibit ternak dan ikan	%	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00
B	1	1	3	27	3	Angka prevalensi penyakit hewan	Point	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B	1	1	3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan						
B	1	1	3	30	1	Persentase jumlah pasar tradisional yang difasilitasi sarana distribusi perdagangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	3	30	2	Persentase jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	3	30	3	Persentase pelaku usaha yang terlibat dalam promosi dagang produk ekspor	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	3	30	4	Persentase jumlah kasus perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	3	30	5	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	%	96,30	96,30	96,30	97,78	100,00
B	1	1	3	30	6	Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian						

Kode						Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
								Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
B	1	1	3	31	1	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang mendapatkan pembinaan	%	0,00	0,00	3,35	3,35	3,35
B	1	1	3	31	2	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang memiliki sertifikasi	%	0,00	0,00	3,35	3,35	3,35
B	1	1	3	31	3	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
B	1	1	4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
B	1	1	4	1		Sekretariat Daerah						
B	1	1	4	1	1	Prosentase OPD dengan struktur yang tepat ukuran dan tepat fungsi	%	90,70	97,56	100,00	100,00	100,00
B	1	1	4	1	2	Prosentase OPD yang memiliki peta proses bisnis yang lengkap dan sesuai aturan	%	0,00	2,44	50,00	100,00	100,00
B	1	1	4	1	3	Prosentase OPD yang memiliki SOP yang baik	%	46,51	73,17	87,50	100,00	100,00
B	1	1	4	1	4	Prosentase OPD/UPT dengan pelayanan publik kategori baik	%	88,06	91,04	94,03	97,01	100,00
B	1	1	4	1	5	Prosentase pemberitaan yang terpublikasi	%	32,97	65,94	72,80	81,37	100,00
B	1	1	4	1	6	Prosentase pembinaan anggota Korpri	%	82,69	90,38	100,00	0,00	0,00
B	1	1	4	1	7	Tingkat kepuasan kepala daerah/wakil kepala daerah/sekretaris daerah terhadap kegiatan humas	Kategori	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas
B	1	1	4	1	8	Prosentase kecamatan dan kelurahan dengan nilai IKM kategori baik	%	93,16	93,16	100,00	100,00	100,00
B	1	1	4	1	9	Prosentase SDM keagamaan yang dibina	%	22,73	39,39	57,58	77,27	100,00
B	1	1	4	1	10	Prosentase organisasi keagamaan yang dibina	%	25,00	31,25	43,75	68,75	100,00
B	1	1	4	1	11	Prosentase organisasi sosial budaya keagamaan yang dibina	%	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
B	1	1	4	1	12	Prosentase peraturan daerah/perwal/kepwal yang harmonis	%	8,59	17,18	30,06	65,03	100,00
B	1	1	4	1	13	Jumlah bantuan hukum litigasi kepada orang atau kelompok masyarakat miskin	Perkara Litigasi	20,00	20,00	60,00	60,00	60,00
B	1	1	4	1	14	Persentase naskah kerjasama aktif yang ditindaklanjuti	%	65,00	65,00	75,00	85,00	100,00
B	1	1	4	1	15	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian dan pengembangan potensi daerah yang ditindaklanjuti	%	18,75	37,50	60,00	80,00	100,00
B	1	1	4	1	16	Prosentase pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	%	100,00	28,39	100,00	100,00	100,00
B	1	1	4	1	17	Tingkat pengendalian kegiatan perangkat daerah tepat waktu	%	92,23	100,93	92,92	93,65	93,97
B	1	1	4	2		Sekretariat DPRD						
B	1	1	4	2	1	Persentase rapat-rapat DPRD tepat waktu dan sesuai rencana	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Kode						Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
								Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
B	1	1	4	2	2	Presentase kegiatan kehumasan dan publikasi terhadap kinerja DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
B	1	1	4	2	3	Presentase realisasi dukungan pembahasan peraturan daerah/non peraturan daerah sesuai rencana	%	70,00	70,00	70,00	79,00	75,00
B	1	1	4	2	4	Presentase dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD sesuai rencana dan tepat waktu	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
B	1	1	4	2	5	Presentase dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sesuai rencana dan tepat waktu	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
B	1	1	4	2	6	Persentase aspirasi dan aduan masyarakat yang terfasilitasi dan tertindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
B	1	1	5	1		Perencanaan						
B	1	1	5	1	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	1	2	Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang diverifikasi	%	70,25	71,65	73,08	74,54	76,05
B	1	1	5	1	3	Persentase indikator sasaran dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	1	4	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra OPD pada bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, bidang perencanaan pembangunan sosial kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	1	5	Persentase keselarasan RKPD dengan renja OPD pada bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, bidang perencanaan pembangunan sosial kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	1	6	Persentase keselarasan Renstra dengan Renja OPD pada bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, bidang perencanaan pembangunan sosial kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	1	7	Persentase indikator sasaran dan program yang Tercapai oleh OPD pada bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, bidang perencanaan pembangunan sosial kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
								Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
						perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup						
B	1	1	5	2		Keuangan						
B	1	1	5	2	1	Tingkat penyelesaian berkas yang masuk sesuai standar (tepat waktu)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	2	2	Tingkat kenaikan potensi pendapatan daerah dari PBB dan BPHTB	%	11,97	33,49	60,07	76,07	100,00
B	1	1	5	2	3	Tingkat penyelesaian penetapan PBB dan BPHTB	%	15,64	33,13	53,96	78,21	100,00
B	1	1	5	2	4	Tingkat penyelesaian laporan Evaluasi Penerimaan PAD, keberatan dan pengendalian PBB dan BPHTB	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	2	5	Tingkat ketersediaan dokumen anggaran daerah	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
B	1	1	5	2	6	Tingkat ketersediaan dokumen penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
B	1	1	5	2	7	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan aset daerah	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
B	1	1	5	2	8	Tingkat pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
B	1	1	5	3		Kepegawaian						
B	1	1	5	3	1	Persentase keterisian jabatan	%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00
B	1	1	5	3	2	Persentase penempatan sesuai kompetensi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	5	3	3	Persentase Pejabat Struktural yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	%	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00
B	1	1	5	3	4	Persentase rata-rata Kehadiran kerja Pegawai	%	81,00	82,00	83,00	84,00	84,50
B	1	1	5	3	5	Nilai rata-rata SKP aparatur	Point	87,00	87,00	87,50	87,50	88,00
B	1	1	5	4		Pendidikan Dan Pelatihan						
B	1	1	5	4	1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi aparatur sesuai jabatan	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
B	1	1	5	5		Penelitian Dan Pengembangan						
B	1	1	5	5	1	Tingkat ketersediaan data base yang akurat untuk perencanaan pembangunan	%	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00
B	1	1	5	5	2	Tingkat penelitian yang dimanfaatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	6			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan						
B	1	1	6	1		Inspektorat Daerah						
B	1	1	6	1	1	Tingkat pemenuhan infrastruktur kapabilitas APIP level 3 penuh	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh
B	1	1	6	1	2	Tingkat Pemenuhan Infrastruktur Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
B	1	1	6	1	1	Persentase OPD dengan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Minimal BB	%	83,72	88,37	93,02	95,35	100,00
B	1	1	7			Unsur Kewilayahan						
B	1	1	7	1		Kecamatan						
B	1	1	7	1	1	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
								Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
						perijinan						
B	1	1	7	1	2	Cakupan pelayanan pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	7	1	3	Cakupan pelayanan kemasyarakatan kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	7	1	4	Cakupan pelayanan RT/RW	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	7	1	5	Cakupan pelayanan pengembangan UMKM kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	7	1	6	Cakupan pelayanan penertiban	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	8			Unsur Pemerintahan Umum						
B	1	1	8	1		Kesatuan Bangsa Dan Politik						
B	1	1	8	1	1	Tingkat pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi masyarakat yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	8	1	2	Tingkat pembinaan partai politik dalam pendidikan politik masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	8	1	3	Tingkat pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	8	1	4	Tingkat pengawasan penyakit masyarakat (pekat)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	8	1	5	Tingkat pencegahan konflik melalui mediasi	%	10,45	22,12	35,33	50,55	68,50
C						ASPEK DAYA SAING DAERAH						
C	1					Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
C	1	1				Urusan Wajib						
C	1	1	2			Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
C	1	1	2	3		Urusan Pangan						
C	1	1	2	3	1	Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	Gram/ kapita/ hari	72,26	71,50	72,26	72,26	72,26
C	1	1	2	3	2	Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan	Gram/ kapita/ hari	56,70	85,90	57,33	57,65	57,96
C	1	1	2	3	3	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	Kkal/ kapita/ hari	2.160,00	2.959,00	2.184,00	2.196,00	2.208,00
C	1	1	2	3	4	Tingkat stabilitas Harga Pangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	1	1	2	3	5	Tingkat cadangan pangan daerah	%	27,77	48,53	50,00	60,00	70,00
C	1	1	2	3	6	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	Kkal/ kapita/ hari	2.291,40	2.305,40	2.251,00	2.230,80	2.210,60
C	1	1	2	3	7	Rasio rekomendasi SKPG dan FSVA yang dimanfaatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	1	1	2	3	8	Tingkat pengawasan dan pembinaan keamanan pangan daerah	%	87,00	90,50	91,07	93,03	95,00
C	1	2				Urusan Pilihan						
C	1	2	0	3		Urusan Pertanian						
C	1	2	0	3	1	Produktivitas pertanian	Kwintal Per	45,10	45,72	60,25	60,75	61,25

Kode						Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
								Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
							Ha					
C	1	2	0	3	2	Persentase pendistribusian bibit ternak dan ikan	%	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00
C	1	2	0	3	3	Angka prevalensi penyakit hewan	Point	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C	1	2	0	6		Urusan Perdagangan						
C	1	2	0	6	1	Persentase jumlah pasar tradisional yang difasilitasi sarana distribusi perdagangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	1	2	0	6	2	Persentase jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	1	2	0	6	3	Persentase pelaku usaha yang terlibat dalam promosi dagang produk ekspor	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	1	2	0	6	4	Persentase jumlah kasus perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	1	2	0	6	5	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	%	96,30	96,30	96,30	97,78	100,00
C	1	2	0	6	6	Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	1	2	0	7		Urusan Perindustrian						
C	1	2	0	7	1	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang mendapatkan pembinaan	%	0,00	0,00	3,35	3,35	3,35
C	1	2	0	7	2	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang memiliki sertifikasi	%	0,00	0,00	3,35	3,35	3,35
C	1	2	0	7	3	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
C	2					Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
C	2	1				Urusan Wajib						
C	2	1	1			Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
C	2	1	1	3		Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
C	2	1	1	3	1	Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%	86,23	86,96	89,96	92,11	94,26
C	2	1	1	4		Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
C	2	1	1	4	1	Persentase permukiman kumuh	%	0,12	0,12	0,10	0,09	0,08
C	2	1	1	4	2	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	4	3	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,73	99,79	99,79	99,80	99,81
C	2	1	1	5		Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
C	2	1	1	5	1	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	2	Tingkat pembinaan kewaspadaan dini masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	3	Tingkat pembinaan satlinmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
								Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
C	2	1	1	5	4	Tingkat penyelesaian penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	5	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	6	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	7	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	8	Tingkat ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	9	Rata-rata waktu tanggap penanganan bencana kebakaran di daerah layanan WMK	Menit	14,91	14,10	15,00	15,00	15,00
C	2	1	1	5	10	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	1	5	11	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana non kebakaran (banjir)	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	2	1	2			Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
C	2	1	2	5		Urusan Lingkungan Hidup						
C	2	1	2	5	1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Point	60,32	57,33	57,33	57,63	57,93
C	2	1	2	5	2	Tingkat pengelolaan sampah	%	100,00	99,22	100,00	100,00	100,00
C	2	1	2	9		Urusan Perhubungan						
C	2	1	2	9	1	Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan	Km/jam	21	22	23	24	25
C	3					Fokus Iklim Berinvestasi						
C	3	1				Urusan Wajib						
C	3	1	2			Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
C	3	1	2	12		Penanaman Modal						
C	3	1	2	12	1	Tingkat pertumbuhan investasi daerah	%	17,38	4,77	5	5	5
C	3	1	2	12	2	Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Triliyun	7,97	8,35	8,77	9,21	9,67
C	4					Fokus Sumber Daya Manusia						
C	4	1				Urusan Wajib						
C	4	1	1			Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
C	4	1	2			Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
C	4	1	2	16		Urusan Kebudayaan						
C	4	1	12	16	1	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	100	100	100	100	100

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Tangerang 2019-2023

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan RKPD

D.1. Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2023

Prioritas pembangunan tahun 2023 dirumuskan untuk mengarahkan program dan kegiatan prioritas serta upaya pengalokasian anggaran yang tepat sasaran. Rumusan Prioritas pembangunan merupakan rangkaian yang diawali dari identifikasi permasalahan pembangunan yang dilanjutkan dengan penyusunan isu strategis pembangunan. Berdasarkan rangkaian tersebut disusun isu strategis tahun 2023 sebagai berikut:

- Kinerja perekonomian daerah belum stabil;
- Kualitas Sumber Daya Manusia menurun;
- Kualitas infrastruktur Daerah menurun;
- Kualitas Lingkungan Hidup menurun;
- Pelayanan Publik dan Penataan ASN belum optimal.

Keterkaitan permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel I-36 Keterkaitan Isu Strategis, Masalah, dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023

No	Isu Startegis	Masalah
1	Kinerja perekonomian daerah belum stabil	
	1.1 Investasi belum Optimal	Kebijakan sisetim perijinan yang berubah (Penerapan Online Single Submission), belum optimal Ketersediaan lahan terbatas, Persaingan antar daerah
	1.2 Aktivitas Pariwisata belum stabil	Pandemi Covid 19 berdampak pada sektor wisata terutama restoran dan perhotelan, disisi lain sarana pendukung pariwisata seperti ketersediaan pemandu wisata, pusat oleh-oleh serta objek wisata masih kurang
	1.3 Pertumbuhan Sektor Industri Belum Pulih	Pandemi covid 19 yang membatasi jam kerja berdampak terhadap kinerja industri, adanya upah buruh yang murah di daerah lain mendorong berpindahnya indusri dari Kota Tangerang, permasalahan lainnya adalah menurunnya permintaan pasar luar negeri terhadap produk industri
	1.4 Kinerja UKM belum stabil	- Pemahaman manajemen perkoperasian masih lemah - Menurunnya permintaan terhadap Produk UKM semasa Pandemi Covid 19 sehingga banyak yang tidak beroperasi, disisi lain banyak produk dari luar daerah yang masuk ke Kota Tangerang turut mempengaruhi

No	Isu Startegis	Masalah
		omset UKM Lokal
1.5	Produktivitas Pertanian dan Perikanan rendah	Semakin berkurangnya lahan dan jumlah petani berdampak terhadap menurunnya produktivitas dan pertanian
1.6	Dukunagan seni dan Budaya belum optimal	andemi covid 19 membatasi pagelaran seni dan budaya untuk mendukung pariwisata daerah
1.7	Kinerja Sektor Perdagangan belum pulih	Kinerja sektor perdagangan mengalami penurunan akibat covid 19 dimana pembatasan aktivitas warga berdampak pada menurunnya aktivitas sektor perdaganagan, selain itu, sarana perdagangan khususnya pasar tradisional masih berkutut dengan layanan yang belum maksimal seperti kebersihan, sarana parkir dan saran pendukung lainnya
2	Kwalitas Sumber Daya Manusia menurun	
2.1	Kwalitas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sistim Pengajaran akibat Pandemi covid 19 masih berubahubah sehingga mengganggu fokus siswa - Ketersediaan sarana pendukung pendukung belum optimal - Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal
2.2	Kwalitas Kesehatan	Dampak kesehatan akibat Pandemi covid 19 belum berakhir, sementara itu masih ditemukan angka gizi buruk, penyakit menular serta belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, dan belum maksimalnya pelayanan RSUD dan Puskesmas
2.3	layanan kesehateraan sosial (kemiskinan, ketenagakerjaan, dan pangan)	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat penyandang masalah sosial masih tinggi - Tingkat pengangguran masih tinggi, seiring dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi dan banyaknya industri yang tutup, sementara pembukaan lapangan kerja baru juga belum tumbuh - Perlu jaminan ketersediaan pangan daerah, untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta bantuan bagi orang miskin
3	Kwalitas infrastruktur Daerah menurun	
3.1	Pelayanan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat titik kemacetan - Sarana prasarana lalulintas belum maksimal - Kenyamanan Penumpang belum optimal
3.2	Kinerja Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat titik banjir/genangan - Masih terdapat jalan dengan kondisi kurang mantab - Masih ada drainase tidak berfungsi maksimal - Keberadaan trotoar jalan ada yang rusak - Kondisi jembatan yang kurang memadai
3.3	kwalitas gedung	Masih terdapat gedung pemerintahan sebagai

No	Isu Startegis	Masalah
	pemerintahan dan layanan masyarakat	sarana pelayanan publik yang kurang memadai, Demikina juga gedung pelayanan di bidang kesehatan, olahraga dan pendidikan
	3.4 kualitas Permukiman dan sarana pendukung	Masih terdapat rumah kumuh, wilayah kumuh dan belum optimalnya dukungan sarana perumahan seperti ketersediaan air minum dan pengelolaan air limbah
4	Kwalitas Lingkungan Hidup menurun	
	4.1 Peningkatan layanan Persampahan	Cakupan pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah belum optimal, sementara kapasitas sarana pengolahan sampah seiring waktu semakin menurun
	4.2 Peningkatan Ruang Terbuka/ Ruang Publik	Masih terdapat pencemaran air, udara dan tanah, disisi lain masih terbatas ruang terbuka hijau sebagai tempat bersosialisasi dan olahraga bagi masyarakat
5	Pelayanan Publik dan Penataan ASN belum optimal	
	5.1 Peningkatan Layanan Publik Berbasis IT	Tingkat Kepuasan Terhadap pelayanan Publik belum maksimal
	5.2 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Akses masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan masih rendah
	5.3 Peningkatan Kompetensi Aparatur	Reposisi jabatan struktural dan fungsional belum optimal

Sumber: Perubahan RKPD Kota Tangerang Tahun 2023

Selanjutnya isu strategis menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan tahun 2023. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengganti bahasa negative (bahasa isu strategis) menjadi bahasa positif. Jika bahasa isu di atas dirubah menjadi bahasa positif maka diperoleh prioritas pembangunan yaitu Pemantapan Perekonomian Daerah, Pemantapan kualitas SDM, Pemantapan kualitas infrastruktur daerah, Pemantapan lingkungan sehat dan berkelanjutan serta pemantapan layanan public dan kompetensi aparatur. Untuk menentukan urutan prioritas pembangunan dilakukan pendekatan pembobotan dengan kriteria yang selektif. Nilai bobot tertinggi berdasarkan kriteria menjadi prioritas pertama, demikian prioritas selanjutnya mengikuti nilai pembobotan.

Berdasarkan hasil analisis pembobotan maka dapat dirumuskan urutan prioritas pembangunan Kota Tangerang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan Perekonomian Daerah;
2. Pemantapan kualitas SDM;
3. Pemantapan kualitas infrastruktur daerah;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

5. Pemantapan layanan public dan kompetensi aparatur.

Prioritas pembangunan akan dijabarkan oleh seluruh Perangkat Daerah ke dalam Program dan kegiatan.

Adapun tema pembangunan tahun 2023 disusun sebagai upaya mendorong seluruh stakeholder agar memiliki sebuah focus yang ingin dituju tahun 2023. Tema ini menjadi penggerak yang mampu memotivasi seluruh stakeholder (Masyarakat dan Pemerintah Kota Tangerang) untuk turut serta ambil bagian dalam pemangunan tahun 2023.

Tema pembangunan tahun 2023 disusun berdasarkan permasalahan pembangunan tahun 2023 yang dirumuskan ke dalam isu strategis. Bergerak dari permasalahan dan isu strategis terdapat kata-kata kunci yang penting yaitu pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur. Berdasarkan kata kunci ini maka dirumuskan tema pembangaunan tahun 2023 yaitu:

”Peningkatan Kesejahteraan melalui Pemantapan ekonomi, Pemantapan SDM dan pemantapan infrastruktur daerah”

Untuk melihat keselarasan pembangunan antara nasional, Provinsi Banten dan Kota Tangerang, maka dilakukan penyelarasan prioritas pembangunan melalui pemetaan sebagaimana berikut ini.

Tabel I-37 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Banten, dan Kota Tangerang Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Banten	Prioritas Kota Tangerang
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan	Pemantapan Perekonomian Daerah
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	-	-
3.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	-	Pemantapan kualitas infrastruktur daerah
4.	Pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
5.	Meningkatkan Sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	Pemantapan kualitas SDM
6.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan		
7.	Memperkuat stabilitas	Meningkatkan kualitas	Pemantapan layanan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Banten	Prioritas Kota Tangerang
	Polhukhankam dan transpormasi pelayanan publik	Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan	public dan kompetensi aparatur

Sumber: Perubahan RKPD Kota Tangerang Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa dari tujuh prioritas nasional terdapat terdapat 5 prioritas yang selaras dengan prioritas pembangunan Kota Tangerang, dua prioritas lainnya tidak dapat diselaraskan karena terkait dengan kewenangan Pemerintah Pusat. Sementara itu seluruh prioritas pembangunan Provinsi Banten sudah selaras dengan Prioritas pembangunan Kota Tangerang.

D.2. Rencana Kerja Tahun 2023

Program yang akan dilaksanakan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2023. Seiring dengan dirubahnya dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 dimana salah satu perubahan yang dilakukan adalah mengganti Program dan Kegiatan di dalam RPJMD berdasarkan nomenklatur baru. Pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 berlaku sejak Tahun 2021-2023. Atas dasar tersebut maka Perubahan RKPD Tahun 2023 sudah mengacu kepada substansi Perubahan RPJMD 2019-2023. Pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 salah satunya melalui penjabaran program dan indikator program ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel I-38 Target Kinerja Program Perubahan RKPD Kota Tangerang Tahun 2023

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
MISI 1 :BERSAMA MENGEMBANGKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS								
Tujuan 1.1 :								
Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia								
		Indeks pendidikan (Indeks pengetahuan)	Point	73,45	74,93	74,93	tetap	
		Indeks kesehatan (Indeks harapan hidup)	Point	79,15	79,48	79,48	tetap	
Sasaran 1.1.1 :								
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat								
		Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,48	97,67	97,67	tetap	
		Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	98,97	98,99	98,99	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
Dinas Pendidikan								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan,	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	Dinas Pendidikan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah						
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								Dinas Pendidikan
	1	Tingkat ketersediaan daya tampung SD	%	82,11	87,92	87,92	tetap	
	2	Persentase SD yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	85,32	98,96	98,96	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
	3	Tingkat layanan terhadap siswa miskin SD	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Persentase pengembangan minat bakat siswa SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan daya tampung SMP	%	84,29	96,68	96,68	tetap	
	6	Persentase SMP yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	75,38	98,47	98,47	tetap	
	7	Tingkat layanan terhadap siswa miskin SMP	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Persentase pengembangan minat bakat Siswa SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	9	Persentase jumlah warga negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%					
	10	Tingkat ketersediaan daya tampung PAUD	%	67,26	82,05	82,05	tetap	
	11	Persentase PAUD yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	71,08	89,15	89,15	tetap	
	12	Persentase pengembangan minat bakat siswa PAUD	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	13	Persentase jumlah warga negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%					

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
	14	Persentase pendidikan non formal yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	15	Persentase lulusan Paket A, B dan C	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	16	Persentase guru bersertifikat	%	70,66	97,50	97,50	tetap	
	17	Persentase guru SD dan SMP berkualifikasi S1/D4	%	87,01	90,88	90,88	tetap	
	18	Tingkat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1	Tingkat penyelesaian pembangunan/rehabilitasi gedung/bangunan sarana	%	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
dan prasarana pendidikan								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								
	1	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Sasaran 1.1.2 :								
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat								
		Angka kematian bayi (AKB)	Orang per 1.000 kelahiran hidup	1,25	1,10	1,10	tetap	
		Angka kematian ibu (AKI)	Orang per 100.000 kelahiran hidup	15,31	12,51	12,51	tetap	
		Angka kesakitan	Orang per 100.000 penduduk	N/A	184,00	184,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
Dinas Kesehatan								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Dinas Kesehatan
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan	% per	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		aparatur perangkat daerah	Tahun					
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	18,68	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	9	Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	0,00	100,00	100,00	tetap	
	10	Cakupan pelayanan UPT	% per Tahun	0,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								Dinas Kesehatan
	1	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99,98	100,00	100,00	tetap	
	2	Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99,49	100,00	100,00	tetap	
	3	Persentase bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	104,39	100,00	100,00	tetap	
	4	Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96,40	100,00	100,00	tetap	
	5	Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan	%	98,45	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		kesehatan sesuai standar						
	6	Persentase usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	86,46	100,00	100,00	tetap	
	7	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Cakupan pembinaan lingkungan sehat	%	88,96	89,00	89,00	tetap	
	9	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	10	Persentase orang dengan terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	11	Persentase kasus berpotensi KLB yang ditangani	%	N/A	100,00	100,00	tetap	
	12	Persentase jumlah penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	13	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	14	Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	15	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
	16	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer yang memenuhi standar	%	67,78	85,33	85,33	tetap	
	17	Cakupan masyarakat yang mendapat kunjungan rumah oleh petugas kesehatan sesuai standar	%	30,00	100,00	100,00	tetap	
	18	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar	%	45,00	62,50	62,50	tetap	
	19	Persentase ketersediaan alat kesehatan dan alat laboratorium puskesmas	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	20	Cakupan penduduk Kota Tangerang yang memiliki jaminan kesehatan	%	94,00	98,00	98,00	tetap	
	21	Cakupan pembinaan kesehatan kerja dan olahraga	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	22	Persentase pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	%	0,00	90,91	90,91	tetap	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								Dinas Kesehatan
	1	Persentase tenaga kesehatan yang meningkat kompetensinya	%	32,11	97,93	97,93	tetap	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN								Dinas Kesehatan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
MAKANAN MINUMAN								
	1	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	%	N/A	95,00	95,00	tetap	
	2	Persentase IRTP yang memenuhi syarat	%		70,00	70,00	tetap	
	3	Persentase fasilitas kefarmasian (Apotek, Toko Obat dan UMOT) dan alat kesehatan (Toko Alat Kesehatan dan Optikal) yang memenuhi syarat	%	67,78	85,00	85,00	tetap	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								Dinas Kesehatan
	1	Cakupan posyandu aktif	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Cakupan rumah tangga ber PHBS	%	47,06	72,00	72,00	tetap	
Rumah Sakit Umum Daerah								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								UPT RSUD
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		perangkat daerah						
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana RS	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	9	Cakupan pelayanan medik RS	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	10	Cakupan pelayanan keperawatan RS	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	11	Presentase ketersediaan SIRS	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								UPT RSUD
	1	Cakupan ketersediaan sarana prasarana	%	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		penunjang RS						
	2	Cakupan ketersediaan sarana prasarana pelayanan medik RS	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								UPT RSUD
	1	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	2	Tingkat penyelesaian pembangunan/rehabilitasi gedung/bangunan sarana dan prasarana kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
URUSAN								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	2	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
Dinas Kepemudaan dan Olahraga								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	1	Jumlah atlet berprestasi	atlet	560,00	675,00	675,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		tingkat Provinsi						
	2	Prosentase SDM keolahragaan yang berkompeten	%	100,00	80,00	80,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang dikembangkan	%	100,00	96,88	96,88	tetap	
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	3	Tingkat penyelesaian pembangunan/rehabilitasi gedung/bangunan sarana dan prasarana olahraga	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								
	3	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga	%	100,00	100,00	100,00	tetap	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Tujuan 1.2 :								
Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat								
		Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	%	4,76	4,35	4,35	tetap	
Sasaran 1.2.1 :								
Menurunnya kemiskinan dan penyangang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)								
		Jumlah penyangang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Orang	117.318,00	100.579,00	100.579,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
Dinas Sosial								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan	% per	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		informasi pembangunan perangkat daerah	Tahun					
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								Dinas Sosial
	1	Persentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	67,37	73,41	73,41	tetap	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								Dinas Sosial
	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (yang terpenuhi kebutuhan dasarnya)	%	14,25	19,85	19,85	tetap	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								Dinas Sosial
	1	Persentase pelayanan perlindungan sosial	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Persentase pelayanan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
jaminan sosial								
PROGRAM PENANGANAN BENCANA								Dinas Sosial
	1	Persentase jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota)	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								Dinas Sosial
	1	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	%	0,00	100,00	100,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
Dinas Ketahanan Pangan								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								Dinas Ketahanan Pangan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN								Dinas Ketahanan Pangan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
KEMANDIRIAN PANGAN								
	1	Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	Gram/ kapita/ hari	72,26	72,26	72,26	tetap	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
	1	Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan	Gram/ kapita/ hari	133,60	57,65	57,65	tetap	Dinas Ketahanan Pangan
	2	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	Kkal/ kapita/ hari	2.490,00	2.196,00	2.196,00	tetap	
	3	Tingkat stabilitas Harga Pangan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat cadangan pangan daerah	%	27,77	60,00	60,00	tetap	
	5	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	Kkal/ kapita/ hari	2.311,60	2.230,80	2.230,80	tetap	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								
	1	Rasio rekomendasi SKPG dan FSVA yang dimanfaatkan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								
	1	Tingkat pengawasan dan pembinaan keamanan	%	80,00	93,03	93,03	tetap	Dinas Ketahanan Pangan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
pangan daerah								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan	% per	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		pelaporan keuangan perangkat daerah	Tahun					
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1	Tingkat partisipasi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pemberdayaan perempuan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
	2	Cakupan perempuan yang meningkat kualitas hidup (Cakupan Pemberdayaan Perempuan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan)	%	17,35	80,00	80,00	tetap	
	3	Persentase organisasi perempuan dalam pemberdayaan perempuan (Cakupan kelembagaan pemberdayaan perempuan)	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1	Persentase kekerasan (KDRT) terhadap perempuan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1	Capaian indikator kota layak anak (KLA)	%	73,15	82,50	82,50	tetap	
PROGRAM								Dinas

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1	Persentase kekerasan (KDRT) terhadap anak	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
								Penduduk dan Keluarga Berencana
	1	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Persentase kelompok masyarakat (RW) yang berperan aktif dalam program pengendalian penduduk	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1	Persentase peserta KB aktif	%	77,12	77,30	77,30	tetap	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1	Cakupan keluarga sakinah mawadah warahmah (samawa)	%	0,00	72,39	72,39	tetap	
Sasaran 1.2.2 :								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
Meningkatnya kesempatan kerja		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	7,41	6,90	6,90	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
Dinas Ketenagakerjaan								Dinas Ketenagakerjaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								Dinas Ketenagakerjaan
	1	Tingkat ketersediaan perencanaan tenaga kerja	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								Dinas Ketenagakerjaan
	1	Prosentase tenaga kerja terlatih yang bersertifikat kompetensi	%	50,00	56,88	56,88	tetap	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								Dinas Ketenagakerjaan
	1	Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	76,00	80,94	80,94	tetap	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								Dinas Ketenagakerjaan
	1	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang	%	58,33	63,78	63,78	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		diselesaikan melalui perjanjian bersama						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
Dinas Kepemudaan dan Olahraga								
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	1	Prosentase SDM kepemudaan yang berprestasi	%	100,00	80,00	80,00	tetap	
	2	Persentase jumlah wirausaha muda	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan	%	66,70	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	1	Prosentase SDM pramuka yang berprestasi	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan fasilitasi kegiatan kepramukaan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat keterlibatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		kepramukaan						
Tujuan 1.3 :								
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik								
		Indeks reformasi birokrasi	Point	57,49	67,00	67,00	tetap	
Sasaran 1.3.1 :								
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik								
		Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah	A, BB, B, CC, C, D	B	BB	BB	tetap	
		Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	WTP	tetap	
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	Point	82,54	85,33	85,33	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
Dinas Komunikasi dan Informatika								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
								Dinas Komunikasi dan Informatika

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								Dinas Komunikasi dan Informatika
	1	Persentase pengembangan diseminasi informasi dan komunikasi publik	%	20,00	98,83	98,83	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
	2	Presentase konten saluran media informasi sesuai kebutuhan	%	20,00	80,00	80,00	tetap	
	3	Presentase informasi yang terpublikasi	%	20,00	80,00	80,00	tetap	
	4	Presentase kecamatan yang memiliki kelompok informasi masyarakat (KIM) yang aktif	%	0,00	53,85	53,85	tetap	
	5	Presentase penyelenggaraan pelayanan informasi	%	0,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA								Dinas Komunikasi dan Informatika
	1	Persentase pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	%	20,00	98,83	98,83	tetap	
	2	Persentase pengembangan, integrasi aplikasi layanan publik	%	20,00	71,00	71,00	tetap	
	3	Presentase peningkatan pemahaman TIK	%	0,00	70,05	70,05	tetap	
	4	Persentase pengembangan, integrasi dan layanan eGovernment	%	20,00	79,69	79,69	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
Dinas Komunikasi dan								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
Informatika								
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								Dinas Komunikasi dan Informatika
	1	Persentase layanan statistik daerah dan sektoral	%	18,00	75,68	75,68	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
Dinas Komunikasi dan Informatika								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								Dinas Komunikasi dan Informatika
	1	Persentase pengelolaan keamanan informasi dan persandian	%	14,00	80,00	80,00	tetap	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
SEKRETARIAT DAERAH								
Sekretariat Daerah								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								Sekretariat Daerah

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	9	Prosentase OPD dengan struktur yang tepat ukuran dan tepat fungsi	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	10	Prosentase OPD yang memiliki peta proses bisnis	%	0,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		yang lengkap dan sesuai aturan						
	11	Prosentase OPD yang memiliki SOP yang baik	%	23,26	100,00	100,00	tetap	
	12	Prosentase OPD/UPT dengan pelayanan publik kategori baik	%	85,07	97,01	97,01	tetap	
	13	Prosentase pemberitaan yang terpublikasi	%	19,94	81,37	81,37	tetap	
	14	Prosentase pembinaan anggota Korpri	%	100,00	0,00	0,00	tetap	
	15	Tingkat kepuasan kepala daerah/wakil kepala daerah/sekretaris daerah terhadap kegiatan humas	Kategori	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	tetap	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								Sekretariat Daerah
	1	Prosentase kecamatan dan kelurahan dengan nilai IKM kategori baik	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Prosentase SDM keagamaan yang dibina	%	100,00	77,27	77,27	tetap	
	3	Prosentase organisasi keagamaan yang dibina	%	100,00	68,75	68,75	tetap	
	4	Prosentase organisasi sosial budaya keagamaan yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Prosentase peraturan daerah/perwal/kepwal yang harmonis	%	100,00	65,03	65,03	tetap	
	6	Jumlah bantuan hukum litigasi kepada orang atau	Perkara Litigasi	20,00	60,00	60,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		kelompok masyarakat miskin						
	7	Persentase naskah kerjasama aktif yang ditindaklanjuti	%	67,16	85,00	85,00	tetap	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								Sekretariat Daerah
	1	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian dan pengembangan potensi daerah yang ditindaklanjuti	%	100,00	80,00	80,00	tetap	
	2	Prosentase pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat pengendalian kegiatan perangkat daerah tepat waktu	%	91,56	93,65	93,65	tetap	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD								
Sekretariat DPRD								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Sekretariat DPRD
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		perangkat daerah						
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								Sekretariat DPRD
	1	Persentase rapat-rapat DPRD tepat waktu dan sesuai rencana	%	N/A	95,00	95,00	tetap	
	2	Presentase kegiatan kehumasan dan publikasi terhadap kinerja DPRD dalam penyelenggaraan	%	N/A	90,00	90,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		pemerintahan daerah						
	3	Presentase realisasi dukungan pembahasan peraturan daerah/non peraturan daerah sesuai rencana	%	N/A	79,00	79,00	tetap	
	4	Presentase dukungan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD sesuai rencana dan tepat waktu	%	N/A	90,00	90,00	tetap	
	5	Presentase dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sesuai rencana dan tepat waktu	%	N/A	90,00	90,00	tetap	
	6	Persentase aspirasi dan aduan masyarakat yang terfasilitasi dan tertindaklanjuti	%	N/A	100,00	100,00	tetap	
UNSUR								
KEWILAYAHAN								
KECAMATAN								
Kecamatan Tangerang								
PROGRAM								
PENUNJANG URUSAN								
PEMERINTAHAN								
DAERAH								
KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		perangkat daerah						
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								Kecamatan Tangerang
	1	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								Kecamatan Tangerang
	1	Cakupan pelayanan pembangunan sarana prasarana wilayah	%	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		kelurahan						
	2	Cakupan pelayanan kemasyarakatan kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Cakupan pelayanan pengembangan UMKM kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								Kecamatan Tangerang
	1	Cakupan pelayanan penertiban	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								Kecamatan Tangerang
	1	Cakupan pelayanan RT/RW	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
KECAMATAN								
Kecamatan Karawaci								
PROGRAM								Kecamatan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Karawaci
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN								Kecamatan Karawaci

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PELAYANAN PUBLIK								
	1	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								Kecamatan Karawaci
	1	Cakupan pelayanan pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	%	100,00	89,00	89,00	tetap	
	2	Cakupan pelayanan kemasyarakatan kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Cakupan pelayanan pengembangan UMKM kecamatan	%	100,00	80,00	80,00	tetap	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								Kecamatan Karawaci
	1	Cakupan pelayanan penertiban	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								Kecamatan Karawaci
	1	Cakupan pelayanan RT/RW	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
KECAMATAN Kecamatan Cibodas								Kecamatan Cibodas
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								Kecamatan Cibodas
	1	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								Kecamatan Cibodas
	1	Cakupan pelayanan pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	%	100,00	92,00	92,00	tetap	
	2	Cakupan pelayanan kemasyarakatan kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Cakupan pelayanan pengembangan UMKM kecamatan	%	100,00	80,00	80,00	tetap	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								Kecamatan Cibodas
	1	Cakupan pelayanan penertiban	%	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								Kecamatan Cibodas
	1	Cakupan pelayanan RT/RW	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
KECAMATAN								
Kecamatan Jatiuwung								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Kecamatan Jatiuwung
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								Kecamatan Jatiuwung
	1	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								Kecamatan Jatiuwung
	1	Cakupan pelayanan pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
	2	Cakupan pelayanan kemasyarakatan kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Cakupan pelayanan pengembangan UMKM kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								Kecamatan Jatiuwung
	1	Cakupan pelayanan penertiban	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								Kecamatan Jatiuwung
	1	Cakupan pelayanan RT/RW	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
KECAMATAN Kecamatan Periuk								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN								Kecamatan Periuk

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								Kecamatan Periuk

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
	1	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								Kecamatan Periuk
	1	Cakupan pelayanan pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	%	100,00	92,00	92,00	tetap	
	2	Cakupan pelayanan kemasyarakatan kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Cakupan pelayanan pengembangan UMKM kecamatan	%	100,00	80,00	80,00	tetap	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								Kecamatan Periuk
	1	Cakupan pelayanan penertiban	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
PROGRAM								Kecamatan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								Periuk
	1	Cakupan pelayanan RT/RW	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
KECAMATAN Kecamatan Neglasari								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Kecamatan Neglasari
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan	% per	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		aparatur perangkat daerah	Tahun					
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								Kecamatan Neglasari
	1	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								Kecamatan Neglasari
	1	Cakupan pelayanan pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	%	80,00	92,00	92,00	tetap	
	2	Cakupan pelayanan kemasyarakatan kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Cakupan pelayanan pengembangan UMKM kecamatan	%	100,00	80,00	80,00	tetap	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								Kecamatan Neglasari
	1	Cakupan pelayanan penertiban	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
URUSAN								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								Kecamatan Neglasari
	1	Cakupan pelayanan RT/RW	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
KECAMATAN								
Kecamatan Benda								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Kecamatan Benda
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan	% per	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	Tahun					
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								Kecamatan Benda
	1	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								Kecamatan Benda
	1	Cakupan pelayanan pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Cakupan pelayanan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		kemasyarakatan kecamatan						
	3	Cakupan pelayanan pengembangan UMKM kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								Kecamatan Benda
	1	Cakupan pelayanan penertiban	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								Kecamatan Benda
	1	Cakupan pelayanan RT/RW	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
KECAMATAN								
Kecamatan Batuceper								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								Kecamatan Batuceper

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
	1	Cakupan pelayanan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	Kecamatan Batuceper

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		administrasi kependudukan dan perijinan						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								Kecamatan Batucapeper
	1	Cakupan pelayanan pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Cakupan pelayanan kemasyarakatan kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Cakupan pelayanan pengembangan UMKM kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								Kecamatan Batucapeper
	1	Cakupan pelayanan penertiban	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
PROGRAM PEMBERDAYAAN								Kecamatan Batucapeper

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1	Cakupan pelayanan RT/RW	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
KECAMATAN								
Kecamatan Cipondoh								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Kecamatan Cipondoh
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								Kecamatan Cipondoh
	1	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								Kecamatan Cipondoh
	1	Cakupan pelayanan pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Cakupan pelayanan kemasyarakatan kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Cakupan pelayanan pengembangan UMKM kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								Kecamatan Cipondoh
	1	Cakupan pelayanan penertiban	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								Kecamatan Cipondoh
	1	Cakupan pelayanan RT/RW	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
KECAMATAN								
Kecamatan Pinang								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Kecamatan Pinang
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		administrasi perkantoran						
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								Kecamatan Pinang
	1	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								Kecamatan Pinang
	1	Cakupan pelayanan pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Cakupan pelayanan kemasyarakatan kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
	3	Cakupan pelayanan pengembangan UMKM kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								Kecamatan Pinang
	1	Cakupan pelayanan penertiban	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								Kecamatan Pinang
	1	Cakupan pelayanan RT/RW	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
KECAMATAN Kecamatan Ciledug								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								Kecamatan Ciledug

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								Kecamatan Ciledug
	1	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		dan perijinan						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								Kecamatan Ciledug
	1	Cakupan pelayanan pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Cakupan pelayanan kemasyarakatan kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Cakupan pelayanan pengembangan UMKM kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								Kecamatan Ciledug
	1	Cakupan pelayanan penertiban	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA								Kecamatan Ciledug

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1	Cakupan pelayanan RT/RW	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
KECAMATAN								
Kecamatan Karang Tengah								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								Kecamatan Karang Tengah
	1	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								Kecamatan Karang Tengah
	1	Cakupan pelayanan pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Cakupan pelayanan kemasyarakatan kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Cakupan pelayanan pengembangan UMKM kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								Kecamatan Karang Tengah
	1	Cakupan pelayanan penertiban	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								Kecamatan Karang Tengah
	1	Cakupan pelayanan RT/RW	%	100,00	100,00	100,00	terap	
KECAMATAN								
Kecamatan Larangan								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Kecamatan Larangan
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	terap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	terap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	terap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		administrasi perkantoran						
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								Kecamatan Larangan
	1	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								Kecamatan Larangan
	1	Cakupan pelayanan pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Cakupan pelayanan kemasyarakatan kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
	3	Cakupan pelayanan pengembangan UMKM kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								Kecamatan Larangan
	1	Cakupan pelayanan penertiban	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								Kecamatan Larangan
	1	Cakupan pelayanan RT/RW	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN								
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PERENCANAAN,								Badan Perencanaan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								Pembangunan Daerah
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang diverifikasi	%	68,89	74,54	74,54	tetap	
	3	Persentase indikator sasaran dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD)	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra OPD pada bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, bidang perencanaan pembangunan sosial kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
	2	Persentase keselarasan RKPD dengan renja OPD pada bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, bidang perencanaan pembangunan sosial kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Persentase keselarasan Renstra dengan Renja OPD pada bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, bidang perencanaan pembangunan sosial kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Persentase indikator sasaran dan program yang Tercapai oleh OPD pada bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, bidang perencanaan pembangunan sosial kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang perencanaan pembangunan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup						
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1	Tingkat ketersediaan data base yang akurat untuk perencanaan pembangunan	%	71,56	82,00	82,00	tetap	
	2	Tingkat penelitian yang dimanfaatkan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
INSPEKTORAT DAERAH								
Inspektorat								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Inspektorat
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023			Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah			
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00		tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00		tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00		tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00		tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00		tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00		tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00		tetap	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									Inspektorat
	1	Tingkat pemenuhan infrastruktur kapabilitas APIP level 3 penuh	Level	Level 3	Level Penuh	3	Level Penuh	3	tetap
	2	Tingkat Pemenuhan Infrastruktur Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3		Level 3		tetap
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,									Inspektorat

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
	1	Persentase OPD dengan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Minimal BB	%	53,49	95,35	95,35	tetap	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
KEUANGAN								
Badan Pendapatan Daerah								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Badan Pendapatan Daerah
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		memadai						
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								Badan Pendapatan Daerah
	1	Tingkat penyelesaian berkas yang masuk sesuai standar (tepat waktu)	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat kenaikan potensi pendapatan daerah dari PBB dan BPHTB	%	10,00	76,07	76,07	tetap	
	3	Tingkat penyelesaian penetapan PBB dan BPHTB	%	15,00	78,21	78,21	tetap	
	4	Tingkat penyelesaian laporan Evaluasi Penerimaan PAD, keberatan dan pengendalian PBB dan BPHTB	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
KEUANGAN								
Badan Pengelola Keuangan Daerah								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN								Badan Pengelola Keuangan Daerah

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
	1	Tingkat ketersediaan	%	20,00	80,00	80,00	tetap	Badan Pengelola Keuangan Daerah

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		dokumen anggaran daerah						
	2	Tingkat ketersediaan dokumen penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah	%	20,00	80,00	80,00	tetap	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								Badan Pengelola Keuangan Daerah
	1	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan aset daerah	%	20,00	80,00	80,00	tetap	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								Badan Pengelola Keuangan Daerah
	1	Tingkat pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah	%	20,00	80,00	80,00	tetap	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN								
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan,	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah						
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	1	Persentase keterisian jabatan	%	80,00	86,00	86,00	tetap	
	2	Persentase penempatan sesuai kompetensi	%	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
	3	Persentase Pejabat Struktural yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	%	5,00	30,00	30,00	tetap	
	4	Persentase rata-rata Kehadiran kerja Pegawai	%	81,00	84,00	84,00	tetap	
	5	Nilai rata-rata SKP aparatur	Point	88,86	87,50	87,50	tetap	
UNSUR PENUNJANG								
URUSAN								
PEMERINTAHAN								
PENDIDIKAN DAN								
PELATIHAN								
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								
PROGRAM								
PENGEMBANGAN								
SUMBER DAYA								
MANUSIA								
	1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi aparatur sesuai jabatan	%	20,00	80,00	80,00	tetap	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
URUSAN								
PEMERINTAHAN								
WAJIB YANG TIDAK								
BERKAITAN DENGAN								
PELAYANAN DASAR								
URUSAN								
PEMERINTAHAN								
BIDANG								
PERTANAHAN								
Dinas Perumahan,								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
Permukiman dan Pertanahan								
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1	Rasio tanah milik pemda bersertifikat	%	10,00	28,20	28,20	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		administrasi perkantoran						
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	1	Cakupan pelayanan perpustakaan kecamatan sesuai standar nasional dari aspek layanan	%	N/A	76,92	76,92	tetap	
	2	Persentase perpustakaan kecamatan yang mengaplikasikan pelayanan otomasi	%	N/A	76,92	76,92	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah								
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								
	1	Tingkat arsip yang memiliki nilai guna	%	20,00	80,00	80,00	tetap	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								
	1	Tingkat perlindungan dan penyelamatan arsip	%	20,00	80,00	80,00	tetap	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	2	Persentase digitalisasi arsip	%	N/A	80,00	80,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1	Persentase dokumen administrasi kependudukan yang terverifikasi sesuai	%	99,33	99,86	99,86	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		standar						
	2	Persentase peningkatan pengajuan permohonan dokumen administrasi kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL								Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1	Persentase dokumen pencatatan sipil yang terverifikasi sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Persentase peningkatan pengajuan permohonan dokumen pencatatan sipil	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1	Cakupan layanan SIAK	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Cakupan database kependudukan yang akurat dan valid	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat pemanfaatan data kependudukan	%		31,00	31,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
Satuan Polisi Pamong Praja								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas	% per	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		sumberdaya aparatur perangkat daerah	Tahun					
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								Satuan Polisi Pamong Praja
	1	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat pembinaan kewaspadaan dini masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat pembinaan satlinmas	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat penyelesaian penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENGUATAN								
Badan Kesatuan Bangsa dan								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								Politik
	1	Tingkat pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi masyarakat yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1	Tingkat pembinaan partai politik dalam pendidikan politik masyarakat	%	40,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1	Tingkat pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasayarakatan	%	40,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
DAN BUDAYA								
	1	Tingkat pengawasan penyakit masyarakat (pekat)	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1	Tingkat pencegahan konflik melalui mediasi	%	100,00	50,55	50,55	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		bencana						
	2	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	Tingkat ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Rata-rata waktu tanggap penanganan bencana kebakaran di daerah layanan WMK	Menit	15,00	15,00	15,00	tetap	
	3	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana non kebakaran (banjir)	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
MISI 2 :BERSAMA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KOTA YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN								
Tujuan 2.1 :								
Meningkatkan kualitas								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
sarana dan prasarana dasar perkotaan								
		Indeks pembangunan sarana prasarana perkotaan	Point	74,97	84,38	84,38	tetap	
Sasaran 2.1.1 :								
Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perkotaan								
		Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%	83,52	92,11	92,11	tetap	
		Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan	Km/jam	20,00	24,00	24,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan								
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								
	4	Tingkat penyelesaian pembangunan/ rehabilitasi gedung/ bangunan sarana dan prasarana pemerintah	%	100,00	100,00	100,00	tetap	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
dan masyarakat								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								
	4	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah dan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	tetap	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
Dinas Perhubungan								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
Dinas Perhubungan								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								Dinas Perhubungan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
	1	Persentase hasil kajian, analisa dan evaluasi pengembangan sistem transportasi	%	100,00	79,31	79,31	tetap	
	2	Jumlah titik kemacetan yang tertangani	Titik	26,00	20,00	20,00	tetap	
	3	Jumlah beroperasinya koridor/trayek angkutan umum sistem transit	Koridor	2,00	13,00	13,00	tetap	
	4	Prosentase PJU keselamatan jalan dalam kondisi baik	%	100,00	72,00	72,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		perangkat daerah						
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	9	Tingkat pelayanan UPT pengukuran dan pengujian bahan konstruksi	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	10	Tingkat pelayanan UPT perlengkapan dan perbengkelan	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	Persentase dokumen perencanaan pembangunan,	%	45,16	90,32	90,32	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang ditindak lanjuti						
	2	Persentase dokumen pemuktahiran data leger yang akurat	%	25,81	83,87	83,87	tetap	
	3	Persentase panjang jalan yang dipelihara	%	82,07	88,07	88,07	tetap	
	4	Persentase jembatan yang dipelihara	%	84,97	96,15	96,15	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan jalan	%	98,23	99,59	99,59	tetap	
	6	Tingkat ketersediaan jembatan	%	97,94	99,31	99,31	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								
	1	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana,	%	5,76	85,71	85,71	tetap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		prasarana dan fasilitas jalan dan jembatan						
Sasaran 2.1.2 :								
Meningkatnya kualitas permukiman								
		Persentase permukiman kumuh	%	0,16	0,09	0,09	tetap	
		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,63	99,80	99,80	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan	% per	100,00	100,00	100,00	tetap	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	Tahun					
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	9	Tingkat pelayanan UPT pengukuran dan pengujian bahan konstruksi	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	10	Tingkat pelayanan UPT perlengkapan dan perbengkelan	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENGEMBANGAN								Dinas Perumahan,

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PERUMAHAN								Permukiman dan Pertanahan
	1	Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1	Persentase bangunan yang memiliki kesesuaian dengan perijinan	%	100,00	34,62	34,62	tetap	
	2	Persentase rumah tidak layak huni	%	0,73	0,24	0,24	tetap	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1	Persentase perumahan yang memiliki PSU	%					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan								
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan								
	1	Persentase jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	100,00	40,00	40,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan								
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan								
	1	Cakupan layanan air	%	22,16	24,52	24,52	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		minum perpipaan						
	2	Tingkat kualitas air minum memenuhi baku mutu yang berlaku	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	1	Cakupan pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik	%	99,00	99,80	99,80	tetap	
	2	Tingkat kualitas air limbah domestik memenuhi baku mutu yang berlaku	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
Sasaran 2.1.3 :								
Meningkatnya kualitas drainase dan sumber daya air								
		Luas banjir dan genangan	Ha	429,38	239,68	239,68	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
PROGRAM PENGELOLAAN								Dinas Pekerjaan Umum dan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
SUMBER DAYA AIR (SDA)								Penataan Ruang
	1	Persentase dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air yang ditindaklanjuti	%	57,14	82,14	82,14	tetap	
	2	Persentase sumber daya air yang dipelihara	%	60,00	90,00	90,00	tetap	
	3	Persentase luas banjir yang tertangani	%	19,87	95,88	95,88	tetap	
	4	Persentase sarana prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	%	66,06	87,50	87,50	tetap	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	Persentase dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase yang ditindaklanjuti	%	57,14	87,50	87,50	tetap	
	2	Persentase saluran drainase/gorong-gorong yang dipelihara	%	50,00	59,00	59,00	tetap	
	3	Persentase luas genangan yang tertangani	%	19,87	68,44	68,44	tetap	
	4	Persentase sarana prasarana drainase dalam kondisi baik	%	66,06	85,00	85,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas sumber daya air dam drainase	%	5,76	75,00	75,00	tetap	
Sasaran 2.1.4 :								
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Point	54,10	57,63	57,63	tetap	
		Tingkat pengelolaan sampah	%	91,00	100,00	100,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
Dinas Lingkungan Hidup								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								Dinas Lingkungan Hidup
	1	Tingkat pelaksanaan evaluasi dokumen lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								Dinas Lingkungan Hidup
	1	Persentase titik pantau udara, kebisingan, air sungai, air situ dan air tanah yang sesuai baku mutu	%	N/A	75,14	75,14	tetap	
	2	Tingkat penurunan emisi gas karbon	%	20,00	20,30	20,30	tetap	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								Dinas Lingkungan Hidup
	1	Tingkat pengelolaan limbah B3	%	70,00	90,00	90,00	tetap	
PROGRAM PEMBINAAN DAN								Dinas Lingkungan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								Hidup
	1	Persentase badan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	%	N/A	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								Dinas Lingkungan Hidup
	1	Persentase sekolah adhywiyata	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Persentase RW yang dibina menjadi kampung iklim	%	N/A	25,00	25,00	tetap	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								Dinas Lingkungan Hidup
	1	Persentase pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								Dinas Lingkungan Hidup
	1	Persentase volume sampah yang tertangani	%	76,00	78,00	78,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
	2	Persentase volume sampah yang berkurang melalui mekanisme 3R	%	15,00	22,00	22,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
Dinas Lingkungan Hidup								
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
	1	Persentase ruang terbuka hijau (RTH) yang dikembangkan	%	0,00	4,19	4,19	tetap	Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH								
Dinas Lingkungan Hidup								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
UNTUK PEMBANGUNAN								
	1	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas lingkungan	%	0,00	45,51	45,51	tetap	
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
	1	Peningkatan luas taman untuk RTH dan ruang terbuka non hijau publik yang tersedia	%	100,00	99,53	99,53	tetap	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2	Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap jumlah dekorasi kota dan reklame yang seharusnya	%	107,96	97,18	97,18	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
Ruang								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	Tingkat ketersediaan dokumen rencana tata ruang	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat penyelesaian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat penyelesaian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
MISI 3 : BERSAMA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN								
Tujuan 3.1 :								
Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat yang berdaya saing								
		Nilai PDRB ADHK	Rp. Triliyun	106,28	112,59	112,59	tetap	
		Indeks pengeluaran (daya beli)	Point	81,37	82,94	82,94	tetap	
Sasaran 3.1.1 :								
Meningkatnya investasi daerah								
		Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Triliyun	6,79	9,21	9,21	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan	% per	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		aparatur perangkat daerah	Tahun					
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1	Tingkat pelaksanaan kebijakan daerah mengenai perizinan dan penanaman modal	%	0,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1	Presentase promosi yang menarik investor	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1	Tingkat ketepatan waktu pelayanan perizinan pelayanan penanaman	%	94,30	97,09	97,09	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		modal						
	2	Tingkat ketepatan waktu pelayanan perizinan pemerintahan dan kesra	%	94,85	99,01	99,01	tetap	
	3	Tingkat ketepatan waktu pelayanan perizinan pembangunan	%	94,30	97,09	97,09	tetap	
	4	Tingkat penyelesaian pengaduan perijinan dan penanaman modal dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1	Tingkat pengendalian pelaporan penanaman modal	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1	Tingkat pemanfaatan sistem terhadap pelayanan perizinan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya perekonomian masyarakat								
		Laju inflasi	%	3,46	3,50	3,50	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		Indeks gini (gini rasio)	Point	0,36	0,31	0,31	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	1	Persentase jumlah pasar tradisional yang difasilitasi sarana distribusi perdagangan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	1	Persentase jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi	%	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		perdagangan						
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	1	Persentase pelaku usaha yang terlibat dalam promosi dagang produk ekspor	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	1	Persentase jumlah kasus perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	%	68,22	97,78	97,78	tetap	
PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	1	Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produk	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
URUSAN								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	1	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang mendapatkan pembinaan	%	0,00	3,35	3,35	tetap	
	2	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang memiliki sertifikasi	%	41,54	3,35	3,35	tetap	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	1	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	100,00	3,35	3,35	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana	% per	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	Tahun					
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	1	Presentase koperasi yang patuh terhadap peraturan terhadap total jumlah koperasi aktif	%	100,00	50,34	50,34	tetap	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	1	Presentase koperasi yang sehat terhadap total jumlah koperasi aktif	%	100,00	33,56	33,56	tetap	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
								Kecil dan Menengah
	1	Presentase koperasi yang melakukan RAT terhadap total jumlah koperasi aktif	%	100,00	60,40	60,40	tetap	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	1	Presentase koperasi yang dibina kapasitas dan kompetensi SDMnya terhadap total jumlah koperasi aktif	%	34,22	77,59	77,59	tetap	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	1	Pertambahan jumlah usaha mikro	%	0,00	5,00	5,00	tetap	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	1	Presentase jumlah usaha mikro yang meningkat daya saingnya (berdaya saing)	%	0,00	3,00	3,00	tetap	
URUSAN								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	1	Tingkat perkembangan objek wisata daerah	%	100,00	60,00	60,00	tetap	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	1	Persentase wisatawan yang datang karena promosi	%	11,58	26,38	26,38	tetap	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	1	Tingkat kepatuhan usaha jasa pariwisata terhadap peraturan kepariwisataan	%	100,00	100,00	100,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	2	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	3	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	4	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	6	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
	7	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
		perangkat daerah						
	8	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	tetap	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	1	Cakupan kajian seni dan budaya	%	100,00	85,71	85,71	tetap	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	1	Cakupan fasilitasi seni dan budaya	%	100,00	83,33	83,33	tetap	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	1	Cakupan pembinaan sejarah	%	0,00	50,00	50,00	tetap	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	1	Cakupan perlindungan seni dan budaya	%	20,00	80,00	80,00	tetap	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	1	Tingkat pengelolaan museum	%	0,00	50,00	50,00	tetap	
URUSAN PEMERINTAHAN								

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target 2023		Ket.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Sebelum	Sesudah		
PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
Dinas Ketahanan Pangan								
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								
	1	Produktivitas perikanan	Kg/m2	5,77	6,25	6,25	tetap	Dinas Ketahanan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
Dinas Ketahanan Pangan								
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
	1	Produktivitas pertanian	Kwintal Per Ha	45,02	60,75	60,75	tetap	Dinas Ketahanan Pangan
	2	Persentase pendistribusian bibit ternak dan ikan	%	9,00	16,00	16,00	tetap	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								
	1	Angka prevalensi penyakit hewan	Point	0,73	1,00	1,00	tetap	Dinas Ketahanan Pangan

Sumber: Perubahan RKPD Kota Tangerang Tahun 2023

D.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pagu Perangkat Daerah tahun 2023 mengalami perubahan naik maupun turun namun terdapat juga pagu perangkat daerah yang tetap. Perubahan pagu perangkat daerah disebabkan oleh dua hal yakni prediksi pendapatan yang turun dan pemenuhan belanja wajib 12 bulan. Pendapatan Daerah yang diprediksi turun termasuk target Silpa yang tidak tercapai sangat berdampak terhadap pagu Perangkat Daerah. Dari sisi Belanja, perubahan pagu dipengaruhi oleh banyaknya belanja yang tidak dianggarkan secara penuh 12 Bulan pada APBD Murni 2023, dimana belanja ini merupakan belanja wajib seperti pemenuhan Gaji THL, insentif, UHC dan beberapa belanja operasional seperti belanja Bahan Bakar dan pembayaran listrik.

Perubahan Pagu Perangkat Daerah tetap menjaga ketercapaian target RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2023, maka rencana Belanja Perubahan masih lebih tinggi di atas 7 persen. Dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran tahun 2023 seluruh target kinerja RPJMD dapat dicapai kecuali beberapa indikator makro dan sedikit indikator kinerja urusan pada Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Di bawah ini disajikan Perubahan Pagu Perangkat Daerah Tahun 2023.

Tabel I-39 Perubahan Pagu Perangkat Daerah Tahun 2023

No	OPD	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih	%
1	1.01.0.00.0.00.11.0000 DINAS PENDIDIKAN	1,273,761,368,939.00	1,254,627,759,200.00	19,133,609,739.00	1.50
2	1.02.0.00.0.00.10.0000 DINAS KESEHATAN	650,367,582,357.00	626,242,546,441.00	24,125,035,916.00	3.71
3	1.02.0.00.0.00.10.0001 UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	252,838,719,217.00	219,564,887,014.00	33,273,832,203.00	13.16
4	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	549,568,784,127.00	604,789,479,156.00	(55,220,695,029.00)	(10.05)
5	1.04.1.03.2.10.20.0000 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	335,052,349,338.00	389,363,430,458.00	(54,311,081,120.00)	(16.21)
6	1.05.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	39,503,196,323.00	36,010,700,122.00	3,492,496,201.00	8.84
7	1.05.0.00.0.00.26.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	41,856,538,916.00	40,550,891,666.00	1,305,647,250.00	3.12
8	1.06.0.00.0.00.17.0000 DINAS SOSIAL	35,053,362,280.00	32,748,425,495.00	2,304,936,785.00	6.58
9	2.07.0.00.0.00.14.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	24,862,667,764.00	26,996,024,164.00	(2,133,356,400.00)	(8.58)
10	2.08.2.14.0.00.25.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	35,677,217,056.00	39,110,112,214.00	(3,432,895,158.00)	(9.62)
11	2.09.3.25.3.27.13.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	24,077,747,897.00	24,302,427,281.00	(224,679,384.00)	(0.93)
12	2.11.0.00.0.00.27.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	214,915,493,534.00	206,846,663,303.00	8,068,830,231.00	3.75
13	2.12.0.00.0.00.15.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	22,278,941,987.00	22,130,700,700.00	148,241,287.00	0.67
14	2.15.0.00.0.00.16.0000 DINAS PERHUBUNGAN	173,459,528,903.00	177,537,004,393.00	(4,077,475,490.00)	(2.35)
15	2.16.2.20.2.21.18.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	48,487,979,214.00	50,640,920,034.00	(2,152,940,820.00)	(4.44)
16	2.18.1.03.0.00.22.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24,661,182,366.00	24,661,182,366.00	-	-
17	2.19.0.00.0.00.23.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	73,778,867,842.00	74,802,246,292.00	(1,023,378,450.00)	(1.39)
18	2.23.2.24.0.00.21.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	17,115,230,413.00	17,125,179,887.00	(9,949,474.00)	(0.06)
19	3.26.2.22.2.11.12.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	73,263,721,934.00	79,430,333,083.00	(6,166,611,149.00)	(8.42)
20	3.30.2.17.3.31.24.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	28,051,327,338.00	29,571,829,927.00	(1,520,502,589.00)	(5.42)

No	OPD	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih	%
21	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	142,302,350,970.00	153,866,864,217.00	(1,520,502,589.00)	(5.42)
22	4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DPRD	126,636,338,902.00	146,927,701,990.00	(11,564,513,247.00)	(8.13)
23	5.01.5.05.0.00.06.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24,699,452,728.00	23,972,436,981.00	(20,291,363,088.00)	(16.02)
24	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	60,762,683,534.00	57,985,943,434.00	727,015,747.00	2.94
25	5.02.0.00.0.00.07.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	78,457,910,704.00	107,232,444,811.00	(28,774,534,107.00)	(36.68)
26	5.03.5.04.0.00.05.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	47,178,583,491.00	121,769,052,584.00	(74,590,469,093.00)	(158.10)
27	6.01.0.00.0.00.09.0000 INSPEKTORAT	25,787,677,853.00	25,787,677,853.00	-	-
28	7.01.2.13.0.00.28.0000 KECAMATAN BATUCEPER	32,409,555,568.00	30,975,510,070.00	1,434,045,498.00	4.42
29	7.01.2.13.0.00.29.0000 KECAMATAN BENDA	27,309,791,400.00	25,633,394,242.00	1,676,397,158.00	6.14
30	7.01.2.13.0.00.30.0000 KECAMATAN TANGERANG	38,262,791,875.00	36,757,526,971.00	1,505,264,904.00	3.93
31	7.01.2.13.0.00.31.0000 KECAMATAN CIPONDOH	44,098,813,226.00	38,685,684,060.00	5,413,129,166.00	12.27
32	7.01.2.13.0.00.32.0000 KECAMATAN CIBODAS	32,515,359,392.00	30,965,132,032.00	1,550,227,360.00	4.77
33	7.01.2.13.0.00.33.0000 KECAMATAN CILEDUG	35,421,807,518.00	32,907,926,518.00	2,513,881,000.00	7.10
34	7.01.2.13.0.00.34.0000 KECAMATAN LARANGAN	34,674,980,040.00	32,056,522,520.00	2,618,457,520.00	7.55
35	7.01.2.13.0.00.35.0000 KECAMATAN KARANG TENGAH	31,592,101,773.00	29,489,766,961.00	2,102,334,812.00	6.65
36	7.01.2.13.0.00.36.0000 KECAMATAN NEGLASARI	30,904,784,981.00	29,667,719,622.00	1,237,065,359.00	4.00
37	7.01.2.13.0.00.37.0000 KECAMATAN KARAWACI	57,276,720,063.00	53,494,938,263.00	3,781,781,800.00	6.60
38	7.01.2.13.0.00.38.0000 KECAMATAN JATIUWUNG	29,079,487,033.00	28,250,323,033.00	829,164,000.00	2.85
39	7.01.2.13.0.00.40.0000 KECAMATAN PINANG	45,009,801,492.00	41,712,464,141.00	3,297,337,351.00	7.33
40	7.01.2.13.2.13.39.0000 KECAMATAN PERIUK	29,161,553,130.00	28,616,429,750.00	545,123,380.00	1.87
41	8.01.0.00.0.00.08.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	46,079,453,346.00	47,599,218,950.00	(1,519,765,604.00)	(3.30)
Total Belanja		4,958,253,806,764.00	5,101,407,422,199.00	(143,153,615,435.00)	(2.89)

Sumber: Perubahan RKPD Kota Tangerang Tahun 2023

Urusan pembangunan yang menggambarkan kewenangan dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah membutuhkan anggaran untuk mewujudkan program pelaksanaan urusan. Berdasarkan aturan perundangan terdapat beberapa urusan mandatory dengan pembatasan syarat minimal proporsi belanja daerah, seperti urusan pendidikan, kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta pengawasan. Proposi Belanja urusan ini menjadi pertimbangan penganggaran dan perubahan tahun 2023. Di bawah ini disajikan Pagu Urusan berdasarkan urusan tahun 2023.

Tabel I-40 Alokasi Anggaran Berdasarkan Urusan Tahun 2023

No	Bidang Urusan	Anggaran	%
1	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1,273,761,368,939	25.69
2	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	903,206,301,574	18.22
3	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	802,762,147,946	16.19
4	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50,992,465,655	1.03
5	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	81,359,735,239	1.64
6	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	35,527,632,971	0,72
7	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	24,862,667,764	0.50
8	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	23,580,477,056	0.48
9	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	20,913,738,861	0.42
10	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	30,608,227,573	0.62
11	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	259,508,891,433	5.23
12	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	22,278,941,987	0.45
13	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	33,966,268,800	0.69
14	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12,065,540,000	0.24
15	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	173,459,528,903	3.50
16	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	45,590,084,564	0.92
17	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	4,263,656,100	0.09

No	Bidang Urusan	Anggaran	%
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
18	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	24,661,182,366	0.50
19	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	73,778,867,842	1.49
20	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1,708,220,650	0,03
21	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1,189,674,000	0.02
22	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	25,964,285,818	0.52
23	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16,520,724,690	0.33
24	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	594,505,723	0.01
25	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	124,999,650	0.00
26	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2,706,259,817	0.05
27	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3,039,009,386	0.06
28	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1,832,762,300	0.04
29	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	21,954,908,938	0.44
30	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	142,302,350,970	2.87
31	4.02 SEKRETARIAT DPRD	126,636,338,902	2.55
32	5.01 PERENCANAAN	22,642,423,878	0.46
33	5.02 KEUANGAN	139,220,594,238	2.81
34	5.03 KEPEGAWAIAN	38,807,419,641	0.78
35	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8,371,163,850	0.17
36	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,872,028,850	0.04
37	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	25,787,677,853	0.52
38	7.01 KECAMATAN	433,751,278,691	8.75
39	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	46,079,453,346	0.93
	Jumlah	4,958,253,806,764	-

Sumber: Perubahan RKPD Kota Tangerang Tahun 2023

Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) yang diamanatkan peraturan perundangan, berdasarkan tabel di atas, adalah sebagai berikut:

- Belanja Pendidikan : 25,69 persen (melebihi amanat : 20 persen);
- Belanja Kesehatan : 18,22 persen (melebihi amanat : 10 persen);
- Belanja Pengawasan/Inspektorat : 0,52 persen (terpenuhi dari amanat 0,5 persen);
- Belanja Pendidikan dan Pelatihan : 0,17 persen (memenuhi amanat 0.16 persen).

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 dijelaskan penyelenggaraan Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan pelaksanaan ditetapkan dengan SPM. Ketentuan lebih lanjut tentang SPM diatur dengan Peraturan Pemerintah maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SPM diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tangerang yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023 dituangkan menjadi bagian dari Indikator Kinerja Daerah. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah (*impact*). Indikator tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah diperlukan untuk mengukur kinerja masing-masing program yang telah dirumuskan dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah ditekankan pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan, yaitu:

1. Prioritas kepada upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial.
2. Menyelaraskan alokasi belanja seiring dengan pendelegasian wewenang.
3. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi pusat perhatian masyarakat (*public interest*).

4. Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kemendesakan (urgensitas) tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam mendukung upaya-upaya penanggulangan dan penanganan permasalahan sosial, antara lain: kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah Daerah Kota Tangerang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD, maupun program/kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program/kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program/kegiatan yang dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerjanya.

Penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada kebijakan belanja daerah berada pada alokasi belanja langsung. Alokasi belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib, pilihan dan penunjang urusan pemerintahan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program/kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masy. dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program/kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga.

Tabel I-41 Target Indikator Kinerja Daerah Kota Tangerang Terkait SPM Tahun 2021-2023

Kode					Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Akhir (2023)
								Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target
B					ASPEK PELAYANAN UMUM								
B	1				Fokus Urusan Wajib								
B	1	1			Urusan Wajib								
B	1	1	1		Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
B	1	1	1	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan								
B	1	1	1	1	Tingkat ketersediaan daya tampung SD	%	82,11	87,62	87,92	87,92	87,92	87,92	87,92
B	1	1	1	1	Persentase SD yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	85,32	98,96	98,96	98,96	98,96	98,96	98,96
B	1	1	1	1	Tingkat layanan terhadap siswa miskin SD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	Persentase pengembangan minat bakat siswa SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	Tingkat ketersediaan daya tampung SMP	%	84,29	92,19	96,68	96,68	96,68	96,68	96,68
B	1	1	1	1	Persentase SMP yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	75,38	98,47	98,47	98,47	98,47	98,47	98,47
B	1	1	1	1	Tingkat layanan terhadap siswa miskin SMP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	Persentase pengembangan minat bakat Siswa SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	Persentase jumlah warga negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100,00	86,79	58,97	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	Tingkat ketersediaan daya tampung PAUD	%	67,26	72,42	82,05	82,05	82,05	83,73	83,73
B	1	1	1	1	Persentase PAUD yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	71,08	89,15	89,15	89,15	89,15	89,15	89,15
B	1	1	1	1	Persentase pengembangan minat bakat siswa PAUD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	Persentase jumlah warga negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Akhir (2023)	
									Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
						perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan									
B	1	1	1	1	14	Persentase pendidikan non formal yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	15	Persentase lulusan Paket A, B dan C	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	1	16	Persentase guru bersertifikat	%	70,66	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50
B	1	1	1	1	17	Persentase guru SD dan SMP berkualifikasi S1/D4	%	87,01	89,39	90,88	90,88	90,88	90,88	90,88	90,88
B	1	1	1	1	18	Tingkat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
B	1	1	1	2	1	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	2	Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	3	Persentase bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	104,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	4	Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96,40	100,00	94,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	5	Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	86,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	6	Persentase usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	7	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	88,96	89,95	56,45	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
B	1	1	1	2	8	Cakupan pembinaan lingkungan sehat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	9	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	10	Persentase orang dengan terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	11	Persentase kasus berpotensi KLB yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Akhir (2023)
									Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target
B	1	1	1	2	12	Persentase jumlah penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	13	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	14	Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	15	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	67,78	83,33	75,71	80,00	85,33	90,63	90,63
B	1	1	1	2	16	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer yang memenuhi standar	%	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	17	Cakupan masyarakat yang mendapat kunjungan rumah oleh petugas kesehatan sesuai standar	%	45,00	87,50	50,00	55,00	62,50	67,50	67,50
B	1	1	1	2	18	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	19	Persentase ketersediaan alat kesehatan dan alat laboratorium puskesmas	%	94,00	101,56	92,33	95,00	95,00	95,00	95,00
B	1	1	1	2	20	Cakupan penduduk Kota Tangerang yang memiliki jaminan kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	2	21	Cakupan pembinaan kesehatan kerja dan olahraga	%	85,29	85,29	89,47	90,00	90,91	91,67	91,67
B	1	1	1	2	22	Persentase pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	%		85,29	89,47	90,00	90,91	91,67	91,67
B	1	1	1	2	23	Persentase tenaga kesehatan yang meningkat kompetensinya	%	32,11	99,20	21,38	79,82	83,91	87,99	100,00
B	1	1	1	2	24	Persentase IRTP yang memenuhi syarat	%	95,00	96,67	80,83	95,00	95,00	95,00	92,50
B	1	1	1	2	25	Persentase fasilitas kefarmasian (Apotek, Toko Obat dan UMOT) dan alat kesehatan (Toko Alat Kesehatan dan Optikal) yang memenuhi syarat	%	70,00	70,00	72,00	75,00	80,00	82,22	76,25
B	1	1	1	2	26	Cakupan posyandu aktif	%	100,00	100,00	98,07	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode							Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Akhir (2023)	
										Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
B	1	1	1	2	27		Cakupan rumah tangga ber PHBS	%	47,06	60,61	68,29	69,00	72,00	75,00	75,00	
B	1	1	1	4			Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman									
B	1	1	1	4	1		Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	4	2		Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	4	3		Persentase bangunan yang memiliki kesesuaian dengan perijinan	%	100,00	129,73	129,73	30,00	34,62	41,07	41,07	
B	1	1	1	4	4		Persentase rumah tidak layak huni	%	0,73	0,29	0,37	0,27	0,24	0,22	0,22	
B	1	1	1	4	5		Persentase perumahan yang memiliki PSU	%	90,32	96,77	96,77	96,77	98,39	100,00	100,00	
B	1	1	1	5			Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
B	1	1	1	5	1		Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	2		Tingkat pembinaan kewaspadaan dini masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	3		Tingkat pembinaan satlinmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	4		Tingkat penyelesaian penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	5		Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	6		Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	7		Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode						Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Akhir (2023)
									Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target
B	1	1	1	5	8	Tingkat ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	9	Rata-rata waktu tanggap penanganan bencana kebakaran di daerah layanan WMK	Menit	15,00	14,91	14,10	15,00	15,00	15,00	15,00
B	1	1	1	5	10	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	5	11	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana non kebakaran (banjir)	% per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	6		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
B	1	1	1	6	1	Persentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	6	2	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	67,37	102,43	70,39	71,90	73,41	74,87	74,87
B	1	1	1	6	3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (yang terpenuhi kebutuhan dasarnya)	%	14,25	15,65	17,05	18,45	19,85	21,25	21,25
B	1	1	1	6	4	Persentase pelayanan perlindungan sosial	%	100,00	108,64	77,60	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	6	5	Persentase pelayanan jaminan sosial	%	100,00	102,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	1	1	1	6	6	Persentase jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Perubahan RPJMD Kota Tangerang 2019-2023

Tabel I-42 Target SPM Pada Kebijakan Umum Anggaran Kota Tangerang Tahun 2023

Kegiatan/Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran/Indikator		
	SPM/Indikator Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran/Target
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
A URUSAN PENDIDIKAN			688.469.826.412,00
A.1 Pendidikan Anak Usia Dini		Rp.	55.561.365.612,00
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	67.292
1 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Rp.	55.561.365.612,00
A.2 Pendidikan Dasar		Rp.	627.307.736.000,00
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI, SMP/MTs)	Orang	296.584
2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Rp.	419.528.494.152,00
3 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Rp.	207.779.241.848,00
A.3 Pendidikan Kesetaraan		Rp.	5.600.724.800,00
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	5.214
4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Rp.	5.600.724.800,00
B URUSAN KESEHATAN		Rp.	7.720.354.100,00
1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Rp.	7.720.354.100,00
01.01 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp.	7.720.354.100,00
B.1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Ibu hamil	40.925
		Rp.	1.071.927.000,00

Kegiatan/Jenis Pelayanan Dasar		Anggaran/Indikator		
		SPM/Indikator Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran/Target
B.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Ibu bersalin	39.588
			Rp.	231.659.000,00
B.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Bayi baru lahir	39.588
			Rp.	49.724.000,00
B.4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 12–59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Balita	90.040
			Rp.	919.542.600,00
B.5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai kelas 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	Anak	231.986
			Rp.	486.871.500,00
B.6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Orang	660.890
			Rp.	2.276.800.000,00
B.7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Orang	62.656
			Rp.	598.738.500,00
B.8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	166.750
			Rp.	20.900.000,00
B.9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	93.500
			Rp.	20.900.000,00
B.12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah ODGJ Berat di wilayah kerja Kab/Kota yang	Orang	17.524

Kegiatan/Jenis Pelayanan Dasar		Anggaran/Indikator		
		SPM/Indikator Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran/Target
	Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun		
			Rp.	203.550.000,00
B.13	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	902
			Rp.	1.030.291.500,00
B.14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	31.843
			Rp.	809.450.000,00
C	URUSAN PEKERJAAN UMUM		Rp.	13.447.598.671,00
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Rp.	1.744.325.105,00
C.1.1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Rumah tangga	611.828
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp.	11.703.273.566,00
C.2.1	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Rumah	428.463
D	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT		Rp.	11.240.378.477,00
1	Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp.	275.000.000,00
D.1	Ketersediaan unit Rumah Korban Bencana yang ditangani dan Rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2023	Unit	4
2	Program Pengembangan Perumahan,		Rp.	10.965.378.477,00

Kegiatan/Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran/Indikator		
	SPM/Indikator Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran/Target
Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Sub-Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			
D.2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan+Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa+Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	Unit 14
E.	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		5.863.422.990,00
<i>E.1</i>	<i>Sub Urusan Bencana dan Kebakaran</i>		<i>3.782.661.340,00</i>
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang 877.930
			Rp. 97.735.800,00
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang 838.837
			Rp. 1.167.394.040,00
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang 3.543
			Rp. 91.998.000,00
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang 1.552
			Rp. 2.425.533.500,00
<i>E.2</i>	<i>Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Rp. 2.080.761.650,00</i>
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Orang 8
a.	Kegiatan Penanganan Gangguan		Rp. 1.582.501.150,00

Kegiatan/Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran/Indikator		
	SPM/Indikator Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran/Target
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
b.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp.	468.133.300,00
c.	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp.	30.127.200,00
F	URUSAN SOSIAL		6.579.792.360,00
A	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	830.874.000,00
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang 341
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	orang 60
3	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Orang 92
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	orang 30
B	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Rp. 2.236.737.600,00
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh Bantuan Sosial Tunai	Orang 300
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Bantuan Sosial Tunai	Orang 650
3	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh Bantuan Sosial Tunai	Orang 999
C	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 2.468.746.760,00
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan permakanan, sarana dan prasarana layanan sosial	Orang 641

Kegiatan/Jenis Pelayanan Dasar		Anggaran/Indikator		
		SPM/Indikator Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran/Target
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh bantuan permakanan, sarana dan prasarana layanan sosial	Orang	710
3	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan permakanan, sarana dan prasarana layanan sosial	Orang	1091
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan permakanan, sarana dan prasarana layanan sosial	Orang	30
D	Program Penanganan Bencana		Rp.	1.043.434.000,00
1	Penyediaan permakanan	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh penyediaan permakanan pada saat tanggap dan paska bencana	Orang	1.247
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh penyediaan sandang pada saat tanggap dan paska bencana	Orang	432
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memanfaatkan tempat penampungan pengungsi pada saat tanggap dan paska bencana	Orang	3
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh penanganan khusus bagi kelompok rentan pada saat tanggap dan paska bencana	Orang	39
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh pelayanan dukungan psikososial pada saat tanggap dan paska bencana	Orang	328

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Tujuan pembangunan Kota Tangerang telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kota Tangerang telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah.

Indikator makro pembangunan daerah Kota Tangerang merupakan tolok ukur dan representasi atas keberhasilan perwujudan visi dan pelaksanaan misi serta program pembangunan di Kota Tangerang. Pencapaian indikator pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi seluruh aspek kehidupan baik di wilayah Kota Tangerang maupun kondisi regional, nasional dan global. Kondisi makro pembangunan daerah secara umum dapat diidentifikasi melalui indikator makro pembangunan daerah. Dalam dokumen RPJMD Perubahan Kota Tangerang Tahun 2019-2023 termuat indikator makro pembangunan daerah sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah, meliputi: indeks pembangunan manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi (LPE), tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan indeks gini (gini rasio).

Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja pembangunan daerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah, ketercapaian setiap indikator makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh stakeholder pembangunan yang meliputi: pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian indikator makro, perlu diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelaku terhadap capaian indikator makro

tersebut. Sehingga gambaran pencapaian indikator makro merupakan hasil kinerja dari seluruh pelaku pembangunan.

Sebagai gambaran perkembangan realisasi (pencapaian) indikator makro, berikut disajikan perkembangan indikator makro Kota Tangerang Tahun 2019-2023:

Tabel II-1 Perkembangan Indikator Makro Kota Tangerang Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	78,43	79,83	80,08	80,44	80,98
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,05	-7,36	3,90	5,98	5,57
3	Tingkat Kemiskinan (% Jumlah Penduduk Miskin)	%	4,43	5,22	5,93	5,77	5,89
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,13	8,63	9,07	7,16	6,76
5	Indeks Gini (Gini Rasio)	Poin	0,328	0,339	0,343	0,383	0,379
6	Pendapatan Per Kapita	Rp. Juta	78,047	75,897	78,628	94,432	105,915

Sumber : BPS Provinsi Banten dan Kota Tangerang, Hasil Analisis, Tahun 2024

Keterangan : *) Angka IPM dari Tahun 2020-2023 menggunakan angka hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)

Kondisi realisasi indikator makro Kota Tangerang pada periode Tahun 2019-2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks pembangunan manusia (IPM) pada periode Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2023 indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 80,98 poin mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022 yang sebesar 80,44 poin. Hal ini mengindikasikan terjadinya proses pemulihan dan peningkatan pembangunan manusia. Hal lain yang cukup menggembirakan, mengacu pada data *Long Form* hasil Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020-LF), Kota Tangerang sejak 2021 sesungguhnya sudah meningkat status capaian IPM-nya dari kategori “Tinggi” ke “Sangat Tinggi” (IPM \geq 80), dikarenakan IPM Kota Tangerang telah menembus angka \geq 80, tepatnya sebesar 80,08 point sejak 2021.
- Pada periode Tahun 2019-2023, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang mengalami fluktuasi yaitu dari 4,05% pada Tahun 2019 menjadi 5,57% pada Tahun 2023. Bahkan pada Tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) terkontraksi -7,36% sebagai dampak pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang terjadi pada masa tersebut. Pada Tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi mengalami *rebound* peningkatan dan tumbuh positif menjadi 3,90%. Demikian pada Tahun

2022, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu dari 3,90% pada Tahun 2021 menjadi 5,98% pada Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa sejak Tahun 2021, proses pemulihan dan peningkatan pembangunan ekonomi di Kota Tangerang sudah mulai terjadi.

- Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin (tingkat kemiskinan) Kota Tangerang dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 cenderung fluktuatif, dimana terjadi penurunan dan peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Tangerang di interval angka 4 sampai 5 persen. Kondisi ini diakibatkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Tahun 2020. Persentase penduduk miskin di Kota Tangerang pada Tahun 2023 mencapai 5,89%, mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang sebesar 5,77%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya garis kemiskinan di Kota Tangerang yang pada Tahun 2023 telah mencapai 746.468 rupiah/kapita/bulan.
- Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang banyak terjadi sebagai dampak dari mewabahnya virus Covid-19 sejak awal Tahun 2020, menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran di Kota Tangerang. Namun seiring meredanya pandemi dan pulihnya ekonomi, angka TPT Kota Tangerang juga mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 yakni mencapai angka 6,76%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Kota Tangerang. Pada Tahun 2023 TPT untuk Kota Tangerang sebesar 6,76%, yang mengartikan bahwa di antara 100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPT untuk Kota Tangerang tersebut turun dari tahun sebelumnya (2022) yaitu 7,16%.
- Indeks gini (gini rasio) yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat pada periode Tahun 2019-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Tahun 2020. Namun pada tahun 2023 gini rasio Kota Tangerang mengalami penurunan menjadi 0,379 dibanding Tahun 2022 yang sebesar 0,383. Kondisi ini mengindikasikan hal yang positif, dimana semakin menyempitnya tingkat ketimpangan (gap) pendapatan masyarakat.
- Pendapatan Per Kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Pada periode Tahun 2019-2023 Pendapatan Per Kapita Kota Tangerang mengalami fluktuasi namun dengan kecenderungan terus meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2020 Pendapatan Per Kapita mengalami pertumbuhan negatif (-2,75%) yang disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi. Namun demikian di Tahun 2022, Pendapatan Per Kapita mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu dari Rp78,628 juta pada Tahun 2021 menjadi Rp94,383 juta pada

Tahun 2022 atau terjadi pertumbuhan sebesar 20,04%. Bahkan pada Tahun 2023 Pendapatan Per Kapita di Kota Tangerang telah menembus angka Rp107,989 juta. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya proses pemulihan dan peningkatan kinerja ekonomi daerah dan masyarakat.

Tabel II-2 Perbandingan Realisasi Indikator Makro Kota Tangerang dengan Provinsi Banten Tahun 2019-2023

Tahun	Indikator	IPM* (Poin)	LPE (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	TPT (%)	Indeks Gini/ Gini Rasio (Poin)	Pendapatan Per Kapita (Rp. Juta)
2019	Kota Tangerang	78,43	4,05	4,43	7,13	0,328	78,047
	Prov. Banten	72,44	5,29	5,09	8,52	0,361	52,014
2020	Kota Tangerang	79,83	-7,36	5,22	8,63	0,339	75,897
	Prov. Banten	72,45	-3,39	5,92	10,64	0,365	52,729
2021	Kota Tangerang	80,08	3,90	5,93	9,07	0,343	78,628
	Prov. Banten	72,72	4,49	6,66	8,98	0,365	55,208
2022	Kota Tangerang	80,44	5,98	5,77	7,16	0,383	94,383
	Prov. Banten	73,32	5,03	6,16	8,09	0,367	60,990
2023	Kota Tangerang	80,98	5,57	5,89	6,76	0,379	107,989
	Prov. Banten	75,77	4,81	6,17	7,52	0,368	66,150

Sumber : BPS Provinsi Banten dan Kota Tangerang, Hasil Analisis, Tahun 2024

Keterangan : *) Angka IPM dari Tahun 2020-2023 menggunakan angka hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)

Gambaran realisasi indikator makro Kota Tangerang dibandingkan dengan Provinsi Banten pada periode Tahun 2019-2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Tangerang lebih tinggi (lebih baik) dari Provinsi Banten, bahkan sejak 2021 masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” (IPM \geq 80).
- Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Tangerang rata-rata lebih tinggi dari Provinsi Banten pada periode Tahun 2019-2023. Terutama sejak Tahun 2022 (paska pandemi), LPE Kota Tangerang selalu lebih tinggi dari Provinsi Banten.
- Dalam periode Tahun 2019-2023 tingkat kemiskinan Kota Tangerang selalu lebih rendah (lebih baik) dari Provinsi Banten.
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tangerang walaupun sempat angkanya melebihi TPT Provinsi Banten pada tahun 2021, namun di tahun-tahun selanjutnya angkanya selalu berada di bawah TPT Provinsi Banten. Secara rata-rata TPT Kota Tangerang dalam periode Tahun 2019-2023 lebih rendah dari Provinsi Banten.
- Indeks gini (gini rasio) yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Tangerang, dalam periode awal Tahun 2019-2023 lebih rendah (lebih baik) dari Provinsi Banten. Namun paska

pandemi ketimpangan di Kota Tangerang berbalik menjadi lebih tinggi dibanding Provinsi Banten.

- Pendapatan Per Kapita yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk Kota Tangerang selama satu tahun, dalam periode Tahun 2018-2023 angkanya selalu lebih tinggi dari Provinsi Banten.

Berpijak pada target dan realisasi indikator makro Kota Tangerang Tahun 2023 maka capaian indikator makro Kota Tangerang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II-3 Capaian Indikator Makro Kota Tangerang Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan Indikator	Baseline 2018	2019	2020	2021	2022	2023		Perubahan 2023 Terhadap 2022	
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		% Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*	Point	77,92	78,43	79,83	80,08	80,44	79,13 - 80,05	80,98	102,34%	0,54
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,95	4,05	-7,36	3,90	5,98	4,86 - 5,30	5,57	114,61%	-0,41
3	Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)	%	4,76	4,43	5,22	5,93	5,77	4,01 - 4,39	5,89	65,83%	0,12
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,41	7,13	8,63	9,07	7,16	6,45 - 7,54	6,76	110,34%	-0,40
5	Indeks Gini (Gini Rasio)	Point	0,330	0,328	0,339	0,343	0,383	0,305 - 0,316	0,379	80,06%	-0,004
6	Pendapatan Per Kapita	Rp. Juta	74,776	78,047	75,897	78,628	94,432	-	105,915	-	11,483
Rata-rata Capaian Kinerja									94,64%		
Predikat Kinerja									Sangat Tinggi		

Sumber: BPS Kota Tangerang; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang, Hasil Analisis Tahun 2024

Keterangan: * Realisasi IPM dari Tahun 2020-2023 menggunakan angka hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)

Capaian indikator makro Kota Tangerang Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Terdapat 3 (tiga) indikator makro yang mencapai dan melebihi targetnya, yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi (LPE), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) .
- Terdapat 2 (dua) indikator makro yang tidak mencapai targetnya, yaitu tingkat kemiskinan dan indeks gini (gini rasio).
- Rata-rata capaian indikator yaitu **94,64%** sehingga berdasarkan kategori kriteria penilaian realisasi kinerja maka tingkat pencapaian kinerja indikator tergolong pada kategori **Sangat Tinggi**. Kategori ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (*Human Development Report*, 1995), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian;
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja;
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal;
4. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan;
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choice of people*) yang diukur dari tiga indikator komposit yang terdiri dari 3 ukuran, yaitu kesehatan (sebagai ukuran *longevity*), pendidikan (sebagai ukuran *knowledge*)

dan tingkat pendapatan riil (sebagai ukuran *living standards*). Bagi pembangunan suatu wilayah, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara dan mengukur kinerja Pemerintah.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pengetahuan, dan pendapatan. Mengacu pada perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), indikator yang dipilih untuk mengukur IPM adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kesehatan diukur dari angka harapan hidup;
2. Indeks Pengetahuan/Pendidikan diukur dari angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah;
3. Indeks Pengeluaran diukur dari tingkat pengeluaran perkapita setahun yang disesuaikan.

Hasil perhitungan menggunakan indeks artinya rasio (angka perbandingan) yang mengukur perubahan nilai dari suatu periode ke periode lainnya. Metode agregasi yang digunakan adalah rata-rata geometrik. *United Nations for Development Program* disingkat UNDP (1990) mengelompokkan negara berdasarkan tingkat pembangunan manusianya. Tingkat pembangunan manusia yang rendah (*low human development*), bila memiliki nilai IPM antara 0 sampai 0,59. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah (*medium human development*), apabila memiliki nilai IPM antara 0,59 sampai 0,70. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (*high human development*), bila memiliki nilai IPM antara 0,70 sampai 1. Artinya, semakin tinggi nilai IPM menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik yang berkorelasi dengan kebijakan ekonomi terhadap pembangunan manusia. Berikut ini klasifikasi status pembangunan manusia.

NILAI IPM	KLASIFIKASI
< 60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2018

Pembangunan manusia yang meliputi: pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat merupakan program utama yang menjadi bagian dari pelaksanaan misi pembangunan daerah Kota Tangerang. Melalui pembangunan manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terpenuhinya kebutuhan pokok minimal dan kebutuhan dasar lainnya secara layak, serta meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat harus dapat diwujudkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli.

Tabel II-4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang Tahun 2019-2023 Berdasarkan Data Long Form SP2020 (SP2020-LF)

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020*	2021*	2022*	2023*
I.	INDEKS KESEHATAN (IK)	Point	79,34	84,28	84,28	84,65	85,08
1.	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	71,57	74,78	74,78	75,02	75,30
	<i>Indeks Harapan Hidup (IHH)</i>	<i>Point</i>	<i>79,34</i>	<i>84,28</i>	<i>84,28</i>	<i>84,65</i>	<i>85,08</i>
II.	INDEKS PENDIDIKAN (IP)	Point	73,94	74,11	74,63	74,69	74,95
1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,84	13,85	13,87	13,88	13,89
	<i>Indeks Harapan Lama Sekolah (IHLS)</i>	<i>Point</i>	<i>76,89</i>	<i>76,94</i>	<i>77,06</i>	<i>77,11</i>	<i>77,17</i>
2.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,65	10,69	10,83	10,84	10,91
	<i>Indeks Rata-rata Lama Sekolah (IRLS)</i>	<i>Point</i>	<i>71,00</i>	<i>71,27</i>	<i>72,20</i>	<i>72,27</i>	<i>72,73</i>
III.	INDEKS DAYA BELI (IDB)	Point	82,24	81,46	81,65	82,34	83,28
1.	Pengeluaran per Kapita Setahun yang Disesuaikan (PPP/DB)	Rp. Ribu	14.860	14.484	14.575	14.909	15.377
	<i>Indeks Daya Beli (IDB)</i>	<i>Point</i>	<i>82,24</i>	<i>81,46</i>	<i>81,65</i>	<i>82,34</i>	<i>83,28</i>
IV.	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	Point	78,43	79,83	80,08	80,44	80,98

Sumber: BPS Kota Tangerang, Tahun 2024

Ket: *data Usia Harapan Hidup dari hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)

Selama periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, IPM Kota Tangerang menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 78,43 point pada Tahun 2019 menjadi 80,98 point pada Tahun 2023.

Indeks harapan hidup yang merupakan salah satu komponen pembentuk IPM adalah angka harapan hidup dibandingkan angka ideal sesuai standar global (UNDP) yaitu 85 tahun. Angka harapan hidup menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat maka kesempatan untuk hidupnya cenderung semakin panjang. Sebaliknya tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. Angka harapan hidup berbanding terbalik dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin tinggi angka kematian bayi maka angka harapan hidup cenderung semakin pendek, demikian pula sebaliknya. Angka harapan hidup (usia harapan hidup saat lahir) Kota Tangerang menunjukkan peningkatan selama periode Tahun 2019-2023, yaitu dari 71,57 tahun pada Tahun 2019 meningkat menjadi 75,30 tahun pada Tahun 2023. Artinya, rata-rata bayi yang lahir di Kota Tangerang pada Tahun 2023 memiliki harapan hidup hingga usia 75,30 tahun.

Indeks pengetahuan menggambarkan partisipasi masyarakat dan perluasan kesempatan dalam bidang pendidikan di suatu wilayah. Indeks pengetahuan Kota Tangerang selama periode Tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan yaitu dari 73,94 point pada Tahun 2019 meningkat menjadi 74,95 point pada

Tahun 2023. Indeks pengetahuan atau pendidikan dihitung berdasarkan indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah. Indeks harapan lama sekolah adalah angka harapan lama sekolah dibandingkan angka ideal sesuai standar global (UNDP) yaitu 18 tahun. Angka harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang program wajib belajar adalah pada usia 7 tahun ke atas) di masa mendatang. Selama kurun waktu Tahun 2019-2023, angka harapan lama sekolah Kota Tangerang menunjukkan peningkatan yaitu dari 13,84 tahun pada Tahun 2019 menjadi 13,89 tahun pada Tahun 2023. Artinya, pada Tahun 2023 setiap penduduk Kota Tangerang yang berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk bersekolah selama 13,89 tahun (setara dengan kuliah semester I-II). Sedangkan indeks rata-rata lama sekolah adalah angka rata-rata lama sekolah dibandingkan angka ideal sesuai standar global (UNDP) yaitu 15 tahun. Angka rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Dalam periode Tahun 2019-2023, angka rata-rata lama sekolah Kota Tangerang menunjukkan peningkatan yaitu dari 10,65 tahun pada Tahun 2019 menjadi 10,91 tahun pada Tahun 2023. Artinya bahwa pada Tahun 2023 penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kota Tangerang rata-rata telah menjalani pendidikan formal selama 10,91 tahun (setara dengan kelas I SLTA).

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk, sebagai dampak membaiknya ekonomi. Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), BPS menggunakan indikator yang dikenal dengan pengeluaran riil per kapita setahun disesuaikan. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Selama kurun waktu Tahun 2019-2023, angka pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Tangerang menunjukkan peningkatan yaitu dari Rp. 14,86 juta per kapita/tahun pada Tahun 2019 menjadi Rp. 15,37 juta per kapita/tahun pada Tahun 2023. Namun demikian, pada Tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi, angka pengeluaran per kapita disesuaikan sempat mengalami penurunan yaitu dari Rp. 14,86 juta per kapita/tahun pada Tahun 2019 menjadi Rp. 14,48 juta per kapita/tahun pada Tahun 2020.

Kondisi indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia pada periode Tahun 2019-2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel II-5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Indonesia Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Tangerang	Point	78,43	79,83	80,08	80,44	80,98
2	Provinsi Banten	Point	72,44	72,45	72,72	73,32	75,77

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
3	Indonesia	Point	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39

Sumber: BPS RI, Provinsi Banten dan Kota Tangerang, Tahun 2024

Pada Tahun 2023, indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Tangerang mencapai 80,98 point, lebih tinggi dari Provinsi Banten yang mencapai 75,77 point dan nasional yang mencapai 74,39 point. Kondisi ini mencerminkan pembangunan manusia Kota Tangerang lebih baik dari Provinsi Banten dan nasional.

Sementara itu, dalam kurun waktu tahun 2020-2023 sesungguhnya telah terjadi peningkatan status capaian IPM dari kategori “tinggi” ke “sangat tinggi” yang dialami Kota Tangerang, yaitu tepatnya sejak tahun 2021. Capaian tersebut berdasarkan pada adanya perubahan data dimensi “umur harapan hidup saat lahir” yang meningkat mengacu pada data *Long Form* hasil Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020-LF).

Dengan mengacu pada data SP2020-LF tersebut, Kota Tangerang sejak 2021 sesungguhnya sudah meningkat status capaian IPM-nya dari kategori “tinggi” ke “sangat tinggi” (IPM \geq 80), dikarenakan IPM Kota Tangerang telah menembus angka \geq 80, tepatnya sebesar 80,08 point sejak 2021.

2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kinerja ekonomi suatu daerah atau negara dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai perubahan tingkat ekonomi pada suatu negara yang bertumpu pada adanya penambahan penduduk (Smith, 1950). Indikator laju pertumbuhan ekonomi (LPE) digunakan: (1) untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional/wilayah; (2) sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional; dan (3) sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.

Pertumbuhan ekonomi diistilahkan dengan *economic growth* mengandung pengertian proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi, dapat didekati dengan menghitung pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Pada Tahun 2023, Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Tangerang mencapai 5,57% menurun dari Tahun 2022 yang mencapai 5,98%. Kondisi yang fluktuatif ini mengindikasikan proses pemulihan ekonomi masih terjadi sebagai dampak Pandemi Covid-19. Berikut ini diuraikan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia periode Tahun 2019-2023.

Tabel II-6 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Kota Tangerang	%	4,02	-7,36	3,90	5,98	5,57
2	Provinsi Banten	%	5,26	-3,39	4,45	5,03	4,81
3	Indonesia	%	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,04

Sumber: BPS RI, Provinsi Banten dan Kota Tangerang, Tahun 2024

Pada periode Tahun 2019-2023, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang mengalami fluktuasi yaitu dari 4,02% pada Tahun 2019 menjadi 5,57% pada Tahun 2023. Bahkan pada Tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) terkontraksi -7,36% sebagai dampak pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang terjadi pada masa tersebut. Pada Tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi mengalami rebound peningkatan dan tumbuh positif menjadi 3,90%. Hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2021, proses pemulihan ekonomi mulai terjadi.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Tangerang jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional dalam periode Tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa LPE Kota Tangerang di bawah atau lebih rendah dari Provinsi Banten dan nasional setiap tahunnya. Namun demikian, pada Tahun 2022 dan 2023, LPE Kota Tangerang justru meningkat pesat mencapai 5,98% dan 5,57%, lebih tinggi dan melampaui LPE Provinsi Banten dan nasional.

2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian seluruh pemerintah di manapun. Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Standar minimal kehidupan ini berbeda antara suatu daerah dengan daerah lain, karena sangat tergantung kebiasaan/adat/budaya, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya. Kemiskinan di suatu wilayah terjadi karena beberapa hal antara lain yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingginya angka ketergantungan antara penduduk yang bekerja dan pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah dan distribusi pendapatan dan pembangunan yang tidak merata. Disamping itu, ketimpangan pendapatan yang ekstrim dapat menyebabkan *in efficiency economic*, terdapat alokasi asset yang tidak efisien dan penekanan yang terlalu tinggi pada pendidikan tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar dan kemudian menyebabkan kesenjangan yang semakin melebar.

Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan

absolut sudah jelas dan tidak ada masyarakat yang dapat merasa nyaman dengan kondisi dimana rekan-rekan satu wilayahnya berada dalam kesengsaraan karena kemiskinan yang diderita mereka.

Berikut ini diuraikan tentang garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Tangerang Tahun 2019-2023.

Tabel II-7 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang Tahun 2019-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2019	584.318	98.370	4,43
2020	632.835	118.220	5,22
2021	655.061	134.240	5,93
2022	695.225	132.880	5,77
2023	746.468	137.700	5,89

Sumber: BPS Kota Tangerang, Tahun 2024

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Tangerang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung fluktuatif, dimana terjadi penurunan dan peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Tangerang dan persentase penduduk miskin di interval angka 4 sampai 5 persen. Persentase penduduk miskin di Kota Tangerang pada tahun 2023 mencapai 5,89% yang mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang sebesar 5,77%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya garis kemiskinan di Kota Tangerang yang pada tahun 2023 telah mencapai 746.468 rupiah/kapita/bulan.

Pemerintah Kota Tangerang melalui program kesehatan gratis, pendidikan, infrastruktur dan subsidi pangan tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan bagi warga Kota Tangerang. Masyarakat dengan pendapatan sedikit di atas garis kemiskinan tidak tergolong miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan biasanya hanya dengan sedikit guncangan masalah ekonomi mereka akan berubah menjadi miskin. Keadaan ini mengakibatkan banyak penduduk yang keluar masuk menjadi miskin. Oleh karenanya program-program pro kemiskinan tidak hanya ditujukan untuk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan tetapi juga masyarakat yang rentan miskin yaitu masyarakat yang dengan mudah jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Tabel II-8 Tingkat Kemiskinan Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Tangerang	%	4,43	5,22	5,93	5,77	5,89
2	Provinsi Banten	%	5,09	5,92	6,66	6,16	6,17
3	Indonesia	%	9,22	10,19	9,71	9,54	9,36

Sumber: BPS RI, Provinsi Banten dan Kota Tangerang, Tahun 2024

Pada Tahun 2023, tingkat kemiskinan Kota Tangerang mencapai 5,89% lebih rendah dari Provinsi Banten yang mencapai 6,17% dan juga lebih rendah dari nasional yang mencapai 9,36%. Kondisi ini mencerminkan tingkat kemiskinan Kota Tangerang masih lebih baik dari Provinsi Banten dan nasional.

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator ini berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend ini akan menunjukkan keberhasilan/ kegagalan program dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Secara formulasi, TPT dihitung melalui rasio antara jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (bukan karena alasan kekurangan fisik) dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yaitu 15 tahun sampai dengan 64 tahun ke atas.

Tabel II-9 Penduduk Kota Tangerang Berdasarkan Jenis Kegiatan, TPAK dan TPT Tahun 2023

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		Total	TPAK	TPT
	Laki-laki	Perempuan			
Bekerja	558.492	318.352	876.844	63,39%	6,76%
Pengangguran	37.172	26.358	63.530		
Bukan Angkatan Kerja	149.687	393.444	543.131		
Jumlah	745.351	738.154	1.483.505		

Sumber : BPS, Sakernas 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada Tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Kota Tangerang sebesar 6,76%. Hal ini mengartikan bahwa diantara 100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPT untuk Kota Tangerang tersebut turun dari tahun sebelumnya (2022) yaitu 7,16%.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang banyak terjadi sebagai dampak dari mewabahnya virus Covid-19 sejak awal Tahun 2020, menyebabkan

meningkatnya jumlah pengangguran di Kota Tangerang. Angka TPT Kota Tangerang Tahun 2021 sebesar 9,07% meningkat dibandingkan Tahun 2020 yang sebesar 8,63%. Namun seiring meredanya pandemi dan pulihnya ekonomi, angka TPT Kota Tangerang juga mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 yakni mencapai angka 6,76%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan ketenagakerjaan di Kota Tangerang.

Jika dilihat menurut jenis kelaminnya, TPT tahun 2023 pada jenis kelamin perempuan sebesar 7,65 persen lebih tinggi dibandingkan TPT jenis kelamin laki-laki sebesar 6,24 persen. TPT jenis kelamin perempuan cenderung mengalami penurunan dimana TPT tahun 2021 sebesar 9,68 persen lalu di tahun 2022 turun menjadi 9,44 persen kemudian di tahun 2023 TPT jenis kelamin perempuan turun menjadi 7,65 persen. Sementara untuk TPT jenis kelamin laki-laki cenderung fluktuatif selama tiga tahun terakhir dimana TPT tahun 2021 jenis kelamin laki-laki sebesar 8,71 persen turun di tahun 2022 menjadi 5,9 persen dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2023 menjadi 6,24 persen.

Adapun kondisi TPT Kota Tangerang jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Indonesia pada periode Tahun 2019-2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel II-10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Tangerang	%	7,13	8,63	9,07	7,16	6,76
2	Provinsi Banten	%	8,11	10,64	8,98	8,09	7,52
3	Indonesia	%	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber: BPS RI, Provinsi Banten dan Kota Tangerang, Tahun 2024

Pada Tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tangerang mencapai 6,76% lebih rendah dari Provinsi Banten yang mencapai 7,52% dan lebih tinggi dari nasional yang mencapai 5,32%. Kondisi ini mencerminkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tangerang lebih baik dari Provinsi Banten dan lebih buruk dari nasional.

2.1.5 Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks Gini (Gini Rasio) merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran-pengeluaran konsumsi atau variabel-variabel lain yang terkait dengan distribusi di mana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik. Indeks Gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Bila nilai

Indeks Gini mendekati satu maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sedangkan semakin kecil atau mendekati nol nilainya maka semakin merata distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang penting karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Tingginya ketimpangan pendapatan atau kemiskinan relatif, berarti kebijakan pembangunan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi indeks gini Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia pada periode Tahun 2019-2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel II-11 Indeks Gini Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Tangerang	Point	0,328	0,339	0,343	0,383	0,379
2	Provinsi Banten	Point	0,361	0,365	0,365	0,367	0,368
3	Indonesia	Point	0,380	0,385	0,398	0,403	0,388

Sumber: BPS RI, Provinsi Banten dan Kota Tangerang, Tahun 2024

Pada Tahun 2023, indeks gini (gini rasio) Kota Tangerang mencapai 0,379 point dan mengalami penurunan dari Tahun 2022 yang mencapai 0,383. Kondisi ini mencerminkan belum berubahnya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Tangerang secara signifikan. Indeks gini Kota Tangerang Tahun 2023 tersebut juga mengandung arti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Tangerang pada Tahun 2023 dikategorikan sebagai tingkat “ketimpangan sedang”.

Pada Tahun 2023, indeks gini (gini rasio) Kota Tangerang mencapai 0,379 point lebih tinggi dari Provinsi Banten yang mencapai 0,368 point dan lebih rendah dari nasional yang mencapai 0,388 point. Kondisi ini mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Tangerang lebih baik dari nasional.

2.1.6 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan Per Kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Pendapatan Per Kapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Pendapatan Per Kapita yang dihitung berdasarkan harga berlaku menunjukkan nilai pendapatan per jiwa atau satu orang penduduk yang dihitung berdasarkan harga pada tahun penghitungan dengan mengesampingkan laju inflasi.

Tabel II-12 Pendapatan Per Kapita Kota Tangerang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	PDRB ADHB per Kapita per Tahun	Rp.Juta/ Jiwa/Tahun	78,05	75,89	78,63	94,38	107,99
2	Laju Pertumbuhan PDRB ADHB per Kapita per Tahun	%	5,70	-3,19	3,93	20,19	14,42
3	PDRB ADHB per Kapita per Bulan	Rp.Juta/ Jiwa/Bulan	6,40	5,22	5,33	6,47	9,00
4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHB per Kapita per Bulan	%	4,03	-18,38	2,13	21,36	39,09

Sumber : BPS Kota Tangerang, Tahun 2024 (Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2024)

Keterangan :

Tahun 2022 (*) = Angka Sementara

Tahun 2023 (**) = Angka Sangat Sementara

Pada Tahun 2023 pendapatan per kapita (PDRB ADHB per kapita) mencapai sebesar Rp. 107,99 juta/jiwa/tahun. Realisasi pendapatan per kapita (PDRB ADHB per kapita) tersebut mengalami peningkatan 14,42% jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang mencapai Rp. 94,38 juta/jiwa/tahun.

Tabel II-13 Pendapatan Per Kapita Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Tangerang	Rp. Juta	78,047	75,897	78,628	94,383	107,989
2	Provinsi Banten	Rp. Juta	52,014	52,729	55,208	60,990	66,150
3	Indonesia	Rp. Juta	59,318	57,290	62,258	71,031	74,965

Sumber: BPS RI, Provinsi Banten dan Kota Tangerang, Tahun 2024

Pendapatan Per Kapita Kota Tangerang jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional dalam periode Tahun 2019-2023 menunjukkan angka atau nilai yang selalu lebih tinggi dari Provinsi Banten dan Nasional. Hal tersebut mengindikasikan kondisi perekonomian Kota Tangerang relatif lebih baik dari rata-rata Provinsi Banten dan Nasional.

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Tangerang memperlihatkan capaian indikator yang telah ditentukan di dalam perencanaan Tahun 2023. Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangannya. Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci Kota Tangerang Tahun 2023 adalah sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	1	1.a.1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Unit	393	393	Dinas Pendidikan	
		2	1.a.1	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	22.105	22.105	Dinas Pendidikan	
		3	1.a.1	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	0	0	Dinas Pendidikan	
		4	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	2.817	2.817	Dinas Pendidikan	
		5	1.a.1	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	2.817	2.817	Dinas Pendidikan	
		6	1.a.1	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		Orang	728	728	Dinas Pendidikan	
		7	1.a.1	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah		Orang	241	241	Dinas Pendidikan	
		1	1.a.2,1.a.3	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		Unit	289	289	Dinas Pendidikan	
		2	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	10.000	10.000	Dinas Pendidikan	
		3	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	5.000	5.000	Dinas Pendidikan	
		4	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	135.194	135.194	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
		5	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	47.102	47.102	Dinas Pendidikan	
		6	1.a.2,1.a.3	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	8.490	8.490	Dinas Pendidikan	
		7	1.a.2,1.a.3	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	3.903	3.903	Dinas Pendidikan	
		8	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Orang	8.490	8.490	Dinas Pendidikan	
		9	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	3.903	3.903	Dinas Pendidikan	
		10	1.a.2,1.a.3	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	925	925	Dinas Pendidikan	
		11	1.a.2,1.a.3	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	513	513	Dinas Pendidikan	
		12	1.a.2,1.a.3	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	925	925	Dinas Pendidikan	
		13	1.a.2,1.a.3	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	513	513	Dinas Pendidikan	
		14	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	3.009	3.009	Dinas Pendidikan	
		15	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	1.473	1.473	Dinas Pendidikan	
		16	1.a.2,1.a.3	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	418	418	Dinas Pendidikan	
		17	1.a.2,1.a.3	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat		Orang	201	201	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
				pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah						
		18	1.a.2,1.a.3	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	465	465	Dinas Pendidikan	
		19	1.a.2,1.a.3	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	294	294	Dinas Pendidikan	
		1	1.a.4	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Orang	22	22	Dinas Pendidikan	
		2	1.a.4	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	0	0	Dinas Pendidikan	
		3	1.a.4	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	0	0	Dinas Pendidikan	
		4	1.a.4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	249	249	Dinas Pendidikan	
		5	1.a.4	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	249	249	Dinas Pendidikan	
		6	1.a.4	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		Orang	128	128	Dinas Pendidikan	
		7	1.a.4	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	418	418	Dinas Pendidikan	
		8	1.a.4	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		Orang	25	25	Dinas Pendidikan	
2	Kesehatan	1	1.b.1	Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		Unit	34	34	Dinas Kesehatan	
		1	1.b.2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		Unit	34	34	Dinas Kesehatan	
		1	1.b.3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			40.925	40.925	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
		2	1.b.3	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		Orang	6987	6.987	Dinas Kesehatan	
		1	1.b.4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			39.588	39.588	Dinas Kesehatan	
		2	1.b.4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		Orang	6987	6.987	Dinas Kesehatan	
		1	1.b.5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			39.588	39.588	Dinas Kesehatan	
		2	1.b.5	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		Orang	6987	6.987	Dinas Kesehatan	
		1	1.b.6	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			90.040	90.040	Dinas Kesehatan	
		2	1.b.6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar			5795	5.795	Dinas Kesehatan	
		1	1.b.7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			231.986	231.986	Dinas Kesehatan	
		2	1.b.7	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		Orang	6.131	6.131	Dinas Kesehatan	
		1	1.b.8	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			660.890	660.890	Dinas Kesehatan	
		2	1.b.8	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	5.972	5.972	Dinas Kesehatan	
		1	1.b.9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			62.656	62.656	Dinas Kesehatan	
		2	1.b.9	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	5.972	5.972	Dinas Kesehatan	
		1	1.b.10	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			166.750	166.750	Dinas Kesehatan	
		2	1.b.10	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	5.801	5.801	Dinas Kesehatan	
		1	1.b.11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			93.500	93.500	Dinas Kesehatan	
		2	1.b.11	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	5.972	5.972	Dinas Kesehatan	
		1	1.b.12	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			902	902	Dinas Kesehatan	
		2	1.b.12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	110	110	Dinas Kesehatan	
		1	1.b.13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			17.895	17.895	Dinas Kesehatan	
		2	1.b.13	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan		Orang	6801	6.801	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
				kesehatan sesuai standar					Kesehatan	
		1	1.b.14	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			32.360	32.360	Dinas Kesehatan	
		2	1.b.14	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	7598	7.598	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1.c.1,1.c.2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)		Ha	429.38	429.38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		2	1.c.1,1.c.2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)		M	Tidak Dapat Diisi	Tidak Dapat Diisi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		3	1.c.1,1.c.2	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)		Ha	Tidak Dapat Diisi	Tidak Dapat Diisi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		4	1.c.1,1.c.2	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)		M	Tidak Dapat Diisi	Tidak Dapat Diisi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		5	1.c.1,1.c.2	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		6	1.c.1,1.c.2	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		7	1.c.1,1.c.2	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota		Jumlah	Tidak Dapat Diisi	Tidak Dapat Diisi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer	%	1	100	Dinas Pekerjaan	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					dalam kondisi baik (m)				Umum dan Penataan Ruang	
					Panjang jaringan irigasi primer (m)		1			
		2	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Sekunder dalam kondisi baik (m)	%	1	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Panjang jaringan irigasi Sekunder (m)		1			
		3	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik (m)	%	1	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Panjang jaringan irigasi Tersier (m)		1			
		1	1.c.4	Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kota	Dokumen RISPAM Kota Tangerang Tahun 2016 - 2030	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		2	1.c.4	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kota	Dokumen Jakstrada SPAM Kota Tangerang Tahun 2016 - 2021	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		3	1.c.4	Jumlah BUMD dan atau UPTD kota penyelenggaraan SPAM	PDAM Tirta Benteng	BUMD/UPTD	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		4	1.c.4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	PT MAT, PT MOYA, PT BHJ, dan PT Cilamaya Subur	Izin	4	4	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		5	1.c.4	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		Kerjasama	1	1	Dinas Perumahan, Permukiman	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
									dan Pertanahan	
		1	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		Rumah	416.121	416.121	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		2	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		Rumah	11.528	11.528	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		3	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		Rumah	617.639	617.639	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		4	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Rumah	5.397	5.397	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		5	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Rumah	5.397	5.397	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		6	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		Rumah	16.925	16.925	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		7	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan	%	416.121	97,12	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
							428.463			

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha					
		8	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan IPLT akses aman	rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	%	5.397	1,26	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
				rumah di wilayah pengembangan IPLT	428.463					
		9	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD T	%	11.528	100,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
				rumah di wilayah pengembangan SPALD T	11.528					
		10	1.c.5	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	%	1.731	100,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
				jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	1.731					
		11	1.c.5	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	%	13	100,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
				jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota	truk tinja		13			
		12	1.c.5	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	jumlah kapasitas pengolahan	%	1	100,00	Dinas Perumahan,	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					lumpur tinja yang tersedia				Permukiman dan Pertanahan	
					jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota		1			
		13	1.c.5	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	%	11.528	100,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
					jumlah rumah yang dilayani @dengan SPALD-T pada kab/kota		11.528			
		14	1.c.5	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	%	5.397	1,30	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
					jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S		416.121			
		1	1.c.6	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana yang laik fungsi yang berlaku	%	187,00	15,75	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
					Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan		1.187,00			

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					rumah deret sederhana					
		2	1.c.6	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting	Izin	1593	1593	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		3	1.c.6	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		4	1.c.6	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		5	1.c.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Bangunan	16	16	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		6	1.c.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kota		Bangunan	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		7	1.c.6	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kota		Bangunan	3.149	3.149	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		8	1.c.6	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kota yang dipelihara/dirawat		Bangunan	3.149	3.149	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		1	1.c.7	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan		KM	255,318	255,318	Dinas Pekerjaan	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
				kota					Umum dan Penataan Ruang	
		2	1.c.7	Panjang jalan yang dibangun		KM	0,392	0,392	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		3	1.c.7	Panjang jembatan yg dibangun		M	28	28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		4	1.c.7	Panjang jalan yang ditingkatkan		KM	13,44	13,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		5	1.c.7	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		M	112,9	112,9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		6	1.c.7	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		KM	1,34	1,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		7	1.c.7	Panjang jembatan yang direhabilitasi		M	31.86	31.86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		8	1.c.7	Panjang jalan yang dipelihara		KM	13,44	13,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		9	1.c.7	Panjang jembatan yang dipelihara		M	803.50	803.50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
									Ruang	
		1	1.c.8	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kota		Orang	481	481	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		2	1.c.8	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kota		Orang	481	481	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		3	1.c.8	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kota		Orang	156	156	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		4	1.c.8	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada (Admin SIPJAKi)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		5	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBD kota	Ada (Data RUP Penyedia Paket Konstruksi)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		6	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBN		Ada/Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		7	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari pendanaan lainnya		Ada/Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		8	1.c.8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada (Data RUP Penyedia Paket Konstruksi)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
		9	1.c.8	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kota	Ada (Perwal SOTK)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		10	1.c.8	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada (Data SKT+Data Bimtek)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		11	1.c.8	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada (Data SKT+Data Bimtek)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		12	1.c.8	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada (Data SKT+Data Bimtek)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		13	1.c.8	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kota	Ada (Data BUJK)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		14	1.c.8	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada (Data Rejap SIUJK)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		15	1.c.8	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		16	1.c.8	Tersedianya data dan informasi kecelakaan		Ada/Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
				konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya					Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		17	1.c.8	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		18	1.c.8	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	417 (Data BUJK)	Badan Usaha	481	481	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		19	1.c.8	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kota		Badan Usaha	481	481	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		20	1.c.8	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/kota		Badan Usaha	481	481	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		21	1.c.8	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota	417 (Data BUJK)	Badan Usaha	481	481	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		22	1.c.8	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		izin	481	481	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		23	1.c.8	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawasan	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		24	1.c.8	Jumlah kecelakaan konstruksi pada		Kecelakaan	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
				proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Konstruksi			Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		25	1.c.8	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawasan	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	1.d.1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		Unit	1.495	1.495	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		2	1.d.1	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Unit	1.495	1.495	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		3	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		Orang	3.373	3.373	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		4	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Unit	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		5	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		Unit	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		6	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		Unit	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		7	1.d.1	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		Unit	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
		8	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		Orang	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		9	1.d.1	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		Ha	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		1	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	29	29	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		2	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	29	29	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		3	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	29	29	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		4	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	29	29	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		5	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	29	29	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		6	1.d.2	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		Ha	29	29	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		1	1.d.3	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh < 10 Ha		Ha	105,31	105,31	Dinas Perumahan,	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
									Permukiman dan Pertanahan	
		2	1.d.3	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Unit	700	700	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		3	1.d.3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		Ha	105,31	105,31	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		1	1.d.4	Jumlah rumah di kab/kota		Rumah	428.463	428.463	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		2	1.d.4	Jumlah unit PK RTLH		Rumah	700,00	700,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		3	1.d.4	Jumlah rumah tidak layak huni		Rumah	66,00	66,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		4	1.d.4	Jumlah rumah yang tidak dihuni		Rumah	0,00	0,00	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		5	1.d.4	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK Jumlah total unit rumah	%	617.639,00 428.463,00	144,15	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		6	1.d.4	Jumlah rumah pembangunan baru			0,00	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
									Pertanahan	
		1	1.d.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		Perumahan	154,00	154	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		2	1.d.5	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Rumah	428.463,00	428.463	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		3	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		Rumah	428.463,00	428.463	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		4	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		Rumah	617.639	617.639	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		5	1.d.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		Perumahan	154	154	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		6	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		Rumah	428.463	428.463	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		7	1.d.5	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		Pengembang	60,00	60	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		8	1.d.5	Jumlah pengembang yang terregistrasi		Pengembang	154,00	154	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
		9	1.d.5	Jumlah pengembang yang mendapat		Pengembang	60,00	60	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
				penyuluhan atau pelatihan					Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	1.e.1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani	Jumlah pengaduan yang ditangani	Jumlah	617	100	Satpol PP	
					Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk		617			
		2	1.e.1	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Satpol PP	Orang	172	172	Satpol PP	
		3	1.e.1	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	Perda & Perkada	9	100	Satpol PP	
					Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		9			
		4	1.e.1	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS	Orang	65	85,53	Satpol PP	
					Jumlah personil Satpol PP		76			
5	1.e.1	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Jumlah keberadaan SOP	SOP	21	21	Satpol PP			
6	1.e.1	Tersedianya sarana prasarana minimal	Jumlah sarana prasarana kendaraan dinas operasional dan jabatan, Jumlah peralatan pelindung Satpol	Jumlah	152	152	Satpol PP			

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					PP					
		1	1.e.3	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan		1			
		2	1.e.3	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	877.930	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		877.930			
		1	1.e.4	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	1	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan		1			
		2	1.e.4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	1	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap		1			

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					dan sudah disahkan					
		3	1.e.4	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	8.984	1,07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana		838.837			
		4	1.e.4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	%	7.913	0,94	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		838.837			
		5	1.e.4	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	%	838.837	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		838.837			
		6	1.e.4	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	%	838.837	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		838.837			
		1	1.e.5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan	%	0	0	Badan Penanggulang	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB				an Bencana Daerah	
					Jumlah seluruh penetapan status KLB		1			
		2	1.e.5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	%	1	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana		1			
		3	1.e.5	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	300	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana		300			
		4	1.e.5	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	%	3.543	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana		3.543			
		1	1.e.6	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota		Layanan	14	14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		2	1.e.6	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar,		Pos	8	8	Badan Penanggulangan	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
				sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan					an Bencana Daerah	
		3	1.e.6	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Untuk di kantor kecamatan tidak ada. Tetapi terdapat pada 2 pos, 4 UPT, dan 1 markas	Orang	91	91	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		4	1.e.6	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		Pos	8	8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		5	1.e.6	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		Sarpras	869	869	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		6	1.e.6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		Orang	300	300	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		7	1.e.6	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		Orang	165	165	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		8	1.e.6	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		Kegiatan	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
6	Sosial	1	1.f.1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		Layanan	4	4	Dinas Sosial	
		2	1.f.1	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		Data	2.217	2.217	Dinas Sosial	
		3	1.f.1	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		Tim	1	1	Dinas Sosial	
		4	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		Orang	2.472	2.472	Dinas Sosial	
		5	1.f.1	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		Unit	4	4	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
		6	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		Orang	285	285	Dinas Sosial	
		7	1.f.1	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		Unit	86	86	Dinas Sosial	
		8	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		Orang	285	285	Dinas Sosial	
		9	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		Orang	238	238	Dinas Sosial	
		10	1.f.1	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter		Alat	4	4	Dinas Sosial	
		11	1.f.1	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia		Paket	2	2	Dinas Sosial	
		12	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		Orang	285	285	Dinas Sosial	
		13	1.f.1	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah		Orang	4	4	Dinas Sosial	
		14	1.f.1	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		Orang	1144	1.144	Dinas Sosial	
		15	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		Orang	285	285	Dinas Sosial	
		16	1.f.1	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		Kegiatan	2	2	Dinas Sosial	
		17	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		Orang	12	12	Dinas Sosial	
		18	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan		Orang	285	285	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
				gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar						
		19	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		Orang	285	285	Dinas Sosial	
		20	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		Orang	166	166	Dinas Sosial	
		21	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		Orang	118	118	Dinas Sosial	
		1	1.f.2	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		Orang	1247	1.247	Dinas Sosial	
		2	1.f.2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		Orang	432	432	Dinas Sosial	
		3	1.f.2	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		Penampungan	3	3	Dinas Sosial	
		4	1.f.2	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		Paket	39	39	Dinas Sosial	
		5	1.f.2	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		Orang	328	328	Dinas Sosial	
		6	1.f.2	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		Orang	1.144	1.144	Dinas Sosial	
7	Tenaga Kerja	1	2.a.1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kota		Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Ketenagakerjaan	
		2	2.a.1	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		%	6	6	Dinas Ketenagakerjaan	
		3	2.a.1	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja		Perusahaan	540	540	Dinas Ketenagakerjaan	
		1	2.a.2	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun 2023	%	9	100	Dinas Ketenagakerjaan	
					keseluruhan		9			

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2023					
		2	2.a.2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2023	%	19	100	Dinas Ketenagakerjaan	
				jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2023	19					
		3	2.a.2	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun 2023	%	19	4,935064935	Dinas Ketenagakerjaan	
				jumlah peserta pelatihan pada tahun 2023	385					
		4	2.a.2	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2023	%	10	13,51351351	Dinas Ketenagakerjaan	
				jumlah seluruh LPK pada tahun 2023	74					
		5	2.a.2	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2023	%	56	75,67567568	Dinas Ketenagakerjaan	
				jumlah LPK yang terdata pada tahun 2023	74					
		6	2.a.2	Jumah penganggur yang dilatih		Orang	1.628	1.628	Dinas Ketenagakerjaan	
		7	2.a.2	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan	%	1.628	100	Dinas Ketenagakerjaan	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					bersertifikat pelatihan				an	
					Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun 2023		1.628			
		8	2.a.2	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2023	%	40	11,9047619	Dinas Ketenagakerjaan	
					Jumlah lulusan pada tahun 2023		336			
		9	2.a.2	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat Kompetensi	%	30.521	100	Dinas Ketenagakerjaan	
					Jumlah lulusan bersertifikat Kompetensi pada tahun 2023		30.521			
		10	2.a.2	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	Σ CPMI dilatih	%	185	100	Dinas Ketenagakerjaan	
					Σ CPMI terdaftar		185			
		11	2.a.2	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)			3	3	Dinas Ketenagakerjaan	
		1	2.a.3	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2023	%	15.702	82	Dinas Ketenagakerjaan	
					jumlah perusahaan pada tahun 2023		19.094			
		2	2.a.3	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi		5.57	5.57	Dinas Ketenagakerjaan	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).				an	
		1	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2023	%	1.670	100	Dinas Ketenagakerjaan	
					Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih		1.670			
		2	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2023	%	592	57.41	Dinas Ketenagakerjaan	
					Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh		1031			
		3	2.a.4	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		SP/SB	10	10	Dinas Ketenagakerjaan	
		4	2.a.4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah	%	2.144	94,78337754	Dinas Ketenagakerjaan	
					Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat		2.262			

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					kerja (dalam PP atau PKB)					
		5	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	15.702	82,23525715	Dinas Ketenagakerjaan	
				Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor		19.094				
		6	2.a.4	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih	%	135	0,707028386	Dinas Ketenagakerjaan	
				Jumlah perusahaan pada tahun 2023		19.094				
		7	2.a.4	Jumlah mogok kerja		Mogok	2	2	Dinas Ketenagakerjaan	
		8	2.a.4	Jumlah penutupan perusahaan		Perusahaan	8	8	Dinas Ketenagakerjaan	
		9	2.a.4	Jumlah perselisihan kepentingan		Perselisihan	0	0	Dinas Ketenagakerjaan	
		10	2.a.4	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		Perselisihan	0	0	Dinas Ketenagakerjaan	
		11	2.a.4	Jumlah perselisihan PHK		Perselisihan	135	135	Dinas Ketenagakerjaan	
		12	2.a.4	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		Orang	291	291	Dinas Ketenagakerjaan	
		13	2.a.4	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		Perselisihan	19	19	Dinas Ketenagakerjaan	
		14	2.a.4	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kota		Ada/Tidak	1	1	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
				yang diberdayakan					Ketenagakerjaan	
		15	2.a.4	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perjanjian Bersama Jumlah kasus perselisihan	%	26 135	19,26	Dinas Ketenagakerjaan	
		1	2.a.5	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kota		Lowongan Kerja	29.146	29.146	Dinas Ketenagakerjaan	
		2	2.a.5	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		Orang	13.135	13.135	Dinas Ketenagakerjaan	
		3	2.a.5	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		BKK	121	121	Dinas Ketenagakerjaan	
		4	2.a.5	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kota		Orang	144	144	Dinas Ketenagakerjaan	
		5	2.a.5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		Orang	3	3	Dinas Ketenagakerjaan	
		6	2.a.5	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		Lembaga	1	1	Dinas Ketenagakerjaan	
		7	2.a.5	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota		Perjanjian	175	175	Dinas Ketenagakerjaan	
		8	2.a.5	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		orang	0	0	Dinas Ketenagakerjaan	
		9	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		Orang	185	185	Dinas Ketenagakerjaan	
		10	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		Orang	185	185	Dinas Ketenagakerjaan	
		11	2.a.5	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya	Σ fasilitasi PMI yang dipulangkan Σ PMI yang pulang	%	0 0	0	Dinas Ketenagakerjaan	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
		12	2.a.5	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{\sum \text{PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\sum \text{PMI/TKI}}$	%	185	100	Dinas Ketenagakerjaan	
							185			
		13	2.a.5	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\sum \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\sum \text{PMI/TKI purna dan keluarganya}}$	%	0	0	Dinas Ketenagakerjaan	
							0			
		14	2.a.5	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\sum \text{LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}}$	%	0	0	Dinas Ketenagakerjaan	
							0			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	2.g.1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kota yang telah dilatih PUG		Lembaga	41 OPD	41 OPD	DP3AP2KB	
		2	2.g.1	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kota		Prog/Keg	109 Program 187 Kegiatan	109 Program 187 Kegiatan	DP3AP2KB	
		1	2.g.2	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		Media Massa	6	6	DP3AP2KB	
		2	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		Lembaga	2	2	DP3AP2KB	
		3	2.g.2	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kota}}$	%	152	100,00	DP3AP2KB	
							152			
		4	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		Lembaga	3	3	DP3AP2KB	
		5	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah kota (APBD kota)		Lembaga	3	3	DP3AP2KB	
1	2.g.3	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat		Organisasi	3	3	DP3AP2KB			

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
				kota yang mendapatkan pelatihan						
		2	2.g.3	Jumlah kader perempuan tingkat kota yang sudah dilatih		Orang	117	117	DP3AP2KB	
		3	2.g.3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		Lembaga	3	3	DP3AP2KB	
		4	2.g.3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kota		Lembaga	3	3	DP3AP2KB	
		5	2.g.3	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		Kebijakan/Program	6	6	DP3AP2KB	
		6	2.g.3	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi		Lembaga	2	2	DP3AP2KB	
		7	2.g.3	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan	%	103	100,00	DP3AP2KB	
	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan				103					
9	Pangan	1	2.h.1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Dinas Ketahanan Pangan	
		2	2.h.1	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Ketahanan Pangan	
		3	2.h.1	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Dinas Ketahanan Pangan	
		4	2.h.1	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan	Ada/tidak kegiatan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Ketahanan	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
				konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	pemberdayaan masyarakat				Pangan	
		5	2.h.1	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Ketahanan Pangan	
		6	2.h.1	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Ketahanan Pangan	
		7	2.h.1	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Dinas Ketahanan Pangan	
		8	2.h.1	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Ketahanan Pangan	
10	Pertanahan	1	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan + jumlah surat penolakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) setelah melalui proses ditolak seluruhnya	%	842	100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
					Jumlah permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)		842			

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					dalam 1 tahun					
		2	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum absentee	%	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
				Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek		1				
		3	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee	%	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
				Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek		1				
		4	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah	%	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
		5	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kota	yang diproses penerbitannya			1	dan Pertanahan	
					Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun					
					Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	%	842	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun		842								
11	Lingkungan Hidup	1a	2.j.1	Hasil Perhitungan kota terhadap : Indeks Kualitas Air (IKA)		Point	18,30	18,30	Dinas Lingkungan Hidup	
		1b	2.j.1	Hasil Perhitungan kota terhadap : Indeks Kualitas Udara (IKU)		Point	23,68	23,68	Dinas Lingkungan Hidup	
		1c	2.j.1	Hasil Perhitungan kota terhadap : Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		Point	4,94	4,94	Dinas Lingkungan Hidup	
		1	2.j.2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kota			3	3	Dinas Lingkungan Hidup	
		1	2.j.3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota	Izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/kota	%	20	100	Dinas Lingkungan Hidup	
				jumlah usulan			20			

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					permohonan yang teregistrasi					
		2	2.j.3	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kota	Jumlah PPLHD yang ada	%	23	115	Dinas Lingkungan Hidup	
					Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota		20			
		3	2.j.3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 kota	Jumlah MHA (masyarakat hukum adat) yg diakui dgn perda	%	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
					Jumlah usulan MHA		1			
		4	2.j.3	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg mendapatkan pelatihan	%	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
					Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg ada		1			
		5	2.j.3	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat	%	66	100	Dinas Lingkungan Hidup	
							66			
		6	2.j.3	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani	%	69	100	Dinas Lingkungan Hidup	
					Total jumlah pengaduan masyarakat yang		69			

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1	2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta perkawinan	tereregistrasi	%	13.045	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan		13.045			
		2	2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta Perceraian yang diterbitkan	%	1.698	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Peristiwa Perceraian yang diterbitkan		1.698			
		3	2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	%	60.953	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Peristiwa kematian yang diterbitkan		60.953			
		4	2.k.1,2.k.2	Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kota dalam satu tahun	%	2	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					2 kali		2			
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	1	2.11,2.1.2	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa			100	100		
		2	2.11,2.1.2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya			100	100		
		3	2.11,2.1.2	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan			100	100		
		4	2.11,2.1.2	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			100	100		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga	1	2.m.1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Ada/Tidak	Ada	Ada	DP3AP2KB	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
	Berencana	2	2.m.1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	ASFRi = ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	Nilai Tengah	252.692	252.692,00	DP3AP2KB
		3	2.m.1	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	ASFR = angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun			1,70	1,70	DP3AP2KB
		4	2.m.1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK advokasi dan KIE	%	979	100,00	DP3AP2KB	
					Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK advokasi dan KIE		979			
		5	2.m.1	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		Stakeholder	168	168	DP3AP2KB	
		1	2.m.2	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB	%	95	100,00	DP3AP2KB	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					MKJP					
					Jumlah faskes		95			
		2	2.m.2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB Aktif	%	229.909	81,50	DP3AP2KB	
					Jumlah PUS		282.088			
		3	2.m.2	Pemerintah Daerah kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		Kelompok	65	65	DP3AP2KB	
		4	2.m.2	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern)	%	17.527	97,07	DP3AP2KB	
					jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan		18.056			
		1	2.m.3	Persentase kesertaan KB di kota dengan kesertaan rendah	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu kota	%	0	0,00	DP3AP2KB	
					Jumlah kelurahan dalam kota		104			
		2	2.m.3	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI	%	65.001	62,87	DP3AP2KB	
Jumlah Keluarga PBI					103.388					
15	Perhubungan	1	2.n.1,2.n.2	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia	%	11,00	84,62	Dinas Perhubungan	
					Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal					

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan		
		2	2.n.1,2.n.2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	%	59.480,00	79,71	Dinas Perhubungan			
					Jumlah kendaraan yang diuji per tahun							
		3	2.n.1,2.n.2	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kota	Jumlah kendaraan wajib uji	%	36,00	100,00	Dinas Perhubungan			
					Jumlah trayek dalam kota							
		4	2.n.1,2.n.2	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota atau kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kota	%	6,00	100,00	Dinas Perhubungan			
					Target kebutuhan perlengkapan jalan kota							
		16	Komunikasi dan Informatika	1	2.o.1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	40,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
							Jumlah Perangkat Daerah					

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
		2	2.o.1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo	%	40,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Jumlah Perangkat Daerah		40,00			
		3	2.o.1	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		1	2.o.2	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015)	%	40,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah		40,00			
		2	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang memiliki	Jumlah	%	40,00	100,00	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
				portal dan situs web yang sesuai standar	perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar				Komunikasi dan Informatika	
					Jumlah Perangkat Daerah		40,00			
		3	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	40,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Jumlah Perangkat Daerah		40,00			
		4	2.o.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	123,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Jumlah layanan		123,00			
		5	2.o.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE layanan publik dan layanan	%	13,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					administrasi pemerintahan yang memanfaatkan sertifikat elektronik					
					Jumlah layanan		13,00			
		6	2.o.2	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	202,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Jumlah sistem elektronik		202,00			
		7	2.o.2	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	123,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Jumlah layanan publik dan layanan administrasi		123,00			
		8	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	40,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Jumlah perangkat daerah		40,00			
		9	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data	%	40,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					di pusat					
					Jumlah perangkat daerah		40,00			
		10	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	%	40,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Jumlah perangkat daerah		40,00			
		11	2.o.2	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	%	13,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah		13,00			
		12	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	40,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Jumlah perangkat daerah		40,00			
		13	2.o.2	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo	%	10,00	15,63	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Jumlah ASN Pengelola TIK		64,00			
		14	2.o.2	Tersedianya peraturan daerah atau		Ada/tidak	Ada	Ada	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
				peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government					Komunikasi dan Informatika	
		1	2.o.3	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah kota yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	%	102,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Σ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah kota		102,00			
		2	2.o.3	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	1327,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota		1327,00			
		3	2.o.3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi	%	5,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					Komunikasi (STRAKOM) dan SOP					
					Σ Diseminasi dan layanan informasi Publik		5,00			
17	Koperasi, usaha kecil dan menengah	1	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	%	0	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam		1			
		2	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	%	0	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan		1			
3	2.p.1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan	Jumlah koperasi	%	150	52,45	Dinas			

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
				yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	yang diperiksa dan diawasi				Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah koperasi yang ada		286			
		4	2.p.1	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	%	150	52,45	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada		286			
		5	2.p.1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	136	47,55	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah koperasi yang ada		286			
		6	2.p.1	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	%	136,00	0,30	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah anggota koperasi yang ada		45434			
		7	2.p.1	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	%	0	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah koperasi yang ada		286			
		8	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			0	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		9	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan	%	112	39,16	Dinas Perindustrian, Perdagangan,	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
				dalam daerah kota	sertifikat Nomor Induk Koperasinya				Koperasi dan UKM	
					Jumlah koperasi yang ada		286			
		10	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	%	0	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah koperasi yang ada		286			
		11	2.p.1	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	0	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah koperasi yang ada		286			
		12	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	%	104	36,36	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah koperasi yang ada		286			
		13	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kota dalam 1 (satu) daerah kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	%	0	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah koperasi yang ada		286			
		1	2.p.2	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	%	4313	100,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah wirausaha yang ada		4313			
		2	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang	Jumlah usaha	%	0	0,00	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan	
				diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	mikro yang diinput@ke dalam sistem data online (ODS)				Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		
					Jumlah usaha mikro yang ada		8367				
		3	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra		Jumlah usaha mikro yang bermitra	%	276	3,30	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
						Jumlah usaha mikro yang ada		8367			
		4	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha		Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	%	320	3,82	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
						Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk		8367			
		5	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	276	3,30	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
						Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran		8367			
		6	2.p.2	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi	%	520	6,21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					pelatihan					
					Jumlah usaha mikro yang ada		8367			
		7	2.p.2	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	%	475	5,68	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah usaha mikro yang ada		8367			
18	Penanaman Modal	1	2.q.1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Ada/Tidak	ada	ada	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		2	2.q.1	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Ada/Tidak	tidak	tidak	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		3	2.q.1	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah Laporan	1	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		4	2.q.1	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah Kegiatan	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		5	2.q.1	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan	Jumlah	3	3	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					pameran penanaman modal	Kegiatan			Penanaman Modal dan PTSP	
		6	2.q.1	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah Kegiatan	0	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		7	2.q.1	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Konsultasi	503	503	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		8	2.q.1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	12.780	12.780	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		9	2.q.1	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Realisasi (Rupiah)	14.993.196.941.150	14.993.196.941.150	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		10	2.q.1	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kota serta kota	Jumlah aparatur dan penanaman modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	Jumlah Aparatur	50	50	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		11	2.q.1	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan	272	272	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		12	2.q.1	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kota kota dalam 1 (satu)	Jumlah permintaan data	Ada/Tidak	ada	ada	Dinas Penanaman	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
				daerah kota	dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima				Modal dan PTSP	
19	Pemuda dan Olahraga	1	2.r.1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		Orang	2589	2589	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		2	2.r.1	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		Orang	0	0	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		1	2.r.2	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		Orang	264	264	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		2	2.r.2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		Orang	6.001	6.001	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		1	2.r.3	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		Orang	742	742	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		2	2.r.3	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		Event	27	27	Dinas Pemuda dan Olahraga	
20	Statistik	1	2.s.1,2.s.2	Tersedianya buku profil daerah		Ada/tidak	Ada	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2	2.s.1,2.s.2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		Jumlah Survey	16	16	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		3	2.s.1,2.s.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		Jumlah Kompilasi	6	6	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		4	2.s.1,2.s.2	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		Jumlah Survey	16	16	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		5	2.s.1,2.s.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		Jumlah Kompilasi	6	6	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		6	2.s.1,2.s.2	Persentase kelengkapan metadata kegiatan	Jumlah	%	16	100,00	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan		
				statistik sektoral	metadata kegiatan statistik sektoral			16	Komunikasi dan Informatika			
					Jumlah kegiatan statistik sektoral							
				7	2.s.1,2.s.2	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral	%	16	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
							jumlah indikator statistik sektoral		16			
21	Persandian	1	2.t.1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan	%	0,00	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika			
					Jumlah kegiatan strategis yang ada		1,00					
		2	2.t.1	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian	%	202,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika			
					Jumlah SE yang ada		202,00					
		3	2.t.1	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	47,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika			
					Jumlah SE yang ada		47,00					
		4	2.t.1	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Jumlah titik teramankan	%	4,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika			
					Jumlah titik pada PHKS		4,00					
		22	Kebudayaan	1	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan		Obyek	81	81	Bidang Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
				pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)						
		2	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)		Obyek	14	14	Bidang Kebudayaan	
		3	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		Obyek	81	81	Bidang Kebudayaan	
		4	2.u.1	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		Orang	514	514	Bidang Kebudayaan	
		5	2.u.1	Register cagar budaya (pendaftaran, pengajuan, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		Cagar Budaya	71	71	Bidang Kebudayaan	
		6	2.u.1	Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		Cagar Budaya	27	27	Bidang Kebudayaan	
		7	2.u.1	Layanan perizinan membawa cagar budaya kota ke luar kota dengan dukungan data		Cagar Budaya	0	0	Bidang Kebudayaan	
		8	2.u.1	Pengembangan cagar budaya kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)		Cagar Budaya	18	18	Bidang Kebudayaan	
		9	2.u.1	Pemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		Cagar Budaya	6	6	Bidang Kebudayaan	
		10	2.u.1	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Koleksi	6	6	Bidang Kebudayaan	
		11	2.u.1	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum		Orang	6720	6720	Bidang Kebudayaan	
		12	2.u.1	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.		Orang	0	0	Bidang Kebudayaan	
		13	2.u.1	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		Tim	1	1	Bidang Kebudayaan	
		14	2.u.1	Pembentukan tim ahli cagar budaya kota		Tim	1	1	Bidang Kebudayaan	
		15	2.u.1	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		Tim	0	0	Bidang Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
		16	2.u.1	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman		Orang	0	0	Bidang Kebudayaan	
		17	2.u.1	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman		Orang	0	0	Bidang Kebudayaan	
		18	2.u.1	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		Unit	2	2	Bidang Kebudayaan	
		19	2.u.1	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		Kegiatan	4	4	Bidang Kebudayaan	
23	Perpustakaan	1	2.v.1	Rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)	%	86.159,00	4,50	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
					Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)		1.912.679,00			
		2	2.v.1	Persentase keterampilan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite	%	213.819,00	11,18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
					Jumlah penduduk di wilayahnya		1.912.679,00			
		3	2.v.1	Rasio kecukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya	%	1.046,00	0,05	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
					Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)		1.912.679,00			

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
		4	2.v.1	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	15,00	1,48	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
					Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya		1.013,00			
		5	2.v.1	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat			945,00	945	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		1	2.v.2	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya		Naskah Kuno	0,00	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2	2.v.2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Naskah Kuno	0,00	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		3	2.v.2	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		Budaya Etnis	127,00	127	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
24	Kearsipan	1	2.w.1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	1.215,00	100,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
					Jumlah seluruh arsip aktif		1.215,00			
		2	2.w.1	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	26.809,00	100,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
					Jumlah seluruh arsip inaktif		26.809,00			
		3	2.w.1	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan	%	1.197,00	100,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					sarana bantu temu balik			1.197,00	Daerah	
					Jumlah seluruh arsip Statis					
		4	2.w.1	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	385,00	100,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
					Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kota		385,00			
		1	2.w.2	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2	2.w.2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		3	2.w.2	Penyelamatan arsip perangkat daerah kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang sesuai NSPK di kota		Jumlah Arsip	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		4	2.w.2	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	10.481,00	10.481,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		5	2.w.2	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	33,00	33,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		6	2.w.2	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kota yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
25	Kelautan dan Perikanan	1	3.a.1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi		0	0,00	Dinas Ketahanan Pangan	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					usaha (RTP)					
		2	3.a.1	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar operasional	%	0	0	Dinas Ketahanan Pangan	
					Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kota		0			
		3	3.a.1	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kota/ kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kota/ kota yang diterbitkan	Izin	0	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		4	3.a.1	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan pertahun	Pembudidaya	369	369	Dinas Ketahanan Pangan	
		5	3.a.1	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi pertahun	Benih	1.371.154	1.371.154	Dinas Ketahanan Pangan	
26	Pariwisata	1	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah entitas pengelolaan destinasi			69	69	Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota	
		2	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata			391	391	Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
		3	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kota		TDUP	10813	10.813	Bidang Pariwisata	
		4	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		orang	255500	255.500	Bidang Pariwisata	
		5	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		Kegiatan	6	6	Bidang Pariwisata	
		6	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota		Kegiatan	0	0	Bidang Pariwisata	
		7	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri		Industri	6	6	Bidang Pariwisata	
		8	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	%	0	0	Bidang Pariwisata	
					Jumlah tenaga kerja pariwisata		1			
		9	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	150	100	Bidang Pariwisata	
					Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan		150			
		10	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		Lokasi	10	10	Bidang Pariwisata	
27	Pertanian	1	3.c.1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Unit	272	272	Dinas Ketahanan Pangan	
		2	3.c.1	Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan		0	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		3	3.c.1	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	Dokumen	0	0	Dinas Ketahanan Pangan	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
		4	3.c.1	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	%	0	0	Dinas Ketahanan Pangan	
					Jumlah prasarana yang dibangun		0			
		5	3.c.1	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	%	0	0	Dinas Ketahanan Pangan	
					Jumlah usulan usaha pertanian		0			
		1	3.c.2	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	%	0	0	Dinas Ketahanan Pangan	
					Luas area yang ditanggulangi (Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular)		0			
28	Kehutanan	1	3.d.1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura			100,00	100,00		
		2	3.d.1	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga			100,00	100,00		
		3	3.d.1	Pemulihan ekosistem pada Tahura			100,00	100,00		
		4	3.d.1	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			100,00	100,00		
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	3.e.1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota			100	100		
30	Perdagangan	1a	3.f.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan < 5 hari kerja	%	0	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang		1			

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					dokumennya sudah lengkap dan benar					
		1b	3.f.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan < 5 hari kerja Jumlah permohonan izin toko swayalan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	%	0	0		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		2	3.f.1	Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG < 5 hari kerja Jumlah permohonan penerbitan TDG	%	0	0		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		3	3.f.1	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG Jumlah gudang yang ada di Kab kota	%	11	4,247104247		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		4	3.f.1	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :			0	0		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		4a	3.f.1	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%	0	0		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		1			
		4b	3.f.1	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%	0	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri		1			
		4c	3.f.1	c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%	0	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah		1			

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri					
		5	3.f.1	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, penge masan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kota	%	0	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer		1			
		1	3.f.1	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja 1 x 24 jam	%	4361	8,332378005	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar		52338			
		2	3.f.1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan	%	0	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
							1			

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					<p>sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</p> <p>a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)</p> <p>b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)</p>					
		3	3.f.1	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		%	0	0		
		1	3.f.2	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	<p>$X = a / (b \times c) \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat kota sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan</p>	%	0	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan	
31	Perindustrian	1	3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Kelompok)	%	18500	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		
					Jumlah UTTP bertanda terasah yang berlaku pada tahun berjalan						
		2	3.f.3	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab kota	%	41	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		
					Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku						
		1	3.g.1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kota	Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	%	41	0	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah realisasi izin yang diterbitkan						
1	3.g.2	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi perda	Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	%	50	50	50	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM			
1	3.g.3	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan								
2	3.g.3	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri kecil yang diterbitkan	Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	%	19	19	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM			
			Jumlah realisasi izin yang								

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	No. IKK Output	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
					diterbitkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		1		Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		1	3.g.6	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota di SIINas Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota	%	5903 5903	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
32	Transmigrasi	1	2.h.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya			100,00	100,00		Kota Tangerang tidak melaksanakan urusan transmigrasi
		2	2.h.1	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya			100,00	100,00		
		3	2.h.1	Jumlah satuan pemukiman yang dibina			100,00	100,00		

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Ket.
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar										
1	Pendidikan	1	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	'''''''''' %	67292	100	Dinas Pendidikan	
					Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kota yang bersangkutan		67292			
		2	1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	'''''''''' %	200050	100	Dinas Pendidikan	
					Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kota yang bersangkutan		200050			
		3	1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	'''''''''' %	96534	100	Dinas Pendidikan	
					Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan		96534			
		4	1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	'''''''''' %	5214	100	Dinas Pendidikan	
	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kota yang bersangkutan				5214					
2	Kesehatan	5	1.b.1	Rasio daya tampung RS	Jumlah daya tampung rumah		4222	2,21	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Ket.
				terhadap Jumlah Penduduk	sakit rujukan di kota					
					Jumlah Penduduk kota		1.912.679			
		6	1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	***** %	34	100	Dinas Kesehatan	
					Jumlah RS kota		34			
		7	1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	***** %	40925	100	Dinas Kesehatan	
					Jumlah ibu hamil di kota		40925			
		8	1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	***** %	39588	100	Dinas Kesehatan	
					Jumlah ibu bersalin di kota		39588			
		9	1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	***** %	39588	100	Dinas Kesehatan	
					Jumlah bayi baru lahir di kota		39588			
		10	1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	***** %	90040	100	Dinas Kesehatan	
					Jumlah balita di kota		90040			
		11	1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	***** %	231986	100	Dinas Kesehatan	
					Jumlah anak usia pendidikan dasar di kota		231986			
		12	1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	***** %	660890	100	Dinas Kesehatan	
					Jumlah orang usia 15-59 tahun di kota		660890			
		13	1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	***** %	62656	100	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Ket.
				kesehatan sesuai standar						
					Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kota		62656			
		14	1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	***** %	166750	100	Dinas Kesehatan	
					Jumlah penderita hipertensi di kota		166750			
		15	1.b.11	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	***** %	93500	100	Dinas Kesehatan	
					Jumlah penderita DM di kota		93500			
		16	1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	***** %	902	100	Dinas Kesehatan	
					Jumlah penderita ODGJ di kota		902			
		17	1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	***** %	17895	100	Dinas Kesehatan	
					Jumlah penderita TBC di kota		17895			
		18	1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	***** %	32360	100	Dinas Kesehatan	
					Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kota		32360			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kota (ha)	***** %	237,83	55,39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Luas kawasan permukiman rawan		429,38			

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Ket.
					banjir di WS Kewenangan kota (ha)					
		20	1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kota (ha)	'''''''''' %	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kota (ha)		1			
		21	1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting	'''''''''' %	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Luas daerah irigasi kewenangan kota		1			
		22	1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota.	'''''''''' %	617.639	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
					Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota tersebut.		617.639			
		23	1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	'''''''''' %	616.469	99.81	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
					Jumlah rumah di kota		617.639			
		24	1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai	'''''''''' %	1.593	100	DPMPTSP	

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Ket.	
					peruntukannya						
					Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku		1.593				
		25	1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	'''''''''' %	252.845	99,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
					Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota		255.318				
		26	1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	'''''''''' %	156	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		
					Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kota		156				
		27	1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	'''''''''' %	757	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		
					Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		757				
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	28	1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	'''''''''' %	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		
					Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n		1				
		29	1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	'''''''''' %	29	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		
					Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan		29				
		30	1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang	'''''''''' %	28,50	100	Dinas Perumahan,		

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Ket.
				dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	ditangani (ha)				Permukiman dan Pertanahan	
					Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha		28,50			
		31	1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	'''''''''' %	66	0,015	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
					Jumlah total unit rumah kota		428.463			
		32	1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	'''''''''' %	105.746	67,48	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
					Jumlah unit rumah kab/kota		156.713			
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33	1.e.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	'''''''''' %	617	100	Satpol PP	
					Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk		617			
		34	1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	'''''''''' %	9	100	Satpol PP	
					Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		9			
		35	1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	'''''''''' %	877.930	100	BPBD	
					Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan		877.930			
		36	1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	'''''''''' %	838.837	100	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Ket.
					Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		838.837			
		37	1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	'''''''''' %	3.543	100	BPBD	
					Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana		3.543			
		38	1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	%	302	97,42	BPBD	
					Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota		310			
		39	1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	Menit	12,37	12,37	BPBD	
6	Sosial	40	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	'''''''''' %	2.472	99,96	Dinas Sosial	
					Populasi penyandang disabilitas terlantar,		2.473			

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Ket.
					anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis					
		41	1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	,,,,,,,,, %	1.403	100	Dinas Sosial	
					Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota		1.403			
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar										
7	Tenaga Kerja	42	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	,,,,,,,,, %	13	100	Dinas Ketenagakerjaan	
					Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kab/Kota		13			
		43	2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	,,,,,,,,, %	30.521	9,684	Dinas Ketenagakerjaan	
					Jumlah tenaga kerja keseluruhan		315.169			
		44	2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)		119.060.332.190.000	13.578.279.852,52	Dinas Ketenagakerjaan	
					Jumlah tenaga kerja		876.844			
		45	2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	,,,,,,,,, %	15.702	82,235	Dinas Ketenagakerjaan	
			Jumlah Perusahaan		19.094					
		46	2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kab/Kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	,,,,,,,,, %	13.135	100,000	Dinas Ketenagakerjaan	

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Ket.
					Jumlah pencaker yang terdaftar		13.135			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD	'''''''''' %	2.217.062.395.884	44,130	DP3AP2KB	
					Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD		5.023.890.268.155			
		48	2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kota yang didampingi	'''''''''' %	152	100	DP3AP2KB	
					Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)		152			
		49	2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Per 100.000	103	10,827	DP3AP2KB	
					Jumlah penduduk perempuan		951.325			
9	Pangan	50	2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	%	605.462	84,30	Dinas Ketahanan Pangan	
					Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan		718.200			
10	Pertanahan	51	2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	'''''''''' %	7.290.225,64	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)		7.290.225,64			
		52	2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk Pembangunan Fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	'''''''''' %	1.676	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
					Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		1.676			

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Ket.
		53	2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	,,,,,,,,,%	6.292.323	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan		6.292.323			
		54	2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	,,,,,,,,,%	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
					Jumlah penerima tanah obyek landreform		1			
		55	2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	,,,,,,,,,%	1676	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
					Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan		1676			
		56	2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	,,,,,,,,,%	3	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
					Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan		3			
11	Lingkungan Hidup	57	2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	46,92	46,92	Dinas Lingkungan Hidup	
					Indeks Kualitas Air (IKA)	Point	18,30			
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	Point	23,68			
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Point	4,94			
		58	2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani	,,,,,,,,,%	514.330	99,97	Dinas Lingkungan Hidup	
			Jumlah seluruh Total vol timbunan		514.478					

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Ket.
					sampah tahun berjalan kabupaten/kota					
		59	2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kota	'''''''''' %	28	4,35	Dinas Lingkungan Hidup	
					Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan		644			
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60	2.k.1.1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	'''''''''' %	1.374.979	99,84	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Jumlah penduduk 17 tahun ke atas		1.377.183			
		61	2.k.1.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	'''''''''' %	361.240	69,160	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Jumlah anak usia 0-17 tahun		522.327			
		62	2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	'''''''''' %	534.938	97,079	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Jumlah anak usia 0-18 tahun		551.036			
		63	2.k.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	'''''''''' %	22	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Jumlah PD		22					
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	64	2.1.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun		0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)		1			
		65	2.1.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per		0	0	Badan Perencanaan Pembangunan	

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Ket.
					tahun				Daerah	
					Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)		1			
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)			1,13	1,13	DP3AP2KB	
		67	2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern	'''''''''' %	229.909	81,503	DP3AP2KB	
					Jumlah Pasangan Usia Subur		282.088			
		68	2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi	'''''''''' %	38.885	13,785	DP3AP2KB	
					Jumlah Pasangan Usia Subur		282.088			
15	Perhubungan	69	2.n.1	Rasio konektivitas Kota	Rasio konektivitas Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)		1	1	Dinas Perhubungan	
		70	2.n.2	Kinerja lalu lintas Kota	V/C ratio di jalan Kota	Rasio	0,61	0,61	Dinas Perhubungan	
16	Komunikasi dan Informatika	71	2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	'''''''''' %	40	100	Dinas Kominfo	
					Jumlah PD		40			
		72	2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	'''''''''' %	49	100	Dinas Kominfo	
					Jumlah Layanan Publik		49			
		73	2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	'''''''''' %	1.347.101	100	Dinas Kominfo	
				Jumlah penduduk		1.347.101				

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Ket.
17	Koperasi dan UKM	74	2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	%	135	47,203	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah seluruh koperasi aktif		286			
		75	2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	8.367	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah usaha Mikro keseluruhan		8.367			
18	Penanaman Modal	76	2.q	Persentase peningkatan investasi di kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota	,,,,,,,,, %	1.942.387.268.590	14,883	DPMPSTP	
					Jumlah investasi tahun n di kabupaten/kota	Trilyun	14.993.196.941.150			
					Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	Trilyun	13.050.809.672.560			
19	Kepemudaan dan Olahraga	77	2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kota	,,,,,,,,, %	68.220	15,54	Dinas Pemuda dan Olahraga	
					Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kota		438.923			
		78	2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kota	,,,,,,,,, %	74.428	16,96	Dinas Pemuda dan Olahraga	
					Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kota		438.923			
		79	2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	70	70	Dinas Pemuda dan Olahraga	
20	Statistik	80	2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	,,,,,,,,, %	40	100	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Ket.
					Jumlah PD		40			
		81	2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	'''''''''' %	40	100	Dinas Kominfo	
					Jumlah PD		40			
21	Persandian	82	2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi		590	91,473	Dinas Kominfo	
					Jumlah area penilaian		645			
22	Kebudayaan	83	2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	'''''''''',%	27	100	Bidang Kebudayaan	
					Jumlah cagar budaya yang terdata		27			
23	Perpustakaan	84	2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat		66,14	66,14	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		85	2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)		74,11	74,11	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
24	Kearsipan	86	2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl40 dan 59 U 43/2009)	$T = (a + i + s + j) / 4$		100	100	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		87	2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$		100	100	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Ket.
Urusan Pilihan										
25	Kelautan dan Perikanan	88	3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	365.469	184,014	Dinas Ketahanan Pangan	
					Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan		198.609			
26	Pariwisata	89	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	,,,,,,,,,%	-16.256	-5,982	Bidang Pariwisata	
					Jumlah wisatawan tahun n		255.500			
					Jumlah wisatawan tahun n-1		271.756			
		90	3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	,,,,,,,,,%	10.938.348	454,103	Bidang Pariwisata	
					Jumlah wisatawan tahun n		13.347.130			
					Jumlah wisatawan tahun n-1		2.408.782			
		91	3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	,,,,,,,,,%	1.173.714	50,347	Bidang Pariwisata	
					Jumlah kamar yang tersedia		2.331.255			
		92	3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	,,,,,,,,,%	2.619	1,268	Bidang Pariwisata	
					Total PDRB Berlaku		206.597			
27	Pertanian	94	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (ton)	Ton/Ha	1174	667,05	Dinas Ketahanan Pangan	
					Luas Panen (ha)		176			
		95	3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan	%	-96	-44,65	Dinas Ketahanan Pangan	

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Ket.	
				menular	menular tahun sebelumnya (t-1)						
					Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun berjalan (t)		119				
					Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)		215				
28	Kehutanan	96	3.d	Kehutanan			-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
29	ESDM	97	3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	,,,,,,,,,%	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
					Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi		1				
30	Perdagangan	98	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	,,,,,,,,,%	609	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		
					Jumlah pelaku usaha di wilayah kota		609				
		99	3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	%	0	0	Dinas Ketahanan Pangan		
					RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)			1			
		100	3.f.3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	%	18.500	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		
					Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kota			18.500			
31	Perindustrian	101	3.g.1	Pertambahan jumlah industri Kecil dan	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah	,,,,,,,,,%	1.473	33,251	Dinas Perindustrian,		

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Ket.
				Menengah di kota	industri kecil dan menengah tahun n-1)				Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah industri kecil dan menengah tahun n		5.903			
					Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1		4.430			
		102	3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota)	Indikator Pembangunan Industri dalam RPIK	%,	0	136,98	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN		0			
		103	3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	%,	19	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah izin yang dikeluarkan		19			
		104	3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	%,	0	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
					Jumlah izin yang dikeluarkan		1			
		105	3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	%,	0	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan,	

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Ket.
				jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kota					Koperasi dan UKM	
					Jumlah izin yang dikeluarkan		1			
		106	3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	7 Informasi industri secara lengkap dan terkini	%	90	90	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
32	Transmigrasi	107	3.h	Transmigrasi			-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

2.2.3 Indikator Kinerja Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										
33	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	1	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	,,,,,,,,,,%	998.633.571.873	21,223	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
					Jumlah APBD		4.705.483.322.900			
		2	4.a.2	Rasio PAD	Jumlah PAD	,,,,,,,,,,%	2.271.392.858.607	48,418	Badan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Pendapatan pada APBD		4.691.252.495.432			
		3	4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3	3	Inspektorat	
		4	4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3	3	Inspektorat	
		5	4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	,,,,,,,,,,%	3.693.088.934.323	78,485	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
					Jumlah belanja APBD		4.705.483.322.900			
		6	4.a.6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	WTP	WTP	10	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
						WDP	WDP	-		
				TW	TW	-				
				TMP	TMP	-				
34	FUNGSI	7	4.b.1	Persentase	Jumlah kontrak	,,,,,,,,,,%	0	0	Sekretariat Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)			jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n					
					Jumlah kontrak keseluruhan tahun n		1.210			
		8	4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	,,,,,,,,,,%	6.316	45,70	Sekretariat Daerah	
					Jumlah seluruh pengadaan		13.821			
		9	4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan	,,,,,,,,,,%	2.977.101.640.890	63,28	Sekretariat Daerah	
					Total belanja operasi dan modal		4.704.872.639.700			
		10	4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	,,,,,,,,,,%	1.362.797.805.044	108,44	Sekretariat Daerah	
					Jumlah Nilai PBJ yang		1.256.777.796.509			

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										
35	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	11	4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	%	2.430	84,287	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
					Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas					
					Jumlah seluruh pegawai		2.883			
		12	4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	%	597	20,708	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
					Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		2.883			
		13	4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	%	266	44,56	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)					597					
36	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	14	4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja	,,,,,,,,, %	4.705.483.322.900	7,7611	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
					Total Belanja APBD		5.101.407.422.199			
		15	4.d.2	Revenue mobilization:	Total PAD dalam realisasi	,,,,,,,,, %	2.271.392.858.607	1,0413	Badan Pendapatan Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										
				Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD						
		16	4.d.3	Assets management	Total PAD dalam APBD	Jumlah	2.295.294.341.258			
					Jumlah Asset Manajemen	Jumlah	4	4	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
					Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		ada	-		
					Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		ada	-		
					Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		ada	-		
					Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		ada	-		
		17	4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA	,,,,,,,,,,%	488.362.728.165	11,012	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
					Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (realisasi)		4.434.781.481.835			
37	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	18	4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	,,,,,,,,,,%	2.181.470.275.254	94,551	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
					Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda		2.307.192.769.830			

No	Urusan Pemerintahan	No IKK	Kode IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Satuan	Elemen Data 2023	Capaian Kinerja 2023	Sumber Data	Keterangan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										
		19	4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	,,,,,,,,,,%	12	100	Dinas Kominfo	
					Total jumlah dokumen yang telah dirinci		12			

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kota Tangerang selaku pengemban amanah masyarakat Kota Tangerang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tangerang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Tangerang Tahun 2019-2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2023, Rencana Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Tangerang Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2023.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Prosentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

2.3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Metodologi dalam pengukuran kinerja mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *core area* Kota Tangerang sebagai kota industri serta pusat pelayanan jasa terpadu di bidang perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam pengukuran capaian kinerja sasaran bisa jadi ditemui kinerja sasaran tidak tercapai secara maksimal. Dalam pengukuran sasaran, bagi kepentingan manajemen dilakukan penghitungan rata-rata atas setiap capaian indikator sasaran.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tingkat Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tingkat Pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan pengukuran kinerjanya, maka untuk menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini, ditetapkan suatu skala pengukuran ordinal pencapaian kinerja berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1. 91% ≤ 100% atau lebih	: Sangat Tinggi
2. 76% ≤ 90,99%	: Tinggi
3. 66% ≤ 75,99%	: Sedang
4. 51% ≤ 65,99%	: Rendah
5. ≤ 50,99%	: Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- **Indikator Kinerja**
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), dan hasil (*outcomes*).
- **Indikator Sasaran**
Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

2.3.2 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Adapun target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terkait Misi 1 yaitu : Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berintegritas, terdapat 14 Indikator Kinerja Utama yaitu sebagai berikut :

No.	Indikator	Satuan Indikator	Target
1.1	Tujuan: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
1	Indeks pendidikan (Indeks pengetahuan)	Point	75,14 - 76,74
2	Indeks kesehatan (Indeks harapan hidup)	Point	79,66 - 79,69
1.1.1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat		

No.	Indikator	Satuan Indikator	Target
3	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,72
4	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	99,00
1.1.2 Sasaran: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			
5	Angka kematian bayi (AKB)	Orang per 1.000 kelahiran hidup	1,07
6	Angka kematian ibu (AKI)	Orang per 100.000 kelahiran hidup	12,13
7	Angka kesakitan	Orang per 100.000 penduduk	182,00
1.2 Tujuan : Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat			
8	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	%	4,01 - 4,39
1.2.1 Sasaran: Menurunnya Kemiskinan Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			
9	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Orang	95.403
1.2.2 Sasaran: Meningkatnya Kesempatan Kerja			
10	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	6,45 - 7,54
1.3 Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
11	Indeks reformasi birokrasi	Point	70,00
1.3.1 Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik			
12	Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah	A, BB, B, CC, C, D	BB
13	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP
14	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	Point	85,83

2. Terkait Misi 2 yaitu : Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kota Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan, terdapat 9 Indikator Kinerja Utama yaitu sebagai berikut :

No.	Indikator	Satuan Indikator	Target
2.1 Tujuan: Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan			
15	Indeks Sarana Prasarana Perkotaan	Point	86,31
2.1.1 Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Perkotaan			
16	Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%	94,26
17	Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan	Km/jam	25
2.1.2 Sasaran: Meningkatnya Kualitas Permukiman			
18	Persentase permukiman kumuh	%	0,08
19	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100,00
20	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,81
2.1.3 Sasaran: Meningkatnya Kualitas Drainase dan Sumber Daya Air			
21	Luas banjir dan genangan	Ha	195,88
2.1.4 Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
22	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Point	57,93
23	Tingkat pengelolaan sampah	%	100,00

3. Terkait Misi 3 yaitu : Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Mandiri Dan Berkeadilan,terdapat 5 Indikator Kinerja Utama yaitu sebagai berikut :

No.	Indikator	Satuan Indikator	Target
3.1	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing		
24	Nilai PDRB	Rp. Triliyun	115,94 - 118,57
25	Indeks pengeluaran (daya beli)	Point	82,73 - 83,91
3.1.1	Sasaran: Meningkatnya Investasi Daerah		
26	Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Triliyun	9,67
3.1.2	Sasaran: Meningkatnya Perekonomian Masyarakat		
27	Laju inflasi	%	3,50
28	Indeks gini (gini rasio)	Point	0,305 - 0,316

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2023 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut di bawah ini.

Tabel II-14 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Tangerang Tahun 2023

Misi 1 : Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berintegritas

Indikator	Satuan Indikator	Tahun 2023			Predikat Capaian	
		Target	Realisasi	Persentase Capaian		
1	Indeks pendidikan (Indeks pengetahuan)	Point	75,14 - 76,74	74,95	99,75%	Tidak Tercapai
2	Indeks kesehatan (Indeks harapan hidup)	Point	79,66 - 79,69	85,08	106,80%	Tercapai (Melebihi Target)
3	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,72	98,09	100,38%	Tercapai (Melebihi Target)
4	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	99,00	99,37	100,37%	Tercapai (Melebihi Target)
5	Angka kematian bayi (AKB)	Orang per 1.000 kelahiran hidup	1,07	1,08	99,07%	Tidak Tercapai
6	Angka kematian ibu (AKI)	Orang per 100.000 kelahiran hidup	12,13	20,07	34,54%	Tidak Tercapai
7	Angka kesakitan	Orang per	182	182	100,00%	Tercapai

Indikator	Satuan Indikator	Tahun 2023			Predikat Capaian	
		Target	Realisasi	Persentase Capaian		
	100.000 penduduk				(Sesuai Target)	
8	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	%	4,01 - 4,39	5,89	65,83%	Tidak Tercapai
9	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Orang	95.403	95.395	100,01%	Tercapai (Melebihi Target)
10	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	6,45 - 7,54	6,76	110,34%	Tercapai (Melebihi Target)
11	Indeks reformasi birokrasi	Point	70,00	82,71	118,16%	Tercapai (Melebihi Target)
12	Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah	A, BB, B, CC, C, D	BB	B	96,59%	Tidak Tercapai
13	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	100,00%	Tercapai (Sesuai Target)
14	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	Point	85,83	87,44	101,88%	Tercapai (Melebihi Target)

Misi 2 : Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kota Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan

Indikator	Satuan Indikator	Tahun 2023			Predikat Capaian	
		Target	Realisasi	Persentase Capaian		
15	Indeks pembangunan sarana prasarana perkotaan	Point	86,31	85,69	99,28%	Tidak Tercapai
16	Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%	25	25,02	100,08%	Tercapai (Melebihi Target)
17	Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan	Km/jam	94,26	99,52	105,58%	Tercapai (Melebihi Target)
18	Persentase permukiman kumuh	%	0,08	0,00	200,00%	Tercapai (Melebihi Target)
19	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100,00	100,00	100,00%	Tercapai (Sesuai Target)
20	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,81	99,81	100,00%	Tercapai (Sesuai Target)
21	Luas banjir dan genangan	Ha	195,88	191,55	102,21%	Tercapai (Melebihi Target)
22	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Point	57,93	46,92	80,99%	Tidak Tercapai
23	Tingkat pengelolaan sampah	%	100,00	99,97	99,97%	Tidak Tercapai

Misi 3 : Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Mandiri Dan Berkeadilan

Indikator	Satuan Indikator	Tahun 2023			Predikat Capaian	
		Target	Realisasi	Persentase Capaian		
24	Nilai PDRB ADHK	Rp. Triliyun	115,94 - 118,57	119,06	102,69%	Tercapai (Melebihi Target)
25	Indeks pengeluaran (daya beli)	Point	82,73 - 83,91	83,21	100,58%	Tercapai (Melebihi Target)
26	Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Triliyun	9,67	14,99	155,01%	Tercapai (Melebihi Target)
27	Laju inflasi	%	3,50	3,17	109,43%	Tercapai (Melebihi Target)
28	Indeks gini (gini rasio)	Point	0,305 - 0,316	0,379	80,06%	Tidak Tercapai

Sumber: BPS Kota Tangerang; Bappeda Kota Tangerang, Hasil Analisis Tahun 2024

Keterangan: * Realisasi Indeks Harapan Hidup menggunakan angka hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)

Capaian indikator kinerja utama Kota Tangerang Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Terdapat 15 (lima belas) dari 28 (dua puluh delapan) atau 53,57% indikator yang mencapai dan melebihi targetnya.
- Terdapat 4 (empat) dari 28 (dua puluh delapan) atau 14,29% indikator yang mencapai dan sesuai targetnya.
- Terdapat 9 (sembilan) dari 28 (dua puluh delapan) atau 32,14% indikator yang tidak mencapai targetnya.
- Rata-rata capaian indikator yaitu **102,49%** sehingga berdasarkan kategori kriteria penilaian realisasi kinerja maka tingkat pencapaian kinerja indikator tergolong pada kategori **Sangat Tinggi**. Kategori ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut didukung pula dengan program prioritas daerah di Kota Tangerang yang telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kota Tangerang 2019-2023.

2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

A. Pengukuran Kinerja Tujuan

Tabel II-15 Laju Pertumbuhan Tujuan 1 Tahun 2023

Tujuan: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

	Indikator	Satuan Indikator	Realisasi		Perbandingan 2023/2022	
			2022	2023	LP (%)	+/-
1	Indeks pendidikan (Indeks pengetahuan)	Point	74,69	74,95	0,35	0,26
2	Indeks kesehatan (Indeks harapan hidup)	Point	84,65	85,08	0,51	0,43

Capaian kinerja Tujuan 1 Tahun 2023 dibanding Tahun 2022, melalui 2 indikator kinerja, rata-rata meningkat pertumbuhannya sebesar 0,43%. Realisasi indikator Indeks Pendidikan pada Tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,26 point atau tumbuh sebesar 0,35%. Begitu pula realisasi indikator Indeks Kesehatan pada Tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,43 point atau tumbuh sebesar 0,51%.

Tabel II-16 Laju Pertumbuhan Tujuan 2 Tahun 2023

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat

	Indikator	Satuan Indikator	Realisasi		Perbandingan 2023/2022	
			2022	2023	LP (%)	+/-
1	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	%	5,77	5,89	2,08	0,12

Capaian kinerja Tujuan 2 Tahun 2023 dibanding Tahun 2022, melalui 1 indikator kinerja mengalami pertumbuhan sebesar 2,08%. Realisasi indikator Tingkat kemiskinan pada Tahun 2023 bertambah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,12% atau tumbuh sebesar 2,08%. Kondisi tersebut menggambarkan kinerja yang kurang baik, dimana pada Tahun 2023 tingkat kemiskinan tidak dapat ditekan atau diturunkan dari tahun sebelumnya.

Tabel II-17 Laju Pertumbuhan Tujuan 3 Tahun 2023

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

	Indikator	Satuan Indikator	Realisasi		Perbandingan 2023/2022	
			2022	2023	LP (%)	+/-
1	Indeks reformasi birokrasi	Point	67,14	82,71	23,19	15,57

Capaian kinerja Tujuan 3 Tahun 2023 dibanding Tahun 2022, melalui 1 indikator kinerja mengalami pertumbuhan sebesar 23,19%. Realisasi indikator Indeks reformasi birokrasi pada Tahun 2023 meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar 15,57 point atau tumbuh sebesar 23,19%.

Tabel II-18 Laju Pertumbuhan Tujuan 4 Tahun 2023

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan

Indikator	Satuan Indikator	Realisasi		Perbandingan 2023/2022	
		2022	2023	LP (%)	+/-
1 Indeks pembangunan sarana prasarana perkotaan	Point	86,10	85,69	-0,48	-0,41

Capaian kinerja Tujuan 4 Tahun 2023 dibanding Tahun 2022, melalui 1 indikator kinerja mengalami pertumbuhan sebesar -0,48%. Realisasi indikator Indeks pembangunan sarana prasarana perkotaan pada Tahun 2023 menurun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar -0,41 point atau tumbuh sebesar -0,48%.

Tabel II-19 Laju Pertumbuhan Tujuan 5 Tahun 2023

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing

Indikator	Satuan Indikator	Realisasi		Perbandingan 2023/2022	
		2022	2023	LP (%)	+/-
1 Nilai PDRB ADHK	Rp. Trilyun	112,78	119,06	5,57	6,28
2 Indeks pengeluaran (daya beli)	Point	82,34	83,21	1,06	0,87

Capaian kinerja Tujuan 5 Tahun 2023 dibanding Tahun 2022, melalui 2 indikator kinerja, rata-rata meningkat pertumbuhannya sebesar 3,31%. Realisasi indikator Nilai PDRB ADHK pada Tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp6,28 Trilyun atau tumbuh sebesar 5,57%. Begitu pula realisasi indikator Indeks pengeluaran pada Tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,87 point atau tumbuh sebesar 1,06%.

B. Pengukuran Kinerja Sasaran**Tabel II-20 Laju Pertumbuhan Sasaran 1 Tahun 2023**

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Indikator	Satuan Indikator	Realisasi		Perbandingan 2023/2022	
		2022	2023	LP (%)	+/-
1 Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,93	98,09	0,16	0,16
2 Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	99,1	99,37	0,27	0,27

Capaian kinerja Sasaran 1 Tahun 2023 dibanding Tahun 2022, melalui 2 indikator kinerja, rata-rata meningkat pertumbuhannya sebesar 0,22%. Realisasi indikator Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A pada Tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,16% atau tumbuh sebesar 0,16%. Begitu pula realisasi indikator Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B pada Tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,27% atau tumbuh sebesar 0,27%.

Tabel II-21 Laju Pertumbuhan Sasaran 2 Tahun 2023

Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator	Satuan Indikator	Realisasi		Perbandingan 2023/2022	
		2022	2023	LP (%)	+/-
1 Angka kematian bayi (AKB)	Orang per 1.000 kelahiran hidup	1,09	1,08	-0,92	-0,01
2 Angka kematian ibu (AKI)	Orang per 100.000 kelahiran hidup	12,67	20,07	58,41	7,40
3 Angka kesakitan	Orang per 100.000 penduduk	183,94	182,34	-0,87	-1,60

Capaian kinerja Sasaran 2 Tahun 2023 dibanding Tahun 2022, melalui 3 indikator kinerja, rata-rata meningkat pertumbuhannya sebesar 18,87%. Realisasi indikator Angka kematian bayi (AKB) pada Tahun 2023 menurun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar -0,01 orang per 1.000 kelahiran hidup atau turun sebesar -0,92%. Begitu pula realisasi indikator Angka kesakitan pada Tahun 2023 menurun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar -1,60 orang per 100.000 penduduk atau turun sebesar -0,87%. Realisasi kinerja kedua indikator tersebut pada

Tahun 2023 menunjukkan capaian yang baik dibanding tahun sebelumnya. Adapun indikator Angka kematian ibu (AKI) pada Tahun 2023 realisasinya justru meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,04 orang per 100.000 kelahiran hidup atau tumbuh sebesar 58,41%. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka kematian ibu pada Tahun 2023 lebih buruk dibanding tahun sebelumnya.

Tabel II-22 Laju Pertumbuhan Sasaran 3 Tahun 2023

Sasaran 3: Menurunnya Kemiskinan Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator	Satuan Indikator	Realisasi		Perbandingan 2023/2022	
		2022	2023	LP (%)	+/-
1 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Orang	100.551	95.395	-5,13	-5.156

Capaian kinerja Sasaran 3 Tahun 2023 dibanding Tahun 2022, melalui 1 indikator kinerja mengalami pertumbuhan sebesar -5,13%. Realisasi indikator Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada Tahun 2023 menurun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar -5.156 orang atau tumbuh sebesar -5,13%. Kondisi tersebut menggambarkan kinerja yang sangat baik, dimana pada Tahun 2023 jumlah PMKS dapat ditekan dan diturunkan dari tahun sebelumnya.

Tabel II-23 Laju Pertumbuhan Sasaran 4 Tahun 2023

Sasaran 4: Meningkatnya Kesempatan Kerja

Indikator	Satuan Indikator	Realisasi		Perbandingan 2023/2022	
		2022	2023	LP (%)	+/-
1 Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	7,16	6,76	-5,59	-0,4

Capaian kinerja Sasaran 4 Tahun 2023 dibanding Tahun 2022, melalui 1 indikator kinerja mengalami pertumbuhan sebesar -5,59%. Realisasi indikator Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2023 menurun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar -0,40% atau tumbuh sebesar -5,59%. Kondisi tersebut menggambarkan kinerja yang sangat baik, dimana pada Tahun 2023 tingkat pengangguran dapat ditekan dan diturunkan dari tahun sebelumnya.

Tabel II-24 Laju Pertumbuhan Sasaran 5 Tahun 2023

Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik.

Indikator	Satuan Indikator	Realisasi		Perbandingan 2023/2022		
		2022	2023	LP (%)	+/-	
1	Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah	A, BB, B, CC, C, D	B	B	-	-
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP/WDP/TMP	WTP	WTP	-	-
3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	Point	85,35	87,44	2,45	2,09

Capaian kinerja Sasaran 5 Tahun 2023 dibanding Tahun 2022, melalui 3 indikator kinerja, rata-rata meningkat pertumbuhannya sebesar 2,45%. Realisasi indikator Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah pada Tahun 2023 sama jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu kategori B. Begitu pula realisasi indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun 2023 sama dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu predikat WTP. Adapun realisasi indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik pada Tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,09 point atau tumbuh sebesar 2,45%.

Tabel II-25 Laju Pertumbuhan Sasaran 6 Tahun 2023

Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Perkotaan

Indikator	Satuan Indikator	Realisasi		Perbandingan 2023/2022		
		2022	2023	LP (%)	+/-	
1	Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%	95,95	99,52	3,72	3,57
2	Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan	Km/jam	24,33	25,02	2,84	0,69

Capaian kinerja Sasaran 6 Tahun 2023 dibanding Tahun 2022, melalui 2 indikator kinerja, rata-rata meningkat pertumbuhannya sebesar 3,28%. Realisasi indikator Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai pada Tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,57% atau tumbuh sebesar 3,72%. Adapun realisasi indikator Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan pada Tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,69 km/jam atau tumbuh sebesar 2,84%.

Tabel II-26 Laju Pertumbuhan Sasaran 7 Tahun 2023

Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas Permukiman

Indikator		Satuan Indikator	Realisasi		Perbandingan 2023/2022	
			2022	2023	LP (%)	+/-
1	Persentase permukiman kumuh	%	0,01	0,00	-100	-0,007
2	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100,00	100,00	0	0
3	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,80	99,81	0,01	0,01

Capaian kinerja Sasaran 7 Tahun 2023 dibanding Tahun 2022, melalui 3 indikator kinerja, rata-rata menurun pertumbuhannya sebesar -33,31%. Realisasi indikator Persentase permukiman kumuh pada Tahun 2023 menurun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar -0,007% atau tumbuh sebesar -100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa proporsi luasan permukiman kumuh di Kota Tangerang pada Tahun 2023 dapat diturunkan dari tahun sebelumnya sesuai target yang ditetapkan. Adapun realisasi indikator Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada Tahun 2023 realisasinya sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi indikator Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada Tahun 2023 sedikit meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,01% atau tumbuh sebesar 0,01%.

Tabel II-27 Laju Pertumbuhan Sasaran 8 Tahun 2023

Sasaran 8: Meningkatnya Kualitas Drainase dan Sumber Daya Air

Indikator		Satuan Indikator	Realisasi		Perbandingan 2023/2022	
			2022	2023	LP (%)	+/-
1	Luas banjir dan genangan	Ha	217,79	191,55	-12,05	-26,24

Capaian kinerja Sasaran 8 Tahun 2023 dibanding Tahun 2022, melalui 1 indikator kinerja mengalami pertumbuhan sebesar -12,05%. Realisasi indikator Luas banjir dan genangan pada Tahun 2023 menurun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar -26,24 Ha atau turun sebesar -12,05%. Kondisi tersebut menggambarkan kinerja yang sangat baik, dimana pada Tahun 2023 luasan daerah terkena banjir dan genangan dapat ditekan dan diturunkan dari tahun sebelumnya.

Tabel II-28 Laju Pertumbuhan Sasaran 9 Tahun 2023

Sasaran 9: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator		Satuan Indikator	Realisasi		Perbandingan 2023/2022	
			2022	2023	LP (%)	+/-
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Point	63,8	46,92	-26,46	-16,88
2	Tingkat pengelolaan sampah	%	100	99,97	-0,03	-0,03

Capaian kinerja Sasaran 9 Tahun 2023 dibanding Tahun 2022, melalui 2 indikator kinerja, rata-rata meningkat pertumbuhannya sebesar -13,24%. Realisasi indikator Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) pada Tahun 2023 menurun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar -16,88 point atau tumbuh sebesar -26,46%. Demikian pula realisasi indikator Tingkat pengelolaan sampah pada Tahun 2023 capaiannya menurun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yakni sebesar -0,03%.

Tabel II-29 Laju Pertumbuhan Sasaran 10 Tahun 2023

Sasaran 10: Meningkatnya Investasi Daerah

Indikator		Satuan Indikator	Realisasi		Perbandingan 2023/2022	
			2022	2023	LP (%)	+/-
1	Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Trilyun	13,05	14,99	14,87	1,94

Capaian kinerja Sasaran 10 Tahun 2023 dibanding Tahun 2022, melalui 1 indikator kinerja mengalami peningkatan sebesar 14,87%. Realisasi indikator Nilai investasi (PMA dan PMDN) pada Tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp1,94 Trilyun atau meningkat sebesar 14,87%.

Tabel II-30 Laju Pertumbuhan Sasaran 11 Tahun 2023

Sasaran 11: Meningkatnya Perekonomian Masyarakat

Indikator		Satuan Indikator	Realisasi		Perbandingan 2023/2022	
			2022	2023	LP (%)	+/-
1	Laju inflasi	%	4,56	3,17	-30,48	-1,39
2	Indeks gini (gini rasio)	Point	0,383	0,379	10,5	0,036

Capaian kinerja Sasaran 11 Tahun 2023 dibanding Tahun 2022, melalui 2 indikator kinerja, rata-rata meningkat pertumbuhannya sebesar -9,99%. Realisasi indikator Laju inflasi pada Tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar -1,39% atau tumbuh

sebesar -30,48%. Adapun realisasi indikator Indeks gini (gini rasio) pada Tahun 2023 capaiannya meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,036 point atau meningkat sebesar 10,50%. Realisasi indikator gini rasio tersebut pada Tahun 2023 menunjukkan capaian yang kurang baik, karena mengalami penurunan yang menggambarkan semakin lebarnya gap atau kesenjangan ekonomi.

2.3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen untuk menjaga konsistensi muatan RPJMD Perubahan Kota Tangerang Tahun 2019-2023, target indikator kinerja tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2023 dan kemudian ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Dalam uraian ini, Pemerintah Kota Tangerang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target program kegiatan dari masing-masing indikator kinerja program kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran serta penilaian tingkat pencapaian target tujuan dari masing-masing indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Perubahan 2019-2023 maupun RKPD Perubahan Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kota Tangerang Tahun 2023, RPJMD Perubahan Tahun 2019-2023 dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang, dimana telah ditetapkan 5 (lima) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II-31 Ketercapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Terhadap Target Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Persentase Capaian	Keterangan
Misi 1 : Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berintegritas				
1.1	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	2	103,28%	1 Indikator Tidak Mencapai Target dan 1 Indikator Tercapai (Melebihi Target)
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	2	100,38%	2 Indikator Mencapai Target (Melebihi Target)
1.1.2	Meningkatnya Derajat	3	77,87%	2 Indikator Tidak

No.	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Persentase Capaian	Keterangan
	Kesehatan Masyarakat			Mencapai Target dan 1 Indikator Tercapai (Sesuai Target)
1.2	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1	65,83%	Tidak Mencapai Target
1.2.1	Menurunnya Kemiskinan Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	100,01%	Mencapai Target (Melebihi Target)
1.2.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1	110,34%	Mencapai Target (Melebihi Target)
1.3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	118,16%	Mencapai Target (Melebihi Target)
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik	3	99,49%	1 Indikator Tidak Mencapai Target, 1 Indikator Mencapai Target (Melebihi Target), 1 Indikator Sesuai Target
Misi 2 : Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kota Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan				
2.1	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan	1	99,28%	Mencapai Target (Melebihi Target)
2.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Perkotaan	2	102,83%	2 Indikator Mencapai Target (Melebihi Target)
2.1.2	Meningkatnya Kualitas Permukiman	3	133,33%	1 Indikator Mencapai Target (Melebihi Target) dan 2 Indikator Sesuai Target
2.1.3	Meningkatnya Kualitas Drainase Dan Sumber Daya Air	1	102,21%	Mencapai Target (Melebihi Target)
2.1.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	90,48%	2 Indikator Tidak Mencapai Target
Misi 3 : Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Mandiri Dan Berkeadilan				
3.1	Meningkatkan Kualitas Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing	2	101,64%	2 Indikator Mencapai Target (Melebihi Target)
3.1.1	Meningkatnya Investasi Daerah	1	155,01%	Mencapai target (Melebihi Target)
3.1.2	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	2	94,75%	1 Indikator Tidak Mencapai Target, 1 Indikator Mencapai Target (Melebihi Target)
	Rata-Rata Capaian Kinerja	28	102,49%	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan dan sasaran di atas dapat digambarkan pencapaian indikator kinerja Tujuan dan Sasaran strategis Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2023 menunjukkan hasil berikut:

- Terdapat 15 (lima belas) dari 28 (dua puluh delapan) atau 53,57% indikator yang mencapai dan melebihi targetnya.
- Terdapat 4 (empat) dari 28 (dua puluh delapan) atau 14,29% indikator yang mencapai dan sesuai targetnya.
- Terdapat 9 (sembilan) dari 28 (dua puluh delapan) atau 32,14% indikator yang tidak mencapai targetnya.
- Rata-rata capaian indikator yaitu **102,49%** sehingga berdasarkan kategori kriteria penilaian realisasi kinerja maka tingkat pencapaian kinerja indikator Tujuan dan Sasaran strategis Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2023 tergolong pada kategori **Sangat Tinggi**. Kategori ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

A. Pengukuran Kinerja Tujuan 1

Tabel II-32 Capaian Kinerja Tujuan 1 Tahun 2023

Tujuan: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Indikator	Satuan	2023			Predikat Capaian	Target Akhir RPJMD (2023)	Target Akhir - Realisasi 2023
		Target	Realisasi	% Capaian			
1 Indeks pendidikan (Indeks pengetahuan)	Point	75,14 - 76,74	74,95	99,75%	Tidak Tercapai	75,14 - 76,74	-0,19
2 Indeks kesehatan (Indeks harapan hidup)	Point	79,66 - 79,69	85,08	106,80%	Tercapai (Melebihi Target)	79,66 - 79,69	5,42
Rata-rata Capaian				103,28%			

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Tahun 2023 yang dinilai melalui 2 indikator kinerja adalah sebesar 103,28% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun realisasi indikator Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Indeks Pendidikan (Indeks Pengetahuan) Tahun 2023 mencapai 74,95 point dan mengalami peningkatan sebesar 0,26 point (laju pertumbuhan mencapai 0,35%) dari Tahun 2022 yang mencapai 74,69 point, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 99,75%. Realisasi Indeks Pendidikan (Indeks Pengetahuan) Tahun 2023 yang mencapai 74,95 point jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 75,14

point maka terdapat selisih -0,19 point. Sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi capaian indikator ini pada akhir periode RPJMD tidak tercapai sesuai yang ditargetkan.

- Indeks Kesehatan (Indeks Harapan Hidup) Tahun 2023 mencapai 85,08 point dan mengalami peningkatan sebesar 0,43 point (laju pertumbuhan mencapai 0,51%) dari Tahun 2022 yang mencapai 84,65 point, sehingga dengan capaian kinerjanya adalah sebesar 106,80%. Realisasi Indeks Kesehatan (Indeks Harapan Hidup) Tahun 2023 yang mencapai 85,08 point jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 79,66 point, maka terdapat selisih 5,42 point yang berarti bahwa target akhir RPJMD pada tahun 2023 dapat tercapai dengan baik.

A.1. Uraian Pencapaian Kinerja Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan (Indeks Pengetahuan) Tahun 2023 mencapai 74,95 point dan mengalami peningkatan sebesar 0,26 point (laju pertumbuhan mencapai 0,35%) dari Tahun 2022 yang mencapai 74,69 point. Realisasi Indeks Pendidikan (Indeks Pengetahuan) Tahun 2023 yang mencapai 74,95 point tersebut belum mencapai/sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 74,82 point, sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 99,75%. Kondisi ini didukung oleh pencapaian angka harapan lama sekolah (HLS) dan angka rata-rata lama sekolah (RLS).

Angka harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang program wajib belajar adalah pada usia 7 tahun ke atas) di masa mendatang. Selama kurun waktu Tahun 2019-2023, angka harapan lama sekolah Kota Tangerang menunjukkan peningkatan yaitu dari 13,84 tahun pada Tahun 2019 menjadi 13,89 tahun pada Tahun 2023. Artinya, pada Tahun 2023 setiap penduduk Kota Tangerang yang berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk bersekolah selama 13,89 tahun (setara dengan kuliah semester I-II).

Angka rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Dalam periode Tahun 2019-2023, angka rata-rata lama sekolah Kota Tangerang menunjukkan peningkatan yaitu dari 10,65 tahun pada Tahun 2019 menjadi 10,91 tahun pada Tahun 2023. Artinya bahwa pada Tahun 2023 penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kota Tangerang rata-rata telah menjalani pendidikan formal selama 10,91 tahun (setara dengan kelas I SLTA).

A.1.1. Upaya yang Telah Dilakukan

Untuk mengoptimalkan pencapaian Indeks Pendidikan, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan upaya yaitu meningkatkan akses pendidikan (angka harapan lama sekolah) dan kualitas pendidikan (angka rata-rata lama sekolah) di tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) sebagai berikut:

1. Memberikan akses bebas biaya pendidikan bagi warga Kota Tangerang yang tidak mampu melalui Program Pembiayaan Tangerang Cerdas SD yang diberikan kepada siswa tidak mampu jenjang SD/MI dengan besaran Biaya Personal Siswa Rp.80.000,-/siswa/bulan dan Program Pembiayaan Tangerang Cerdas SMP yang diberikan kepada siswa tidak mampu jenjang SMP/MTs dengan besaran Biaya Personal Siswa sebesar Rp.100.000,-/siswa/bulan serta beasiswa masuk sekolah besaran biaya personal siswa sebesar Rp.1.000.000,-/siswa.
2. Meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas sekolah.
3. Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan melalui subsidi Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI Negeri dan Swasta dengan besaran BOP per sekolah berdasarkan jumlah siswa dengan tarif Rp.50.000,-/siswa/bulan, dan di tingkat SMP/MTs Negeri dan Swasta dengan besaran BOP per sekolah berdasarkan jumlah siswa dengan tarif Rp.105.000,-/siswa/bulan.
4. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Upaya tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 yang mendukung pencapaian Indeks Pendidikan (Indeks Pengetahuan), yaitu sebagai berikut:

	Program/Kegiatan	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		688.469.826.412,00	675.115.013.936,00	98,06
	1. Tingkat ketersediaan daya tampung PAUD	%	83,73	83,73	100,00%
	2. Persentase PAUD yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	89,14	84,2	94,46%
	3. Persentase Pengembangan Minat Bakat Siswa PAUD	%	100	100	100,00%
	4. Persentase Pendidikan Non Formal yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	100	100	100,00%
	5. Persentase lulusan Paket A,B dan C	%	100	100	100,00%
	6. Tingkat ketersediaan daya tampung SD	%	87,92	87,92	100,00%
	7. Persentase SD yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	98,95	96,9	97,93%
	8. Tingkat layanan terhadap siswa mmiskin SD	%	100	100	100,00%
	9. Persentase Pengembangan Minat Bakat Siswa SD/MI	%	100	100	100,00%
	10. Tingkat ketersediaan daya tampung SMP	%	96,68	100	103,43%
	11. Persentase SMP yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	%	98,46	99	100,55%
	12. Tingkat layanan terhadap siswa miskin SMP	%	100	100	100,00%
	13. Persentase pengembangan minat bakat Siswa SMP/MTs	%	100	100	100,00%

Program/Kegiatan		Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	14. Persentase guru bersertifikat	%	97,50	86,4	88,62%
	15. Persentase guru SD dan SMP berkualifikasi S1/D4	%	90,88	92	101,23%
	16. Tingkat Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	%	100	100	100,00%
	17. Persentase jumlah warga negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	100	100,00%
	18. Persentase jumlah warga negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100,00%
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		419.528.494.152,00	412.224.937.035,00	98,26
	Jumlah Pengelolaan Sekolah Dasar SD/MI		(100) 589 Sekolah	589 Sekolah	100,00 %
1	Pengadaan Mebel Sekolah		1.057.790.000,00	979.210.000,00	92,57
	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		(100) 1 paket	1 paket	100,00 %
2	Pengadaan Perlengkapan Siswa		0,00	0,00	0,00
	Pojok Baca		0	0	0
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		42.838.591.250,00	42.381.053.743,00	98,93
	Beasiswa Non Personal Peserta Didik Kota Tangerang Jenjang MIN		(100) 1 MIN -	1 MIN	100,00
	Beasiswa Non Personal Peserta Didik Kota Tangerang Jenjang SDSdam MTsS		(100) 8444 Siswa -	8444 Siswa	100,00 %
	Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) jenjangSDN		(100) 298 SDN -	298 SDN	100,00 %
	Program Tangerang Cerdas jenjang SD		(100) 10000 Siswa -	10000 Siswa	100,00
	Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kinerja Jenjang SDN		(100) 41 SDN -	41 SDN	100,00 %
4	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		478.546.200,00	473.243.270,00	98,89
	Pemenuhan kebutuhan Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan		(100) 445 Sekolah	445 Sekolah	100,00 %
5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		672.388.100,00	638.605.000,00	94,98
	kegiatan lomba-lomba jenjang SD		(100) 445 Sekolah	445 Sekolah	100,00 %
6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		221.329.733.643,00	216.143.028.826,00	97,66
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD/MIpenerima BPJS Ketenagaan		(100) 2924 Orang -	2924 orang	100,00
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD/MI penerima insentif		(100) 8704 Orang -	8704 orang	100,00
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SDN Non PNS penerima Kesejahteraan		(100) 2923 Orang -	2923 orang	100,00

Program/Kegiatan		Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	7 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		213.241.300,00	188.063.900,00	88,19
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang di tingkatkan kompetensinya		(100) 300 Orang -	300 Orang	100.00 %
	8 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		107.911.850,00	106.511.850,00	98,70
	Program sekolah Sehat dan Program Sekolah Literat		(100) 445 Sekolah	445 Sekolah	100.00 %
	9 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		152.808.403.009,00	151.293.331.646,00	99,01
	Jumlah sekolah Dasar yang diberikan bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS)		(100) 445 Sekolah	445 Sekolah	100.00 %
	10 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		21.888.800,00	21.888.800,00	100,00
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		(100) 500 Orang -	500 Orang	100.00 %
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		207.779.241.848,00	203.021.008.549,00	97,71
	Jumlah pengelolaan pendidikan SMP/MTs yang dikota Tangerang		(100) 264 Sekolah	264 Sekolah	100.00 %
	1 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		74.506.000,00	12.000.000,00	16,11
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 1		(100) 1 Paket	1 Paket	16,11%
	2 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		47.155.571.000,00	45.471.216.015,00	96,43
	Jumlah sekolah penerima bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik		(100) 80 Sekolah -	80 Sekolah	100.00 %
	Jumlah sekolah penerima BOSDA Inklusif		(100) 13 Sekolah -	13 Sekolah	100.00 %
	Jumlah sekolah penerima BOSDA Reguler		(100) 33 Sekolah -	33 Sekolah	100.00 %
	Jumlah Siswa Penerima Tangerang Cerdas SMP/Sederajat		(100) 5000 Siswa -	5000 Siswa	100.00 %
	3 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		404.479.000,00	403.991.400,00	99,88
	Jumlah Sekolah Yang mengikuti Asesmen Nasional		(100) 201 Sekolah	201 Sekolah	100.00 %
	4 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		1.629.238.100,00	1.554.248.700,00	95,40
	Jumlah Peserta yang mengikuti lomba		(100) 300 orang	300 orang	100.00 %
	Jumlah Peserta yang mengikuti lomba menulis artikel dalam rangka HUT Kota Tangerang		(100) 39 orang	39 orang	100.00 %
	5 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		80.979.649.548,00	78.372.145.921,00	96,78
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP/MTs/SKH penerima BPJS ketenagakerjaan		(100) 666 Orang -	666 Orang	100.00 %

Program/Kegiatan		Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP/MTs/SKH penerima Insentif		(100) 5103 Orang -	5103 Orang	100.00 %
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMPN Non PNS penerima Kesejahteraan		(100) 664 Orang -	664 Orang	100.00 %
	6 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		116.811.400,00	116.811.400,00	100,00
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang di tingkatkan kompetensinya		(100) 300 Orang -	300 Orang	100.00 %
	7 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		230.221.900,00	228.483.900,00	99,25
	Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba		(100) 100 Sekolah	100 Sekolah	100.00 %
	8 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		77.102.880.000,00	76.776.226.313,00	99,58
	umlah sekolah yang diberikan bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS)		(100) 33 Sekolah -	33 Sekolah	100.00 %
	9 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		85.884.900,00	85.884.900,00	100.00 %
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		(100) 400 Orang -	400 Orang	100.00 %
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		55.561.365.612,00	54.413.223.852,00	97,93
	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK/RA/KB/SPS)		(100) 1.092 Lembaga	100	100.00 %
	1 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD		78.458.000,00	78.458.000,00	100,00
	TK Negeri Penerima BOP		(100) 1 Sekolah	1 Sekolah	100.00 %
	2 Pengadaan Perlengkapan PAUD		21.542.000,00	20.562.000,00	95,45
	Pengadaan perlengkapan PAUD		(100) 1 Sekolah	1 Sekolah	100.00 %
	3 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		122.348.800,00	122.072.000,00	99,77
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia		(100) 1 Paket -	1 Paket	100.00 %
	4 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		40.456.278.562,00	39.783.701.552,00	98,34
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan BPJS ketenagakerjaan jenjang PAUD, TK dan RA		(100) 13 Orang -	13 Orang	100.00 %
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan penerima Insentif TK, RA, PAUD		(100) 5834 Orang -	5834 Orang	100.00 %
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan TK negeri penerima kesejahteraan		(100) 13 Orang -	13 Orang	100.00 %
	5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		185.536.450,00	185.536.400,00	100,00
	Jumlah peserta guru, kepala		(100) 60 Orang -	60 orang	100.00

Program/Kegiatan		Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		sekolah dan pengawas berprestasi jenjang TK			%
		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi kegiatan stunting dan LKP	(100) 440 Orang -	440 Orang	100.00 %
	6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	216.141.800,00	211.541.800,00	97,87
		Jumlah Guru PAUD yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	(100) 90 Peserta -	90 Peserta	100.00 %
	7	Pengelolaan Dana BOP PAUD	14.481.060.000,00	14.011.352.100,00	96,76
		Pengelolaan BOP Lembaga PAUD	(100) 598 lembaga	598 lembaga	100,00
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.600.724.800,00	5.455.844.500,00	97,41
		Jumlah Pengelolaan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	(100) 38 Lembaga	38 Lembaga	100.00 %
	1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	279.999.800,00	278.299.800,00	99,39
		Jumlah peserta ujian paket A, paket B dan paket C	(100) 3669 Orang	3669 orang	100,00
	2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	983.435.000,00	841.050.000,00	85,52
		Jumlah pendidik, tenaga kependidikan dan tutor PKBM penerima Insentif	(100) 256 Orang -	256 Orang	100,00
	3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	111.680.000,00	111.380.000,00	99,73
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang di tingkatkan komptensinya	(100) 70 Orang -	70 Orang	100,00
	4	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.225.610.000,00	4.225.114.700,00	99,99
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	(100) 42 lembaga	42 lembaga	100,00

A.1.2. Permasalahan yang Dihadapi

1. Dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia dan Kota Tangerang khususnya sebagai kota industri, berdampak bagi perekonomian yang dihadapi oleh orang tua siswa, dimana beberapa orang tua siswa yang pada akhirnya pindah tempat tinggal di luar Kota Tangerang.
2. Masih adanya sebagian kecil masyarakat usia dibawah 7 tahun sudah bersekolah pada jenjang pendidikan dasar dan usia 12 tahun sudah memasuki jenjang sekolah menengah pertama, serta usia diatas 12 tahun yang mengikuti paket A, serta usia dibawah 13 tahun sudah bersekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama dan usia 15 tahun sudah

menduduki sekolah menengah atas, serta usia diatas 15 tahun yang masih dan sedang bersekolah pada paket B.

3. Sebagian masyarakat Kota Tangerang yang tinggal berbatasan dengan kota/kabupaten lain, yang tempat tinggalnya lebih dekat dengan sekolah yang ada di kota/kabupaten lain lebih memilih sekolah yang berada di luar kota Tangerang.
4. Pada jenjang sekolah menengah pertama, beberapa siswa memilih untuk melanjutkan sekolah ke pesantren atau sekolah menengah *boarding school* lainnya yang berada di luar Kota Tangerang
5. Masih kurangnya sistem pendataan untuk menghitung siswa-siswa Kota Tangerang yang bersekolah di luar Kota Tangerang.

A.1.3. Solusi Terhadap Permasalahan

1. Meningkatkan pembiayaan untuk akses bersekolah khususnya terhadap siswa yang tidak mampu, baik di lingkup sekolah negeri maupun swasta agar dapat memenuhi kebutuhan.
2. Melakukan pendataan yang akurat terkait siswa tidak mampu yang membutuhkan pembiayaan sekolah.
3. Meningkatkan sarana prasarana sekolah dan kompetensi guru.
4. Meningkatkan akses pembiayaan untuk program Kejar Paket A, dan B.

A.2. Uraian Pencapaian Kinerja Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan (Indeks Harapan Hidup) Tahun 2023 mencapai 85,08 point dan mengalami peningkatan sebesar 0,43 point (laju pertumbuhan mencapai 0,51%) dari Tahun 2022 yang mencapai 84,65 point, sehingga dengan capaian kinerjanya adalah sebesar 106,80%. Realisasi Indeks Kesehatan (Indeks Harapan Hidup) Tahun 2023 yang mencapai 85,08 point jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 79,66 point, maka terdapat selisih 5,42 point yang berarti bahwa target akhir RPJMD pada tahun 2023 dapat tercapai dengan baik. Kondisi ini didukung oleh pencapaian angka harapan hidup (AHH) atau usia harapan hidup saat lahir (UHH).

Angka harapan hidup menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat maka kesempatan untuk hidupnya cenderung semakin panjang. Sebaliknya tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. Angka harapan hidup berbanding terbalik dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin tinggi angka kematian bayi maka angka harapan hidup cenderung semakin pendek, demikian pula sebaliknya.

Angka harapan hidup (usia harapan hidup saat lahir) Kota Tangerang menunjukkan peningkatan selama periode Tahun 2019-2023, yaitu dari

71,57 tahun pada Tahun 2019 meningkat menjadi 75,30 tahun pada Tahun 2023. Artinya, rata-rata bayi yang lahir di Kota Tangerang pada Tahun 2023 memiliki harapan hidup hingga usia 75,30 tahun.

A.2.1. Upaya yang Telah Dilakukan

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan angka harapan hidup (usia harapan hidup saat lahir) di Kota Tangerang hingga tahun 2023 diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal. Peraturan Walikota ini memuat tentang alur rujukan, tata cara rujukan, komunikasi dan informasi sistem rujukan, pembinaan jejaring rujukan, pembiayaan dan audit terhadap kasus kematian maternal dan neonatal.
2. Penerapan Sistem Rujukan Ibu dan Bayi "SIJARIEMAS" dan Call Center SIJARIEMAS yang siap mengawal rujukan kegawatdaruratan selama 24 jam 7 hari seminggu, yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016, diharapkan mampu mengurangi rujukan touring hospital dan dapat menjembatani komunikasi antara perujuk dan tempat rujukan.
3. Penerapan Universal Health Coverage (UHC) pada tanggal 1 Maret 2017, dimana setiap warga Kota Tangerang dijamin pembiayaan kesehatannya melalui kepesertaan JKN-KIS, termasuk di dalamnya akses pelayanan persalinan dan perawatan bayi baru lahir.
4. Fasilitas Ambulan Gratis Pemerintah Kota Tangerang yang siaga 24 jam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang agar mudah mengakses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan.
5. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal melalui workshop kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
6. Penyusunan Buku pedoman SOP Gawat Darurat Maternal dan Neonatal.
7. Pendampingan klinis untuk rumah sakit dan Puskesmas PONED dalam hal tata laksana kegawatdaruratan maternal dan neonatal yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola klinis pada fasilitas kesehatan.
8. CAGEUR JASA (Colaborasi Kunjungan Keluarga Terintegrasi Keluarga Sehat) adalah pelayanan ke rumah warga oleh tenaga kesehatan dengan tidak membedakan status kesehatannya.
9. Pendampingan Ibu hamil dan Balita dengan memperkuat Kader SRIKANDI (Sedari Dini Kawal Ibu Hamil dan Balita).
10. Pembentukan 264 Kelas Ibu hamil dan 117 Kelas Ibu Balita tersebar di seluruh Puskesmas se-Kota Tangerang untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan ibu balita.

11. Pemanfaatan Aplikasi EMAK IDEP (Sistem Pemantauan Kehamilan Terintegrasi dan Terpadu) merupakan pendataan, pemantauan, dan rujukan terencana ibu hamil dalam rangka mempermudah pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak, yang saat ini menjadi E-Kohort KIA oleh Kementerian Kesehatan.
12. Pemetaan kemampuan fasilitas kesehatan dan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir tahun 2023 antara Dinas Kesehatan dengan seluruh Fasilitas Kesehatan se-Kota Tangerang, Organisasi Profesi IDI, IDAI, POGI, IBI, PMI dan BPJS Kesehatan.
13. Perjanjian Kerjasama antara pemerintah daerah dengan organisasi profesi IDAI dan POGI tentang Pendampingan Tenaga Ahli di Puskesmas se-Kota Tangerang.
14. Pelatihan USG terbatas dan skrining resiko tinggi ibu hamil untuk dokter Puskesmas se-Kota Tangerang.
15. Penyediaan layanan USG 2D di seluruh Puskesmas se-Kota Tangerang.

Upaya tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 yang mendukung peningkatan Indeks Kesehatan, yaitu sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	288.812.883.090,00	270.480.577.226,00	89.45 %
Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100.00 %
Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100.00 %
Persentase bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100.00 %
Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100.00 %
Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100.00 %
Persentase usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100.00 %
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100.00 %
Cakupan pembinaan lingkungan sehat	89,00	89	100.00 %
Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100	100	100.00 %
Persentase orang dengan terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	100	100.00 %
Persentase kasus berpotensi KLB yang ditangani	100	100	100.00 %
Persentase Jumlah Penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining sesuai standar	100	100	100.00 %
Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100.00 %
Persentase penderita Diabetes Melitus	100	100	100.00 %

Program/ Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
	Persentase Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ) Berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100.00 %
	Cakupan Masyarakat yang mendapat Kunjungan rumah oleh petugas kesehatan sesuai standar	100	100	100.00 %
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan yang memenuhi standar	67,5	67,5	100.00 %
	Persentase ketersediaan alat kesehatan dan alat laboratorium puskesmas	100	100	100.00 %
	Cakupan Penduduk Kota Tangerang yang memiliki jaminan kesehatan	95,00	98,84	104.04 %
	Cakupan Pembinaan Kesehatan Kerja & Olah Raga	100	100	100.00 %
	Persentase Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi Standar	91,67	91,67	100.00 %
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer yang memenuhi standar	90,62	90,62	100.00 %
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	69.320.433.178,00	63.417.339.506,00	91.42 %
	Rata-rata capaian target Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	(100) 100 %	100	100.00 %
1	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	707.773.400,00	665.850.000,00	94.08 %
	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	(100) 2 Paket	2 paket	100.00 %
2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	44.941.124.856,00	40.696.271.391,00	90.55 %
	Jumlah jenis alat kesehatan dan alat laboratorium yang tersedia di RSUD, Puskesmas dan jejaringnya	(100) 2 Jenis	2 jenis	100.00 %
3	Pengadaan Obat, Vaksin	16.681.809.144,00	16.160.076.753,00	96.87 %
	Jumlah paket obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia sesuai kebutuhan di puskesmas dan pustu	(100) 2 Paket	2 paket	100.00 %
4	Pengadaan Bahan Habis Pakai	6.944.125.778,00	5.850.373.862,00	84.25 %
	Jumlah paket bahan habis pakai yang tersedia sesuai kebutuhan	(100) 1 Paket	1 paket	100.00 %
5	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	45.600.000,00	44.767.500,00	98.17 %
	Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	(100) 1 Paket	1 paket	100.00 %
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	203.947.587.912,00	193.932.973.690,00	88.83 %
	Rata-rata capaian target Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(100) 100 %	92,38	92.38 %
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.600.000,00	45.334.000,00	4.23 %
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(100) 40925 Orang	40925 orang	100.00 %

Program/ Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	231.659.000,00	219.603.498,00	94.80 %
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(100) 39588 Orang	39588 orang	100.00 %
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	49.724.000,00	49.724.000,00	100.00 %
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(100) 39588 Orang	39588 Orang	100.00 %
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	106.578.600,00	106.578.600,00	11.59 %
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(100) 90040 Orang	90040 Orang	100.00 %
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	47.500.000,00	46.307.500,00	9.51 %
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(100) 231986 Orang	231986 Orang	100.00 %
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.239.000.000,00	2.226.053.000,00	97.77 %
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(100) 660890 Orang	660890 Orang	100.00 %
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	102.676.000,00	101.468.000,00	16.95 %
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(100) 62656 Orang	62656 Orang	100.00 %
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	20.900.000,00	20.900.000,00	100.00 %
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(100) 166750 Orang	166750 Orang	100.00 %
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	20.900.000,00	20.900.000,00	100.00 %
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(100) 93500 Orang	93500 Orang	100.00 %
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	50.850.000,00	50.850.000,00	24.98 %
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	(100) 902 Orang	902 Orang	100.00 %
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.922.291.500,00	331.657.500,00	9.20 %
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	(100) 17895 Orang	17895 Orang	100.00 %
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	654.050.000,00	511.550.000,00	63.20 %
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	(100) 32360 Orang	32360 Orang	100.00 %
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	35.300.000,00	31.100.000,00	88.10 %
	Jumlah kasus berpotensi KLB yang ditangani	(100) 5 Kasus	5 kasus	100.00 %
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.737.673.550,00	8.395.669.692,00	77.87 %
	Jumlah gizi buruk mendapat perawatan	(100) 111 Orang	80 orang	100.00 %
	Jumlah remaja puteri mendapat	(100) 22087 Orang	22087 orang	100.00 %

Program/ Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Tablet Tambah Darah (TTD)			
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	177.436.400,00	167.488.400,00	74.15 %
	Jamaah haji yang diukur tingkat kebugarannya	(100) 1600 Orang	1600 orang	100.00 %
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	(100) 1 Dokumen	1 dokumen	0.00 %
	Jumlah Puskesmas yang melakukan pembinaan kesehatan kerja dan olah raga	(100) 37 Puskesmas	37 puskesmas	100.00 %
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	255.241.700,00	255.241.700,00	100.00 %
	Jumlah Rumah yang dilakukan pembinaan	(100) 25384 Rumah	25384 Rumah	100.00 %
	Jumlah Tempat-Tempat Umum yang dilaksanakan pembinaan	(100) 462 Fasilitas	486 fasilitas	105.19 %
17	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	22.750.000,00	22.750.000,00	1.03 %
	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang dikunjungi oleh petugas kesehatan sesuai standar	(100) 60000 KK	60000 kk	100.00 %
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	27.750.000,00	27.750.000,00	100.00 %
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelayanan kesehatan primer	(100) 160 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	160 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.00 %
19	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	106.750.000,00	104.810.000,00	98.18 %
	Jumlah bayi usia 9-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)	(100) 31000 Orang	31000 Orang	100.00 %
	Jumlah jemaah haji yang diperiksa kesehatan	(100) 1600 Orang	1600 Orang	100.00 %
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	(100) 37 Puskesmas	37 Puskesmas	100.00 %
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	47.107.000,00	47.107.000,00	100.00 %
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	(100) 5891 Orang	5891 Orang	100.00 %
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	45.800.000,00	45.800.000,00	26.14 %
	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza	(100) 38 Puskesmas	38 Puskesmas	100.00 %
	Jumlah penderita depresi pada penduduk usia ≥ 15 tahun yang mendapat layanan	(100) 1227 Orang	1227 Orang	100.00 %
	Jumlah penderita gangguan mental emosional (GME) pada penduduk usia ≥ 15 tahun yang mendapat layanan	(100) 8639 Orang	8639 Orang	100.00 %
22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	839.426.200,00	552.371.000,00	19.73 %
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	(100) 150 Orang	150 Orang	100.00 %
	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani	(100) 47040 Orang	47040 Orang	85,03%
	Jumlah pneumoni balita yang ditangani	(100) 6906 Orang	6906 Orang	87.87 %
23	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	181.754.646.326,00	176.400.239.800,00	97.05 %

Program/ Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Jumlah Penduduk yang dibiayai iuran jaminan kesehatannya oleh pemerintah daerah kota tangerang	(100) 600000 Orang	600000 Orang	65.47 %
	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Tangerang	(100) 40 Puskesmas	39 Puskesmas	100.00 %
	Jumlah rumah sakit yang melayani masyarakat untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional	(100) 10 Rumah Sakit	10 Rumah Sakit	100.00 %
	24 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.043.501.636,00	0,00	0.00 %
	25 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.957.000.000,00	3.766.500.000,00	51.33 %
	Jumlah puskesmas yang memanfaatkan dana bantuan operasional	(100) 40 Puskesmas	39 puskesma	100.00 %
	26 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	112.496.000,00	99.200.000,00	88.18 %
	Jumlah Puskesmas yang di akreditasi	(100) 15 Puskesmas	15 puskesmas	100.00 %
	27 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6.900.000,00	6.900.000,00	100.00 %
	jumlah pelaporan pelacakan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)	(100) 1 Dokumen	1 dokumen	100.00 %
	28 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	194.880.000,00	191.982.000,00	98.51 %
	29 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	15.600.000,00	14.925.000,00	95.67 %
	30 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	8.300.000,00	8.300.000,00	100.00 %
	31 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	64.300.000,00	63.913.000,00	99.40 %
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	255.809.000,00	255.341.000,00	99.82 %
	Rata-rata capaian target Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	(100) 100 %	100	100.00 %
	1 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	255.809.000,00	255.341.000,00	99.82 %
	Jumlah sarana yang melakukan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	(100) 1 Sarana	1 sarana	100.00 %
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	523.236.000,00	427.014.400,00	81.61 %
	Rata-rata capaian target pendukung persyaratan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	(100) 100 %	100	100.00 %
	1 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.200.000,00	16.200.000,00	100.00 %
	Jumlah Pelayanan kesehatan yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	(100) 60 Sarana	60 sarana	100.00 %
	2 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	391.557.000,00	296.710.000,00	75.78 %
	Jumlah dokumen pengendali mutu dan manajemen mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	(100) 2 Dokumen	2 dokumen	100.00 %
	3 Penyiapan Perumusan dan	115.479.000,00	114.104.400,00	98.81 %

Program/ Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	(100) 40 fasilitas Pelayanan Kesehatan	40 fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.00 %
	BOK - DINAS KESEHATAN	14.281.221.000	12.284.061.095	86,02%
	JKN FKTP - DINAS KESEHATAN	484.596.000	163.847.535	33,81%
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.580.940.650,00	2.239.944.650,00	86.79 %
	Persentase tenaga kesehatan yang meningkat kompetensinya	87,99	82,03	93.23 %
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.078.501.000,00	887.692.000,00	82.31 %
	Rata-rata capaian target Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	(100) 100 %	100	100.00 %
1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.000.000.000,00	810.000.000,00	81.00 %
2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	78.501.000,00	77.692.000,00	98.97 %
	Jumlah tenaga fungsional kesehatan yang dinilai jenjang karirnya	(100) 367 Orang	367 Orang	100.00 %
2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.502.439.650,00	1.352.252.650,00	90.00 %
	Rata-rata capaian target Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(100) 100 %	93,22	93.22 %
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.502.439.650,00	1.352.252.650,00	90.00 %
	Jumlah Tenaga Kesehatan yang meningkat kompetensinya	(100) 1077 Orang	1004 orang	93.22 %
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	95.095.000,00	90.795.000,00	95.48 %
	Persentase IRTP yang Memenuhi Syarat	100,00	17,82	17.82 %
	Persentase Fasilitas Kefarmasian (Apotek, Toko Obat dan UMOT) dan Alat Kesehatan (Toko Alat Kesehatan dan Optikal) yang memenuhi syarat	82,22	82,22	100.00 %
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	8.100.000,00	8.100.000,00	100.00 %
	Rata-rata capaian target pendukung persyaratan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	(100) 100 %	100	100.00 %
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	8.100.000,00	8.100.000,00	100.00 %
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	(100) 1 Dokumen	1 dokumen	0.00 %
	Jumlah Fasilitas Kefarmasian	(100) 90 Fasilitas	90 fasilitas	100.00 %

Program/ Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	(Apotek, Toko Obat dan U MOT) dan Alat Kesehatan (Toko Alat Kesehatan dan Optikal) yang dilakukan pembinaan dan pengawasan			
2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	86.995.000,00	82.695.000,00	95.06 %
	Rata-rata capaian target pendukung persyaratan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	(100) 100 %	17,82	17.82 %
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	86.995.000,00	82.695.000,00	95.06 %
	Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi Syarat Keamanan Pangan	(100) 114 Sarana	18 sarana	17.82 %
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.516.266.500,00	1.506.431.400,00	68.24 %
	Cakupan posyandu aktif	100	100	100.00 %
	Cakupan Rumah Tangga Ber PHBS	75	75	100.00 %
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.196.116.000,00	1.195.591.500,00	99.96 %
	Rata-rata capaian target Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(100) 100 %	100	100.00 %
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.196.116.000,00	1.195.591.500,00	99.96 %
	Forum Kelurahan dan FKTS Kecamatan yang aktif melaksanakan kegiatan Kota sehat	(100) 13 Forum Kecamatan	13 Forum Kecamatan	100.00 %
	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	(100) 1 Dokumen	1 dokumen	0.00 %
	Media Komunikasi Informasi Edukasi Kesehatan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat	(100) 1 Paket	1 paket	100.00 %
	Posyandu yang melaksanakan pelayanan rutin usaha kesehatan berbasis masyarakat	(100) 1094 Posyandu	1096 posyandu	100.00 %
	Rumah tangga yang memenuhi syarat 10 indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	(100) 7800 Rumah Tangga	7800 Rumah Tangga	100.00 %
2	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	320.150.500,00	310.839.900,00	30.73 %
	Rata-rata capaian target Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(100) 100 %	100	100.00 %
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi	320.150.500,00	310.839.900,00	30.73 %

Program/ Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
	Posyandu yang melaksanakan pelayanan rutin usaha kesehatan berbasis masyarakat	(100) 1094 Posyandu	1096 posyandu	100.00 %

A.2.2. Permasalahan yang Dihadapi

1. Belum optimalnya tata kelola program, tata kelola manajemen dan tata kelola klinis (Tata kelola kasus, perbaikan sistem rujukan, skrining kasus beresiko tinggi, dll).
2. Upaya untuk menekan angka kesakitan masih lebih berfokus pada penanggulangan kasus kesakitan aktif. Padahal sangat penting mengatasi angka kesakitan dari segi promotif dan preventif untuk menekan timbulnya kasus aktif baru angka kesakitan.
3. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan bagi masyarakat dalam upaya promotif, preventif dan responsif dalam memberikan pelayanan kesehatan. Namun di sisi lain, Puskesmas juga memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.

A.2.3. Solusi Terhadap Permasalahan

1. Penguatan tata kelola program, tata kelola manajemen dan tata kelola klinis (Tata kelola kasus, perbaikan sistem rujukan, skrining kasus beresiko tinggi, dll).
2. Pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi dalam pendataan, pemantauan dan rujukan terencana ibu hamil dalam rangka mempermudah pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak.
3. Pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan kader, masyarakat, jejaring Puskesmas dalam kegiatan Puskesmas dan kegiatan pendampingan ibu hamil dan bayi baru lahir.
4. Melakukan upaya promotif dan preventif dengan pemberian terapi pencegahan penyakit untuk menekan penambahan kasus baru dan menurunkan angka kesakitan.
5. Secara berkelanjutan mengadakan kegiatan pelatihan kepada petugas Puskesmas tentang *Service Excellence* dan kegiatan akreditasi yang diikuti oleh 37 Puskesmas se-Kota Tangerang juga membuat usulan kebutuhan tenaga kesehatan kepada Badan Kepegawaian.

B. Pengukuran Kinerja Tujuan 2**Tabel II-33 Capaian Kinerja Tujuan 2 Tahun 2023**

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Indikator	Satuan	2023			Predikat Capaian	Target Akhir RPJMD (2023)	Target Akhir - Realisasi 2023
		Target	Realisasi	% Capaian			
1 Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	%	4,01 - 4,39	5,89	65,83%	Tidak Tercapai	4,01 - 4,39	1,50
Rata-rata Capaian				65,83%			

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 2 Tahun 2022 dinilai melalui 1 indikator kinerja adalah sebesar 65,83% dengan kategori Sedang. Adapun realisasi indikator Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Realisasi tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) Tahun 2023 mencapai 5,89% lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 4,01% - 4,39%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 65,83% atau dengan predikat tidak tercapai. Realisasi tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) Tahun 2023 yang mencapai 5,89% jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 4,01% - 4,39% maka terdapat selisih 1,50%. Sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi capaian indikator ini pada akhir akhir periode RPJMD tidak tercapai sesuai yang ditargetkan.

B.1. Uraian Pencapaian Kinerja

Realisasi indikator Tingkat kemiskinan pada Tahun 2023 bertambah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,12% atau tumbuh sebesar 2,08%. Kondisi tersebut menggambarkan kinerja yang kurang baik, dimana pada Tahun 2023 tingkat kemiskinan tidak dapat ditekan atau diturunkan dari tahun sebelumnya.

B.1.1. Upaya yang Telah Dilakukan

1. Mempermudah dan memperluas akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai dan berkualitas melalui Program Tangerang Cerdas dan Tangerang Sehat.
2. Memperluas akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan pangan yang memadai dan terjangkau melalui pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Program Kartu Sembako).

3. Mempermudah dan memperluas akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkesinambungan melalui kerjasama dengan pengusaha setempat untuk memberikan prioritas lapangan kerja bagi warga miskin serta Program Padat Karya.
4. Memberikan pelatihan dan pendampingan usaha kepada masyarakat miskin melalui Program Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin yaitu Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk menumbuhkembangkan Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) keluarga miskin.
5. Meningkatkan dan memperluas akses masyarakat miskin untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial melalui Program Tangerang Peduli, Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia (Lansia) Miskin dan Terlantar, serta pendampingan Program Jaminan Sosial Rakyat Bersatu (Jamsos Ratu).
6. Memfasilitasi dan membina masyarakat miskin terlibat aktif dan berkolaborasi dalam pengelolaan Program Kampung Tematik untuk meningkatkan potensi pariwisata di Kota Tangerang berbasis potensi lokal di masing-masing wilayah.
7. Mempermudah dan memperluas akses masyarakat miskin untuk menikmati tempat tinggal yang layak melalui Program Bedah Rumah bagi masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH).
8. Melakukan pendataan dan pemutakhiran secara berkala masyarakat miskin sehingga didapatkan informasi nama, alamat dan profil warga yang berkategori miskin.

Upaya tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 yang mendukung penurunan tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin), yaitu sebagai berikut:

Program/Kegiatan		Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		8.617.374.950,00	8.426.955.500,00	97.79 %
	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	74,86	74,84	99.97 %
	Persentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	100	100.00 %
1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		38.824.000,00	25.674.000,00	66.13 %
	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosial		(100) 154 Orang	154 Orang	100.00 %
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		38.824.000,00	25.674.000,00	66.13 %
	Jumlah Masyarakat Yang		(100) 154 orang	154 Orang	100.00 %

Program/Kegiatan		Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Menerima Penyuluhan Sosial				
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		8.578.550.950,00	8.401.281.500,00	97.93 %
	Jumlah kube yang telah memasarkan hasil produk		(100) 19 KUBE	19 KUBE	100.00 %
	Jumlah penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mendampingi Kampung Sejahtera Mandiri (KSM)		(100) 999 Orang	999 Orang	100.00 %
	Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang memberikan pelayanan kepada PMKS		(100) 30 Kelompok	30 Kelompok	100.00 %
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		5.916.000.000,00	5.892.000.000,00	99.59 %
	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		(100) 986 Orang	986 Orang	100.00 %
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		156.000.000,00	104.000.000,00	66.67 %
	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		(100) 13 Orang	13 Orang	100.00 %
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		2.283.063.500,00	2.224.613.900,00	97.44 %
	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		(100) 328 Keluarga	325 Keluarga	99.09 %
	Jumlah KUBE yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		(100) 19 KUBE	19 KUBE	100.00 %
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		223.487.450,00	180.667.600,00	80.84 %
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		(100) 5 Lembaga	5 Lembaga	100.00 %
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		830.874.000,00	657.190.500,00	79.10 %
	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	21,25	29,02	136.56 %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		609.445.200,00	437.190.500,00	71.74 %
	Jumlah jasa (tenaga) teknis yang tersedia		(100) 13 orang	13 orang	100.00 %
	Jumlah peserta kegiatan disabilitas		(100) 175 Orang	175 Orang	100.00 %
1	Penyediaan Sandang		16.368.700,00	16.255.500,00	99.31 %

Program/Kegiatan		Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		(100) 10 Orang	14 Orang	140.00 %
	2 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		570.276.500,00	411.235.000,00	72.11 %
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		(100) 255 Orang	255 Orang	100.00 %
	Jumlah peserta kegiatan disabilitas		(100) 175 orang	175 orang	100.00 %
	3 Pemberian Layanan Kedaruratan		22.800.000,00	9.700.000,00	42.54 %
	Jumlah pemulangan orang terlantar, sakit dan meninggal		(100) 270 orang	360 orang	133.33 %
	2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		221.428.800,00	220.000.000,00	99.35 %
	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina		(100) 480 orang	100	100.00 %
	1 Penyediaan Sandang		5.428.800,00	5.200.000,00	95.79 %
	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		(100) 26 Orang	26 Orang	100.00 %
	2 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		216.000.000,00	214.800.000,00	99.44 %
	Jumlah jasa (tenaga) teknis yang tersedia (TRC)		(100) 12 orang	12 orang	100.00 %
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		3.698.729.900,00	3.475.923.400,00	93,98%
	Persentase Pelayanan Perlindungan Sosial	%	100	99,66	99.66 %
	Persentase Pelayanan Jaminan Sosial	%	100	99,66	99.66 %
	1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		3.698.729.900,00	3.475.923.400,00	94.58 %
	Jumlah dokumen yang tersedia		(100) 1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %
	Jumlah Bantuan Sosial Bagi Anak Miskin/Terlantar		(100) 650 orang	650 orang	100.00 %
	Jumlah bantuan sosial bagi anak yatim		(100) 1.300 Orang	1.298 Orang	99.85 %
	Jumlah bantuan sosial bagi disabilitas		(100) 300 orang	300 orang	100.00 %
	Jumlah bantuan sosial bagi lansia miskin		(100) 1.000 Orang	999 Orang	99.90 %
	1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1.529.729.900,00	1.329.573.400,00	86.92 %
	Jumlah dokumen yang tersedia		(100) 1 dokumen	1 dokumen	100.00 %
	2 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		2.169.000.000,00	2.146.350.000,00	98,96%

Program/Kegiatan		Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Jumlah bantuan sosial tunai bagi anak terlantar dan/miskin		(100) 650 orang	650 orang	100.00 %
	Jumlah bantuan sosial tunai bagi anak yatim		(100) 1.300 orang	1.298 orang	99.85 %
	Jumlah bantuan sosial tunai bagi balita/terlantar miskin		(100) 300 orang	300 orang	100.00 %
	Jumlah bantuan sosial tunai khusus bagi kelompok rentan (Lansia terlantar/miskin dan penyandang Disabilitas) yang mendapat jaminan bantuan sosial		(100) 1.300 orang	1.299 orang	99.92 %

B.1.2. Permasalahan yang Dihadapi

1. Dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pada resesi ekonomi turut mendorong peningkatan jumlah masyarakat miskin.
2. Pendataan dan pemutakhiran data kemiskinan belum optimal sehingga menyebabkan program penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya tepat sasaran.
3. Ketersediaan informasi mengenai permasalahan dan kebutuhan masyarakat miskin yang detail dan termutakhirkan secara berkala belum memadai.
4. Pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan belum optimal dan terintegrasi.
5. Pengelolaan program penanggulangan kemiskinan yang dikoordinasikan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) belum optimal.
6. Kolaborasi dan partisipasi aktif semua pelaku pembangunan (stakeholders) dalam penanggulangan kemiskinan belum memadai.

B.1.3. Solusi Terhadap Permasalahan

1. Peningkatan pendataan, pemutakhiran dan pengelolaan data dan informasi mengenai permasalahan dan kebutuhan masyarakat miskin yang detail dan termutakhirkan secara berkala.
2. Penguatan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) dalam mengintegrasikan dan memfasilitasi pelaksanaan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
3. Optimalisasi Program Tangerang Peduli untuk meningkatkan dan memperluas kolaborasi dan partisipasi aktif semua pelaku pembangunan (stakeholders) dalam penanggulangan kemiskinan.
4. Peningkatan dan optimalisasi pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan.

C. Pengukuran Kinerja Tujuan 3

Tabel II-34 Capaian Kinerja Tujuan 3 Tahun 2023

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indikator	Satuan	2023			Predikat Capaian	Target Akhir RPJMD (2023)	Target Akhir - Realisasi 2023
		Target	Realisasi	% Capaian			
1 Indeks reformasi birokrasi	Point	70	82,71	118,16%	Tercapai (Melebihi Target)	70	12,71
Rata-rata Capaian				118,16%			

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Tahun 2023 yang dinilai melalui 1 indikator kinerja adalah sebesar 118,16% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun realisasi indikator Tujuan 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil sistem Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi on line sesuai dengan Permenpan RB RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Reformasi birokrasi dalam upaya perbaikan kondisi daerah terus dilakukan seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan daerah baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, mengatasi sejumlah permasalahan ekonomi, sosial dan budaya karena pengaruh globalisasi dan era persaingan bebas. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing di daerah. Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Tangerang telah melaksanakan reformasi birokrasi yang dilaksanakan bertahap 5 (lima) tahunan sampai tahun 2020 mengacu pada Peraturan Walikota Tangerang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2016-2020.

Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Tangerang maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Tangerang agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang atas pelaksanaan program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan, yaitu :

- 1) Manajemen perubahan.
- 2) Penataan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penataan dan penguatan organisasi.
- 4) Penataan tatalaksana.
- 5) Penataan sistem manajemen SDM.
- 6) Penguatan akuntabilitas.
- 7) Penguatan pengawasan.
- 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Fokus perubahan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah sesuai Peraturan Walikota Tangerang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah yaitu:

- 1) Penataan dan penguatan organisasi

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).

Hasil yang diharapkan dari area perubahan ini adalah :

- Penataan dan penguatan organisasi difokuskan pada penataan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, dengan berlandaskan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pembentukan perangkat daerah ini disesuaikan dengan potensi dan karakteristik, serta memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- Penyempurnaan dalam penyusunan dan evaluasi tugas fungsi perangkat daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi duplikasi/tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas fungsi.

2) Penataan tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Hasil yang diharapkan dari area perubahan ini adalah :

- Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
- Terintegrasikannya seluruh aplikasi.
- Setiap OPD sudah mempunyai SOP untuk dijadikan pedoman dalam mensinergikan berbagai tugas pokok dan fungsi kewenangan OPD/unsur kerja.
- Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik.
- Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
- Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal.
- Semua OPD Pelayanan sudah mempunyai SPM dan SP untuk menjamin terlaksananya seluruh proses pelayanan melalui prosedur yang benar, meliputi alur, persyaratan, kelengkapan, output yang dihasilkan dalam waktu yang tetap (standard).
- Sudah memiliki peta bisnis sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

3) Penataan peraturan perundang-undangan

Penataan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

Hasil yang diharapkan dari area perubahan ini adalah :

- Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang-undangan yang harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.
- Tersosialisasikannya produk hukum kepada masyarakat.

4) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Hasil yang diharapkan dari area perubahan ini adalah :

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyusun konsep regulasi dalam rangka pelayanan publik, disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi daerah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan.
- Membangun/mengembangkan teknologi informasi secara optimal.
- Melakukan pendampingan dalam penyusunan SOP pelayanan.
- Meningkatkan pengelolaan pengaduan masyarakat.

C.1. Uraian Pencapaian Kinerja

Capaian Kinerja Tujuan 3 Tahun 2023 yang dinilai melalui indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil LHE RB yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB dengan poin sebesar 82,71 point. Realisasi indikator Indeks reformasi birokrasi pada Tahun 2023 meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar 15,57 point atau tumbuh sebesar 23,19%.

C.1.1. Upaya yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan pada 4 (empat) area perubahan pada PMPRB antara lain sebagai berikut:

1. Deregulasi Kebijakan

- Melakukan evaluasi kinerja dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum.
- Melakukan keselarasan dan harmonisasi atas peraturan perundang-undangan pusat dengan peraturan perundang-undangan di daerah
- Melakukan konsistensi peraturan.
- Melakukan pemberian bantuan hukum litigasi maupun non litigasi bagi masyarakat umum dan masyarakat miskin.
- Melakukan fasilitasi penanganan perkara di Tingkat Peradilan.

2. Penyederhanaan Birokrasi

a. Penyederhanaan Struktur Organisasi

- 1) Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3484/OTDA Tanggal 31 Mei 2021 Hal Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021, disampaikan Surat Wali Kota Tangerang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Banten Nomor 800/2213-Org/2021 Tanggal 21 Juni 2021 Hal Permohonan Verifikasi dan Validasi Hasil Identifikasi Penyederhanaan Struktur Organisasi di Kota Tangerang, dengan prosentase sebesar 100% atau sebanyak 259 Jabatan Pengawas yang disederhanakan sesuai dengan excersice Kementerian PAN dan RB.
- 2) Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4283/OTDA Tanggal 30 Juni 2021 Hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Banten.
- 3) Gubernur Banten memberikan persetujuan melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 060/1646- ORB/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Perihal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Banten.
- 4) Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Surat Wali Kota Tangerang kepada Gubernur Banten Nomor 060/3658 Tanggal 17 September 2021 Hal Permohonan Verifikasi dan Validasi Struktur Organisasi DPMPSTP, dimana terdapat 4 Jabatan Administrator yang dialihkan ke dalam Jabatan Fungsional, sehingga jumlah keseluruhan jabatan administrasi yang dialihkan ke dalam jabatan fungsional adalah sebanyak 263 jabatan

b. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional

- 1) Pemerintah Kota Tangerang menyampaikan dokumen hasil identifikasi usulan Penyetaraan Jabatan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang melalui surat Wali Kota Tangerang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Banten Nomor 800/3763-Org Tanggal 28 September 2021 Hal Permohonan Verifikasi dan Validasi.

- 2) Kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Banten selaku Wakil Pemerintah Pusat dengan menyampaikan surat Sekretaris Daerah Provinsi Banten kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2263-ORB/2021 Tanggal 30 September 2021 Perihal Usulan Penyetaraan Jabatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
- 3) Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan atas Usulan Penyetaraan Jabatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten melalui Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Banten Nomor 800/8501/OTDA Tanggal 24 Desember 2021.
- 4) Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2021 Wali Kota Tangerang melantik Pejabat Administrasi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional berdasarkan hasil persetujuan Menteri Dalam Negeri sebanyak 263 orang

3. Perbaiki Tata Laksana

- Sudah menyusun peta proses bisnis yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 591.2/Kep.93- Bag.Org/2021 tentang Peta Proses Bisnis.
- Melakukan pembaharuan terhadap regulasi terkait tata naskah dinas termasuk di dalamnya sudah memuat tata naskah dinas elektronik yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang No 20 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas.
- Pembinaan kepada perangkat daerah tentang penyusunan peta proses bisnis kepada perangkat daerah.
- Saat ini aplikasi manajemen pemerintahan dan aplikasi layanan publik sudah terintegrasi, hal tersebut sebanding dengan nilai indeks SPBE Pemerintah Kota Tangerang yaitu 3,44 dengan predikat “BAIK”.
- Untuk Penerapan e-government, Pemerintah Kota Tangerang membagi penerapan menjadi dua bagian layanan, yaitu layanan manajemen pemerintahan dan layanan publik. Untuk aplikasi layanan manajemen pemerintahan semuanya terintegrasi dengan data kepegawaian menggunakan unique key Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk akses login masuk kedalam aplikasi manajemen pemerintahan. Sedangkan untuk semua aplikasi layanan publik terintegrasi dengan data kependudukan dari Dinas Dukcapil Kota Tangerang dengan memakai unique key Nomor Induk Kependudukan (NIK). Layanan manajemen pemerintahan memiliki gabungan aplikasi manajemen pemerintahan yang disebut Portal E-Gov berbasis Android untuk mengakomodir kemudahan satu akses bagi pegawai Pemerintah Kota Tangerang untuk menggunakan aplikasi manajemen pemerintahan menggunakan Handphone masing-masing pegawai dan

menerapkan prinsip Bring Your On Device (BYOD) dan Single Sign On (SSO) untuk login menggunakan NIP pegawai.

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik

- Pembinaan terhadap OPD Pelayanan yang melaksanakan Pelayanan Publik khususnya yang menjadi Role Model dari Pemerintah Pusat terhadap OPD yang menyelenggarakan Pelayanan Publik lainnya.
- Indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan Kota Tangerang pada tahun 2021 dengan nilai 84,84 (skala 0-100) dengan kategori baik (B).
- Pengaduan pelayanan dikelola melalui media email, telepon, konsultasi tatap muka (dengan pendaftaran konsultasi via sms) dan kontak melalui sistem via website, sosial media, telepon, sms.
- Telah ditetapkannya SOP Penanganan Pengaduan.
- Terdapat unit kerja yang menangani pengaduan pelayanan di OPD Pelayanan.
- Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan.
- Pembuatan aplikasi layanan publik yang dapat diakses melalui smartpone berbasis android seperti LAKSA, perizinan online, siap kerja dan lain-lain yang terintegrasi dalam single aplikasi Tangerang LIVE.
- Pembangunan dan pengembangan Tangerang Live Room (TLR) sebagai pusat pengendali pelayanan publik.
- Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik untuk urusan administrasi kependudukan dan lainnya dalam satu lokasi berkerja sama dengan instansi vertikal.
- Penyelenggaraan sistem perizinan online Kota Tangerang yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik.

Upaya tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 yang mendukung peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Prosentase OPD dengan struktur yang tepat ukuran dan tepat fungsi	%	100,00	100,00	100,00%
Prosentase OPD yang memiliki peta proses bisnis yang lengkap dan sesuai aturan	%	100,00	100,00	100,00%
Prosentase OPD yang memiliki SOP yang baik	%	100,00	100,00	100,00%
Prosentase OPD/UPT dengan pelayanan publik kategori baik	%	100,00	95,52	95,52%

Program/Kegiatan		Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
9	Penataan Organisasi		417.158.403,00	413.408.402,00	99,10%
	Jumlah OPD yang dibina dan dievaluasi terkait ketepatan ukuran dan fungsi organisasi	OPD	40	40	100,00%
	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pencapaian nilai RB pada 4 area perubahan	Kegiatan	2	2	100,00%
	Jumlah OPD yang dibina dan dievaluasi terkait peningkatan kinerja	OPD	40	40	100,00%
	Jumlah unit pelayanan publik yang menyusun laporan SKM	OPD	168	168	100,00%
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		41.600.000,00	38.550.000,00	92,67%
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	3	3	100,00%
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		221.668.403,00	221.268.402,00	99,82%
	Jumlah buku indeks kepuasan masyarakat Kota Tangerang	Buku	12	12	100,00%
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	1	1	100,00%
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan	Peserta	80	80	100,00%
	Jumlah peserta pembinaan pelayanan publik	Peserta	388	388	100,00%
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		153.890.000,00	153.590.000,00	99,81%
	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	2	100,00%
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		28.241.034.630,00	26.830.832.245,00	95,01%
	Persentase naskah kerjasama aktif yang ditindaklanjuti	%	100	117	117,00%
	Prosentase Kecamatan dan Kelurahan dengan nilai IKM Kategori Baik	%	100	100	100,00%
	Jumlah bantuan hukum litigasi kepada orang atau masyarakat miskin	lain-lain	60	60	100,00%
	Prosentase peraturan daerah/perwal/kepwal yang harmonis	%	100	116,56	116,56%
	Prosentase kelembagaan kesejahteraan masyarakat yang dibina	%	100	100	100,00%
	Prosentase organisasi keagamaan yang dibina	%	100	109,38	109,38%
	Prosentase SDM keagamaan yang dibina	%	100	100,71	100,71%
	Prosentase organisasi sosial budaya keagamaan yang dibina	%	0	0	0,00%
1	Administrasi Tata Pemerintahan		1.402.740.300,00	1.257.158.900,00	89,62%
	Jumlah koordinasi serta pembinaan dalam rangka peningkatan pelayanan publik	Kegiatan	12	12	100,00%
1	Penataan Administrasi Pemerintahan		522.983.600,00	380.789.900,00	72,81%
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	Dokumen	1	1	100,00%

Program/Kegiatan		Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Pemerintahan				
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		46.456.700,00	44.069.000,00	94,86%
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1	1	100,00%
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		833.300.000,00	832.300.000,00	99,88%
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	1	1	100,00%
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		22.072.737.330,00	21.448.702.225,00	97,17%
	Jumlah rakor kesra yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	9	9	100,00%
	Jumlah kegiatan fasilitasi organisasi keagamaan	Kegiatan	6	6	100,00%
	Jumlah kegiatan fasilitasi bina mental spiritual	Kegiatan	26	26	100,00%
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		3.708.167.330,00	3.490.407.225,00	94,13%
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	5	5	100,00%
	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan Pegawai dan Masyarakat	Kegiatan	12	12	100,00%
	Jumlah Kegiatan Pengiriman Kafilah pada MTQ Tingkat Provinsi Banten	Kegiatan	1	1	100,00%
	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam di Pemda Kota Tangerang	Kegiatan	5	5	100,00%
	Jumlah Pelaksanaan Pengajian Pegawai Pemda di Bulan Ramadhan	Kegiatan	17	17	100,00%
	Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Kerukunan Kehidupan Beragama	Orang	600	600	100,00%
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peringatan Hari Santri di Kota Tangerang	Kegiatan	1	1	100,00%
	Jumlah Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Kota Tangerang	Orang	5	5	100,00%
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		18.364.570.000,00	17.958.295.000,00	97,79%
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	3	3	100,00%
	Jumlah Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Masyarakat	Kelompok Masyarakat	149	149	100,00%
	Jumlah Rakor Kesra yang berkenaan dengan	Kegiatan	9	9	100,00%

Program/Kegiatan		Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Pemberdayaan Masyarakat				
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		4.706.559.000,00	4.065.973.120,00	86,39%
	Jumlah bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Perkara Litigasi	60	60	100,00%
	Jumlah produk hukum yang diharmonisasi dan dipublikasi	Produk Hukum	57	57	100,00%
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		1.005.387.000,00	985.137.000,00	97,99%
	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	57	57	100,00%
2	Fasilitasi Bantuan Hukum		2.545.989.050,00	1.967.989.850,00	77,30%
	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	60	60	100,00%
	Jumlah Penanganan Perkara di Tingkat Peradilan	Kasus	27	27	100,00%
	Layanan Konsultasi Keliling Yang Dilakukan	Konsultasi Hukum	24	24	100,00%
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		1.155.182.950,00	1.112.846.270,00	96,34%
	Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum Yang Diberikan Kepada Masyarakat	Orang	890	890	100,00%
	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	1000	1000	100,00%
4	Fasilitasi Kerjasama Daerah		58.998.000,00	58.998.000,00	100,00%
	Jumlah dokumen kerjasama daerah	Dokumen	100	117	117,00%
1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		49.998.000,00	49.998.000,00	100,00%
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	100	117	117,00%
2	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	4	4	100,00%

C.1.2. Permasalahan yang Dihadapi

1. Deregulasi Kebijakan

- Terdapat beberapa tahapan penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah yang harus diikuti dan membutuhkan waktu penyelesaian dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia.
- Belum terinformasikannya kepada masyarakat secara menyeluruh adanya bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi.

2. Penederhanaan Birokrasi

- Pada saat melakukan identifikasi dan pemetaan jabatan administrasi yang akan dialihkan ke dalam jabatan fungsional terkendala dengan masih belum tersedianya nomenklatur Jabatan Fungsional yang mengakomodir transformasi jabatan administrasi dimaksud.
- Adanya variasi kelas Jabatan Fungsional Muda, yaitu kelas 9 dan 10, dimana hal tersebut tentunya dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).
- Adanya pemangku jabatan eksisting yang mempunyai latar belakang yang kurang sesuai dengan jabatan fungsionalnya.

3. Perbaiki Tata Laksana

- Peta proses bisnis yang ada saat ini dinilai belum memperhatikan tugas, fungsi dan rencana strategis pemerintah daerah, selain itu belum dilakukan penyesuaian dengan perubahan RPJMD 2019-2023.
- Belum semua perangkat daerah mempunyai peta proses bisnis dan sop yang baik dan benar.
- Pengelola kearsipan belum sepenuhnya berbasis digital.
- Penerapan tata laksana berbasis elektronik belum sepenuhnya dilakukan seluruh perangkat daerah.

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik:

- Belum semua OPD pelayanan mempublikasikan hasil IKM.
- Belum semua OPD menindaklanjuti hasil IKM tahun sebelumnya.
- Mall Pelayanan Publik dinilai kurang maksimal karena lokasi yang dianggap tidak strategis.
- Belum semua OPD pelayanan mengimplementasikan pemberian reward/punishment terhadap pemberi layanan.
- Beberapa pelapor menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas sehingga tidak dapat dilakukan pendataan.
- Pengaduan via kotak saran seringkali tidak mencantumkan identitas secara jelas sehingga tidak dapat dikonfirmasi kepada pelapor.

C.1.3. Solusi Terhadap Permasalahan

1. Perlunya komitmen pimpinan daerah dan pimpinan perangkat daerah dalam memastikan agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik.
2. Perlunya internalisasi Reformasi Birokrasi sampai kerja bahkan individu.
3. Perlunya membuat rencana aksi perbaikan seluruh area perubahan reformasi birokrasi;
4. Perlunya melakukan inovasi pelayanan;
5. Perlunya melakukan survei secara berkala dan menindaklanjuti keluhan penerima layanan;
6. Perlunya melakukan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi perbaikan;

7. Perlunya membuktikan perubahan yang terjadi setelah perubahan (*before and after reform*).
8. Perlunya membangun manajemen media.
9. Perlunya peran aktif dari Pemerintah Provinsi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang.
10. Rencana aksi pada 4 area perubahan
 - a. Penataan peraturan perundang-undangan
 - Membangun sistem penataan dan pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan tumpang tindih untuk selanjutnya dilakukan perbaikan.
 - b. Penataan dan penguatan organisasi
 - Assessment organisasi perangkat daerah diharapkan akan menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien. Hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi sebagai quick wins mandatory akan dilakukan pada tahun pertama pelaksanaan reformasi birokrasi 2021-2025 sehingga akan membentuk organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran berbasis kinerja sesuai proses bisnis
 - c. Penataan tatalaksana
 - Peta proses bisnis sebagai acuan penyederhanaan birokrasi yang telah disusun, dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya dengan melakukan review dan/atau penyusunan SOP secara lengkap untuk seluruh perangkat daerah.
 - Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang integratif sebagai salah satu quick wins Pemerintah Kota Tangerang diharapkan akan berdampak pada semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis elektronik yang lebih cepat dan efisien.
 - Peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik yang mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien, dan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
 - Pengelolaan kearsipan telah sepenuhnya berbasis digital.
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik

- Standar pelayanan publik secara lengkap telah disusun dan diterapkan secara konsisten, seiring pula dengan reposisi dan penguatan peran Mal Pelayanan Publik.
- Inovasi pelayanan publik terus dilakukan guna mendorong pelayanan publik yang semakin berkualitas, yaitu dapat memperluas jangkauan pelayanan dan memperpendek proses pelayanan.
- Pengelolaan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai media secara responsif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat semakin merasakan kemudahan, transparansi, dan kecepatan pelayanan dalam mengurus berbagai jenis layanan, baik perizinan maupun nonperizinan, secara integratif dan berbasis digital. Hal tersebut sebagai wujud nyata dari pelayanan prima yang memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal tersebut sebagaimana amanah dari UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan (pelayanan prima).

D. Pengukuran Kinerja Tujuan 4

Tabel II-35 Capaian Kinerja Tujuan 4 Tahun 2023

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan

Indikator	Satuan	2023			Predikat Capaian	Target Akhir RPJMD (2023)	Target Akhir - Realisasi 2023
		Target	Realisasi	% Capaian			
1 Indeks pembangunan sarana prasarana perkotaan	Point	86,31	85,69	99,28%	Tidak Tercapai	86,31	-0,62
Rata-rata Capaian				99,28%			

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 4 Tahun 2023 dinilai melalui 1 indikator kinerja adalah sebesar 99,28% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun realisasi indikator Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Indeks Sarana Prasarana Perkotaan Tahun 2023 mencapai 85,69 point lebih kecil dari target yang ditetapkan yaitu 86,31 point, sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 99,28% atau dengan predikat tidak tercapai. Realisasi Nilai Indeks Sarana Prasarana Perkotaan Tahun 2023

yang mencapai 85,69 point jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 86,31 point maka terdapat selisih sebesar -0,62 point. Sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi capaian indikator ini pada akhir periode RPJMD tidak tercapai sesuai yang ditargetkan.

D.1. Uraian Pencapaian Kinerja

Realisasi Indeks Sarana Prasarana Perkotaan Tahun 2023 yang mencapai 85,69 point tersebut dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 86,31 point, sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 99,28%. Kondisi ini didukung oleh pencapaian indeks dan indikator sebagai berikut:

1. Indeks kualitas jalan dan jembatan yang memadai (indikator persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai).
2. Indeks kecepatan rata-rata perjalanan (indikator kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan).
3. Indeks penanganan permukiman kumuh (indikator persentase permukiman kumuh).
4. Indeks pelayanan air minum (indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari).
5. Indeks pelayanan pengolahan limbah domestik (indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik).
6. Indeks penanganan banjir dan genangan (Indikator luas banjir dan genangan).
7. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).
8. Indeks pelayanan persampahan (indikator tingkat pengelolaan sampah).

D.1.1. Upaya yang Telah Dilakukan

1. Indeks kualitas jalan dan jembatan yang memadai (indikator persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai)

Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator persentase kualitas jalan dan jembatan dicapai melalui 1 (satu) program, 1 (Satu) Kegiatan dan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan yaitu: Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Leger Jalan, Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Pembangunan Jalan,

Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Pembangunan Jembatan, dan Pemeliharaan Rutin Jembatan.

Berikut ini diuraikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian indikator persentase kualitas jalan dan jembatan.

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp213.094.795.394,00	Rp202.876.227.385,00
	Presentase dokumen perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang ditindak lanjuti	100%	100%
	Prosentase panjang jalan yang dipelihara	89,57%	89,57%
	Prosentase jembatan yang dipelihara	98,95%	98,95%
	Tingkat ketersediaan jalan	100%	66,67%
	Tingkat ketersediaan jembatan	99,65%	99,65%
	Presentase dokumen pemuktahiran data leger yang akurat	100%	100%
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp213.094.795.394,00	Rp202.876.227.385,00
	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan yang disusun	100%	100%
	Jumlah dokumen pemutakhiran data leger	100%	100%
	Jumlah dokumen Survey kondisi jalan/jembatan	100%	100%
	Panjang jalan yang dipelihara	100%	100%
	Jumlah jembatan yang dipelihara	100%	100%
	Jumlah ruas jalan kolektor sekunder yang dibangun	100%	36,64%
	Jumlah jalan arteri sekunder yang dikembangkan	100%	100%
	Jumlah ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal yang ditingkatkan	100%	100%
	Jumlah ruas jalan lingkungan yang ditingkatkan	100%	100%
	Jumlah jembatan yang dibangun	100%	100%
	Jumlah jembatan yang diganti	100%	100%
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp966.527.200,00	Rp947.295.858,00
	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan yang disusun	3 Jenis Dokumen	11 Jenis Dokumen
2	Pengelolaan Leger Jalan	Rp1.045.639.800,00	Rp943.079.400,00
	Jumlah dokumen pemutakhiran data leger	3 Jenis Dokumen	10 Jenis Dokumen
3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp222.480.200,00	Rp222.480.200,00
	Jumlah dokumen Survey kondisi jalan/jembatan	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen
4	Pembangunan Jalan	Rp10.939.993.600,00	Rp 10.375.103.400,00
	Jumlah ruas jalan kolektor sekunder yang dibangun	1,07 km	0,392 Km
5	Rekonstruksi Jalan	Rp72.618.280.000,00	Rp71.456.491.600,00
	Jumlah jalan arteri sekunder yang dikembangkan	0 Km	0 Km
	Jumlah ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal yang ditingkatkan	11,55 Km	13,62 Km
6	Rehabilitasi Jalan	Rp45.423.117.900,00	Rp44.802.124.080,00
	Jumlah ruas jalan lingkungan yang ditingkatkan	24,85 Km	25,35 Km
7	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp50.035.589.620,00	Rp42.938.342.513,00
	Panjang jalan yang dipelihara	3,85 Km	14,78 Km
8	Pembangunan Jembatan	Rp28.002.387.100,00	Rp27.772.623.200,00
	Jumlah jembatan yang dibangun	1 Ruas Jembatan	2 Ruas Jembatan
	Jumlah jembatan yang diganti	5 Ruas Jembatan	18 Ruas Jembatan
9	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp3.840.779.974,00	Rp3.418.687.134,00
	Jumlah jembatan yang dipelihara	8 Ruas	31 Ruas

2. Indeks kecepatan rata-rata perjalanan (indikator kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan)

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 yang mendukung pencapaian indikator kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		68.015.258.309,00	64.273.681.726,00	94,50%
Persentase hasil kajian, analisa dan evaluasi pengembangan sistem transportasi	%	100	100	100.00 %
Jumlah titik kemacetan yang tertangani	lain-lain	100,00	100	100.00 %
Jumlah beroperasi koridor/trayek angkutan umum sistem transit	lain-lain	100,00	100	100.00 %
Prosentase PJU keselamatan jalan dalam kondisi baik	%	100	100	100.00 %
Jumlah Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan Terpasang	lain-lain	100,00	100	100.00 %
1 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		1.579.754.200,00	985.222.100,00	62,37%
Jumlah Dokumen Kajian, Analisa dan Evaluasi Pengembangan Sitem Transportasi		(100) Pengembangan Sitem Transportasi	(100) Pengembangan Sitem Transportasi	100.00 %
1 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		955.784.000,00	568.852.900,00	59,52%
Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		(100) 3 Dokumen	(100) 3 Dokumen	100.00 %
2 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		623.970.200,00	416.369.200,00	66,73%
Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		(100) 3 Laporan	(100) 3 Laporan	100.00 %
2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		15.697.210.283,00	14.934.661.782,00	95,14%
Jumlah Prasarana dan Perlengkapan Jalan Terbangun dan Terpelihara		(100) 13 Ruas Jalan Kota	(100) 13 Ruas Jalan Kota	100.00 %
1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		25.779.000,00	22.000.000,00	85,34%
Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		(100) 13 Ruas Jalan Kota	(100) 13 Ruas Jalan Kota	100.00 %
2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		1.775.436.983,00	1.701.195.286,00	95,82%
Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		(100) 68 Titik	(100) 68 Titik	100.00 %
3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		464.283.900,00	372.576.120,00	80,25%
Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		(100) 13 Ruas Jalan Kota	(100) 13 Ruas Jalan Kota	100.00 %

Program/Kegiatan		Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		13.431.710.400,00	12.838.890.376,00	95,59%
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan Terpelihara Tere		(100) 4 item	(100) 4 item	100.00 %
	3 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		163.013.700,00	158.446.300,00	97,20%
	Jumlah Terminal Terpelihara		(100) 2 Terminal	(100) 2 Terminal	100.00 %
	1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		163.013.700,00	158.446.300,00	97,20%
	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara		(100) 2 Terminal	(100) 2 Terminal	100.00 %
	4 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		423.510.000,00	423.042.500,00	99,89%
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Penertiban Perparkiran		(100) 12 Bulan	(100) 12 Bulan	100.00 %
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		423.510.000,00	423.042.500,00	99,89%
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		(100) 12 Bulan	(100) 12 Bulan	100.00 %
	5 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1.979.285.500,00	1.925.869.100,00	97,30%
	Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor		(100) 1 Unit Pelayanan	(100) 1 Unit Pelayanan	100.00 %
	1 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	100,00%
	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		(100) 50000 Kartu	(100) 50000 Kartu	100.00 %
	2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		729.285.500,00	675.869.100,00	92,68%
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		(100) 1 Balai	(100) 1 Balai	100.00 %
	6 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		9.100.511.126,00	7.624.106.700,00	83,78%
	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Untuk Manajemen Rekayasa Lalu Lintas		(100) 4 Item Pekerjaan	(100) 4 Item Pekerjaan	100.00 %
	1 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		9.100.511.126,00	7.624.106.700,00	83,78%
	Jumlah Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		(100) 4 Item	(100) 4 Item	100.00 %
	7 Persetujuan Hasil Analisis		97.350.000,00	66.800.000,00	68,62%

Program/Kegiatan		Satuan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				
	Jumlah Dokumen Pembahasan Andalalin		(100) 6 Dokumen	(100) 6 Dokumen	100.00 %
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		97.350.000,00	66.800.000,00	68,62%
	Jumlah Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)		(100) 6 Kegiatan	(100) 6 Kegiatan	100.00 %
	8 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		38.974.623.500,00	38.155.533.244,00	97,90%
	Jumlah Beroperasinya Koridor/ Trayek Angkutan Umum Sistem Transit		(100) 13 Koridor	(100) 13 Koridor	100.00 %
	1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		38.730.807.500,00	37.915.490.744,00	97,89%
	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum		(100) 13 Koridor	(100) 13 Koridor	100.00 %
	2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		243.816.000,00	240.042.500,00	98,45%
	Jumlah Evaluasi Pengendalian Penyelenggaraan Angkutan Umum		(100) 1 Evaluasi	(100) 1 Evaluasi	100.00 %

3. Indeks penanganan permukiman kumuh (indikator persentase permukiman kumuh)

Perhitungan Pengurangan Kumuh Kota Tangerang yang sudah dilakukan dari Tahun 2021 sampai tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2018 yaitu mencakup 7 Indikator dan 16 Parameter. Pada Tahun 2023, Kota Tangerang bersama dengan KOTAKU melakukan intervensi sisa kawasan kumuh seluas 1,17 ha dari 28,5 Ha.

Dalam proses pendataan baseline yang dilakukan oleh KOTAKU, wilayah kumuh yang akan di intervensi adalah di RT004-RW004 Kelurahan Kedaung Wetan mencakup dari aspek bangunan gedung, jalan lingkungan, kebutuhan minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Intervensi ini mencakup 7 indikator dan 16 parameter dengan berbagai sumber dana baik APBD maupun APBN. Berikut adalah tabel intervensi kawasan kumuh Tahun 2023.

Lokasi	Jenis Infrastruktur	Lebar (m)	Panjang (m)	(Unit)	KK Penerima Manfaat	Status	Sasaran Indikator/Parameter Yang Terlayani	Keterangan Sumber Dana
RT004-RW004	Perbaikan RTLH			3	3		1c. Ketidaksesuaian dengan P	Program BPS Regular
RT004-RW004	Peningkatan Jalan Paving Block	1.5	145			REHAB	2b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	APBN
RT004-RW004	Peningkatan drainase lingkungan		150			REHAB	4c. Kualitas Konstruksi Drainase	APBN
RT004-RW004	BPBD Pemadam Kebakaran			117	117		7a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	APBD
RT004-RW004	BPBD Pemadam Kebakaran			117	117		7b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	APBD
RT004-RW004	Pengadaan tong sampah			22	22	BARU	6a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	APBD 2023
RT004-RW004	Pengadaan tong sampah			22	22	BARU	6b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	APBD 2023

4. Indeks pelayanan air minum (indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari)
 1. Sejak Tahun 2022 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Program telah melakukan beberapa kegiatan untuk mendukung terealisasinya capaian indikator jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari, diantaranya melakukan pemeliharaan jaringan SPAM dan melakukan penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM.
 2. Pengembangan Aplikasi R'SPAM di Tangerang LIVE sebagai media informasi pelanggan PDAM terkait kebocoran jaringan, tagihan dan layanan pengaduan.
5. Indeks pelayanan pengolahan limbah domestik (indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik)
 1. Sejak Tahun 2022 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota telah

melakukan pembangunan jamban sebanyak 20 unit untuk 20 KK, melakukan uji kualitas Air Limbah pada IPAL, IPLT dan kolam oksidasi, serta melayani pengolahan air limbah domestik melalui 13 (tiga belas) mobil truk sedot tinja yang beroperasi setiap hari

2. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik bekerjasama dengan BPPW Provinsi Banten dimana salah satu tujuan dari rancangan Perda adalah pelibatan swasta dalam pengolahan air limbah domestik.
 3. Menyediakan layanan call center sedot tinja untuk mempermudah pemesanan layanan sedot tinja bagi masyarakat Kota Tangerang.
 4. Pengembangan metode pembayaran sedot tinja melalui layanan non tunai (QRIS).
6. Indeks penanganan banjir dan genangan (Indikator luas banjir dan genangan)

Upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan target penurunan luasan banjir dan genangan adalah dengan membangun, menambah kapasitas saluran dan melaksanakan normalisasi saluran sungai, drainase dan saluran pembuang yang dilakukan melalui 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 13 Sub Kegiatan yaitu: Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai, Pembangunan Tanggul Sungai, Pembangunan Polder/Kolam Retensi, Rehabilitasi Tanggul Sungai, Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, Normalisasi/Restorasi Sungai, Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai, Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir, Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan, Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase, Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan.

Berikut ini diuraikan program dan kegiatan penanganan banjir dan genangan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023.

	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp131.830.353.989,00	Rp107.323.542.620,00
	Prosesntase sumber daya air yang dipelihara	90%	90%
	Presentase luas banjir yang tertangani	100%	182,84%
	Presentase sarana prasarana Sumber Daya Air dan Drainase dalam kondisi baik	100%	100%

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi
	Presentase dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air yang ditindak lanjuti	100%	100%
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp131.830.353.989,00	Rp107.323.542.620,00
	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase yang disusun	100%	100%
	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air yang disusun	100%	100%
	Jumlah Sungai yang dinormalisasi	100%	100%
	Jumlah stasiun pompa banjir yang dipelihara	100%	100%
	Jumlah tanggul dan tebing sungai yang pelihara	100%	100%
	Jumlah Bangunan Turap yang dibangun	100%	100%
	Jumlah Sistem pengendali banjir	100%	100%
	Jumlah Bangunan Embung yang dibangun	100%	50%
	Jumlah Bangunan Pintu Air yang dibangun	100%	100%
	Jumlah Sarana Prasarana SDA	100%	100%
	Jumlah Bangunan Sumber Daya Air yang di Rehabilitasi	100%	100%
	Jumlah Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	100%	100%
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Rp1.284.401.035,00	Rp1.219.321.830,00
	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase yang disusun	3 Jenis Dokumen	6 Jenis Dokumen
	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air yang disusun	3 Jenis Dokumen	6 Jenis Dokumen
2	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rp13.386.637.871,00	Rp4.929.274.300,00
	Jumlah Bangunan Embung yang dibangun	4 Unit	2 Unit
3	Pembangunan Tanggul Sungai	Rp35.835.165.904,00	Rp31.172.341.200,00
	Jumlah Bangunan Turap yang dibangun	20 Unit	28 Unit
4	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rp1.698.129.519,00	Rp1.301.216.000,00
	Jumlah Bangunan Pintu Air yang dibangun	2 Unit	4 Unit
5	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Rp26.830.595.788,00	Rp20.292.704.800,00
	Jumlah Sistem pengendali banjir	15 Unit	16 Unit
6	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Rp17.092.425.641,00	Rp16.856.810.200,00
	Jumlah Bangunan Sumber Daya Air yang di Rehabilitasi	15 Unit	29 Unit
7	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rp2.336.347.860,00	Rp2.229.777.108,00
	Jumlah Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	15 Unit	74 Unit
8	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Rp5.383.115.811,00	Rp4.918.619.000,00
	Jumlah Sarana Prasarana SDA	1 Lokasi	6 Lokasi
9	Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp17.132.237.160,00	Rp15.153.914.749,00
	Jumlah Sungai yang dinormalisasi	65 Km	65,85 Km
10	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Rp6.438.090.640,00	Rp6.258.050.786,00
	Jumlah tanggul dan tebing sungai yang pelihara	65 Unit	65 Unit
11	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Rp4.413.206.760,00	Rp2.991.512.647,00
	Jumlah stasiun pompa banjir yang dipelihara	65 Unit	65 Unit
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp125.033.486.792,00	Rp122.882.226.653,00
	Presentase dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase yang ditindak lanjuti	100%	100%

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi
	Presentase saluran drainase/ gorong-gorong yang dipelihara	59%	59%
	Presentase luas genangan yang tertangani	100%	116,99%
	Presentase sarana prasarana Drainase dalam kondisi baik	100%	100%
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp125.033.486.792,00	Rp122.882.226.653,00
	Jumlah Dokumen Supervisi bangunan Drainase makro dan Drainase perumahan pemukiman	100%	100%
	Jumlah bangunan Drainase makro perkotaan yang dibangun	100%	12,28%
	Jumlah Sarana dan Prasarana Drainase	100%	100%
	Panjang drainase yang dipelihara	100%	100%
	Jumlah bangunan Drainase perumahan pemukiman yang dibangun	100%	100%
1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Rp267.408.600,00	Rp245.361.400,00
	Jumlah Dokumen Supervisi bangunan Drainase makro dan Drainase perumahan pemukiman	1 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen
2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Rp4.188.729.492,00	Rp3.270.114.760,00
	Jumlah bangunan Drainase makro perkotaan yang dibangun	5 Km	0,614 Km
3	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Rp4.746.551.500,00	Rp4.289.194.179,00
	Jumlah Sarana dan Prasarana Drainase	6 Unit	8 Unit
4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Rp13.289.744.900,00	Rp12.771.927.114,00
	Panjang drainase yang dipelihara	200 Km	200 Km
5	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Rp102.541.052.300,00	Rp102.305.629.200,00
	Jumlah bangunan Drainase perumahan pemukiman yang dibangun	70 Km	70,08 Km

7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Dalam menunjang pencapaian indikator IKLH terdapat 3 program, 4 kegiatan, dan 5 sub kegiatan pendukung. Diantaranya Program pengendalian dan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).

Upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2023 untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yaitu sebagai berikut:

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Realisasi
1	Program pengendalian dan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	3.512.965.726	2.442.694.886
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.733.613.726	1.810.170.886
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	858.724.400	639.483.500
	jumlah institusi dan/atau non institusi yang dipantau	20 institusi/non institusi	20 institusi/non institusi
	Jumlah kegiatan pelaksanaan Hari bebas Kendaraan	22 kegiatan	14 kegiatan
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	779.352.000	632.524.000
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada	779.352.000	632.524.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target	Realisasi
		Masyarakat		
		Cakupan Frekuensi Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Kondisi Ekologis	2 periode	2 periode
		Cakupan Frekuensi Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan	1 periode	1 periode
		Frekuensi pelaksanaan pengujian emisi penunjang Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) Program Langit Biru	1 kegiatan	1 kegiatan
		Jumlah buku IKPLHD yang diselesaikan dari jumlah target penyusunan dokumen SLHD	2 buku	2 buku
		Pemantauan Kualitas Air Tanah dan Air Situ	2 periode	2 periode
2		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	7.091.868.000	66.700.000
	1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.091.868.000	66.700.000
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.091.868.000	66.700.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
		luas lahan dan bangunan yang di ganti rugi	3500 M2	0
3		Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	26.128.000	20.240.000
	1	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	26.128.000	20.240.000
	1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	26.128.000	20.240.000
		Jumlah Pohon yang ditanam	184 pohon	184 pohon

8. Indeks pelayanan persampahan (indikator tingkat pengelolaan sampah)

Upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2023 dalam rangka meningkatkan pelayanan persampahan, yaitu sebagai berikut:

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target	Realisasi
1		Program Pengelolaan Persampahan	143.124.353.605,00	138.158.374.950,00
	1	Pengelolaan Persampahan	143.124.353.605,00	138.158.374.950,00
	1	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	6.352.516.587,00	5.945.671.132,00
		Jumlah Sampah yang termanfaatkan dan terdaur ulang	128619.5 ton per tahun	128869,42 ton per tahun
		Tersedianya data/informasi penanganan sampah	1 buku	1 buku
	2	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	103.864.464.569,00	102.220.434.898,00
		Jumlah limbah B3 domestik yang dikelola	355 KG	355 KG
		Jumlah lokasi pengolahan sampah yang beroperasi	13 lokasi	10 lokasi
		Jumlah sampah yang terangkut ke TPA	385858.5 ton per tahun	385460,44 ton per tahun
		Operasionalisasi TPA di Kota Tangerang	72 poin	0
		Persentase cakupan area pelayanan di 6 Kecamatan	100%	100%
		Persentase cakupan area pelayanan di 7 Kecamatan	100%	100%
		Persentase Pencapaian target retribusi	100%	100%
	3	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	494.432.272,00	450.745.276,00
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau	3 Kelompok	3 Kelompok

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target	Realisasi
		Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		
	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	32.412.940.177,00	29.541.523.644,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 lokasi	1 lokasi

D.1.2. Permasalahan yang Dihadapi

1. Indeks kualitas jalan dan jembatan yang memadai (indikator persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai)
 - Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan lahan yang belum selesai dibebaskan.
 - Adanya kegiatan yang batal dilaksanakan karena gagal lelang sedangkan untuk proses lelang ulang waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi.
 - Terdapat ruas jalan yang dipelihara atau ditingkatkan kualitasnya dengan menggunakan perkerasan hotmix mengalami kerusakan dini akibat adanya genangan air dikarenakan tingginya curah hujan dan tidak tersedianya saluran drainase.
 - Terdapat ruas jalan yang ditingkatkan kualitasnya tidak sesuai dengan umur rencana dikarenakan over tonase diruas jalan tersebut.
 - Banyak ruas jalan yang tidak memenuhi kriteria kelengkapan jalan dikarenakan tidak tersedianya lahan dan adanya bangunan pada damija.
 - Terdapat jembatan yang memerlukan rehabilitasi sedang atau berat sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar.
2. Indeks kecepatan rata-rata perjalanan (indikator kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan)
 - Kurangnya pemahaman masyarakat pengguna jalan akan pentingnya tertib berlalu lintas.
 - Pengaturan dan pengendalian lalu lintas belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Tangerang dikarenakan keterbatasan petugas pengendalian dan penertiban.
 - Terdapat beberapa ruas jalan yang kinerja jalannya terganggu akibat gangguan samping seperti halnya pedagang kaki lima dan parkir kendaraan di bahu jalan yang tidak diperuntukan sebagai ruang parkir.
3. Indeks penanganan permukiman kumuh (indikator persentase permukiman kumuh)

- Keterbatasan kemampuan BKM dalam membuat proposal kegiatan yang belum memadai seperti menyusun RAB dan pembuatan formulir Rencana Penggunaan Dana.
 - Belum adanya kolaborasi antar dinas terkait (DISPERKIMTAN, Dinas PUPR, BPBD, dan DLH) dalam penanganan kumuh di Kota Tangerang.
4. Indeks pelayanan air minum (indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari)
- Tingkat kesadaran akan pentingnya ketersediaan air minum melalui jaringan perpipaan yang masih rendah, sehingga pada saat proses pelaksanaan pembangunan jaringan perpipaan ada beberapa masyarakat yang tidak setuju wilayahnya terbangun.
 - Besarnya anggaran untuk pengembangan pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan di Zona 2 (melayani wilayah Kecamatan Cibodas, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Periuk dan Kecamatan Jatiuwung) dan Zona 3 (melayani wilayah Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Pinang, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan).
 - Perpindahan layanan dari PDAM Tirta Kerta Raharja ke PDAM Tirta Benteng membuat cakupan layanan perpipaan bertambah tetapi tingkat kebocorannya tinggi karena pipa jaringan yang dimiliki masih berbahan PVC.
5. Indeks pelayanan pengolahan limbah domestik (indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik)
- Pengembangan layanan IPAL perumahan terkendala oleh kondisi permukiman yang cukup padat.
 - Kapasitas pengolahan IPAL Tanah Tinggi dan IPLT Bawang yang sudah mencapai batas maksimal pengolahan, sedangkan volume air limbah domestik selalu bertambah setiap tahun.
6. Indeks penanganan banjir dan genangan (Indikator luas banjir dan genangan)
- Terdapat bangunan liar yang menempati sempadan sungai, sehingga menyulitkan ketika akan dilakukan pelebaran maupun normalisasi saluran sungai dan drainase.
 - Banyak masyarakat membuang sampah di sungai sehingga menyebabkan sedimentasi. Kondisi seperti ini banyak ditemui di sepanjang bantaran sungai kali cirarab di kecamatan periuk dan kali sabi di kecamatan cibodas.

- Belum terintegrasi sistem saluran drainase saluran primer-sekunder dan tersier. Tidak teritegrasi saluran ini menyebabkan kesulitan ketika akan membangun saluran drainase yang baru.
- Kurangnya sarana dan sistem drainase yang memadai sebagai pengganti lahan yang mengalami perubahan fungsi tersebut, terlebih apabila perubahan tersebut tidak disertai dengan analisa tentang dampak lingkungan.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan dan pemeliharaan terhdap sarana drainase lingkungan yang menyebabkan sistem drainase lingkungan tidak dapat berfungsi.
- Berubahnya/beralihnya fungsi tata guna lahan/ahli fungsi lahan yang cepat baik di daerah hulu dan kawasan perkotaan, yang semula merupakan daerah resapan air menjadi bangunan, perumahan, industry/pabrik, pertokoan, pergudangan dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan semakin berkurangnya areal yang berfungsi sebagai tempat penampungan air dan resapan air sebelum menuju saluran pembuang.
- Topografi wilayah utara Kota Tangerang yang berada di dataran rendah bahkan sebagian permukaan tanahnya lebih rendah dari permukaan sungai yang kemudian masuk menggenangi lahan permukiman.
- Alih fungsi lahan yang menyebabkan kurangnya resapan air, sehingga menyebabkan meningkatnya debit limpasan air hujan.
- Tidak optimalnya infrastruktur yang ada, seperti pintu-pintu air yang gagal membendung masuknya rob dari hilir.

7. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)

- Masih tingginya tingkat pencemaran air sungai dan situ/danau, tingkat pencemaran udara dan kebisingan, didapat nilai IKA tahun 2023 sebesar 48,67 point dengan kategori “kurang” dan nilai IKU 58,47 point dengan kategori “sedang”.
- Hasil perhitungan IKU masih menggunakan alat yang lama, sehingga kurang tingkat akuratnya.
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait konservasi air.
- Masih rendahnya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap pentingnya Dokumen/Ijin lingkungan, (Air, Udara dan Tanah), masih terdapat beberapa pengelola usaha yang masih di berikan sanksi sebanyak 31 sanksi tertulis maupun paksaan pemerintah.

8. Indeks pelayanan persampahan (indikator tingkat pengelolaan sampah)

- Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dari sumbernya.

- Hasil yang diperoleh dari beberapa teknologi pengelolaan sampah yang ada belum terlalu signifikan dalam pengurangan sampah, harus ada terobosan teknologi yang lebih canggih untuk menekan angka timbulan sampah.
- Belum ada kestabilan harga pada bank sampah, sehingga beberapa masyarakat kurang berpartisipasi.
- Masih kurangnya sistem penanganan sampah di perkotaan.
- Peraturan terkait pengelolaan sampah yang ada belum diterapkan kepada masyarakat, sehingga belum ada punishment yang diterima oleh masyarakat.
- Ketersediaan lahan untuk membuang residu sampah di TPA semakin sempit dan berangsur-angsur habis sehingga usia operasionalnya semakin kritis, itu dikarenakan jumlah sampah yang dibuang ke TPA semakin hari semakin banyak.

D.1.3. Solusi Terhadap Permasalahan

1. Indeks kualitas jalan dan jembatan yang memadai (indikator persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai)
 - Melaksanakan kegiatan fisik yang dirasionalisasi pada Tahun 2023 di tahun berikutnya, guna menyesuaikan target yang belum terlaksana pada Tahun 2023.
 - Penyelesaian proses pembebasan lahan pada tahun sebelumnya / tidak bersamaan dengan tahun pelaksanaan fisik konstruksi.
 - Pelaksanaan lelang dini diawal tahun kegiatan guna mengantisipasi adanya lelang ulang.
 - Peningkatan kualitas jalan dan jembatan dilaksanakan dengan optimalisasi kegiatan pemeliharaan oleh Bidang Operasional dan Pemeliharaan.
 - Adanya kajian atau penerapan teknologi baru terkait dengan pemeliharaan jalan dengan struktur perkerasan hotmix.
 - Menyediakan bangunan pelengkap jalan pada setiap ruas jalan berupa drainase dan trotoar.
 - Menentukan kelas jalan pada seluruh ruas jalan agar sesuai dengan tonase sehingga kualitas jalan sesuai dengan umur rencana.
 - Menggunakan teknologi atau alternatif bahan material lain untuk meningkatkan kualitas jalan.
 - Membangun dan melebarkan drainase dan resapan air (biopori) untuk mencegah genangan air di jalan.
2. Indeks kecepatan rata-rata perjalanan (indikator kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan)

- Daya dukung yang cukup akan kajian secara teknis dan evaluasi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan.
 - Menjalankan secara optimal wadah koordinasi dan komunikasi pemangku kepentingan urusan perhubungan dalam rangka penyelesaian permasalahan transportasi melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - Peningkatan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai kebutuhan dan mengarahkan agar lebih tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas.
 - Melaksanakan operasi gabungan bersama instansi terkait (TNI, POLRI, Satpol PP dll) dalam rangka menjaga kinerja ruas jalan dengan menertibkan para pedagang kaki lima agar berjualan pada tempatnya bukan diruas jalan.
 - Menangani kemacetan pada titik-titik tertentu dengan cara memaksimalkan jumlah anggota pengendali / pengatur lalu lintas yang ada melalui sistem moving sistem regu mobil dan motoris didorong agar anggota dapat bereaksi cepat apabila ada kemacetan segera menangani dengan cepat.
 - Meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan angkutan umum sistem transit dengan cara menambah koridor angkutan umum serta menyediakan angkutan pengumpan serta kemudahan dalam bertransaksi dengan cara transaksi non tunai, dengan tujuan meningkatkan animo masyarakat menggunakan angkutan umum dibanding menggunakan kendaraan pribadi.
3. Indeks penanganan permukiman kumuh (indikator persentase permukiman kumuh)
- Mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada para BKM dalam pembuatan proposal.
 - Melakukan kolaborasi antar dinas terkait (DISPERKIMTAN, Dinas PUPR, BPBD, dan DLH), Kementerian PUPR dan BPPW Provinsi Banten di Kawasan Permukiman Kumuh Kedaung.
4. Indeks pelayanan air minum (indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari)
- Melaksanakan sosialisasi sebelum proses pembangunan jaringan perpipaan air minum, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses pembangunan jaringan.
 - Menyusun Dokumen Review RISPAM, JAKSTRADA dan dokumen terkait data air minum per kelurahan.
 - Pembiayaan pembangunan dilakukan secara bertahap dengan membagi alokasi anggaran antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antara lain melalui Pembangunan IPA Sitanala untuk melayani air minum melalui jaringan perpipaan Zona 2 dimana anggarannya berasal dari Pemerintah Pusat. Persiapan proyek KPBU

(Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) SPAM Regional Karian Serpong diharapkan dapat meningkatkan cakupan layanan air minum melalui jaringan perpipaan di Zona 3.

- Bekerja sama dengan pihak swasta, dalam hal ini PDAM Tirta Benteng menggunakan pola B to B (kerja sama antar Badan Usaha) untuk melayani wilayah Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah.
5. Indeks pelayanan pengolahan limbah domestik (indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik)
- Melakukan penambahan anggaran pada kegiatan pembangunan jamban keluarga pada tahun anggaran selanjutnya.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya ketersediaan sanitasi dasar guna kesehatan lingkungan dan masyarakat.
 - Melakukan revitalisasi instalasi sistem pengolahan air limbah domestik diantaranya revitalisasi IPAL Tanah Tinggi dan IPLT Bawang guna memaksimalkan pengolahan air limbah domestik.
6. Indeks penanganan banjir dan genangan (Indikator luas banjir dan genangan)
- Melakukan penertiban bangunan liar untuk menunjang ketersediaan lahan untuk pelebaran maupun normalisasi saluran sungai / drainase.
 - Melaksanakan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah dibantaran sungai.
 - Melakukan pembangunan drainase perumahan, lingkungan dan makro yang terintergrasi.
 - Membangun sumur-sumur resapan untuk resapan air.
 - Mempertahakan daerah-daerah tangkapan air dan membangun bangunan penampung air berupa embung.
 - Mengevaluasi design terhadap debit dan curah hujan.
 - Evaluasi teknis umur rencana fisik konstruksi (turap dan bangunan pengendali banjir).
 - Perlu tindak lanjut perencanaan detail dari setiap program yang terdapat dalam Master Plan Drainase Berwawasan Lingkungan tersebut di atas. Karena master plan ini masih bersifat kebijakan makro.
 - Dalam pelaksanaan pembangunan program ini perlu melibatkan peran serta masyarakat baik dalam hal pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunannya. Dengan demikian masyarakat akan ikut terlibat dalam pembangunan dan secara otomatis akan ikut memelihara karena merasa ikut memiliki.
 - Untuk pendetailan desain masing-masing bangunan perlu dilakukan pengukuran dan investigasi geoteknik lebih lanjut dan detail.

7. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)

- Upaya meningkatkan Indeks Kualitas Air dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Permukiman dan Pertanahan terkait informasi pencemaran akibat limbah rumah tangga seperti penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah rumah tangga, pembuatan septic tank dan IPAL komunal di wilayah tercemar, dan peningkatan upaya penanganan tinja.
- Untuk menjamin hasil yang lebih akurat maka di perlukan pemeliharaan alat stasiun pemantau kualitas udara secara berkala. Dari hasil pemeliharaan terakhir diperlukan penggantian sensor untuk setiap parameter. Alat pemantauan kualitas udara terdapat di 2 (dua) stasiun pos pemantau udara otomatis, antaranya berlokasi di Jl. Benteng betawi, Jl. Sudirman (mewakili sektor transportasi) dan Kantor Sudimara Barat (mewakili sektor permukiman dan perkantoran).
- Melakukan pembinaan terkait konservasi air berupa pembuatan sumur injeksi dan biopori super jumbo kepada masyarakat, sehingga mengubah pola pikir masyarakat untuk membantu memelihara, melindungi, dan mengelola sumber daya air agar mencegah air kotor yang akan mencemari ketersediaan air tanah.
- Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup kepada perusahaan yang ada di Kota Tangerang.

8. Indeks pelayanan persampahan (indikator tingkat pengelolaan sampah)

- Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat secara berkelanjutan dalam menerapkan gerakan 3R, dengan melakukan pembinaan pengelolaan sampah kepada sekolah-sekolah atau masyarakat di wilayah Kota Tangerang.
- Membuat peraturan terkait bank sampah dari aturan pendirian bank sampah, pengelola bank sampah sampai dengan daftar harga sampah yang sesuai dengan harga pasar, agar masyarakat tertarik untuk ikut berpartisipasi menjadi nasabah bank sampah.
- Saat ini jumlah bank sampah yang ada di Kota Tangerang sebanyak 86 lokasi.
- Menggencarkan dan memfasilitasi pelatihan kepada masyarakat dalam pengolahan sampah organik dengan biokonversi maggot untuk meningkatkan pengurangan sampah secara signifikan.
- Mengoptimalisasikan kinerja TPS 3R guna meningkatkan efektifitas operasional dan pemeliharannya.

- Kota Tangerang sedang mempersiapkan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) yang sampai dengan saat ini telah menjalani proses finalisasi perjanjian kerja sama dengan badan usaha pelaksana, penyediaan lahan serta sudah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait.

E. Pengukuran Kinerja Tujuan 5

Tabel II-36 Capaian Kinerja Tujuan 5 Tahun 2023

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing

Indikator	Satuan	2023			Predikat Capaian	Target Akhir RPJMD (2023)	Target Akhir - Realisasi 2023
		Target	Realisasi	% Capaian			
1 Nilai PDRB ADHK	Rp. Trilyun	115,94 - 118,57	119,06	102,69%	Tercapai (Melebihi Target)	115,94 - 118,57	3,12
2 Indeks pengeluaran (daya beli)	Point	82,73 - 83,91	83,21	100,58%	Tercapai (Melebihi Target)	82,73 - 83,91	0,48
Rata-rata Capaian				101,64%			

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 5: Meningkatkan Kualitas Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Tahun 2023 yang dinilai melalui 2 indikator kinerja adalah sebesar 101,64% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun realisasi indikator Tujuan 5: Meningkatkan Kualitas Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Nilai PDRB ADHK Tahun 2023 mencapai Rp119,06 Trilyun lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu Rp115,94 Trilyun, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 102,69% atau dengan predikat tercapai melebihi target. Realisasi Nilai PDRB ADHK Tahun 2023 yang mencapai Rp119,06 Trilyun jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu Rp115,94 Trilyun maka terdapat selisih sebesar Rp-3,12 Trilyun. Sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi capaian indikator ini pada akhir periode RPJMD dapat tercapai melampaui yang ditargetkan.
- Realisasi Indeks Pengeluaran (daya beli) Tahun 2023 mencapai 83,21 point lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 82,73 point, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100,58% atau dengan predikat tercapai melebihi target. Realisasi Indeks Pengeluaran (daya beli) Tahun 2023 yang mencapai 83,21 point jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 82,73 point maka terdapat selisih sebesar 0,48 point. Sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi capaian indikator ini pada akhir periode RPJMD dapat tercapai melampaui yang ditargetkan.

E.1. Uraian Pencapaian Kinerja

Nilai PDRB ADHK Tahun 2023 mencapai Rp119,06 Triliun dan mengalami peningkatan Rp6,28 Trilyun (laju pertumbuhan mencapai 5,57%) dari Tahun 2022 yang mencapai Rp112,78 Trilyun. Realisasi Nilai PDRB ADHK Tahun 2022 yang mencapai Rp119,06 Triliun tersebut diatas target yang telah ditetapkan yaitu 115,94 - 118,57 Trilyun, sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 102,69%.

Seiring dengan peningkatan nilai PDRB ADHK, pada Tahun 2023, Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Tangerang mencapai 5,57% atau turun dari Tahun 2022 yang sebesar 5,98%.

Berikut diuraikan nilai PDRB ADHK Kota Tangerang Tahun 2019-2023 yang menggambarkan kinerja perekonomian.

Kode	Lapangan Usaha	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022*	2023**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp. Jt	1.694.004,10	1.744.673,70	1.746.000,00	1.811.680,00	1.844.070,00
B.	Pertambangan dan Penggalian	Rp. Jt	0	0	0	0	0
C.	Industri Pengolahan	Rp. Jt	39.566.347,70	37.527.630,00	39.039.920,00	39.045.450,00	40.515.820,00
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	Rp. Jt	185.037,20	181.390,00	193.230,00	203.840,00	206.410,00
7	Pengadaan Listrik dan Gas	Rp. Jt	91.121,40	99.850,80	111.420,00	115.950,00	122.220,00
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp. Jt	8.219.964,00	8.184.620,00	8.917.960,00	9.152.500,00	9.236.400,00
F.	Konstruksi	Rp. Jt	14.679.063,30	14.503.429,10	14.834.200,00	15.143.400,00	15.692.320,00
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Jt	16.724.276,00	9.095.692,00	9.171.870,00	14.157.560,00	17.049.710,00
H.	Transportasi dan Pergudangan	Rp. Jt	1.746.490,80	1.651.820,00	1.708.370,00	1.768.470,00	1.860.260,00
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp. Jt	9.260.963,20	10.141.680,90	10.717.730,00	11.045.690,00	11.613.990,00
J.	Informasi dan Komunikasi	Rp. Jt	3.094.442,30	3.286.160,00	3.509.710,00	3.566.270,00	3.521.820,00
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp. Jt	7.691.166,60	8.178.790,00	8.508.390,00	8.733.860,00	8.921.510,00
L.	Real Estat	Rp. Jt	1.204.897,70	1.189.595,50	1.174.610,00	1.186.470,00	1.249.160,00
M,N.	Jasa Perusahaan	Rp. Jt	1.252.340,30	1.247.957,10	1.246.580,00	1.252.070,00	1.275.610,00
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp. Jt	2.518.896,30	2.670.790,00	2.642.740,00	2.644.060,00	2.774.900,00
P.	Jasa Pendidikan	Rp. Jt	1.056.361,10	1.226.010,00	1.344.200,00	1.356.030,00	1.453.430,00
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp. Jt	1.571.026,20	1.524.366,70	1.546.770,00	1.596.740,00	1.722.700,00
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	Rp. Jt	1.694.004,10	1.744.673,70	1.746.000,00	1.811.680,00	1.844.070,00
	PDRB ADHK	Rp. Jt	110.556.398,20	102.454.455,80	106.413.700,00	112.780.040,00	119.060.330,00

Berdasarkan data tersebut di atas, sektor perekonomian yang dominan di Kota Tangerang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Industri Pengolahan;
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan;
- Konstruksi;
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
- Jasa Keuangan dan Asuransi.

Secara keseluruhan, perekonomian Tahun 2023 sudah sepenuhnya pulih, dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 yang positif 5,57% mengindikasikan proses pemulihan ekonomi sudah terjadi.

Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, indeks pengeluaran (daya beli) Tahun 2023 mencapai 83,21 point dan mengalami peningkatan 0,87 point (laju pertumbuhan mencapai 1,06%) dari Tahun 2022 yang mencapai 82,34 point. Indeks pengeluaran (daya beli) Tahun 2023 yang mencapai 83,21 point tersebut mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 82,73-83,91 point, sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100,58%.

E.1.1. Upaya yang Telah Dilakukan

1. Program pemberian bantuan modal kepada UKM dengan mekanisme kredit ringan bagi kelompok usaha.
2. Program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.
3. Berbagai program pemberdayaan UMKM dan pasar murah yg masif serta inovasi belanja gampang dengan mobil si jampang
4. Subsidi transportasi massal gratis (si Tayo dan si Benteng)
5. Peningkatan iklim investasi yang kondusif
 - Menyusun regulasi dan perangkat untuk menyederhanakan sistem dan mempermudah pelayanan investasi, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta mengembangkan insentif dan disinsentif investasi
6. Pengembangan, penataan, dan peningkatan industri, perdagangan, UMKM dan koperasi, pariwisata, serta pertanian dan perikanan
 - Mengembangkan sarana, prasarana dan fasilitas pasar tradisional yang bersih dan modern, tata niaga perdagangan serta membina pelaku usaha perdagangan
 - Mengembangkan produk industri kecil menengah (IKM) yang kreatif dan inovatif

- Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi
- Mengembangkan pemberdayaan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana prasarana produksi, kualitas produk yang kreatif dan inovatif, promosi dan pemasaran usaha mikro sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi
- Mengembangkan potensi, destinasi, promosi, sumber daya manusia, fasilitas dan jasa pendukung pariwisata sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi
- Mengembangkan sumber daya (fasilitas, peralatan, sanggar, SDM) kebudayaan serta mengembangkan festival budaya dan pagelaran kesenian daerah, taman budaya, museum kota dan kawasan cagar budaya
- Mengembangkan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan serta kesehatan hewan sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi.

E.1.2. Permasalahan yang Dihadapi

1. Daya beli masyarakat belum memadai.
2. Pelayanan perijinan dan investasi belum optimal.
3. Peran UKM dan Koperasi sebagai pelaku usaha ekonomi kerakyatan belum tumbuh dan berkembang dengan baik.
4. Pengelolaan pariwisata belum optimal.
5. Pengelolaan perdagangan belum optimal.
6. Kualitas produk industri dan IKM yang belum berdaya saing.

E.1.3. Solusi Terhadap Permasalahan

1. Mengadakan program pemberian bantuan modal kepada UKM dengan mekanisme kredit ringan bagi kelompok usaha.
2. Meringankan beban hidup masyarakat dan menjaga daya beli masyarakat antara lain dengan pemberian subsidi angkutan umum (Angkot Benteng), insentif penghapusan denda pajak daerah.
3. Mensosialisasikan dan menerapkan penyederhanaan sistem dan mempermudah pelayanan investasi, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta meningkatkan implementasi insentif dan disinsentif investasi.
4. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas pasar tradisional yang bersih dan modern, tata niaga perdagangan serta meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan (Meningkatkan kualitas protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru (AKB) dalam pengelolaan perdagangan sejalan dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi.
5. Meningkatkan kualitas produk industri kecil menengah (IKM) yang kreatif dan inovatif (Mengembangkan dan meningkatkan fasilitasi dan kapasitas

- pemberdayaan IKM sejalan dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi).
6. Meningkatkan kualitas pemberdayaan dan perlindungan koperasi sejalan dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi.
 7. Meningkatkan kualitas pemberdayaan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana prasarana produksi, kualitas produk yang kreatif dan inovatif, promosi dan pemasaran usaha mikro sejalan dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi.
 8. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas potensi, destinasi, promosi, sumber daya manusia, fasilitas dan jasa pendukung pariwisata sejalan dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi.
 9. Meningkatkan kualitas sumber daya (fasilitas, peralatan, sanggar, SDM) kebudayaan serta mengembangkan festival budaya dan pagelaran kesenian daerah, taman budaya, museum kota dan kawasan cagar budaya.
 10. Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan serta kesehatan hewan sejalan dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi.

F. Kinerja Sasaran 1

Tabel II-37 Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Indikator	Satuan	2023			Predikat Capaian	Target Akhir RPJMD (2023)	Target Akhir - Realisasi 2023
		Target	Realisasi	% Capaian			
1 Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,72	98,09	100,38%	Tercapai (Melebihi Target)	97,72	0,37
2 Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	99	99,37	100,37%	Tercapai (Melebihi Target)	99	0,37
Rata-rata Capaian				100,38%			

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Tahun 2023 yang dinilai melalui 2 indikator kinerja adalah sebesar 100,38% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun realisasi indikator Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A Tahun 2023 mencapai 98,09% lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 97,72%, sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 100,38% atau dengan

predikat tercapai melebihi target. Realisasi Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A Tahun 2023 yang mencapai 98,09% jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 97,72% maka terdapat selisih sebesar 0,37%, artinya target akhir RPJMD sedianya telah terpenuhi bahkan terlampaui.

- Realisasi Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B Tahun 2023 mencapai 99,37% lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 99,00%, sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 100,37% atau dengan predikat tercapai melebihi target. Realisasi Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B Tahun 2023 yang mencapai 99,37% jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 99,00% maka terdapat selisih sebesar 0,37%, artinya target akhir RPJMD sedianya telah terpenuhi bahkan terlampaui.

F.1. Uraian Pencapaian Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Capaian Angka Partisipasi Murni pada tahun 2023 ini mencapai 98,09%, dimana target capaian pada tahun 2023 ialah 97,72%, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa target pada tahun 2023 dapat terpenuhi. Data ini berdasarkan dari sistem Data Pokok Pendidik (Dapodik) dan emis (Sistem yang bersumber dari Kementerian Agama), hal ini menunjukkan tercapainya Angka Partisipasi Murni Kota Tangerang dari target yang telah ditetapkan.

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terjadi kenaikan, dimana Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A pada tahun 2022 sebesar 97,93%. Hasil evaluasi realisasi capaian APM SD/MI/Paket A selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat, namun pada tahun 2020, terjadi penurunan Angka Partisipasi, hal ini dikarenakan terjadinya pandemi covid-19.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A ini dilihat dari populasi usia siswa sekolah 7–12 tahun yang ada di Kota Tangerang dan warga Kota Tangerang yang bersekolah di luar Kota Tangerang. Hal ini dikarenakan letak geografis Kota Tangerang yang bersebelahan dengan Jakarta dan kota/kabupaten di luar Kota Tangerang, dengan pembandingan terhadap jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun yang ada di Kota Tangerang.

F.1.1. Upaya yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A adalah sebagai berikut:

1. Dengan memberikan bantuan kepada sekolah dalam meningkatkan operasional sekolah serta memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa tidak mampu;
2. Terus berupaya dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah;
3. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Upaya tersebut diimplementasikan melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 yang mendukung pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, yaitu sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 419.528.494.152	Rp 413.059.223.539
1	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp 1.057.790.000	Rp 979.210.000
		1 Paket	1 Paket
2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp 42.838.591.250	Rp 42.385.668.022
	Beasiswa Non Personal Peserta Didik Kota Tangerang Jenjang MIN	1 MIN	1 MIN
	Beasiswa Non Personal Peserta Didik Kota Tangerang Jenjang SDSdam MTsS	8444 Siswa	8444 Siswa
	Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) jenjangSDN	298 SDN	298 SDN
	Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kinerja Jenjang SDN	41 SDN	41 SDN
	Program Tangerang Cerdas jenjang SD	10000 Siswa	10000 Siswa
3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 221.329.733.643	Rp 216.143.028.826
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD/MI penerima BPJS Ketenagaan	2924 Orang	2924 Orang
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD/MI penerima insentif	8704 Orang	4512 Orang
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SDN Non PNS penerima Kesejahteraan	2923 Orang	2923 Orang
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp107.911.850	Rp 106.511.850
	Program sekolah Sehat dan Program Sekolah Literat	445 Sekolah	445 Sekolah
5	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (DAK)	Rp152.808.403.009	Rp 152.123.003.871
	Jumlah sekolah yang diberikan bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	298 Sekolah	298 Sekolah
6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp213.241.300	Rp 188.063.900
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang di tingkatkan kompetensinya	300 Orang	300 Orang

F.1.2. Permasalahan Yang Dihadapi

Terdapat permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A, diantaranya:

- Masih kurangnya suatu sistem pendataan untuk menghitung siswa-siswa Kota Tangerang yang bersekolah di luar Kota Tangerang.

F.1.3. Solusi Terhadap Permasalahan

Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, Dinas Pendidikan telah melakukan kegiatan dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang mendukung langsung terhadap pencapaian Angka

Partisipasi Murni SD/MI/Paket A dengan lebih mengutamakan kegiatan prioritas sebagaimana tersebut di atas dengan kegiatan lanjutan, seperti :

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - ✚ Pengadaan Mebel Sekolah dengan output pengadaan mebel Sekolah yang disediakan 1 Paket.
 - ✚ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar, dengan output diantaranya :
 - pemberian bantuan Biaya Operasional Pendidikan kepada 298 SDN dan 1 MIN dan diberikan pula kepada 8444 siswa sekolah swasta.
 - Pemberian Program Tangerang Cerdas untuk 10000 Siswa jenjang Sekolah Dasar dengan besaran Rp. 80.000/siswa/bulan
 - Pemberian bantuan untuk mendukung 50 sekolah inklusi jenjang menengah pertama dengan anggaran Rp. 50.000.000,-/sekolah/semester
 - ✚ Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan output sebagai berikut :
 - Pemberian insentif untuk 4512 tenaga pendidik dan kependidikan
 - Pemberian kesejahteraan kepada 2923 pendidik dan tenaga kependidikan SDN Non PNS yang ada di Sekolah Dasar Negeri
 - Pemberian BPJS Ketenagaan kepada 2924 pendidik dan tenaga kependidikan
 - ✚ Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan output melaksanakan program lomba sekolah Sehat dan program sekolah literat.
 - ✚ Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, dengan output pemberian Bantuan Operasional Sekolah kepada 298 Sekolah Dasar Negeri.
 - ✚ Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dalam meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

F.2. Uraian Pencapaian Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B)

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B dengan target tahun 2023 sebesar 99 Persen dan direalisasikan sebesar 99,37 Persen dengan capaian yang sudah melebihi target. Data ini berdasarkan dari sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Emis. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 terjadi peningkatan, dimana Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B pada tahun 2021 sebesar 99,00 persen. Hasil evaluasi realisasi capaian APM SD/MI/Paket A selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat, namun

pada tahun 2020, terjadi penurunan Angka Partisipasi, hal ini dikarenakan terjadinya pandemic covid-19.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B ini dilihat dari populasi usia siswa sekolah 13–15 Tahun yang ada di Kota Tangerang dan warga Kota Tangerang yang bersekolah di luar Kota Tangerang, hal ini dikarenakan letak geografis Kota Tangerang yang bersebelahan dengan Kota dan Kabupaten diluar Kota Tangerang, serta pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama, beberapa siswa memilih untuk melanjutkan sekolah ke Pesantren atau Sekolah Menengah *Boarding School* lainnya yang berada di luar Kota Tangerang. Adapun sebagai pembandingan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B yaitu terhadap jumlah penduduk usia sekolah 13-15 tahun yang ada di Kota Tangerang.

F.2.1. Upaya yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B adalah sebagai berikut:

- ❖ Dengan memberikan bantuan kepada sekolah dalam meningkatkan operasional sekolah serta memberikan bantuan kepada siswa tidak mampu;
- ❖ Terus berupaya dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah;
- ❖ Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Upaya tersebut diimplementasikan melalui kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp207.779.241.848	Rp203.026.028.155
	1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp47.155.571.000	Rp45.471.216.015
	Jumlah sekolah penerima bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik	80 Sekolah	80 Sekolah
	Jumlah sekolah penerima BOSDA Inklusif	13 Sekolah	13 Sekolah
	Jumlah sekolah penerima BOSDA Reguler	33 Sekolah	33 Sekolah
	2 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp80.979.649.548	Rp78.372.145.921
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP/MTs/SKH penerima BPJS ketenagakerjaan	666 Orang	666 Orang
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP/MTs/ SKH penerima Insentif	4105 Orang	4105 Orang
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMPN Non PNS penerima Kesejahteraan	664 Orang	664 Orang
	3 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Rp116.811.400	Rp116.811.400

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi
	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang di tingkatkan kompetensinya	300 Orang	300 Orang
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp230.221.900	Rp228.483.900
	Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba	100 Sekolah	100 Sekolah
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp77.102.880.000	Rp76.781.245.919
	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Reguler	34 Sekolah	34 Sekolah

F.2.2. Permasalahan Yang Dihadapi

Untuk realisasi angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SMP sederajat terdapat permasalahan yang dihadapi, untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B yaitu masih kurangnya suatu sistem pendataan untuk menghitung siswa-siswa Kota Tangerang yang bersekolah diluar Kota Tangerang.

F.2.3. Solusi Terhadap Permasalahan

Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang mendukung langsung terhadap pencapaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B dengan lebih mengutamakan kegiatan prioritas sebagaimana tersebut diatas dengan kegiatan lanjutan seperti :

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan sub kegiatan dan output sebagai berikut :
 - ✚ Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), dengan output Penyusunan rencana pembangunan sekolah baru Jenjang SMP, sebagai rencana akan adanya penambahan sekolah SMPN.
 - ✚ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, dengan output sebagai berikut :
 - Pemberian bantuan operasional sekolah untuk 33 sekolah jenjang menengah pertama.
 - Pemberian bantuan untuk mendukung 13 sekolah inklusi jenjang menengah pertama dengan anggaran Rp. 100.000.000,- /sekolah/semester
 - Pemberian bantuan berupa Tangerang Cerdas kepada 5000 Siswa menengah pertama dengan anggaran Rp.100.000,-/siswa/bulan

- ✚ Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan output sebagai berikut :
 - Pemberian insentif bagi 4105 pendidik dan kependidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama
 - Pemberian kesejahteraan bagi 664 pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS yang ada pada sekolah Negeri pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama
 - Pemberian BPJS ketenagakerjaan bagi 666 pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama
- ✚ Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- ✚ Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan output melaksanakan program lomba sekolah Sehat dan program sekolah literat.

G. Kinerja Sasaran 2

Tabel II-38 Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023

Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator	Satuan	2023			Predikat Capaian	Target Akhir RPJMD (2023)	Target Akhir - Realisasi 2023
		Target	Realisasi	% Capaian			
1 Angka kematian bayi (AKB)	Orang per 1.000 kelahiran hidup	1,07	1,08	99,07%	Tidak Tercapai	1,07	0,01
2 Angka kematian ibu (AKI)	Orang per 100.000 kelahiran hidup	12,13	20,07	34,54%	Tidak Tercapai	12,13	7,94
3 Angka kesakitan	Orang per 100.000 penduduk	182	182	100,00%	Tercapai (Sesuai Target)	182	0
Rata-rata Capaian				77,87%			

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 yang dinilai melalui 3 indikator kinerja adalah sebesar 77,87% dengan kategori Tinggi. Adapun realisasi indikator Sasaran 2:

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Angka kematian bayi (AKB) Tahun 2023 mencapai 1,08 orang per 1.000 kelahiran hidup, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 1,07 orang per 1.000 kelahiran hidup, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 99,07% atau dengan predikat tidak tercapai. Realisasi Angka kematian bayi (AKB) Tahun 2023 yang mencapai 1,08 orang per 1.000 kelahiran hidup jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 1,07 orang per 1.000 kelahiran hidup maka terdapat selisih sebesar 0,01. Sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi capaian indikator ini pada akhir periode RPJMD tidak dapat tercapai sesuai yang ditargetkan.
- Realisasi Angka kematian ibu (AKI) Tahun 2023 mencapai 20,07 orang per 100.000 kelahiran hidup, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 12,13 orang per 100.000 kelahiran hidup, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 34,54% atau dengan predikat tidak tercapai. Realisasi Angka kematian ibu (AKI) Tahun 2023 yang mencapai 20,07 orang per 100.000 kelahiran hidup jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 12,13 orang per 100.000 kelahiran hidup maka terdapat selisih sebesar 7,94. Sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi capaian indikator ini pada akhir periode RPJMD tidak dapat tercapai sesuai yang ditargetkan.
- Realisasi Angka Kesakitan Tahun 2023 mencapai 182 orang per 100.000 penduduk, sesuai target yang ditetapkan yaitu 182 orang per 100.000 penduduk, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100,00% atau dengan predikat tercapai sesuai target. Realisasi Angka Kesakitan Tahun 2023 yang mencapai 182 orang per 100.000 penduduk jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 182 orang per 100.000 penduduk maka tidak terdapat selisih. Sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi capaian indikator ini pada akhir periode RPJMD dapat tercapai sesuai yang ditargetkan.

G.1. Uraian Pencapaian Kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Capaian realisasi AKB pada 2023 adalah 1,08 hampir mencapai target 1,07. Meskipun realisasinya berada di bawah target, karena indikator ini merupakan indikator negatif maka pencapaian kinerja yang mendekati target tersebut dapat dianggap cukup baik.

Berbeda dengan indikator kinerja AKI yang gap capaiannya sangat signifikan tersebut, menandakan adanya masalah serius dalam sistem kesehatan terkait perawatan ibu selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Kenaikan yang besar dalam AKI dari target menunjukkan bahwa langkah-langkah yang ada belum cukup efektif untuk mengatasi penyebab kematian ibu.

Meskipun terjadi peningkatan kinerja AKB dari tahun 2019 hingga 2023, yang menunjukkan perbaikan dalam derajat kesehatan masyarakat terkait kematian bayi, namun terjadi kegagalan yang signifikan dalam mencapai target terkait AKI. Sementara AKB hampir mencapai target pada tahun 2023 dengan persentase realisasi sebesar 99,07%, AKI justru mengalami penurunan yang dramatis, jauh dari target yang ditetapkan dengan persentase realisasi yang rendah 34,54%.

Ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pencapaian kinerja antara kedua indikator tersebut, dengan keberhasilan yang dicapai dalam mengurangi angka kematian bayi namun kegagalan dalam mengendalikan angka kematian ibu. Diperlukan langkah-langkah yang lebih besar dan lebih efektif untuk mengatasi masalah terkait kesehatan ibu agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan memastikan kesejahteraan ibu dan bayi di masa mendatang.

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa kematian ibu di Kota Tangerang sebagian besar dikarenakan perdarahan dan pre-eklampsia (PEB) yaitu kondisi tekanan darah ibu hamil meningkat disertai adanya protein di dalam urine yang diduga dipicu oleh plasenta janin yang tidak berfungsi atau berkembang dengan baik. Sementara kematian bayi di Kota Tangerang sebagian besar dikarenakan asfiksia yaitu masalah sistem pernapasan yang diakibatkan oleh rendahnya kadar oksigen di dalam tubuh bayi yang terjadi sebelum, selama dan setelah proses persalinan.

G.1.1. Upaya yang Telah Dilakukan

Upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB dan AKI berdasarkan laporan bidang kesehatan masyarakat Nomor 400/01713-Kesmas/II/2024 yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal. Peraturan Walikota ini memuat tentang alur rujukan, tata cara rujukan, komunikasi dan informasi sistem rujukan, pembinaan jejaring rujukan, pembiayaan dan audit terhadap kasus kematian maternal dan neonatal.
2. Penerapan Sistem Rujukan Ibu dan Bayi "SIJARIEMAS" dan Call Center SIJARIEMAS yang siap mengawal rujukan kegawatdaruratan selama 24 jam 7 hari seminggu, yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016, diharapkan mampu mengurangi rujukan touring hospital dan dapat menjembatani komunikasi antara perujuk dan tempat rujukan.
3. Penerapan *Universal Health Coverage* (UHC) pada tanggal 1 Maret 2017, dimana setiap warga Kota Tangerang dijamin pembiayaan kesehatannya melalui kepesertaan JKN-KIS, termasuk di dalamnya akses pelayanan persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

4. Fasilitas Ambulan Gratis Pemerintah Kota Tangerang yang siaga 24 jam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang agar mudah mengakses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan.
5. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal melalui *workshop* kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
6. Penyusunan Buku pedoman SOP Gawat Darurat Maternal dan Neonatal.
7. Pendampingan klinis untuk rumah sakit dan Puskesmas PONED dalam hal tata laksana kegawatdaruratan maternal dan neonatal yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola klinis pada fasilitas kesehatan.
8. CAGEUR JASA (Colaborasi Kunjungan Keluarga Terintegrasi Keluarga Sehat) adalah pelayanan ke rumah warga oleh tenaga kesehatan dengan tidak membedakan status kesehatannya.
9. Pendampingan Ibu hamil dan Balita dengan memperkuat Kader SRIKANDI (Sedari Dini Kawal Ibu Hamil dan Balita).
10. Pembentukan 264 Kelas Ibu hamil dan 117 Kelas Ibu Balita tersebar di seluruh Puskesmas se-Kota Tangerang untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan ibu balita.
11. Pemanfaatan Aplikasi EMAK IDEP (Sistem Pemantauan Kehamilan Terintegrasi dan Terpadu) merupakan pendataan, pemantauan, dan rujukan terencana ibu hamil dalam rangka mempermudah pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak, yang saat ini menjadi E-Kohort KIA oleh Kementerian Kesehatan.
12. Pemetaan kemampuan fasilitas kesehatan dan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir tahun 2023 antara Dinas Kesehatan dengan seluruh Fasilitas Kesehatan se-Kota Tangerang, Organisasi Profesi IDI, IDAI, POGI, IBI, PMI dan BPJS Kesehatan.
13. Perjanjian Kerjasama antara pemerintah daerah dengan organisasi profesi IDAI dan POGI tentang Pendampingan Tenaga Ahli di Puskesmas se-Kota Tangerang.
14. Pelatihan USG terbatas dan skrining resiko tinggi ibu hamil untuk dokter Puskesmas se-Kota Tangerang.
15. Penyediaan layanan USG 2D di seluruh Puskesmas se-Kota Tangerang.

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian indikator AKB dan AKI pada tahun 2023 mencakup berbagai aspek strategis dan implementasi program. Dibawah ini merupakan tabel yang menggambarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkontribusi yaitu sebagai berikut:

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	329.983.000	314.661.498
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	329.983.000	314.661.498
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.600.000	45.334.000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	231.659.000	219.603.498
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	49.724.000	49.724.000
TOTAL		329.983.000	314.661.498

G.1.2. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Beban tugas bidan yang banyak (Bidan menjadi bendahara, PPTK)
2. Pelaksanaan Antenatal Care (ANC) terpadu belum optimal
3. Kompetensi petugas belum merata dalam penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir
4. Alat kesehatan di Puskesmas belum lengkap sesuai PMK 43 tahun 2019.
5. Adanya ibu hamil warga pendatang (urbanisasi) dan tidak mempunyai dokumen kependudukan serta jaminan kesehatan
6. Kurangnya peran serta masyarakat dalam penurunan AKI
7. Keterbatasan fasilitas sarana prasaranan Rumah Sakit Rujukan (ICU, NICU, PICU, bank darah)
8. Rendahnya pengetahuan ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya ANC dan tanda bahaya ibu hamil, dan bayi baru lahir.

G.1.3. Solusi Terhadap Permasalahan

1. Tim TPCB (Tim Pembina Cluster Binaan) secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi kepada setiap FKTP agar memberikan pelayanan ANC, persalinan, nifas dan kegawatdaruratan sesuai standar
2. Peningkatan kapasitas dokter umum dan bidan dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
3. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir
4. Kesiapan RS dalam penanganan komplikasi ibu dan bayi (tersedia tim PONEK)
5. Ketersediaan UTD (Unit Transfusi Darah)/BDRS (Bank Darah Rumah Sakit)

6. Pelatihan tim PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif)
7. Penguatan tata kelola program, tata kelola manajemen dan tata kelola klinis
8. Pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi E-Kohort EMAK IDEP yaitu inovasi pendataan, pemantauan dan rujukan terencana ibu hamil dalam rangka mempermudah pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak.

G.2. Uraian Pencapaian Kinerja Angka Kesakitan

Berdasarkan hasil 13 penyebab utama kematian diseluruh dunia pada beberapa tahun terakhir tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu dari dan penyebab paling utama kematian karena infeksi tetapi pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 TBC menjadi penyebab kedua kematian karena infeksi. Secara global pandemi COVID-19 menyebabkan kemunduran terhadap layanan dan pengurangan beban TBC. Dampak paling jelas adalah pada penurunan orang yang baru didiagnosis TBC dan dilaporkan dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Indonesia menempati peringkat ke-3 dunia dalam kasus tuberkulosis (TBC) setelah India dan China dengan penemuan kasus 845.000 orang pada tahun 2020. Sebesar 2/3 dari total kasus TBC ada di Pulau Jawa dan Bali. Kelompok yang rentan terhadap TBC antara lain gizi kurang, warga binaan pemasyarakatan, pekerja tambang, orang dengan penurunan sistem imun, penderita HIV, pasien DM dan perokok.

Ada tujuh prioritas masalah TBC di Indonesia yang dikelompokkan berdasarkan tahapan layanan kesehatan yang berkesinambungan yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang terdiagnosis tuberkulosis tetapi tidak memulai pengobatan;
2. Orang dengan gejala Tuberkulosis yang tidak mencari pengobatan;
3. Orang dengan Tuberkulosis yang datang ke fasilitas kesehatan tetapi tidak didiagnosis;
4. Orang yang terdiagnosis Tuberkulosis dan diobati oleh pemberi layanan yang kesehatan tetapi tidak dilaporkan pada program;
5. Orang dengan pengobatan Tuberkulosis yang terlaporkan tetapi tidak sembuh atau tidak menyelesaikan pengobatannya;
6. Orang yang terinfeksi Tuberkulosis atau berisiko tinggi menjadi sakit Tuberkulosis.

Kota Tangerang melakukan upaya pencegahan dan pengendalian TBC dengan mengacu kepada Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia 2020-2024 dan dasar hukum yang berkaitan dengan TBC lainnya. Strategi yang dilakukan yaitu:

1. Penguatan kepemimpinan program berbasis kabupaten/kota
2. Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien
3. Pengendalian infeksi dna optimalisasi pemberian pengobatan pencegahan TBC
4. Pemanfaatan hasil riset dan teknologi skrining, diagnosis dan tatalaksana TBC
5. Peningkatan peran serta komunitas, mitra dan multisektor lainnya dalam eliminasi TBC
6. Penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan

Peningkatan pada penemuan kasus (insiden rate) TBC tahun 2021 di Kota Tangerang dicapai melalui aktif dan massif-nya upaya upaya penemuan kasus melalui skrining dan investigasi kontak dimasyarakat dengan melibatkan organisasi profesi, lintas sektor, organisasi non pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kader ASMARA TBC. Selain itu dengan adanya edaran dari Kemenkes RI nomor HK.02.02/III.I/936/2021 pada tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan Alur Diagnosis dan Pengobatan Tuberkulosis di Indonesia maka penegakkan diagnosis TBC dan TBC resisten obat dapat dilakukan lebih dini, akurat dan lebih cepat untuk mengetahui resistensi obat TBC menggunakan alat tes cepat molekuler.

Angka Kesakitan (Incidence Rate TBC) Tahun 2023 mencapai 182 orang per 100.000 penduduk dan mengalami penurunan -1,60 orang per 100.000 penduduk (laju pertumbuhan mencapai -0,87%) dari Tahun 2022 yang mencapai 183,94 orang per 100.000 penduduk. Angka Kesakitan (Incidence Rate TBC) Tahun 2023 yang mencapai 182 orang per 100.000 penduduk tersebut sesuai target yang telah ditetapkan di Tahun 2023 yaitu 182 orang per 100.000 penduduk, sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100,00%.

G.2.1. Upaya yang Telah Dilakukan

Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi Angka Kesakitan (Incidence Rate TBC) Tahun 2023, yaitu:

1. Penguatan jejaring pelayanan TBC antara swasta dan pemerintah (DPPM/ district public private mix) dan bekerjasama dengan berbagai organisasi profesi melalui koalisi organisasi profesi indonesia untuk penanggulangan TBC (KOPI TBC) sehingga Kota Tangerang mendapatkan nilai baik ditingkat nasional dalam jejaring pelayanan swasta dan pemerintah serta penghargaan keterlibatan multi sektor dalam percepatan eliminasi TBC-HIV
2. Melakukan inovasi dalam investigasi kontak dengan menyediakan aplikasi aksi skrining mandiri TBC berbasis masyarakat (ASMARA TBC) yang mudah digunakan oleh kader
3. Melakukan pendampingan di kelas kecil bagi fasilitas kesehatan dalam pencatatan dan pelaporan kasus sehingga meningkatkan notifikasi kasus

4. Melakukan pemeriksaan PCR terhadap pasien-pasien di poli TBC dan sebaliknya melakukan pemeriksaan TBC pada pasien poli ILI (*Influenza Like Illness*) dengan keluhan batuk tetapi negatif PCR (saat pandemi)
5. Penyediaan jejaring laboratorium TCM untuk TBC dan HIV di 16 faskes
6. Melakukan inovasi kembali yang diberikan nama “Ransel TBC” (Gerakan Bersama Menuju Eliminasi Tuberkulosis) yaitu dengan peningkatan peran serta komunitas, mitra dan multisektor lainnya dengan melibatkan sektor pendidikan untuk melakukan skrining TBC.
7. Melakukan ACF (*Active case finding*) di populasi beresiko.

Upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pencegahan pada indikator kinerja ini tentunya ada dukungan program. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang menggambarkan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan.

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.117.171.500	523.639.500
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.117.171.500	523.639.500
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.922.291.500	331.657.500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	194.880.000	191.982.000

G.2.2. Permasalahan Yang Dihadapi

Berdasarkan laporan hasil ACF (*Active Case Finding*) kontak serumah pada tahun 2023 diketahui bahwa hasil penemuan kasus baru pada dari individu yang sebelumnya telah terkonfirmasi menderita TBC dari sasaran 2.137 orang ditemukan 69 kasus baru yaitu sebesar 3,2%. Sehingga permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator ini adalah penanggulangan TBC masih berfokus pada penanggulangan kasus aktif. Akan tetapi mekanisme penemuan kasus saat ini lebih baik yaitu menggunakan alat tes cepat molekuler, tersedianya tuberkulin tes yang cukup untuk diagnosa anak dan kebijakan pemeriksaan skrining TBC-DM menggunakan *x-ray*. Sehingga penegakkan diagnosa lebih sensitif dan berkualitas. Pasien yang terpapar TBC tetapi negatif TBC sedangkan pemeriksaan tuberkulinnya positif maka diberikan terapi pencegahan. Sangat penting mengatasi TBC dari segi promotif dan preventif untuk menekan timbulkan kasus aktif dari infeksi laten sebesar 60-90%.

G.2.3. Solusi Terhadap Permasalahan

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan upaya promotif dan preventif dengan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis untuk menekan penambahan kasus baru dari kasus laten menjadi kasus aktif.
2. Pemberian terapi pencegahan ini dilakukan di faskes primer dengan dukungan dari dokter paru, dokter penyakit dalam dan dokter anak
3. Penambahan alat tes cepat molekuler.
4. Mekanisme skrining menggunakan alat x-ray.
5. Penemuan kasus melalui kolaborasi program.

H. Kinerja Sasaran 3

Tabel II-39 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2023

Sasaran 3: Menurunnya Kemiskinan Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator	Satuan	2023			Predikat Capaian	Target Akhir RPJMD (2023)	Target Akhir - Realisasi 2023
		Target	Realisasi	% Capaian			
1 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Orang	95.403	95.395	100,01%	Tercapai (Melebihi Target)	95.403	-8
Rata-rata Capaian				100,01%			

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3: Menurunnya Kemiskinan Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2023 yang dinilai melalui 1 indikator kinerja adalah sebesar 100,01% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun realisasi indikator Sasaran 3: Menurunnya Kemiskinan Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Realisasi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Tahun 2023 mencapai 95.395 orang, sedikit lebih rendah dibanding dengan target yang ditetapkan yaitu 95.403 orang, sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 100,01% atau dengan predikat tercapai melebihi target. Realisasi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Tahun 2023 yang mencapai 95.395 .orang jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 95.403 orang maka terdapat selisih sebesar -8 orang. Sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi capaian indikator ini pada akhir periode RPJMD dapat tercapai sesuai yang ditargetkan.

H.1. Uraian Pencapaian Kinerja

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Tahun 2023 mencapai 95.395 jiwa dan mengalami penurunan -5.156 jiwa (laju pertumbuhan mencapai -5,13%) dari Tahun 2022 yang mencapai 100.551 jiwa. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Tahun 2023 yang mencapai 95.395 jiwa tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 95.403 jiwa, sehingga tingkat capaian kerjanya adalah 100,01%.

Walau indikator tersebut melebihi target, namun permasalahan PMKS belum sepenuhnya teratasi, ditambah lagi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu yang turut menyebabkan pada meningkatnya jumlah PMKS di Kota Tangerang. Berikut ini diuraikan jumlah PMKS per kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2022-2023.

No.	Kecamatan	Tahun		Selisih
		2022	2023	
1	Batuceper	6.436	5.311	-1.125
2	Benda	7.258	4.533	-2.725
3	Cibodas	7.067	7.715	648
4	Ciledug	6.511	6.903	392
5	Cipondoh	8.770	8.369	-401
6	Jatiuwung	6.032	6.043	11
7	Karang Tengah	5.348	4.441	-907
8	Karawaci	10.673	11.009	336
9	Larangan	5.576	7.118	1.542
10	Neglasari	12.328	12.101	-227
11	Periuk	6.275	5.126	-1.149
12	Pinang	10.383	9.434	-949
13	Tangerang	7.894	6.696	-1.198
	Jumlah	100.551	95.395	-5.156

Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang, Tahun 2024

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah PMKS Kota Tangerang mengalami penurunan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023. Pada Tahun 2022 jumlah PMKS di Kota Tangerang mencapai 100.551 jiwa lalu di Tahun 2023 jumlah PMKS di Kota Tangerang menurun menjadi 95.395 jiwa sehingga dapat diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah PMKS sebanyak -5.516 orang. Penurunan jumlah PMKS tersebut terjadi hampir di semua kecamatan, khususnya seperti di Kecamatan Benda, Karang Tengah, Neglasari, Pinang, Periuk dan Tangerang.

H.1.1. Upaya yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial Kota Tangerang untuk menurunkan jumlah PMKS antara lain tertuang dalam program dan kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan

Pengemis di Luar Panti Sosial dengan anggaran sebesar Rp 437.190.500,-. Pada kegiatan ini telah diberikan bantuan kursi roda 200 unit, 15 unit alat bantu dengar (ABD), 10 unit tongkat kaki empat dan 13 unit walker bagi disabilitas dari dana APBD II, ada juga bantuan Kementrian Sosial, dan masyarakat, serta pemberian bimbingan sosial bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis melalui program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI).

2. Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan anggaran sebesar Rp 220.000.000,-. Pada kegiatan ini lebih terfokus pada penanganan orang-orang terlantar, tuna susila dan eks disabilitas mental yang memerlukan reaksi cepat dari pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Sosial yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Sosial Kota Tangerang.

H.1.2. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Adanya keterbatasan kapasitas di Panti sosial lanjut usia/Werdha milik Provinsi Banten berdampak pada layanan lanjutan/rujukan klien lanjut usia terlantar yang berada di Rumah Perlindungan Sosial (RPS).
2. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam upaya mengembangkan pelayanan, antara lain masih adanya keterbatasan kapasitas ruangan pada Rumah Singgah dalam memberikan pelayanan/penanganan konseling dan trauma healing serta isolasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Susila.
3. Belum adanya tenaga psikososial yang bersertifikat.

H.1.3. Solusi Terhadap Permasalahan

1. Melakukan advokasi, koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan di Provinsi Banten agar menambahkan kapasitas Panti Sosial Lanjut Usia/Werdha.
2. Memperluas Rumah Singgah atau membangun Rumah Singgah yang Reprerentatif dan terstandar.
3. Meminta Pekerja Sosial Kota Tangerang untuk melaksanakan kegiatan psikososial kepada klien (PMKS).

I. Kinerja Sasaran 4

Tabel II-40 Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2023

Sasaran 4: Meningkatnya Kesempatan Kerja

Indikator	Satuan	2023			Predikat Capaian	Target Akhir RPJMD (2023)	Target Akhir - Realisasi 2023
		Target	Realisasi	% Capaian			
1 Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	6,45 - 7,54	6,76	110,34%	Tercapai (Melebihi Target)	6,45 - 7,54	-0,78
Rata-rata Capaian				110,34%			

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4: Meningkatnya Kesempatan Kerja Tahun 2023 yang dinilai melalui 1 indikator kinerja adalah sebesar 110,34% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun realisasi indikator Sasaran 4: Meningkatnya Kesempatan Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Tahun 2023 mencapai 6,76%, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 6,45 - 7,54%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 110,34% atau dengan predikat tercapai melebihi target. Realisasi Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Tahun 2023 yang mencapai 6,76% jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 6,45% - 7,54% maka terdapat selisih sebesar -0,78%. Sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi capaian indikator ini pada akhir periode RPJMD dapat tercapai melampaui yang ditargetkan.

I.1. Uraian Pencapaian Kinerja

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Tahun 2023 mencapai 6,76% dan mengalami penurunan -0,40% (laju pertumbuhan mencapai -5,59%) dari Tahun 2022 yang mencapai 7,16%. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Tahun 2023 yang mencapai 6,76% tersebut melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 6,90 - 7,87% sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 110,34%.

Jika diulas merujuk pada data series lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa pada Tahun 2018-2021, realisasi penurunan angka TPT di Kota Tangerang tidak tercapai. Mengacu pada trend pencapaian tersebut, target TPT pada kisaran angka 7%, sedangkan target TPT 2019 dan 2020 pada angka 6%. Dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 sangat dirasakan terhadap sektor ketenagakerjaan. Hal ini berarti, semua upaya yang dilakukan perlu didukung oleh kebijakan serta dukungan dari seluruh stakeholder.

Memasuki Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mulai menunjukkan penurunan seiring dengan meredanya pandemi Covid-19, dan pada Tahun 2023 TPT untuk Kota Tangerang semakin menurun yakni sebesar 6,76%. Hal ini mengartikan bahwa di antara 100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPT untuk Kota Tangerang turun menjadi 6,76% dari tahun sebelumnya yaitu 7,16%.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk yang bekerja di Kota Tangerang sebanyak 876.844 orang, pengangguran sebanyak 63.530 orang, dan penduduk yang bukan angkatan kerja sebanyak 543.131 orang. Dari data tersebut maka didapat angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 63,39% dan angka Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,76%.

Berikut ini diuraikan kondisi ketenagakerjaan (Penduduk Menurut Jenis Kegiatan) Kota Tangerang Tahun 2023.

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		Total	TPAK	TPT
	Laki-laki	Perempuan			
Bekerja	558.492	318.352	876.844	63,39	6,76
Pengangguran	37.172	39.988	63.530		
Bukan Angkatan Kerja	149.687	460.724	543.131		
Jumlah	745.351	738.154	1.481.3505		

Sumber: BPS Sakernas, Agustus 2023

Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa di Kota Tangerang pada tahun 2023 penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 12.837 orang, sektor manufaktur sebabanyak 236.333 orang, dan penduduk yang bekerja pada sektor jasa sebanyak 627.638 orang.

Lapangan Usaha (3 Sektor)	Laki-laki	Perempuan	Total
Pertanian	10.403	2.470	12.873
Manufaktur	170.382	65.951	236.333
Jasa-jasa	377.707	249.931	627.638
Jumlah	558.492	318.352	876.844

Sumber: BPS Sakernas, Agustus 2023

Berdasarkan status pekerjaan utama, terlihat bahwa jumlah pada tahun 2023 penduduk yang Berusaha sendiri sebanyak 190.596 orang, Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak tetap sebanyak 34.381 orang, Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar sebanyak 18.566 orang, Buruh/karyawan/pegawai sebanyak 561.006 orang, Pekerja bebas sebanyak 30.597 orang, dan Pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 41.698 orang.

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Formal	Non Formal
Berusaha sendiri	126.962	63.634	190.596	716.247	390.189
Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak tetap	16.651	17.730	34.381		

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Formal	Non Formal
Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar	17.136	1.430	18.566		
Buruh/karyawan/pegawai	362.543	198.463	561.006		
Pekerja bebas	23.109	7.488	30.597		
Pekerja keluarga/tidak dibayar	12.091	29.607	41.698		
Total	558.492	318.352	876.844		

Sumber: BPS Sakernas, Agustus 2023

Adapun tenaga kerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, terlihat bahwa pada tahun 2023 jumlah angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan SD sebanyak 133.028 orang, tingkat pendidikan SMP sebanyak 109.893 orang, tingkat pendidikan SMA Umum sebanyak 253.040 orang, tingkat pendidikan SMA Kejuruan sebanyak 217.930 orang, tingkat pendidikan Diploma I/II/III sebanyak 29.337 orang, dan tingkat pendidikan Universitas sebanyak 197.686 orang.

Pendidikan Ditamatkan	Jenis Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Angkatan Kerja
<= SD	Bekerja	72.077	57.184	129.261	133.028
	Pengangguran	3.767	0	3.767	
SMP	Bekerja	65.397	37.391	102.788	109.893
	Pengangguran	3.747	3.358	7.105	
SMA Umum	Bekerja	164.535	73.129	237.664	253.040
	Pengangguran	7.337	8.039	15.376	
SMA Kejuruan	Bekerja	133.035	62.002	195.037	217.390
	Pengangguran	13.510	8.843	22.353	
Diploma I/II/III	Bekerja	18.067	9.506	27.573	29.337
	Pengangguran	1.764	0	1.764	
Universitas	Bekerja	105.381	79.140	184.521	197.686
	Pengangguran	7.047	6.118	13.165	
Total	Bekerja	558.492	318.352	876.844	940.374
	Pengangguran	37.172	26.358	63.530	

Sumber: BPS Sakernas, Agustus 2023

I.1.1. Upaya yang Telah Dilakukan

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang telah melakukan berbagai upaya yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam rangka menurunkan angka TPT. Adapun program dan kegiatan dimaksud yaitu sebagai berikut:

No	Nama Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	45 kegiatan,
			Perluasan Kesempatan Kerja	1.053 orang peserta pelatihan kewirausahaan
		2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/ Bursa Kerja	12 kegiatan Job Fair (264 perusahaan, 29.146 lowongan

No	Nama Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output
				kerja, 15.486 pelamar. 13.135 Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan, 2.483 siswa bekerja melalui Bursa Kerja Khusus
		3. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	185 orang CPMI yang terdata
2	Program Pelatihan Kerja Dan Peningkatan Produktivitas	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	336 orang pencari kerja yang dilatih di Balai Latihan Kerja
				199 orang pencari kerja yang dilatih di melalui program kerjasama dengan Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia
				40 orang pencari kerja yang dilatih di melalui program kerjasama dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia
				80 LPK yang dibina
				267 tenaga kerja bersertifikasi BNSP melalui BLK
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	199 tenaga kerja bersertifikasi BNSP melalui Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	402 orang mengikuti pemagangan kerja di 8 perusahaan
			Pemagangan	
3	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftara Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Perjajian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	4.744 orang mengikuti program PKWT

Program dan kegiatan pelatihan kerja baik berbasis kompetensi maupun berbasis kewirausahaan yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan TPT oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagai berikut.

Pelatihan oleh BLK Kota Tangerang Tahun 2023

No	Nama Pelatihan	Target	Realisasi	Jumlah Peserta
1	Menjahit Pakaian	5 Angkatan (120 orang)	5 Angkatan	87 orang
2	Operator Komputer	3 Angkatan (60 orang)	3 Angkatan	54 orang
3	Design Grafis dan Digital Printing	4 Angkatan (80 orang)	4 Angkatan	78 orang
4	Perhotelan	1 Angkatan (20 orang)	1 Angkatan	4 orang
5	Tune Sepeda Motor Konvensional	1 Angkatan (20 orang)	1 Angkatan	17 orang
6	Tata Boga	3 Angkatan (45 orang)	3 Angkatan	43 orang
7	Teknis Pendingin	1 Angkatan (20 orang)	1 Angkatan	17 orang
8	Instalasi Listrik	1 Angkatan (20 orang)	1 Angkatan	17 orang
9	Teknik Otomotif (Servis Berkala Kendaraan Ringan)	1 Angkatan (20 orang)	1 Angkatan	19 orang
Jumlah		20 Angkatan (385 orang)	20 Angkatan	336 orang

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2024

Pada tahun 2023, UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Tangerang dapat melaksanakan seluruh kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dengan lulusan sebanyak 336 orang dari target sebanyak 385 orang (88,42%).

Selain program pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan dengan menggunakan APBD, pelatihan berbasis kompetensi juga dilaksanakan melalui kerjasama dengan organisasi/lembaga non pemerintah, yaitu Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia.

Kerjasama Pelatihan BLK Kota Tangerang dengan Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia Tahun 2023

No	Nama Pelatihan	Target	Realisasi	%
1	Jasa Konstruksi	200 orang	199 orang	99,50

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2024

Kerjasama Pelatihan BLK Kota Tangerang dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia Tahun 2023

No	Nama Pelatihan	Target	Realisasi	Jumlah Peserta
1	Web Programming	1 Angkatan (20 orang)	1 Angkatan	20 orang
2	Digital Marketing	1 Angkatan (20 orang)	1 Angkatan	20 orang
Jumlah		2 Angkatan (40 orang)	2 Angkatan	40 orang

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2024

Selain pelatihan yang diselenggarakan oleh UPT BLK, Dinas Ketenagakerjaan menyelenggarakan pelatihan berbasis kewirausahaan dalam kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja untuk mendorong peserta mampu menjadi

wirausahawan. Dalam kurun waktu 2019 – 2023, jumlah peserta yang sudah dilatih sebanyak 3.842 orang. Tahun 2023 yang dilatih sebanyak 1.069 orang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pelatihan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)	Total (Orang)
2019	Tata Rias Wajah	60	325
	Barista	90	
	Sablon	75	
	Bisnis Online	100	
2020	Digital Marketing	64	64
2021	Barista	180	660
	Digital Marketing	270	
	Pembuatan Makanan	180	
	Sablon	30	
2022	Barista	235	1.534
	Digital Marketing	267	
	Packaging	220	
	Sablon	126	
	Pembuatan Makanan	237	
	Content Creator	301	
	Reparasi Sepeda	148	
2023	Barista	386	1.069
	Digital Marketing	429	
	Pembuatan Makanan	146	
	Content Creator	108	
Total			3.842

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2024

I.1.2. Permasalahan Yang Dihadapi

Berdasarkan gambaran angka TPT di Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang terus berusaha menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka antara lain dengan keterpaduan program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh OPD dilingkungan pemerintah Kota Tangerang, yang masih perlu ditingkatkan.

Selain itu peran BKK dalam penyaluran lulusannya melalui program *link and match* dengan perusahaan masih dirasakan belum optimal dan belum didapatkannya data jumlah lulusan SMK yang terserap di lapangan usaha. Hal ini membutuhkan sinergitas dalam penentuan program vokasi yang dilaksanakan di SMK antara Dinas Ketenagakerjaan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Lulusan pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan di BLK belum seluruhnya bisa diserap oleh industri/perusahaan. Diperlukan upaya yang massif untuk dapat menyalurkan lulusan pelatihan kerja antara Dinas Ketenagakerjaan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Pelatihan berbasis kewirausahaan melalui kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dimana lulusan pelatihan ini dapat menjadi tenaga kerja mandiri belum sesuai dengan harapan. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum optimalnya pendampingan dan bantuan akses modal usaha yang akan membuka peluang mereka menjadi wirausaha baru.

Pada bidang Hubungan Industrial masih belum optimalnya sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan mediasi apabila terjadi perselisihan hubungan industrial serta terbatasnya jumlah fungsional mediator. Belum semua perusahaan memiliki sarana hubungan industrial.

I.1.3. Solusi Terhadap Permasalahan

Dalam kondisi seperti ini, perlu adanya pengarahannya pembangunan yang ramah ketenagakerjaan (*employment-growth friendly*), dimana pembangunan harus mereposisi paradigma pada orientasi ketenagakerjaan yaitu penciptaan kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya, sehingga pendayagunaan tenaga kerja secara optimal tanpa mengabaikan aspek pertumbuhan dapat tercapai. Sinergi antara BPS dan Pemerintah Kota Tangerang dan keterpaduan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat program pelatihan keterampilan kerja yang dilaksanakan oleh OPD harus berorientasi pada tercapainya outcome untuk menurunkan angka TPT.

Pembinaan terhadap BKK lebih ditingkatkan melalui sinergi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan perusahaan yang ada di Kota Tangerang untuk lebih mengoptimalkan program *link and match*, sehingga lulusan SMK dapat terserap seluruhnya.

Analisis kebutuhan pelatihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana pada BLK yang lebih up to date, serta adanya pemberian bantuan modal usaha dan pendampingan bagi lulusan pelatihan berbasis kewirausahaan, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran secara signifikan.

Beberapa alternatif penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis, sebagai berikut :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan mediasi yang representatif, sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik;
- b. Menambah jumlah fungsional mediator perselisihan hubungan industrial dengan mengajukan permohonan penambahan fungsional mediator dan mengusulkan pegawai yang untuk mengikuti diklat fungsional mediator;
- c. Mendorong perusahaan untuk memenuhi sarana dan prasarana hubungan industrial.

J. Kinerja Sasaran 5**Tabel II-41 Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2023**

Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik

Indikator	Satuan	2023			Predikat Capaian	Target Akhir RPJMD (2023)	Target Akhir - Realisasi 2023
		Target	Realisasi	% Capaian			
1 Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah	A, BB, B, CC, C, D	BB	B	96,59%	Tidak Tercapai	BB	-
2 Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	100,00%	Tercapai (Sesuai Target)	WTP	-
3 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	Point	85,83	87,44	101,88%	Tercapai (Melebihi Target)	85,83	1,61
Rata-rata Capaian				99,49%			

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Tahun 2023 yang dinilai melalui 3 indikator kinerja adalah sebesar 99,49% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun realisasi indikator Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Tahun 2023 mencapai kategori B, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu kategori BB, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 96,59% atau dengan predikat tidak tercapai. Realisasi Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang mencapai kategori B jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu kategori BB maka belum tercapai, sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi capaian indikator ini pada akhir periode RPJMD tidak tercapai sesuai yang ditargetkan.
- Realisasi Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 mencapai kategori WTP, sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu kategori WTP, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100,00% atau dengan predikat tercapai sesuai target. Realisasi Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang mencapai kategori

WTP jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu kategori WTP maka telah tercapai sesuai target, sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi capaian indikator ini pada akhir periode RPJMD dapat tercapai sesuai yang ditargetkan.

- Realisasi Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik Tahun 2023 mencapai 87,44 point, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 85,83 point, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 101,88% atau dengan predikat tercapai melebihi target. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik Tahun 2023 yang mencapai 87,44 point jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 85,83 point maka terdapat selisih sebesar 2,09 point, sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi capaian indikator ini pada akhir periode RPJMD dapat tercapai melampaui yang ditargetkan.

J.1. Uraian Pencapaian Kinerja Nilai Evaluasi AKIP

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan No. 89/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah pada Tahun 2023 hasil evaluasi resmi yang diumumkan oleh Kemenpan RB dengan nilai 67,61 poin dengan tingkat akuntabilitas kinerja B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintahan Kota Tangerang sudah menunjukkan hasil yang baik.

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Tangerang Tahun 2018-2023 meliputi meliputi 5 komponen AKIP sebagaimana tabel berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2018 - 2021				Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
			2018	2019	2020	2021			
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,84	21,84	21,79	20,79	30	21,90	21,96
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,66	15,66	15,68	14,73	30	20,59	20,71
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,35	9,35	9,45	9,3	15	11,03	11,11
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	5,67	5,67	5,71	5,80	25	13,60	13,83
e.	Capaian Kinerja	20	10,76	12,15	12,25	15,39			
	Nilai Hasil Evaluasi		61,75	64,67	65,06	66,01		67,12	67,61
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B		B	B

Sumber: Bappeda Kota Tangerang, 2024

Dari data tersebut di atas diperoleh gambaran hasil evaluasi AKIP Kota Tangerang Tahun 2023, secara umum terdapat peningkatan pada beberapa komponen SAKIP dibandingkan Tahun 2022. Terkait hal tersebut terdapat beberapa catatan evaluasi dan rekomendasi dari Kementerian PAN-RB kepada Pemerintah Kota Tangerang dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan:

- Perencanaan Kinerja
 - Pemerintah Kota Tangerang telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan kinerja transisi. Namun masih ditemukan rumusan sasaran dan tujuan yang belum berorientasi pada hasil sesuai dengan jenjang kerjanya;
 - Pimpinan unit kerja belum terlibat secara aktif dalam perencanaan dan proses penyusunan strategi dan pemberian masukan umpan balik dalam pencapaian kinerja unit kerjanya.
- Pengukuran Kinerja
 - Pemerintah Kota Tangerang telah menggunakan aplikasi e-Sakip Kota Tangerang. Namun belum terlihat komitmen dari seluruh unit kerja untuk memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja;
 - Hasil pengukuran kinerja berjenjang yang telah dilakukan belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* sehingga belum sepenuhnya budaya kerja terbentuk dengan baik.
- Pelaporan Kinerja
 - Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tangerang dan sebagian PD telah menyajikan analisa pencapaian kinerja yang berorientasi hasil, menyajikan perbandingan data kinerja selama tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
 - Pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan, hal ini dapat dilihat dari penetapan target kinerja perencanaan kinerja tahun berjalan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - Peraturan Walikota Tangerang No. 85 Tahun 2023 yang sudah disusun belum digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP bagi perangkat daerah Kota Tangerang;
 - Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja yang disampaikan belum dilakukan secara berkala, sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu

mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja tingkat unit kerja dan akan berpengaruh juga pada tingkat pusat;

- Pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal sebagai alat dalam memberikan *reward dan punishment* kepada PD belum dilakukan.

2. Rekomendasi/upaya perbaikan yang perlu dilakukan

- Melakukan reviu atas dokumen perencanaan kinerja jangka menengah guna memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan telah berorientasi outcome dan sesuai dengan jenjang levelnya;
- Mendorong keterlibatan aktif pimpinan unit kerja dalam hal perencanaan dan proses penyusunan strategi serta pemberian masukan umpan balik dalam pencapaian kinerja unit kerjanya;
- Mendorong komitmen seluruh pimpinan unit kerja untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan memberikan *feedback* perbaikan sebagai bentuk pengawasan pimpinan unit;
- Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berjenjang untuk dijadikan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* dan juga sebagai bukti tumbuhnya budaya kinerja yang baik;
- Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam laporan kinerja di PD dengan menyajikan analisis yang memadai dan informatif dalam penyajiannya tanpa mengurangi kualitas atas penyajian data, informasi dan analisa capaian kinerja;
- Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya, sehingga perencanaan kinerja ke depan target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja;
- Mendorong pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menggunakan peraturan walikota tentang pedoman evaluasi yang telah disusun;
- Mendorong adanya monitoring atas adanya tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja dilakukan secara berkala, sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja tingkat unit kerja dan akan berpengaruh juga di tingkat pusat;
- Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal yang sudah dilakukan sebagai bagian dari penilaian *reward and punishment* kepada OPD, sehingga OPD dapat lebih semangat dalam mendorong perbaikan implementasi SAKIP kedepannya.

J.1.1. Upaya yang Telah Dilakukan

1. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan (e-Planning) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev).
2. Reviu dan Revisi Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
3. Peningkatan kapasitas pejabat eselon II, III dan IV terkait akuntabilitas kinerja.
4. Menerbitkan Peraturan Walikota Tangerang No. 85 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi.

J.1.2. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Keterbatasan kelengkapan data pendukung yang disampaikan oleh OPD terkait, khususnya pada komponen indikator makro dikarenakan instansi yang menjadi sumber data belum merilis update terbaru dari data-data terkait. Sehingga data yang ditampilkan seringkali bersifat proyeksi atau prediksi (data diolah oleh tim Bappeda).
2. Keterbatasan pemahaman OPD terkait definisi maupun rumusan operasional indikator yang menjadi tanggungjawabnya sehingga data yang terkumpul belum menggambarkan update indikator sesuai rumusan yang diminta.
3. Keterbatasan pemahaman OPD terhadap definisi maupun rumusan operasional indikator tersebut juga berpengaruh terhadap perencanaan kegiatan yang diusulkan OPD, dimana tujuan dan rincian kegiatan yang diusulkan belum sepenuhnya mengarah pada pencapaian indikator RPJMD. Hal tersebut juga menjadi kendala Bappeda sebagai pembina perencanaan dalam memberikan arahan dan panduan penyusunan rencana kegiatan serta anggaran pada masing-masing OPD.

J.1.3. Solusi Terhadap Permasalahan

1. Meningkatkan koordinasi secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian indikator kinerja RPJMD yang dilaksanakan oleh OPD terkait, termasuk diantaranya melibatkan tidak hanya kasubag perencanaan dalam rapat koordinasi namun juga bidang terkait pada OPD, sebagai sumber data indikator. Koordinasi juga dilakukan dalam bentuk pembahasan secara detail terkait definisi maupun rumusan operasional indikator untuk meningkatkan pemahaman OPD terkait indikator kinerja sesuai tanggungjawabnya dan memastikan validitas data yang disampaikan OPD.
2. Melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi vertikal yang menjadi sumber data seperti BPS, untuk mendapatkan informasi terupdate terkait data prediksi dan proyeksi indikator.
3. Mengintegrasikan system informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi untuk mempermudah akses pengumpulan data indikator dari OPD dan mempermudah penilaian Bappeda terhadap usulan kegiatan OPD pada saat penajaman usulan program dan kegiatan pembangunan

agar mendukung pencapaian indikator RPJMD. Dengan adanya evaluasi berkala baik di lingkup koordinasi maupun system informasi dapat memberikan gambaran terkait ketercapaian indikator RPJMD sebagai bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan untuk menentukan program dan kegiatan yang akan diprioritaskan.

J.2. Uraian Pencapaian Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2023 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK bertanggung jawab pada pernyataan pendapat/opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan dengan integritas tinggi, sedangkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab entitas. Empat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu sebagai berikut:

a. Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau biasa disingkat WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan atau biasa disingkat WTP-DPP. Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambakkannya paragraf penjelasan, misalnya adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal.

b. Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

Opini Wajar dengan pengecualian atau biasa disingkat WDP adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan

julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

c. Tidak Wajar (*adverse opinion*)

Opini Tidak Wajar atau biasa disebut TW adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

d. Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*)

Opini Tidak Menyatakan Pendapat atau biasa disebut TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.

Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Dalam rangka pemenuhan target indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas OPD, dilakukan kuatifikasi pengukuran dengan formulasi sebagai berikut :

- Apabila mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), diberikan nilai 1 (satu).
- Apabila mendapatkan opini Tidak Wajar (TW) atau Disclaimer, maka nilainya adalah 2 (dua).
- Apabila mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), maka nilainya 3 (tiga).
- Apabila mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka nilainya adalah 4 (empat).

J.2.1. Uraian Pencapaian Kinerja

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 mencapai WTP dan tidak mengalami perubahan (tetap) dari Tahun 2022 yang mencapai WTP. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang mencapai WTP tersebut mencapai target yang telah ditetapkan yaitu WTP, sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100,00%.

Berdasarkan BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan opini WTP yang ke lima belas kali secara berturut-turut diperoleh Pemerintah Kota Tangerang.

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah WTP atau nilai 4 (empat). Realisasi capaian target kinerja Pemerintah Kota Tangerang untuk opini BPK-RI atas LKPD Tahun 2023 mendapatkan opini WTP atau mendapatkan Poin (4) sesuai dengan LHP No. 33a/LHP/XVIII.SRG/06/2023 dari BPK-RI. Sehingga penghitungan pencapaian target untuk indikator dimaksud adalah : $WTP (4) / WTP (4) \times 100\%$ atau sama dengan 100,00%, artinya capaian target indikator kinerja dimaksud dapat tercapai 100,00%.

J.2.2. Upaya yang Telah Dilakukan

1. Memberikan pemahaman dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah;
2. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah serta mengintegrasikan dengan aplikasi lainnya yang terkait.

J.2.3. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Pengelolaan dan pengisian dokumen belum keseluruhan dilaksanakan dengan tertib;
2. Pengelolaan data transaksi aset dan keuangan belum seluruhnya dilaksanakan dengan tertib;
3. Pemahaman akan pentingnya menjaga konsistensi data belum sepenuhnya terbangun;
4. Pemahaman sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah belum merata;
5. Perbedaan pengaturan dalam pelaksanaan keuangan daerah oleh pemerintah pusat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan.

J.2.4. Solusi Terhadap Permasalahan

1. Memberikan pemahaman dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah serta mengintegrasikan dengan aplikasi lainnya yang terkait.

J.3. Uraian Pencapaian Kinerja IKM

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 mencapai 87,44 point dan mengalami peningkatan 2,09 point (laju pertumbuhan mencapai 2,45%) dari Tahun 2022 yang mencapai 85,35 point. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 yang mencapai 87,44 point tersebut melebihi target yang telah ditetapkan dari 85,83 point, sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 101,88%. Berikut ini diuraikan perkembangan realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Tangerang Tahun 2018-2023.

No.	Tahun	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Point)
1	2018	82,54
2	2019	82,62
3	2020	84,25
4	2021	84,84
5	2022	85,35
6	2023	87,44

Sumber: Bagian Organisasi SETDA Kota Tangerang, 2024

Berdasarkan data tersebut di atas, diperoleh hasil peningkatan yang linear dan signifikan atas nilai IKM Kota Tangerang Tahun 2018-2023. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penilaian IKM tiap tahun yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang mampu memotivasi tiap unit-unit penyelenggara pelayanan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikemas dalam pelayanan publik. Baik buruknya pelayanan publik yang diberikan bergantung pada kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Kualitas dari sebuah pelayanan publik menjadi suatu indikator utama dan menjadi sangat penting untuk menilai baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka pemerintah melakukan upaya dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara pelayanan publik.

Jumlah total sampel pada penelitian ini tahun 2023 adalah sebanyak 16.800 reponden, dengan komposisi sampel sebagai berikut:

No	OPD	Jumlah Sampel
1	RSUD Kota Tangerang	100 Responden
2	Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 Responden

No	OPD	Jumlah Sampel
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 Responden
4	Dinas Lingkungan Hidup	100 Responden
5	Dinas Ketenagakerjaan	100 Responden
6	Dinas Perhubungan	100 Responden
7	Dinas Sosial	100 Responden
8	Dinas Pendidikan	100 Responden
9	UPTD Labkesda	100 Responden
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 Responden
11	DPMPSTP	100 Responden
12	Badan Pendapatan Daerah	100 Responden
13	UPT Wilayah Barat	100 Responden
14	UPT Wilayah Timur	100 Responden
15	Puskesmas se Kota Tangerang	3.700 Responden
16	Kecamatan se Kota Tangerang	1.300 Responden
17	Kelurahan se Kota Tangerang	10.400 Responden
TOTAL		16.800 Responden

Sumber: Bagian Organisasi SETDA, 2023

Dasar hukum Survei Kepuasan Masyarakat salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan lampiran peraturan tersebut, mutu pelayanan dari setiap unit layanan disusun dalam 4 (empat) kelompok interval yaitu:

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik

Sumber: PerMenPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berikut diuraikan nilai IKM OPD Tahun 2023 total di Kota Tangerang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

No.	Nama Unit Pelayanan	Jumlah	IKM	Mutu/Predikat
1	Dinas, Badan dan RSUD	14	88,85	A
2	Kecamatan	13	88,56	A
3	Puskesmas	37	86,78	B
4	Kelurahan	104	85,56	B
IKM TOTAL		168	87,44	B

Sumber: Bagian Organisasi SETDA, 2023

- Perhitungan IKM Kota Tangerang didasarkan pada 7 dinas, 3 badan, 3 UPT dan RSUD, 13 kecamatan, 37 puskesmas dan 104 kelurahan adalah sebesar 87,44 dengan mutu/predikat B. Nilai IKM yang dihitung menunjukkan mutu pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kota Tangerang. Dengan demikian disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan pelayanan publik Kota Tangerang mendapatkan mutu/predikat B (Baik).

- Nilai IKM 7 dinas (OPD), 3 badan, 3 UPT dan RSUD, mendapatkan mutu/predikat B, hal ini berdasarkan hasil perhitungan kepuasan masyarakat sebesar 88,85 dengan mutu/predikat A (Sangat Baik.)
- Nilai IKM Puskesmas mendapatkan mutu/predikat B, hal ini berdasarkan hasil perhitungan dari 37 puskesmas didapatkan indeks kepuasan masyarakat sebesar 86,78 dengan mutu/predikat B (Baik).
- Nilai IKM di Kelurahan Kota Tangerang mendapatkan predikat/mutu B, hal ini berdasarkan hasil perhitungan dari 104 kelurahan didapatkan indeks kepuasan masyarakat sebesar 85,56 dengan mutu/predikat B (Baik).
- IKM Kelurahan Se-Kota Tangerang mendapatkan predikat/mutu B, hal ini berdasarkan hasil perhitungan dari 104 kelurahan didapatkan indeks kepuasan masyarakat sebesar 84,51.

J.3.1. Upaya yang Telah Dilakukan

1. Melakukan monitoring dan evaluasi ke Perangkat Daerah/UPP yang memiliki hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terendah;
2. Memberikan pelatihan kepada petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan yang prima (peningkatan kualitas SDM);
3. Memberikan kuesioner kepada pengguna layanan untuk dapat melihat dan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah diberikan (SKM);
4. Meningkatkan saran dan prasarana yang masih kurang maksimal;
5. Melaksanakan forum konsultasi publik (FKP) bagi penyelenggara pelayanan;
6. Memberikan alur prosedur pelayanan yang lebih cepat dan efisien;
7. Memberikan waktu pelayanan yang lebih cepat.

J.3.2. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Masih adanya Pelayanan Publik yang belum optimal menurut persepsi masyarakat.
2. Diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang lebih baik untuk kenyamanan masyarakat pada sebagian Perangkat Daerah/UPP.
3. Perlu publikasi yang lebih baik tentang besaran tarif semua jenis layanan.
4. Perlu perbaikan desain ruang baca agar lebih menarik dan nyaman bagi pengunjung.

5. Masih perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM petugas pelayanan.
6. Perlu perbaikan peningkatan kebersihan untuk kenyamanan aktivitas di tempat pelayanan.

J.3.3. Solusi Terhadap Permasalahan

Bertolak dari permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka solusi yang dilakukan yaitu memberikan rekomendasi untuk perbaikan layanan unit pelayanan publik Kota Tangerang sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas informasi pelayanan publik, misal: membuat/membuka akses via website serta menugaskan 1 (satu) atau lebih admin website UPP agar dapat mengupdate informasi dan menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh pengguna layanan. Selain itu juga dengan melakukan pembinaan terhadap UPP/PD Pelayanan yang melaksanakan pelayanan publik agar dapat membuat alur prosedur pelayanan lebih simpel dan mudah.
- Diperlukan peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan publik yang lebih baik, seperti penambahan kursi pada ruang tunggu, perluasan area parkir yang memadai, adanya fasilitas toilet dan kursi roda untuk disabilitas, jaringan internet yang lancar.
- Membuat spanduk atau brosur yang berisi informasi tentang besaran tarif layanan pada UPP yang mengenakan tarif layanan. Tarif layanan juga dicantumkan pada website UPP tersebut.
- Melakukan perbaikan desain ruang baca agar lebih menarik dan nyaman bagi pengunjung.
- Peningkatan ketepatan dan kecepatan waktu pelayanan dengan menambah jumlah pegawai pelayanan yang kompeten dan membuat SOP waktu pelayanan untuk pengguna layanan dan mengadakan pelatihan bagi petugas pelayanan dan petugas pengaduan agar dapat meningkatkan kinerja petugas pelayanan sehingga berdampak terhadap waktu pelayanan yang diberikan dan mempercepat penanganan pemberian solusi terhadap masalah yang dihadapi pengguna layanan.
- Diperlukan peningkatan kualitas kinerja pegawai kebersihan dan kontrol bagi petugas agar dapat meningkatkan kebersihan pada area pelayanan terutama kebersihan toilet.

K. Kinerja Sasaran 6**Tabel II-42 Capaian Kinerja Sasaran 6 Tahun 2023**

Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Perkotaan

Indikator	Satuan	2023			Predikat Capaian	Target Akhir RPJMD (2023)	Target Akhir - Realisasi 2023
		Target	Realisasi	% Capaian			
1. Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%	94,26	99,52	105,58%	Tercapai (Melebihi Target)	94,26	5,26
2. Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan	Km/jam	25	25,02	100,08%	Tercapai (Melebihi Target)	25	0,02
Rata-rata Capaian				102,83%			

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Perkotaan Tahun 2023 yang dinilai melalui 2 indikator kinerja adalah sebesar 102,83% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun realisasi indikator Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Perkotaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai Tahun 2023 mencapai 99,52% lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 94,26%, sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 105,58% atau dengan predikat tercapai melebihi target. Realisasi Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai Tahun 2023 yang mencapai 99,52% jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 94,26% maka terdapat surplus sebesar 5,26%, artinya target akhir RPJMD sedianya telah tercapai bahkan terlampaui.
- Realisasi Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan Tahun 2023 mencapai 25,02 km/jam lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 25,00 km/jam, sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 100,08% atau dengan predikat tercapai melebihi target. Realisasi Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan Tahun 2023 yang mencapai 25,02 km/jam jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 25,00 km/jam maka terdapat selisih sebesar 0,02 km/jam, artinya target akhir RPJMD telah tercapai bahkan terlampaui.

K.1. Uraian Pencapaian Kinerja Persentase Kualitas Jalan dan Jembatan yang Memadai

Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan pada akhir tahun 2023 terdiri dari proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik dengan target 94,79% dan rasio jumlah jembatan dalam kondisi baik dengan target 99,3%. Adapun realisasi proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik tercapai melebihi target yaitu 99,03% dan realisasi rasio jumlah jembatan dalam kondisi baik tercapai melebihi target yaitu 100%. Dengan jumlah total anggaran yaitu Rp. 213.094.795.394,00 dengan realisasi sebesar Rp. 202.876.227.385,00 (95,20%).

Jika dibandingkan dengan capaian realisasi pada kinerja tahun-tahun sebelumnya, terdapat peningkatan capaian kinerja pada tahun anggaran 2023, dimana jika dibandingkan terhadap capaian realisasi tahun anggaran 2022 terdapat peningkatan sebesar 4,87% untuk proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik dan peningkatan sebesar 3,57% untuk Rasio jumlah jembatan dalam kondisi baik.

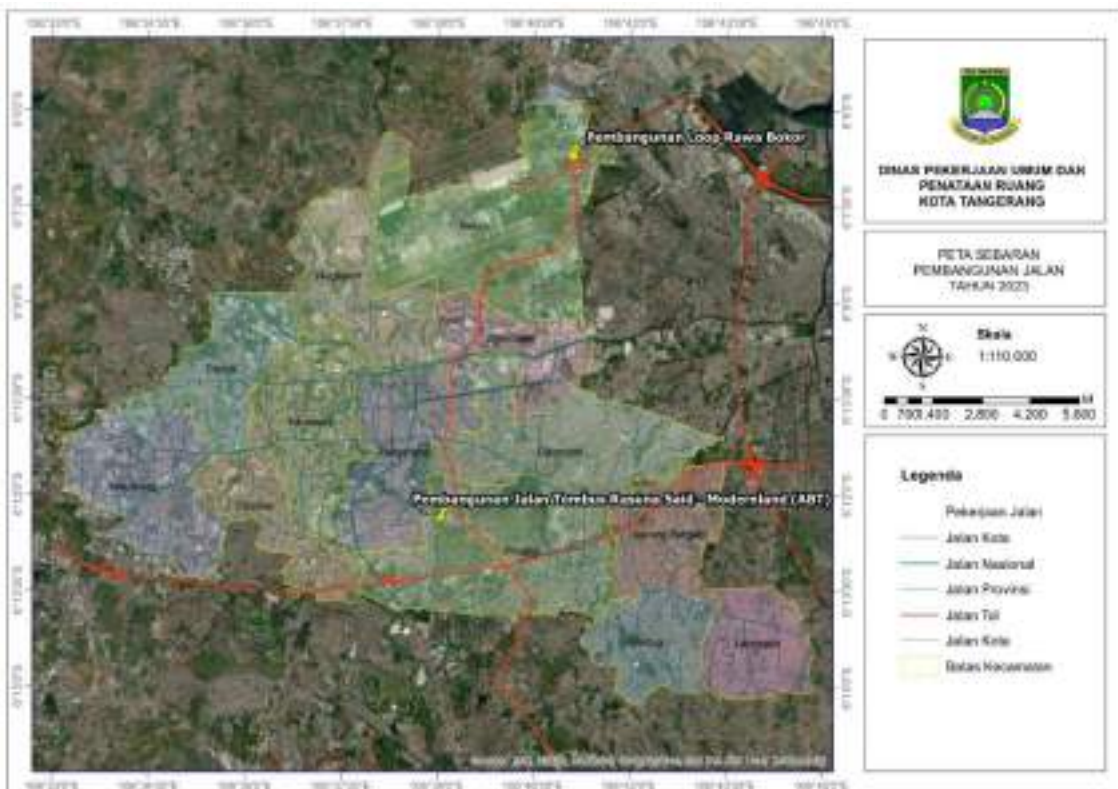
Kemudian pencapaian target akhir tahun 2023 pada indikator Persentase Kualitas Jalan dan Jembatan yang Memadai jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2023 telah melebihi target.

K.1.1. Upaya yang Telah Dilakukan

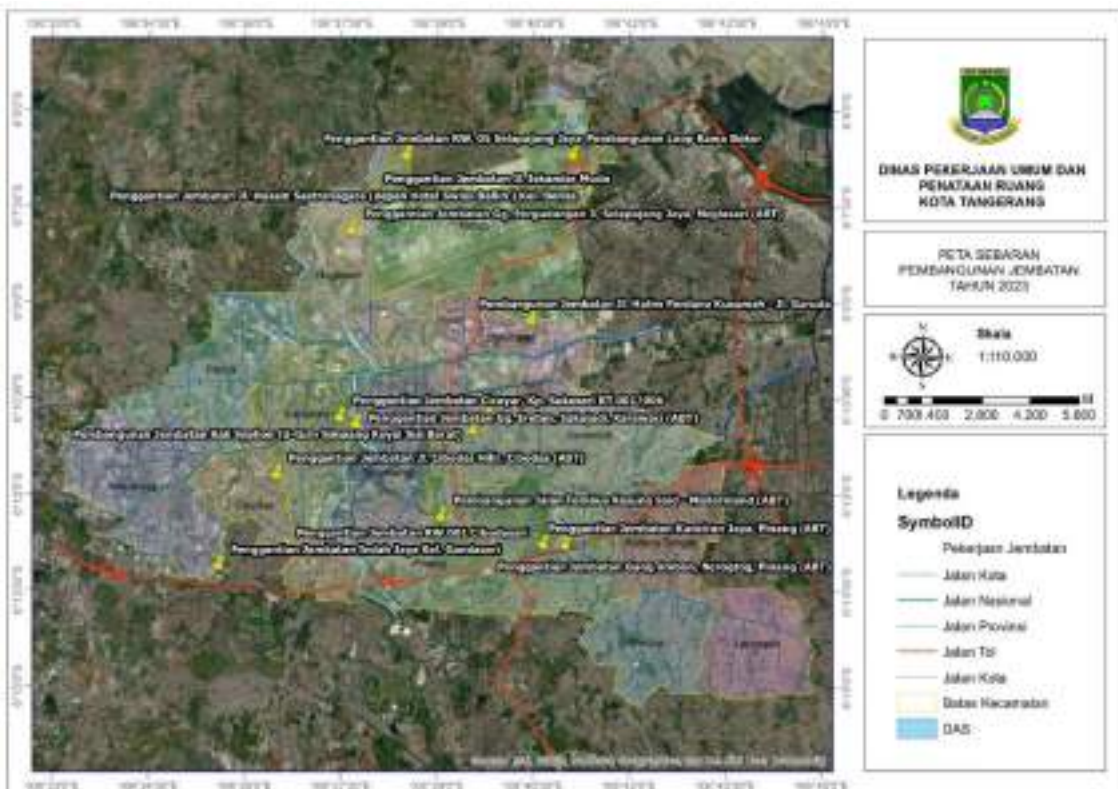
Upaya yang telah dilakukan dalam rangka untuk mencapai persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai dapat dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota		Rp 213,094,795,394,00	Rp 202,876,227,385,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp 966.527.200,00	Rp 947.295.858,00
		Pengelolaan Leger Jalan	Rp 1.045.639.800,00	Rp 943.079.400,00
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp 222.480.200,00	Rp 222.480.200,00
		Pembangunan Jalan	Rp 10.939.993.600,00	Rp 10.375.103.400,00
		Rekonstruksi Jalan	Rp 72.618.280.000,00	Rp 71.456.491.600,00
		Rehabilitasi Jalan	Rp 45.423.117.900,00	Rp 44.802.124.080,00
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 50.035.589.620,00	Rp 42.938.342.513,00
		Pembangunan Jembatan	Rp 28.002.387.100,00	Rp 27.772.623.200,00
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp 3.840.779.974,00	Rp 3.418.687.134,00

Gambar II-1 Sebaran Pembangunan Jalan Tahun 2023



Gambar II-2 Sebaran Pembangunan Jembatan Tahun 2023



K.1.2. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Beberapa ruas jalan yang dipelihara atau ditingkatkan kualitasnya dengan menggunakan perkerasan hotmix mengalami kerusakan dini, hal ini disebabkan oleh adanya genangan air pada waktu hujan di ruas jalan yang memang belum memiliki saluran drainase ataupun drainase jalan tersebut tidak dapat berfungsi optimal.
2. Beberapa ruas jalan yang ditingkatkan kualitasnya dengan menggunakan perkerasan beton tidak sesuai dengan umur rencana, hal ini dikarenakan adanya over tonase diruas jalan tersebut sebagai akibat belum adanya pembagian kelas jalan di Kota Tangerang. Sehingga jalan yang seharusnya tidak dilalui kendaraan berat dapat terjaga kualitasnya sesuai umur rencana.
3. Masih terdapat ruas jalan yang perlu adanya peningkatan konstruksi namun belum dapat dikerjakan, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan pembagian anggaran berdasarkan skala prioritas.
4. Masih terdapat jembatan yang perlu adanya peningkatan konstruksi maupun peninggian namun belum dapat dikerjakan, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan pembagian anggaran berdasarkan skala prioritas serta masih adanya rasionalisasi anggaran.
5. Terdapat ruas jalan yang belum terbangun sebesar 0,678 km atau sebesar 63,46% dari target sebesar 1,07 km dimana realisasi ruas jalan yang terbangun sebesar 0,392 km atau terealisasi 36,64% sebagai akibat proses pembebasan lahan pada tahun bersamaan yang belum tuntas dilaksanakan.
6. Masih kurangnya bangunan trotoar pada ruas – ruas jalan kota yang mana pembangunannya membutuhkan cukup banyak anggaran.
7. Masih terdapat usulan kegiatan rehabilitasi jalan lingkungan yang belum sesuai dengan klasifikasi penanganan dari dinas teknis.

K.1.3. Solusi Terhadap Permasalahan

1. Perlu adanya pembangunan maupun optimalisasi fungsi drainase pada ruas ruas jalan yang sering terdapat genangan air pada waktu hujan, sehingga kualitas jalan selalu terjaga dan umur jalan jauh lebih panjang.
2. Perlu adanya penetapan kelas jalan oleh Dinas Perhubungan pada seluruh ruas jalan kota di Kota Tangerang sehingga ruas – ruas jalan di Kota Tangerang dapat dilalui sesuai peruntukan dan tidak terjadi over tonase.
3. Perlu adanya roadmap peningkatan jalan, trotoar dan jembatan sehingga prioritas anggaran dan implementasinya dapat terealisasi secara efektif dan efisien.

4. Tidak mengusulkan atau mengganggu kegiatan pembangunan jalan pada tahun bersamaan yang mana lahannya belum bebas karena berpotensi tidak dapat dilaksanakan.
5. Optimalisasi perencanaan dan lebih selektif dalam menampung usulan usulan kegiatan sehingga pemanfaatan anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan dapat optimal lebih efektif efisien.

K.2. Uraian Pencapaian Kinerja Kecepatan Rata-Rata Perjalanan Kendaraan

Pada Tahun 2023, kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan terealisasi 25,02 km/jam dari target 25 km/jam sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100,08% (melebihi target). Realisasi Tahun 2023 tersebut mengalami peningkatan 2,84% dibandingkan dengan Tahun 2022 yang mencapai 24,33 km/jam. Kondisi ini didukung oleh semakin menurunnya jumlah titik kemacetan di Kota Tangerang.

Perhitungan kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan diraih melalui sebuah studi evaluasi kecepatan rata-rata perjalanan pada ruas jalan kota, yang menjadi objek terhadap penelitian/studi evaluasi yang dilaksanakan oleh jasa konsultan melalui surveyor pada triwulan keempat setiap tahunnya. Survei primer kecepatan perjalanan telah dilaksanakan langsung di lapangan pada November tahun 2023 terhadap 83 ruas jalan 464 segmen ruas jalan.

Dengan metode survei kecepatan perjalanan tahun 2023 menggunakan MCO (*Moving Car Observer*) dengan teknik *floating car observer* dimana kendaraan pribadi yang bergerak sesuai kecepatan arus lalu lintas pada umumnya. Hasil temuan dari kegiatan penelitian/studi tersebut pada tahun 2023 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

No.	Nama Jalan	Kecepatan Perjalanan (Km/Jam)
1	Jl. Raya Serang (Jl. Gatot Subroto)	24,66
2	Jl. Merdeka	23,08
3	Jl. Otista	21,68
4	Jl. KS. Tubun	21,51
5	Jl. Daan Mogot	30,94
KECEPATAN RATA RATA JALAN NASIONAL		24,37
6	Jl. Sudirman	34,22
7	Jl. Thamrin/Serpong Raya	33,88
8	Jl. KH. Hasyim Ashari	24,86
9	Jl. Hos Cokroaminoto	21,62
10	Jl. Raden Patah	21,43
KECEPATAN RATA RATA JALAN PROVINSI		27,20
11	Jl. Raden Saleh	21,46
12	Jl. Sutomo	21,56
13	Jl. Pinang Kunciran	28,59
14	Jl. Halim Perdana Kusuma	23,58

No.	Nama Jalan	Kecepatan Perjalanan (Km/Jam)
15	Jl. Husien Sastranegara	31,69
16	Jl. Sisi Barat Saluran Jl. Husien S.	19,32
17	Jl. AMD	26,70
18	Jl. Husien Sastranegara	22,66
19	Jl. Husien Sastranegara	28,21
20	Jl. Perancis	19,23
21	Jl. Garuda	27,00
22	Jl. Pembangunan 3	29,70
23	Jl. Lio Baru (Bourok)	24,71
24	Jl. Perimeter Utara	31,53
25	Jl. Benteng Betawi	35,27
26	Jl. Maulana Hasanudin	24,21
27	Looping Jl. Maulana Hasanudin	21,88
28	Jl. Imam Bonjol	23,88
29	Jl. M. Toha	22,64
30	U-Turn Raya Cadas	19,97
31	Jl. Tembus Sangego-M. Toha	22,32
32	Jl. Teuku Umar	25,79
33	Jl. Proklamasi	18,61
34	Akses Terminal Cimone	19,49
35	Jl. Sisi Kali Cisadane	32,63
36	Jl. Tembus Thamrin-Imam Bonjol	26,98
37	Jl. KS. Tubun	23,30
38	Jl. Kyai Maja	21,56
39	Jl. Rasuna Said	21,60
40	Jl. Pajajaran	21,55
41	Jl. Prabu Siliwangi	23,67
42	Jl. Kiansantang	21,77
43	Jl. Sangego	30,11
44	Lingkar (Looping) Sangego	29,33
45	Jl. Satria	20,95
46	Jl. Dewi Sartika	18,90
47	Jl. TMP. Taruna	24,19
48	Jl. M.Yamin	27,12
49	Perintis (Belakang Tangerang City)	23,73
50	Jl. Maulana Yusuf	20,32
51	Jl. Benteng Jaya	20,97
52	Jl. Benteng Makasar	32,25
53	Jl. Kali Pasir	26,63
54	Jl. Sasmita	22,17
55	Jl.. Arya Santika	19,30
56	Jl. Pintu Air	20,16
57	Jl. Sitanala	21,18
58	Jl. Arya Wasangkara	18,62
59	Jl. Perintis Kemerdekaan	26,16
60	Jl. Marsekal Suryadarma	29,79
61	Jl. Veteran	21,42
62	Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo	24,13
63	Jl. H. Mansyur	21,28
64	Jl. Ahmad Dahlan	23,53
65	Jl. Ki Hajar Dewantara	21,37
66	Jl. Metro Permata Raya	17,94
67	Jl., Green Lake City Bolevard	35,90
68	Jl. Beringin Raya (Perumnas 1)	22,36
69	Jl. Kavling Pemda	21,31
70	Jl. Karet Raya	17,92
71	Jl. Perambanan	20,09
72	Jl. Darma wangsa	22,70

No.	Nama Jalan	Kecepatan Perjalanan (Km/Jam)
73	Jl. Dipati Ukur	17,21
74	Jl. Siliwangi (Perumnas)	26,32
75	Jl. Dipati Unus	20,42
76	Jl. Cibodas Besar	20,50
77	Jl. Empu gandrung	20,60
78	Jl. Borobudur	20,56
79	Jl. Villa Tangerang Regency	20,72
80	Jl. KH. Wahid Hasyim	19,88
81	Jl. Subandi	18,16
82	Jl. Graha Raya	26,07
83	Jl. Baharudin	18,65
KECEPATAN RATA RATA JALAN KOTA		23,48
KECEPATAN RATA RATA KOTA TANGERANG		25,02

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tangerang Tahun 2024

K.2.1. Upaya yang Telah Dilakukan

Melalui berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam usahanya mencapai target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan, tentunya upaya-upaya yang dilakukan mengacu kepada kesesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti halnya kesesuaian ketentuan perencanaan, pelaksanaan pengadaan, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pada tahap pengawasan. Rangkaian pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan menjadi salah satu faktor utama lancarnya sebuah pekerjaan berjalan dan akan berdampak kepada ketercapaian target kinerja.

Koordinasi dan kolaborasi seluruh unit yang ada di Dinas Perhubungan juga turut serta menjadi andil ketercapaian target kinerja sebagai salah satu upaya yang nyata dari berjalannya seluruh roda organisasi Dinas Perhubungan Kota Tangerang.

Adapun penjabaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 oleh Dinas Perhubungan untuk mendukung capaian sasaran di atas adalah sebagai berikut.

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	106.044.270.594	103.214.217.638	97,33
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.932.702.833	17.585.056.722	98,06
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	919.123.800	793.751.000	86,36
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.948.357.900	2.568.080.949	87,10
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.773.756.191	76.893.359.477	98,87
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.470.329.870	5.373.969.490	83,06
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	68.015.258.309	64.273.681.726	94,50

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
	JALAN (LLAJ			
2.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.579.754.200	985.222.100	62,37
2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	15.697.210.283	14.934.661.782	95,14
2.3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	163.013.700	158.446.300	97,20
2.4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	423.510.000	423.042.500	99,89
2.5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.979.285.500	1.925.869.100	97,30
2.6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	9.100.511.126	7.624.106.700	83,78
2.7	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	97.350.000	66.800.000	68,62
2.8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.974.623.500	38.155.533.244	97,90

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tangerang Tahun 2024

Tabel diatas merupakan gambaran penjabaran program dan kegiatan pendukung capaian indikator tujuan Dinas Perhubungan, dimana dapat tergambar bahwa capaian realisasi program kegiatan secara rata-rata mampu mencapai angka lebih dari 92%. Terlihat bahwa penggunaan sumber daya anggaran cukup optimal direalisasikan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka mencapai target indikator yang ditetapkan.

K.2.2. Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam meningkatkan kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan tentunya Dinas Perhubungan tidak dapat menyelesaikan sendiri tanpa adanya kolaborasi bersama instansi lainnya terkait penyelenggaraan jalan, beberapa permasalahan dijumpai dalam proses pelaksanaan meningkatkan kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan, diantaranya adalah :

1. Kinerja ruas jalan yang belum optimal dikarenakan masih cukup banyak gangguan samping pada ruas-ruas jalan yang ada.
2. Penggunaan kendaraan pribadi yang masih cukup tinggi dikarenakan belum optimalnya pelayanan angkutan umum perkotaan.
3. Perilaku para pengguna jalan yang belum mencerminkan sikap tertib lancar berlalu lintas.

K.2.3. Solusi Terhadap Permasalahan

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan dalam rangka pelayanan kepada pengguna jalan melalui pembahasan permasalahan lalulintas bersama lintas sektoral.

2. Terus mendorong penyelenggara angkutan umum perkotaan agar terus meningkatkan fasilitas pelayanan sehingga mampu maksimal menyerap pengguna kendaraan pribadi untuk menggunakan angkutan umum.
3. Melakukan sosialisasi tertib lancar berlalulintas baik melalui media online, cetak dan lainnya.

L. Kinerja Sasaran 7

Tabel II-43 Capaian Kinerja Sasaran 7 Tahun 2023

Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas Permukiman

Indikator	Satuan	2023			Predikat Capaian	Target Akhir RPJMD (2023)	Target Akhir - Realisasi 2023
		Target	Realisasi	% Capaian			
1 Persentase permukiman kumuh	%	0,08	0	200,00%	Tercapai (Melebihi Target)	0,08	-0,08
2 Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100	100,00%	Tercapai (Sesuai Target)	100	0
3 Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,81	99,81	100,00%	Tercapai (Sesuai Target)	99,81	0
Rata-rata Capaian				133,33%			

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas Permukiman Tahun 2023 yang dinilai melalui 3 indikator kinerja adalah sebesar 133,33% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun realisasi indikator Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas Permukiman Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Persentase permukiman kumuh Tahun 2023 mencapai 0,00% lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 0,08%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 200,00% atau dengan predikat tercapai melebihi target. Realisasi Persentase permukiman kumuh Tahun 2023 yang mencapai 0,00% jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target

akhir RPJMD) yaitu 0,08% maka terdapat surplus sebesar -0,08%, artinya target akhir RPJMD sedianya telah terlampaui pada Tahun 2023.

- Realisasi Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari Tahun 2023 mencapai 100,00% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100,00%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100,00% atau dengan predikat tercapai sesuai target. Realisasi Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari Tahun 2023 yang mencapai 100,00% jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 100,00% maka artinya target akhir RPJMD sedianya telah tercapai.
- Realisasi Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Tahun 2023 mencapai 99,81% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 99,81%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100,00% atau dengan predikat tercapai sesuai target. Realisasi Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Tahun 2023 yang mencapai 99,81% jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 99,81% maka terlihat telah tercapai, artinya target akhir RPJMD sedianya telah tercapai sesuai target.

L.1. Uraian Pencapaian Kinerja Persentase Permukiman Kumuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Berikut ini 7 Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditinjau dari:

1. bangunan gedung;
2. jalan lingkungan;
3. penyediaan air minum;
4. drainase lingkungan;
5. pengelolaan air limbah;
6. pengelolaan persampahan; dan
7. proteksi kebakaran.

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung salah satunya adalah ketidakteraturan bangunan. Ketidakteraturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman yang tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona.

Indikator Persentase permukiman kumuh dicapai dengan membandingkan luas permukiman kumuh di Kota Tangerang dengan luas seluruh wilayah permukiman. Dalam Berita Acara Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Nomor 210/BA-PLH/POKJA-PKP/KOTANG/2020 yang ditandatangani oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, KOTAKU dan BAPPEDA, sampai dengan akhir Tahun 2020 luas kawasan kumuh di Kota Tangerang berkurang menjadi 28,50 Ha. Dalam Berita Acara tersebut tercatat seluruh luas kawasan kumuh yang tersisa pada akhir Tahun 2020 seluas 28,50 Ha dari seluruh luas wilayah Kota Tangerang 16.455 Ha (tidak termasuk Bandara Soekarno Hatta) dimana kawasan kumuh berat di Kota Tangerang sudah tidak ada. Perhitungan pengurangan perluasan kumuh tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Hal ini dijadikan dasar oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, BAPPEDA dan KOTAKU untuk mengubah dasar perhitungan target luasan kumuh dari sebelumnya seluas 19,03 Ha yang merupakan kawasan kumuh berat, menjadi 28,50 Ha kawasan kumuh ringan. Perubahan target luasan kumuh ini mempengaruhi capaian kinerja Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan menjadi jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Dari Tahun 2021 sampai dengan akhir Tahun 2023, Kota Tangerang sudah mengintervensi kawasan kumuh seluas 28,5 Ha, hal ini tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Penghitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 800/5670-Bid.Perkim/2023 yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkim dan Kepala Bappeda Kota Tangerang pada tanggal 29 Desember 2023.

Walaupun sampai dengan akhir Tahun 2023 Kota Tangerang sudah mengintervensi 28,5 Ha, bukan berarti sudah tidak ada kawasan kumuh lagi, karena luas kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang No: 052/Kep.793-Bappeda/2021 tentang Penetapan Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Kumuh di Wilayah Kota Tangerang adalah seluas 105,31 Ha. Hal ini berarti ada sisa kawasan kumuh seluas 76,81 Ha masih harus di tangani secara bertahap.

L.1.1. Upaya yang Telah Dilakukan

Perhitungan Pengurangan Kumuh Kota Tangerang yang sudah dilakukan dari Tahun 2021 sampai tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2018 yaitu mencakup 7 Indikator dan 16 Parameter. Pada Tahun 2023, Kota Tangerang bersama dengan KOTAKU melakukan intervensi sisa kawasan kumuh seluas 1,17 ha dari 28,5 Ha. Dalam proses pendataan baseline yang dilakukan oleh KOTAKU, wilayah kumuh yang akan di intervensi adalah di RT 004-RW 004 Kelurahan Kedaung Wetan mencakup dari aspek bangunan gedung, jalan lingkungan, kebutuhan minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi

kebakaran. Intervensi ini mencakup 7 indikator dan 16 parameter dengan berbagai sumber dana baik APBD maupun APBN.

L.1.2. Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam perhitungan pengurangan kumuh sangat tergantung pada kegiatan yang dilaksanakan di lokasi yang sesuai dengan SK kumuh minimal harus ada 3 aspek kegiatan. Pengurangan kumuh juga sangat tergantung pada volume kegiatan yang direalisasi. Maka dari itu dalam menyusun perencanaan harus benar-benar sesuai dengan profil permukiman kumuh yang sudah divalidasi atau sesuai dengan kondisi lapangan.

L.1.3. Solusi Terhadap Permasalahan

1. Perhitungan realisasi intervensi kawasan kumuh dilakukan berkolaborasi dengan KOTAKU, melalui baseline data yang ada di KOTAKU.
2. Intervensi kawasan kumuh mengoptimalkan kolaborasi antar dinas terkait (DISPERKIMTAN, Bappeda, Dinas PUPR, BPBD, dan DLH), Kementerian PUPR dan BPPW Provinsi Banten dan KOTAKU di Kawasan Permukiman Kumuh Kedaung, sehingga 7 indikator dan 16 parameter dapat ditangani secara bersama-sama.
3. Untuk mencegah kawasan kumuh baru perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat.

L.2. Uraian Pencapaian Kinerja Jumlah Penduduk yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Indikator Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari diperoleh dengan membandingkan antara jumlah KK yang terlayani air bersih dengan jumlah KK di Kota Tangerang.

Selain melalui jaringan perpipaan, pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat di Kota Tangerang juga diperoleh melalui jaringan non perpipaan dan dapat juga diupayakan oleh pemasok air minum dari truk tangki air yang menjual langsung ke masyarakat atau dari sumur dangkal yang dimiliki oleh masyarakat secara swadaya. Sumber air minum lainnya yang dikonsumsi oleh penduduk Kota Tangerang antara lain berasal dari air kemasan bermerek/air isi ulang. Berdasarkan data penduduk per kecamatan di Kota Tangerang 2023 yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, Jumlah KK di Kota Tangerang sebanyak 611.828 KK, maka dapat dengan kata lain seluruh masyarakat di Kota Tangerang sudah memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sehingga capaian realisasi Indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan

pokok air minum sehari-hari adalah sebesar 100% atau dengan tingkat ketercapaian 100%.

Capaian realisasi indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari rentang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 sudah selaras dengan target setiap tahun pada RPJMD yang telah ditetapkan.

Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari dari Tahun 2019-2023 di Kota Tangerang.

No.	Kategori Sumber Air Minum Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sambungan Air Leding eksisting pada Jaringan Perpipaan PDAM Tirta Benteng	59.018	67.258	91.491	96.231	101.300
2.	Sambungan Air Leding eksisting pada Jaringan Perpipaan PDAM Tirta Kerta Raharja	77.034	77.034	52.261	52.261	52.261
3.	Sambungan Air Leding eksisting pada Jaringan Perpipaan dari Sumur Dalam di Kota Tangerang	2.336	2.336	2.336	14.276	14.276
4.	Sumber Air Minum non perpipaan terlindungi	343.586	343.856	402.290	388.596	388.596
5.	Sumber Air Minum Kemasan/ Isi Ulang	108.380	98.082	44.848	50.694	50.694
Jumlah		590.624	588.566	593.226	602.058	607.127

Sumber : Disperkimtan Kota Tangerang, 2024

Data capaian Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dari Tahun 2019 – 2023 selalu mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh penduduk di Kota Tangerang dapat mengakses air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, baik itu melalui jaringan air minum perpipaan maupun jaringan air minum non perpipaan.

L.2.1. Upaya yang Telah Dilakukan

1. Pada Tahun 2023 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Program telah melakukan beberapa kegiatan untuk mendukung terealisasinya capaian indikator jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari, diantaranya melakukan pemeliharaan jaringan SPAM dan melakukan penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM.
2. Pengembangan Aplikasi R'SPAM di Tangerang LIVE sebagai media informasi pelanggan PDAM terkait kebocoran jaringan, tagihan dan layanan pengaduan.

L.2.2. Permasalahan Yang Dihadapi

- Perpindahan layanan dari PDAM Tirta Kerta Raharja ke PDAM Tirta Benteng membuat cakupan layanan perpipaan bertambah tetapi tingkat kebocorannya tinggi karena pipa jaringan yang dimiliki masih berbahan PVC.

L.2.3. Solusi Terhadap Permasalahan

- Mengusulkan kepada PDAM Tirta Benteng untuk berinvestasi dengan pipa berbahan HDPE.

L.3. Uraian Pencapaian Kinerja Persentase Jumlah Penduduk yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan jaringan air limbah domestik dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah Kota Tangerang.

Data capaian persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan jaringan air limbah domestik dari Tahun 2019 – 2023 setiap tahunnya adalah 100%. Hal ini menggambarkan bahwa seluruh penduduk Kota Tangerang sudah terlayani dalam layanan pengolahan air limbah domestik, terdiri dari KK yang memiliki akses pengolahan berupa dan rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Limbah Terpusat serta rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD. Layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dengan layanan mobil sedot tinja yang beroperasi setiap hari, pembangunan jamban melalui swadaya masyarakat. Intervensi Pembangunan jamban dilakukan berdasarkan Data Buku Putih Sanitasi yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2018 yaitu sebanyak 1.991 KK yang belum memiliki jamban.

Pelayanan pengolahan lumpur tinja di Kota Tangerang dilakukan baik melalui jaringan perpipaan maupun jaringan non perpipaan. Jaringan perpipaan yang dimiliki berupa 8 (delapan) kolam oksidasi dan 1 (satu) Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Tanah Tinggi dengan total kapasitas pengolahan sebesar 1.204 SR m³/hari. Jaringan non perpipaan melalui pelayanan angkutan air limbah ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Bawang dengan kapasitas 98 m³/hari.

Berdasarkan data sanitasi dari Dinas Kesehatan pada akhir tahun 2022 sebanyak 1.215 KK belum memiliki jamban, dan pada Tahun 2023 telah dilakukan pembangunan jamban kepada 138 KK, Sehingga jumlah KK yang belum memiliki jamban di akhir tahun 2023 adalah sebanyak 1.077 KK.

Berdasarkan data penduduk per kecamatan di Kota Tangerang 2023 yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, Jumlah KK di Kota Tangerang sebanyak 611.828 KK, sedangkan target 598.038 KK yang terlayani pengolahan air limbah domestik dapat tercapai maka persentase jumlah KK yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dapat terealisasi 99,81% atau dengan tingkat ketercapaian 100%.

Pembangunan Jamban di Kota Tangerang Tahun 2020 - 2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Batu Ceper	232			18	
2	Benda	93		7	2	
3	Cipondoh	40				10
4	Jatiuwung	119				
5	Karang Tengah	21				
6	Karawaci	0				23
7	Neglasari	40		9		43
8	Periuk	67		4		
9	Pinang	41				13
10	Cibodas	30				46
11	Ciledug	26				1
12	Larangan	20				
13	Tangerang	7				2
Jumlah Unit		653	0	20	20	138

Sumber : Disperkimtan Kota Tangerang, 2024

L.3.1. Upaya yang Telah Dilakukan

1. Pada Tahun 2023 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota telah melakukan pembangunan jamban sebanyak 20 unit untuk 20 KK, melakukan uji kualitas Air Limbah pada IPAL, IPLT dan kolam oksidasi, serta melayani pengolahan air limbah domestik melalui 13 (tiga belas) mobil truk sedot tinja yang beroperasi setiap hari.
2. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik bekerjasama dengan BPPW Provinsi Banten dimana salah satu tujuan dari rancangan Perda adalah pelibatan swasta dalam pengolahan air limbah domestik.
3. Menyediakan layanan call center sedot tinja untuk mempermudah pemesanan layanan sedot tinja bagi masyarakat Kota Tangerang.
4. Pengembangan metode pembayaran sedot tinja melalui layanan non tunai (QRIS).

L.3.2. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Pengembangan layanan IPAL perumahan terkendala oleh kondisi permukiman yang cukup padat.

2. Kapasitas pengolahan IPAL Tanah Tinggi dan IPLT Bawang yang sudah mencapai batas maksimal pengolahan, sedangkan volume air limbah domestik selalu bertambah setiap tahun.

L.3.3. Solusi Terhadap Permasalahan

1. Melakukan penambahan anggaran pada kegiatan pembangunan jamban keluarga pada tahun anggaran selanjutnya
2. Memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya ketersediaan sanitasi dasar guna kesehatan lingkungan dan masyarakat
3. Melakukan revitalisasi instalasi sistem pengolahan air limbah domestik diantaranya revitalisasi IPAL Tanah Tinggi dan IPLT Bawang guna memaksimalkan pengolahan air limbah.
4. Melakukan penambahan armada untuk pelayanan sedot tinja.

M. Kinerja Sasaran 8

Tabel II-44 Capaian Kinerja Sasaran 8 Tahun 2023

Sasaran 8: Meningkatnya Kualitas Drainase dan Sumber Daya Air

Indikator	Satuan	2023			Predikat Capaian	Target Akhir RPJMD (2023)	Target Akhir - Realisasi 2023
		Target	Realisasi	% Capaian			
1 Luas banjir dan genangan	Ha	195,88	191,55	102,21%	Tercapai (Melebihi Target)	195,88	-4,33
Rata-rata Capaian				102,21%			

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8: Meningkatnya Kualitas Drainase dan Sumber Daya Air Tahun 2023 yang dinilai melalui 1 indikator kinerja adalah sebesar 102,21% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun realisasi indikator Sasaran 8: Meningkatnya Kualitas Drainase dan Sumber Daya Air Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Luas banjir dan genangan Tahun 2023 mencapai 191,55 Ha lebih kecil dari target yang ditetapkan yaitu 195,88 Ha, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 102,21% atau dengan predikat tercapai melebihi target. Realisasi Luas banjir dan genangan Tahun 2023 yang mencapai 191,55 Ha jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 195,88 Ha maka terlihat telah tercapai, artinya target akhir RPJMD sedianya telah tercapai bahkan melampaui target.

M.1. Uraian Pencapaian Kinerja

Pada capaian kinerja Tahun Anggaran 2023, indikator Luas banjir dan genangan dimana indikator tersebut dihitung dari luasan penurunan banjir dan genangan, dimana pada Tahun Anggaran 2023 nilai penurunan banjir tercapai 3,73 Ha dan nilai penurunan genangan tercapai sebesar 22,51 Ha sehingga diperoleh realisasi sebesar 191,55 Ha.

Luas banjir dan genangan merupakan indikator yang dihitung dengan formula akumulatif negatif (semakin kecil capaian maka semakin baik kinerja), dalam hal ini luas banjir dan genangan yang tersisa di Kota Tangerang. Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi pada kinerja tahun-tahun sebelumnya, terdapat penurunan luas banjir dan genangan, dimana capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2022 sisa luas banjir dan genangan sebesar 217,79 Ha dan sisa banjir pada Tahun Anggaran 2023 menjadi 191,55 Ha, dimana jika dibandingkan terhadap capaian realisasi Tahun Anggaran 2022 luas banjir dan genangan menurun sebesar 26,24 Ha.

Kemudian jika pencapaian target akhir tahun 2023 pada indikator Luas banjir dan genangan dibandingkan dengan target akhir Renstra, capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2023 telah melebihi target, dimana capaian realisasi Tahun Anggaran 2023 sisa luas banjir dan genangan sebesar 191,55 ha dan target akhir Renstra sisa luas banjir dan genangan adalah 195,88 Ha sehingga capaian tersebut melebihi target sebesar 4,33 Ha.

M.1.1. Upaya yang Telah Dilakukan

Hasil penyusunan masterplan banjir dan genangan tahun 2017 bahwa di Kota Tangerang tercatat luasan banjir dan genangan seluas 704,492 Ha. Adapun dari total luasan tersebut terdapat 2 (dua) kategori banjir dan genangan yaitu 1. Kategori sedang dan berat dengan luasan 429,38 Ha; 2. Kategori ringan dengan luasan 275,11 Ha. Untuk kategori sedang dan berat akan menjadi prioritas penanganan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 tahun kedepan sedangkan untuk kategori ringan diupayakan akan ditangani oleh wilayah melalui dana kelurahan berupa penyediaan infrastruktur oleh kecamatan dan kelurahan.

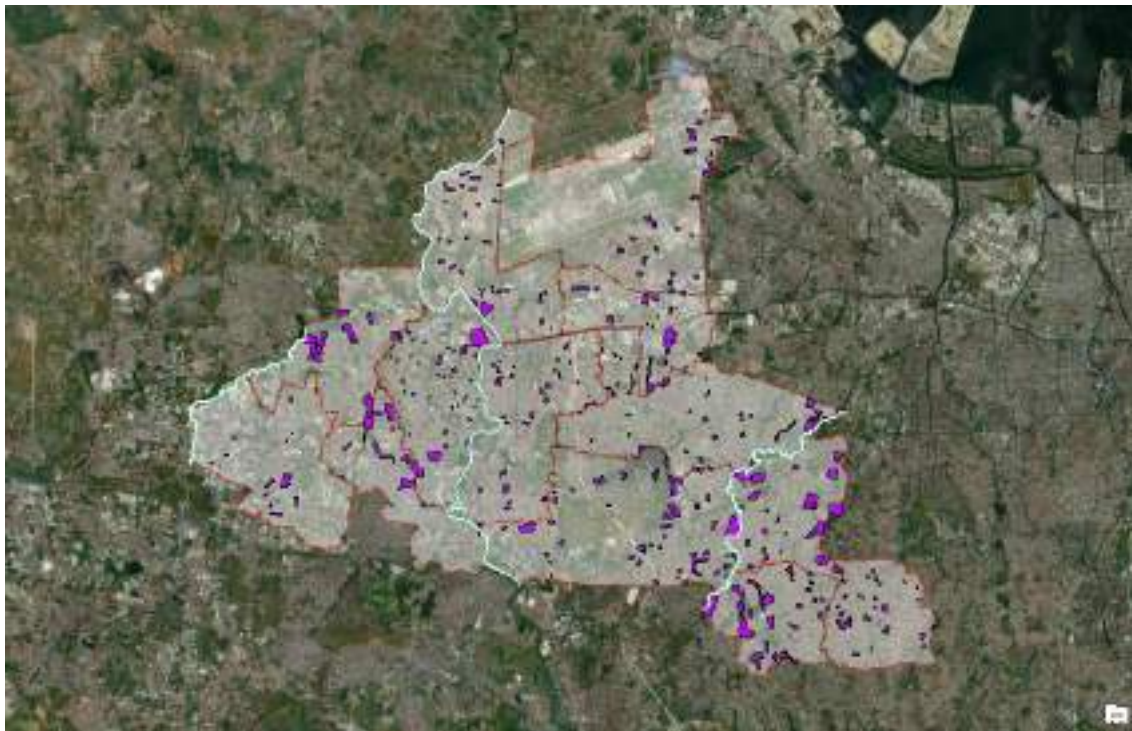
Tabel II-45 Sebaran Luasan Genangan dan Banjir (Kategori Sedang dan Berat) Tahun 2017

No	Kecamatan	Titik Lokasi	Kedalaman	Luas
			(m)	(Ha)
1	Tangerang	5 Kelurahan; 17 Lokasi	0.3 - 1	7,621
2	Periuk	5 Kelurahan; 18 Lokasi	0.5 - 1.5	43,167
3	Pinang	11 Kelurahan; 48 Lokasi	0.3 - 2	76,158
4	Neglasari	7 Kelurahan; 28 Lokasi	0.2 - 2	18,588
5	Larangan	8 Kelurahan; 27 Lokasi	0.2 - 2	21,147
6	Karawaci	15 Kelurahan; 32 Lokasi	0.3 - 2	13,756
7	Karang Tengah	7 Kelurahan; 24 Lokasi	0.3 - 2	77,264
8	Jatiuwung	5 Kelurahan; 17 Lokasi	0.2 - 1.5	14,930

No	Kecamatan	Titik Lokasi	Kedalaman	Luas
			(m)	(Ha)
9	Batuceper	5 Kelurahan; 9 Lokasi	0.3 - 1.5	17,693
10	Cipondoh	6 Kelurahan; 31 Lokasi	0.2 - 3	27,165
11	Ciledug	8 Kelurahan; 31 Lokasi	0.2 - 1.2	62,328
12	Cibodas	5 Kelurahan; 13 Lokasi	0.2 - 1.3	36,021
13	Benda	5 Kelurahan; 25 Lokasi	0.3 - 8	13,541
Jumlah				429,38

Sumber : Dinas PUPR Kota Tangerang, 2024

Gambar II-3 Sebaran Luasan Genangan dan Banjir (Kategori Sedang dan Berat) Tahun 2017



Adapun pada tahun 2023 ditargetkan penurunan luasan genangan dan banjir seluas 21,91 Ha, dari 217,97 Ha menjadi 195,88 Ha. Adapun peta sebaran luasan genangan dan banjir tahun 2023 beserta peta sebaran penanganan luasan banjir dan genangan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut.

Tabel II-46 Sebaran Luasan Genangan dan Banjir (Kategori Sedang dan Berat) Tahun 2023

No.	Kecamatan	Lokasi	Parameter Luas (Ha)	Banjir/ Genangan	Luas Banjir 2023	Realisasi Intervensi 2023	Realisasi Penurunan Luas 2023 (Ha)
1	Benda	Kelurahan Belendung RW 09	2,47	Banjir	0,49	Pembangunan Turap Kel. Belendung	0,17
				Banjir	0,49	Pembangunan Turap Kelurahan Belendung (ABT)	0,17
				Banjir	0,49	Rehabilitasi Turap Belendung (ABT)	0,15
2	Benda	Kelurahan Pajang Bandara RW 01	1,41	Banjir	0,35	Pembangunan Turap Kelurahan Pajang (ABT)	0,12
3	Cipondoh	Kelurahan Cipondoh Indah RW 01	0,33	Genangan	0,33	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 01 Kel. Cipondoh Indah	0,08
				Genangan	0,33	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 02 Kel. Cipondoh Indah	0,08
				Genangan	0,33	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 05 Kel. Cipondoh Indah	0,08
				Genangan	0,33	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 01 Kel. Cipondoh Indah (ABT)	0,08
				Genangan	3,18	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 01 Kel. Petir (ABT)	0,80
				Genangan	3,18	Rehabilitasi Turap Petir	0,95
4	Cipondoh	Kelurahan Petir RW 06	4	Genangan	4	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 06 Kel. Petir	1,00
5	Pinang	Kelurahan Panunggangan Utara RW 05 RT 05	0,71	Genangan	0,43	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 05 kel. Panunggangan Utara	0,11
6	Batuceper	Kelurahan Batu Sari RT 02,03,04,05 RW 03	5,53	Banjir	5,53	Rehabilitasi Turap Kel. Batusari (ABT)	1,66
7	Ciledug	Kelurahan Tajur RW 09	6,45	Banjir	0,47	Rehabilitasi Turap Wisma Tajur	0,14
8	Karawaci	Kelurahan Suka Jadi RW 03	0,26	Genangan	0,16	Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 03 Kel.	0,04

No.	Kecamatan	Lokasi	Parameter Luas (Ha)	Banjir/ Genangan	Luas Banjir 2023	Realisasi Intervensi 2023	Realisasi Penurunan Luas 2023 (Ha)
						Sukajadi	
9	Karawaci	Kelurahan Suka Jadi RW 04	0,24	Genangan	0,15	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 04 Kel. Sukajadi (ABT)	0,04
10	Karawaci	Kelurahan Bojong Jaya RW 01 RT 03 Karawaci kebon Jati	0,22	Genangan	0,13	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 01 Kel. Bojong Jaya (ABT)	0,03
11	Larangan	kelurahan Gaga RW 12	1,65	Genangan	1,65	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong crossing RW. 12 Kel. Gaga	0,41
12	Karang Tengah	Kelurahan Karang Tengah RW 05 RT 01 Jl. Karyawan	3,87	Genangan	2,9	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 03 Kel. Panunggangan Utara	0,73
				Genangan	2,9	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Karyawan 4 Kel. Karang Tengah	0,73
				Genangan	2,9	Rehabilitasi Turap Kel. Karang Tengah	0,87
13	Karang Tengah	Kelurahan Karang Mulya RW 02 RT 01 Karang Mulya	7,62	Genangan	1,39	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Adhiyaksa Kel. Karang Mulya	0,35
				Genangan	1,39	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 02 Kel. Karang Mulya	0,35
14	Karang Tengah	Kelurahan Pondok Pucung RW 06 Bangun Reksa	1,92	Genangan	1,15	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Komplek Bangun Reksa RW. 06 Kel. Pondok Pucung	0,29
15	Karang Tengah	Kelurahan Pondok Bahar RW 01 RT 04	4,13	Banjir	1,03	Rehabilitasi Tanggul Pondok Bahar	0,31
16	Karang Tengah	Kelurahan Karang Timur Komplek Perdagangan	6,58	Genangan	1,12	Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong Komplek Perdagangan Kel. Karang Timur	0,28
17	Periuk	Kelurahan Gebang Raya RW 21 RT 04	1,59	Banjir	0,4	Pembangunan Sistem Pengendalian Banjir Kelurahan Gebang Raya	0,10
18	Periuk	Kelurahan Priuk dekat kali	1,65	Banjir	1,65	Pembangunan Sistem Pengendalian	0,66

No.	Kecamatan	Lokasi	Parameter Luas (Ha)	Banjir/ Genangan	Luas Banjir 2023	Realisasi Intervensi 2023	Realisasi Penurunan Luas 2023 (Ha)
		cirarab				Banjir Kelurahan Periuk	
19	Cibodas	Kelurahan Cibodas RW 11	0,83	Banjir	0,83	Rehabilitasi SP Cibodas	0,25
20	Cibodas	Kelurahan Cibodas RW 3	2,71	Genangan	2,71	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 03 Kel. Cibodas (ABT)	0,68
21	Cipondoh	Kelurahan Cipondoh Indah RW 07	0,11	Genangan	0,11	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 07 Kel. Cipondoh Indah	0,03
				Genangan	0,31	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 05 Kel. Cipondoh Indah	0,08
				Genangan	0,26	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 06 Kel. Cipondoh Indah	0,07
				Genangan	0,9	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 07 Kel. Cipondoh Makmur	0,23
				Genangan	0,63	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 06 Kel. Gondrong	0,22
				Genangan	0,48	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 09 Kel. Kunciran Indah	0,12
				Genangan	0,48	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 09 Kel. Kunciran Indah (ABT)	0,12
22	Pinang	Kelurahan Kunciran Indah RW 06 RT 02	0,3	Genangan	0,3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 06 kel. Kunciran Indah	0,08
				Genangan	0,3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 06 Kel. Kunciran Indah (ABT)	0,08
23	Pinang	Kelurahan Kunciran Indah RW 10 RT 01 dan RW 15 RT 01	0,91	Genangan	0,91	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 10 Kel. Kunciran Indah	0,23

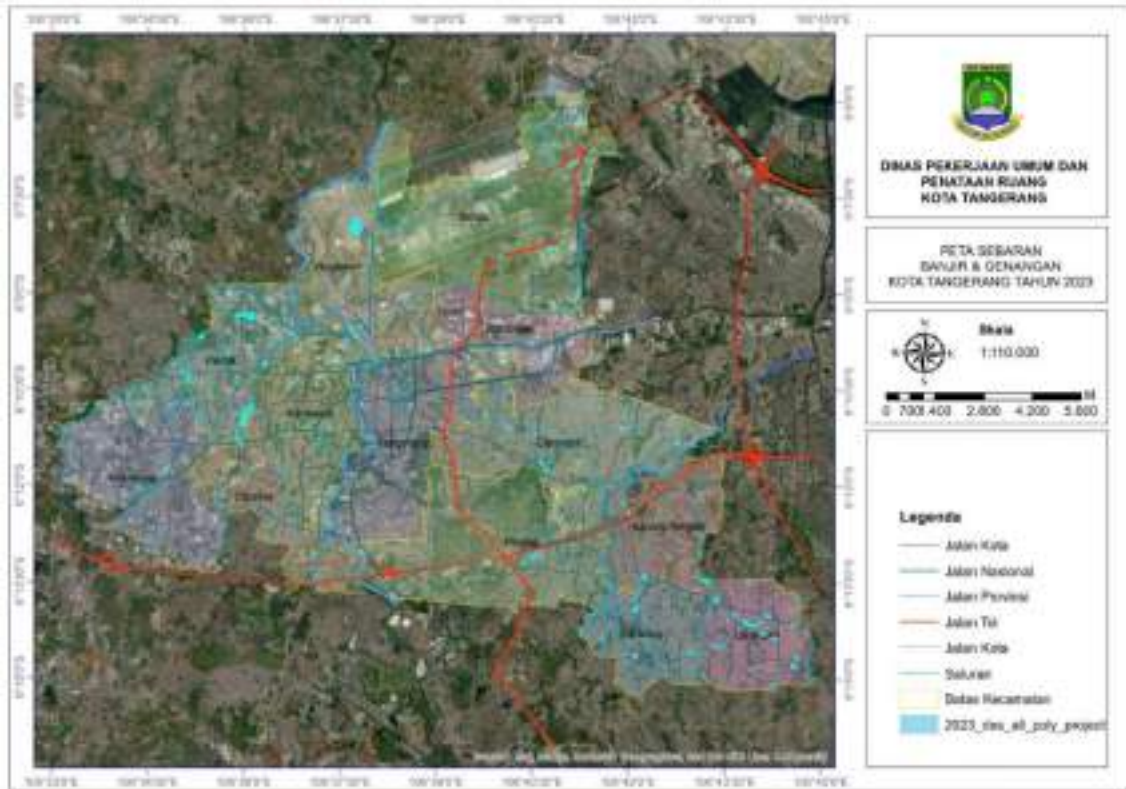
No.	Kecamatan	Lokasi	Parameter Luas (Ha)	Banjir/ Genangan	Luas Banjir 2023	Realisasi Intervensi 2023	Realisasi Penurunan Luas 2023 (Ha)
				Genangan	0,91	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 10 Kel. Kunciran Indah	0,23
				Genangan	0,91	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 10 Kel. Kunciran Indah (ABT)	0,23
24	Pinang	Kelurahan Neroktog RT 01/06	4,2	Genangan	4,2	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 01 Kel. Neroktog (ABT)	1,05
				Genangan	4,2	Pembangunan Turap Kali Angke (Bawah Jembatan Tol - Neroktog)	1,47
25	Pinang	Kelurahan Neroktog RT 03/06	2,42	Genangan	2,42	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 01 kel. Neroktog	0,61
				Genangan	2,42	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 01 Kel. Neroktog (ABT)	0,61
				Genangan	2,42	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 02 Kel. Neroktog	0,61
				Genangan	2,42	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 04 Kel. Neroktog	0,61
26	Pinang	Kelurahan Neroktog RT 01/06	2,18	Genangan	2,18	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 06 kel. Neroktog	0,55
				Genangan	2,18	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 04 Kel. Neroktog (ABT)	0,55
				Genangan	2,18	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 05 Kel. Neroktog (ABT)	0,55
				Genangan	2,18	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 02 Kel. Neroktog (ABT)	0,55

No.	Kecamatan	Lokasi	Parameter Luas (Ha)	Banjir/ Genangan	Luas Banjir 2023	Realisasi Intervensi 2023	Realisasi Penurunan Luas 2023 (Ha)
				Genangan	1,13	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 04 Kel. Sudimara Pinang	0,28
				Genangan	1,13	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 04 Kel. Sudimara Pinang (ABT)	0,28
27	Pinang	Kelurahan Pakojan RW 02 RT 03	0,24	Genangan	0,24	Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Buaran RW. 02 Kel. Pakojan	0,06
28	Tangerang	Kelurahan Babakan RW 05	1,93	Genangan	1,93	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 04 Kel. Babakan	0,48
				Genangan	1,93	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 05 dan 06 Kel. Babakan	0,48
				Genangan	1,93	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 04 Kel. Babakan (ABT)	0,48
29	Tangerang	Kelurahan Babakan RW 03	0,78	Genangan	0,78	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 03 Kel. Babakan	0,20
30	Tangerang	Kelurahan Babakan RW 02	0,48	Genangan	0,48	Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 02 Kel. Babakan	0,12
31	Tangerang	Kelurahan Buaran Indah RW 04, 07 dan 09	1,89	Genangan	1,89	Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 09 Kel. Buaran Indah	0,47
32	Tangerang	Kelurahan Buaran Indah RW 05	0,55	Genangan	0,55	Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 05 Kel. Buaran Indah	0,14
33	Tangerang	Kelurahan Buaran Indah RW 06	0,45	Genangan	0,45	Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 01 Kel. Buaran Indah	0,11
34	Tangerang	Kelurahan Buaran Indah RW 02 dan 03	0,92	Genangan	0,92	Rehabilitasi Turap Buaran Indah	0,28

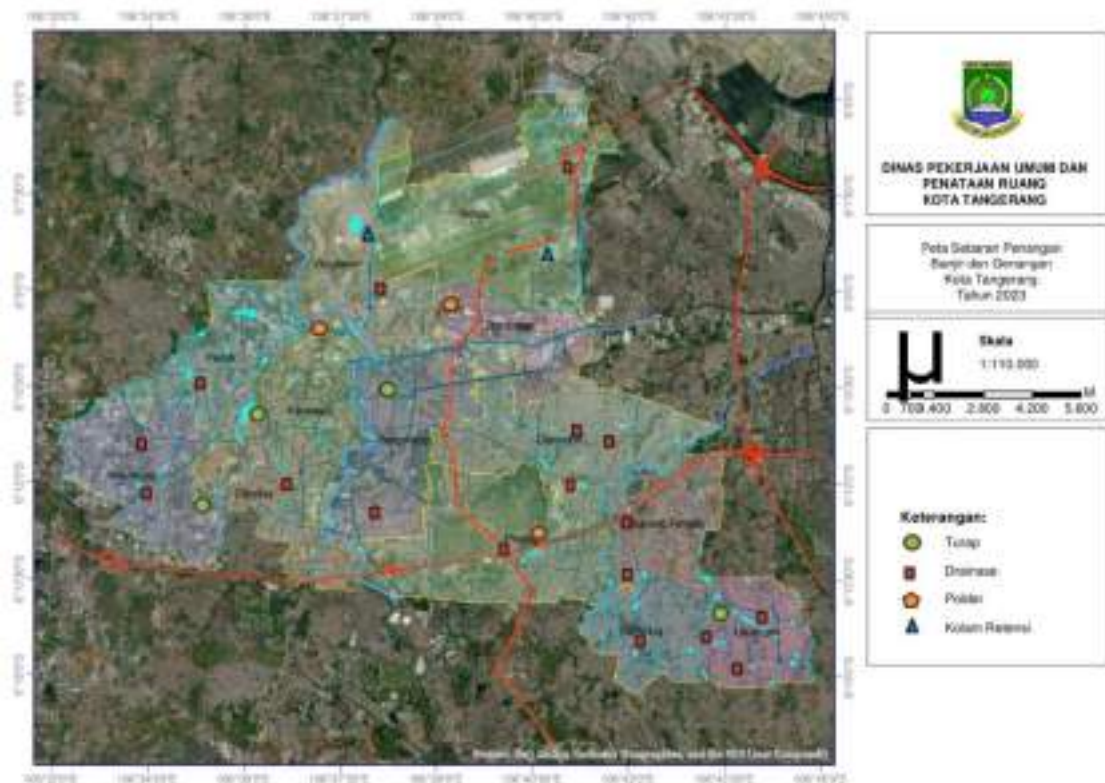
No.	Kecamatan	Lokasi	Parameter Luas (Ha)	Banjir/ Genangan	Luas Banjir 2023	Realisasi Intervensi 2023	Realisasi Penurunan Luas 2023 (Ha)
				Genangan	0,92	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 03 Kel. Buaran Indah	0,23
				Genangan	0,92	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 02 Kel. Buaran Indah (ABT)	0,23
35	Tangerang	Kelurahan Tanah Tinggi RW 10 Jl. Muhajirin Raya	1,19	Genangan	1,19	Pembangunan Turap S.I. Tanah Tinggi	0,42
				Genangan	1,19	Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 10 Kel. Tanah Tinggi	0,30
36	Karawaci	Kelurahan Karawaci Baru RW 03 RT 03	1,49	Genangan	1,49	Pembangunan Turap Kelurahan Karawaci Baru (ABT)	0,45
				Genangan	1,49	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 03 dan 09 kel. Karawaci Baru	0,37
37	Jati Uwung	Kelurahan Gandasari RW 2 RT 8 Lokasi 3	0,51	Genangan	0,51	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong RW. 04 Kel. Gandasari (ABT)	0,13
38	Jati Uwung	Kelurahan Gandasari Lokasi 1 Banjir Sungai Sabi	0,74	Genangan	0,74	Rehabilitasi Turap Kel. Gandasari	0,22
REKAPITULASI			92,67				26,24
				Target 2023		Realisasi 2023	
				Banjir	2,04	Banjir	3,73
				Genangan	19,87	Genangan	22,51
				Total	21,91	Total	26,24

Sumber : Dinas PUPR Kota Tangerang, 2024

Gambar II-4 Sebaran Luasan Genangan dan Banjir Tahun 2023



Gambar II-5 Sebaran Penanganan Genangan dan Banjir Tahun 2023



Upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan target penurunan luasan banjir dan genangan adalah dengan membangun, menambah kapasitas saluran dan melaksanakan normalisasi saluran sungai, drainase dan saluran pembuang. Penjelasan dan penyajian nilai pencapaian melalui program dan kegiatan dapat dilihat berikut ini.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp 131,830,353,989,00	Rp 107,323,542,620,00
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Rp 1.284.401.035,00	Rp 1.219.321.830,00
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rp 13.386.637.871,00	Rp 4.929.274.300,00
		Pembangunan Tanggul Sungai	Rp 35.835.165.904,00	Rp 31.172.341.200,00
		Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rp 1.698.129.519,00	Rp 1.301.216.000,00
		Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Rp 26.830.595.788,00	Rp 20.292.704.800,00
		Rehabilitasi Tanggul Sungai	Rp 17.092.425.641,00	Rp 16.856.810.200,00
		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rp 2.336.347.860,00	Rp 2.229.777.108,00
		Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Rp 5.383.115.811,00	Rp 4.918.619.000,00
		Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp 17.132.237.160,00	Rp 15.153.914.749,00
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Rp 6.438.090.640,00	Rp 6.258.050.786,00
		Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Rp 4.413.206.760,00	Rp 2.991.512.647,00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp 125,033,486,792,00	Rp 122,882,226,653,00
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Rp 267.408.600,00	Rp 245.361.400,00
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Rp 4.188.729.492,00	Rp 3.270.114.760,00
		Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Rp 4.746.551.500,00	Rp 4.289.194.179,00
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Rp 13.289.744.900,00	Rp 12.771.927.114,00
		Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Rp102.541.052.300,00	Rp 102.305.629.200,00

M.1.2. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Terdapat 2 bangunan embung yang batal dilaksanakan dari target embung yang akan dibangun sejumlah 4 embung sebagai akibat adanya proses pembebasan lahan yang belum terselesaikan, sehingga upaya penurunan luasan banjir belum dapat melebihi target yang ditetapkan ;
2. Banyak masyarakat membuang sampah di sungai sehingga menyebabkan sedimentasi. Kondisi seperti ini banyak ditemui di sepanjang bantaran sungai kali cirarab di kecamatan periuk dan kali sabi di kecamatan cibodas;
3. Masih terdapat bangunan bangunan pengendali banjir belum dapat dikerjakan, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan pembagian anggaran berdasarkan skala prioritas.
4. Belum terintegrasi sistem saluran drainase saluran primer-sekunder dan tersier sehingga menyebabkan kesulitan ketika akan membangun saluran drainase yang baru;
5. Kurangnya sarana dan sistem drainase yang memadai sebagai pengganti lahan yang mengalami perubahan fungsi tersebut, terlebih apabila perubahan tersebut tidak disertai dengan analisa tentang dampak lingkungan;
6. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan dan pemeliharaan terhadap sarana drainase lingkungan yang menyebabkan sistem drainase lingkungan tidak dapat berfungsi;
7. Berubahnya/beralihnya fungsi tata guna lahan/ahli fungsi lahan yang cepat baik di daerah hulu dan kawasan perkotaan yang menyebabkan kurangnya resapan air yang berfungsi sebagai tempat penampungan air dan resapan air sebelum menuju saluran pembuang.;
8. Topografi wilayah utara Kota Tangerang yang berada di dataran rendah bahkan sebagian permukaan tanahnya lebih rendah dari permukaan sungai yang kemudian masuk menggenangi lahan permukiman;
9. Tidak optimalnya infrastruktur yang ada, seperti pintu-pintu air yang gagal membendung masuknya rob dari hilir.

M.1.3. Solusi Terhadap Permasalahan

1. Tidak mengusulkan atau menganggarkan kegiatan pada tahun bersamaan yang mana lahannya belum bebas karena berpotensi tidak dapat dilaksanakan
2. Perlu adanya roadmap pembangunan tata air sehingga prioritas anggaran dan implementasinya dapat terealisasi secara efektif dan efisien
3. Optimalisasi perencanaan dan lebih selektif dalam menampung usulan usulan kegiatan sehingga pemanfaatan anggaran dalam upaya pengendalian banjir dan genangan dapat optimal lebih efektif efisien

4. Melakukan penertiban bangunan liar untuk menunjang ketersediaan lahan untuk pelebaran maupun normalisasi saluran sungai / drainase
5. Melaksanakan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah dibantaran sungai;
6. Melakukan pembangunan drainase perumahan, lingkungan dan makro yang terintergrasi
7. Membangun sumur – sumur resapan untuk resapan air;
8. Mempertahakan daerah – daerah tangkapan air dan membangun bangunan penampung air berupa embung
9. Mengevaluasi design terhadap debit dan curah hujan;
10. Evaluasi teknis umur rencana fisik konstruksi (turap dan bangunan pengendali banjir);
11. Perlu tindak lanjut perencanaan detail dari setiap program yang terdapat dalam Master Plan Drainase Berwawasan Lingkungan tersebut di atas. Karena master plan ini masih bersifat kebijakan makro;
12. Dalam pelaksanaan pembangunan perlu melibatkan peran serta aktif dari masyarakat baik dalam hal pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunannya. Dengan demikian masyarakat akan ikut terlibat dalam pembangunan dan secara otomatis akan ikut memelihara karena merasa ikut memiliki;
13. Untuk pendetailan desain masing-masing bangunan perlu dilakukan pengukuran dan investigasi geoteknik lebih lanjut dan detail.

N. Kinerja Sasaran 9

Tabel II-47 Capaian Kinerja Sasaran 9 Tahun 2023

Sasaran 9: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator	Satuan	2023			Predikat Capaian	Target Akhir RPJMD (2023)	Target Akhir - Realisasi 2023
		Target	Realisasi	% Capaian			
1 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Point	57,93	46,92	80,99%	Tidak Tercapai	57,93	-11,01
2 Tingkat pengelolaan sampah	%	100	99,97	99,97%	Tidak Tercapai	100	-0,03
Rata-rata Capaian				90,48%			

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 9: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 yang dinilai melalui 2 indikator kinerja adalah sebesar 90,48% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun realisasi indikator Sasaran 9:

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Tahun 2023 mencapai 46,92 point, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 57,93 point, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 80,99% atau dengan predikat tidak tercapai. Realisasi Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Tahun 2023 yang mencapai 46,92 point jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 57,93 point, sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi capaian indikator ini pada akhir periode RPJMD tidak tercapai sesuai yang ditargetkan.
- Realisasi Tingkat pengelolaan sampah Tahun 2023 mencapai 99,97% sedikit di bawah target yang ditetapkan yaitu 100,00%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 99,97% atau dengan predikat tidak tercapai sesuai target. Realisasi Tingkat pengelolaan sampah Tahun 2023 yang mencapai 99,97% jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 100,00% maka artinya dapat dikatakan bahwa realisasi capaian indikator ini pada akhir periode RPJMD tidak tercapai sesuai yang ditargetkan.

N.1. Uraian Pencapaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu yang mendapat perhatian utama Pemerintah Kota Tangerang untuk menjaga agar menjadi kota yang layak huni (liveable city) ditengah meningkatnya faktor-faktor pengaruh yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan antara lain aktivitas ekonomi, mobilitas orang dan barang (transportasi), jumlah penduduk, pencemaran, dan perubahan iklim. Dalam perdebatan akan kualitas lingkungan hidup, satu hal yang sering sekali sulit untuk dijawab secara lugas berdasarkan data-data yang ada adalah apakah kualitas lingkungan hidup Kota Tangerang berada dalam kategori baik, sedang, atau buruk. Maka, untuk menjadi pedoman dalam menentukan kategori kualitas lingkungan hidup digunakanlah ukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan kompilasi penjumlahan dari 3 komponen indeks yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Tujuan dari IKLH sebagai : informasi bagi pengambil keputusan untuk bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, alarm untuk mengidentifikasi sumber masalah sehingga dapat diambil kebijakan dan tindakan untuk menentukan skala prioritas pembangunan dan tindakan penegakan hukum lingkungan hidup, dan bahasa komunikasi yang menjadi penggerak keterlibatan publik untuk ikut aktif menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Perhitungan IKLH dilakukan setelah IKA, IKU, dan IKTL dihitung dan diketahui nilainya, kemudian setiap komponen indeks tersebut dikalikan dengan bobot yang telah ditetapkan, dan selanjutnya dijumlahkan sebagaimana rumus berikut :

$$IKLH = (IKA \times 0,376) + (IKU \times 0,405) + (IKTL \times 0,219)$$

Keterangan :

IKLH	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKA	:	Indeks Kualitas Air
IKU	:	Indeks Kualitas Udara
IKTL	:	Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Tangerang termasuk dalam kategori yang mana dari 5 kategori berikut:

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber: PerMen LHK No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan formula perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tersebut kemudian didapatkan nilai IKLH Kota Tangerang sebagai berikut:

$$IKLH_{\text{Kota Tangerang}} = (IKA \times 0,376) + (IKU \times 0,405) + (IKTL \times 0,219)$$

Sehingga:

$$IKLH_{\text{Kota Tangerang}} = (IPA \times 0,376) + (IPU \times 0,405) + (ITH \times 0,219)$$

$$IKLH_{\text{Kota Tangerang}} = (48,67 \times 0,376) + (58,47 \times 0,405) + (22,54 \times 0,219)$$

$$IKLH_{\text{Kota Tangerang}} = \mathbf{46,92}$$

Dari perhitungan tersebut didapatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tangerang tahun 2023 adalah 46,92 point atau masuk dalam kategori “Kurang” dengan persentase 80,99%. Pencapaian realisasi Tahun 2023 dibawah target yang ditentukan sebesar 57,93 point.

Penyebab realisasi kinerja IKLH tahun 2023 tidak dapat mencapai target adalah karena pengukuran di 3 (tiga) indikator sasaran semua mengalami penurunan, yang di karenakan kondisi lingkungan pada waktu pengambilan sampel sedang terjadi fenomena El nino yang menyebabkan kondisi cuaca menjadi lebih kering atau curah hujan dibawah sehingga mempengaruhi kualitas air permukaan dan mempengaruhi nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan

Indeks Kualitas Udara (IKU) serta metode perhitungan nilai IKA dan IKU diambil dari sistem IKLH milik KLHK yang menggunakan pendekatan data dari Kota Tangerang, Provinsi Banten dan KLHK.

N.1.1. Upaya yang Telah Dilakukan

Dalam menunjang pencapaian target IKLH terdapat 3 program, 4 kegiatan, dan 5 sub kegiatan pendukung. Diantaranya Program pengendalian dan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup, Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi
Program pengendalian dan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	3.512.965.726	2.442.694.886
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.733.613.726	1.810.170.886
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	858.724.400	639.483.500
jumlah institusi dan/atau non institusi yang dipantau	20 institusi/non institusi	20 institusi/non institusi
Jumlah kegiatan pelaksanaan Hari bebas Kendaraan	22 kegiatan	14 kegiatan
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	779.352.000	632.524.000
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	779.352.000	632.524.000
Cakupan Frekuensi Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Kondisi Ekologis	2 periode	2 periode
Cakupan Frekuensi Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan	1 periode	1 periode
Frekuensi pelaksanaan pengujian emisi penunjang Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) Program Langit Biru	1 kegiatan	1 kegiatan
Jumlah buku IKPLHD yang diselesaikan dari jumlah target penyusunan dokumen SLHD	2 buku	2 buku
Pemantauan Kualitas Air Tanah dan Air Situ	2 periode	2 periode
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	7.091.868.000	66.700.000
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.091.868.000	66.700.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.091.868.000	66.700.000
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
luas lahan dan bangunan yang di ganti rugi	3500 M2	0
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	26.128.000	20.240.000
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	26.128.000	20.240.000
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	26.128.000	20.240.000
Jumlah Pohon yang ditanam	184 pohon	184 pohon

Sub Kegiatan penunjang pencapaian IKLH Tahun 2023 hampir semua tercapai, hanya Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak tercapai, yaitu sebesar 0,94%. Alasan tidak tercapai karena kurangnya waktu pelaksanaan, oleh karena itu terserap hanya perencanaannya.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan penataan berupa pengawasan ke perusahaan-perusahaan terkait pengelolaan lingkungan hidup
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan penyelesaian pengaduan dan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup dengan menangani pengaduan. Penyelesaian sengketa Tahun 2023 dari pengaduan sebanyak 76 pengaduan yang terselesaikan penegakkan hukum lingkungan hidup sebagai upaya untuk mencegah atau menghentikan pencemaran/perusakan yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup. Tahun 2023 jumlah kasus pelanggaran lingkungan hidup yang ditangani sebanyak 31 usaha/kegiatan.

N.1.2. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Masih tingginya tingkat pencemaran air sungai dan situ/danau, tingkat pencemaran udara dan kebisingan, didapat nilai IKA tahun 2023 sebesar 48,67 point dengan kategori “kurang” dan nilai IKU 58,47 point dengan kategori “sedang”.
2. Hasil perhitungan IKU masih menggunakan alat yang lama, sehingga kurang tingkat akuratnya.
3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait konservasi air.
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap pentingnya Dokumen/Ijin lingkungan, (Air, Udara dan Tanah), masih terdapat beberapa pengelola usaha yang masih di berikan sanksi sebanyak 31 sanksi tertulis maupun paksaan pemerintah.

N.1.3. Solusi Terhadap Permasalahan

1. Upaya meningkatkan Indeks Kualitas Air dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Permukiman dan Pertanahan terkait informasi pencemaran akibat limbah rumah tangga seperti penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah rumah tangga, pembuatan septic tank dan IPAL komunal di wilayah tercemar, dan peningkatan upaya penanganan tinja.
2. Untuk menjamin hasil yang lebih akurat maka di perlukan pemeliharaan alat stasiun pemantau kualitas udara secara berkala. Dari hasil

pemeliharaan terakhir diperlukan penggantian sensor untuk setiap paramenter. Alat pemantauan kualitas udara terdapat di 2 (dua) stasiun pos pemantau udara otomatis, antaranya berlokasi di Jl. Benteng betawi, Jl. Sudirman (mewakili sektor transportasi) dan Kantor Sudimara Barat (mewakili sektor permukiman dan perkantoran)

3. Melakukan pembinaan terkait konservasi air berupa pembuatan sumur injeksi dan biopori super jumbo kepada masyarakat, sehingga mengubah pola pikir masyarakat untuk membantu memelihara, melindungi, dan mengelola sumber daya air agar mencegah air kotor yang akan mencemari ketersediaan air tanah
4. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup kepada perusahaan yang ada di Kota Tangerang.

N.2. Uraian Pencapaian Kinerja Tingkat Pengelolaan Sampah

Jumlah timbulan sampah tahun 2023 ialah 514.330 ton/tahun, yang terdiri dari jumlah sampah yang ditangani mencapai 385.460,44 ton/tahun atau setara dengan persentase penanganan sampah mencapai 74,92% dari jumlah timbulan sampah yang dikelola ialah 128.869,42 ton/ tahun setara 25,05% jumlah timbulan sampah yang berhasil direduksi di sumber. Sehingga dengan demikian Sehingga realisasi capaian kinerja tingkat pengelolaan sampah tahun 2023 sebesar 99,97%. Hal itu di karenakan masih terjadi perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai dengan jadwal pengangkutan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Pengelolaan sampah yang dilakukan di Kota Tangerang tidaklah cukup hanya sampai pada tahap pelayanan pengangkutan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) saja. Pengelolaan sampah harus dilakukan hingga tahap pengurangan volume sampah di sumber agar sampah yang dibuang ke TPA hanya berupa residu yang benar-benar sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memperpanjang usia operasional TPA dan mendayagunakan sampah agar lebih berguna dan bernilai ekonomis. Paradigma baru pengelolaan sampah ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yakni menerapkan mekanisme mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang atau sering disebut 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*).

Pembatasan timbulan sampah dilakukan di berbagai tempat, seperti sekolah adiwiyata dan non adiwiyata, pondok pesantren, perkantoran, pasar, retail modern, penginapan/hotel/wisma, rumah makan/restoran, serta kegiatan gerakan sumber bersih. Selanjutnya, pengurangan dari sampah yang dimanfaatkan kembali melalui bank sampah, lapak, serta pemulung di sumber maupun TPA. Sedangkan, kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan biokonversi maggot, komposting skala rumah tangga, sedekah sampah anorganik, dan pembuatan biopori.

Tabel II-48 Pengurangan Sampah di Kota Tangerang Tahun 2023**A. Pembatasan Timbulan Sampah**

No.	Lokasi Kegiatan Pembatasan Timbulan Sampah	Jumlah (Unit)	Jumlah Timbulan Sampah sebelum ada pembatasan (ton/hari)	Timbulan Sampah sebelum ada pembatasan (ton/tahun)	Jumlah Timbulan Sampah Setelah ada Pembatasan (ton/hari)	Jumlah Timbulan Sampah Setelah ada Pembatasan (ton/tahun)	Jumlah Sampah yang dibatasi (ton/hari)	Jumlah Sampah yang dibatasi (ton/tahun)
1	Sekolah	487	66,97862	24.447,19466	36,82358	13.440,60506	30,15504	11.006,58960
2	Perguruan Tinggi	0	4,72598	1.724,98422	4,72598	1.724,98422	0	0,00000
3	Pondok Pesantren	29	9,28901	3.390,48685	8,29141	3.026,36285	0,99760	364,12400
4	Perkantoran	144	56,83970	20.746,48921	54,36290	19.842,45721	2,47680	904,03200
5	Pasar	10	46,33227	16.911,27875	42,46227	15.498,72875	3,87000	1.412,55000
6	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS/Puskesmas/Klinik)	39	3,02773	1.105,12226	1,35073	493,01726	1,67700	612,10500
7	Retail Modern / Swalayan / Mini market	556	22,11041	8.070,30069	2,98401	1.089,16469	19,12640	6.981,13600
8	Pertokoan/Kios/Warung	125	7,37014	2.690,10023	6,29514	2.297,72523	1,07500	392,37500
9	Industri	1045	175,62838	64.104,35885	121,70638	44.422,82885	53,92200	19.681,53000
10	Penginapan/Hotel/Wisma	56	6,89207	2.515,60724	6,41047	2.339,82324	0,48160	175,78400
11	Rumah Makan/Restoran	36	30,80518	11.243,89191	30,18598	11.017,88391	0,61920	226,00800
12	Lembaga Perumahan (Lapas)	5	0,81483	297,41113	0,77183	281,71613	0,04300	15,69500
13	Terminal Bus / Angkot	1	2,35820	860,74184	2,34100	854,46384	0,01720	6,27800
14	Stasiun Kereta Api	4	2,94806	1.076,04009	2,26006	824,92009	0,68800	251,12000
15	Pelabuhan Penumpang	0		0,00000	0	0,00000	0	0,00000
16	Bandara Udara	1	7,57264	2.764,01527	6,71264	2.450,11527	0,86000	313,90000
17	Tempat Ibadah	5	1,12437	410,39364	1,08137	394,69864	0,04300	15,69500
18	Tempat Wisata	0		0,00000	0	0,00000	0	0,00000
19	Taman Kota	0		0,00000	0	0,00000	0	0,00000
20	Hutan Kota	0		0,00000	0	0,00000	0	0,00000
21	Permukiman	478	964,71119	352.119,58310	962,548797	351.330,30950	2,16239	789,27360
22	Kegiatan Gerakan Sumber Bersih (HPSN, Jumat Bersih, Bersih-Bersih Pantai, Event Lainnya)			0,00000	0	0,00000		0,00000
23	Lainnya	...		0,00000	0	0,00000		0,00000
	Total	3.021	1.409,52877	514.478,00000	1.291,31455	471.329,80474	118,21423	43.148,19520

B. Pemanfaatan Kembali Sampah

No	Lokasi Kegiatan Pemanfaatan Kembali Sampah	Jumlah lokasi (Unit)	Jenis Sampah yang dimanfaatkan kembali					Total Sampah yang Dimanfaatkan Kembali (ton/bulan)	Jumlah Sampah yang Dimanfaatkan Kembali (ton/tahun)	
			Jumlah Kemasan Botol Kaca/Beling (ton/bulan)	Jumlah Kemasan Botol PET (ton/bulan)	Jumlah Kemasan Botol Aluminium (ton/bulan)	Jumlah Kemasan Cat (ton/bulan)	Jumlah Ban (Mobil/Motor/ Sepeda) (ton/bulan)			Jumlah Lain-Lain (ton/bulan)
1	Permukiman	24.350	59,56010	7,40240	7,74330	26,78500			101,49080	1.217,88960
2	Sekolah								0,00000	0,00000
3	Perguruan Tinggi								0,00000	0,00000
4	Pondok Pesantren								0,00000	0,00000
5	Perkantoran								0,00000	0,00000
6	Pasar								0,00000	0,00000
7	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS/Puskesmas/Klinik)								0,00000	0,00000
8	Pusat Perniagaan (Pertokoan, retail, swalayan, mini market, dll)								0,00000	0,00000
9	Industri								0,00000	0,00000
10	LAPAS (Lembaga Perasyarakatan)								0,00000	0,00000
11	Fasilitas Publik (Terminal, Bandara, Stasiun KA, Pelabuhan, taman kota ,dll)								0,00000	0,00000
12	Hotel/Penginapan								0,00000	0,00000
13	Restoran								0,00000	0,00000
14	Lain-Lain								0,00000	0,00000
Total		24.350	59,56010	7,40240	7,74330	26,78500	0,00000	0,00000	101,49080	1.217,88960

C. Pendaauran Ulang Sampah

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/hari)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/tahun)	PENDAURAN ULANG SAMPAH			Jumlah Pendaauran Ulang Sampah / Sampah Terkelola (ton/hari)	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah / sampah Terkelola (ton/tahun)
					Bahan Baku Pakan Ternak / Ikan (ton/hari)	Bahan Baku Kompos (ton/hari)	Bahan Baku Daur Ulang / Industri Daur Ulang (ton/hari)		
1	Komposting skala kecil atau RT/RW (tong komposter, takakura,dll) dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	478	9,560	584,000	0,000	9,560	0,000	9,560	584,000
2	Bank Sampah Unit (An Organik) dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	75	9,375	3421,875	0,000	0,000	9,375	9,375	3421,875
3	Bank Sampah Induk (AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	1	2,500	912,500	0,000	0,000	2,500	2,500	912,500
4	TPS3R (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	8	7,228	2638,220	0,000	2,488	1,219	7,228	2638,220
5	Rumah kompos dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	TPST (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	PDU (Pusat Daur Ulang) (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	POO (Pusat Olah Organik) (Organik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	3	27,738	10124,370	27,738	0,000	0,000	27,738	10124,370
9	Biodigester (Organik) dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Daur Ulang Produk Kreatif dikelola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll)	75	0,225	82,125	0,000	0,000	0,225	0,225	82,125
11	Pengepul/Lapak	46	182,850	66740,250	0,000	0,000	182,850	182,850	66740,250
Total		686	239,476	84503,340	7,484	12,048	196,169	239,476	84503,340

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 2024

Berdasarkan data tabel di atas upaya pengurangan sampah dilakukan dengan 3 aktivitas yaitu pembatasan timbulan, pemanfaatan, dan pendaurulangan sampah. Melalui upaya pembatasan timbulan sampah, telah dicapai jumlah sampah yang dibatasi 43.148,19520 ton/tahun. Berdasarkan sampah terkelola melalui upaya pembatasan sampah paling besar berhasil dilakukan di lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, pdan pesantren) dan tempat aktivitas ekonomi (industri). Sedangkan jika dilihat dari berat sampah yang berhasil dibatasi paling banyak adalah dari industri dengan pembatasan timbulan sampah per tahun 19.681,53000 ton, sekolah 11.006,58960 ton, dan Retail Modern / Swalayan / Mini market 6.981,13600 ton/ tahun.

Kemudian dari upaya pemanfaatan sampah di 24.350 lokasi pemukiman sampah yang dimanfaatkan kembali mencapai 1.217,88960 ton/tahun. Kemudian dari aktivitas pendaurulangan sampah telah mendaur ulang 84503,340 ton/tahun kontribusi terbesarnya dari Pengepul/Lapak 66740,250 ton/tahun dan POO (Pusat Olah Organik) (Organik) dikelola oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll) 10124,370.

Dari segi jenis sampah anorganik dan jumlah yang termanfaatkan, persentase pemanfaatan yang signifikan dalam mengurangi sampah di sumber adalah dari lapak. Sampah seperti botol plastik, kardus, kertas, kantong plastik, kaca, dan besi yang dikelola oleh lapak dapat dijual kembali sehingga menjadi bernilai ekonomis. Selain itu, terdapat pemulung baik di sumber maupun di TPA yang juga memberikan kontribusi terhadap pengurangan sampah.

Dalam hal pengurangan sampah melalui proses daur ulang, terdapat inovasi program baru yaitu pengolahan sampah organik dengan biokonversi maggot yang telah terlaksana di ITF, TPS 3R, maupun masyarakat. Meskipun persentasenya saat ini belum terlalu besar karena masih belum lama berjalan, maggot menjadi solusi terbaik bagi pengurangan sampah organik.

Dengan demikian total pengurangan sampah dari seluruh aktivitas (pembatasan, pemanfaatan, dan pendaurulangan) telah mengurangi 128.869,42 ton/tahun atau setara dengan 25,05% dari timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Tangerang.

Kemudian upaya pengelolaan dan pemrosesan sampah berikutnya adalah penanganan sampah yang dilakukan dengan pengolahan sampah menjadi bahan baku, pemanfaatan menjadi sumber energi, dan pemrosesan akhir. Progres hasil pengelolaan melalui penanganan sampah disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-49 Penanganan Sampah di Kota Tangerang Tahun 2023**D. Pengolahan****D.1. Terolah Menjadi Bahan Baku**

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/hari)	Jumlah Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/tahun)	Terolah menjadi Bahan Baku					Jumlah Sampah Terkelola (ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (ton/tahun)	Residu (ton/tahun)
					Bahan Baku Pakan Ternak / Ikan (ton/hari)	Bahan Baku Kompos (ton/hari)	Bahan Baku Daur Ulang (ton/hari)	Bahan Baku Upcycle (ton/hari)	Bahan Baku Sumber Energi (ton/hari)			
1	TPS3R / UPS (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	TPST (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh sistem kota (pemda) (Diluar TPA)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	Rumah kompos (Organik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	1	1,056	385,440	0,0000	1,056	-	-	0,0000	1,056	385,440	0,0000
4	PDU (Pusat Daur Ulang) (Organik dan atau AnOrganik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	POO (Pusat Olah Organik) (Organik) dikelola oleh sistem kota (pemda)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6	ITF (Organik dan atau Anorganik) dikelola oleh sistem kota (pemda) "Non Incenerator"	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7	Daur Ulang Produk Kreatif dikelola oleh sistem kota (pemda) (Anorganik)	0	0,0000	0,0000	-	-	0,0000	0,0000	-	0,0000	0,0000	0,0000
Total		1	1,056	385,440	0,0000	1,056	0,0000	0,0000	0,0000	1,056	385,440	0,0000

D.2. Sampah Menjadi Sumber Energi

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Jumlah Sampah yang masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang masuk (ton/tahun)	Jumlah Sampah Terkelola (ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (ton/tahun)	Residu (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
1	Biodigester dikelola oleh sistem kota (pemda/swasta yang bermitra dengan pemda)	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
2	Proses Thermal (Incenerator, gasifikasi, pirolisis) dikelola oleh sistem kota (pemda/swasta yang bermitra dengan pemda)	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
3	RDF (Refuse Derived Fuel) dikelola oleh sistem kota (pemda/swasta yang bermitra dengan pemda)	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Total		0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

E. Pemrosesan Akhir / TPA / TPST di TPA

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	TPA / TPST Sanitary/Control Landfill (ton/hari)	TPA Open Dumping (ton/hari)	TPA / TPST Sanitary/Control Landfill (ton/tahun)	TPA Open Dumping (ton/tahun)
Masuk ke TPA/TPST					
1	Jumlah TPA (unit)	1	0	1	0
2	Jumlah sampah yang masuk ke TPA	1.055,000	0,00	385.075,000	0,00
3	Jumlah sampah yang menjadi bahan baku kompos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jumlah sampah yang menjadi bahan baku daur ulang atau industri daur ulang	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jumlah Hasil Pulungan oleh Pemulung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Jumlah yang masuk ke landfill	1.055,000	0,00	385.075,000	0,00
7	Penangkapan dan Pemanfaatan Gas Metan Sebagai Sumber Energi Listrik				
Jumlah (sampah yg masuk ke TPA)		1.055,000	0,00	385.075,000	0,00
Total Sampah terkelola di TPA/TPST		1.055,000	ton/ hari	385.075,000	ton/tahun
Total TPA/ TPST di Kabupaten / Kota		1			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 2024

Pada upaya penanganan dengan mengolah menjadi bahan baku yakni mengubah sampah menjadi bahan bermanfaat untuk proses produksi lainnya misalnya sampah organik menjadi kompos untuk pupuk tanaman atau sampah anorganik menjadi bahan baku untuk memproduksi barang lainnya. Dari upaya tersebut jumlah sampah yang terkelola ialah 385,440 ton/tahun, terdiri dari kompos 1,056 ton/tahun. Kemudian, residu sampah yang tidak terkelola di sumber dilakukan upaya penanganan pemrosesan akhir di TPA Rawa Kucing, jumlah sampah yang masuk ke TPA mencapai 385,440 ton/tahun. Sehingga dengan demikian total sampah yang ditangani mencapai 385.460,44 ton/tahun atau setara dengan persentase penanganan sampah mencapai 74,92% dari total timbulan sampah yang dihasilkan setelah dikurangi 25,05% timbulan sampah yang berhasil direduksi di sumber.

N.2.1. Upaya yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2023 kegiatan pengurangan sampah dengan melakukan upaya sebagai berikut:

- Melakukan penanganan sampah berupa pengangkutan sampah setiap harinya sebanyak 2 (dua) ritase;
- Melakukan pemeliharaan armada pengangkut sampah yang mengalami trouble;
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan melakukan pembinaan kepada kader bank sampah sebanyak 86 lokasi bank sampah yang ada di Kota Tangerang;
- Melakukan pengembangan teknologi pengolahan persampahan antara lain biokonversi maggot dan TPS 3R, guna mengurangi timbulan sampah yang ada di Kota Tangerang;
- Melakukan pembinaan terkait pengelolaan sampah kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Tangerang. Diharapkan dapat mengubah pola pikir mereka untuk lebih peduli dengan lingkungan;
- Pengolahan sampah organik dengan cara mengolah sampah organik menjadi kompos, ecoenzim, molase, teapace, komposter, composbag;
- Melakukan optimalisasi TPA dan perbaikan alat berat untuk operasional sampah di TPA;
- Pembinaan terkait Perlindungan dan pengelolaan sampah hidup kepada Sekolah Adhiwiyata, Kampung Iklim dan Saka Kalpataru.

Dalam menunjang pencapaian Tingkat Pengelolaan Persampahan pada tahun 2023, dilaksanakan 1 program, 1 kegiatan, dan 4 sub kegiatan pendukung, yaitu Program Pengelolaan Persampahan.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi
Program Pengelolaan Persampahan	143.124.353.605,00	138.158.374.950,00
Pengelolaan Persampahan	143.124.353.605,00	138.158.374.950,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	6.352.516.587,00	5.945.671.132,00
Jumlah Sampah yang termanfaatkan dan terdaur ulang	128619.5 ton per tahun	128869,42 ton per tahun
Tersedianya data/informasi penanganan sampah	1 buku	1 buku
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	103.864.464.569,00	102.220.434.898,00
Jumlah limbah B3 domestik yang dikelola	355 KG	355 KG
Jumlah lokasi pengolahan sampah yang beroperasi	13 lokasi	10 lokasi
Jumlah sampah yang terangkut ke TPA	385858.5 ton per tahun	385460,44 ton per tahun
Operasionalisasi TPA di Kota Tangerang	72 poin	0
Persentase cakupan area pelayanan di 6 Kecamatan	100%	100%
Persentase cakupan area pelayanan di 7 Kecamatan	100%	100%
Persentase Pencapaian target retribusi	100%	100%
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	494.432.272,00	450.745.276,00
Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	3 Kelompok
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	32.412.940.177,00	29.541.523.644,00
Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 lokasi	1 lokasi

N.2.2. Permasalahan Yang Dihadapi

Masalah atau hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan indikator Tingkat Pengelolaan Persampahan pada tahun 2023 yaitu:

1. Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dari sumbernya.
2. Hasil yang diperoleh dari beberapa teknologi pengelolaan sampah yang ada belum terlalu signifikan dalam pengurangan sampah, harus ada terobosan teknologi yang lebih canggih untuk menekan angka timbulan sampah.
3. Belum ada kestabilan harga pada bank sampah, sehingga beberapa masyarakat kurang berpartisipasi.
4. Masih kurangnya sistem penanganan sampah di perkotaan.

5. Peraturan terkait pengelolaan sampah yang ada belum diterapkan kepada masyarakat, sehingga belum ada punishment yang diterima oleh masyarakat.
6. Ketersediaan lahan untuk membuang residu sampah di TPA semakin sempit dan berangsur-angsur habis sehingga usia operasionalnya semakin kritis, itu dikarenakan jumlah sampah yang dibuang ke TPA semakin hari semakin banyak.

N.2.3. Solusi Terhadap Permasalahan

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi di atas antara lain :

1. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat secara berkelanjutan dalam menerapkan gerakan 3R, dengan melakukan pembinaan pengelolaan sampah kepada sekolah-sekolah atau masyarakat di wilayah Kota Tangerang.
2. Membuat peraturan terkait bank sampah dari aturan pendirian bank sampah, pengelola bank sampah sampai dengan daftar harga sampah yang sesuai dengan harga pasar, agar masyarakat tertarik untuk ikut berpartisipasi menjadi nasabah bank sampah.
3. Saat ini jumlah bank sampah yang ada di Kota Tangerang sebanyak 86 lokasi.
4. Menggencarkan dan memfasilitasi pelatihan kepada masyarakat dalam pengolahan sampah organik dengan biokonversi maggot untuk meningkatkan pengurangan sampah secara signifikan.
5. Mengoptimalkan kinerja TPS 3R guna meningkatkan efektifitas operasional dan pemeliharannya.
6. Kota Tangerang sedang mempersiapkan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) yang sampai dengan saat ini telah menjalani proses finalisasi perjanjian kerja sama dengan badan usaha pelaksana, penyediaan lahan serta sudah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait.

O. Kinerja Sasaran 10**Tabel II-50 Capaian Kinerja Sasaran 10 Tahun 2023**

Sasaran 10: Meningkatnya Investasi Daerah

Indikator	Satuan	2023			Predikat Capaian	Target Akhir RPJMD (2023)	Target Akhir - Realisasi 2023
		Target	Realisasi	% Capaian			
1 Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Trilyun	9,67	14,99	155,01%	Tercapai (Melebihi Target)	9,67	5,32
Rata-rata Capaian				155,01%			

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10: Meningkatnya Investasi Daerah Tahun 2023 yang dinilai melalui 1 indikator kinerja adalah sebesar 155,01% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun realisasi indikator Sasaran 10: Meningkatnya Investasi Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Nilai investasi (PMA dan PMDN) Tahun 2023 mencapai Rp14,99 Trilyun lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu Rp9,67 Trilyun, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 155,01% atau dengan predikat tercapai melebihi target. Realisasi Nilai investasi (PMA dan PMDN) Tahun 2023 yang mencapai Rp14,99 Trilyun jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu Rp9,67 Trilyun, maka terdapat surplus sebesar Rp5,32 Trilyun, artinya target akhir RPJMD telah terlampaui dari target yang ditetapkan.

O.1. Uraian Pencapaian Kinerja

Persetujuan dan perizinan penanaman modal baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mempunyai pengaruh dalam pengembangan penanaman modal di Indonesia. Proses persetujuan dan perizinan penanaman modal yang mudah, cepat, efisien serta tidak berbelit-belit dan birokrasi yang panjang merupakan suatu kendala yang sangat memberatkan bagi pelaku usaha. Dalam upaya pembenahan pelayanan perizinan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang menyediakan pelayanan perizinan secara *Online Single Submission* (OSS) yang terintegrasi secara elektronik. Pelayanan izin OSS dalam arti penanaman modal tidak perlu hadir secara fisik untuk mendapatkan pelayanan. Dalam peraturan pemerintah tersebut, perizinan telah banyak disederhanakan serta dapat diterbitkan berdasarkan komitmen bahkan waktu yang dibutuhkan dalam penerbitan perizinan juga telah ditentukan namun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelumnya.

Realisasi Nilai Investasi pada Tahun 2023 sebesar Rp 14,99 Triliun melebihi dari target sebesar Rp 9,67 Triliun (155,02%). Perkembangan realisasi

investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Izin Usaha ini sangat tergantung kepada kepatuhan dan perhatian para pengusaha baik PMA maupun PMDN dalam menyampaikan LKPM setiap tahunnya.

Realisasi nilai investasi tahun 2023 bertambah sebesar 14,86% jika dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2022, Realisasi nilai investasi tahun 2023 bertambah sebesar 18,68% jika dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2021 sebesar 12,63 Triliun, Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi investasi pada tahun 2020 sebesar 8,35 Triliun meningkat sebesar 79,52%. Jika dibandingkan dengan realisasi awal Renstra yaitu tahun 2019 realisasi investasi sebesar 7,97 Triliun atau meningkat 88,08%. Jika dibandingkan dengan realisasi investasi pada tahun 2018 sebesar 7,73 Triliun meningkat sebesar 93,91%.

Jika kepatuhan para pengusaha dalam menyampaikan LKPM tersebut semakin baik maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pada tahun-tahun berikutnya akan semakin meningkat dan pemerintah daerah dapat memantau perkembangan investasi dengan baik. Akan tetapi, jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pengusaha maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pun akan cenderung menurun bahkan semakin berkurang. Oleh karena itu, sinergitas antara pengusaha dengan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan agar setiap kegiatan investasi di daerah dapat dikendalikan dan terpantau dengan baik sehingga diharapkan Iklim Investasi di Kota Tangerang cenderung lebih kondusif pada tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dan pemerintah daerah, dengan upaya secara terus menerus menyederhanakan proses perizinan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Mal Pelayanan Publik khususnya di Kota Tangerang.

0.1.1. Upaya yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target penanaman modal tahun 2023 melalui beberapa kegiatan berikut:

1. Menyusun strategi promosi penanaman modal berupa kajian profil sektor unggulan daerah dalam program promosi penanaman modal.
2. Melakukan Sosialisasi penanaman modal dan pelayanan perizinan berupa Cetak Baliho yang terpasang pada papan reklame di jalan protokol perbatasan Kota Tangerang dan Jalan Tol Jakarta Tangerang dalam program promosi penanaman modal.
3. Melakukan Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 kali dengan 255 peserta (pengusaha) dan Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha sebanyak 8 kali dengan 280 peserta (pengusaha) dalam merealisasikan kegiatan usahanya dalam proram pengendalian penanaman modal.

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	3.200.000,00	532.500,00
	1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.200.000,00	532.500,00
	Jumlah kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan
	1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3.200.000,00	532.500,00
	Jumlah kebijakan Daerah mengenai perizinan dan penanaman modal yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	306.654.600,00	288.500.000,00
	1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	306.654.600,00	288.500.000,00
	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 kegiatan	2 kegiatan
	1 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	97.034.400,00	94.125.000,00
	Jumlah strategi promosi penanaman modal yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen
	2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	209.620.200,00	194.375.000,00
	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah kota/kabupaten	3 kali	3 kali
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	292.100.000,00	219.444.750,00
	1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	85.875.000,00	82.007.000,00
	Jumlah kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	2 kegiatan	2 kegiatan
	1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.875.000,00	12.875.000,00
	Jumlah rapat pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	3 kali	3 kali
	2 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	70.000.000,00	69.132.000,00
	Jumlah iklan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	7 kali	7 kali
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	292.100.000,00	219.444.750,00
	1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	292.100.000,00	219.444.750,00
	Jumlah kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	279.500.000,00	208.754.750,00
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	255 Pelaku Usaha	255 Pelaku Usaha
	Jumlah pengusaha/pelaku usaha yang mengikuti pembinaan	280 Pelaku Usaha	280 Pelaku Usaha
	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	12.600.000,00	10.690.000,00
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	16 Kegiatan Usaha	16 Kegiatan Usaha
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	138.121.200,00	102.000.000,00
	1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	138.121.200,00	102.000.000,00
	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	138.121.200,00	102.000.000,00
	Jumlah Rapat Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 kali	1 kali
	TOTAL	825.950.800,00	692.484.250,00

O.1.2. Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan upaya peningkatan penanaman modal pada tahun 2023 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Tidak tersedianya data peluang pasar investasi di Kota Tangerang sebagai acuan Investor untuk berinvestasi di Kota Tangerang.
2. Masih banyaknya Perusahaan PMA dan PMDN yang belum melaporkan (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal untuk mengetahui perkembangan investasi Di Kota Tangerang. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. LKPM mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan di setiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal di bidang usaha perdagangan, LKPM cukup berdasarkan lokasi yang telah dinyatakan pada Izin Prinsip. Masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan LKPM.
3. Masih banyaknya Masyarakat atau Investor yang belum mengetahui tentang prosedur dan kemudahan perizinan di Kota Tangerang.

O.1.3. Solusi Terhadap Permasalahan

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi di atas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan konsinyering dengan mengundang calon investor/pelaku usaha terkait kemudahan perizinan berusaha;
2. Melaksanakan Kajian Investasi Kota Tangerang;
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis laporan penanaman modal bagi Pelaku Usaha PMA dan PMDN;
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur dan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan.

P. Kinerja Sasaran 11**Tabel II-51 Capaian Kinerja Sasaran 11 Tahun 2023**

Sasaran 11: Meningkatnya Perekonomian Masyarakat

Indikator	Satuan	2023			Predikat Capaian	Target Akhir RPJMD (2023)	Target Akhir - Realisasi 2023
		Target	Realisasi	% Capaian			
1 Laju inflasi	%	3,5	3,17	109,43%	Tercapai (Melebihi Target)	3,5	-0,33
2 Indeks gini (gini rasio)	Point	0,305 - 0,316	0,379	80,06%	Tidak Tercapai	0,305 - 0,316	0,063
Rata-rata Capaian				94,75%			

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11: Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Tahun 2023 yang dinilai melalui 2 indikator kinerja adalah sebesar 94,75% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun realisasi indikator Sasaran 11: Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Laju inflasi Tahun 2023 mencapai 3,17% lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 3,5%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 109,43% atau dengan predikat tercapai melampaui target. Realisasi Laju inflasi Tahun 2023 yang mencapai 3,17% jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 3,5% maka terdapat selisih sebesar -0,33%, sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi capaian indikator ini pada akhir periode RPJMD dapat tercapai melampaui yang ditargetkan.
- Realisasi Indeks gini (gini rasio) Tahun 2023 mencapai 0,379 point lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 0,305 - 0,316 point, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 80,06% atau dengan predikat tidak tercapai. Realisasi Indeks gini (gini rasio) Tahun 2023 yang mencapai 0,379 point jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 (target akhir RPJMD) yaitu 0,305-0,316 point, maka terdapat selisih sebesar 0,063 point, sehingga dapat dikatakan bahwa realisasi capaian indikator ini pada akhir periode RPJMD tidak tercapai sesuai yang ditargetkan.

P.1. Uraian Pencapaian Kinerja Laju Inflasi

Inflasi dapat digambarkan sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang pada umumnya berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di suatu wilayah meningkat maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Atas dasar hal tersebut maka laju inflasi kerap dijadikan sebagai salah satu indikator pembangunan suatu daerah atau negara. Tingginya nilai inflasi mengindikasikan semakin terbebannya perekonomian masyarakat karena terjadinya kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, semakin rendah nilai inflasi atau bahkan bernilai negatif (deflasi), maka hal tersebut menunjukkan relatif stabilnya perekonomian masyarakat.

Pada Tahun 2023, inflasi mencapai 3,17%. Realisasi inflasi tahun 2023 tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022 yang mencapai 4,56%.

Relatif stabil dan terkendalnya laju inflasi di Kota Tangerang tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Sebagaimana diketahui bahwa angka inflasi diperoleh dari besar kecilnya pergeseran nilai harga-harga barang kebutuhan masyarakat atau kerap disebut Indeks Harga Konsumen (IHK). Untuk menjaga stabilitas IHK tersebut agar dapat terkendali maka diperlukan adanya intervensi yang intensif dan berkesinambungan dari berbagai pihak, utamanya pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan pasar.

P.1.1. Upaya yang Telah Dilakukan

Mengontrol harga kebutuhan pokok di pasaran dengan meningkatkan kinerja tim pengendalian inflasi daerah (TPID).

P.1.2. Permasalahan Yang Dihadapi

Belum berkembangnya kerjasama dengan daerah lain atau pihak lainnya untuk menyediakan kebutuhan bahan pokok dan strategis sehingga ketersediaan dan stabilitas harganya relatif belum dapat dikendalikan.

P.1.3. Solusi Terhadap Permasalahan

Mengembangkan kerjasama dengan daerah lain atau pihak lainnya untuk menyediakan kebutuhan bahan pokok dan strategis sehingga ketersediaan dan stabilitas harganya dapat dikendalikan.

P.2. Uraian Pencapaian Kinerja Indeks Gini Ratio

Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran-pengeluaran konsumsi atau variabel-variabel lain yang terkait dengan distribusi di mana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik. Dalam bahasa lain Indeks Gini dijelaskan sebagai salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Bila nilai Indeks Gini mendekati satu maka terjadi

ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sedangkan semakin kecil atau mendekati nol nilainya maka semakin merata distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi.

Pada Tahun 2023 Indeks Gini (gini ratio) Kota Tangerang mencapai angka 0,379 point dan mengalami perubahan dari Tahun 2022 yang mencapai 0,383. Kondisi tersebut mencerminkan berubahnya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Tangerang. Kondisi ini awalnya dipicu oleh terjadinya pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi yang melanda sejak tahun 2020. Indeks gini Kota Tangerang Tahun 2023 tersebut juga megandung arti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Tangerang pada Tahun 2023 dikategorikan sebagai tingkat “ketimpangan sedang”.

P.2.1. Upaya yang Telah Dilakukan

1. Program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat kurang mampu untuk menjaga daya beli dan pendapatan masyarakat.
2. Pengembangan, penataan, dan peningkatan industri, perdagangan, UMKM dan koperasi, pariwisata, serta pertanian dan perikanan.
3. Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi masyarakat.
4. Mengembangkan pemberdayaan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana prasarana produksi, kualitas produk yang kreatif dan inovatif, promosi dan pemasaran usaha mikro.
5. Mengembangkan potensi, destinasi, promosi, sumber daya manusia, fasilitas dan jasa pendukung pariwisata sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi.

P.2.2. Permasalahan Yang Dihadapi

Secara keseluruhan, perekonomian Tahun 2023 sudah mulai stabil dan pulih, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang pendapatannya belum stabil terutama golongan masyarakat menengah ke bawah.

P.2.3. Solusi Terhadap Permasalahan

1. Mengadakan program pemberian bantuan modal kepada UKM dengan mekanisme kredit ringan bagi kelompok usaha.
2. Meringankan beban hidup masyarakat dan menjaga daya beli masyarakat antara lain dengan pemberian subsidi, insentif penghapusan denda pajak daerah, dan lain-lain.
3. Menjaga pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah atau golongan masyarakat diantaranya melalui pemberian bantuan sosial (bansos).
4. Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

2.3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Berikut ini diuraikan mengenai analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama (tujuan dan sasaran strategis) Kota Tangerang Tahun 2023.

▪ Uraian Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun Anggaran 2023, penganggarannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang. Pada Tahun Anggaran 2023, jumlah belanja daerah yang dianggarkan (dialokasikan) adalah sebesar Rp5.060.875.781.078,00 dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp4.705.483.322.900,00 sehingga capaian realisasi belanja daerah adalah sebesar 92,98%. Dengan kata lain, tingkat penyerapan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2023 mencapai 92,98%.

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk pendanaan bagi 207 Program dan 1.219 Kegiatan pada 41 OPD yang meliputi: 6 urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 5 Urusan Pilihan, 2 Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, 5 Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, 1 Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, 1 Urusan Unsur Kewilayahan, dan 1 Urusan Unsur Pemerintahan Umum.

Berikut ini diuraikan anggaran dan realisasi belanja daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kelompok belanja.

Tabel II-52 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 Menurut Kelompok Belanja

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Komposisi Anggaran	Komposisi Realisasi
2	BELANJA	5.060.875.781.078,00	4.705.483.322.900,00	92,98		
2.1	BELANJA OPERASI	4.111.223.192.748,00	3.904.618.342.674,00	94,97	81,24%	82,98%
2.1.1	Belanja Pegawai	1.629.920.043.105,00	1.568.820.763.541,00	96,25		
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.268.069.980.243,00	2.124.268.170.782,00	93,66		
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00			
2.1.3	Belanja Subsidi	37.000.000.000,00	36.352.600.597,00	98,25		
2.1.4	Belanja Hibah	172.135.169.400,00	171.119.307.754,00	99,41		
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.098.000.000,00	4.057.500.000,00	99,01		
2.2	BELANJA MODAL	912.667.075.407,00	800.254.297.026,00	87,68	18,03%	17,01%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	62.644.910.736,00	11.206.062.731,00	17,89		
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	176.550.710.550,00	166.010.986.051,00	94,03		
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	257.972.796.180,00	235.599.718.327,00	91,33		
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	377.984.249.310,00	354.196.828.076,00	93,71		
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.526.565.701,00	22.225.309.936,00	98,66		

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Komposisi Anggaran	Komposisi Realisasi
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	14.987.842.930,00	11.015.391.905,00	73,50		
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	36.985.512.923,00	610.683.200,00	1,65	0,73%	0,01%
2.3.1	Belanja Tak Terduga	36.985.512.923,00	610.683.200,00	1,65		
3	TRANSFER	0,00	0,00		0,00%	0,00%
3.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	0,00	0,00			
3.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00			

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, 6 Maret 2024

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, kinerja kelompok belanja daerah pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, dianggarkan sebesar Rp4.111.223.192.748,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp3.904.618.342.674,00 sehingga capaiannya adalah sebesar 94,97%.
2. Belanja Modal, dianggarkan sebesar Rp912.667.075.407,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp800.254.297.026,00 sehingga capaiannya adalah sebesar 87,68%.
3. Belanja Tidak Terduga, dianggarkan sebesar Rp36.985.512.923,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp610.683.200,00 sehingga capaiannya adalah sebesar 1,65%.
4. Komposisi Belanja Operasi mencapai 81,24% dari total Belanja.
5. Komposisi Belanja Modal mencapai 18,03% dari total Belanja.
6. Komposisi Belanja Tidak Terduga mencapai 0,73% dari total Belanja.

Berikut ini diuraikan alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 berdasarkan organisasi perangkat daerah (OPD).

Tabel II-53 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 Menurut Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kode	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.01.0.00.0.00.11.0000	DINAS PENDIDIKAN	1.016.089.349.970,00	983.817.131.172,00	96,82
	BOS SD - DINAS PENDIDIKAN	152.808.403.009,00	151.293.331.646,00	99,01
	BOS SMP - DINAS PENDIDIKAN	77.102.880.000,00	76.776.226.313,00	99,58
	BOP PAUD - DINAS PENDIDIKAN	14.481.060.000,00	14.011.352.100,00	96,76
	BOP KESETARAAN - DINAS PENDIDIKAN	4.045.610.000,00	4.225.114.700,00	104,44
1.02.0.00.0.00.10.0000	DINAS KESEHATAN	553.494.686.437,00	528.333.854.201,00	95,45
	BLUD - DINAS KESEHATAN	88.290.228.965,00	85.312.086.998,00	96,63

Kode	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
	BOK - DINAS KESEHATAN	14.281.221.000,00	12.284.061.095,00	86,02
	JKN FKTP - DINAS KESEHATAN	484.596.000,00	163.847.535,00	33,81
1.02.0.00.0.00.10.0001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	114.851.450.514,00	108.298.067.072,00	94,29
	BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	124.043.612.203,00	111.807.740.345,00	90,14
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	596.962.197.097,00	511.334.911.870,00	85,66
1.04.1.03.2.10.20.0000	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	336.152.349.338,00	309.608.396.861,00	92,10
1.05.0.00.0.00.06.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	39.789.796.323,00	38.626.100.082,00	97,08
1.05.0.00.0.00.26.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	42.443.413.916,00	39.227.315.959,00	92,42
1.06.0.00.0.00.17.0000	DINAS SOSIAL	32.162.233.173,00	29.819.071.669,00	92,71
2.07.0.00.0.00.14.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN	25.363.718.902,00	23.525.604.419,00	92,75
2.08.2.14.0.00.25.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	34.520.322.056,00	32.091.912.788,00	92,97
2.09.3.25.3.27.13.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	24.227.747.897,00	22.776.979.400,00	94,01
2.11.0.00.0.00.27.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	223.264.169.685,00	206.357.280.207,00	92,43
2.12.0.00.0.00.15.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	22.278.941.987,00	21.691.611.888,00	97,36
2.15.0.00.0.00.16.0000	DINAS PERHUBUNGAN	174.059.528.903,00	167.487.899.364,00	96,22
2.16.2.20.2.21.18.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	49.006.905.814,00	46.242.221.519,00	94,36
2.18.1.03.0.00.22.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24.661.182.366	23.887.661.083,00	96,86
2.19.0.00.0.00.23.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	78.289.289.842,00	70.270.809.104,00	89,76
2.23.2.24.0.00.21.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	18.056.328.163,00	17.719.315.570,00	98,13
3.26.2.22.2.11.12.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	76.406.541.258,00	68.452.820.010,00	89,59
3.30.2.17.3.31.24.0000	DINAS	29.230.288.838,00	26.127.226.278,00	89,38

Kode	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
	PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	158.487.770.175,00	148.266.234.379,00	93,55
4.02.0.00.0.00.02.0000	SEKRETARIAT DPRD	131.923.014.922,00	112.188.231.377,00	85,04
5.01.5.05.0.00.06.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24.989.234.228,00	24.339.585.425,00	97,40
5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	60.829.794.358,00	58.887.154.084,00	96,81
5.02.0.00.0.00.07.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	102.519.533.098,00	63.572.153.631,00	62,01
5.03.5.04.0.00.05.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	47.228.583.491,00	37.508.506.829,00	79,42
6.01.0.00.0.00.09.0000	INSPEKTORAT	25.983.635.753,00	24.640.059.723,00	94,83
7.01.2.13.0.00.28.0000	KECAMATAN BATUCEPER	31.902.600.268,00	31.303.087.331,00	98,12
7.01.2.13.0.00.29.0000	KECAMATAN BENDA	28.368.239.400,00	27.357.535.736,00	96,44
7.01.2.13.0.00.30.0000	KECAMATAN TANGERANG	38.487.791.875,00	37.096.756.805,00	96,39
7.01.2.13.0.00.31.0000	KECAMATAN CIPONDOH	45.053.813.226,00	43.914.506.883,00	97,47
7.01.2.13.0.00.32.0000	KECAMATAN CIBODAS	32.695.359.392,00	31.597.124.932,00	96,64
7.01.2.13.0.00.33.0000	KECAMATAN CILEDUG	35.037.168.561,00	34.180.069.984,00	97,55
7.01.2.13.0.00.34.0000	KECAMATAN LARANGAN	34.809.980.040,00	32.781.470.828,00	94,17
7.01.2.13.0.00.35.0000	KECAMATAN KARANG TENGAH	32.143.370.590,00	30.779.215.779,00	95,76
7.01.2.13.0.00.36.0000	KECAMATAN NEGLASARI	31.196.737.481,00	30.404.042.936,00	97,46
7.01.2.13.0.00.37.0000	KECAMATAN KARAWACI	57.503.168.063,00	56.445.706.228,00	98,16
7.01.2.13.0.00.38.0000	KECAMATAN JATIWUNG	29.331.487.033,00	27.593.149.599,00	94,07
7.01.2.13.0.00.40.0000	KECAMATAN PINANG	45.261.801.492,00	43.535.100.003,00	96,19
7.01.2.13.2.13.39.0000	KECAMATAN PERIUK	29.531.553.130,00	28.512.773.539,00	96,55
8.01.0.00.0.00.08.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.743.090.846,00	49.010.905.621,00	96,59
	Jumlah	5.060.875.781.078,00	4.705.483.322.900,00	92,98

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, 6 Maret 2024

Berikut ini diuraikan alokasi anggaran dan realisasi anggaran belanja daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Tabel II-54 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Kode	Urusan Pemerintahan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01	PENDIDIKAN	1.264.527.302.979,00	1.230.123.155.931,00	97,28
1.02	KESEHATAN	895.445.795.119,00	846.199.657.246,00	94,50
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	828.051.913.621,00	763.131.529.635,00	92,16
1.04	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	49.135.261.378,00	46.499.233.165,00	94,64
1.05	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	82.233.210.239,00	77.853.416.041,00	94,67
1.06	SOSIAL	32.162.233.173,00	29.819.071.669,00	92,71
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.07	TENAGA KERJA	25.363.718.902,00	23.525.604.419,00	92,75
2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	22.453.582.056,00	20.771.762.013,00	92,51
2.09	PANGAN	20.942.975.501,00	19.620.103.640,00	93,68
2.10	PERTANAHAN	63.019.239.436,00	11.379.245.931,00	18,06
2.11	LINGKUNGAN HIDUP	261.984.160.059,00	245.508.015.682,00	93,71
2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	22.278.941.987,00	21.691.611.888,00	97,36
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	33.988.903.200,00	33.949.839.186,00	99,89
2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.066.740.000,00	11.320.150.775,00	93,81
2.15	PERHUBUNGAN	174.059.528.903,00	167.487.899.364,00	96,22
2.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	46.208.324.364,00	43.545.247.075,00	94,24
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.333.750.100,00	3.643.007.600,00	84,06
2.18	PENANAMAN MODAL	24.661.182.366,00	23.887.661.083,00	96,86
2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	78.289.289.842,00	70.270.809.104,00	89,76
2.20	STATISTIK	1.608.907.450,00	1.513.260.600,00	94,06
2.21	PERSANDIAN	1.189.674.000,00	1.183.713.844,00	99,50
2.22	KEBUDAYAAN	27.482.060.367,00	26.302.340.410,00	95,71
2.23	PERPUSTAKAAN	17.260.729.240,00	16.957.345.647,00	98,24
2.24	KEARSIPAN	795.598.923,00	761.969.923,00	95,77
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	204.351.650,00	198.862.650,00	97,31

Kode	Urusan Pemerintahan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
3.26	PARIWISATA	3.112.622.517,00	2.933.044.125,00	94,23
3.27	PERTANIAN	3.080.420.746,00	2.958.013.110,00	96,03
3.30	PERDAGANGAN	1.862.762.300,00	1.755.732.000,00	94,25
3.31	PERINDUSTRIAN	23.033.776.438,00	20.728.486.678,00	89,99
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	158.487.770.175,00	148.266.234.379,00	93,55
4.02	SEKRETARIAT DPRD	131.923.014.922,00	112.188.231.377,00	85,04
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.01	PERENCANAAN	23.034.255.528,00	22.447.929.725,00	97,45
5.02	KEUANGAN	163.349.327.456,00	122.459.307.715,00	74,97
5.03	KEPEGAWAIAN	38.857.419.641,00	29.528.502.379,00	75,99
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8.371.163.850,00	7.980.004.450,00	95,33
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.954.978.700,00	1.891.655.700,00	96,76
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	25.983.635.753,00	24.640.059.723,00	94,83
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN	437.334.167.351,00	421.541.363.797,00	96,39
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.743.090.846,00	49.010.905.621,00	96,59
	Jumlah	5.060.875.781.078,00	4.705.473.985.300,00	92,98

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, 6 Maret 2024

▪ Upaya Yang Telah Dilakukan

Untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya pada tahun 2023, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan beberapa upaya diantaranya :

1. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada semester 1 untuk mengoptimalkan efisiensi dari pelaksanaan lelang lebih awal agar dapat dialokasikan pada anggaran perubahan tahun berjalan.
2. Mendorong pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersifat non fisik dan dapat dimajukan jadwalnya ke semester 1 untuk dapat diselesaikan lebih awal. Ini dilakukan untuk mendorong penyerapan anggaran lebih maksimal dan agar sisa anggaran hasil pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan pada anggaran perubahan tahun berjalan.
3. Memaksimalkan pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis teknologi informasi untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya. Diantaranya yang sudah dilakukan melalui evaluasi dan pelaporan online, dan kebijakan paperless dimana kegiatan surat menyurat dilakukan melalui penggunaan aplikasi *e-office*. Hal ini berdampak positif dalam meminimalisir penggunaan kertas, printer dan biaya pengiriman dokumen. Selain itu juga meningkatkan efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan untuk mengontrol capaian pelaksanaan pembangunan, khususnya yang bersifat fisik dan mengawal apabila ada kendala dalam pelaksanaannya untuk segera di ambil langkah antisipasi dengan tujuan kegiatan dapat diselesaikan tepat pada waktunya
5. Melakukan koordinasi rutin dengan OPD untuk mengevaluasi capaian indikator RPJMD dan realisasi kegiatan OPD.
6. Mengadakan kerjasama dengan akademisi dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan melalui kajian yang disusun perguruan tinggi atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan fisik swakelola yang dikoordinir OPD Kecamatan.
7. Mengadakan kerjasama dengan dunia usaha agar dapat berkontribusi melalui dana CSR dalam rangka melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

▪ **Kendala Yang Dihadapi**

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemerintah daerah masih terdapat permasalahan yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

1. Komposisi belanja modal terhadap total belanja daerah belum sepenuhnya memenuhi arahan kebijakan keuangan dari Pemerintah Pusat;
2. Keterbatasan kapasitas belanja daerah sehingga belum mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan belanja untuk alokasi program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan berdasarkan beban permasalahan pembangunan yang dihadapi dan usulan aspirasi seluruh pelaku pembangunan;
3. Terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang alokasi anggrannya cukup besar namun tingkat realisasinya (penyerapan) belanjanya masih belum optimal sehingga berdampak pada belum optimalnya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
4. Tingkat penyerapan belanja daerah belum optimal.

▪ **Solusi/Rencana Tindak Lanjut**

Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Mendorong komposisi belanja daerah mendekati komposisi yang diarahkan oleh kebijakan keuangan Pemerintah Pusat terutama meningkatkan alokasi belanja modal;
2. Menerapkan prioritas alokasi belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang lebih mengutamakan pada upaya nyata untuk mengatasi prioritas isu strategis dan permasalahan pembangunan yang

- dihadapi serta mendorong peningkatan pemenuhan alokasi belanja untuk merealisasikan usulan aspirasi seluruh pelaku pembangunan;
3. Mempersiapkan secara matang dan sejak dini dan meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sehingga dapat terlaksana tepat waktu dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
 4. Penanganan masalah-masalah khusus yang perlu segera ditangani serta menampung aspirasi masyarakat yang mendesak dan membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah;
 5. Monitoring berkala penyerapan belanja daerah, melaksanakan pelelangan pengadaan barang dan jasa di awal tahun dan tepat waktu, serta meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.

▪ **Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil capaian kinerja yang dibandingkan dengan capaian anggaran yang digunakan atau direalisasikan (diserap).

Berikut ini diuraikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama (tujuan dan sasaran strategis) Kota Tangerang Tahun 2023.

Tabel II-55 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama (Tujuan dan Sasaran Strategis) Kota Tangerang Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Efisiensi
	Misi 1 : Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berintegritas				
1.1	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	2	103,28%	90,10%	13,18%
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	2	100,38%	93,81%	6,57%
1.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3	77,87%	86,00%	-8,13%
1.2	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1	65,83%	88,19%	-22,36%
1.2.1	Menurunnya Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	100,01%	87,58%	12,43%

No.	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Efisiensi
1.2.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1	110,34%	90,26%	20,08%
1.3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	118,16%	80,27%	37,89%
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik	3	99,49%	79,34%	20,15%
	Misi 2 : Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kota Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan				
2.1	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan	1	99,28%	89,14%	10,14%
2.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Perkotaan	2	102,83%	86,82%	16,01%
2.1.2	Meningkatnya Kualitas Permukiman	3	133,33%	82,56%	50,77%
2.1.3	Meningkatnya Kualitas Drainase dan Sumber Daya Air	1	102,21%	96,25%	5,96%
2.1.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	90,48%	90,12%	0,36%
	Misi 3 : Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Mandiri Dan Berkeadilan				
3.1	Meningkatkan Kualitas Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing	2	101,64%	85,99%	15,65%
3.1.1	Meningkatnya Investasi Daerah	1	155,01%	88,59%	66,42%
3.1.2	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	2	94,75%	84,88%	9,87%
	Jumlah	28	102,49%	92,98%	9,51%

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan data tersebut maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama (tujuan dan sasaran strategis) Kota Tangerang Tahun 2023 mencapai sebesar 9,51%.

2.3.7 Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

A. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Realisasi anggaran program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Kota Tangerang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II-56 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2023

Kode	Urusan Pemerintahan	Jumlah Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				

Kode	Urusan Pemerintahan	Jumlah Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
	DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	PENDIDIKAN	2	1.264.527.302.979,00	1.230.123.155.931,00	97,28
1.02	KESEHATAN	5	895.445.795.119,00	846.199.657.246,00	94,50
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	828.051.913.621,00	763.131.529.635,00	92,16
1.04	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	49.135.261.378,00	46.499.233.165,00	94,64
1.05	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5	82.233.210.239,00	77.853.416.041,00	94,67
1.06	SOSIAL	6	32.162.233.173,00	29.819.071.669,00	92,71
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07	TENAGA KERJA	5	25.363.718.902,00	23.525.604.419,00	92,75
2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	22.453.582.056,00	20.771.762.013,00	92,51
2.09	PANGAN	5	20.942.975.501,00	19.620.103.640,00	93,68
2.10	PERTANAHAN	4	63.019.239.436,00	11.379.245.931,00	18,06
2.11	LINGKUNGAN HIDUP	10	261.984.160.059,00	245.508.015.682,00	93,71
2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	22.278.941.987,00	21.691.611.888,00	97,36
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13	33.988.903.200,00	33.949.839.186,00	99,89
2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	12.066.740.000,00	11.320.150.775,00	93,81
2.15	PERHUBUNGAN	2	174.059.528.903,00	167.487.899.364,00	96,22
2.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	46.208.324.364,00	43.545.247.075,00	94,24
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6	4.333.750.100,00	3.643.007.600,00	84,06
2.18	PENANAMAN MODAL	6	24.661.182.366,00	23.887.661.083,00	96,86
2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	78.289.289.842,00	70.270.809.104,00	89,76
2.20	STATISTIK	1	1.608.907.450,00	1.513.260.600,00	94,06
2.21	PERSANDIAN	1	1.189.674.000,00	1.183.713.844,00	99,50
2.22	KEBUDAYAAN	6	27.482.060.367,00	26.302.340.410,00	95,71
2.23	PERPUSTAKAAN	2	17.260.729.240,00	16.957.345.647,00	98,24
2.24	KEARSIPAN	2	795.598.923,00	761.969.923,00	95,77
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	204.351.650,00	198.862.650,00	97,31
3.26	PARIWISATA	3	3.112.622.517,00	2.933.044.125,00	94,23
3.27	PERTANIAN	2	3.080.420.746,00	2.958.013.110,00	96,03
3.30	PERDAGANGAN	5	1.862.762.300,00	1.755.732.000,00	94,25
3.31	PERINDUSTRIAN	3	23.033.776.438,00	20.728.486.678,00	89,99
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	3	158.487.770.175,00	148.266.234.379,00	93,55
4.02	SEKRETARIAT DPRD	2	131.923.014.922,00	112.188.231.377,00	85,04
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				

Kode	Urusan Pemerintahan	Jumlah Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
5.01	PERENCANAAN	3	23.034.255.528,00	22.447.929.725,00	97,45
5.02	KEUANGAN	6	163.349.327.456,00	122.459.307.715,00	74,97
5.03	KEPEGAWAIAN	2	38.857.419.641,00	29.528.502.379,00	75,99
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	8.371.163.850,00	7.980.004.450,00	95,33
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1.954.978.700,00	1.891.655.700,00	96,76
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	3	25.983.635.753,00	24.640.059.723,00	94,83
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN	52	437.334.167.351,00	421.541.363.797,00	96,39
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	50.743.090.846,00	49.010.905.621,00	96,59
	Jumlah	208	5.060.875.781.078,00	4.705.473.985.300,00	92,98

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, 6 Maret 2024

Indikator kinerja utama Kota Tangerang berdasarkan RPJMD Perubahan Kota Tangerang Tahun 2019-2023 terdapat 5 tujuan yang didukung 11 sasaran dengan total jumlah indikator keseluruhan sebanyak 28 indikator. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kota Tangerang yang telah ditetapkan maka pada Tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 208 program dan 496 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.060.875.781.078,00 yang dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp4.705.473.985.300,00 sehingga capaian realisasi belanjanya mencapai 92,98%.

B. Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Kota Tangerang

- Pemantauan secara berkala setiap bulan melalui rapat koordinasi evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan melalui rapat koordinasi pengendalian evaluasi RKPD Triwulanan yang dilaksanakan Bappeda dengan mengundang seluruh OPD untuk menyampaikan data progress pencapaian sasaran dan program untuk dibahas dan menjadi bahan pengambilan kebijakan baik di lingkup perencanaan maupun penganggaran. Progress pencapaian indikator setiap triwulan juga dibahas pada koordinasi rutin yang dilaksanakan di masing-masing bidang pemegang urusan. Hasil evaluasi secara berkala juga menjadi dasar untuk penajaman pada proses perencanaan dan penganggaran kegiatan saat penyusunan KUA-PPAS hingga APBD Kota Tangerang baik pada anggaran perubahan maupun murni, sehingga kegiatan yang dilaksanakan OPD dioptimalkan untuk mendukung pencapaian indikator yang ada di RPJMD maupun RKPD setiap tahunnya.
- Mempermudah proses penginputan laporan evaluasi secara berkala melalui ketersediaan sistem informasi evaluasi dan pelaporan serta sistem informasi monitoring dan evaluasi.

- Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Kota Tangerang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	688.469.826.412,00	675.115.013.936,00	98,06
	1. Tingkat ketersediaan daya tampung PAUD	83,73	83,73	100,00%
	2. Persentase PAUD yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	89,14	84,2	94,46%
	3. Persentase Pengembangan Minat Bakat Siswa PAUD	100	100	100,00%
	4. Persentase Pendidikan Non Formal yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	100	100	100,00%
	5. Persentase lulusan Paket A,B dan C	100	100	100,00%
	6. Tingkat ketersediaan daya tampung SD	87,92	87,92	100,00%
	7. Persentase SD yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	98,95	96,9	97,93%
	8. Tingkat layanan terhadap siswa mmiskin SD	100	100	100,00%
	9. Persentase Pengembangan Minat Bakat Siswa SD/MI	100	100	100,00%
	10. Tingkat ketersediaan daya tampung SMP	96,68	100	103,43%
	11. Persentase SMP yang memenuhi sarana, prasarana dan fasilitas sekolah sesuai standar	98,46	99	100,55%
	12. Tingkat layanan terhadap siswa miskin SMP	100	100	100,00%
	13. Persentase pengembangan minat bakat Siswa SMP/MTs	100	100	100,00%
	14. Persentase guru bersertifikat	97,50	86,4	88,62%
	15. Persentase guru SD dan SMP berkualifikasi S1/D4	90,88	92	101,23%
	16. Tingkat Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100	100	100,00%
	17. Persentase jumlah warga negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	100	100,00%
	18. Persentase jumlah warga negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	100,00%
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	419.528.494.152,00	412.224.937.035,00	98,26
	Jumlah Pengelolaan Sekolah Dasar SD/MI	(100) 589 Sekolah	589 Sekolah	100.00 %
1	Pengadaan Mebel Sekolah	1.057.790.000,00	979.210.000,00	92,57
	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	(100) 1 paket	1 paket	100.00 %
2	Pengadaan Perlengkapan Siswa	0,00	0,00	0,00
	Pojok Baca	0	0	0
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	42.838.591.250,00	42.381.053.743,00	98,93
	Beasiswa Non Personal Peserta Didik Kota Tangerang Jenjang MIN	(100) 1 MIN -	1 MIN	100,00
	Beasiswa Non Personal Peserta Didik Kota Tangerang Jenjang	(100) 8444 Siswa -	8444 Siswa	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	SDSdam MTsS			
	Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) jenjangSDN	(100) 298 SDN -	298 SDN	100.00 %
	Program Tangerang Cerdas jenjang SD	(100) 10000 Siswa -	10000 Siswa	100,00
	Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kinerja Jenjang SDN	(100) 41 SDN -	41 SDN	100.00 %
	4 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	478.546.200,00	473.243.270,00	98,89
	Pemenuhan kebutuhan Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan	(100) 445 Sekolah	445 Sekolah	100.00 %
	5 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	672.388.100,00	638.605.000,00	94,98
	kegiatan lomba-lomba jenjang SD	(100) 445 Sekolah	445 Sekolah	100.00 %
	6 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	221.329.733.643,00	216.143.028.826,00	97,66
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD/MIpenerima BPJS Ketenagaan	(100) 2924 Orang -	2924 orang	100,00
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD/MI penerima insentif	(100) 8704 Orang -	8704 orang	100,00
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SDN Non PNS penerima Kesejahteraan	(100) 2923 Orang -	2923 orang	100,00
	7 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	213.241.300,00	188.063.900,00	88,19
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang di tingkatkan kompetensinya	(100) 300 Orang -	300 Orang	100.00 %
	8 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	107.911.850,00	106.511.850,00	98,70
	Program sekolah Sehat dan Program Sekolah Literat	(100) 445 Sekolah	445 Sekolah	100.00 %
	9 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	152.808.403.009,00	151.293.331.646,00	99,01
	Jumlah sekolah Dasar yang diberikan bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	(100) 445 Sekolah	445 Sekolah	100.00 %
	10 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	21.888.800,00	21.888.800,00	100,00
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	(100) 500 Orang -	500 Orang	100.00 %
	2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	207.779.241.848,00	203.021.008.549,00	97,71
	Jumlah pengelolaan pendidikan SMP/MTs yang dikota Tangerang	(100) 264 Sekolah	264 Sekolah	100.00 %
	1 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	74.506.000,00	12.000.000,00	16,11
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 1	(100) 1 Paket	1 Paket	16,11%
	2 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	47.155.571.000,00	45.471.216.015,00	96,43
	Jumlah sekolah penerima bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik	(100) 80 Sekolah -	80 Sekolah	100.00 %
	Jumlah sekolah penerima BOSDA Inklusif	(100) 13 Sekolah -	13 Sekolah	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Jumlah sekolah penerima BOSDA Reguler	(100) 33 Sekolah -	33 Sekolah	100.00 %
	Jumlah Siswa Penerima Tangerang Cerdas SMP/Sederajat	(100) 5000 Siswa -	5000 Siswa	100.00 %
3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	404.479.000,00	403.991.400,00	99,88
	Jumlah Sekolah Yang mengikuti Asesmen Nasional	(100) 201 Sekolah	201 Sekolah	100.00 %
4	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.629.238.100,00	1.554.248.700,00	95,40
	Jumlah Peserta yang mengikuti lomba	(100) 300 orang	300 orang	100.00 %
	Jumlah Peserta yang mengikuti lomba menulis artikel dalam rangka HUT Kota Tangerang	(100) 39 orang	39 orang	100.00 %
5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	80.979.649.548,00	78.372.145.921,00	96,78
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP/MTs/SKH penerima BPJS ketenagakerjaan	(100) 666 Orang -	666 Orang	100.00 %
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP/MTs/ SKH penerima Insentif	(100) 5103 Orang -	5103 Orang	100.00 %
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMPN Non PNS penerima Kesejahteraan	(100) 664 Orang -	664 Orang	100.00 %
6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	116.811.400,00	116.811.400,00	100,00
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang di tingkatkan kompetensinya	(100) 300 Orang -	300 Orang	100.00 %
7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	230.221.900,00	228.483.900,00	99,25
	Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba	(100) 100 Sekolah	100 Sekolah	100.00 %
8	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	77.102.880.000,00	76.776.226.313,00	99,58
	jumlah sekolah yang diberikan bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	(100) 33 Sekolah -	33 Sekolah	100.00 %
9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	85.884.900,00	85.884.900,00	100.00 %
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	(100) 400 Orang -	400 Orang	100.00 %
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	55.561.365.612,00	54.413.223.852,00	97,93
	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK/RA/KB/SPS)	(100) 1.092 Lembaga	100	100.00 %
1	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	78.458.000,00	78.458.000,00	100,00
	TK Negeri Penerima BOP	(100) 1 Sekolah	1 Sekolah	100.00 %
2	Pengadaan Perlengkapan PAUD	21.542.000,00	20.562.000,00	95,45
	Pengadaan perlengkapan PAUD	(100) 1 Sekolah	1 Sekolah	100.00 %
3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	122.348.800,00	122.072.000,00	99,77
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	(100) 1 Paket -	1 Paket	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	40.456.278.562,00	39.783.701.552,00	98,34
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan BPJS ketenagakerjaan jenjang PAUD, TK dan RA	(100) 13 Orang -	13 Orang	100.00 %
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan penerima Insentif TK, RA, PAUD	(100) 5834 Orang -	5834 Orang	100.00 %
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan TK negeri penerima kesejahteraan	(100) 13 Orang -	13 Orang	100.00 %
5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	185.536.450,00	185.536.400,00	100,00
	Jumlah peserta guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi jenjang TK	(100) 60 Orang -	60 orang	100.00 %
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi kegiatan stunting dan LKP	(100) 440 Orang -	440 Orang	100.00 %
6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	216.141.800,00	211.541.800,00	97,87
	Jumlah Guru PAUD yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	(100) 90 Peserta -	90 Peserta	100.00 %
7	Pengelolaan Dana BOP PAUD	14.481.060.000,00	14.011.352.100,00	96,76
	Pengelolaan BOP Lembaga PAUD	(100) 598 lembaga	598 lembaga	100,00
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.600.724.800,00	5.455.844.500,00	97,41
	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	(100) 38 Lembaga	38 Lembaga	100.00 %
1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	279.999.800,00	278.299.800,00	99,39
	Jumlah peserta ujian paket A, paket B dan paket C	(100) 3669 Orang	3669 orang	100,00
2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	983.435.000,00	841.050.000,00	85,52
	Jumlah pendidik, tenaga kependidikan dan tutor PKBM penerima Insentif	(100) 256 Orang -	256 Orang	100,00
3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	111.680.000,00	111.380.000,00	99,73
	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang di tingkatkan komptensinya	(100) 70 Orang -	70 Orang	100,00
4	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.225.610.000,00	4.225.114.700,00	99,99
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	(100) 42 lembaga	42 lembaga	100,00

2. Urusan Kesehatan

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	288.812.883.090,00	270.480.577.226,00	89,45 %
	Persentase ibu hamil yang mendapat	100	100	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	pelayanan kesehatan sesuai standar			
	Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100.00 %
	Persentase bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100.00 %
	Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100.00 %
	Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100.00 %
	Persentase usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100.00 %
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100.00 %
	Cakupan pembinaan lingkungan sehat	89,00	89	100.00 %
	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100	100	100.00 %
	Persentase orang dengan terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	100	100.00 %
	Persentase kasus berpotensi KLB yang ditangani	100	100	100.00 %
	Persentase Jumlah Penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining sesuai standar	100	100	100.00 %
	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100.00 %
	Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100.00 %
	Persentase Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ) Berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100.00 %
	Cakupan Masyarakat yang mendapat Kunjungan rumah oleh petugas kesehatan sesuai standar	100	100	100.00 %
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan yang memenuhi standar	67,5	67,5	100.00 %
	Persentase ketersediaan alat kesehatan dan alat laboratorium puskesmas	100	100	100.00 %
	Cakupan Penduduk Kota Tangerang yang memiliki jaminan kesehatan	95,00	98,84	104.04 %
	Cakupan Pembinaan Kesehatan Kerja & Olah Raga	100	100	100.00 %
	Persentase Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi Standar	91,67	91,67	100.00 %
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer yang memenuhi standar	90,62	90,62	100.00 %
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	69.320.433.178,00	63.417.339.506,00	91.42 %
	Rata-rata capaian target Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	(100) 100 %	100	100.00 %
1	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	707.773.400,00	665.850.000,00	94.08 %
	Jumlah Prasarana Fasilitas	(100) 2 Paket	2 paket	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			
2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	44.941.124.856,00	40.696.271.391,00	90.55 %
	Jumlah jenis alat kesehatan dan alat laboratorium yang tersedia di RSUD, Puskesmas dan jejaringnya	(100) 2 Jenis	2 jenis	100.00 %
3	Pengadaan Obat, Vaksin	16.681.809.144,00	16.160.076.753,00	96.87 %
	Jumlah paket obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia sesuai kebutuhan di puskesmas dan pustu	(100) 2 Paket	2 paket	100.00 %
4	Pengadaan Bahan Habis Pakai	6.944.125.778,00	5.850.373.862,00	84.25 %
	Jumlah paket bahan habis pakai yang tersedia sesuai kebutuhan	(100) 1 Paket	1 paket	100.00 %
5	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	45.600.000,00	44.767.500,00	98.17 %
	Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	(100) 1 Paket	1 paket	100.00 %
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	203.947.587.912,00	193.932.973.690,00	88.83 %
	Rata-rata capaian target Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(100) 100 %	92,38	92.38 %
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.600.000,00	45.334.000,00	4.23 %
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(100) 40925 Orang	40925 orang	100.00 %
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	231.659.000,00	219.603.498,00	94.80 %
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(100) 39588 Orang	39588 orang	100.00 %
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	49.724.000,00	49.724.000,00	100.00 %
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(100) 39588 Orang	39588 Orang	100.00 %
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	106.578.600,00	106.578.600,00	11.59 %
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(100) 90040 Orang	90040 Orang	100.00 %
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	47.500.000,00	46.307.500,00	9.51 %
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(100) 231986 Orang	231986 Orang	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.239.000.000,00	2.226.053.000,00	97.77 %
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(100) 660890 Orang	660890 Orang	100.00 %
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	102.676.000,00	101.468.000,00	16.95 %
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(100) 62656 Orang	62656 Orang	100.00 %
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	20.900.000,00	20.900.000,00	100.00 %
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(100) 166750 Orang	166750 Orang	100.00 %
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	20.900.000,00	20.900.000,00	100.00 %
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(100) 93500 Orang	93500 Orang	100.00 %
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	50.850.000,00	50.850.000,00	24.98 %
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	(100) 902 Orang	902 Orang	100.00 %
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.922.291.500,00	331.657.500,00	9.20 %
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	(100) 17895 Orang	17895 Orang	100.00 %
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	654.050.000,00	511.550.000,00	63.20 %
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	(100) 32360 Orang	32360 Orang	100.00 %
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	35.300.000,00	31.100.000,00	88.10 %
	Jumlah kasus berpotensi KLB yang ditangani	(100) 5 Kasus	5 kasus	100.00 %
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.737.673.550,00	8.395.669.692,00	77.87 %
	Jumlah gizi buruk mendapat perawatan	(100) 111 Orang	80 orang	100.00 %
	Jumlah remaja puteri mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	(100) 22087 Orang	22087 orang	100.00 %
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	177.436.400,00	167.488.400,00	74.15 %
	Jamaah haji yang diukur tingkat kebugarannya	(100) 1600 Orang	1600 orang	100.00 %
	Jumlah Dokumen Hasil	(100) 1 Dokumen	1 dokumen	0.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
	Jumlah Puskesmas yang melakukan pembinaan kesehatan kerja dan olah raga	(100) 37 Puskesmas	37 puskesmas	100.00 %
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	255.241.700,00	255.241.700,00	100.00 %
	Jumlah Rumah yang dilakukan pembinaan	(100) 25384 Rumah	25384 Rumah	100.00 %
	Jumlah Tempat-Tempat Umum yang dilaksanakan pembinaan	(100) 462 Fasilitas	486 fasilitas	105.19 %
17	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	22.750.000,00	22.750.000,00	1.03 %
	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang dikunjungi oleh petugas kesehatan sesuai standar	(100) 60000 KK	60000 kk	100.00 %
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	27.750.000,00	27.750.000,00	100.00 %
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelayanan kesehatan primer	(100) 160 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	160 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.00 %
19	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	106.750.000,00	104.810.000,00	98.18 %
	Jumlah bayi usia 9-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)	(100) 31000 Orang	31000 Orang	100.00 %
	Jumlah jemaah haji yang diperiksa kesehatan	(100) 1600 Orang	1600 Orang	100.00 %
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	(100) 37 Puskesmas	37 Puskesmas	100.00 %
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	47.107.000,00	47.107.000,00	100.00 %
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	(100) 5891 Orang	5891 Orang	100.00 %
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	45.800.000,00	45.800.000,00	26.14 %
	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza	(100) 38 Puskesmas	38 Puskesmas	100.00 %
	Jumlah penderita depresi pada penduduk usia ≥ 15 tahun yang mendapat layanan	(100) 1227 Orang	1227 Orang	100.00 %
	Jumlah penderita gangguan mental emosional (GME) pada penduduk usia ≥ 15 tahun yang mendapat layanan	(100) 8639 Orang	8639 Orang	100.00 %
22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	839.426.200,00	552.371.000,00	19.73 %
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	(100) 150 Orang	150 Orang	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani	(100) 47040 Orang	47040 Orang	85,03%
	Jumlah pneumoni balita yang ditangani	(100) 6906 Orang	6906 Orang	87,87 %
	23 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	181.754.646.326,00	176.400.239.800,00	97,05 %
	Jumlah Penduduk yang dibiayai iuran jaminan kesehatannya oleh pemerintah daerah kota tangerang	(100) 600000 Orang	600000 Orang	65,47 %
	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Tangerang	(100) 40 Puskesmas	39 Puskesmas	100,00 %
	Jumlah rumah sakit yang melayani masyarakat untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional	(100) 10 Rumah Sakit	10 Rumah Sakit	100,00 %
	24 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.043.501.636,00	0,00	0,00 %
	25 Operasional Pelayanan Puskesmas	3.957.000.000,00	3.766.500.000,00	51,33 %
	Jumlah puskesmas yang memanfaatkan dana bantuan operasional	(100) 40 Puskesmas	39 puskesma	100,00 %
	26 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	112.496.000,00	99.200.000,00	88,18 %
	Jumlah Puskesmas yang di akreditasi	(100) 15 Puskesmas	15 puskesmas	100,00 %
	27 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00 %
	jumlah pelaporan pelacakan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)	(100) 1 Dokumen	1 dokumen	100,00 %
	28 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	194.880.000,00	191.982.000,00	98,51 %
	29 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	15.600.000,00	14.925.000,00	95,67 %
	30 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	8.300.000,00	8.300.000,00	100,00 %
	31 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	64.300.000,00	63.913.000,00	99,40 %
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	255.809.000,00	255.341.000,00	99,82 %
	Rata-rata capaian target Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	(100) 100 %	100	100,00 %
	1 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	255.809.000,00	255.341.000,00	99,82 %
	Jumlah sarana yang melakukan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	(100) 1 Sarana	1 sarana	100,00 %
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat	523.236.000,00	427.014.400,00	81,61 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
Daerah Kabupaten/Kota				
	Rata-rata capaian target pendukung persyaratan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(100) 100 %	100	100.00 %
	1 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.200.000,00	16.200.000,00	100.00 %
	Jumlah Pelayanan kesehatan yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	(100) 60 Sarana	60 sarana	100.00 %
	2 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	391.557.000,00	296.710.000,00	75.78 %
	Jumlah dokumen pengendali mutu dan manajemen mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	(100) 2 Dokumen	2 dokumen	100.00 %
	3 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	115.479.000,00	114.104.400,00	98.81 %
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	(100) 40 fasilitas Pelayanan Kesehatan	40 fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.00 %
	BOK - DINAS KESEHATAN	14.281.221.000	12.284.061.095	86,02%
	JKN FKTP - DINAS KESEHATAN	484.596.000	163.847.535	33,81%
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.580.940.650,00	2.239.944.650,00	86.79 %
	Persentase tenaga kesehatan yang meningkat kompetensinya	87,99	82,03	93.23 %
	1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.078.501.000,00	887.692.000,00	82.31 %
	Rata-rata capaian target Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	(100) 100 %	100	100.00 %
	1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.000.000.000,00	810.000.000,00	81.00 %
	2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	78.501.000,00	77.692.000,00	98.97 %
	Jumlah tenaga fungsional kesehatan yang dinilai jenjang karirnya	(100) 367 Orang	367 Orang	100.00 %
	2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.502.439.650,00	1.352.252.650,00	90.00 %
	Rata-rata capaian target Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	(100) 100 %	93,22	93.22 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.502.439.650,00	1.352.252.650,00	90.00 %
	Jumlah Tenaga Kesehatan yang meningkat kompetensinya	(100) 1077 Orang	1004 orang	93.22 %
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	95.095.000,00	90.795.000,00	95.48 %
	Persentase IRTP yang Memenuhi Syarat	100,00	17,82	17.82 %
	Persentase Fasilitas Kefarmasian (Apotek, Toko Obat dan UMOT) dan Alat Kesehatan (Toko Alat Kesehatan dan Optikal) yang memenuhi syarat	82,22	82,22	100.00 %
	1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	8.100.000,00	8.100.000,00	100.00 %
	Rata-rata capaian target pendukung persyaratan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	(100) 100 %	100	100.00 %
	1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	8.100.000,00	8.100.000,00	100.00 %
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	(100) 1 Dokumen	1 dokumen	0.00 %
	Jumlah Fasilitas Kefarmasian (Apotek, Toko Obat dan UMOT) dan Alat Kesehatan (Toko Alat Kesehatan dan Optikal) yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	(100) 90 Fasilitas	90 fasilitas	100.00 %
	2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	86.995.000,00	82.695.000,00	95.06 %
	Rata-rata capaian target pendukung persyaratan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	(100) 100 %	17,82	17.82 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	86.995.000,00	82.695.000,00	95.06 %
	Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi Syarat Keamanan Pangan	(100) 114 Sarana	18 sarana	17.82 %
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.516.266.500,00	1.506.431.400,00	68.24 %
	Cakupan posyandu aktif	100	100	100.00 %
	Cakupan Rumah Tangga Ber PHBS	75	75	100.00 %
	1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.196.116.000,00	1.195.591.500,00	99.96 %
	Rata-rata capaian target Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(100) 100 %	100	100.00 %
	1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.196.116.000,00	1.195.591.500,00	99.96 %
	Forum Kelurahan dan FKTS Kecamatan yang aktif melaksanakan kegiatan Kota sehat	(100) 13 Forum Kecamatan	13 Forum Kecamatan	100.00 %
	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	(100) 1 Dokumen	1 dokumen	0.00 %
	Media Komunikasi Informasi Edukasi Kesehatan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat	(100) 1 Paket	1 paket	100.00 %
	Posyandu yang melaksanakan pelayanan rutin usaha kesehatan berbasis masyarakat	(100) 1094 Posyandu	1096 posyandu	100.00 %
	Rumah tangga yang memenuhi syarat 10 indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	(100) 7800 Rumah Tangga	7800 Rumah Tangga	100.00 %
	2 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	320.150.500,00	310.839.900,00	30.73 %
	Rata-rata capaian target Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(100) 100 %	100	100.00 %
	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	320.150.500,00	310.839.900,00	30.73 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Posyandu yang melaksanakan pelayanan rutin usaha kesehatan berbasis masyarakat	(100) 1094 Posyandu	1096 posyandu	100.00 %

3. Urusan Sosial

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	8.617.374.950,00	8.426.955.500,00	97.79 %
	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	74,86	74,84	99.97 %
	Persentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	100	100	100.00 %
1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	38.824.000,00	25.674.000,00	66.13 %
	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosial	(100) 154 Orang	154 Orang	100.00 %
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	38.824.000,00	25.674.000,00	66.13 %
	Jumlah Masyarakat Yang Menerima Penyuluhan Sosial	(100) 154 orang	154 Orang	100.00 %
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	8.578.550.950,00	8.401.281.500,00	97.93 %
	Jumlah kube yang telah memasarkan hasil produk	(100) 19 KUBE	19 KUBE	100.00 %
	Jumlah penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mendampingi Kampung Sejahtera Mandiri (KSM)	(100) 999 Orang	999 Orang	100.00 %
	Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang memberikan pelayanan kepada PMKS	(100) 30 Kelompok	30 Kelompok	100.00 %
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5.916.000.000,00	5.892.000.000,00	99.59 %
	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	(100) 986 Orang	986 Orang	100.00 %
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	156.000.000,00	104.000.000,00	66.67 %
	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	(100) 13 Orang	13 Orang	100.00 %
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.283.063.500,00	2.224.613.900,00	97.44 %
	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	(100) 328 Keluarga	325 Keluarga	99.09 %
	Jumlah KUBE yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	(100) 19 KUBE	19 KUBE	100.00 %
4	Peningkatan Kemampuan Potensi	223.487.450,00	180.667.600,00	80.84 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	(100) 5 Lembaga	5 Lembaga	100.00 %
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	830.874.000,00	657.190.500,00	79.10 %
	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	21,25	29,02	136.56 %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	609.445.200,00	437.190.500,00	71.74 %
	Jumlah jasa (tenaga) teknis yang tersedia	(100) 13 orang	13 orang	100.00 %
	Jumlah peserta kegiatan disabilitas	(100) 175 Orang	175 Orang	100.00 %
1	Penyediaan Sandang	16.368.700,00	16.255.500,00	99.31 %
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	(100) 10 Orang	14 Orang	140.00 %
2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	570.276.500,00	411.235.000,00	72.11 %
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	(100) 255 Orang	255 Orang	100.00 %
	Jumlah peserta kegiatan disabilitas	(100) 175 orang	175 orang	100.00 %
3	Pemberian Layanan Kedaruratan	22.800.000,00	9.700.000,00	42.54 %
	Jumlah pemulangan orang terlantar, sakit dan meninggal	(100) 270 orang	360 orang	133.33 %
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	221.428.800,00	220.000.000,00	99.35 %
	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina	(100) 480 orang	100	100.00 %
1	Penyediaan Sandang	5.428.800,00	5.200.000,00	95.79 %
	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	(100) 26 Orang	26 Orang	100.00 %
2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	216.000.000,00	214.800.000,00	99.44 %
	Jumlah jasa (tenaga) teknis yang tersedia (TRC)	(100) 12 orang	12 orang	100.00 %
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.698.729.900,00	3.475.923.400,00	93,98%
	Persentase Pelayanan Perlindungan Sosial	100	99,66	99.66 %
	Persentase Pelayanan Jaminan Sosial	100	99,66	99.66 %
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.698.729.900,00	3.475.923.400,00	94.58 %
	Jumlah dokumen yang tersedia	(100) 1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %
	Jumlah Bantuan Sosial Bagi Anak Miskin/Terlantar	(100) 650 orang	650 orang	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Jumlah bantuan sosial bagi anak yatim	(100) 1.300 Orang	1.298 Orang	99.85 %
	Jumlah bantuan sosial bagi disabilitas	(100) 300 orang	300 orang	100.00 %
	Jumlah bantuan sosial bagi lansia miskin	(100) 1.000 Orang	999 Orang	99.90 %
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.529.729.900,00	1.329.573.400,00	86.92 %
	Jumlah dokumen yang tersedia	(100) 1 dokumen	1 dokumen	100.00 %
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.169.000.000,00	2.146.350.000,00	98,96%
	Jumlah bantuan sosial tunai bagi anak terlantar dan/miskin	(100) 650 orang	650 orang	100.00 %
	Jumlah bantuan sosial tunai bagi anak yatim	(100) 1.300 orang	1.298 orang	99.85 %
	Jumlah bantuan sosial tunai bagi balita/terlantar miskin	(100) 300 orang	300 orang	100.00 %
	Jumlah bantuan sosial tunai khusus bagi kelompok rentan (Lansia terlantar/miskin dan penyandang Disabilitas) yang mendapat jaminan bantuan sosial	(100) 1.300 orang	1.299 orang	99.92 %
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.410.680.100,00	962.900.100,00	68.26 %
	Persentase jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota)	100	69,28	69.28 %
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.043.434.000,00	618.423.000,00	59.27 %
	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat bantuan kebutuhan dasar/logistik makanan	(100) 1.800 orang	1.247 orang	69.28 %
	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat bantuan kebutuhan dasar/logistik sandang	(100) 1.000 orang	432 orang	43.20 %
1	Penyediaan Makanan	920.640.400,00	541.395.300,00	58.81 %
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	(100) 1.800 Orang	1.247 Orang	69.28 %
2	Penyediaan Sandang	122.793.600,00	77.027.700,00	62.73 %
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	(100) 1.000 Orang	432 Orang	43.20 %
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	367.246.100,00	344.477.100,00	93.80 %
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	(100) 2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	367.246.100,00	344.477.100,00	93.80 %
	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	(100) 3 Kampung	3 Kampung	100.00 %
	Jumlah masyarakat Kota Tangerang yang mengikuti simulasi dan manajemen bencana	(100) 150 orang	150 orang	100.00 %
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	38.969.500,00	25.216.300,00	64.71 %
	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100	100	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	38.969.500,00	25.216.300,00	64.71 %
	Terlaksananya pemeliharaan dan tertatanya kebersihan serta keindahan Taman Makam Pahlawan Taruna	(100) 1 unit	1 unit	100.00 %
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	38.969.500,00	25.216.300,00	64.71 %
	Jumlah Sarana dan Prasarana TMP yang dipelihara	(100) 1 paket	1 paket	100.00 %

4. Urusan Tenaga Kerja

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	94.869.200,00	79.619.000,00	83.93 %
	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Tenaga Kerja	100	100	100.00 %
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	94.869.200,00	79.619.000,00	83.93 %
	Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	(100) 2 dokumen	2 dokumen	100.00 %
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	94.869.200,00	79.619.000,00	83.93 %
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kerja Mikro	(100) 1 dokumen	1 dokumen	100.00 %
	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	(100) 20 Perusahaan	20 perusahaan	100.00 %
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.656.194.390,00	2.545.230.450,00	95.82 %
	Prosentase tenaga kerja terlatih yang bersertifikat kompetensi	51,35	79,46	154.74 %
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.330.154.390,00	2.226.081.450,00	95.53 %
	Jumlah pencari kerja yang dilatih	(100) 360 orang	360 orang	100.00 %
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.330.154.390,00	2.226.081.450,00	95.53 %
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	(100) 370 Orang	370 orang	100.00 %
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	167.276.900,00	163.133.900,00	97.52 %
	Jumlah LPK yang memiliki perijinan	(100) 80 LPK	71 LPK	88.25 %
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	167.276.900,00	163.133.900,00	97.52 %
	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	(100) 80 Lembaga	80 lembaga	88.25 %
	Pembinaan LPK yang dilaksanakan	(100) 12 bulan	12 bulan	100.00 %
3	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	158.763.100,00	156.015.100,00	98.27 %
	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi	(100) 180 orang	180 orang	100.00 %
1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	158.763.100,00	156.015.100,00	98.27 %
	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	(100) 4 Dokumen	4 dokumen	100.00 %
	Penyelenggaraan Uji	(100) 190 orang	190 orang	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Kompetensi			
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.702.858.700,00	1.585.427.300,00	92.41 %
	Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan	81,88	142,06	173.50 %
1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	1.150.237.200,00	1.051.759.800,00	90.41 %
	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	(100) 12500 orang	12500 orang	100.00 %
1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	321.168.000,00	271.405.400,00	80.82 %
	Jumlah penyuluhan bimbingan jabatan yang terselenggara	(100) 45 kegiatan	45 kegiatan	100.00 %
2	Perluasan Kesempatan Kerja	829.069.200,00	780.354.400,00	94.12 %
	Jumlah peserta pelatihan tenaga kerja mandiri/wirusaha baru	(100) 400 orang	400 orang	100.00 %
2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	449.146.400,00	437.392.400,00	97.38 %
	Jumlah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang dilaksanakan	(100) 12 kegiatan	12 kegiatan	100.00 %
1	Job Fair/Bursa Kerja	449.146.400,00	437.392.400,00	97.38 %
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	(100) 5000 Orang	5000 orang	100.00 %
	Jumlah Penyelenggaraan Job Fair Online	(100) 12 kegiatan	12 kegiatan	100.00 %
3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	103.475.100,00	96.275.100,00	93.04 %
	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terdata	(100) 35 orang	35 orang	100.00 %
1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	103.475.100,00	96.275.100,00	93.04 %
	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	(100) 40 Orang	40 orang	100.00 %
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.000.078.900,00	978.225.900,00	97.81 %
	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	65,35	70,37	107.68 %
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	173.920.000,00	163.522.000,00	94.02 %
	Jumlah perusahaan yang memiliki PP/PKB	(100) 120 perusahaan	120 perusahaan	100.00 %
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	133.420.000,00	132.172.000,00	99.06 %
	Jumlah Bimbingan Teknis Penyusunan PP/PKB	(100) 2 kegiatan	2 kegiatan	100.00 %
	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	(100) 120 Perusahaan	120 perusahaan	100.00 %
2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	40.500.000,00	31.350.000,00	77.41 %
	Jumlah Data dan Informasi	(100) 9 Laporan	9 laporan	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	826.158.900,00	814.703.900,00	98.61 %
	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	(100) 95 kasus	95 kasus	100.00 %
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	496.237.400,00	485.532.400,00	97.84 %
	Jumlah Kegiatan Mekanisme Teknik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	(100) 2 kegiatan	2 kegiatan	100.00 %
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan May Day	(100) 1 kegiatan	1 kegiatan	100.00 %
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	(100) 50 Perkara	50 perkara	88.00 %
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.971.500,00	1.971.500,00	100.00 %
	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	(100) 95 Perkara	95 perkara	100.00 %
3	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	327.950.000,00	327.200.000,00	99.77 %
	Jumlah Kegiatan Depeko dan LKS Tripartit	(100) 12 kegiatan	12 kegiatan	100.00 %
	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	(100) 1 Lembaga	1 lembaga	100.00 %

5. Urusan Sekretariat Daerah

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	28.241.034.630,00	26.830.832.245,00	95,01%
	Persentase naskah kerjasama aktif yang ditindaklanjuti	100	117	117,00%
	Prosentase Kecamatan dan Kelurahan dengan nilai IKM Kategori Baik	100	100	100,00%
	Jumlah bantuan hukum litigasi kepada orang atau masyarakat miskin	60	60	100,00%
	Prosentase peraturan daerah/perwal/kepwal yang harmonis	100	116,56	116,56%
	Prosentase kelembagaan kesejahteraan masyarakat yang dibina	100	100	100,00%
	Prosentase organisasi keagamaan yang dibina	100	109,38	109,38%
	Prosentase SDM keagamaan yang dibina	100	100,71	100,71%
	Prosentase organisasi sosial budaya keagamaan yang dibina	0	0	0,00%

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
1	Administrasi Tata Pemerintahan	1.402.740.300,00	1.257.158.900,00	89,62%
	Jumlah koordinasi serta pembinaan dalam rangka peningkatan pelayanan publik	12	12	100,00%
	1 Penataan Administrasi Pemerintahan	522.983.600,00	380.789.900,00	72,81%
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	1	100,00%
	2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	46.456.700,00	44.069.000,00	94,86%
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	1	100,00%
	3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	833.300.000,00	832.300.000,00	99,88%
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	1	100,00%
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	22.072.737.330,00	21.448.702.225,00	97,17%
	Jumlah rakor kesra yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat	9	9	100,00%
	Jumlah kegiatan fasilitasi organisasi keagamaan	6	6	100,00%
	Jumlah kegiatan fasilitasi bina mental spiritual	26	26	100,00%
	1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.708.167.330,00	3.490.407.225,00	94,13%
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5	5	100,00%
	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan Pegawai dan Masyarakat	12	12	100,00%
	Jumlah Kegiatan Pengiriman Kafilah pada MTQ Tingkat Provinsi Banten	1	1	100,00%
	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam di Pemda Kota Tangerang	5	5	100,00%
	Jumlah Pelaksanaan Pengajian Pegawai Pemda di Bulan Ramadhan	17	17	100,00%
	Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Kerukunan Kehidupan Beragama	600	600	100,00%
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peringatan Hari Santri di Kota Tangerang	1	1	100,00%
	Jumlah Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Kota Tangerang	5	5	100,00%
	2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	18.364.570.000,00	17.958.295.000,00	97,79%
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3	3	100,00%
	Jumlah Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Masyarakat	149	149	100,00%
	Jumlah Rakor Kesra yang	9	9	100,00%

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	berkenaan dengan Pemberdayaan Masyarakat			
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.706.559.000,00	4.065.973.120,00	86,39%
	Jumlah bantuan hukum litigasi dan non litigasi	60	60	100,00%
	Jumlah produk hukum yang diharmonisasi dan dipublikasi	57	57	100,00%
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1.005.387.000,00	985.137.000,00	97,99%
	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	57	57	100,00%
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	2.545.989.050,00	1.967.989.850,00	77,30%
	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	60	60	100,00%
	Jumlah Penanganan Perkara di Tingkat Peradilan	27	27	100,00%
	Layanan Konsultasi Keliling Yang Dilakukan	24	24	100,00%
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1.155.182.950,00	1.112.846.270,00	96,34%
	Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum Yang Diberikan Kepada Masyarakat	890	890	100,00%
	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1000	1000	100,00%
4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	58.998.000,00	58.998.000,00	100,00%
	Jumlah dokumen kerjasama daerah	100	117	117,00%
1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	49.998.000,00	49.998.000,00	100,00%
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100	117	117,00%
2	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4	4	100,00%
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.417.412.000,00	1.297.782.800,00	91,56%
	Tingkat Pengendalian Kegiatan Perangkat Daerah Tepat Waktu	93,97	93,97	100,00%
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian dan pengembangan potensi daerah yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00%
	Prosentase Pengadaan Barang dan Jasa yang diselesaikan melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE)	100,00	107,00	107,00%
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	295.312.500,00	257.762.500,00	87,28%
	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	6	6	100,00%
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	39.800.000,00	38.900.000,00	97,74%
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	2	100,00%
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	234.212.500,00	200.912.500,00	85,78%
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi	4	4	100,00%

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Perekonomian			
	3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	21.300.000,00	17.950.000,00	84,27%
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	4	100,00%
	2 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	595.431.000,00	532.205.000,00	89,38%
	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2	2	100,00%
	1 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	556.506.000,00	493.280.000,00	88,64%
	Jumlah buku Satuan Standar Harga Barang Jasa dan belanja	190	190	100,00%
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	10	10	100,00%
	2 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	38.925.000,00	38.925.000,00	100,00%
	Jumlah Dokumen Kegiatan Pembangunan	36	36	100,00%
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	12	100,00%
	3 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	526.668.500,00	507.815.300,00	96,42%
	Jumlah dokumen pengelolaan pengadaan barang dan jasa	12	12	100,00%
	1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	44.217.950,00	31.067.950,00	70,26%
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	12	100,00%
	2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	382.457.900,00	377.969.300,00	98,83%
	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	12	100,00%
	3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	99.992.650,00	98.778.050,00	98,79%
	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	12	12	100,00%
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50	50	100,00%

6. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp131.830.353.989,00	Rp107.323.542.620,00
	Prosentase sumber daya air yang dipelihara	90%	90%
	Presentase luas banjir yang tertangani	100%	182,84%
	Presentase sarana prasarana Sumber Daya Air dan Drainase dalam kondisi baik	100%	100%
	Presentase dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air yang ditindak lanjuti	100%	100%
	1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp131.830.353.989,00	Rp107.323.542.620,00
	Jumlah dokumen perencanaan teknis	100%	100%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi
	pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase yang disusun		
	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air yang disusun	100%	100%
	Jumlah Sungai yang dinormalisasi	100%	100%
	Jumlah stasiun pompa banjir yang dipelihara	100%	100%
	Jumlah tanggul dan tebing sungai yang pelihara	100%	100%
	Jumlah Bangunan Turap yang dibangun	100%	100%
	Jumlah Sistem pengendali banjir	100%	100%
	Jumlah Bangunan Embung yang dibangun	100%	50%
	Jumlah Bangunan Pintu Air yang dibangun	100%	100%
	Jumlah Sarana Prasarana SDA	100%	100%
	Jumlah Bangunan Sumber Daya Air yang di Rehabilitasi	100%	100%
	Jumlah Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	100%	100%
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Rp1.284.401.035,00	Rp1.219.321.830,00
	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase yang disusun	3 Jenis Dokumen	6 Jenis Dokumen
	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air yang disusun	3 Jenis Dokumen	6 Jenis Dokumen
2	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rp13.386.637.871,00	Rp4.929.274.300,00
	Jumlah Bangunan Embung yang dibangun	4 Unit	2 Unit
3	Pembangunan Tanggul Sungai	Rp35.835.165.904,00	Rp31.172.341.200,00
	Jumlah Bangunan Turap yang dibangun	20 Unit	28 Unit
4	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rp1.698.129.519,00	Rp1.301.216.000,00
	Jumlah Bangunan Pintu Air yang dibangun	2 Unit	4 Unit
5	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Rp26.830.595.788,00	Rp20.292.704.800,00
	Jumlah Sistem pengendali banjir	15 Unit	16 Unit
6	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Rp17.092.425.641,00	Rp 16.856.810.200,00
	Jumlah Bangunan Sumber Daya Air yang di Rehabilitasi	15 Unit	29 Unit
7	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rp2.336.347.860,00	Rp2.229.777.108,00
	Jumlah Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	15 Unit	74 Unit
8	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Rp5.383.115.811,00	Rp4.918.619.000,00
	Jumlah Sarana Prasarana SDA	1 Lokasi	6 Lokasi
9	Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp17.132.237.160,00	Rp15.153.914.749,00
	Jumlah Sungai yang dinormalisasi	65 Km	65,85 Km
10	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Rp6.438.090.640,00	Rp6.258.050.786,00
	Jumlah tanggul dan tebing sungai yang pelihara	65 Unit	65 Unit
11	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Rp4.413.206.760,00	Rp2.991.512.647,00
	Jumlah stasiun pompa banjir yang dipelihara	65 Unit	65 Unit
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp125.033.486.792,00	Rp122.882.226.653,00
	Presentase dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase yang ditindak lanjuti	100%	100%
	Prosentase saluran drainase/gorong-gorong yang dipelihara	59%	59%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi
	Presentase luas genangan yang tertangani	100%	116,99%
	Presentase sarana prasarana Drainase dalam kondisi baik	100%	100%
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp125.033.486.792,00	Rp122.882.226.653,00
	Jumlah Dokumen Supervisi bangunan Drainase makro dan Drainase perumahan pemukiman	100%	100%
	Jumlah bangunan Drainase makro perkotaan yang dibangun	100%	12,28%
	Jumlah Sarana dan Prasarana Drainase	100%	100%
	Panjang drainase yang dipelihara	100%	100%
	Jumlah bangunan Drainase perumahan pemukiman yang dibangun	100%	100%
1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Rp267.408.600,00	Rp245.361.400,00
	Jumlah Dokumen Supervisi bangunan Drainase makro dan Drainase perumahan pemukiman	1 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen
2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Rp4.188.729.492,00	Rp 3.270.114.760,00
	Jumlah bangunan Drainase makro perkotaan yang dibangun	5 Km	0,614 Km
3	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Rp4.746.551.500,00	Rp4.289.194.179,00
	Jumlah Sarana dan Prasarana Drainase	6 Unit	8 Unit
4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Rp 13.289.744.900,00	Rp12.771.927.114,00
	Panjang drainase yang dipelihara	200 Km	200 Km
5	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Rp102.541.052.300,00	Rp102.305.629.200,00
	Jumlah bangunan Drainase perumahan pemukiman yang dibangun	70 Km	70,08 Km
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp213.094.795.394,00	Rp202.876.227.385,00
	Presentase dokumen perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang ditindak lanjuti	100%	100%
	Prosentase panjang jalan yang dipelihara	89,57%	89,57%
	Prosentase jembatan yang dipelihara	98,95%	98,95%
	Tingkat ketersediaan jalan	100%	66,67%
	Tingkat ketersediaan jembatan	99,65%	99,65%
	Presentase dokumen pemuktahiran data leger yang akurat	100%	100%
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp213.094.795.394,00	Rp202.876.227.385,00
	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan yang disusun	100%	100%
	Jumlah dokumen pemutakhiran data leger	100%	100%
	Jumlah dokumen Survey kondisi jalan/jembatan	100%	100%
	Panjang jalan yang dipelihara	100%	100%
	Jumlah jembatan yang dipelihara	100%	100%
	Jumlah ruas jalan kolektor sekunder yang dibangun	100%	36,64%
	Jumlah jalan arteri sekunder yang dikembangkan	100%	100%
	Jumlah ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal yang ditingkatkan	100%	100%
	Jumlah ruas jalan lingkungan yang ditingkatkan	100%	100%
	Jumlah jembatan yang dibangun	100%	100%
	Jumlah jembatan yang diganti	100%	100%
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp966.527.200,00	Rp947.295.858,00
	Jumlah dokumen perencanaan teknis	3 Jenis Dokumen	11 Jenis Dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi
	pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan yang disusun		
2	Pengelolaan Leger Jalan	Rp1.045.639.800,00	Rp943.079.400,00
	Jumlah dokumen pemutakhiran data leger	3 Jenis Dokumen	10 Jenis Dokumen
3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp 222.480.200,00	Rp222.480.200,00
	Jumlah dokumen Survey kondisi jalan/jembatan	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen
4	Pembangunan Jalan	Rp10.939.993.600,00	Rp10.375.103.400,00
	Jumlah ruas jalan kolektor sekunder yang dibangun	1,07 km	0,392 Km
5	Rekonstruksi Jalan	Rp72.618.280.000,00	Rp71.456.491.600,00
	Jumlah jalan arteri sekunder yang dikembangkan	0 Km	0 Km
	Jumlah ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal yang ditingkatkan	11,55 Km	13,62 Km
6	Rehabilitasi Jalan	Rp 45.423.117.900,00	Rp44.802.124.080,00
	Jumlah ruas jalan lingkungan yang ditingkatkan	24,85 Km	25,35 Km
7	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 50.035.589.620,00	Rp 42.938.342.513,00
	Panjang jalan yang dipelihara	3,85 Km	14,78 Km
8	Pembangunan Jembatan	Rp28.002.387.100,00	Rp27.772.623.200,00
	Jumlah jembatan yang dibangun	1 Ruas Jembatan	2 Ruas Jembatan
	Jumlah jembatan yang diganti	5 Ruas Jembatan	18 Ruas Jembatan
9	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp3.840.779.974,00	Rp3.418.687.134,00
	Jumlah jembatan yang dipelihara	8 Ruas	31 Ruas
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp1.214.055.650,00	Rp635.992.250,00
	Tingkat ketersediaan dokumen rencana tata ruang	100%	100%
	Tingkat penyelesaian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang tepat waktu	100%	100%
	Tingkat ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang	100%	0%
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp724.467.800,00	Rp474.674.700,00
	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun	100%	100%
	Jumlah dokumen pendukung perencanaan tata ruang	100%	100%
	Jumlah kegiatan sosialisasi Rencana Tata Ruang yang terlaksana	100%	100%
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Rp724.467.800,00	Rp474.674.700,00
	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah dokumen pendukung perencanaan tata ruang	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah kegiatan sosialisasi Rencana Tata Ruang yang terlaksana	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp194.893.600,00	Rp154.117.550,00
	Jumlah peta analog dan digital yang disusun	100%	100%
1	Sistem Informasi Penataan Ruang	Rp194.893.600,00	Rp154.117.550,00
	Jumlah peta analog dan digital yang disusun	1 Jenis Peta	1 Jenis Peta
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp294.694.250,00	Rp7.200.000,00
	Jumlah rekomendasi teknis pemanfaatan ruang yang diterbitkan	100%	100%
	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemanfaatan ruang	100%	0%
	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang kota	100%	0%
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan	Rp294.694.250,00	Rp7.200.000,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi
	Ruang		
	Jumlah rekomendasi teknis pemanfaatan ruang yang diterbitkan	100 Rekomendasi Teknis	100 Rekomendasi Teknis
	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemanfaatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan
	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang kota	2 Kegiatan	0 Kegiatan
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.744.325.105,00	1.555.746.764,00
	Cakupan layanan air minum perpipaan	28,16	27,19
	Tingkat kualitas air minum memenuhi baku mutu yang berlaku	100	100
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.744.325.105,00	1.555.746.764,00
	Penyusunan dokumen SPAM, Pembangunan, Operasi, serta Pemeliharaan SPAM	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	886.165.060,00	731.263.560,00
	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	406.505.291,00	375.475.200,00
	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	107 SR	107 SR
3	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	451.654.754,00	449.008.004,00
	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan dan Jumlah unit bangunan SPAM yang mendapatkan Uji Baku Mutu	110 Unit	110 Unit
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.253.144.566,00	10.062.867.878,00
	Cakupan pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik	99,81	99,81
	Tingkat kualitas air limbah domestik memenuhi baku mutu yang berlaku	100	100
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.253.144.566,00	10.062.867.878,00
	Jumlah Sistem Air Limbah yang terbangun dan terpelihara	29 Unit	29 Unit
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	495.452.950,00	426.834.450,00
	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.201.566.000,00	1.136.375.000,00
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	138 RT	138 RT
3	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	76.768.700,00	42.807.500,00
	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	3 Kelompok	3 Kelompok
4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	6.817.322.294,00	5.980.062.057,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi
	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	29 Unit	29 Unit
5	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	868.985.350,00	317.988.000,00
	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	3 Unit	0
	Jumlah Penyediaan Pompa Sedot Lumpur Tinja untuk Truk	5 Unit	100
6	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	2.793.049.272,00	2.158.800.871,00
	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	5397 RT	5397 RT
3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	265.703.498.358,00	244.841.878.215,00
	Tingkat penyelesaian pembangunan/ rehabilitasi gedung/ bangunan sarana, prasarana dan fasilitas pemerintah dan masyarakat	100	99,21
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	265.703.498.358,00	244.841.878.215,00
	Jumlah pembangunan/ rehabilitasi gedung/ bangunan sarana, prasarana dan fasilitas pemerintah dan masyarakat	29 unit	29 unit
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1.125.430.072,00	1.116.648.160,00
	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	12 Dokumen	12 Dokumen
2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	227.470.258.482,00	209.188.679.219,00
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	100
	Jumlah pembangunan gedung pemerintahan	30 unit	29 unit
3	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	161.170.805,00	102.136.449,00
	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	200 Unit	100
4	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	28.737.088.540,00	26.933.867.600,00
	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	96 unit	96 unit
5	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	8.209.550.459,00	7.500.546.787,00
	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	10 Unit	100
4	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	229.459.788,00	172.989.948,00
	Persentase jasa konstruksi yang tersertifikasi	50	53,79
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga	95.128.500,00	45.028.500,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi
	Terampil Konstruksi		
	jumlah jasa konstruksi yang dilatih	409 orang	409 orang
1	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	95.128.500,00	45.028.500,00
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	409 orang	409 orang
2	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	134.331.288,00	127.961.448,00
	jumlah peserta sosialisasi	290 Orang	290 Orang
1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	134.331.288,00	127.961.448,00
	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	4 Laporan	4 Laporan

7. Urusan Perhubungan

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	68.015.258.309,00	64.273.681.726,00	94,50%
	Persentase hasil kajian, analisa dan evaluasi pengembangan sistem transportasi	100	100	100.00 %
	Jumlah titik kemacetan yang tertangani	100,00	100	100.00 %
	Jumlah beroperasinya koridor/trayek angkutan umum sistem transit	100,00	100	100.00 %
	Prosentase PJU keselamatan jalan dalam kondisi baik	100	100	100.00 %
	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan Terpasang	100,00	100	100.00 %
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.579.754.200,00	985.222.100,00	62,37%
	Jumlah Dokumen Kajian, Analisa dan Evaluasi Pengembangan Sitem Transportasi	(100) Pengembangan Sitem Transportasi	(100) Pengembangan Sitem Transportasi	100.00 %
1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	955.784.000,00	568.852.900,00	59,52%
	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	(100) 3 Dokumen	(100) 3 Dokumen	100.00 %
2	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	623.970.200,00	416.369.200,00	66,73%
	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	(100) 3 Laporan	(100) 3 Laporan	100.00 %
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	15.697.210.283,00	14.934.661.782,00	95,14%
	Jumlah Prasarana dan Perlengkapan Jalan Terbangun dan Terpelihara	(100) 13 Ruas Jalan Kota	(100) 13 Ruas Jalan Kota	100.00 %
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	25.779.000,00	22.000.000,00	85,34%
	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	(100) 13 Ruas Jalan Kota	(100) 13 Ruas Jalan Kota	100.00 %
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.775.436.983,00	1.701.195.286,00	95,82%
	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	(100) 68 Titik	(100) 68 Titik	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	464.283.900,00	372.576.120,00	80,25%
	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	(100) 13 Ruas Jalan Kota	(100) 13 Ruas Jalan Kota	100.00 %
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	13.431.710.400,00	12.838.890.376,00	95,59%
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan Terpelihara Tere	(100) 4 item	(100) 4 item	100.00 %
3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	163.013.700,00	158.446.300,00	97,20%
	Jumlah Terminal Terpelihara	(100) 2 Terminal	(100) 2 Terminal	100.00 %
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	163.013.700,00	158.446.300,00	97,20%
	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	(100) 2 Terminal	(100) 2 Terminal	100.00 %
4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	423.510.000,00	423.042.500,00	99,89%
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Penertiban Perparkiran	(100) 12 Bulan	(100) 12 Bulan	100.00 %
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	423.510.000,00	423.042.500,00	99,89%
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	(100) 12 Bulan	(100) 12 Bulan	100.00 %
5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.979.285.500,00	1.925.869.100,00	97,30%
	Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor	(100) 1 Unit Pelayanan	(100) 1 Unit Pelayanan	100.00 %
1	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	100,00%
	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	(100) 50000 Kartu	(100) 50000 Kartu	100.00 %
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	729.285.500,00	675.869.100,00	92,68%
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	(100) 1 Balai	(100) 1 Balai	100.00 %
6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	9.100.511.126,00	7.624.106.700,00	83,78%
	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Untuk Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	(100) 4 Item Pekerjaan	(100) 4 Item Pekerjaan	100.00 %
1	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	9.100.511.126,00	7.624.106.700,00	83,78%
	Jumlah Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	(100) 4 Item	(100) 4 Item	100.00 %
7	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	97.350.000,00	66.800.000,00	68,62%
	Jumlah Dokumen Pembahasan Andalalin	(100) 6 Dokumen	(100) 6 Dokumen	100.00 %
1	Koordinasi dan Sinkronisasi	97.350.000,00	66.800.000,00	68,62%

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Penilaian Hasil Andalalin			
	Jumlah Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	(100) 6 Kegiatan	(100) 6 Kegiatan	100.00 %
8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.974.623.500,00	38.155.533.244,00	97,90%
	Jumlah Beroperasinya Koridor/Trayek Angkutan Umum Sistem Transit	(100) 13 Koridor	(100) 13 Koridor	100.00 %
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.730.807.500,00	37.915.490.744,00	97,89%
	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	(100) 13 Koridor	(100) 13 Koridor	100.00 %
2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	243.816.000,00	240.042.500,00	98,45%
	Jumlah Evaluasi Pengendalian Penyelenggaraan Angkutan Umum	(100) 1 Evaluasi	(100) 1 Evaluasi	100.00 %

8. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.236.039.168,00	1.951.576.985,00	87.28 %
	Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	0	0.00 %
	Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	0	0.00 %
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	275.000.000,00	0,00	0.00 %
	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun	20 unit	0	0.00 %
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	275.000.000,00	0,00	0.00 %
	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	0	0.00 %
2	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.961.039.168,00	1.951.576.985,00	99.52 %
	Jumlah pemeliharaan Rusunawa (Gebang Raya, Betet, Manis Jaya)	3 lokasi	100	100.00 %
1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1.961.039.168,00	1.951.576.985,00	99.52 %
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	14.241.971.300,00	14.215.725.540,00	99.82 %
	Persentase bangunan yang memiliki kesesuaian dengan perijinan	41,07	59,58	145.07 %
	Persentase rumah tidak layak huni	0,216	0,02	190.74 %
1	Penataan dan Peningkatan	0,00	0,00	0.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			
	Jumlah dokumen pendataan perumahan dan permukiman	2 dokumen	0	0.00 %
1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	0,00	0,00	0.00 %
	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	0	0	0.00 %
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	14.241.971.300,00	14.215.725.540,00	99.82 %
	Jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun	450 unit	100	100.00 %
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	14.241.971.300,00	14.215.725.540,00	99.82 %
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	700 unit Rumah	700 unit Rumah	100.00 %
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.704.548.161,00	2.490.570.950,00	92.09 %
	Persentase perumahan yang memiliki PSU	100	100	100.00 %
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.704.548.161,00	2.490.570.950,00	92.09 %
	Jumlah dokumen pendataan perumahan dalam rangka perolehan aset PSU	4 dokumen	100	100.00 %
	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan pemakaman TPU Selapajang Jaya	1 lokasi	1 lokasi	100.00 %
	Jumlah dokumen perumahan dalam rangka perolehan aset PSU	0 dokumen	0 dokumen	0.00 %
	Jumlah Dokumen Persyaratan serah terima PSU	6 dokumen	6 dokumen	100.00 %
	Jumlah Papan PSU	2 paket	2 paket	100.00 %
	Jumlah Peta Bidang	4 dokumen	4 dokumen	100.00 %
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	541.465.200,00	522.525.000,00	96.50 %
	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.569.197.397,00	1.403.510.926,00	89.44 %
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 Lokasi pemakaman	1 Lokasi pemakaman	100.00 %
	Jumlah TPU yang terpelihara	1 lokasi	1 lokasi	100.00 %
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	156.020.000,00	154.900.000,00	99.28 %
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %
4	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	437.865.564,00	409.635.024,00	93.55 %
	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %

9. Urusan Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	45.811.858.374,00	39.217.435.475,00	85,61%
	Peningkatan luas taman untuk RTH dan ruang terbuka non hijau publik yang tersedia	100	100	100.00 %
	Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap jumlah dekorasi kota dan reklame yang seharusnya dipelihara	100	100	100%
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	45.811.858.374,00	39.217.435.475,00	85.87 %
	Jumlah pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati	(100) 3 Kegiatan	(100) 3 Kegiatan	100.00 %
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	998.392.424,00	724.250.566,00	72,54%
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	(100) 72 Dokumen	(100) 72 Dokumen	100.00 %
2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	32.738.498.650,00	27.904.011.246,00	85,23%
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	(100) 52.64 ha	(100) 52.64 ha	100.00 %
3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	12.074.967.300,00	10.589.173.663,00	87,70%
	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	(100) 142 Unit	(100) 142 Unit	100.00 %
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		435.315.000	432.265.000	99,30
	Tingkat pelaksanaan evaluasi dokumen lingkungan hidup	100%	100%	100,00
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	44.750.000	41.700.000	93,18
	Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen RPPLH	100%	100%	100,00
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	44.750.000	41.700.000	93,18
	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	390.565.000	390.565.000	100,00
	Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	100%	100%	100,00
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	390.565.000	390.565.000	100
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		3.512.965.726	2.442.694.886	69,53
	Tingkat penurunan emisi gas karbon :	20,39%	20,39%	100,00
	Persentase titik pantau udara, kebisingan, air sungai, air situ, dan air tanah yang sesuai dengan baku mutu :	80%	53%	00,00
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.733.613.726	1.810.170.886	66,22
	Tingkat pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	100,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	858.724.400	639.483.500	74,47
	jumlah institusi dan/atau non institusi yang dipantau	20 institusi/non insti	20 institusi/non insti	100
	Jumlah kegiatan pelaksanaan Hari bebas Kendaraan	22 kegiatan	14 kegiatan	63,64
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1.874.889.326	1.170.687.386	62,44
	Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kota Tangerang	1 laporan	1 laporan	100

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Jumlah RW Kampung Iklim yang dibina	135 RW	86 RW	63,70
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	779.352.000	632.524.000	81,16
	Tingkat penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan HidupK	100%	100%	100,00
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	779.352.000	632.524.000	81,16
	Cakupan Frekuensi Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Kondisi Ekologis	2 periode	2 periode	100
	Cakupan Frekuensi Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan	1 periode	1 periode	100
	Frekuensi pelaksanaan pengujian emisi penunjang Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) Program Langit Biru	1 kegiatan	1 kegiatan	100
	Jumlah buku IKPLHD yang diselesaikan dari jumlah target penyusunan dokumen SLHD	2 buku	2 buku	100
	Pemantauan Kualitas Air Tanah dan Air Situ	2 periode	2 periode	100
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		26.128.000	20.240.000	77,46
	Persentase ruang terbuka hijau (RTH) yang dikembangkan	4,239%	4,239%	100,00
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	26.128.000	20.240.000	77,46
	Tingkat ketersediaan pohon untuk penghijauan	100%	100%	100,00
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	26.128.000	20.240.000	77,46
	Jumlah Pohon yang ditanam	184 pohon	184 pohon	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		146.117.000	140.270.600	96,00
	Tingkat pengelolaan limbah B3 :	100%	100%	100,00
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	146.117.000	140.270.600	96,00
	Tingkat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	100%	100%	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	146.117.000	140.270.600	96,00
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang terlaksana	2 kegiatan	2 kegiatan	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		174.519.149	174.076.000	99,75
	Persentase badan usaha dan /atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan :	100%	100%	100,00
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	174.519.149	174.076.000	99,75
	Tingkat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan	100%	100%	100,00
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	0	0	
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 dokumen	20 dokumen	100,00
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	174.519.149	174.076.000	99,75

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Kabupaten/Kota			
	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60 Laporan	101 laporan	168,3
	Jumlah pengawasan usaha dan/atau kegiatan	100 usaha dan/atau keg	101 usaha dan/ atau keg	101,000
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		520.639.440	373.351.200	71,71
	Persentase sekolah adhiwiyata	100%	100%	100,00
	Persentase RW yang di bina menjadi kampung iklim	27%	17,20%	63,70
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	520.639.440	373.351.200	71,71
	Tingkat Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Ungkungan Hidup	100%	100%	100,00
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	509.239.440	361.951.200	71,08
	Jumlah aktivitas Kelompok Pelaku Lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang difasilitasi	5 aktivitas	5 aktivitas	100
	Jumlah Calon Perusahaan PROPER	50 Perusahaan	0 Perusahaan	0
	Jumlah Sekolah SD, SMP yang akan dibina menjadi sekolah Adhiwiyata	65 sekolah	65 sekolah	100
	Sistem Manajemen Adipura	1 penghargaan	0 penghargaan	0
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	11.400.000	11.400.000	100
	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	200 orang	200 orang	100
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		219.270.000	213.220.000	97
	Persentase pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup yang ditangani	100%	100%	100
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	219.270.000	213.220.000	97,24
	Persentase kasus pelanggaran lingkungan hidup yang ditangani	100%	100%	100,00
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	100%	100%	100,00
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	189.520.000	188.470.000	99,45
	Jumlah pengaduan sengketa lingkungan hidup yang ditangani	20 pengaduan	76 pengaduan	380,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	29.750.000	24.750.000	83,19
	Jumlah kasus pelanggaran lingkungan hidup yang ditangani	30 usaha dan/atau keg	31 usaha dan/atau keg	103,33
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		143.124.353.605	138.158.374.950	96,53
	Persentase Volume Sampah yang tertangani :	75%	74,92%	99,89
	Jumlah sampah yang berkurang melalui mekanisme 3R :	25%	25,50%	102,00
	Pengelolaan Sampah	143.124.353.605	138.158.374.950	96,53
	Tingkat pengelolaan sampah di Kota Tangerang	100%	100%	96,53
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan	6.352.516.587	5.945.671.132	93,60

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Pemanfaatan Kembali			
	Jumlah Sampah yang termanfaatkan dan terdaur ulang	128619.5 ton per tahun	128869,42 ton per tahun	100,19
	Tersedianya data/informasi penanganan sampah	1 buku	1 buku	100,00
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	103.864.464.569	102.220.434.898	98,42
	Jumlah limbah B3 domestik yang dikelola	355 KG	355 KG	100,00
	Jumlah lokasi pengolahan sampah yang beroperasi	13 lokasi	10 lokasi	76,92
	Jumlah sampah yang terangkut ke TPA	385858.5 ton per tahun	385460,44 ton per tahun	99,89
	Operasionalisasi TPA di Kota Tangerang	72 poin	0	-
	Persentase cakupan area pelayanan di 6 Kecamatan	100%	100%	100,00
	Persentase cakupan area pelayanan di 7 Kecamatan	100%	100%	100,00
	Persentase Pencapaian target retribusi	100%	105,75%	105,75
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	494.432.272	450.745.276	91,16
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	3 Kelompok	100
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	32.412.940.177	29.541.523.644	91,14
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 lokasi	1 lokasi	90

10. Urusan Penanaman Modal

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	3.200.000,00	532.500,00	16,64%
	Tingkat pelaksanaan kebijakan daerah mengenai perizinan dan penanaman modal	100	100	100,00%
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.200.000,00	532.500,00	16,64%
	Jumlah kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00 %
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3.200.000,00	532.500,00	16,64%
	Jumlah kebijakan Daerah mengenai perizinan dan penanaman modal yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	306.654.600,00	288.500.000,00	94,08%
	Presentase Promosi yang Menarik Investor	100	100	100,00%
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	306.654.600,00	288.500.000,00	94,08%
	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00 %
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	97.034.400,00	94.125.000,00	97,00%

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Jumlah strategi promosi penanaman modal yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %
	2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	209.620.200,00	194.375.000,00	92,73%
	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah kota/kabupaten	3 kali	3 kali	100.00 %
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	85.875.000,00	82.007.000,00	95,50%
	Tingkat Ketepatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	98,03	107,60	109,76%
	Tingkat ketepatan waktu pelayanan perizinan Pemerintahan dan Kesra	99,00	135,23	136,60%
	Tingkat penyelesaian pengaduan perijinan dan penanaman modal dengan baik	100	100	100,00%
	Tingkat ketepatan waktu pelayanan perizinan pembangunan	98,03	125,70	128,23%
	1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	85.875.000,00	82.007.000,00	95,50%
	Jumlah kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00 %
	1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.875.000,00	12.875.000,00	81,10%
	Jumlah rapat pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	3 kali	3 kali	100.00 %
	2 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	70.000.000,00	69.132.000,00	98,76%
	Jumlah iklan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	7 kali	7 kali	100.00 %
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	292.100.000,00	219.444.750,00	75,13%
	Tingkat Pengendalian Pelaporan Penanaman Modal	100	100	100,00%
	1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	292.100.000,00	219.444.750,00	75,13%
	Jumlah kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00 %
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	279.500.000,00	208.754.750,00	74,69%
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	255 Pelaku Usaha	255 Pelaku Usaha	100.00 %
	Jumlah pengusaha/pelaku usaha yang mengikuti pembinaan	280 Pelaku Usaha	280 Pelaku Usaha	100.00 %
	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	12.600.000,00	10.690.000,00	84,84%
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	16 Kegiatan Usaha	16 Kegiatan Usaha	100.00 %
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	138.121.200,00	102.000.000,00	73,85%
	Tingkat Pemanfaatan Sistem Terhadap Pelayanan Perizinan	100	100	100.00 %
	1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	138.121.200,00	102.000.000,00	73,85%
	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	138.121.200,00	102.000.000,00	73,85%
	Jumlah Rapat Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 kali	1 kali	100.00 %

11. Urusan Perindustrian; Urusan Perdagangan; Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	819.465.800,00	759.832.800,00	92.72 %
	Persentase Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang memiliki sertifikasi	3,351	3,351	100%
	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang mendapatkan pembinaan	3,351	4,45	132.80 %
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	819.465.800,00	759.832.800,00	92.72 %
	Jumlah Pelaku industri makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan	(100) 150 orang	(100) 150 orang	100.00 %
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	405.789.700,00	348.729.700,00	85.94 %
	jumlah industri makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan	(100) 400 IKM	361 IKM	90.25 %
	jumlah industri yang memiliki legalitas usaha industri	(100) 150 IKM	150 IKM	100.00 %
	Jumlah Uji Laboratorium Produk Pangan Industri Rumah Tangga	(100) 100 Jenis	59 Jenis	59.00 %
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	221.508.600,00	219.670.600,00	99.17 %
	Tersedianya sarana prasarana produksi bagi peningkatan produktivitas	(100) 60 IKM	60 IKM	100.00 %
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	192.167.500,00	191.432.500,00	99.62 %
	Jumlah industri yang bermitra	(100) 30 industri kecil	29 industri kecil	96.66 %
	jumlah industri yang mengikuti klinik industri	(100) 30 Industri kecil	30 Industri kecil	100.00 %
	Jumlah perusahaan yang menerapkan peningkatan mutu dan kualitas produk setelah mengetahui pentingnya penerapan SNI	(100) 2 industri kecil	0	0.00 %
3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	3.533.700,00	3.533.700,00	100.00 %
	Persentase jumlah industri kecil dan menengah yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	3,35	3,35	100%
1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.533.700,00	3.533.700,00	100.00 %
	Jumlah Kegiatan Pembinaan Industri	(100) 1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam	3.533.700,00	3.533.700,00	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
	Jumlah industri di Kota Tangerang yang Terbina	(100) 100 Industri Kecil	(100) 100 Industri Kecil	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	111.377.900,00	102.762.900,00	92.27 %
	Persentase jumlah pasar tradisional yang difasilitasi sarana dan fasilitas distribusi perdagangan	10	10	100.00 %
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	111.377.900,00	102.762.900,00	92.27 %
	Jumlah peserta lomba pasar tradisional bersih	(100) 40 Pasar	40 Pasar	100.00 %
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	111.377.900,00	102.762.900,00	92.27 %
	Dokumen kajian pasar tematik	(100) 1 Dokumen	0	0.00 %
	Dokumen naskah akademik pembuatan minimarket	(100) 1 Dokumen	0	0.00 %
	Jumlah peserta lomba pasar tradisional bersih	(100) 38 Pasar	(100) 38 Pasar	100.00 %
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	172.443.600,00	172.443.600,00	100.00 %
	Persentase jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	100	100	100.00 %
1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	172.443.600,00	172.443.600,00	100.00 %
	Jumlah Dokumen Pemantauan Harga Sembako di Pasar	(100) 200 IKM	200 IKM	100.00 %
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	172.443.600,00	172.443.600,00	100.00 %
	Jumlah dokumen pemantauan harga sembako dipasar	(100) 72 Buku	72 Buku	100.00 %
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	702.826.900,00	677.825.500,00	96.44 %
	Persentase pelaku usaha yang terlibat dalam promosi dagang produk ekspor	100	100	100.00 %
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	702.826.900,00	677.825.500,00	96.44 %
	Jumlah peserta IKM dan Pelaku Ekspor yang Mengikuti Pembinaan serta Terselenggaranya Promosi Perdagangan	(100) 100 %	100%	100.00 %
1	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	702.826.900,00	677.825.500,00	96.44 %
	Jumlah IKM yang mengikuti Pembinaan dan Pelatihan	(100) 100 IKM	100 IKM	100.00 %
	Jumlah Pengusaha yang Mengikuti Pembinaan	(100) 100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100.00 %
4	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	106.693.200,00	105.218.000,00	98.62 %
	Persentase jumlah kasus perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti	100	100	100.00 %
	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	100	100	100.00 %
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	106.693.200,00	105.218.000,00	98.62 %
	Terlaksananya Pelayanan Tera dan Tera	(100) 38 Lokasi	38 Lokasi	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Ulang Kecamatan (4) Terciptanya jaminan ketelusuran standar milik UPT Pelayanan Metrologi (5) Kaji Ulang Management dan Audit Internal			
	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	106.693.200,00	105.218.000,00	98.62 %
	Tersedianya alat ukur, takar , timbang danperlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	(100) 1 paket	1 paket	100.00 %
5	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	769.420.700,00	697.482.000,00	90.65 %
	Persentase jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang difasilitasi pemasaran produk	100	100	100.00 %
	1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	769.420.700,00	697.482.000,00	90.65 %
	Jumlah Jasa Acara Kegiatan yang terselenggarakan	(100) 2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %
	1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	552.210.700,00	495.992.200,00	89.82 %
	Jumlah Jasa Acara Kegiatan yang terselenggarakan	(100) 1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %
	2 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	217.210.000,00	201.489.800,00	92.76 %
	Jumlah pelaku usaha dan masyarakat yang diedukasi	(100) 2040 Orang	2040 Orang	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	361.971.400,00	352.668.400,00	97.43 %
	Presentase koperasi yang patuh terhadap peraturan terhadap total jumlah koperasi aktif	62,08	62,08	100%
	1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	361.971.400,00	352.668.400,00	97.43 %
	Jumlah Kegiatan Pengawas Koperasi	(100) 2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %
	1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	84.521.550,00	83.320.050,00	98.58 %
	Jumlah Koperasi yang diawasi	(100) 150 Koperasi	150 Koperasi	100.00 %
	2 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	277.449.850,00	269.348.350,00	97.08 %
	Jumlah Koperasi yang di awasi	(100) 18 Koperasi	18 Koperasi	100.00 %
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	40.670.550,00	36.925.550,00	90.79 %
	Presentase koperasi yang sehat terhadap total jumlah koperasi aktif	50,33	50,33	100%
	1 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.670.550,00	36.925.550,00	90.79 %
	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Koperasi	(100) 1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %
	1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40.670.550,00	36.925.550,00	90.79 %
	Jumlah Koperasi yang di fasilitasi	(100) 150 Koperasi	150 Koperasi	100.00 %
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	541.443.400,00	494.428.400,00	91.32%
	Presentase koperasi yang dibina kapasitas dan kompetensi SDMnya terhadap total jumlah koperasi aktif	67,11	67,11	100%

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	108.073.400,00	102.645.600,00	94.98 %
	Koperasi yang dibina / dilatih	(100) 1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	108.073.400,00	102.645.600,00	94.98 %
	Jumlah Koperasi yang dibina/dilatih	(100) 200 Orang	122	61.00 %
2	Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	433.370.000,00	391.782.800,00	90.4%
	Koperasi yang dibina / dilatih	(100) 1 kegiatan	1 kegiatan	100.00 %
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	433.370.000,00	391.782.800,00	90.4%
	Jumlah SDM Koperasi yang dibina/dilatih	(100) 200 Orang	200 Orang	100.00 %
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	227.080.900,00	206.263.400,00	90.83 %
	Presentase koperasi yang melakukan RAT terhadap total jumlah koperasi aktif	88,43	88,43	100%
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	227.080.900,00	206.263.400,00	90.83 %
	Jumlah Kegiatan Pembinaan Koperasi	(100) 1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %
1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	227.080.900,00	206.263.400,00	90.83 %
	Jumlah Koperasi yang difasilitasi bina/dilatih	(100) 150 Koperasi	150 Koperasi	100.00 %
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.687.464.150,00	2.077.720.550,00	77.31%
	Pertambahan jumlah usaha mikro	5,011	5,011	100%
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.687.464.150,00	2.077.720.550,00	77.31%
	Jumlah UMKM yang Mengikuti Tangerang Expo, Bazar UMKM, Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat, Pameran Keluar Daerah dan Jumlah UMKM yang mendapatkan pendampingan/bimbingan teknis	(100) 827 Usaha Mikro	(100) 827 Usaha Mikro	100.00 %
1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	923.265.850,00	417.992.650,00	45.27 %
	Jumlah UMKM yang mendapatkan pendampingan/bimbingan teknis	(100) 390 Usaha mikro	(100) 390 Usaha mikro	100.00 %
2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	1.764.198.300,00	1.659.727.900,00	94.08%
	Jumlah UMKM yang Mengikuti Tangerang Expo, Bazar UMKM dan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat	(100) 570 pelaku UMKM	570 pelaku UMKM	100.00 %
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	475.119.700,00	475.001.300,00	99.98%
	Presentase jumlah usaha mikro yang meningkat daya saingnya (berdaya saing)	3,007	3,03	100.76 %
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	475.119.700,00	475.001.300,00	99.98%
	Jumlah UMKM yang dibina/dilatih	(100) 1 Kali	1 Kali	100.00 %
1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	475.119.700,00	475.001.300,00	99.98%
	Jumlah UMKM yang dibina/dilatih	(100) 750 ukm	750 ukm	100.00 %

12. Urusan Kebudayaan; Urusan Pariwisata; Urusan Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.607.431.520,00	4.424.907.320,00	96,04%
	Cakupan kajian seni dan budaya	100	100	100.00 %
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.656.423.520,00	2.628.917.020,00	99,03 %
	Jumlah kegiatan pengelolaan kebudayaan	(100) 2 Kegiatan	(100) 2 Kegiatan	100.00 %
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	342.775.000,00	319.168.500,00	93,11%
	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	(100) 2 Objek	(100) 2 Objek	100.00 %
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2.313.648.520,00	2.309.748.520,00	99,83%
	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	(100) 225 Orang	(100) 225 Orang	100.00 %
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.951.008.000,00	1.795.990.300,00	92,05 %
	Jumlah kesenian daerah yang dilestarikan melalui tampilan, perlombaan dan pentas	(100) 39 Jenis	100	100.00 %
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	811.355.000,00	788.390.300,00	97,17%
	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	(100) 1 Objek	(100) 1 Objek	100.00 %
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1.139.653.000,00	1.007.600.000,00	88,41%
	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	(100) 4 Laporan	(100) 4 Laporan	100.00 %
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	168.549.000,00	142.111.200,00	84,31%
	Cakupan Fasilitas seni dan budaya	100	100	100.00 %
1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	168.549.000,00	142.111.200,00	84,31%
	Jumlah pembinaan/pelatihan kesenian daerah	(100) 4 Jenis	(100) 4 Jenis	100.00 %
1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	168.549.000,00	142.111.200,00	84,31%
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	(100) 50 Orang	(100) 50 Orang	100.00 %
4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	93.733.000,00	93.692.305,00	99,96%
	Cakupan Pembinaan sejarah	100	100	100.00 %
1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	93.733.000,00	93.692.305,00	99,96%
	Jumlah pembinaan sejarah lokal	(100) 3 Kegiatan	(100) 3 Kegiatan	100.00 %
1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	24.850.000,00	24.849.000,00	99,99%
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal kabupaten/Kota yang Diberdayakan	(100) 60 Orang	(100) 60 Orang	100.00 %
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	43.083.000,00	43.048.305,00	99,92%
	Jumlah Sarana dan Prasarana	(100) 2 Unit	(100) 2 Unit	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Pembinaan Sejarah			
3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	25.800.000,00	25.795.000,00	99,98%
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	(100) 1 Dokumen	(100) 1 Dokumen	100.00 %
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	751.860.000,00	534.065.050,00	71,03%
	Cakupan perlindungan seni dan budaya	100	100	100.00 %
1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	751.860.000,00	534.065.050,00	71,03%
	Jumlah Cagar Budaya yang dipelihara	(100) 10 Cagar budaya	(100) 10 Cagar budaya	100.00 %
1	Pelindungan Cagar Budaya	518.738.000,00	349.765.050,00	67,43%
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	(100) 3 Objek	(100) 3 Objek	100.00 %
2	Pengembangan Cagar Budaya	233.122.000,00	184.300.000,00	79,06%
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	(100) 1 Objek	(100) 1 Objek	100.00 %
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	286.396.300,00	283.882.300,00	99,12%
	Tingkat pengelolaan museum	100	100	100.00 %
1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	286.396.300,00	283.882.300,00	99,12%
	Jumlah dokumen perencanaan revitalisasi/ renovasi cagar budaya	(100) 1 dokumen	(100) 1 dokumen	100.00 %
1	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	286.396.300,00	283.882.300,00	99,12%
	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	(100) 1 Unit	(100) 1 Unit	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.354.387.892,00	2.219.699.200,00	94,28%
	Tingkat perkembangan objek wisata daerah	100	100	100.00 %
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.382.922.200,00	1.266.940.000,00	91,61%
	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata	(100) 3 Kegiatan	(100) 3 Kegiatan	100.00 %
1	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	61.055.800,00	60.462.500,00	99,03%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	(100) 2 Dokumen	(100) 2 Dokumen	100.00 %
2	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.321.866.400,00	1.206.477.500,00	91,27%
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	(100) 2 Lokasi	(100) 2 Lokasi	100.00 %
2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	835.199.492,00	816.493.000,00	97,76%
	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	(100) 3 Kegiatan	(100) 3 Kegiatan	100.00 %
1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	700.693.492,00	683.437.000,00	97,54%
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	(100) 4 Unit	(100) 4 Unit	100.00 %
2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	36.435.600,00	36.435.600,00	100,00%
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	(100) 12 Dokumen	(100) 12 Dokumen	100.00 %
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	98.070.400,00	96.620.400,00	98,52%
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan	(100) 3 Laporan	(100) 3 Laporan	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	136.266.200,00	136.266.200,00	100,00%
	Jumlah kegiatan pendataan dan sosialisasi regulasi usaha jasa pariwisata	(100) 2 Kegiatan	(100) 2 Kegiatan	100.00 %
1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	136.266.200,00	136.266.200,00	100,00%
	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	(100) 2 Dokumen	(100) 2 Dokumen	100.00 %
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	630.629.825,00	599.988.825,00	95,14%
	Persentase wisatawan yang datang karena promosi	27,54	27,54	100.00 %
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	630.629.825,00	599.988.825,00	95,14%
	Jumlah promosi, pameran dan kerjasama promosi yang dilaksanakan	(100) 12 Kali	(100) 12 Kali	100.00 %
1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	53.072.000,00	53.072.000,00	100,00%
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	(100) 3 Dokumen	(100) 3 Dokumen	100.00 %
2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	577.557.825,00	546.916.825,00	94,69%
	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	(100) 6 Laporan	(100) 6 Laporan	100.00 %
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	127.604.800,00	113.356.100,00	88,83%
	Tingkat kepatuhan usaha jasa pariwisata terhadap peraturan kepariwisataan (baru)	100	100	100.00 %
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	127.604.800,00	113.356.100,00	88,83%
	Jumlah pelatihan pengembangan profesionalisme bidang pariwisata	(100) 1 Kali	(100) 1 Kali	100.00 %
1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	127.604.800,00	113.356.100,00	88,83%
	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	(100) 125 Orang	(100) 125 Orang	100.00 %

13. Urusan Pangan; Urusan Pertanian; Urusan Kelautan Perikanan

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.745.301.952,00	2.637.823.560,00	96.09 %
	Produktivitas Pertanian	61,25	61,25	100.00 %
	Prosentase Pendistribusian Bibit Ternak dan Ikan sebesar	18	18	100.00 %
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	324.535.660,00	301.852.260,00	93.01 %
	Jumlah penyediaan dan pengembangan sarana pertanian di Kota Tangerang	(100) 2 jenis	2 jenis	100.00 %
1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	324.535.660,00	301.852.260,00	93.01 %
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	(100) 1 Laporan	1 Laporan	100.00 %
	Pembinaan dan Pengembangan Pertanian Perkotaan	(100) 2 paket	2 paket	100.00 %
2	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit	2.420.766.292,00	2.335.971.300,00	96.50 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
	Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Jumlah penyediaan bibit/ternak/ikan yang tersedia	(100) 3 jenis	3 jenis	100.00 %
1	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.420.766.292,00	2.335.971.300,00	96.50 %
	Jumlah bibit ikan yang di hasilkan	(100) 190000 ekor	190000 ekor	100.00 %
	Jumlah bibit tanaman yang di hasilka	(100) 50000 pohon	50000 pohon	100.00 %
	Jumlah bibit ternak yang di hasilkan	(100) 28 ekor	28 ekor	100.00 %
	Jumlah Naungan Jalan Eksisting Kolam	(100) 1 Paket	1 Paket	100.00 %
2	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	335.118.794,00	320.189.550,00	95.55 %
	Angka prevalensi penyakit hewan	1	0	100%
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	195.118.994,00	180.189.750,00	92.35 %
	Tersedianya penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota.	(100) 2 jenis	2 jenis	100.00 %
1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	195.118.994,00	180.189.750,00	92.35 %
	Vaksinasi rabies pada hewan kesayangan	(100) 500 ekor	500 ekor	100.00 %
	Pelayanan pengobatan pada hewan kesayangan, ternak besar dan kecil	(100) 5000 ekor	5000 ekor	100.00 %
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	139.999.800,00	139.999.800,00	100.00 %
	Tersedianya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	(100) 3 Jenis	3 Jenis	100.00 %
1	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	139.999.800,00	139.999.800,00	100.00 %
	Jumlah orang yang diberikan pembinaan terkait peternakan dan kesehatan hewan	(100) 628 orang	628 orang	100.00 %
	Pelayanan pemotongan di UPT RPH (Rumah Potong Hewan)	(100) 15080 ekor	15080 ekor	100.00 %
	Pendataan dan monitoring titik pemotongan hewan kurban	(100) 1500 titik	1500 titik	100.00 %

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	204.351.650,00	198.862.650,00	97.31 %
	Produktivitas perikanan	6,31	6,31	100.00 %
1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	204.351.650,00	198.862.650,00	97.31 %
	Tersedianya pengelolaan pembudidayaan ikan	(100) 3 jenis	3 jenis	100.00 %
1	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	204.351.650,00	198.862.650,00	97.31 %
	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	(100) 210 Orang	210 Orang	100.00 %
	Pembibitan ikan konsumsi	(100) 3 lokasi	3 lokasi	100.00 %
	Pendataan produksi perikanan	(100) 13 Kecamatan	13 Kecamatan	100.00 %

C. Permasalahan yang Dihadapi

1. Keterbatasan kelengkapan data pendukung yang disampaikan oleh OPD terkait, khususnya pada komponen indikator makro dikarenakan instansi yang menjadi sumber data belum merilis update terbaru dari data-data terkait. Sehingga data yang ditampilkan seringkali bersifat proyeksi atau prediksi (data diolah oleh tim Bappeda).
2. Keterbatasan pemahaman OPD terhadap definisi maupun rumusan operasional indikator kinerja sehingga berpengaruh terhadap perencanaan kegiatan yang diusulkan OPD, dimana tujuan dan rincian kegiatan yang diusulkan belum sepenuhnya mengarah pada pencapaian sasaran dan program RPJMD. Hal tersebut juga menjadi kendala dalam mengkoordinasikan dan memberikan arahan serta panduan penyusunan rencana anggaran pada masing-masing OPD.
3. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan LHP inspektorat dikarenakan kurangnya koordinasi antara OPD dan inspektorat untuk memahami rekomendasi hasil LHP.
4. Belum terintegrasinya sistem penganggaran, perencanaan dan evaluasi kinerja, sehingga pengukuran capaian kinerja tidak dapat terlaksana dengan optimal dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.

D. Solusi Terhadap Permasalahan

1. Meningkatkan koordinasi secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian kinerja RPJMD yang dilaksanakan oleh OPD terkait, termasuk diantaranya melibatkan tidak hanya kasubag perencanaan dalam rapat koordinasi namun juga bidang terkait pada OPD, sebagai sumber data indikator. Koordinasi juga dilakukan dalam bentuk pembahasan secara detail terkait definisi maupun rumusan operasional indikator untuk meningkatkan pemahaman OPD terkait indikator kinerja sesuai tanggungjawabnya dan memastikan validitas data yang disampaikan OPD.
2. Melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi vertikal yang menjadi sumber data seperti BPS, untuk mendapatkan informasi terupdate terkait data prediksi dan proyeksi indikator.
3. Mengintegrasikan sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi untuk mempermudah akses pengumpulan data kinerja dari OPD dan mempermudah penilaian terhadap usulan kegiatan OPD pada saat penajaman usulan program dan kegiatan pembangunan agar mendukung pencapaian sasaran dan program RPJMD. Dengan adanya evaluasi berkala baik di lingkup koordinasi maupun system informasi dapat memberikan gambaran terkait ketercapaian indikator RPJMD sebagai bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan untuk menentukan program dan kegiatan yang akan diprioritaskan.
4. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparatur terkait tugas dan fungsi perencanaan khususnya dalam menyiapkan konsep rencana kerja dengan berpedoman pada dokumen rencana kerja serta berdasarkan

tupoksi OPD agar selaras dengan visi-misi-tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD Perubahan Kota Tangerang Tahun 2019-2023.

5. Meningkatkan kemampuan fungsional dan akuntabilitas secara berkesinambungan bagi fungsional APIP khususnya dalam mengevaluasi kinerja OPD.
6. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait secara inten untuk mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan mengundang OPD dan objek pemeriksaaan secara periodik.

Berikut ini diuraikan anggaran dan realisasi belanja daerah untuk mendukung pencapaian target perjanjian kinerja Kota Tangerang Tahun 2023.

Tabel II-57 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Untuk Mendukung Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Kota Tangerang Tahun 2023

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan Indikator	2023			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Anggaran	OPD Pelaksana	
				Target	Realisasi	% Capaian					
1	MISI 1 : BERSAMA MENGEMBANGKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS										
1.1	Tujuan 1.1 :	1	Indeks pendidikan (Indeks pengetahuan)	Point	75,14 - 76,74	74,95	99,75%	2.159.973.098.098,00	2.076.322.813.087,00	96,13%	
	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	2	Indeks kesehatan (Indeks harapan hidup)	Point	79,66 - 79,69	85,08	106,80%				
1.1.1	Sasaran 1.1.1 :	1.1	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,72	98,09	100,38%	1.264.527.302.979,00	1.230.123.155.841,00	97,28%	Dinas Pendidikan; Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1.2	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	99	99,37	100,37%				
1.1.2	Sasaran 1.1.2 :	2.1	Angka kematian bayi (AKB)	Orang per 1.000 kelahiran hidup	1,07	1,08	99,07%	895.445.795.119,00	846.199.657.246,00	94,50%	Dinas Kesehatan; RSUD; Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; Dinas
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.2	Angka kematian ibu (AKI)	Orang per 100.000 kelahiran	12,13	20,07	34,54%				

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan Indikator	2023			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Anggaran	OPD Pelaksana	
				Target	Realisasi	% Capaian					
			hidup							Kepemudaan dan Olahraga	
		2.3 Angka kesakitan	Orang per 100.000 penduduk	182	182	100,00%					
1.2	Tujuan 1.2 : Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	1	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	%	4,01 - 4,39	5,89	65,83%	170.335.563.973,00	155.707.397.980,00	91,41%	
1.2.1	Sasaran 1.2.1 : Menurunnya kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1.1	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Orang	95.403	95.395	100,01%	66.682.555.229,00	61.910.984.457,00	92,84%	Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.2.2	Sasaran 1.2.2 : Meningkatnya kesempatan kerja	2.1	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	6,45 - 7,54	6,76	110,34%	103.653.008.744,00	93.796.413.523,00	90,49%	Dinas Ketenagakerjaan; Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.3	Tujuan 1.3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1	Indeks reformasi birokrasi	Point	70	82,71	118,16%	1.245.603.113.625,00	1.137.419.936.670,00	91,31%	
1.3.1	Sasaran 1.3.1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	1.1	Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah	A, BB, B, CC, C, D	BB	B	96,59%				Dinas Komunikasi dan Informatika; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; 13 Kecamatan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Inspektorat; Badan
		1.2	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	100,00%	1.245.603.113.625,00	1.137.419.936.670,00	91,31%	
		1.3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan	Point	85,83	87,44	101,88%				

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan Indikator	2023			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Anggaran	OPD Pelaksana
				Target	Realisasi	% Capaian				
		publik							Pendapatan Daerah; Badan Pengelola Keuangan Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
2	MISI 2 : BERSAMA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KOTA YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN									
2.1	Tujuan 2.1 : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan	1	Indeks pembangunan sarana prasarana perkotaan	Point	86,31	85,69	99,28%	1.167.052.782.787,00	1.031.637.405.890,00	88,40%

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan Indikator	2023			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Anggaran	OPD Pelaksana	
				Target	Realisasi	% Capaian					
2.1.1	Sasaran 2.1.1 :	1.1	Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%	94,26	99,52	105,58%	571.188.072.840,00	532.925.760.362,00	93,30%	Dinas Perhubungan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perkotaan	1.2	Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan	Km/jam	25	25,02	100,08%				
2.1.2	Sasaran 2.1.2 :	2.1	Persentase permukiman kumuh	%	0,08	0	200,00%	77.016.709.107,00	22.997.860.573,00	29,86%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya kualitas permukiman	2.2	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100	100,00%				
		2.3	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,81	99,81	100,00%				
2.1.3	Sasaran 2.1.3 : Meningkatnya kualitas drainase dan sumber daya air	3.1	Luas banjir dan genangan	Ha	195,88	191,55	102,21%	256.863.840.781,00	230.205.769.273,00	89,62%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.1.4	Sasaran 2.1.4 :	4.1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Point	57,93	46,92	80,99%	261.984.160.059,00	245.508.015.682,00	93,71%	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	4.2	Tingkat pengelolaan sampah	%	100	99,97	99,97%				
3	MISI 3 : BERSAMA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI										

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan Indikator	2023			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Anggaran	OPD Pelaksana	
				Target	Realisasi	% Capaian					
	YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN										
3.1	Tujuan 3.1 :	1	Nilai PDRB ADHK	Rp. Triliyun	115,94 - 118,57	119,06	102,69%	220.747.227.569,00	209.271.469.318,00	94,80%	
	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat yang berdaya saing	2	Indeks pengeluaran (daya beli)	Point	82,73 - 83,91	83,21	100,58%				
	Sasaran 3.1.1 :										
3.1.1	Meningkatnya investasi daerah	1.1	Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Triliyun	9,67	14,99	155,01%	157.637.483.451,00	150.751.982.745,00	95,63%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, , Badan Kesbangpol, Polisi Pamong Praja
	Sasaran 3.1.2 :	2.1	Laju inflasi	%	3,5	3,17	109,43%				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3.1.2	Meningkatnya perekonomian masyarakat	2.2	Indeks gini (gini rasio)	Point	0,305 - 0,316	0,379	80,06%	63.109.744.118,00	58.519.486.573,00	92,73%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Ketahanan Pangan
Rata-Rata Capaian Kinerja							102,49%				
Predikat Kinerja							Sangat Tinggi				

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2023 tidak melaksanakan Tugas Pembantuan, baik berupa Tugas Pembantuan yang diberikan maupun tugas pembantuan yang diterima.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM Bidang Urusan pendidikan pada Pemerintahan Kota Tangerang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya serta peraturan penerapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM Bidang Urusan Pendidikan merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

SPM Bidang Urusan Pendidikan daerah kabupaten/kota mencakup 3 (tiga) pelayanan dasar yaitu:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama); dan
- c. pendidikan kesetaraan.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Sedangkan Penerima Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Pendidikan yaitu:

- a. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- c. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor : 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor : 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019-2023.

4.1.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian yang ditetapkan Pemerintah Kota Tangerang dalam mencapai SPM Urusan Pendidikan di Tahun 2023, termasuk perhitungan pembiayaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV-1 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar/Program		Anggaran/Indikator SPM	Satuan	Target
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Rp.	688.469.826.412
1	Pendidikan Dasar		Rp.	627.307.736.000
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI, SMP/MTs)	Orang	296.584
a.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Rp.	419.528.494.152
b.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Rp.	207.779.241.848
2	Pendidikan Kesetaraan		Rp.	5.600.724.800
		Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum	Orang	5.214

Jenis Pelayanan Dasar/Program		Anggaran/Indikator SPM	Satuan	Target
		menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
c.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Rp.	5.600.724.800
3	Pendidikan Anak Usia Dini		Rp.	55.561.365.612
		Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	67.292
c.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Rp.	55.561.365.612

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2024

Anggaran yang dipersiapkan untuk mendukung SPM Urusan Pendidikan sebesar Rp 688.469.826.412,-. Berdasarkan besaran anggaran berturut-turut dari yang terbesar diperuntukkan pada program Pendidikan Dasar, diikuti dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan terakhir adalah Pendidikan Kesetaraan. Dari program tersebut anggaran terbesar diberikan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan proporsi sebesar 60,94%. Posisi kedua ditempati oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan proporsi sebesar 30,18% dan terakhir adalah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan proporsi sebesar 8,07%. sedangkan kegiatan dengan anggaran terkecil ada pada Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar 0,81%.

4.1.3 Realisasi

Realisasi pencapaian indikator SPM pada Urusan Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2023 dan capaian indikator SPM terhadap Target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel IV-2 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar/Program		Anggaran/Indikator SPM	Satuan	Realisasi	Capaian
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Rp.	675.959.699.046	98,18
1	Pendidikan Dasar		Rp.	616.085.251.694	98,21
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Orang	296.584	100,00

Jenis Pelayanan Dasar/Program		Anggaran/Indikator SPM	Satuan	Realisasi	Capaian
		SD/MI, SMP/MTs)			
a.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Rp.	413.059.223.539	98,46
b.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Rp.	203.026.028.155	97,71
2	Pendidikan Kesetaraan		Rp.	5.455.844.500	97,41
		Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	5.214	100,00
c.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Rp.	5.455.844.500	97,41
3	Pendidikan Anak Usia Dini		Rp.	54.418.602.852	97,94
		Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	67.292	100,00
c.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Rp.	54.418.602.852	97,41

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2024

Capaian Indikator SPM dari ketiga jenis pelayanan dasar Kota Tangerang Tahun 2023 terhadap target yang ditentukan mencapai realisasi 100%. Meskipun pencapaian SPM dari ketiga jenis pelayanan dasar Kota Tangerang mencapai 100% namun realisasi pembiayaan yang digunakan ketiganya tidak mencapai 100%. Capaian realisasi anggaran terbesar ada pada jenis pelayanan dasar Pendidikan Dasar sebesar 98,21% urutan selanjutnya ada pada jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini sebesar 97,94%, dan jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan sebesar 97,41%.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2023 merupakan jumlah anggaran yang berada pada anggaran belanja langsung yang bersumber dari APBD Kota Tangerang sebagai berikut:

Tabel IV-3 Pagu dan Realisasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah	Realisasi Anggaran	Persentase
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	688.469.826.412	675.959.699.046	98,18
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	419.528.494.152,00	413.059.223.539,00	98,46
1	Pengadaan Mebel Sekolah	1.057.790.000,00	979.210.000,00	92,57
2	Pengadaan Perlengkapan Siswa	-	-	-
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	42.838.591.250,00	42.385.668.022,00	98,94
4	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	478.546.200,00	473.243.270,00	98,89
5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	672.388.100,00	638.605.000,00	94,98
6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	221.329.733.643,00	216.143.028.826,00	97,66
7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	213.241.300,00	188.063.900,00	88,19
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	107.911.850,00	106.511.850,00	98,70
9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	152.808.403.009,00	152.123.003.871,00	99,55
10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	21.888.800	21.888.800	100
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	207.779.241.848	203.026.028.155	97,71
11	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	74.506.000	12.000.000	16,11
12	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	47.155.571.000	45.471.216.015	96,43
13	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	404.479.000	403.991.400	99,88
14	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.629.238.100	1.554.248.700	95,40
15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	80.979.649.548	78.372.145.921	96,78
16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	116.811.400	116.811.400	100
17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	230.221.900	45.471.216.015,00	96,43
18	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	77.102.880.000,00	76.781.245.919,00	99,58

No.	Uraian	Jumlah	Realisasi Anggaran	Persentase
19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	85.884.900,00	85.884.900,00	100
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	55.561.365.612	54.418.602.852	97,94
20	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	78.458.000,00	78.458.000,00	100,00
21	Pengadaan Perlengkapan PAUD	21.542.000,00	20.562.000,00	95,45
22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	122.348.800,00	122.072.000,00	99,77
23	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	40.456.278.562,00	39.783.701.552,00	98,34
24	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	185.536.450,00	185.536.400,00	100,00
25	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	216.141.800,00	211.541.800,00	97,87
26	Pengelolaan Dana BOP PAUD (DAK)	14.481.060.000,00	14.016.731.100,00	96,79
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.600.724.800,00	5.455.844.500,00	97,41
27	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	279.999.800,00	278.299.800,00	99,39
28	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	983.435.000,00	841.050.000,00	85,52
29	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	111.680.000,00	111.380.000,00	99,73
30	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (DAK)	5.936.200.000	3.980.800.000	67,06

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2024

4.1.5 Dukungan Personil

Suatu organisasi atau lembaga membutuhkan dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat berjalan secara optimal. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kota Tangerang, Dinas Pendidikan didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang. Sampai dengan bulan Desember 2023

Dinas Pendidikan Kota Tangerang memiliki pegawai seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV-4 Jumlah dan Status Pegawai Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2023

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT					PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			
	ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3	Non PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Kepala Dinas Pendidikan	1									1						1			1	
Sekretaris Dinas Pendidikan	1									1						1			1	
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	1								1						1					1
Perencana (Subkooor Perencanaan)	1								1						1					1
Analisis Kebijakan (Subkooor Keuangan)	1									1					1					1
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Non Formal	1									1						1				1
Kepala Seksi Kurikulum Dan Penilaian	1									1						1				
Kepala Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana	1								1						1					1
Widyaprada (Subkooor Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter)	0																			
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (Sd/Mi)	1										1					1				
Kepala Seksi	1								1						1					1

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT					PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			
	ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3	Non PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
	Kurikulum Dan Penilaian																			
Kepala Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana	1								1						1					1
Widyaprada (Subkooor Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter)	1									1					1					1
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah (SMP/ Mts)	1									1						1				1
Kepala Seksi Kurikulum Dan Penilaian	1									1						1				
Kepala Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana	1								1						1					1
Widyaprada (Subkooor Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter)	1								1						1					1
Kepala Bidang Pembinaan Ketengaan	1									1						1				1
Kepala Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1								1						1					1

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT					PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			
	ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3	Non PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
	Dan Pendidikan Non Formal																			
Kepala Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Dan Tugas Pembantuan	1								1											1
Analisis Aset Daerah	0																			
Analisis Hukum	1								1				-	-	1	-				
Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	3								3				-	-	3	-				
Analisis Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2								1	1			-	-	1	1				
Analisis Pengembangan Peserta Didik	2								2				-	-	2	-				
Analisis Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	0																			
Analisis Penilaian Dan Akreditasi	2								2				-	-	2	-				
Bendahara	1				1								-	1	-	-				
Calon Guru	12								12				-	8	4	-				
Guru Bimbingan Konseling Ahli Pertama	13								13				-	-	13	-				
Guru Pendidikan	14								14				-	-	14	-				

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT					PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			
	ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3	Non PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Agama Islam Ahli Pertama																				
Guru Penjasorkes Ahli Pertama	14								14				-	-	14	-				
Guru SD	169				42			4	121	2			-	112	57	-				
Guru Seni Dan Budaya Ahli Pertama	13								13				-	-	13	-				
Pembina Karakter	2								1	1			-	-	2	-				
Pemelihara Sarana Dan Prasarana	15		4	11									-	15	-	-				
Penata Laporan Keuangan	2								2				-	-	2	-				
Pengadministrasi Kepegawaian	1				1								-	1	-	-				
Pengadministrasi Keuangan	10				7			1	2				-	9	1	-				
Pengadministrasi Kurikulum	2				2								-	2	-	-				
Pengadministrasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1				1								-	1	-	-				
Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	1				1								-	1	-	-				
Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	5				5								-	3	2	-				
Pengadministrasi Umum	18			5	11				2				-	15	2	1				
Pengelola Barang Milik Negara	2							2					-	2	-	-				
Pengelola Data	3								3				-	-	3	-				
Pengelola Gaji	0																			

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT					PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			
	ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3	Non PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	2							1	1				-	-	2	-			
Pengelola Kepegawaian	3								3				-	-	3	-				
Pengelola Keuangan	16				7			3	6				-	6	10	-				
Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah	2								2				-	-	2	-				
Pengelola Peserta Didik	2				2								-	-	2	-				
Pengelola Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar	1						1						-	-	1	-				
Pengelola Sarana Dan Prasarana Pendidikan Menengah	6				3				3				-	-	6	-				
Pengelola Sarana Dan Prasarana Pendidikan Non Formal Dan Informal	1								1				-	-	1	-				
Pengelola Sertifikasi	1								1				-	-	1	-				
Penyusun Program, Anggaran, Dan Pelaporan	1								1				-	-	1	-				
Petugas Keamanan	8		6	2									6	2	-	-				
Tenaga Guru	23								23				-	-	23	-				
Verifikator Keuangan	1							1						1						
Pengawas Sekolah Muda	10								6	4					10					
Pengawas Sekolah Madya	66								51	15			-	-	-	66				
Penilik Madya	32								29	3			-	-	-	32				

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT					PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			
	ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3	Non PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Penilik Muda	21								17	4			-	-	21	-				
Penilik Pertama	1								1				-	-	1	-				
Arsiparis	1								1				-	-	1	-				
Analisis Kepegawaian Terampil	1							1					-	-	1	-				
Pranata Komputer Pertama	2								2				-	-	2	-				
Pranata Komputer Terampil	1							1						1						
Analisis Sdm Aparatur	1								1						1					
Guru Madya	955								748	206	1					955				
Guru Muda	905								870	35					905					
Guru Pertama	1048								1041	7					1048					
Guru	188				151	14			23				1	187						
Tenaga Administrasi (THL Dinas)	9								9			9								
Tenaga Kebersihan (THL Dinas)	3				3							3								
Pengamanan Kantor (THL Dinas)	14				14							14								
Total	3652	0	10	18	251	14	1	14	3055	287	2	26	7	367	2189	1063	0	0	2	14

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2024

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Dukungan alokasi anggaran dan personil berupaya untuk memberikan pencapaian SPM urusan Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2023 sesuai dengan target. Dalam pencapaian target pada pelaksanaannya masih ditemui kendala. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang beserta dengan solusinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV-5 Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Permasalahan	Solusi
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya siswa usia sekolah dibawah 7 tahun (pada tingkat Sekolah Dasar) dan di atas 15 tahun (pada jenjang SMP) • Terdapat siswa yang rumahnya berada di perbatasan dengan kota/kabupaten lain lebih memilih bersekolah di luar Kota Tangerang 	Dinas Pendidikan Kota Tangerang terus memberikan bantuan operasional Sekolah melalui BOP dan memberikan bantuan kepada siswa miskin melalui Tangerang Cerdas, serta memberikan beasiswa untuk masuk sekolah SMP Swasta bagi siswa tidak mampu
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-	-
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak orang tua siswa yang terkena dampak ekonomi sehingga lebih memilih pulang ke kampung halamannya. • Terdapat siswa yang rumahnya berada di perbatasan dengan kabupaten/kota lain lebih memilih menempuh pendidikan di luar Kota Tangerang 	Dinas Pendidikan Kota Tangerang terus memberikan bantuan operasional Sekolah pada jejang PAUD melalui BOP

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2024

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan pada Pemerintahan Kota Tangerang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya serta peraturan penerapan standar pelayanan minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM Bidang Urusan Kesehatan merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

SPM bidang Urusan Kesehatan Kota Tangerang terdiri dari :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia Kesehatan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan /promotif dan pencegahan/preventif.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Kesehatan mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

- b. standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia kesehatan; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Dalam penyelenggaraannya, SPM Urusan Kesehatan dibuat berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019 – 2023;
7. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 440/Kep.279-Dinkes/2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023.

4.2.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Dinas Kesehatan telah memasukkan target SPM pada Perubahan RPJMD Kota Tangerang 2019-2023. Target pencapaian yang ditetapkan Pemerintah Kota Tangerang dalam mencapai SPM Urusan Kesehatan di Tahun 2023, termasuk perhitungan pembiayaannya berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2019-2023, dan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV-6 Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar/Program		Indikator SPM/Anggaran	Satuan	Target
a	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Ibu hamil	40.925
			Rp.	1.071.927.000
b	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Ibu bersalin	39.588
			Rp.	231.659.000
c	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Bayi baru lahir	39.588
			Rp.	49.724.000
d	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 12-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Balita	90.040
			Rp.	919.542.600
e	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai kelas 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	Anak	231.986
			Rp.	486.871.500
f	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Orang	660.890
				2.276.800.000
g	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Orang	62.656
			Rp.	598.738.500
h	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	166.750
			Rp.	20.900.000
i	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	93.500

Jenis Pelayanan Dasar/Program		Indikator SPM/Anggaran	Satuan	Target
	Melitus (DM)			
			Rp.	20.900.000
j	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ Berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	902
			Rp.	203.550.000
k	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	17.895
			Rp.	3.605.691.500
l	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	32.360
			Rp.	809.450.000

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2024

Anggaran yang dipersiapkan untuk mendukung SPM Urusan Kesehatan sebesar Rp. 10.295.754.100,- terbesar diberikan pada jenis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dengan proporsi sebesar 35,02%, terbesar kedua ada pada jenis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif dengan proporsi 22,11% dan terbesar ketiga ada pada jenis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan proporsi 10,41%. Sedangkan proporsi anggaran terkecil ada pada jenis pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dan Diabetes Mellitus dengan proporsi anggaran sebesar 0.20%.

4.2.3 Realisasi

Realisasi pencapaian indikator SPM pada Urusan Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2023 dan capaian indikator SPM terhadap Target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel IV-7 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar/Program		Indikator SPM/Anggaran	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Rp.	7.414.662.098	72,72
a	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Ibu hamil	40.925	100
			Rp.	1.059.781.500	98,87
b	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Ibu bersalin	39.588	100
			Rp.	219.603.498	94,80
c	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Bayi baru lahir	39.588	100
			Rp.	49.724.000	100
d	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 12-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Balita	90.040	100
			Rp.	891.028.600	96,90
e	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai kelas 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	Anak	231.986	100
			Rp.	463.638.500	95,23
f	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining	Orang	660.890	100

Jenis Pelayanan Dasar/Program		Indikator SPM/Anggaran	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
		kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun			
			Rp.	2.263.853.000	99,43
g	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Orang	62.656	100
			Rp.	596.525.500	99,63
h	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia \geq 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	166.750	100
			Rp.	20.900.000	100
i	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	93.500	100
				20.900.000	100
j	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ Berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	902	100
			Rp.	199.800.000	98,16
k	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	17.895	100
			Rp.	978.757.500	27,14
l	Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah orang dengan risiko	Orang	32.360	100

Jenis Pelayanan Dasar/Program		Indikator SPM/Anggaran	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)		terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun			
			Rp.	650.150.000	80,32

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2024

Capaian Indikator SPM Urusan Kesehatan Kota Tangerang tahun 2023 secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun, terdapat catatan terkait rendahnya realisasi anggaran pada Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, di mana hanya sebesar 27,14% dari anggaran *Cartridge* TCM yang bersumber dari dana non fisik tidak dapat dicairkan dari Kementerian Kesehatan.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk penerapan dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2023 merupakan jumlah anggaran yang berada pada anggaran belanja langsung yang sepenuhnya bersumber dari APBD Kota Tangerang sebagai berikut:

Tabel IV-8 Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2023

Program/Kegiatan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
	SPM Urusan Kesehatan	10.295.754.100	7.414.662.098	72,02
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.925.754.100	7.414.662.098	72,02
1.1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.295.754.100	7.414.662.098	72,02
a	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1.071.927.000	1.059.781.500	98,87
b	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 231.659.000	219.603.498	94,80
c	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan 49.724.000	49.724.000	100,00

Program/Kegiatan/Jenis Pelayanan Dasar		Indikator SPM	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
		sesuai standar			
d	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 12-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	919.542.600	891.028.600	96,90
e	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai kelas 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	486.871.500	463.638.500	95,23
f	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.276.800.000	2.263.853.000	99,43
g	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	598.738.500	596.525.500	99,63
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia \geq 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	20.900.000	20.900.000	100,00
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20.900.000	20.900.000	100,00
j	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ Berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	203.550.000	199.800.000	98,16
k	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu 1 tahun	3.605.691.500	978.757.500	27,14

Program/Kegiatan/Jenis Pelayanan Dasar		Indikator SPM	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	809.450.000	650.150.000	80,32

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2024

4.2.5 Dukungan Personil

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kota Tangerang yang menjalankan Urusan Kesehatan, Dinas Kesehatan dalam proses penerapan dan pencapaian SPM didukung oleh sejumlah personil atau pegawai baik PNS maupun Non PNS yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sampai dengan bulan Desember 2023 Dinas Kesehatan Kota Tangerang memiliki jumlah personil yang melaksanakan pelayanan di Dinas Kesehatan, Puskesmas, maupun kader wilayah yaitu sebagai berikut:

Tabel IV-9 Jumlah dan Status Personil yang Terlibat Dalam Pencapaian dan Penerapan SPM Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Jumlah Personil
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	6.987
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	6.987
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	6.987
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	5.795
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	6.131
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	5.972
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	5.972
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5.801
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.972
10.	Pelayanan Kesehatan Orang	Persentase ODGJ berat yang	110

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Jumlah Personil
	dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)	Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	6.801
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	7.598

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2024

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang untuk pelaksanaan SPM urusan kesehatan disusun sebagai berikut:

Tabel IV-10 Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)	Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2024

Dalam melaksanakan pencapaian SPM urusan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang masih menghadapi kendala. Kendala dan upaya berkenaan dengan hal tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel IV-11 Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Permasalahan	Solusi
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	1. Data layanan ibu hamil belum terbridging antara e-PUS dengan aplikasi <i>ekohort</i> Kemenkes sehingga petugas harus input ulang. 2. Tidak ada anggaran APBD untuk mencetak buku KIA	1. Aplikasi <i>ekohort</i> Kemenkes bisa terbridging dengan E-Puskesmas 2. Pengajuan ke Kemenkes/ <i>dropping</i> buku KIA dari Kemenkes, Puskesmas mencetak dari dana BLUD
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	1. Data layanan ibu hamil belum terbridging antara e-PUS dengan aplikasi <i>ekohort</i> Kemenkes sehingga petugas harus input ulang. 2. Tidak ada anggaran APBD untuk mencetak buku KIA	1. Aplikasi <i>ekohort</i> Kemenkes bisa terbridging dengan E-Puskesmas 2. Pengajuan ke Kemenkes/ <i>dropping</i> buku KIA dari Kemenkes, Puskesmas mencetak dari dana BLUD
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1. Data layanan ibu hamil belum terbridging antara e-PUS dengan aplikasi <i>ekohort</i> Kemenkes sehingga petugas harus input ulang. 2. Tidak ada anggaran APBD untuk mencetak	1. Aplikasi <i>ekohort</i> Kemenkes bisa terbridging dengan E-Puskesmas 2. Pengajuan ke Kemenkes/ <i>dropping</i> buku

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Permasalahan	Solusi
			buku KIA	KIA dari Kemenkes, Puskesmas mencetak dari dana BLUD
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1. Jumlah sasaran berbeda antara sasaran Pusdatin, sasaran Proyeksi BPS, sasaran proyeksi Disdukcapil	1. Penetapan sasaran balita dalam satu tahun menggunakan data riil hasil rekonsiliasi data dengan Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
			2. Masih banyaknya warga yang tidak antusias membawa Balita ke Posyandu	2. Meningkatkan peran serta lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat untuk datang ke posyandu, melaksanakan <i>sweeping</i> ke rumah balita yang tidak datang ke Posyandu
			3. Kader dan petugas puskesmas masih memerlukan penyesuaian dengan penggunaan aplikasi baru (SIDATA)	3. Pelatihan baik kepada petugas puskesmas maupun kader posyandu, OJT penggunaan SIDATA langsung dengan kader saat Posyandu
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Perbedaan jumlah sekolah di masing-masing Puskesmas sedangkan jumlah SDM Puskesmas hampir sama	Puskesmas dengan jumlah sekolah banyak membentuk tim UKS dan dibuat jadwal dalam setahun
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1. Kompetensi dan jumlah petugas terlatih yang masih kurang dalam hal edukasi kepada masyarakat	1. Pelatihan Tenaga Kesehatan
			2. Kesadaran masyarakat kurang akibat kurangnya kompetensi petugas yang masih kurang dalam memberikan edukasi kesehatan terkait	2. Sosialisasi lintas sektor terkait
			3. Pencatatan dan pelaporan yang belum maksimal	3. Koordinasi dengan lintas sektor swasta/jejaring dalam pelaksanaan program dan pelaporan kasus
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1. Sasaran Pusdatin terlalu tinggi	1. <i>Bottom up</i> : Meminta sasaran real Puskesmas sesuai hasil pendataan
			2. Sasaran lansia dengan keterbatasan	2. Meningkatkan kunjungan rumah untuk

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Permasalahan	Solusi
			fisik untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan/posyandu lansia	lansia dengan keterbatasan fisik
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Kompetensi dan jumlah petugas terlatih yang masih kurang dalam hal edukasi kepada masyarakat	1. Pelatihan Tenaga Kesehatan
			2. Kesadaran masyarakat kurang akibat kurangnya kompetensi petugas yang masih kurang dalam memberikan edukasi kesehatan terkait	2. Sosialisasi lintas sektor terkait
			3. Pencatatan dan pelaporan yang belum maksimal	3. Koordinasi dengan lintas sektor swasta/jejaring dalam pelaksanaan program dan pelaporan kasus
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Kompetensi dan jumlah petugas terlatih yang masih kurang dalam hal edukasi kepada masyarakat	1. Pelatihan Tenaga Kesehatan
			2. Kesadaran masyarakat kurang akibat kurangnya kompetensi petugas yang masih kurang dalam memberikan edukasi kesehatan terkait	2. Sosialisasi lintas sektor terkait
			3. Pencatatan dan pelaporan yang belum maksimal	3. Koordinasi dengan lintas sektor swasta/jejaring dalam pelaksanaan program dan pelaporan kasus
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1. Kompetensi dan jumlah petugas terlatih yang masih kurang dalam hal edukasi kepada masyarakat	Menambah tenaga kesehatan sesuai Kompetensi pelayanan kesehatan jiwa Pelatihan Tenaga Kesehatan Koordinasi dengan lintas sektor swasta/jejaring dalam pelaksanaan program dan pelaporan kasus
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga	Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB	Keterbatasan sarana pemeriksaan terduga TBC (katrid TCM, x-ray), Tuberkulin untuk	Dukungan pengadaan cartridge TCM, alat TCM dan x-ray portable serta jasa mobil x-ray dari

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Permasalahan	Solusi
	Tuberkulosis (TB)	sesuai standar	skrining terduga anak dan pembekuan anggaran <i>cartridge</i> TCM oleh Kemenkes (anggaran DAK NF)	anggaran APBD, pembelian tuberkulin dari anggaran BLUD
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Tantangan dalam pelaporan hasil <i>skrining</i> HIV oleh faskes swasta, tantangan dalam <i>skrining</i> HIV pada pasien TBC dan pelayanan belum terpadu	Membangun dan menguatkan jejaring pelayanan dengan puskesmas. Mengembangkan layanan pengobatan ARV sehingga semua puskesmas sudah mampu pengobatan TBC-HIV sekaligus yang berawal dari kegiatan <i>skrining</i> HIV pada pasien TBC

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2024

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Pemerintahan Kota Tangerang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah Pekerjaan Umum berkaitan dengan pelayanan dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya serta peraturan penerapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SPM bidang Urusan Pekerjaan Umum Kota Tangerang mencakup 2 (dua) pelayanan dasar yaitu:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Menjamin ketersediaan akses Air Limbah Domestik.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum mencakup:

- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Mutu Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Mutu pelayanan dasar setiap Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan dalam standar teknis memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau Jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar sebagai berikut:

1. Ukuran Jumlah dan Kualitas Barang

Jasa mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV-12 Ukuran SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota

No.	Indikator	Sub Indikator
1	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.
2	Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antarlain: a. Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening. b. Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya. c. Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air d. Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak. e. Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan, serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.

2. Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemenuhan Standar

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota. Atau, dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{\text{Rumah Tangga terlayani}}{\text{Rumah Tangga di Kabupaten-Kota}} \times 100\%$$

Pembilang : adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut : adalah jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kabupaten/kota tersebut.

Mutu Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Limbah Domestik

Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik.

a. Kuantitas

Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik.

b. Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik

Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari:

1. Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan
2. Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Berikut Indikator SPM dan formulasi berdasarkan jenis pelayanan dasar:

Tabel IV-13 Indikator SPM Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar/SPM		Formulasi
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	
1.1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	
	Rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih yang aman	x 100%

Jenis Pelayanan Dasar/SPM		Formulasi	
		Rumah Tangga di Kota Tangerang	
2	Menjamin Ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik		
2.1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		
		Rumah tangga yang terlayani sistem air limbah secara memadai	x 100%
		Rumah Tangga di Kota Tangerang	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4.3.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian yang ditetapkan Pemerintah Kota Tangerang dalam mencapai SPM Urusan Pekerjaan Umum di Tahun 2023, termasuk perhitungan pembiayaannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV-14 Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Satuan	Target
1.	SPM Bidang Pekerjaan Umum		Rp.	13,447,598,671
1.1	Sub Bidang Air Minum		Rp.	1,744,325,105
a	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari		
		rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih yang aman	Rumah tangga	611,828
1.2	Sub Bidang Air Limbah Domestik		Rp.	11,703,273,566
b.	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		
		rumah yang terlayani sistem air limbah secara memadai	Rumah tangga	428,463

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, 2024

Anggaran yang dipersiapkan untuk mendukung SPM urusan Pekerjaan Umum sebesar Rp. 13,447,598,671,-. Proporsi anggaran terbesar diberikan pada SPM Sub Bidang Air Limbah Domestik sebesar 86.81% sedangkan proporsi anggaran yang diberikan pada Sub Bidang Air Minum sebesar 13.19%.

4.3.3 Realisasi

Realisasi pencapaian indikator SPM pada Bidang Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun 2023 dan capaian indikator SPM terhadap Target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel IV-15 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
1.	SPM Bidang Pekerjaan Umum		Rp.	11,623,546,642	86.44
1.1	Sub Bidang Air Minum		Rp.	1,555,746,764	89.19
a	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari			
		Rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih yang aman	Rumah tangga	611,828	100,00
1.2	Sub Bidang Air Limbah Domestik		Rp.	10,067,799,878	86.03
b.	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
		Rumah tangga yang terlayani sistem air limbah secara memadai	Rumah tangga	427,649	99,81

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, 2024

Penjelasan lebih rinci dari pencapaian SPM tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari mencapai 100%.

Capaian pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari mencapai 100% dengan jumlah KK yang terlayani air minum perpipaan sebanyak 27.43% dan 72.57% lainnya terlayani air minum non-perpipaan terlindungi dan air kemasan. Pada tahun 2022 dilaksanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sitanala oleh Kementerian PUPR dan tengah dijalankan rencana pembangunan IPA Karian Serpong. Melalui pembangunan kedua IPA tersebut, ditargetkan cakupan layanan air minum perpipaan akan meningkat pada tahun 2024.

2. Ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik mencapai 99,81%.

Berdasarkan kondisi eksisting data capaian pada tahun 2023, cakupan layanan akses pengolahan air limbah domestik masih belum mencapai target. Dari 100% yang ditargetkan baru mencapai 99,81% yang terdiri dari rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD.

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun 2023 merupakan jumlah anggaran yang berada pada anggaran belanja langsung yang bersumber dari APBD Kota Tangerang sebagai berikut.

Tabel IV-16 Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun 2023

	Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	SPM Bidang Pekerjaan Umum	Rp.	13,447,598,671	11,623,546,642	86.44
1	Program Pengembangan Air Minum dan Air Limbah	Rp.	1,744,325,105	1,555,746,764	89.19
A	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari				
1.2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	11,703,273,566	10,067,799,878	86.03
b.	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik				

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, 2024

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kota Tangerang, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang menjalankan Urusan Pekerjaan Umum Bidang Air Minum dan Air Limbah, dalam proses penerapan dan pencapaian SPM didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang. Dukungan personil dalam melaksanakan pencapaian Urusan Pekerjaan Umum bidang Air Minum dan Air Limbah adalah sebagai berikut.

Tabel IV-17 Jumlah dan Status Pegawai yang Terlibat Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Kota Tangerang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Dukungan Personil	
			PNS	NON PNS
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	4	4
2	Menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2	66

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, 2024

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penerapan dan pencapaian SPM Pekerjaan Umum sub bidang Bidang Air Minum dan Air Limbah adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) masih dalam tahap konstruksi, sehingga pembangunan jaringan perpipaan air minum belum merata di seluruh wilayah Kota Tangerang.
- Kuantitas dan kualitas air tanah dirasa masih cukup baik. Sebagian masyarakat mengandalkan air tanah sebagai sumber air minum sehingga belum mau beralih ke jaringan perpipaan.
- Sebagian masyarakat memenuhi kebutuhan air minumnya secara swadaya, baik menggunakan air tanah maupun air minum kemasan sebagai sumber air minum utamanya.
- Sebagian masyarakat masih nyaman dengan sistem air limbah setempat dibandingkan dengan sistem air limbah perpipaan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum dan Air Limbah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan revisi Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) serta Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Air Minum.
2. Menyusun Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan air limbah.

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat pada Pemerintahan Kota Tangerang tahun 2023 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, dengan adanya sinkronisasi data dengan kinerja kegiatan terkait dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, juga Dinas Lingkungan Hidup sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi dalam Peraturan Kementerian PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar tersebut meliputi:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

SPM yang tercantum merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah kota.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Perumahan Rakyat mencakup:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota meliputi:

Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan dasar yang ada merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kualitas barang/ jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- a. Rehabilitasi rumah korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

- b. Pembangunan Kembali Rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

c. Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana

Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak/ringan memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam.

d. Bantuan akses rumah/sewa layak huni bagi korban bencana

Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa (dengan spesifikasinya sesuai NSPK).

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi:

Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan. Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

a. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan

Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian appraisal berdasarkan NSPK yang berlaku.

b. Subsidi Uang Sewa

Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak.

c. Penyediaan Rumah Layak Huni

Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup massif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyelesaian dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus. Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi bencana gempa yang sesuai dengan NSPK.

Tabel IV-18 Indikator SPM Perumahan Rakyat Kota Tangerang Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar/SPM		Formulasi	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		
1.1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang	x 100%

Jenis Pelayanan Dasar/SPM		Formulasi	
		ditangani pada tahun n	
		Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	
2	Fasilitasi penyediaan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		
2.1	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		
		Jumlah Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan+Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa+Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	x 100%
		Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4.4.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian yang ditetapkan Pemerintah Kota Tangerang dalam mencapai SPM Urusan Pendidikan di Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV-19 Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Tangerang Tahun 2023

Jenis Pelayanan		Indikator	Satuan	Target
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota (bila terjadi bencana dan ada SK Kebencanaan)	Ketersediaan unit Rumah Korban Bencana yang ditangani dan Rumah layak huni	Unit	20
		Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2023	Unit	20
2	Fasilitasi penyediaan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota (bila terjadi keadaan Relokasi)	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Unit	30
		Jumlah Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan+Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa+Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	Unit	30

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, 2024

Anggaran yang dipersiapkan untuk mendukung SPM Urusan Perumahan Rakyat selalu dipersiapkan dalam dianggarkan dalam dokumen anggaran,

mengingat untuk kedua pelayanan dasar tersebut dapat dilaksanakan bila memang terjadi bencana dan adanya SK Kebencanaan yang ditetapkan oleh Wali Kota Tangerang dan apabila memang ada kegiatan Pemda Kota Tangerang yang menyebabkan perlunya Fasilitas penyediaan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang terdampak.

4.4.3 Realisasi

Penghitungan realisasi pencapaian SPM mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018.

1. Cakupan unit rumah korban bencana yang ditangani

- Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/ atau pembangunan kembali rumah;
- Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan, dan alam, serta tanah longsor;
- Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana;
- Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama;
- Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
- Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa rumah umum layak huni yang ada.
- Rumus cakupan rumah layak huni adalah:

$$= \frac{\text{Jumlah Unit Rumah Korban bencana yang ditangani}}{\text{jumlah total rencana unit rumah yang akan ditangani}} \times 100$$

2. Cakupan Fasilitas Penyediaan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

- “Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer;

- Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/ Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan;
- Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus;
- Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tinggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;
- Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota;
- Rumus capaian SPM adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Unit Rumah Korban bencana Rumah Tangga} \\ \text{Penerima Fasilitas Penggantian} \\ \text{Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan} + \\ \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \\ \text{Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni yang ditangani}}{\text{jumlah total rencana unit rumah yang akan ditangani}} \times 100$$

Realisasi pencapaian indikator SPM pada Urusan Perumahan Rakyat Kota Tangerang Tahun 2023 dan capaian indikator SPM terhadap Target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel IV-20 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Tangerang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Rumus	Hasil Data	Realisasi Tahun 2023
1	Ketersediaan unit Rumah Korban Bencana yang ditangani dan Rumah layak huni	Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	$\text{SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2023}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2023}} \times 100 \%$	4	100 %
2	Fasilitas Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	Cakupan rumah tangga penerima fasilitas penggantian Hak atas tanah dan/ atau	$\text{SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan} + \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \text{Rumah Tangga}}{\text{Rumus}} \times 100 \%$	43	100 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Rumus	Hasil Data	Realisasi Tahun 2023
		bangunan, Penerima subsidi uang sewa, penerima penyediaan Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria}}$	43	

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, 2024

Penjelasan lebih rinci dari tabel realisasi pencapaian SPM tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Cakupan ketersediaan unit Rumah Korban Bencana yang ditangani dan Rumah Layak Huni mencapai 100%.

Capaian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota dapat terealisasi dari hasil bantuan melalui BAZNAS Kota Tangerang dengan sejumlah 4 unit rumah dengan 16 orang didalamnya, yang diajukan karena bencana kebakaran. Sedangkan untuk anggaran dari APBD yang masuk dalam dokumen anggaran sub-kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni direncanakan sebanyak 20 unit, tidak ada yang terealisasi. Disamping karena SK Kebencanaan oleh Wali Kota yang baru ada di Triwulan-4 terkait kebakaran TPA Rawa Kucing, juga tidak adanya usulan yang masuk ke Dinas terkait bencana tersebut.

2. Cakupan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota tetap 100%.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tatacara Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa disebutkan bahwa:

- a. Bab III Pasal 13 ayat (1) huruf c, bahwa kelompok sasaran penghuni Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sehat) adalah masyarakat yang terkena dampak relokasi pembangunan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Pasal 20, dalam hal penghuni yang berasal dari warga yang terkena dampak relokasi kegiatan pembangunan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c dan/atau warga yang terkena kegiatan penertiban yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Satpol PP dan surat keterangan lurah, maka dibebaskan dari uang jaminan dan uang sewa selama 3 (tiga) bulan.

Kota Tangerang mempersiapkan Rusunawa yang disediakan untuk warga yang terkena dampak relokasi kegiatan pembangunan pemerintah

dan/atau pemerintah daerah dialokasikan di Rusunawa Manisjaya A dan B sebanyak 30 unit dengan luas hunian sebesar 18 m² dilengkapi fasilitas kamar mandi bersama, dapur bersama dan listrik bersama dengan 1 kwh meter tiap lantai. Peraturan ini merupakan wujud persiapan Pemda apabila terjadi relokasi yang warga masyarakat Kota memerlukan tempat tinggal sementara.

Adapun di tahun 2023 telah terbangun 1 Rusunawa baru dari Kementerian PUPR di Kota Tangerang yang berlokasi di Kelurahan Kedaung Baru yang ditujukan untuk *squatters* yang selama ini tinggal di sebelah persis kantor kelurahan Kedaung Baru. Direncanakan akan dipindahkan sebanyak 29 rumah dengan 71 warga yang akan dipindahkan. Adapula beberapa kegiatan Pemda yang kemudian berdampak untuk perlunya relokasi pada bangunan milik masyarakat yang didapatkan datanya dari kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup Adapun terjadi fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan sebanyak 14 unit bangunan dengan ganti rugi/beli tanah.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pemenuhan SPM bidang Perumahan Rakyat untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota pada tahun 2023 telah dianggarkan dalam dokumen anggaran APBD adalah sebagai berikut.

Tabel IV-21 Alokasi Anggaran Kegiatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang Terkait SPM Tahun 2023

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Penyerapan Anggaran
1	Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp 275.000.000,00	Rp 0,00

Sumber: DPA dan Serapan Anggaran Dinas Perkimtan TA. 2023

Adapun data mengenai pemberian bantuan untuk korban bencana yang berasal dari anggaran BAZNAS Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

Tabel IV-22 Penerima Bantuan Anggaran BAZNAS Kota Tangerang Untuk Korban Bencana Tahun 2023

No.	Nama	Alamat	Realisasi Bantuan Anggaran
1	SAIMAN	Jl. Inpres VII/46 RT 007/ RW 004 Kel. Larangan Utara, Kec. Larangan	20.000.000
2	SUPARMAN	Jl. KH Agus Salim RT 001/ RW 002 Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang	20.000.000

No.	Nama	Alamat	Realisasi Bantuan Anggaran
3	ANTO	Jl. Daan Mogot Gg. Pom bensin RT 007/RW 002 Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang	5.000.000
4	YANTO SUSILO	Rawa Rotan RT 002/RW 002 Kel. Selapajang Jaya, Kec. Neglasari	5.000.000
Total		4 unit	Rp 50.000.000,00

Sumber: BAZNAS Kota Tangerang, 2024

Alokasi anggaran yang mendukung pemenuhan SPM bidang Perumahan Rakyat khusus untuk yang penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota terdapat dalam Anggaran Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rusunawa adalah sebagai berikut:

Tabel IV-23 Alokasi Anggaran Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rusunawa Kota Tangerang Tahun 2023

No.	Jenis Layanan	Jumlah Rumah/Bangunan	Realisasi Penyerapan Anggaran
1	Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan	14 unit	Rp 10.965.378.477,00

Sumber: DPA dan Serapan Anggaran Dinas Perkimtan TA. 2023

Data tersebut merupakan dampak dari beberapa kegiatan Pemda yang kemudian berdampak untuk perlunya relokasi pada bangunan milik masyarakat yang didapatkan datanya dari kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup. Adapun di tahun 2023 telah terbangun 1 Rusunawa baru dari Kementerian PUPR di Kota Tangerang yang berlokasi di Kelurahan Kedaung Baru yang ditujukan untuk 29 KK *squatters* pada Triwulan-4 proses pembangunan telah selesai dengan menunggu proses serah-terima pemeliharaan ke Pemda Kota Tangerang.

4.4.5 Dukungan Personil

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian target dari SPM Urusan Bidang Perumahan Rakyat jumlah dukungan personil yang tersedia dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

Tabel IV-24 Jumlah dan Status Pegawai yang Terlibat Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Kota Tangerang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Dukungan Personil	
			PNS	Non PNS
1	Penanganan Rumah Korban Bencana	Ketersediaan unit Rumah Korban Bencana yang ditangani	2	4
2	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian Hak dan	2	4

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Dukungan Personil	
			PNS	Non PNS
	terdampak relokasi program pemerintah	Penerima Subsidi bantuan		

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, 2024

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam SPM, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan tidak lepas dari permasalahan. Kendala dan solusi atas permasalahan tersebut dituangkan berikut.

A. Permasalahan

Kendala-kendala yang dirasakan dalam pelaksanaan urusan adalah:

1. Tidak adanya SK Kebencanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (baru ada di Triwulan-4 untuk TPA Rawa Kucing); dan
2. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antara stakeholder terkait sehingga masih sulit melakukan pengumpulan data secara komprehensif dan terintegrasi.

B. Solusi

Solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

1. Perlu diadakan perencanaan kegiatan untuk Penanganan Rumah Korban Bencana dan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang dan untuk tahun berikutnya dengan konsep dan rencana yang lebih matang, sehingga saat anggaran sudah tersedia, kegiatan dapat langsung berjalan;
2. Perlu dibuat juga pendataan area rawan bencana di wilayah Kota Tangerang, sosialisasi kegiatan, perencanaan dan koordinasi sehingga dapat mempermudah kegiatan Penanganan Rumah Korban Bencana dalam waktu yang cepat dan dapat segera ditangani, baik di dalam Dinas sendiri maupun dengan OPD lainnya dan instansi maupun sektor lainnya.

4.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN BENCANA DAN KEBAKARAN

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dan Kebakaran pada Pemerintahan Kota Tangerang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kebencanaan dan acuan dalam target pencapaiannya serta peraturan penerapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dasar hukum pelaksanaan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan antara lain:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Jenis Pelayanan dasar Sub Urusan Bencana Kota Tangerang meliputi:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana;
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Jenis Pelayanan dasar Sub Urusan Kebakaran Kota Tangerang yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Tabel IV-25 Indikator SPM Sub Urusan Bencana dan Kebakaran Kota Tangerang Tahun 2023

Pelayanan Dasar/Indikator SPM		Formulasi	
1	Pelayanan Informasi rawan bencana		
1.1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		
		Jumlah warga negara di Kabupaten/kota yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	x 100%
		Jumlah warga negara di Kabupaten/kota yang ditargetkan memperoleh layanan informasi rawan bencana	
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
2.1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
		Jumlah warga negara di wilayah rawan bencana Kabupaten/kota yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	x 100%
		Jumlah warga negara di wilayah rawan bencana Kabupaten/kota yang seharusnya memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
3.1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten/Kota	x 100%
		Jumlah warga negara yang membutuhkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten/Kota	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
1.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran di Kabupaten/Kota	x 100%
		Jumlah warga negara yang membutuhkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran di Kabupaten/Kota	

4.5.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian yang ditetapkan Pemerintah Kota Tangerang dalam mencapai SPM Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran di Tahun

2023, termasuk perhitungan pembiayaannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV-26 Target Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana dan Kebakaran Kota Tangerang Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan		Indikator	Satuan	Target
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	Pelayanan Informasi rawan bencana		Rp.	97.735.800
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	877.930
1.1	Penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	Dokumen	-
1.2	Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Orang	300
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Rp.	1.167.394.040
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	838.837
2.1	penyelesaian dokumen (Rencana Penanggulangan Bencana) RPB sampai dinyatakan sah/legal	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	Dokumen	1
2.2	Penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) sampai dinyatakan sah/legal	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	Dokumen	1
2.3	Pelatihan aparaturnya dan warga negara	Terlatihnya aparaturnya yang menangani sub urusan bencana dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	Orang	8.984
2.4	Pelatihan warga negara	Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	7.913
2.5	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	838.837
2.6	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	Orang	838.837
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Rp.	91.998.000
		Jumlah warga negara yang	Orang	3.543

Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan		Indikator	Satuan	Target
		memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
3.1	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	KLB	-
3.2	Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana dari 24 jam	kejadian	-
3.3	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	orang	-
3.4	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	orang	3.543
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Rp.	2.425.533.500
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	1.552
4.1	Layanan respon cepat (Respon Time) penanggulangan kejadian kebakaran	15 Menit (sejak diterimanya informasi sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan)	menit	15
	Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh BPBD	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh BPBD	Layanan	14
	Layanan pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Pos	8
	Layanan aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Orang	91
	Layanan Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Tersedianya Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Pos	8
	Sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Tersedianya sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Sarpras	869
	Layanan aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam	Tersedianya aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam	Orang	300
	Layanan relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Tersedianya relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Orang	165
	Layanan peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam	Kegiatan	-

Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
kebakaran	kebakaran		

Sumber: BPBD Kota Tangerang Tahun 2024

4.5.3 Realisasi

Realisasi pencapaian indikator SPM pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dan kebakaran Kota Tangerang Tahun 2023 dan capaian indikator SPM terhadap Target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel IV-27 Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran Kota Tangerang Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1 Pelayanan Informasi rawan bencana		Rp.	79.890.000	81,74
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	877.930	100
1.1 Penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	Dokumen	-	100
1.2 Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Orang	300	100
2 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Rp.	1.072.809.927	91,90
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	838.837	100
2.1 penyelesaian dokumen (Rencana Penanggulangan Bencana) RPB sampai dinyatakan sah/legal	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	Dokumen	1	100
2.2 Penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) sampai dinyatakan sah/legal	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	Dokumen	1	100
2.3 Pelatihan aparatur dan warga negara	Terlatihnya aparatur yang menangani sub urusan	Orang	8.984	100

Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan		Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
		bencana dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana			
2.4	Pelatihan warga negara	Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	7.913	100
2.5	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	838.837	100
2.6	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	Orang	838.837	100
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Rp.	88.500.000	96,20
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	3.543	100
3.1	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	KLB	-	100
3.2	Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana dari 24 jam	kejadian	1	100
3.3	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	orang	-	100
3.4	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	orang	3.543	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Rp.	2.408.318.442	99,29
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	1.552	100
4.1	Layanan respon cepat (Respon Time) penanggulangan kejadian kebakaran	15 Menit (sejak diterimanya informasi sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan)	menit	12,37	117,55
	Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh BPBD	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh BPBD	Layanan	14	100
	Layanan pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana	Pos	8	100

Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
penyelamatan di kantor kecamatan	penyelamatan di kantor kecamatan			
Layanan aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Orang	91	100
Layanan Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Tersedianya Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Pos	8	100
Sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Tersedianya sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Sarpras	869	100
Layanan aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam	Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam	Orang	300	100
Layanan relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Tersedianya relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Orang	165	100
Layanan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Kegiatan	-	100

Sumber: BPBD Kota Tangerang Tahun 2024

Capaian Indikator SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang Sub Urusan Bencana dan Sub Unit Kebakaran Tahun 2023 terhadap target yang ditentukan sudah mencapai target yang ditentukan bahkan ada beberapa indikator tercapai tanpa mengeluarkan anggaran dikarenakan kondisi Kota Tangerang kondusif dan aman dari bahaya bencana.

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk penerapan dan pencapaian SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan sub urusan Bencana dan sub urusan Kebakaran Masyarakat Kota Tangerang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel IV-28 Alokasi Anggaran BPBD Pelaksanaan SPM Kota Tangerang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	(Kegiatan/ Indikator)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
----	-----------------------	-----------------------	--------------	----------------	---

No	Jenis Pelayanan Dasar	(Kegiatan/ Indikator)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelayanan Informasi rawan bencana		97.735.800	79.890.000	81,74
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	-	-
		Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana	97.735.800	79.890.000	81,74
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		1.167.394.040	1.072.809.927	91,90
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	penyelesaian dokumen (Rencana Penanggulangan Bencana) RPB sampai dinyatakan sah/legal	252.176.900	218.276.000	86,56
		Penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) sampai dinyatakan sah/legal	154.184.600	142.621.000	92,5
		Pelatihan aparatur dan warga negara	331.131.540	310.109.500	93,65
		Pelatihan warga negara	-	-	-
		Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	355.260.000	329.803.427	92,83
		Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	74.641.000	72.000.000	96,46
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		91.998.000	88.500.000	96,23
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	-	-	-
		Respon cepat darurat bencana	-	-	-
		Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	-	-	-
		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	91.998.000	88.500.000	96,23
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		2.425.533.500	2.408.318.442	96,29
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Layanan respon cepat (Respon Time) penanggulangan kejadian kebakaran	816.090.000	814.994.770	99,87
		Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan	645.130.000	644.125.472	99,84

No	Jenis Pelayanan Dasar	(Kegiatan/ Indikator)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota			
		Layanan pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	-	-	-
		Layanan aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	-	-	-
		Layanan Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	-	-	-
		Sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	964.313.500	949.198.200	98,43
		Layanan aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam	-	-	-
		Layanan relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	-	-	-
		Layanan peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	-	-	-
		Layanan respon cepat (Respon Time) penanggulangan kejadian kebakaran	-	-	-

Sumber: BPBD Kota Tangerang Tahun 2024

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing-masing.

Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tercantum dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang menunjukkan bahwa area inti (*core area*) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang adalah melakukan pelayanan di bidang Penanggulangan Bencana.

Kedudukan

Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam struktur Pemerintah Kota Tangerang berada di bawah komando langsung dari Walikota dan Wakil Walikota Tangerang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi 4 UPTD dan 3 pos pemadam yaitu UPTD Cibodas, Batu Ceper, Ciledug, Priuk beserta Pos Pinang, Benda dan Keroncong.

Tugas

a. Kepala Pelaksana:

Kepala Pelaksana membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan sehari-hari, yang mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, serta mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana.

Fungsi Koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Fungsi Komando dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat kerja lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Fungsi Pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan/prabencana;
2. pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik pada saat bencana;
3. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
4. pelaksanaan pemadaman kebakaran, penyelamatan korban, inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan investigasi kejadian kebakaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
5. pelaksanaan ketatausahaan Badan;

6. pengelolaan UPT; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Badan:

Sekretaris Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan.

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, sekretaris unsur pelaksana mempunyai fungsi:

1. penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
2. penatausahaan urusan keuangan;
3. penatausahaan urusan perencanaan;
4. pengoordinasian dalam penyusunan program Badan;
5. pengoordinasian dalam pembangunan dan pengembangan egovernment; dan
6. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan UPT dilingkungan Badan.

c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, pengendalian, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan Inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran bersama UPT sesuai wilayah kerjanya;
3. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana; dan
4. pelaporan.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris, yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian

tugas dan fungsi Badan dalam lingkup penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan korban bersama dengan UPT sesuai wilayah kerjanya;
3. pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
4. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
5. pelaporan.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris dan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Investigasi kejadian kebakaran dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran bersama dengan UPT sesuai wilayah tugasnya;
3. pelaksanaan penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
4. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
5. pelaporan.

f. Bidang Sarana Prasarana Bencana

Bidang Sarana Prasarana Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris dan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup penyelenggaraan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana bencana. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Sarana Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana bencana;
2. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana prasarana bencana dengan bidang lain dan UPT sesuai dengan wilayah kerjanya;
3. pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana bencana;
4. pelaksanaan hubungan kerja di bidang sarana prasarana bencana dengan instansi terkait; dan
5. pelaporan.

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris Badan yang membawahi tiga subbagian dan empat Bidang yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi serta Bidang Sarana Prasarana Bencana. Adapun keterangan mendetail mengenai jumlah pegawai berdasarkan Jabatan, Pendidikan Terakhir, Golongan/Pangkat, Esselon dan Diklat yang telah diikuti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV-29 Jumlah dan Status Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Tahun 2023

No	Nama Jabatan	Status Jabatan		Kualifikasi Pendidikan (Terakhir)									Golongan/Pangkat				Pendidikan Pelatihan Struktural				
		ISI	KOS ONG	SD	SL TP	SLT A	D1	D2	D3	S1 /D 4	S2	S3	NO N PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Kepala Pelaksana	V									1						1		V		
2	Sekretaris Badan	V									1						1			V	
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	V									1						1			0	
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	V									1						1			V	
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	V									1					1				V	
6	Kepala Bidang Sarana Prasarana Bencana	V									1						1			V	
7	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	V								1						1					V
8	Kepala Subbag Perencanaan	V								1						1					V

No	Nama Jabatan	Status Jabatan		Kualifikasi Pendidikan (Terakhir)									Golongan/Pangkat				Pendidikan Pelatihan Struktural				
		ISI	KOS ONG	SD	SL TP	SLT A	D1	D2	D3	S1 /D 4	S2	S3	NO N PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9	Kepala Subag Keuangan	V									1					1					V
10	Kasi Kesiapsiagaan	V								1						1					V
11	Kasi Pencegahan	V								1						1					V
12	Kasi Kedaruratan	V								1						1					V
13	Kasi Logistik	V								1						1					V
14	Kasi Rehabilitasi	V								1						1					V
15	Kasi Rekontruksi	V								1						1					V
16	Kasi Pengadaan Sarana Prasarana Bencana	V									1					1					V
17	Kasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bencana	V								1						1					V
18	Kepala UPTD Batuceper	V								1						1					V
19	Kepala TU UPTD Batuceper	V								1						1					V
20	Kepala UPTD Cibodas	V								1						1					0
21	Kepala TU UPTD Cibodas	V								1						1					0
22	Kepala UPTD Ciledug	V								1						1					0
23	Kepala TU UPTD Ciledug	V								1						1					0
24	Kepala UPTD Priuk	V								1						1					V
25	Kepala TU UPTD Periuk	V								1						1					V
Jabatan yang terisi		25								17	8					20	5		1	4	15
Fungsional		1								1											
Staf PNS		36		5	3	19			2	6	2			6	18	13					
Staf TKK		0																			
Total pegawai		380		5	3	19			2	25	8		318	6	18	32	6				

Sumber: BPBD Kota Tangerang Tahun 2024

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian SPM Sub Urusan Bencana dan Sub unsur Kebakaran di Kota Tangerang, BPBD mendapatkan beberapa permasalahan, berikut rincian permasalahan yang dihadapi disertai dengan solusi pelaksanaan kegiatan pencapaian SPM Sub Urusan Bencana dan Sub unsur Kebakaran di Kota Tangerang Tahun 2023.

Tabel IV-30 Permasalahan dan Solusi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	(Kegiatan/ Indikator)	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Sudah dilaksanakan di tahun 2022	-
			Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana	-	Informasi dan edukasi melalui berbagai macam platform (kelurahan tangguh dan media sosial)
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	penyelesaian dokumen (Rencana Penanggulangan Bencana) RPB sampai dinyatakan sah/legal	-	-
			Penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) sampai dinyatakan sah/legal	-	-
			Pelatihan aparaturnya dan warga negara	-	-
			Pelatihan warga negara	-	-
			Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-
			Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	-	-
			Respon cepat darurat bencana	Terdapat kejadian kebakaran TPA Rawa Kucing	Koordinasi aktif dengan BNPB dan seluruh stakeholder penanggulangan bencana
			Aktivasi sistem komando penanganan darurat	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	(Kegiatan/ Indikator)	Permasalahan	Solusi
			bencana		
			Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	-	-
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Layanan respon cepat (Respon Time) penanggulangan kejadian kebakaran	-	-
			Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota	-	-
			Layanan pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Untuk di kantor kecamatan tidak ada	Terdapat pada 3 pos, 4 UPT, dan 1 markas
			Layanan aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	-	-
			Layanan Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/ desa	Untuk di setiap kelurahan/desa tidak ada	Terdapat pada 3 pos, 4 UPT, dan 1 markas
			Sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	-	-
			Layanan aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam	-	-
			Layanan relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	(Kegiatan/ Indikator)	Permasalahan	Solusi
			atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		
			Layanan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	-	-

Sumber: BPBD Kota Tangerang Tahun 2024

4.6. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pemerintahan Kota Tangerang dilaksanakan oleh Satpol-PP dan sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban umum dan mengacu dalam target pencapaiannya serta peraturan penerapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan mutu pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Tangerang dengan Jenis Pelayanan Dasar adalah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Pencapaian SPM Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perwal.

Mutu Pelayanan Dasar untuk SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum mencakup:

- a. standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. standar sarana prasarana Satpol PP;
- c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan

- d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Tabel IV-31 Indikator SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Tangerang Tahun 2023

Jensi Pelayanan Dasar/SPM		Formulasi	
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum		
1.1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum Perda dan Perkada		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	x 100%
		Jumlah warga negara yang membutuhkan layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Kabupaten/Kota	

Sumber:Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

4.6.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian yang ditetapkan Pemerintah Kota Tangerang dalam mencapai SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tahun 2023, termasuk perhitungan pembiayaannya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel IV-32 Target Pencapaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Tangerang Tahun 2023

Jenis Pelayanan/Program/Kegiatan	Anggaran/Indikator		
	SPM/Indikator Kegiatan	Satuan	Target
URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp.	2.080.761.650,00
1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Orang	8
A Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp.	1.582.501.150,00
B Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Rp.	468.133.300,00
C Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Rp.	30.127.200,00

Sumber: Satpol-PP Kota Tangerang, 2024

Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi yaitu tidak ditargetkannya warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan, begitu juga dengan warga

negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil sebagai akibat dari penegakan Perda dan Perkada, dengan penjelasan bahwa sampai dengan akhir tahun 2023 dalam kaitan kegiatan penanganan dan penegakan Perda maupun Perkada ditargetkan tidak ada warga yang mengalami cedera fisik bahkan sampai dengan mengalami kerugian materil atas asset pribadinya. Hal tersebut diwujudkan dalam upaya pelaksanaan penanganan dan penegakan Perda dan Perkada yang dijalankan oleh OPD Satpol-PP dilakukan secara humanis dengan mengacu pada kaidah-kaidah dalam Hukum dan HAM serta SOP yang berlaku. Dalam hal ini penetapan target pencapaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum didalam dokumen Renstra OPD Satpol PP adalah sebesar 100%.

Anggaran yang dipersiapkan untuk mendukung SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan target pencapaian 100% dengan 3 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.582.501.150,00.
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota sebesar Rp. 468.133.300,00
3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota sebesar Rp. 30.127.200,00,-.

4.6.3 Realisasi

Realisasi pencapaian indikator SPM pada Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Tangerang Tahun 2023 dan capaian indikator SPM terhadap Target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel IV-33 Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Tangerang Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.080.761.650,00	1.924.661.650,00	92,50
1	PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.582.501.150,00	1.490.501.150,00	94,19
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksaaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	647.910.000,00	567.910.000,00	87,65

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%
	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	180.860.000,00	176.860.000,00	97,79
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	378.823.850,00	378.823.850,00	100,00
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	233.407.300,00	233.407.300,00	100,00
	Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	133.500.000,00	133.500.000,00	100,00
	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	8.000.000,00	-	-
2.	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA	468.133.300,00	408.833.300,00	87,33
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	123.415.600,00	122.515.600,00	99.27
	Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	62.597.400,00	54.197.400,00	86.58
	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota	282.120.300,00	232.120.300,00	82.28
3.	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA	30.127.200,00	26.327.200,00	84.07
	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	30.127.200,00	26.327.200,00	84.07

Sumber: Satpol-PP Kota Tangerang, 2024

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada pada tahun 2023 adalah nihil. Dalam artian tidak ada warga yang mengalami dampak kerugian materil yang membutuhkan perbaikan atas barang atau asset pribadinya dan juga tidak ada warga yang mengalami dampak kerugian cedera fisik sehingga memerlukan layanan pengobatan. Kesimpulan tersebut diperoleh dengan tidak adanya pengaduan atau tuntutan yang disampaikan oleh warga sepanjang tahun 2023 atas pengajuan ganti rugi sebagai dampak

penegakan hukum yang dijalankan oleh Satpol PP. Untuk itu dapat dikatakan bahwa realisasi pencapaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar 100% . Indikator SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Tangerang Tahun 2023 sudah mencapai target yang ditentukan dengan capaian realisasi anggaran terhadap target anggaran sebesar 100%.

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang Tahun 2023 merupakan jumlah anggaran yang berada pada anggaran belanja langsung yang bersumber dari APBD Kota Tangerang sebagai berikut:

Tabel IV-34 Alokasi Anggaran SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Tangerang Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2023
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.080.761.650,00
1	PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.582.501.150,00
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	647.910.000,00
	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	180.860.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	378.823.850,00
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	233.407.300,00
	Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	133.500.000,00
	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	8.000.000,00
2.	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA	468.133.300,00
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	123.415.600,00
	Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	62.597.400,00
	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota	282.120.300,00
3.	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA	30.127.200,00
	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	30.127.200,00

Sumber: Satpol-PP Kota Tangerang, 2024

4.6.5 Dukungan Personil

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kota Tangerang, Satpol-PP yang menjalankan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dalam proses penerapan dan pencapaian SPM didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang didukung juga dengan personil yang meliputi 76 orang PNS dan 235 orang Non PNS yang melaksanakan pelayanan sebagaimana berikut.

Tabel IV-35 Jumlah dan Status yang Terlibat Dalam Pencapaian dan Penerapan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Personil PNS	Personil Non PNS
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	76	235

Sumber: Satpol-PP Kota Tangerang, 2024

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dan upaya solusi dalam melaksanakan pencapaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Tangerang Tahun 2023 dituangkan sebagai berikut:

Tabel IV-36 Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Tangerang Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Permasalahan/Hambatan	Solusi
Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya efek jera kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tangerang. • Belum ada penataan/ relokasi tempat untuk berjualan yang jelas. • Masih banyaknya kegiatan sosial masyarakat yang tidak mengacu pada peraturan yang berlaku dan perlunya peningkatan kinerja pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dalam menegakan/ memaksimalkan sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, dan diterapkannya peraturan daerah. • Bekerja sama dengan OPD terkait untuk menyelesaikan penataan tempat/lokasi berdagang bagi Pedagang Kaki Lima. • Penyuluhan/sosialisasi perda

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Permasalahan/Hambatan	Solusi
		kantramtibmas. • Kurangnya sarana prasarana dalam menunjang tugas dan pokok fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terutama kendaraan operasional yang sudah tidak layak pakai.	terhadap masyarakat serta kerjasama dengan aparat lain yang berkepentingan. • Tetap mengajukan melalui surat permohonan untuk dimasukkan ke dalam anggaran Tahun Berikutnya yang menjadi perhatian Pimpinan dalam menunjang Tupoksi Satpolpp.

Sumber: Satpol-PP Kota Tangerang, 2024

4.7. URUSAN SOSIAL

4.7.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial pada Pemerintahan Kota Tangerang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah Sosial dalam target pencapaiannya mengacu peraturan penerapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Sosial di Kota Tangerang terdiri dari:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Sosial mencakup:

- Standar dan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- standar dan jumlah dan kualitas sumber daya manusia; dan
- petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial untuk setiap jenis layanan dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan untuk Pelayanan Dasar yang diberikan berdasarkan kewenangan Kota Tangerang adalah:

- Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar panti;
- Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar panti;
- Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar panti;
- Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti; dan
- Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

4.7.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian yang ditetapkan Pemerintah Kota Tangerang dalam mencapai SPM Urusan Sosial di Tahun 2023, termasuk perhitungan pembiayaannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV-37 Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Kota Tangerang Tahun 2023

Jenis Pelayanan/Program/Kegiatan	Anggaran/Indikator		
	SPM/Indikator Kegiatan	Satuan	Target
SPM URUSAN SOSIAL		Rp	6.579.792.360,00
A. Program Rehabilitasi Sosial		Rp	830.874.000,00
<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>		<i>Rp</i>	<i>609.445.200,00</i>
<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang</i>		<i>Rp</i>	<i>221.428.800,00</i>

Jenis Pelayanan/Program/Kegiatan	Anggaran/Indikator		
	SPM/Indikator Kegiatan	Satuan	Target
<i>Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>			
Jenis Pelayanan :			
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	341
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	60
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Orang	92
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	orang	30
B. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Rp	2.236.737.600,00
<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota</i>		Rp	2.236.737.600,00
Jenis Pelayanan:			
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh Bantuan Sosial Tunai	Orang	300
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Bantuan Sosial Tunai	Orang	650
3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh Bantuan Sosial Tunai	Orang	999
C. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp	2.468.746.760,00
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		Rp	1.076.291.800,00
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		Rp	1.092.036.960,00
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		Rp	300.418.000,00
Jenis Pelayanan:			
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan permakanan, sarana dan prasarana layanan sosial	Orang	641
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh bantuan permakanan, sarana dan prasarana layanan sosial	Orang	710
3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan permakanan, sarana dan prasarana layanan sosial	Orang	1091

Jenis Pelayanan/Program/Kegiatan	Anggaran/Indikator		
	SPM/Indikator Kegiatan	Satuan	Target
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan permakanaan, sarana dan prasarana layanan sosial	Orang	30
D. Program Penanganan Bencana		Rp	1.043.434.000,00
<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>		<i>Rp</i>	<i>1.043.434.000,00</i>
Jenis Pelayanan :			
1. Penyediaan permakanaan	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh penyediaan permakanaan pada saat tanggap dan paska bencana	Orang	1.247
2. Penyediaan Sandang	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh penyediaan sandang pada saat tanggap dan paska bencana	Orang	432
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memanfaatkan tempat penampungan pengungsi pada saat tanggap dan paska bencana	Orang	3
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh penanganan khusus bagi kelompok rentan pada saat tanggap dan paska bencana	Orang	39
5. Pelayanan dukungan Psikososial	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh pelayanan dukungan psikososial pada saat tanggap dan paska bencana	Orang	328

Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang, 2024

Anggaran yang dipersiapkan untuk mendukung SPM Urusan Sosial sebesar **Rp 6.579.792.360,-** yang terdapat pada Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Penanganan Bencana dimana pada program tersebut merupakan program dengan kegiatan yang mengupayakan pencapaian SPM antara lain:

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan proporsi anggaran kegiatan terhadap anggaran program sebesar 100%, dimana indikator SPM urusan sosial antara lain:

- a. Persentase penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial sesuai standar;
 - b. Persentase anak terlantar di luar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial sesuai standar;
 - c. Persentase lanjut usia terlantar di luar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial sesuai standar;
 - d. Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial sesuai standar.
2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan proporsi anggaran kegiatan terhadap anggaran program sebesar 60,47%, dengan indikator SPM urusan sosial antara lain:
- a. Persentase penyandang disabilitas terlantar/miskin di luar panti yang memperoleh Bantuan Sosial Tunai;
 - b. Persentase anak terlantar/miskin di luar panti yang memperoleh Bantuan Sosial Tunai;
 - c. Persentase lanjut usia terlantar/miskin di luar panti yang memperoleh Bantuan Sosial Tunai.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan proporsi anggaran kegiatan terhadap anggaran program sebesar 14,05%, dengan indikator SPM antara lain:
- a. Persentase warga negara penyandang disabilitas di luar panti yang memperoleh bantuan permakanan, sarana dan prasarana layanan sosial sesuai standar;
 - b. Persentase anak terlantar di luar panti yang memperoleh bantuan permakanan, sarana dan prasarana layanan sosial sesuai standar;
 - c. Persentase lanjut usia terlantar di luar panti yang memperoleh bantuan permakanan, sarana dan prasarana layanan sosial sesuai standar;
 - d. Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan permakanan, sarana dan prasarana layanan sosial sesuai standar.
4. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan proporsi anggaran kegiatan terhadap anggaran program sebesar 73,97%, dengan indikator SPM antara lain:
- a. Persentase Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh penyediaan permakanan pada saat tanggap dan paska bencana sesuai standar;
 - b. Persentase Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh penyediaan permakanan pada saat tanggap dan paska bencana sesuai standar;

- c. Persentase Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memanfaatkan tempat penampungan pengungsi pada saat tanggap dan paska bencana sesuai standar;
- d. Persentase Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh penanganan khusus bagi kelompok rentan pada saat tanggap dan paska bencana sesuai standar;
- e. Persentase Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh pelayanan dukungan psikososial pada saat tanggap dan paska bencana sesuai standar.

4.7.3 Realisasi

Realisasi pencapaian indikator SPM pada Urusan Sosial Kota Tangerang Tahun 2023 dan capaian indikator SPM terhadap Target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel IV-38 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Kota Tangerang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	641	641	100	Tercapai
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	710	710	100	Tercapai
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	1.091	1.091	100	Tercapai
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Orang	30	30	100	Tercapai
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan sosial	Orang	1.403	1.403	100	Tercapai

Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang, 2024

Capaian Indikator SPM Urusan Sosial Kota Tangerang Tahun 2023 terhadap target yang ditentukan secara keseluruhan sudah tercapai 100%, sama

seperti capaian indikator SPM di Tahun 2022 dimana semua indikator SPM-nya tercapai.

4.7.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial Kota Tangerang Tahun 2023 merupakan jumlah anggaran yang berada pada anggaran belanja langsung yang bersumber dari APBD Kota Tangerang sebagai berikut:

Tabel IV-39 Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Kota Tangerang Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (APBD)	Jumlah
	URUSAN SOSIAL		Rp 6.579.792.360,-
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Rp 830.874.000,-
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp 609.445.200,-	
	Penyediaan Sandang	Rp 16.368.700,-	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp 570.276.500,-	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp 22.800.000,-	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp 221.428.800,-	
	Penyediaan Sandang	Rp 5.428.800,-	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Rp 216.000.000,-	
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Rp 2.236.737.600,-
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.236.737.600,-	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 67.737.600,-	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 2.169.000.000,-	
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp 2.468.746.760,-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.076.291.800,-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 456.403.200,-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 513.979.000,-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 105.909.600,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp 1.092.036.960,-	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (APBD)	Jumlah
	Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 1.040.856.960,-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 51.180.000,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 300.418.000,-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 300.418.000,-	
3.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Rp 1.043.434.000,-
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp 1.043.434.000,-	
	Penyediaan Makanan	Rp 920.640.400,-	
	Penyediaan Sandang	Rp 122.793.600,-	

Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang, 2024

4.7.5 Dukungan Personil

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kota Tangerang, Dinas Sosial didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 132 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, di mana sampai dengan bulan Desember 2023 Dinas Sosial Kota Tangerang memiliki pegawai seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV-40 Jumlah dan Status Pegawai Dinas Sosial Kota Tangerang Dalam Pencapaian dan Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Personil PNS	Personil Non PNS
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial sesuai standar	10	31
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti Sosial	Persentase anak terlantar di luar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial sesuai standar	10	31
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Persentase lanjut usia terlantar di luar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial sesuai	10	31

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Personil PNS	Personil Non PNS
		standar		
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial sesuai standar	10	31
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Persentase korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial sesuai standar	39	227

Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang, 2024

4.7.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pencapaian SPM Urusan Sosial Kota Tangerang Tahun 2023 dan upaya solusinya adalah sebagai berikut:

Tabel IV-41 Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Urusan Sosial Kota Tangerang Tahun 2023

No	Indikator Pelayanan	Permasalahan	Solusi
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial sesuai standar	Belum adanya panti sosial bagi disabilitas fisik dan mental yang terlantar milik pemerintah Provinsi Banten sehingga menyulitkan Dinas Sosial Kota Tangerang dalam melakukan layanan lanjutan/rujukan	Menambah jumlah Panti Rehabilitasi Sosial khususnya bagi penyandang disabilitas fisik dan mental di masing-masing kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten untuk memudahkan aksesibilitas layanan lanjut/rujukan
2.	Persentase anak terlantar di luar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial sesuai standar	Keterbatasan ruangan pada rumah singgah dalam memberikan layanan konseling dan trauma healing	Memperluas atau membangun Rumah Singgah yang representatif dan berstandar.
3.	Persentase lanjut usia terlantar di luar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial sesuai standar	Keterbatasan kapasitas di Panti Sosial Lanjut Usia / Werdha milik Provinsi berdampak apada layanan rujukan klien lanjut usia terlantar di RPS	Melakukan advokasi, koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Sosial Provinsi Banten agar menambah kapasitas penghuni Panti Sosial Lanjut Usia/Werdha
4.	Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial sesuai standar	- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan gepeng - Belum ada layanan rehabilitasi berbasis panti sebagai kewenangan provinsi sesuai UU Otda	- Perlu dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan gepeng. - Mendorong percepatan provinsi untuk layanan rehabilitasi (panti)
5.	Persentase korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial sesuai standar	Kegiatan penanganan bencana belum maksimal karena masih kurangnya perlengkapan pengungsi seperti karpet, Kasur lipat dan terpal.	Menganggarkan di Tahun 2024 untuk pembelian karpet, Kasur lipat dan terpal

Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang, 2024

4.8. PROGRAM DAN KEGIATAN

Memahami arti dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial.

Dalam implementasi di daerah diwajibkan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan diatas berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Standar Pelayanan Minimal sendiri adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sebagai implementasi kewenangan pemerintah daerah, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dalam mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik agar lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, sehingga implementasi kebijakan publik di era otonomi daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat, terutama pemerintah daerah harus menyediakan kebijakan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi, yakni Merupakan standard minimum pelayanan publik yang WAJIB disediakan oleh Pemda kepada masyarakat serta mampu menjamin terwujudnya hak-hak individu terhadap akses masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai ukuran yg ditetapkan oleh Pemerintah.

Untuk melaksanakan pencapaian SPM di Kota Tangerang sesuai dengan target yang telah ditentukan Tahun 2023 didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel IV-42 Program dan Kegiatan Terkait Pencapaian SPM Kota Tangerang Tahun 2023

Kegiatan/Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran/Indikator				
	SPM/Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			733.321.373.010,00	718.118.258.642,00	97,93
A URUSAN PENDIDIKAN			688.469.826.412,00	675.959.699.046,00	98,18
Program Pengelolaan Pendidikan			688.469.826.412,00	675.959.699.046,00	98,18
A.1 Pendidikan Anak Usia Dini		Rp.	55.561.365.612,00	54.418.602.852,00	97,94
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	67.292	67.292	100,00
1 Pengelolaan		Rp.	55.561.365.612,00	54.418.602.852,00	97,94

Kegiatan/Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran/Indikator				
	SPM/Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
A.2 Pendidikan Dasar		Rp.	627.307.736.000,00	616.085.251.694,00	98,21
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI, SMP/MTs)	Orang	296.584	296.584	100,00
1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Rp.	419.528.494.152,00	413.059.223.539,00	98,46
2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Rp.	207.779.241.848,00	203.026.028.155,00	97,71
A.3 Pendidikan Kesetaraan		Rp.	5.600.724.800,00	5.455.844.500,00	97,41
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	5.214	5.214	100,00
1 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Rp.	5.600.724.800,00	5.455.844.500,00	97,41
B URUSAN KESEHATAN		Rp.	7.720.354.100,00	7.414.662.098,00	96,04
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Rp.	7.720.354.100,00	7.414.662.098,00	96,04
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp.	7.720.354.100,00	7.414.662.098,00	96,04
B.1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp.	1.071.927.000,00	1.059.781.500,00	98,87
	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Ibu hamil	40.925	40.520	99,01
B.2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Rp.	231.659.000,00	219.603.498,00	94,80
	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Ibu bersalin	39.588	39.468	99,70
B.3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Rp.	49.724.000,00	49.724.000,00	100,00
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat	Bayi baru lahir	39.588	39.468	99,70

Kegiatan/Jenis Pelayanan Dasar		Anggaran/Indikator				
		SPM/Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target
		pelayanan kesehatan sesuai standar				
B.4	Pelayanan Kesehatan Balita		Rp.	919.542.600,00	895.378.600,00	97,37
		Jumlah balita 12-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Balita	90.040	89.925	99,87
B.5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Rp.	486.871.500,00	459.288.500,00	94,33
		Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai kelas 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	Anak	231.986	231.986	100,00
B.6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Rp.	2.276.800.000,00	2.263.853.000,00	99,43
		Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Orang	660.890	62.036	9,39
B.7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Rp.	598.738.500,00	596.525.500,00	99,63
		Jumlah pengunjung berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Orang	62.656	31.843	50,82
B.8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Rp.	20.900.000,00	20.900.000,00	100,00
		Jumlah penderita hipertensi usia \geq 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	166.750	17.524	10,51
B.9	Pelayanan Kesehatan		Rp.	20.900.000,00	20.900.000,00	100,00

Kegiatan/Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran/Indikator				
	SPM/Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target
Penderita Diabetes Melitus (DM)					
	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	93.500	586.330	627,09
B.1 2	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Rp.	203.550.000,00	199.800.000,00	98,16
	Jumlah ODGJ Berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	17.524	152.000	867,38
B.1 3	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)	Rp.	1.030.291.500,00	978.757.500,00	95,00
	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	85.900	85.900	100,00
B.1 4	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Rp.	809.450.000,00	650.150.000,00	80,32
	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	898	898	100,00
C	URUSAN PEKERJAAN UMUM	Rp.	13.447.598.671,00	11.623.546.642,00	86,44
C.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.744.325.105,00	1.555.746.764,00	89,19
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Rp.	1.744.325.105,00	1.555.746.764,00	89,19
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Rumah tangga	611.828	611.828	100,00
C.2	Pengelolaan dan	Rp.	11.703.273.566,00	10.067.799.878,00	86,03

Kegiatan/Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran/Indikator				
	SPM/Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target
Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1 Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik		Rp.	11.703.273.566,00	10.067.799.878,00	86,03
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Rumah	428.463	427.649	99,81
D URUSAN PERUMAHAN RAKYAT		Rp.	11.240.378.477,00	10.965.378.477,00	97,55
Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp.	275.000.000,00	0,00	0,00
D.1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota (bila terjadi bencana dan ada SK Kebencanaan)		Rp.	275.000.000,00	0,00	0,00
	Ketersediaan unit Rumah Korban Bencana yang ditangani dan Rumah layak huni (Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2023)	Unit	20	0	0,00
2 Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Sub-Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Rp.	10.965.378.477,00	10.965.378.477,00	100,00
D.2 Fasilitasi penyediaan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota (bila terjadi keadaan Relokasi)		Rp.	10.965.378.477,00	10.965.378.477,00	100,00

Kegiatan/Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran/Indikator				
	SPM/Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (Jumlah Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan+Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa+Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni)	Unit	30	29	96,67
E.	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		5.863.422.990,00	5.575.180.019,00	95,08
E.1	Sub Urusan Bencana dan Kebakaran		3.782.661.340,00	3.649.518.369,00	96,48
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	Rp.	97.735.800,00	79.890.000,00	81,74
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	877.930	877.930	100,00
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Rp.	1.167.394.040,00	1.072.809.927,00	91,90
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	838.837	838.837	100,00
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Rp.	91.998.000,00	88.500.000,00	96,20
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	3.543	3.543	100,00
4	Pelayanan penyelamatan dan	Rp.	2.425.533.500,00	2.408.318.442,00	99,29

Kegiatan/Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran/Indikator				
	SPM/Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target
evakuasi korban kebakaran					
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	1.552	1.552	100,00
E.2 Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp.	2.080.761.650,00	1.925.661.650,00	92,55
1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Orang	8	0	0,00
a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp.	1.582.501.150,00	1.490.501.150,00	94,19
b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Rp.	468.133.300,00	408.833.300,00	87,33
c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Rp.	30.127.200,00	26.327.200,00	87,39
F URUSAN SOSIAL			6.579.792.360,00	5.872.528.697,00	89,25
F.1 Program Rehabilitasi Sosial		Rp.	830.874.000,00	657.190.500,00	79,10
1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	341	341	100,00
2 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	orang	60	60	100,00
3 Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	92	92	100,00
4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	orang	30	30	100,00
F.2 Program		Rp.	2.236.737.600,00	2.214.030.000,00	98,98

Kegiatan/Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran/Indikator				
	SPM/Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target
Perindungan dan Jaminan Sosial					
1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh Bantuan Sosial Tunai	Orang	300	300	100,00
2 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Bantuan Sosial Tunai	Orang	650	650	100,00
3 Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh Bantuan Sosial Tunai	Orang	999	999	100,00
F.3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.	2.468.746.760,00	2.382.885,00	96,52
1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan permakanaan, sarana dan prasarana layanan sosial	Orang	641	641	100,00
2 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh bantuan permakanaan, sarana dan prasarana layanan sosial	Orang	710	710	100,00
3 Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan permakanaan, sarana dan prasarana layanan sosial	Orang	1.091	1.091	100,00
4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan permakanaan, sarana dan prasarana layanan sosial	Orang	30	30	100,00
F.4 Program Penanganan Bencana		Rp.	1.043.434.000,00	618.423.000,00	59,27
1 Penyediaan permakanaan	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh	Orang	1.247	1.247	100,00

Kegiatan/Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran/Indikator				
	SPM/Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target
2	Penyediaan Sandang	Orang	432	432	100,00
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	3	3	100,00
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	39	39	100,00
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	328	328	100,00

Sumber: Pemerintah Kota Tangerang, 2024

BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tangerang Tahun 2023 merupakan bentuk pelaporan dari serangkaian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan melalui perencanaan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun, sebagaimana diamanatkan melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2023 yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan, penerapan dan pencapaian SPM, serta akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan Tahun 2023, dapat dilihat dari hasil capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2023 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Berbagai perubahan paradigma pemerintahan (khususnya pemerintahan daerah) dan perubahan peraturan perundang-undangan antara lain di bidang perencanaan dan bidang pengelolaan keuangan daerah turut mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kaitannya dengan hal ini, Pemerintah Kota Tangerang berusaha responsif dan adaptif dalam mengimplementasikan berbagai perubahan dan perbaikan tersebut ke dalam berbagai kebijakan pemerintah sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selain LPPD ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Perkembangan pendapatan Tahun 2023 dapat dilihat dari perbandingan antara target yang ditentukan setelah pergeseran perubahan dan realisasi penerimaan secara keseluruhan, sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah ditargetkan pada anggaran setelah pergeseran perubahan sebesar Rp4.558.269.432.595,00 terealisasi sebesar Rp4.691.252.495.432,00 sehingga capaiannya adalah sebesar 102,92%;
2. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Tangerang menargetkan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.202.605.531.310,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp2.271.392.858.607,00 sehingga capaiannya adalah sebesar 103,12%;
3. Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp2.355.663.901.285,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp2.419.084.007.661,00 sehingga capaiannya adalah sebesar 102,69%; dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp0,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp775.629.164,00.

Adapun perkembangan belanja daerah Kota Tangerang Tahun 2023, dilihat dari perbandingan anggaran setelah pergeseran perubahan terhadap realisasi adalah sebagai berikut:

1. Dari target belanja daerah sebesar Rp5.060.875.781.078,00 terealisasi sebesar Rp4.705.483.322.900,00 atau sebesar 92,98%;
2. Dari target anggaran belanja tersebut untuk belanja operasi ditargetkan sebesar Rp4.111.223.192.748,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp3.904.618.342.674,00 sehingga capaiannya adalah sebesar 94,97%;
3. Belanja Modal, dianggarkan sebesar Rp912.667.075.407,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp800.254.297.026,00 sehingga capaiannya adalah sebesar 87,68%;
4. Belanja Tidak Terduga, dianggarkan sebesar Rp36.985.512.923,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp610.683.200,00 sehingga capaiannya adalah sebesar 1,65%;
5. Dari keseluruhan belanja tersebut jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan terjadi defisit sebesar Rp-14.230.827.468,00.

Dari keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2020- 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2023, sebagian indikator kinerja utama yang sebelumnya di Tahun 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan, dikarenakan masih adanya dampak pandemi Covid-19, terlihat sudah mengalami perbaikan capaian atau kinerja. Capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Indeks pendidikan (Indeks pengetahuan), dengan target 75,14 - 76,74 poin, terealisasi 74,95 poin dengan capaian 99,75%.
- Indeks Kesehatan (Indeks harapan hidup), dengan target 79,66 - 79,69 poin, terealisasi 85,08 point dengan capaian 106,80%.
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, dengan target 97,72% terealisasi 98,09% dengan capaian 100,38%.
- Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B dengan target 99,00% terealisasi 99,37% dengan capaian 100,37%.

- Angka kematian bayi (AKB) dengan target 1,07 orang per 1.000 kelahiran hidup, terealisasi 1,08 orang per 1.000 kelahiran hidup, dengan capaian 99,07%.
- Angka Kematian Ibu (AKI), dengan target 12,13 orang per 100.000 kelahiran hidup, terealisasi 20,07 orang per 100.000 kelahiran dengan capaian 34,54%.
- Angka Kesakitan dengan target 182 orang per 100.000 penduduk, terealisasi 182 orang per 100.000 penduduk dengan capaian 100,00%.
- Tingkat Kemiskinan (persentase penduduk miskin), dengan target 4,01-4,39, terealisasi 5,89%, dengan capaian 65,83%.
- Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan target 95.403 orang terealisasi 95.395 orang dengan capaian 100,01%.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan target 6,45 - 7,54, terealisasi 6,76% dengan capaian 110,34%.
- Indeks Reformasi dengan target 70 poin, terealisasi sebesar 82,71 poin atau dengan capaian 118,16%.
- Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah dengan target BB terealisasi dengan kategori B, atau dengan capaian 96,59%.
- Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan target penilaian WTP, terealisasi penilaian WTP dengan capaian 100%.
- Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik dengan target pencapaian 85,83 poin terealisasi 87,44 poin, dengan capaian 101,88%.
- Indeks pembangunan sarana prasarana perkotaan dengan target 86,31 poin, terealisasi 85,69 poin dengan capaian 99,28%.
- Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai dengan target 94,26%, terealisasi 99,52% dengan capaian 105,58%.
- Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan dengan target 25 Km/jam, terealisasi 25,02 Km/jam dengan capaian 100,08%.
- Persentase permukiman kumuh, dengan target 0,08%, terealisasi 0,00% dengan capaian 200,00%.
- Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan target 100%, terealisasi 100% dengan capaian 100%.
- Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan target 99,81%, terealisasi 99,81% dengan capaian 100%.
- Luas banjir dan genangan, dengan target 195,88 Ha, terealisasi 191,55 Ha dengan capaian 102,21%.
- Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dengan target 57,93 poin, terealisasi 46,92 poin dengan capaian 80,99%.
- Tingkat pengelolaan sampah dengan target 100%, terealisasi 99,97% dengan capaian 99,97%.
- Nilai PDRB ADHK dengan target 115,94 - 118,57 trilyun rupiah, terealisasi 119,06 trilyun rupiah dengan capaian 102,69%.
- Indeks Pengeluaran (daya beli), dengan target 82,73 - 83,91 poin, terealisasi 83,21 poin dengan capaian 100,58%.

- Nilai investasi (PMA dan PMDN) dengan target 9,67 trilyun rupiah, terealisasi 14,99 trilyun rupiah dengan capaian 155,01%.
- Laju inflasi dengan target 3,5%, terealisasi 3,17% dengan capaian 109,43%.
- Indeks Gini (gini rasio), dengan target 0,305 - 0,316 poin, terealisasi 0,379 poin dengan capaian 80,06%.

Meskipun masih terdapat beberapa indikator yang tidak terpenuhi sesuai target, namun secara umum terjadi peningkatan capaian kinerja dengan rata-rata capaian pada Tahun 2023 sebesar 102,49%. Capaian rata-rata tersebut termasuk dalam kategori kinerja “Sangat Tinggi”.

Pemerintah Kota Tangerang dalam tahun-tahun mendatang akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Tangerang, yaitu **Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing**. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala upaya dan perjuangan ini demi kemajuan Kota Tangerang.



kolaborasi
wujudkan
visi



LPPD 2023

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD) TAHUN 2023 KOTA TANGERANG**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG